BUMN
Hadir untuk negeri

PT PELNI (PERSERO)

Transform, Innovate and Grow for Sustainable Growth

Bertransformasi, Berinovasi dan Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

2017 Laporan Tahunan
Annual Report

GUNUNG DEMPO
PALEMBANG
BUMA
GRUNO IV
GRUNO IV

Transform, Innovate and Grow for Sustainable Growth

Bertransformasi, Berinovasi, Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2017, PT PELNI (Persero) memasuki tahapan *Consolidation and Growth,* yaitu tahapan di tahun ketiga dalam rangkaian tahapan dalam Transformasi PT PELNI (Persero) yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015 – 2019.

Sesuai dengan tema Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2017, yaitu Bertransformasi, Berinovasi dan Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan, Perseroan optimis akan terciptanya Visi untuk Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan. Hal ini dapat tergambar dari proses transformasi yang telah dijalankan di setiap bagian di dalam Perseroan, yang meliputi: *talent management,* standar pelayanan, budaya, penerapan manajemen risiko, aliansi strategis dan portofolio bisnis yang baru.

Perseroan bersama dengan seluruh Insan PELNI serta dukungan pemangku kepentingan siap untuk menyambut tahapan transformasi selanjutnya yaitu Growth di tahun 2018 dengan tetap menghidupkan semangat nilai-nilai Perusahaan yaitu *Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus* dan *Competitive.*

Throughout the year 2017, PT PELNI (Persero) entered the consolidation and growth stage in the series of PT PELNI (Persero) Transformation stages as contained in the Company long – term plan 2015 – 2019.

In line with the theme of PT PELNI (Persero) Annual Report 2017, which is Transforming, Innovating and Growing for Sustainable Growth, the Company is optimistic that the Vision for Becoming a Tough Shipping Company and Customer Preferred Choice will be established. This can be seen by the transformation process that has been carried out in every part of the Company, which includes: talent management, service standards, culture, risk management implementation, strategic alliances and new business portfolios.

The Company together with all of PELNI Members as well as stakeholder support are ready to welcome the next transformation stage of Growth in 2018 while maintaining the Spirit of corporate values namely Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus and Competitive.

KESINAMBUNGAN TEMA
Theme Continuity

2017

Transform, Innovate and Grow for Sustainable Growth

Bertansformasi, Berinovasi, Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan

Sepanjang tahun 2017, PT PELNI (Persero) memasuki tahapan *Consolidation and Growth*, yaitu tahapan di tahun ketiga dalam rangkaian tahapan dalam Transformasi PT PELNI (Persero) yang tertuang dalam Rencana Jangka Panjang Perusahaan 2015 – 2019.

Sesuai dengan tema Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) Tahun Buku 2017, yaitu Bertransformasi, Berinovasi dan Bertumbuh untuk Pertumbuhan yang Berkelanjutan, Perseroan optimis akan terciptanya Visi untuk Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan. Hal ini dapat tergambar dari proses transformasi yang telah dijalankan di setiap bagian di dalam Perseroan, yang meliputi: *talent management,* standar pelayanan, budaya, penerapan manajemen risiko, aliansi strategis dan portofolio bisnis yang baru.

Perseroan bersama dengan seluruh Insan PELNI serta dukungan pemangku kepentingan siap untuk menyambut tahapan transformasi selanjutnya yaitu Growth di tahun 2018 dengan tetap menghidupkan semangat nilai-nilai Perusahaan yaitu *Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus* dan *Competitive.*

Throughout the year 2017, PT PELNI (Persero) entered the consolidation and growth stage in the series of PT PELNI (Persero) Transformation stages as contained in the Company long – term plan 2015 – 2019.

In line with the theme of PT PELNI (Persero) Annual Report 2017, which is Transforming, Innovating and Growing for Sustainable Growth, the Company is optimistic that the Vision for Becoming a Tough Shipping Company and Customer Preferred Choice will be established. This can be seen by the transformation process that has been carried out in every part of the Company, which includes: talent management, service standards, culture, risk management implementation, strategic alliances and new business portfolios.

The Company together with all of PELNI Members as well as stakeholder support are ready to welcome the next transformation stage of Growth in 2018 while maintaining the Spirit of corporate values namelyIntegrity, Continuous Improvement, Customer Focus and Competitive.

2016

Transformasi Menuju Pertumbuhan Kinerja

Transformation Towards Higher Growth

PT PELNI (Persero) terus melakukan transformasi sepanjang tahun 2016 meliputi transformasi bisnis, transformasi budaya perusahaan dan transformasi Sumber Daya Manusia. Transformasi bisnis diarahkan untuk mengintegrasikan induk dan anak perusahaan meliputi bisnis kapal penumpang, logistik dan kargo serta pelayanan jasa. Transformasi budaya mengarah pada standar pelayanan pelanggan sesuai *best practice* dan *service excellence.* Transformasi Sumber Daya Manusia mengadaptasi *Individual Development Plan* untuk mengoptimalkan seluruh potensi pertumbuhan PELNI di masa yang akan datang.

PT PELNI (Persero) continued to transformation phase throughout 2016 including business transformation, corporate culture transformation and People transformation. The Business transformation is directed to integrate holding company and all subsidiaries covering passenger ship, cargo and services. Culture transformation leads to customer service standard based on best practice and service excellence. People transformation adapts Individual Development Plan to optimize entire growth potential of PELNI in the future.

2015

Perjalanan Untuk perubahan Dengan Membangun Budaya Kerja

Journey to Change, Building the Work Culture

Menjadi sebuah entitas perusahaan dengan fungsi vital, keselarasan bergerak menjadi poin penting bagi PT PELNI (Persero) untuk meraih kinerja yang unggul. Ibarat kapal yang berlayar di tengah samudera, perusahaan memiliki kompas yang menunjukkan arah dan awak yang menopang gerak kapal sehingga sampai ke tujuan. Sumber Daya Manusia sebagai awak dan aset perusahaan menjadi salah satu komponen signifikan dalam menjamin keberlangsungan tata kelola perusahaan yang dinamis. Banyaknya yang bekerja dengan tugas dan fungsi masing-masing baik di dalam maupun di luar perusahaan sehingga dibutuhkan pemahaman yang padu mengenai visi dan misi PT PELNI (Persero). Dengan demikian maka satu langkah lebih dekat bagi PT PELNI (Persero) untuk membuktikan diri dengan berkontribusi nyata untuk negeri.

As a corporate entity with vital functions, a harmony moves to be an important point for PT PELNI (Persero) to achieve its superiority performance. Like a ship sailing in the ocean, this company has its own compass to show the direction and has crews that sustain the ship's motion focus to the destination. Human resources are the crews and assets of the company to be one of the significant components to ensure the sustainability of corporate governance dynamic. Many parties work in their own respective duties and functions, both inside and outside the company, so it takes a solid understanding of the vision and mission PT PELNI (Persero). Then, one step will be closer to PT PELNI (Persero) to prove itself in a real contribution to the country.

2014

Bahtera Penyatu Nusantara Jelajahi Wisata Bahari

Ship that Unite The Country, Sailing the Marine Tourism

Semenjak tahun 2014, PT PELNI (Persero) telah berinovasi menyelenggarakan paket wisata bahari dengan menjadikan kapal PELNI sebagai hotel terapung di tiga lokasi wisata, yaitu Wakatobi (Sulawesi Tenggara), Raja Ampat (Papua Barat) dan Pulau Komodo. Dan ke depannya, masih banyak destinasi wisata bahari nusantara lainnya yang sudah dibidik dan segera dijajaki oleh PT PELNI (Persero) untuk dijadikan paket program perjalanan wisata bahari dari perusahaan pelayaran ini.

Sebagai perusahaan pelayaran nasional terkemuka di Tanah Air, PT PELNI (Persero) memang tak pernah berhenti dalam meng-improve program-program bisnisnya, dan selalu berusaha selangkah lebih maju di depan. Ini adalah bukti komitmen PT PELNI (Persero) untuk selalu menjadi yang terdepan di dalam industri pelayaran di Tanah Air.

Since 2014, PT PELNI (Persero) has made several innovations by making PELNI's ships as floating hotels, located in some places suh as; Komodo Islands (East Nusa Tenggara), Wakatobi (South East Sulawesi), and Raja Ampat (West Papua). In the future, there will be a lot of destination which have been targeted and studied by PT PELNI (Persero) for marine tourism program of the national shipping company.

As a well-known national shipping company, PT PELNI (Persero) has never stopped in perfecting its business programs and has always tried to be one step ahead. This is the proof of PT PELNI (Persero) commitment to be the leader of shipping industry in this country.

HIGHLIGHT 2017
2017 Highlights

4,39 Triliun Trillion
Pendapatan Usaha Bersih Setelah dikurangi Reduksi
Net Operating Revenue After Reduction
3,77%

0,72%
262,28 Miliar Billion
Laba Usaha
Operating Income

6,43 Triliun Trillion
Jumlah Aset
Total Assets
8,77%

3,77%
26 Kapal Ships
Armada Kapal Penumpang
Passenger Vessels Fleet

46 Kapal Vessels
Armada Kapal Perintis
Perintis Vessels Fleet

9 Kapal Vessels
Armada Tol Laut
Passenger Vessels Fleet

3.521.873 Orang Pax
Jumlah Penumpang
Total Passenger

74.719 Ton/m³
Muatan
Cargo

14.782 Teus
Muatan Kontainer
Containers

91 Pelabuhan Ports
Jumlah Pelabuhan Singgah
Total Shelter Ports

98.329 Mil Laut Sea Miles
Jumlah Mil Laut
Total Sea Miles

TESTIMONI
Testimony

Kinerja Divisi Pengadaan PT PELNI (Persero) yang baik agar dipertahankan.

Good Performance of PT PELNI (Persero) procurement division has to be maintained.

Deni Syahrial Simorangkir SH MH
Deni Simorangkir XV Advokat &Konsultan Hukum
Deni Simorangkir XV Advocate & Legal Consultant

Secara proses dalam hal pengadaan sudah berjalan dengan baik

In the process of procurement has been going well.

Lukman Nurdin
Sales Support Personel Alih Daya
Outsourcing Sales Support Personnel

Sampai saat ini kinerja pada *Procurement* PT PELNI (Persero) Sangat bagus dan transparan.

Until nowadays, the performance on Procurement of PT PELNI (Persero) is Very good and transparent.

Jodi
Spv Marketing PT Datavis Indonesia
Marketing Supervisor of PT Datavis Indonesia

Semoga menjadi mitra yang terbaik buat semua.

Hope to be the best partner for all parties.

Lee Richard
Direktur PT Pertalube Nusa Jaya
Director of PT Pertalube Nusa Jaya

Apabila dalam proses *procurement* ada saran baik mengenai teknis maupun harga mohon dipertimbangkan.

If in the procurement process there is good advice on technical and price, please to be considered.

Citra Imanda Mauludy
Consulting Assistant PT Hay Group
Consulting Assistant of PT Hay Group

Tim Pengadaan sudah menunjukkan profesionalisme yang sangat baik, sehingga bisa memperoleh rekanan yang *capable* untuk memenuhi kebutuhan yang *user* syaratkan.

The Procurement Team has demonstrated good professionalism so as to obtain a capable partner to meet the requirements that the user required.

Hendra Kusumawidjaja
Direktur PT Equine Global
Director of PT Equine Global

DAFTAR ISI
Table of Content

01 IKHTISAR PENCAPAIAN 2017
2017 Performance Highlights

02 LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

03 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

03 *Cover Story*
Cover Story
04 Kesinambungan Tema
Theme Continuity
06 *Highlight* 2017
2017 Highlights
07 Testimoni
Testimony
08 Daftar Isi
Table of Content

12 IKHTISAR PENCAPAIAN 2017
2017 Performance Highlights

14 Ikhtisar Keuangan
Financial Highlights
16 Ikhtisar Usaha
Operating Highlights
18 Peristiwa Penting 2017
2017 Significant Event
20 Penghargaan dan Sertifikasi
Awards and Certification

24 LAPORAN MANAJEMEN
Management Report

26 Laporan Dewan Komisaris
Report from the Board of Commissioners
33 Profil Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Profile
38 Laporan Direksi
Report from Board of Directors
54 Profil Direksi
The Board of Directors Profile

60 PROFIL PERUSAHAAN
Company Profile

63 Identitas Perusahaan
Corporate Identity
64 Riwayat Singkat Perusahaan
Company Brief History
66 Jejak Langkah Perusahaan
The Company Milestones
68 Bidang Usaha
Line of Business
69 Produk dan Jasa
Product and Services
74 Visi, Misi, Tata Nilai, Budaya Perusahaan & Perilaku
Vision, Mission & Corporate Culture & Behavior
78 Struktur Organisasi
Organization Structure
82 Sumber Daya Manusia
Human Resources
101 Teknologi Informasi
Information Technology
116 Tata Kelola Pengadaan Barang Dan Jasa
Procurement Governance
122 Pejabat Eksekutif per 31 Desember 2017
Executives Officer as of December 31, 2017
125 Komposisi Pemegang Saham
Shareholders Composition
125 Kronologi Pencatatan Saham
Shares Listing Chronology
125 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya
Other Securities Listing Chronology
126 Struktur Grup Perusahaan
Corporate Group Structure
127 Entitas Anak & Asosiasi
Subsidiary & Association

Daftar Isi
Table of Content

04 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Company Profile

05 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Good Corporate Governance

06 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

130 Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal
Stock Market Supporting Institution and Professions
132 Peta Wilayah Operasi Jaringan Trayek Kapal
Ship Route Network Operational Area
134 Jaringan Trayek Tol Laut Tahun 2017
The Tol Laut Network Sea 2017
136 Jaringan Trayek Nasional Kapal Perintis Tahun 2017
National Route Network Ship Perintis 2017
138 Rute Kapal Ternak 2017
Cattle Ship Route 2017
140 Nama Dan Alamat Anak Perusahaan, Kantor Cabang dan Kantor Perwakilan
Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office
144 Informasi pada Website Perusahaan
Information at Company Website

146 ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN
Management Discussion & Analysis

148 Tinjauan Makro Ekonomi
Macro Economic Review
149 Tinjauan Industri Pelayaran
Shipping Industry Review
151 Kinerja Operasi Per Segmen Usaha
Operation Performance per Business Segment
158 Uraian Atas Kinerja Keuangan Perusahaan
The Company Financial Performance Description
158 Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian
Consolidated Financial Position Statements
163 Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Consolidated Statements of Comprehensive Income
169 Laporan Arus Kas Konsolidasian
Consolidated Statement of Cash Flows
172 Rasio Kinerja Keuangan
Financial Performance Ratio
173 Kemampuan Membayar Hutang dan Kolektabilitas Piutang Perusahaan
Solvability and Collectability Of Company Receivables
175 Struktur Modal dan Kebijakan Struktur Modal
Capital Structure and Capital Structure Policy
177 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal
The Material Commitments for Investment Of Capital Goods
177 Investasi Barang Modal
Investment of Capital Goods
179 Perbandingan antara Target dan Realisasi Tahun 2017 serta Proyeksi untuk Tahun Mendatang
Comparison Between Target and Realization in 2017 also Projection for The Next Year
181 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi setelah Tanggal Laporan Akuntan
Information and Facts Material that Happened after the Date of Accountant Report
181 Kebijakan Dividen
Dividend Policy
182 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan (MSOP)
Employee Stock Ownership Program (Msop)
182 Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
Fund Uses Realization from Public Offers
182 Informasi Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Sifat Transaksi dengan Pihak Afiliasi
Material Information Containing Conflict of Interest and Transactions with Affiliates Parties
182 Informasi Material yang Mengenai Ekspansi, Divestasi, Akuisisi dan Restrukturisasi Hutang dan Modal
Material Information on Expansion, Divestment, Acquisition and Debt and Capital Restructuring

Daftar Isi
Table of Content

182 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan dan Dampaknya Terhadap Perusahaan
Amendment of Regulatory Regulations and its Impact on Company
183 Perubahan Kebijakan Akuntansi dan Dampaknya terhadap Laporan Keuangan Perusahaan
Amendment of Accounting Policies and its Impact on Company Financial Statements
185 Informasi Kelangsungan Usaha
Business Continuity Information
187 Aspek Pemasaran
Marketing Aspect
188 Prospek Usaha dan Strategi Perusahaan
Business Prospects and Company Strategies

192 TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK
Management Discussion & Analysis

194 Pendahuluan
Introduction
209 Informasi Pemegang Saham Utama dan Pengendali
Ultimate and Controlling Shareholders Informations
209 Struktur Organ GCG Perusahaan
Coporate GCG Structure
211 Rapat Umum Pemegang Saham
General Meeting of Shareholders
220 Dewan Komisaris
Board of Commissioners
225 Sekretaris Dewan Komisaris
Board of Commissioners Secretary
226 Profil Sekretaris Dewan Komisaris
Profile of Board of Commissioners Secretary
227 Komisaris Independen
Independent Commissioner
228 Direksi
Board of Directors
234 Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat
Board of Commissioners Attendance Frequency
246 Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy
252 Keberagaman Komposisi Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Directors and Board of Commissioners Composition Diversity
253 Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assesment
258 Hubungan Afiliasi antara Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham
Affiliation of Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders
259 Kepemilikan Saham Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership
260 Rangkap Jabatan Dewan Komisaris dan Direksi
Board of Commissioners and Board of Directors Dual Position
261 Komite Audit
Audit Committee
271 Profil Komite Audit
Audit Committee Profile
274 Komite Kebijakan Risiko
Risk Policy Committee
278 Profil Komite Kebijakan Risiko
Risk Policy Committee Profile
281 Fungsi Nominasi dan/atau Remunerasi
Nomination and/or Remuneration Function
282 Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary
283 Profil Sekretaris Perusahaan
Corporate Secretary Profile
284 Satuan Pengawasan Intern (SPI)
Internal Audit Unit (SPI)

Sangkalan dan Batas Tanggung Jawab

Laporan Tahunan ini berisikan pernyataan-pernyataan kondisi keuangan, hasil operasi, proyeksi, rencana, strategi, kebijakan, serta tujuan Perusahaan, yang digolongkan sebagai pernyataan ke depan dalam pengertian perundang-undangan yang berlaku, kecuali hal-hal yang bersifat historis.

Pernyataan-pernyataan tersebut bersifat prospektif yang memiliki risiko dan ketidakpastian serta dapat mengakibatkan perkembangan aktual secara material berbeda dari yang tertulis dalam pernyataan-pernyataan tersebut. Pernyataan prospektif dalam laporan tahunan ini dibuat berdasarkan berbagai asumsi mengenai kondisi terkini dan kondisi mendatang dari Perusahaan serta lingkungan bisnis di mana Perusahaan menjalankan kegiatan usaha. Perusahaan tidak menjamin bahwa segala tindakan yang telah diambil untuk memastikan keabsahan dokumen ini akan membawa hasil-hasil tertentu sesuai harapan.

Laporan ini juga memuat kata “Perusahaan”, “Perseroan”, PELNI atau “PT PELNI (Persero)” yang didefinisikan sebagai PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero).

Daftar Isi
Table of Content

292 Profil Kepala Satuan Pengawasan Internal
Head of Internal Audit Unit (SPI) Profile
293 Auditor Eksternal
External Auditor
294 Manajemen Risiko
Risk Management
306 Etika Bisnis
Business Ethics
310 Perkara Penting yang Sedang Dihadapi Perusahaan
Litigation Involving the Company
314 Akses Informasi dan Data Perusahaan
Corporate Data and Information Access
315 Sistem Pelaporan Pelanggaran
Whistle Blowing System

320 TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN
Corporate Social Responsibility

322 Pendahuluan
Introduction
325 Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup
Social Responsibility in Environment
327 Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Kesehatan dan Keselamatan Kerja
Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects
332 Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan
Social Responsibility in Community and Society Development Sector
338 Tanggung Jawab Sosial Kepada Pelanggan
Social Responsibility to Customers

343 Surat Pernyataan Anggota Dewan Komisaris dan Direksi Tentang Tanggung Jawab Atas Laporan Tahunan 2017 PT PELNI (Persero)
Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2017 of PT PELNI (Persero)

347 Referensi SEOJK Nomor 30-SEOJK.04-2016: Laporan Tahunan Perusahaan Publik
SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

363 Kriteria *Annual Report Award* 2016
2016 Annual Report Award Criteria

383 LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Consolidated Financial Report

Disclaimer

This annual report contains financial condition, operation results, projections, plans, strategies, policy, as well as the Company's objectives, which is classified as forward-looking statements in the implementation of the prevailing laws, excluding historical matters.

Such forward-looking statements are subject to known and unknown risks (prospective), uncertainties, and other factors that could cause actual results to differ materially from expected results. Prospective statements in this annual report are prepared based on numerous assumptions concerning current conditions and future events of the Company and the business environment where the Company conducts business. The Company shall have no obligation to guarantee that the entire valid document presented will bring specific results as expected.

This annual report contains the words "Company," "The Company," PELNI or "PT PELNI (Persero)", hereinafter referred to as PT PELAYARAN INDONESIA (Persero).

01

IKHTISAR PENCAPAIAN 2017

2017 Performance Highlights

IKHTISAR KEUANGAN
Financial Highlights

Uraian (dalam jutaan) Description (in million)	2013	2014	2015	2016	**2017**
Pendapatan Usaha Bersih Gross Profit	2.494.374	2.970.314	3.853.628	4.255.263	**4.415.692**
Beban Usaha Operating Expenses	(2.551.851)	(2.713.914)	(3.293.408)	(3.445.001)	**(3.652.044)**
Laba (Rugi) Kotor Profit (Loss) Gross	(57.477)	256.400	560.220	799.614	**742.801**
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) Business	577.972	56.901	147.007	260.413	**262.280**
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	(622.358)	4.396	98.931	248.177	**276.419**
Pemilik Non Pengendali Non-Controlling Interest	(122)	(202)	(288)	370	**462**
Laba Tahun Berjalan Profit Current Year	(62.248)	4.194	98.643	248.547	**276.881**
Pendapatan (Beban) Komprehensif Lain Other Comprehensive Income (Loss)	(47.269)	(27.377)	2.079	(33.627)	**(37.429)**
Laba (Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Comprehensive Income (Loss) For The year	(669.749)	31.571	100.722	214.920	**239.452**
Laba Bersih Per Saham Dasar Basic Earnings Per Share	0	4.809	14.297	35.127,22	**39.124,62**
Jumlah Aset Total Assets	5.357.704	5.335.868	5.892.895	6.211.091	**6.432.064**
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	1.302.578	1.249.003	1.205.241	747.847	**728.416**
Jumlah Ekuitas Total Equity	4.055.126	4.086.865	4.687.654	5.463.795	**5.703.648**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Rasio Keuangan
Financial Ratio

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	**2017**	Satuan Units
Rasio Likuiditas | Liquidity Ratio						
Rasio Lancar Current Ratio	158,67	155,31	256,71	430,80	**525,60**	%
Rasio Kas Cash Ratio	50,54	38,02	107,71	196,27	**293,37**	%
Rasio Cepat Quick Ratio	152,13	103,63	184,98	150,05	**254,45**	%
Rasio Leverage | Leverage Ratio						
Rasio Kewajiban atas Aset Liabilities to Assets Ratio	24,31	23,41	20,45	12,04	**11,32**	%
Rasio Kewajiban atas Ekuitas Liabilities to Equity Ratio	32,12	30,56	25,71	13,69	**11,32**	%
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas Long-term Liabilities to Equity Ratio	13,21	9,46	8,59	2,89	**3,55**	%

IKHTISAR KEUANGAN
Financial Highlights

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	**2017**	Satuan Units
Rasio Aktivitas | Activity Ratio						
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	0,15	0,15	0,15	0,11	**0,11**	Kali Times
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	46,56	55,67	65,39	69,81	**70,94**	%
Rasio Penagihan Rata-rata Average Collection Ratio	20	14	18	23	**17**	Kali Times
Rasio Profitabilitas | Profitability Ratio						
Imbalan terhadap Ekuitas Return to Equity	(1,51)	0,10	2,15	4,12	**4,41**	%
Imbalan terhadap Investasi Return to Investment	(0,11)	1,50	2,49	6,61	**10,82**	%
Marjin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit on Sales	(2,30)	8,63	14,54	18,84	**16,90**	%
Marjin Laba Bersih atas Penjualan Net Profit on Sales	(23,17)	1,92	3,81	5,74	**6,14**	%
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA on Asset Ratio	(6,18)	7,06	7,94	6,61	**10,82**	%

Arus Kas
Cash Flow

Uraian Description	2013	2014	2015	2016	**2017**	Satuan Units
Arus Kas dari Aktvitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	(134.546)	(51.514)	121.629	788.812	**439.262**	Rp Juta Million Rupiah
Arus Kas dari Aktivias Investasi Cash Flows from Investment Activities	(47.565)	(19.819)	(90.809)	(54.065)	**(323.426)**	Rp Juta Million Rupiah
Arus Kas dari Aktivias Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	75.133	19.851	437.756	27.760	**(13.087)**	Rp Juta Million Rupiah
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase cash and cash Equivalent	(106.977)	(51.483)	468.576	762.507	**102.748**	Rp Juta Million Rupiah
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash and Cash Equivalent	528.975	421.998	370.415	839.091	**1.601.598**	Rp Juta Million Rupiah
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash and Cash Equivalent	421.998	370.515	839.091	1.601.599	**1.704.346**	Rp Juta Million Rupiah

IKHTISAR USAHA
Operating Highlights

Pendapatan Usaha Bersih
Gross Profit

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

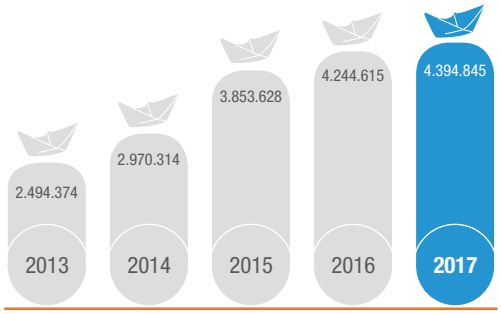

Laba (Rugi) Usaha
Profit (Loss) Business

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

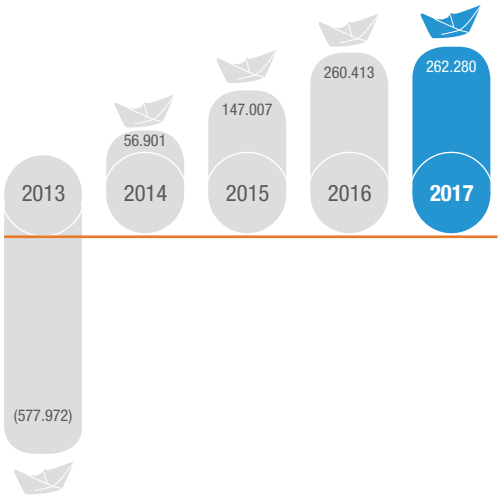

Laba (Rugi) Komprehensif tahun berjalan
Comprehensive Income (Loss) For The year

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

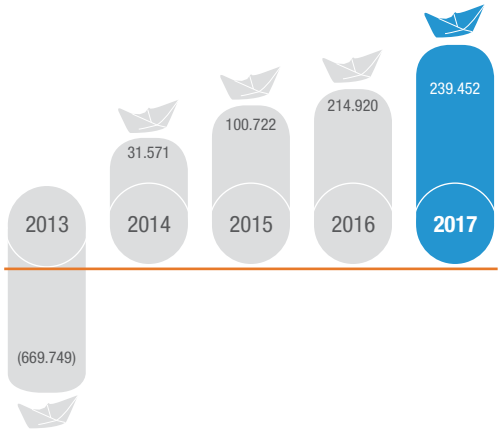

Jumlah Aset
Total Assets

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

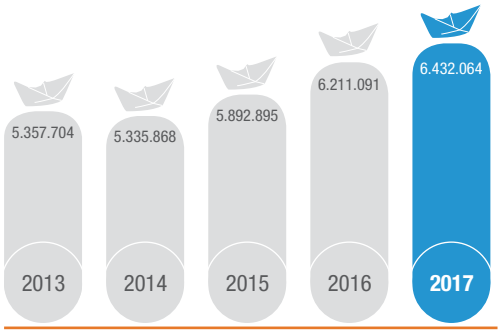

IKHTISAR USAHA
Operating Highlights

Jumlah Liabilitas
Total Liabilities

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

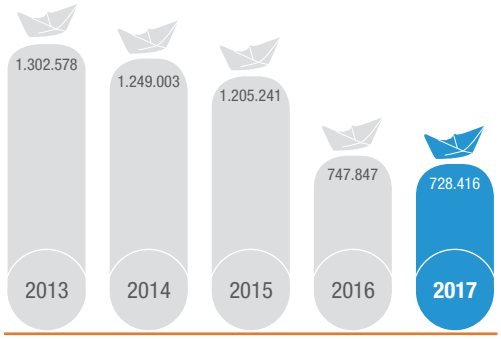

Jumlah Ekuitas
Total Equity

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

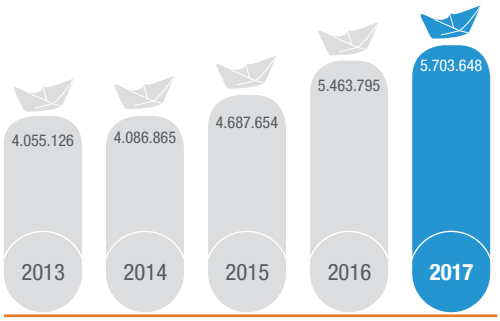

Kas dan Setara Kas Awal Tahun
Beginning Balance Cash and Cash Equivalent

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

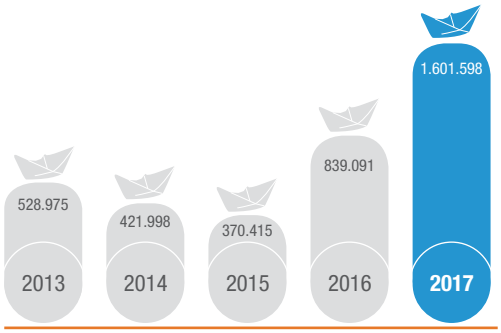

Kas dan Setara Kas Akhir Tahun
Ending Balance Cash and Cash Equivalent

dalam juta Rupiah
in million Rupiah

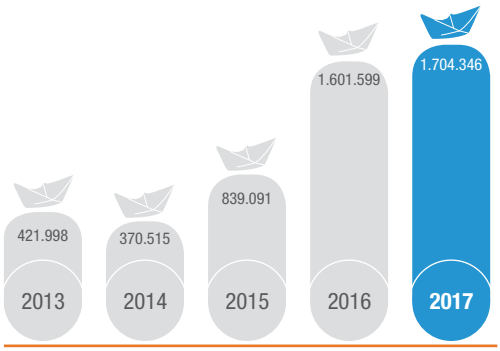

PERISTIWA PENTING 2017
2017 Significant Event

Rapat Pimpinan PT PELNI di Bandung Dihadiri Menteri Pariwisata Arif Yahya
Chair Meeting of PT PELNI on Bandung attended by Mr. Arif Yahya Minister of Tourism

Penandatanganan MOU PT PELNI dan PT Sarinah
MOU cooperation signing between PT PELNI and PT Sarinah

Launching Project Management Disaksikan Rhenald Khasali
Launching Project Management attended by Rhenald Khasali

Pergantian Direktur Keuangan
Changes in Director of Finance

Penandatanganan MOU PT PELNI dan Kepolisian RI
MOU cooperation signing between PT PELNI and Republic of Indonesia Police

HUT Ke-65 PT PELNI
PT PELNI's 65 th Anniversary Celebration

Launching KM Sabuk Nusantara 66 di Perairan Kepulauan Seribu
KM Sabuk Nusantara 66 Launching on Seribu Islands

Mudik Motor Gratis menggunakan KM Dobonsolo
Free Homecoming Transport using KM Dobonsolo

Rapat Pimpinan PT PELNI di Solo
Chair Meeting of PT PELNI on Solo

Pergantian Direktur Utama
President Director Changes

Ikut serta dalam IBD Expo di JCC
Participating in IBD Expo at JCC

Penandatanganan MOU PT PELNI dan PT SIER
MOU cooperation signing between PT PELNI and PT SIER

PERISTIWA PENTING 2017
2017 Significant Event

Penandatanganan PKS PT PELNI dan PT POS
PKS Signing of PT PELNI and PT POS

Program Bina Lingkungan dengan Meletakan Terumbu Karang Buatan di Pulau Sepa Kepulauan Seribu
Community Development Program by Locating Artificial Coral Reefs at Sepa Island, Seribu Islands

BUMN Hadir di Kampus UPI Bandung dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda
SOEs Present at UPI Campus Bandung for commerating Sumpah Pemuda

Penyerahan Dana Program Kemitraan senilai Rp1,4 Miliar kepada Mitra Binaan di Wilayah Jawa Tengah
Community Development Program Fund Distribution amounting to Rp1.4 billion to Partners in Central Java

Penandatanganan MOU PT PELNI dan Kepolisian RI
MOU cooperation signing between PT PELNI and Republic of Indonesia Police

Peresmian KM Logistik Nusantara 3
KM Logistik Nusantara 3 Inauguration

Direktur Usaha Angkutan Penumpang dan Kapal Perintis Menerima Penghargaan BUMN *Branding and Marketing Award* 2017
Director of Passenger Fleet and Perintis Ship earned BUMN Branding and Marketing Award 2017

PELNI meraih penghargaan ASEAN *Risk Awards* 2017
PELNI earned ASEAN Risk Awards 2017

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certification

Penghargaan
Awards

Mudik Berengan Guyub Rukun

Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution	Menteri Perhubungan Republik Indonesia Minister of Transportation of the Republic of Indonesia
Kategori Category	Penghargaan Atas Pelayanan Jasa Transportasi yang Optimal dalam penyelenggaraan Angkutan Lebaran 2017 Award for Optimal Transportation Service in Eid Al-Fitr Transportation 2017
Tanggal Date	10 Juli 2017 July 10, 2017

Top Information Technology Awards 2017 (TOP IT 2017)

Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution	Majalah Itech Itech Magazine
Kategori Category	Kategori *TOP IT Manager 2017 and TOP IT Implementation on Sea Transportation Sector 2017* TOP IT Manager 2017 and TOP IT Implementation on Sea Transportation Sector 2017 Category
Tanggal Date	3 November 2017 November 3, 2017

Asean Risk Awards 2017

Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution	Enterprise Risk Management Academy (ERMA)
Kategori Category	*Winner in the Category Public Risk* Winner in the Category Public Risk
Tanggal Date	7 Desember 2017 December 7, 2017

Transportation Safety Management Award 2017

Lembaga Pemberi Penghargaan Awarding Institution	Menteri Perhubungan Republik Indonesia Minister of Transportation of the Republic of Indonesia
Kategori Category	Kategori Transportasi Laut dan Penyeberangan Marine Transportation and Crossings Categories
Tanggal Date	19 Desember 2017 December 19, 2017

Sertifikasi
Certification

Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang
Passenger Ship Safety Certificate

Lembaga Pemberi Sertifikat Certificate Institution	Direktorat Jendral Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation
Tanggal Perolehan Certification Date	26 Januari 2016 January 26, 2016
Masa Berlaku Validity	27 Oktober 2017 October 27, 2017

Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum
Minimum Safe Manning Document

Lembaga Pemberi Sertifikat Certificate Institution	Direktorat Jendral Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation
Tanggal Perolehan Certification Date	13 Oktober 2016 October 13, 2016
Masa Berlaku Validity	26 Juli 2017 July 26, 2017

Dokumen Penyesuaian Manajemen Keselamatan
Document of Compliance

Lembaga Pemberi Sertifikat Certificate Institution	Direktorat Jendral Perhubungan Laut Directorate General of Sea Transportation
Tanggal Perolehan Certification Date	11 Agustus 2015 August 11, 2015
Masa Berlaku Validity	10 Agustus 2020 August 10, 2020

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certification

No No	Nama Kapal Ship Name	Sertifikasi Garis Muat Load Line Certificate		
		Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date	
			Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Time
A	**Pax 2000**			
1	KM Sinabung	23551	31-May-17	18-Apr-22
2	KM Kelud	16701	23-Dec-13	27-Oct-18
3	KM Dorolonda	22308	25-Oct-16	11-Jul-21
4	KM Nggapulu	23490-SB	12-May-17	05-Apr-22
5	KM Labobar	18264	12-Sep-14	26-Jun-19
6	KM G Dempo	15416	18-Jun-13	20-Jun-18
7	KM Umsini	20345	10-Aug-15	28-Jul-20
8	KM Tidar	22932	26-Jan-17	26-Nov-21
9	KM B. Siguntang	022286	24-Oct-16	23-May-21
10	KM Lambelu	23537-SB	23-May-17	15-May-22
11	KM Ciremai	16928	24-Jan-14	01-Aug-18
12	KM Dobonsolo	16428	15-Nov-13	11-Oct-18
B	**Pax 1000**			
1	KM Kelimutu	19857	07-May-15	04-Feb-20
2	KM Lawit	021644	26-May-16	08-Dec-19
3	KM Tatamailau	21020	19-Jan-16	25-Mar-20
4	KM Sirimau	20599	21-Sep-15	17-May-20
5	KM Awu	23729-SB	03-Jul-17	08-Jun-21
6	KM Leuser	15649	24-Jul-13	28-May-18
7	KM Binaiya	17663	02-Jun-14	25-Mar-19
8	KM Bukit Raya	18450	30-Sep-14	27-Mar-19
9	KM Tilong Kabila	20030	12-Jun-15	04-Mar-20
C	**Pax 500/RoRo**			
1	KM Pangrango	23232	27-Mar-17	09-Nov-21
2	KM Sangiang	17763	19-Jun-14	12-May-19
3	KM Wilis	19872	11-May-15	11-Feb-20
4	KM Egon	7840	30-Sep-15	29-Jun-20
5	KFC Jet Liner	16233	22-Oct-13	11-Sep-18
D	**Kapal Barang/Tol Laut** Freight Vessels/Tol Laut			
1	KM CJN III-4	22910	24-Jan-17	25-Oct-21
2	KM CJN III-22	2252	16-Dec-17	15-May-18
3	KM CJN III-32	17897	04-Jul-14	12-May-19
4	KM Logistik Nusantara 1	00157-SP	25-Jul-17	26-Feb-18
5	KM Logistik Nusantara 2	0558-SP	25-Sep-17	24-Feb-18
6	KM Logistik Nusantara 3	0660-SP	09-Nov-17	08-Apr-18
7	KM Logistik Nusantara 4	0858-SP	15-Dec-17	14-May-18

PENGHARGAAN DAN SERTIFIKASI
Awards and Certification

Sertifikasi Lambung Hull Certificate			Sertifikasi Mesin Machine Certificate			Lembaga Klasifikasi Clasification Institution
Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date		Nomor Sertifikasi Certificate Number	Tanggal Date		
	Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Time		Dikeluarkan Issued	Jatuh Tempo Valid Time	
35346	31-May-17	18-Apr-22	23486	31-May-17	18-Apr-22	PT BKI
24385	23-Dec-13	27-Oct-18	16157	23-Dec-13	27-Oct-18	PT BKI
22308	25-Oct-16	11-Jul-21	22308	25-Oct-16	11-Jul-21	PT BKI
35230-SB	12-May-17	05-Apr-22	23416-SB	12-May-17	05-Apr-22	PT BKI
26550	12-Sep-14	26-Jun-19	17557	12-Sep-14	26-Jun-19	PT BKI
22611	18-Jun-13	20-Jun-18	14967	18-Jun-13	20-Jun-18	PT BKI
29448	10-Aug-15	28-Jul-20	19553	10-Aug-15	28-Jul-20	PT BKI
34080	26-Jan-17	26-Nov-21	22911	26-Jan-17	26-Nov-21	PT BKI
032733	24-Oct-16	23-May-21	021470	24-Oct-16	23-May-21	PT BKI
35319-SB	23-May-17	15-May-22	23463-SB	23-May-17	15-May-22	PT BKI
24688	24-Jan-14	01-Aug-18	16352	24-Jan-14	01-Aug-18	PT BKI
24027	15-Nov-13	11-Oct-18	15918	15-Nov-13	11-Oct-18	PT BKI
28781	07-May-15	04-Feb-20	19093	07-May-15	04-Feb-20	PT BKI
031385	26-May-16	08-Dec-19	020818	26-May-16	08-Dec-19	PT BKI
30434	19-Jan-16	25-Mar-20	20212	19-Jan-16	25-Mar-20	PT BKI
29831	21-Sep-15	17-May-20	19806	21-Sep-15	17-May-20	PT BKI
35684-SB	03-Jul-17	08-Jun-21	23630-SB	03-Jul-17	08-Jun-21	PT BKI
22926	24-Jul-13	28-May-18	15175	24-Jul-13	28-May-18	PT BKI
25691	02-Jun-14	25-Mar-19	16972	02-Jun-14	25-Mar-19	PT BKI
26818	30-Sep-14	27-Mar-19	17743	30-Sep-14	27-Mar-19	PT BKI
29020	12-Jun-15	04-Mar-20	19261	12-Jun-15	04-Mar-20	PT BKI
34701	27-Mar-17	09-Nov-21	23202	27-Mar-17	09-Nov-21	PT BKI
25838	19-Jun-14	12-May-19	17073	19-Jun-14	12-May-19	PT BKI
28800	11-May-15	11-Feb-20	19106	11-May-15	11-Feb-20	PT BKI
29877	30-Sep-15	29-Jun-20	19842	30-Sep-15	29-Jun-20	PT BKI
23767	22-Oct-13	11-Sep-18	15742	22-Oct-13	11-Sep-18	PT BKI
34042	24-Jan-17	25-Oct-21	22893	24-Jan-17	25-Oct-21	PT BKI
2252	16-Dec-17	15-Jun-18	2252	16-Dec-17	15-Jun-18	PT BKI
26008	04-Jul-14	12-May-19	17167	04-Jul-14	12-May-19	PT BKI
00157-SP	27-Feb-17	26-Feb-18	Sertifikasi Klasifikasi Sementara Classification Provisory Certification			PT BKI
0558-SP	25-Sep-17	24-Sep-18	Sertifikasi Klasifikasi Sementara Classification Provisory Certification			PT BKI
0660-SP	09-Nov-17	08-Nov-18	Sertifikasi Klasifikasi Sementara Classification Provisory Certification			PT BKI
0858-SP	15-Dec-17	14-Dec-18	Sertifikasi Klasifikasi Sementara Classification Provisory Certification			PT BKI

PT.PELNI

02

LAPORAN MANAJEMEN

Management Report

LAPORAN DEWAN KOMISARIS

Report from the Board of Commissioners

1 **H. Leon Muhamad**
Komisaris Utama
President Commissioner

2 **Johanes Widodo Hario Mumpuni**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

3 **Satya Bhakti Parikesit**
Komisaris
Commissioner

4 **Sudarto**
Komisaris Independen
Independent Commissioner

5 **Raldi Hendro Koestoer**
Komisaris
Commissioner

Pemegang saham dan pemangku kepentingan yang terhormat,

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmat-Nya serta dukungan yang diberikan oleh Pemegang Saham dan segenap Pemangku Kepentingan, kami dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang diberikan kepada kami selaku Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Atas nama Dewan Komisaris, perkenankan kami menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas pengawasan kepada Direksi PT PELNI (Persero) dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam memimpin Perseroan.

Kondisi perekonomian Indonesia tahun 2017 menunjukkan adanya perbaikan walaupun belum sepenuhnya pulih namun berhasil mencatatkan pertumbuhan sebesar 5,07%, sedikit meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar 5,02%.

PENILAIAN TERHADAP KINERJA DIREKSI DAN DASAR PENILAIANNYA

Dewan Komisaris memberikan penghargaan sebesar-besarnya kepada segenap Direksi PT PELNI (Persero), yang berhasil menghasilkan kinerja yang baik pada tahun 2017. Dewan Komisaris menilai bahwa Direksi dan seluruh manajemen telah berhasil memberikan kontribusi yang maksimal dalam meningkatkan kinerja Perseroan, secara keuangan dan operasional.

Dasar penilaian dari sisi keuangan dapat terlihat dari pencapaian Perseroan terhadap Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2017 pada sisi Keuangan. Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil mencatatkan peningkatan secara kinerja dari sisi keuangan dengan mencatatkan pencapaian laba konsolidasi sebesar Rp276.419 miliar atau 90,44% dari RKAP 2017 yang sebesar Rp305,62 miliar. Dan realisasi marjin laba kotor Perseroan tahun 2017 sebesar 17,96%, atau 105% dari RKAP 2017 yang sebesar 7,10%. Pencapaian marjin laba bersih sedikit dibawah target, dengan pencapaian 99,49% atau pada tingkat 7,08% dari RKAP 2017 yang berada pada tingkat 7,11%.

Dear Honoured Shareholder and stakeholder,

We thank to Almighty God for His blessings and grace, and the support from the Shareholders and all Stakeholders. So, we could perform the duties and responsibilities that given to the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

On behalf of the Board of Commissioners, allow us to submit an accountability report on the performance of supervisory duty to Directors of PT PELNI (Persero) in performing their duties and responsibilities in leading the Company.

Indonesia's economic condition in 2017 showed an improvement although it has not fully recovered yet but managed to record growth of 5.07%, and slightly increased when compared to the previous year which was 5.02%.

ASSESSMENT ON THE PERFORMANCE OF THE BOARD OF DIRECTORS AND BASIS OF ASSESSMENT

The Board of Commissioners highly appreciates to the entire Board of Directors of PT PELNI (Persero) which succeeded producing good performance in 2017. The Board of Commissioners considers that the Board of Directors and all management have succeeded to contribute in improving the performance of the Company, financially and operationally.

The financial assessment basis could be seen from the Company's achievement toward the Company's Work and Budget Plan (RKAP) Year 2017 on the Financial side. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has successfully recorded a performance improvement from the financial side by achieving a consolidated profit of Rp276.419 billion or 90,44% from the RKAP 2017 amounting to Rp305.62 billion. And the gross margin realization of the Company in 2017 amounted to 17.96%, or 105% from the RKAP 2017 which amounted to 7.10%. Achievement of net profit margin was slightly below target, with achievement of 99,49% or at level 7.08% from the RKAP 2017 which was at level of 7,11%.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

Dilihat dari pertumbuhan kinerja keuangan tahun 2017 dibandingkan dengan tahun 2016, Perseroan mencatatkan pertumbuhan yang cukup baik. Pendapatan usaha bersih Perseroan tahun 2017 sebesar Rp4,39 triliun atau meningkat 3,54% dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,24 triliun. Dan Perseroan berhasil mencatatkan laba tahun berjalan sebesar Rp276,88 miliar atau meningkat 11,40% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp248,55 miliar.

Dasar penilaian dari sisi operasional dapat terlihat dari pencapaian Perseroan terhadap RKAP Tahun 2017 pada sisi Operasional dan Permintaan Pelanggan.Dewan Komisaris menilai Direksi berhasil mencatatkan peningkatan secara kinerja dari sisi operasional dan pemintaan pelanggan dengan mencatatkan pencapaian jumlah kapal beroperasi dari setiap jenis kapal (Penumpang, Perintis, Ternak dan Tol Laut) masing-masing dengan tingkat capaian 100%.Namun pada tahun 2017 Perseroan belum berhasil mengoperasikan Kapal Wisata.

Dari sisi Permintaan Pelanggan, Perseroan belum berhasil mencapai target RKAP yang ditentukan tahun 2017. Untuk Angkutan Penumpang, Perseroan mencatatkan sebanyak 3,52 juta orang atau 82,75% dari RKAP 2017. Pencapaian angkutan barang dan container masing-masing sebesar 36,10% dan 59,28%.Dan angkutan kendaraan dan ternak masing-masing sebesar 89,62% dan 66,66%.

PENGAWASAN TERHADAP IMPLEMENTASI STRATEGI

Selama tahun 2017 Dewan Komisaris telah berupaya sedemikian rupa untuk memastikan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan. Hal ini sejalan dengan fungsi Dewan Komisaris untuk memastikan bahwa pelaksanaan strategi Perseroan dalam menjalankan kegiatan usahanya senantiasa berorientasi pada peningkatan nilai-nilai Perseroan sesuai dengan standar prosedur serta memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku.

Seeing from the financial performance growth in 2017 compared to 2016, the Company recorded good growth. The net income of the Company in 2017 amounted to Rp4.39 trillion, increasing to 3.54% from the previous year which amounted to Rp4.24 trillion. And the Company managed to record a current profit of Rp276.88 billion, increased by 11.40% when compared to the previous year which amounted to Rp248.55 billion.

The operational assessment basis could be seen from the Company's achievement toward the RKAP 2017 on the side of Operations and Customer Demand. The Board of Commissioners believes that the Board of Directors has succeeded for improving performance in terms of operational and customer demand by listing the number of ships operating from each type of ships (Passenger, Perintis, Cattle and Tol Laut) with 100% achievement rate respectively. However, in 2017, the Company has not succeeded in operating the Tourism Ship.

In terms of Customer Demand, the Company has not succeeded in achieving the Company's Work and Budget Plan target set by 2017. For Passenger Transportation, the Company listed 3.52 million people or 83.75% from the RKAP 2017. Achievement of goods and container transportation respectively 36.10% and 59.28%. And vehicle and cattle transportation were 89.62% and 66.66% respectively.

SUPERVISION TO THE IMPLEMENTATION OF THE STRATEGY

During 2017, the Board of Commissioners has worked to ensure oversight the management of the Company in accordance with the established plans. This is in line with the Board of Commissioners' function to ensure that the implementation of the Company's strategy in conducting its business activities that is always oriented towards upgrading the Company's values according to standard procedures and take into account compliance with applicable regulations.

Dewan Komisaris menilai bahwa strategi Perseroan, baik perumusan maupun implementasinya yang telah dilakukan pada tahun 2017 sudah optimal. Selanjutnya Dewan Komisaris juga telah memberikan nasihat kepada Direksi agar diperkuat strategi yang mencakup pada optimasi pendapatan. Dewan Komisaris secara periodik telah melakukan rapat bersama jajaran Direksi untuk memberikan nasihat atas perkembangan strategi yang diterapkan Direksi dalam memimpin Perseroan.

PANDANGAN ATAS PROSPEK USAHA YANG DISUSUN DIREKSI DAN DASAR PERTIMBANGANNYA

Dewan Komisaris berpendapat bahwa prospek usaha yang telah disusun oleh Direksi PT PELNI (Persero) beserta strategi-strateginya telah mampu menjawab tantangan dan menangkap peluang bisnis untuk tercapainya target Perseroan, baik jangka pendek maupun jangka panjang.

Dewan Komisaris berpendapat bahwa strategi yang telah ditetapkan Direksi tetap perlu dievaluasi secara periodik dengan tetap mengelola risiko yang kemungkinan akan timbul, mengevaluasi proses bisnis, peningkatan efisiensi dan memperhatikan kesehatan dan keselamatan kerja.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Sebagai salah satu Organ Utama dalam pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, Dewan Komisaris telah melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi dan seluruh Manajemen atas pengelolaan Perseroan selama tahun 2017. Terkait dengan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*/ GCG), Dewan Komisaris dalam menjalankan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dibantu oleh Komite Audit dan Komite Kebijakan Risiko.

The Board of Commissioners considers that the Company strategy, in both of formulation and implementation that done in 2017 was optimal. Furthermore, the Board of Commissioners has also given advice to the Board of Directors to strengthen the strategy that includes income optimization. The Board of Commissioners has periodically conducted meetings with the Board of Directors to advise on the development of the strategies adopted by the Directors in leading the Company.

VIEWS FOR BUSINESS PROSPECTS COMPILED BY THE BOARD OF DIRECTORS AND BASIS OF CONSIDERATIONS

The Board of Commissioners believes that the business prospects arranged by the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and their strategies have been able to fulfill the challenges and capture business opportunities for achieving the Company's target, both short and long term.

The Board of Commissioners believes that the strategy set by the Board of Directors remains to be periodically evaluated while maintaining risks that are likely to arise, evaluating business processes, improving efficiency and taking into account occupational health and safety.

THE VIEW OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

As one of the Main Organs in the implementation of Good Corporate Governance, the Board of Commissioners has performed supervisory and advisory functions to the Board of Directors and all Management for the management of the Company during 2017. In relation to good corporate governance (GCG) practices, The Board of Commissioners in performing supervisory and advisory duties is assisted by the Audit Committee and Risk Policy Committee.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

Dewan Komisaris berpendapat bahwa Direksi PT PELNI (Persero) telah menerapkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik, hal ini terbukti dari capaian atas penilaian GCG yang pada tahun 2017 dengan skor 80,448 dengan predikat BAIK berdasarkan *self assessment* untuk periode 2017. Nilai ini turun dibandingkan dengan tahun sebelumnya yaitu 80,785 dengan predikat BAIK. Dengan demikian dapat terlihat bahwa dari seluruh aspek penilaian (Komitmen terhadap penerapan tata kelola perusahaan yang baik secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS, Dewan Komisaris, Direksi, Pengungkapan Informasi dan Transaparansi serta Aspek lainnya) berada pada pencapaian Baik.

The Board of Commissioners believes that the Board of Directors of PT PELNI (Persero) has implemented Good Corporate Governance, this evidenced by the achievement of GCG assessment in 2017 with a score of 80.448 GOOD predicate, based on self-assessment for the period 2017. This number decreased compared to the previous year 80.785 with GOOD predicate. Thus, it can be seen that from all of the assessment aspect (Commitment to the implementation of good corporate governance in a sustainable manner, shareholders and GMS, Board of Commissioners, Board of Directors, Disclosure of Information and Transparency and other Aspects) are in the achievement of Good.

PANDANGAN ATAS PENERAPAN *WHISTLE BLOWING SYSTEM* (WBS)

Pandangan Dewan Komisarisatas penerapan Sistem Pelaporan Pelanggaran atau *Whistle Blowing System* (WBS) di Perseroan, Dewan Komisaris menilai bahwa implementasi WBS di Perseroan sudah sangat baik.

Dewan Komisaris menghimbau agar Direksi terus memperbaiki pelaksanaannya sesuai dengan landasan peraturan perundang-undangan dan arahan Pemegang Saham. Mekanisme WBS diharapkan dapat diterapkan dengan mekanisme pelaporan dan pemberian sanksi yang lebih tegas untuk meningkatkan akuntabilitas dalam seluruh aktivitas bisnis dan operasional Perseroan.

VIEWS ON WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) IMPLEMENTATION

On the implementation of the Whistle Blowing System (WBS) in the Company, the Board of Commissioners considers that the implementation of WBS in the Company has been very good.

The Board of Commissioners reminds the Board of Directors to continuously improve its implementation in accordance with the rules of law and the guidance form the Shareholders. The WBS mechanism is expected to be implemented by reporting and sanctioning mechanism to improve accountability in all business activities and operations of the Company.

FREKUENSI DAN CARA PEMBERIAN NASIHAT KEPADA DIREKSI

Dalam menjalankan fungsi Dewan Komisaris dalam memberikan nasihat kepada Direksi, selama tahun 2017 Dewan Komisaris mengadakan Rapat Dewan Komisaris yang mengundang Direksi sebanyak 7 kali dengan tingkat kehadiran diatas 80%. Mekanisme rapat gabungan antara Dewan Komisaris dan Direksi inilah yang digunakan Dewan Komisaris untuk memberikan arahan ataupun nasihat kepada Direksi dalam menjalankan tugasnya sebagai pengelola Perseroan.

FREQUENCY AND WAY FOR PROVIDING ADVICES TO THE BOARD OF DIRECTORS

In performing the functions of the Board of Commissioners in providing advice to the Board of Directors, during 2017 the Board of Commissioners holds a Board of Commissioners Meeting which invites the Board of Directors as much as 7 times with an attendance above 80% rate. The joint meeting mechanism between the Board of Commissioners and the Board of Directors is used by the Board of Commissioners to provide directions or advices to the Board of Directors for conducting its duties as a manager of the Company.

Rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris sehubungan dengan pengelolaan Perseroan di sepanjang tahun 2017, antara lain terkait peningkatan kinerja, peningkatan efisiensi, mitigasi risiko, serta pengelolaan SDM.

PERUBAHAN SUSUNAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS

Pada tahun 2017, telah terjadi perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris yang tertuang pada SK-264/MBU/12/2017 tanggal 8 Desember 2017 dengan bergabungnya Bapak Johanes Widodo Hario sebagai Komisaris Independen PT PELNI (Persero). Kami berharap kehadiran mereka dapat meningkatkan nilai tambah pada kompetensi dan kapabilitas jajaran Dewan Komisaris Perseroan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Omo Dahlan dan Bapak Wolter B. Hesegem atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

Berikut susunan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun buku 2016:

Komisaris Utama	: H. Leon Muhamad
Komisaris Independen	: Omo Dahlan
Komisaris Independen	: Sudarto
Komisaris	: Satya Bhakti Parikesit
Komisaris	: Wolter B. Hesegem
Komisaris	: Raldi Hendro Koestoer

Setelah terjadi perubahan, maka susunan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Komisaris Utama	: H. Leon Muhamad
Komisaris Independen	: Johanes Widodo Hario
Komisaris Independen	: Sudarto
Komisaris	: Raldi Hendro Koestoer
Komisaris	: Satya Bhakti Parikesit

Diharapkan melalui perubahan anggota Dewan Komisaris ini, PT PELNI (Persero) dapat membantu Direksi dalam meningkatkan pertumbuhan kinerja dan mempercepat terwujudnya visi Perseroan.

Recommendations provided by the Board of Commissioners along with the management of the Company in 2017, related to performance improvement, efficiency improvement, risk mitigation, and human resource management.

CHANGES IN THE MEMBERS OF THE BOARD OF COMMISSIONERS

In 2017, there has been a change in the composition of members of the Board of Commissioners as stated in SK-264 / MBU / 12/2017 dated December 8, 2017 by joining Mr. Johanes Widodo Hario as Independent Commissioner of PT PELNI (Persero). We hope that their presence will increase the added value of the competence and capability of the Company's Board of Commissioners.

We also express our greatest appreciation to Mr. Omo Dahlan and Mr. Wolter B. Hesegem for his contribution during his tenure as a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero).

The composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) fiscal year 2016 is as follows:

President Commissioner	: H. Leon Muhamad
Independent Commissioner	: Omo Dahlan
Independent Commissioner	: Sudarto
Commissioner	: Satya Bhakti Parikesit
Commissioner	: Wolter B. Hesegem
Commissioner	: Raldi Hendro Koestoer

After the change, the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) up to the end of 2017 is as follows:

President Commissioner	: H. Leon Muhamad
Independent Commissioner	: Johanes Widodo Hario
Independent Commissioner	: Sudarto
Commissioner	: Raldi Hendro Koestoer
Commissioner	: Satya Bhakti Parikesit

It is expected that through this changes in the members of the Board of Commissioners, PT PELNI (Persero) could assist the Board of Directors in enhancing performance growth and accelerating the realization of the Company's vision.

LAPORAN DEWAN KOMISARIS
Report from the Board of Commissioners

APRESIASI

Seluruh jajaran Dewan Komisaris optimis bahwa PT PELNI (Persero) mampu meningkatkan pertumbuhan bisnis di tengah berbagai tantangan perekonomian, baik imbas situasi perekonomian Indonesia maupun global. Perseroan telah dan akan terus berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip GCG dalam pengelolaan Perusahaan secara berkelanjutan.

Atas nama Dewan Komisaris, kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh pemegang saham, karyawan, serta mitra usaha atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan. Secara khusus, kami mengucapkan terima kasih atas dedikasi serta kerja keras yang telah tercurah demi terciptanya kinerja Perseroan yang lebih baik.

APPRECIATION

The Board of Commissioners is optimistic that PT PELNI (Persero) could improve its business growth amidst some various economic challenges, both the impact of the Indonesian and global economic situation. The Company has and will continue to commit for applying GCG principles in the Company's sustainable management.

On behalf of the Board of Commissioners, we give thank to the entire shareholders, employees, and business partners for the trust and support has been given to us. In particular, we express gratitude for the dedication and hard work for the sake of better perfomance of the Company.

Jakarta, 30 Mei 2018
Jakarta, May 30, 2018

Atas Nama Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
On Behalf of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero)

H. Leon Muhamad
Komisaris Utama
President Commissioner

PROFIL DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners Profile

H. Leon Muhamad
Komisaris Utama
President Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
63 tahun per 31 Desember 2017
63 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Padang, Tahun 1954
Padang, on 1954

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Utama sejak tanggal 17 November 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-232/MBU/11/2015.
Appointed as President Commissioners since November 17, 2015 based on SOE's Decision Letter No. SK-232/MBU/11/2015.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1978	Akademi Ilmu Pelayaran (sekarang STIP) Shipping academy (recently known as STIP)

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015-Sekarang (Present)	Komisaris Utama PT PELNI (Persero) President Commissioner PT PELNI (Persero)	2009 – 2011	Direktur Lalu Lintas dan Angkutan Laut Ditjen Perhubungan Laut Director of Marine Traffic and Transportation Marine Transportation General Directorate
2012-Sekarang (Present)	Direktur Jenderal Perhubungan Laut dan Sekretaris Jenderal Kementerian Perhubungan Marine Transportation General Directorate and General Secretary Ministry of Transportation	2004 – 2008	Atase Perhubungan Indonesia di Singapura Indonesia Transportation Attache in Singapore

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners Profile

Johanes Widodo Hario Mumpuni
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
60 tahun per 31 Desember 2017
60 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Yogyakarta Tahun 1957
Yogyakarta, on 1957

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris Independen sejak tanggal tanggal 08 Desember 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-264/MBU/12/201.
Appointed as Independent Commissioners since December 08, 2017 based on SOE's Decision Letter No. SK-264/MBU/12/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1993	Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University of Halifax, Nova Scotia, Canada Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University of Halifax, Nova Scotia, Canada	1983	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta Bachelor Degree of Economy, Economic Faculty, Accounting Major, Gajah Mada University, Yogyakarta

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014 - Sekarang (Present)	Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) Expert Staff of Central Government Finance Field.	2007 – 2009	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
1984 - Sekarang (Present)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indonesian Supreme Audit Institution (BPK).	2005 – 2007	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
2009 – 2014	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III. Main Auditor (Tortama) State Finance III.		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners Profile

Satya Bhakti Parikesit
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Cimahi Tahun 1972
Cimahi, on 1972

Usia | Age
45 tahun per 31 Desember 2017
45 years old as of December 31, 2017

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 17 November 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-232/MBU/11/2015.
Appointed as Commissioners since November 17, 2015 based on SOE's Decision Letter No. SK-232/MBU/11/2015.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2000	Ph.D of International Law University of Nottingham, Inggris Ph.D of International Law University of Nottingham, England	1995	Sarjana Hukum Universitas Indonesia Bachelor Degree of Law Universitas Indonesia
1999	Magister Hukum Universitas Padjajaran Master Degree of Law Universitas Padjajaran		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015- Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner PT PELNI (Persero)	2011	Sekretariat Kabinet dan Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan Bidang Perekonomian Cabinet Secretariate and Assistant Deputy in Legal Economy Sector
2015	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Expert Staff in Legal and International Relation		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners Profile

Sudarto
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Madiun Tahun 1969
Madiun, on 1969

Usia | Age
48 tahun per 31 Desember 2017
48 years old as of December 31, 2017

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris sejak tanggal 17 Oktober 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-218/MBU/2014.
Appointed as Commissioners since October 17, 2014 based on SOE's Decision Letter No. SK-218/MBU/2014

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2018	Doctor of Philosophy University ofNew South Wales, Australia Doctor of Philosophy University of New South Wales, Australia	1996	Sarjana Ekonomi Universitas Indonesia Bachelor Degree of Economics Universitas Indonesia
2001	Master of Business Administration International University of Japan Master of Business Administration International University of Japan		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2012- Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner PT PELNI (Persero)	Sekarang (Present)	Direktur Transformasi Perbendaharaan di Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan Republik Indonesia Director of Treasury Transformation at Treasury General Directorate, Ministry of Finance Republic of Indonesia

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners Profile

Raldi Hendro Koestoer
Komisaris
Commissioner

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
59 tahun per 31 Desember 2017
59 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Jakarta Tahun1958
Jakarta, on 1958

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Komisaris sejak sejak tanggal 08 Januari 2014 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-01/MBU/2014.
Appointed as Commissioners since January 08, 2014 based on SOE's Decision Letter No. SK-01/MBU/2014.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1992	Philosophy of Doctor Environmental Planning Griffith University, Australia Philosophy of Doctor Environmental Planning Griffith University, Australia	1982	Sarjana Sains Fakultas Matematika dan Ilmu Alam Universitas Indonesia Bachelor Degree of Science Faculty of Math and Natural Science Universitas Indonesia
1986	Master of Science dalam Bidang Regional Science, University of Queensland, Australia Master Degree of Science in Regional Science from University of Queensland, Australia		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014-Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner PT PELNI (Persero)	2006-2013	Staf Ahli Menko Perekonomian Republik Indonesia bidang Inovasi Teknologi dan Lingkungan Hidup Expert Staff for The Republic of Indonesia Coordinative Minister of Economics in Technology and Environment sector

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

1 **Insan Purwarisya L. Tobing**
Direktur Utama
President Director

2 **Harry Boediarto Soewarto**
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Director of Freight & Tol Laut

3 **Muhamad Tukul Harsono**
Direktur Armada
Director of Fleet

4 **Olih Masolich Sodikin**
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Business Transportation

5 **Tri Andayani**
Direktur Keuangan
Director of Finance

6 **Ganefi**
Direktur SDM & Umum
Director of Human Capital & General Affairs

Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan yang Terhormat,

Mengawali sambutan ini perkenankan kami menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas pencapaian yang kami telah peroleh pada tahun 2017 dan rasa optimisme kami menghadapi tahun-tahun yang akan datang. Kami bersyukur karena Perseroan berhasil menutup tahun 2017 dengan pencapaian-pencapaian yang cukup membanggakan. Suatu kehormatan bagi saya atas nama Direksi untuk menyajikan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2017. Tentunya, capaian kinerja yang positif tersebut tidak terlepas dari kerja keras dari segenap pihak, karyawan, Direksi, Dewan Komisaris, serta tentunya juga tak lepas dari dukungan yang kuat dari Pemerintah.

PERKEMBANGAN EKONOMI GLOBAL DAN INDONESIA

Dunia selama periode tahun 2017 telah dihiasi dengan berbagai peristiwa, seperti di Amerika dengan adanya pergantian pimpinan negara yang baru dengan kebijakannya yang cukup kontroversial telah mempengaruhi perekonomian dunia, yang kemudian berdampak luas sehingga banyak negara menyesuaikan kebijakannya masing - masing. Selain itu kemajuan teknologi digital yang pesat sangat berpengaruh pada peradaban manusia, karena semua informasi dan peristiwa yang terjadi dalam hitungan waktu yang cepat dapat diakses oleh siapapun dibelahan dunia manapun. Hal tersebut membuktikan bahwa globalisasi dengan berbagai dampaknya telah sukses merubah peradaban dunia dan tidak dapat dihindarkan oleh belahan dunia manapun.

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3% setelah terjadinya krisis global dan tahun ini menurut Dana Moneter International (IMF) diprediksi akan tumbuh 3,6% atau 3,9% dalam 2 tahun ke depan. Naiknya proyeksi ini sejalan dengan ekspektasi dampak dari kebijakan pemangkasan pajak yang dilakukan Amerika Serikat. Indonesia belum bisa secara maksimal memanfaatkan momentum ini. Menurut IMF, potensi penguatan pertumbuhan ekonomi akan terlihat di negara-negara pengekspor besar. Sementara, kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB hanya 25%.

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal IV 2017 di angka 5,19% secara tahunan *(year-on-year).* Namun, angka Produk Domestik Bruto (PDB) secara absolut lebih rendah 1,7% dibandingkan kuartal sebelumnya yang disebut merupakan efek musiman. Angka pertumbuhan ekonomi di kuartal IV ini adalah yang tertinggi

Dear honoured shareholders and stakeholders,

To begin, allow us to bestow praise to the Almighty, Most Gracious, and Most Merciful God for the achievements we had gained in 2017 and our optimism over the years to come. The Board of Directors is grateful that the Company has been succeeded in closing the year 2017 with an outstanding achievements. It is an honor for me on behalf of the Board of Directors to present the Company's Annual Report for the fiscal year 2017. Obviously, the achievement of a positive performance is inseparable from the hard work of all parties, employees, Directors, Board of Commissioners, and of course also can not be separated from strong support from Government.

INDONESIA AND GLOBAL ECONOMIC DEVELOPMENT

During 2017 period, the world has been adorned with several events, such as in America by the replacement of new state leaders whose controversial policies have affected the world economy, which then has a wide impact for many countries that adjust their policies. Therefore, the rapid advancement of digital technology is very influential on human civilization, because all of information and events that occur in a fast time could be accessed by anyone of the world. It proves that globalization with its various impacts has successfully changed the civilization of the world and could not be avoided by any part of the world.

World economic conditions in 2017 grew by 3% after the global crisis and according to the International Monetary Fund (IMF), this year is predicted to grow 3.6% or 3.9% for the next 2 years. This increase of projection is along with expectations on the impact of US tax-cutting policies. Indonesia has not fully utilized this momentum. The potential for strengthening economic growth will be seen in major exporting countries. Meanwhile, Indonesia's export contribution to GDP is only 25%.

According to the Central Bureau of Statistics (BPS), Indonesia's economic growth in the fourth quarter of 2017 was at 5.19 percent year-on-year. However, the Gross Domestic Product (GDP) figure in absolute terms was at 1.7% lower than the previous quarter which is called a seasonal effect. The economic growth rate in the fourth

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

dalam tiga tahun terakhir dan merupakan angka pertumbuhan kuartalan tertinggi sepanjang tahun 2017. Akibatnya, secara kumulatif, pertumbuhan ekonomi tahun 2017 tumbuh 5,07% atau lebih baik dibanding tahun lalu yakni 5,02%.

Selain itu, *assessment* Pemerintah melalui Kementerian Perhubungan menginginkan Indonesia dapat terhubung antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga meminimalisasi kesenjangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Selain memiliki tugas untuk menghubungkan dan membuka isolasi daerah yang terpencil, maka dengan keberadaan PT PELNI (Persero) yang memiliki *core business* Transportasi menggunakan kapal laut yang menjadi kebanggaan bangsa.

Sebagai bentuk dukungannya, Kementerian Perindustrian (Kemenperin) telah menyiapkan road map pembangunan industri perkapalan di Indonesia hingga tahun 2025 nanti. Industri ini diharapkan bisa memproduksi dan mereparasi semua jenis kapal dari yang berukuran kecil hingga besar. Pemerintah akan meningkatkan kemampuan desain dan rekayasa kapal serta didukung pula oleh pengembangan Pusat Desain dan Rekayasa Kapal Nasional (PDRKN). Industri bahan baku dan komponen lokal, serta pengembangan pusat peningkatan keterampilan SDM perkapalan juga terus ditingkatkan. Pemerintah juga akan mengamankan dan mengoptimalkan pemanfaatan pasar dalam negeri sebagai *base load* untuk pengembangan industri perkapalan.

ANALISA ATAS KINERJA TAHUN 2017

Melalui program Nawa Cita yang diusung oleh Pemerintah, PT PELNI (Persero) dipercaya untuk memegang peran penting dalam menjalankan beberapa program pemerintah antara lain Program Tol Laut, pengoperasian Kapal Ternak dari Nusa Tenggara Timur (NTT) ke Tanjung Priok dan menjadi operator Kapal Perintis serta berkontribusi dalam meningkatkan popularitas Wisata Bahari Nusantara di kalangan wisatawan domestik dan mancanegara.

Selama tahun 2017, maraknya *Low Cost Carrier* (LCC) atau Penerbangan Bertarif Rendah dan program pengembangan bandara serta kondisi makro ekonomi yang mengalami tren melemah menyebabkan turunnya jumlah penumpang kapal laut secara nasional dimana hal ini menjadi tantangan tersendiri bagi perseroan. Di sisi lain naiknya jasa pengiriman barang menghadirkan sejumlah peluang bagi kinerja Perseroan.

quarter was the highest in the last three years and the highest quarterly growth figure during 2017. As a result, economic growth in 2017 grew 5.07% or better than last year at 5.02% cumulatively.

In addition, the Government's assessment through the Ministry of Transportation wants Indonesia to connect between one region and another, thus minimizing the gap between each and other region, therefore, PT PELNI (Persero) is expected to be able to maintain the unity of the Republic of Indonesia (NKRI). Besides having the task to connect and open the isolation areas, then with the presence of PT PELNI (Persero) which has a core business of transportation using ships that become the pride of the nation.

As a form of support, the Ministry of Industry (Kemenperin) has prepared a road map of shipping industry development in Indonesia until 2025. This industry is expected to produce and repair all types of ships from small to be large ships. The government will improve the design and ship engineering capability and also supported by the development of National Ship Design and Engineering Center (PDRKN). The raw materials industry and local components, and also the development of shipping human resources skills centers are also continuously improved. The government will also secure and optimize the utilization of the domestic market as a base load for the development of the shipping industry.

ANALYSIS ON 2017 PERFORMANCE

Through the Nawa Cita program from Government, PT PELNI (Persero) is trusted to play an important role in carrying out several government programs such as the Tol Laut Program, the operation of the Cattle Ships from East Nusa Tenggara to Tanjung Priok and becoming the operator of Perintis ships as well as contributing in improving the popularity of Marine Tourism Archipelago among domestic and foreign tourists.

During the year of 2017, the increase of Low Cost Carrier (LCC) or Low Cost Flight, airport development programs and macroeconomic conditions that experienced a weakening trend caused a decrease in the number interest of passengers for using national ship which was a challenge for the company. On the other hand, the rise of freight forwarding services became the opportunities for the

Mayoritas kebutuhan logistik indonesia bagian timur masih menggunakan kapal laut, hal ini menjadi peluang emas bagi Perseroan. Dan juga didukung dengan pengoperasian armada secara penuh serta kinerja Tol Laut yang makin lancar membuat pelayaran ke Indonesia Timur semakin optimal.

Sepanjang tahun 2017, Perseroan mengoperasikan 26 Kapal Penumpang, 47 Kapal Perintis, 9 Kapal Tol Laut dan 1 Kapal Ternak. PT PELNI (Persero) dalam melaksanakan tanggung jawabnya tidak hanya terbatas melayani rute komersial tetapi juga melayani pelayaran dengan rute pulau-pulau kecil terluar. Saat ini kapal PT PELNI (Persero) menyinggahi 98 pelabuhan kapal penumpang dan lebih dari 300 pelabuhan kapal perintis dengan 46 kantor cabang dan dilayani di 400 travel agen yang tersebar di seluruh Indonesia.

Dalam rangka mengatasi setiap tantangan sekaligus mengoptimalkan peluang yang hadir selama tahun 2017, Direksi dan segenap Manajemen telah mengimplementasikan strategi transformasi baik dalam aspek bisnis maupun operasional guna meningkatkan kinerja Perseroan. Selain implementasi kebijakan yang bersifat transformasional, Manajemen juga terus melakukan efisiensi di segala bidang guna mendukung kebutuhan pengembangan bisnis dan usaha Perseroan.

Sebagai hasil dari penerapan strategi tersebut, per 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) berhasil membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4,39 triliun, mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun 2016 yakni sebesar Rp150,23 miliar atau meningkat 3,54%. Dan mencatatkan laba bersih tahun berjalan sebesar Rp276,88 miliar, meningkat 11,40% atau sebesar 28,33 miliar jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp248,55 miliar.

STRATEGI DAN KEBIJAKAN STRATEGIS

Selama tahun 2017 Perseroan telah menjalankan strategi yang telah kami susun sebelumnya di dalam *Roadmap* Tranformasi PELNI dan telah dapat dilaksanakan dengan baik, hal ini dapat dilihat dari peningkatan kinerja operasional dan keuangan Perseroan. Sesuai dengan *Roadmap* PELNI, Tahun 2017 adalah tahun Konsolidasi dan Pertumbuhan dan berikut dalah penjelasan lebih jauh mengenai strategi dan kebijakan strategis yang telah kami lakukan selama tahun 2017:

Company's performance. The majority of logistics needs in eastern Indonesia has been using ships, this is a golden opportunity for the Company. And also supported by full fleet operation and Tol Laut performance smoothness makes the voyage to Eastern Indonesia is more optimal.

Throughout the year of 2017, the Company operated 26 Passenger Ships, 47 Perintis Ships, 9 Tol Laut Ship and 1 Cattle vessel. PT PELNI (Persero) in carrying out its responsibilities is not only limited to serve commercial routes but also the outer islands. Currently PT PELNI (Persero) ships visited 98 ports of passenger ships and more than 300 ports of Perintis ships with 46 branches and served in 400 travel agents spread across Indonesia.

For overcoming every challenge and optimizing the opportunities during 2017, the Board of Directors and all Management have implemented transformation strategies in both of business and operational aspects to improve the Company performance. In addition to the implementation of transformational policies, Management also continues to perform efficiencies in all areas for supporting the business development needs of the Company.

As a result of the strategy implementation, as of December 31, 2017, PT PELNI (Persero) booked Rp4.39 trillion in revenues, had been increasing when compared to 2016 at Rp150.23 billion or increased by 3.54%. And recorded a net profit for the year of Rp276.88 billion, increased by 11.40% or 28.33 billion when compared to the previous year which amounted to Rp248.55 billion.

STRATEGY AND STRATEGIC POLICIES

Throughout 2017, the Company has well implemented the strategies that have set in the Roadmap of PELNI Transformation, this can be seen from the improvement of the Company's operational and financial performance. In accordance with PELNI Road map, 2017 is the year of Consolidated and Growth, strategies and strategic policies that have undertaken during 2017 are explained below:

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

CONSOLIDATION AND GROWTH – 2017

COMPETENCY ASSESSMENT & DEVELOPMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- *Talent Management*
  Talent Management

CUSTOMER DEVELOPMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Pemenuhan layanan sesuai Standar Pelayanan Penumpang Kapal
  Fulfillment of service according to Ship Passenger Service Standard

CORPORATE CULTURE DEVELOPMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Perumusan Tata Nilai, Perilaku & Budaya Perusahaan
  Formulation of Corporate Values, Behavior & Culture

PRODUCTION FACILITY IMPROVEMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Penerapan sistem pemeliharaan kapal berbasis manajemen risiko
  Application of ship maintenance system based on risk management

STRATEGIC ALLIANCE

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Sinergi BUMN
  SOE's Synergy
- Meratus
  Meratus

NEW PORTOFOLIO - BUSINESS

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- *Services*
  Services
- *Asset Management*
  Asset Management
- Logistik
  Logistic
- Penumpang
  Passenger

Sumber: Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2015 – 2019 (diolah)
Source: Company Long Term Plan 2015 - 2019 (processed)

1. ***Competency Assessment & Development***
   Aspek Sumber Daya Manusia (SDM) tetap menjadi fokus utama dalam transformasi Perseroan dalam upaya meningkatkan kompetensi internal untuk mencapai target pertumbuhan Perseroan. Kebijakan strategis Perseroan dalam *Competency Assessment & Development* tersebut dikembangkan dengan menjalankan program strategi *"Talent Management"*, yaitu mengembangan kompetensi SDM berdasarkan potensi dan bakat masing-masing individu melalui antara lain: *talent mapping,* desain pengembangan SDM, evaluasi *workload analysis,* rotasi & promosi dan diklat serta pelatihan.

2. ***Customer Development***
   Sebagai Perusahaan Jasa, Perseroan meyakini bahwa standar pelayanan menentukan pertumbuhan konsumen Perseroan. Kebijakan strategis Perseroan dalam *Customer Development* dikembangkan dengan menjalankan program strategi "Pemenuhan Layanan sesuai Standar Pelayanan Penumpang Kapal". Adapun standarisasi layanan tersebut meliputi: standarisasi menu & penyajian, sarana, layanan kebersihan, evaluasi, penanganan keluhan pelanggan dan *product knowledge.* Dengan memiliki standar layanan penumpang, diharapkan Perseroan dapat terus meningkatkan kuailtas layanan secara konsisten.

1. **Competency Assessment & Development**
   Human Resource (SDM) aspect become the main focus for the Company's transformation as an effort to increase internal competence to achieve the Company's growth target. The Company's strategic policy in Competency Assessment & Development is developed by implementing the "Talent Management" strategy program, which is developing human resource competencies based on the potential and talents of each individual through: talent mapping, HR development design, workload analysis, rotation & promotion, education and training.

2. **Customer Development**
   As a Company that engages in shipping transportation service, the Company believes that the service standards determining the growth of the Company's consumers. The Company's strategic policy in Customer Development is developed by implementing the "Fulfillment of Service in accordance with Ship Passenger Service Standard" strategy program. The standardization of service includes standardization of menu & presentation, facilities, cleaning service, evaluation, handling of customer complaints and product knowledge. It is expected that the Company could continuously improve service quality consistently.

3. ***Corporate Culture Development***
Seiring dengan terus bertumbuhnya Perusahaan maka dibutuhkan pengembangan budaya Perusahaan yang sesuai. Kebijakan strategis Perseroan dalam *Corporate Culture Development* dikembangkan dengan program strategi "Perumusan Tata Nilai, Perilaku & Budaya Perusahaan". Dengan Tata Nilai, Perilaku & Budaya Perusahaan yang baru, diharapkan internal Perusahaan mampu untuk mendorong pertumbuhan Perseroan.

4. ***Production Facility Improvement***
Peningkatan armada Kapal memegang peranan penting sebagai bisnis inti dari Perseroan. Kebijakan strategis Perseroan dalam *Production Facility Improvement* dikembangkan dengan program strategi "Penerapan Sistem Pemeliharaan Kapal Berbasis Manajemen Risiko" sehingga dengan demikian Perseroan dapat mengelola, meminimalisir dan memitigasi risiko-risiko yang ada dan mungkin timbul di masa yang akan datang.

5. ***Strategic Alliance***
Sejalan rencana Perseroan mengembangkan usahanya untuk pertumbuhan yang berkelanjutan, maka Perseroan mengambil kebijakan strategis yaitu *"Strategic Alliance"*. Program strategi yang dilaksanakan adalah "Sinergi dengan beberapa Perusahaan Badan Usaha Milik Negara (BUMN)". Beberapa sinergi BUMN yang telah dilakukan Perseroan diantaranya: kerjasama dengan PT Pelindo dalam melaksanakan *"Auto Collection"*, PT Jasa Raharja & PT Jasa Raharja Putra dalam melaksanakan "Sentralisasi Penyetoran Premi Asuransi Penumpang", Bank Mandiri dalam pelaksanaan *"E-Budgeting"*, PT Pertamina dalam "Pengadaan Minyak HSD dan Minyak Pelumas serta PT Telkomsel dalam kerjasama "Sewa Tempat Pemasangan BTS di Kapal Penumpang".

6. ***New Portfolio Business***
PT PELNI (Persero) juga berinisiatif menetapkan kebijakan strategis *"New Portfolio Business"* di tahun 2017. Program strategi yang dilaksanakan adalah dengan memanfaatkan "*Services, Asset Management*, Logistik dan Penumpang" yang dimiliki oleh Perseroan. Sehingga menghasilkan pendapatan bagi Perseroan dari inovasi dalam memberikan jasa baru, seperti wisata bahari, perhotelan dan usaha penunjang lainnya.

3. **Corporate Culture Development**
Along with the Company growth, it is necessary to develop appropriate corporate culture. The Company's strategic policy in Corporate Culture Development is developed with a strategy program of "Formulating Values, Behavior & Corporate Culture". With the new Corporate Values, Behavior & Culture, it is expected that the Company's internal is able to drive the Company growth.

4. **Production Facility Improvement**
Increased fleet of ships play an important role as the core business of the Company. The Company's strategic policy in Production Facility Improvement is developed with the strategy of "Implementation of Ship Maintenance System Based on Risk Management" so that the Company could manage, minimize and mitigate the risks that exist and may appear in the future.

5. **Strategic Alliance**
As the Company's plan to develop its business for sustainable growth, the Company adopts a strategic policy of "Strategic Alliance". The strategy program that implemented is "Synergy with some several State-Owned Enterprises (SOEs)". Several synergies of SOE that have been performed by the Company i.e cooperation with PT Pelindo in conducting "Auto Collection", PT Jasa Raharja & PT Jasa Raharja Putra in implementing "Centralized Deposit Insurance Premium Insurance", Bank Mandiri in "E-Budgeting", PT Pertamina in "Procurement of HSD Oil and Lubricating Oil and PT Telkomsel in cooperation" Rental of BTS Installation at Passenger Ships ".

6. **New Portfolio Business**
PT PELNI (Persero) also has had initiative to establish the strategic policy of "New Portfolio Business" in 2017. The strategy program implemented is to utilize "Services, Asset Management, Logistics and Passenger" owned by the Company. So that to generate revenue for the Company from innovation in providing new services, such as marine tourism, hospitality and other supporting businesses.

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

PERBANDINGAN HASIL YANG DICAPAI DENGAN YANG DITARGETKAN TAHUN 2017

Melalui implementasi kebijakan strategis di atas, PT PELNI (Persero) mencatat kinerja yang memuaskan pada tahun 2017 jika dibandingkan dengan target yang dicanangkan dalam RKAP 2017. Perbandingan hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan Perseroan untuk tahun buku 2017 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

COMPARISON BETWEEN RESULTS AND TARGETED IN 2017

Through the above strategic policies implementation, PT PELNI (Persero) recorded satisfactory performance in 2017 when compared with targets whose announced in the The Company Work and Budget Plan (RKAP) 2017. Comparison between the results that achieved and targeted by the Company for the fiscal year 2017 can be seen in the following table:

Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Target) dan Realisasi 2017
Table of Company's Budget Plan and Realization 2017

Uraian Description	RKAP 2017 2017 CBP	Realisasi 2017 2017 Realization	%
Operasional Operational			
Kapal Milik owned ship			
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	26	100%
Kapal Perintis Perintis Ship	47	46	100%
Kapal Ternak Cattle Ship	1	1	100%
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	9	9	100%
Kapal Sewa/*Charter* Charter Ship			
Kapal Wisata cruise ship	1	0	-
Jumlah Kapal Beroperasi Number of Ships Operated	**84**	**82**	**97,62%**
Permintaan Pelanggan Customer Requests			
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	4.256.275 orang | Person	3.521.873 orang | Person	82,75%
Angkutan Barang Goods Transportation	206.995 Ton/M3	74.719 Ton/M3	36,10%
Container Container	24.935 Teus	14.782 Teus	59,28%
Kendaraan Vehicle	7.716 Unit	6.915 Unit	89,62%
Ternak Animal	12.000 Ekor | Animals	7.999 Ekor | Animals	66,66%
Keuangan Finance			
Laba Konsolidasi Consolidated Profit	Rp305,624 juta | million	Rp276.419 juta | million	90,44%
Kondisi Kesehatan Health Condition	Sehat A | healthy A	Sehat AA | healthy AA	-
Commission Day Commission Day	27.350 Hari | days	20.084 Hari | days	73,43%
Gross Profit Margin Gross Profit Margin	17,10%	16,90%	98,83%
Net Profit Margin Net Profit Margin	7,11%	6,14%	86,36%

Secara operasional, semua target yang dicanangkan Perseroan terealisasi 98,81% yaitu berhasil mengoperasikan sebanyak 83 kapal di tahun 2017 dari target sebanyak 84 kapal.

Dari segi permintaan pelanggan di tahun 2017, angkutan penumpang dan angkutan barang masing-masing terealiasi sebesar 93,42% dan 40,65%, yaitu sebanyak 3,98 juta orang dan 84,15 ribu ton/m3. Untuk kontainer dan kendaraan teralisasi 62,28% dan 50,73%, yaitu sebesar 15,53 ribu teus dan 3,91 ribu unit kendaraan. Sedangkan untuk ternak terealisasi sebesar 87,49% yaitu sebanyak 10,50 ribu ekor ternak.

Meskipun realiasi dari segi permintaan pelanggan secara rata-rata terealisasi sebesar 75%, namun secara konsolidasi kinerja keuangan perusahaan mampu melebihi target yang dicanangkan. Untuk tahun 2017, Perseroan berhasil mencatatkan laba konsolidasi sebesar Rp307,88 miliar, melebihi target yang sebesar Rp305,62 miliar atau tercapai 100,74%. Dari kondisi kesehatan, Perseroan berhasil mendapat predikat 'Sehat AA", melebih dari target "Sehat A". Gross profit margin dan net profit margin Perseroan, masing-masing berada pada level 17,96% dan 7,08% atau terealisasi sebesar 105,00% dan 99,49,49%.

KENDALA YANG DIHADAPI PERUSAHAAN DAN LANGKAH-LANGKAH PENYELESAIANNYA

Seperti yang telah disebutkan di atas, selain tantangan dari faktor eksternal yang mencakup kondisi ekonomi global dan nasional, Perseroan juga menghadapi tantangan dari sisi meningkatnya persaingan dengan pengangkutan udara yang menawarkan *Low Cost Carrier.* Untuk mengatasi tantangan tersebut, Perseroan berupaya mempertahankan pangsa pasar Perseroan dengan meningkatkan nilai tambah yang dimiliki.

Tantangan dalam perkembangan teknologi yang menuntut Perseroan untuk cepat beradaptasi dalam mengaplikasi teknologi yang sedang berkembang di masyarakat, terutama dalam memberikan layanan secara *online* yang cepat dan akurat. Dan Perseroan berhasil mengembangkan teknologi layanan pelanggan, seperti pemesanan tiket, pembayaran ataupun komplain melalui aplikasi yang dapat digunakan langsung di *handphone.*

Operationally, all of the targets that set by the Company realized at 98.81%, which successfully operated 83 ships in 2017 from the target of 84 ships.

In terms of customer demand in 2017, passenger and freight transport were relized 93.42% and 40.65% respectively, i.e 3.98 million people and 84.15 thousand tons/m3. For containers and vehicles were at 62.28% and 50.73%, ie 15.53 thousand teus and 3.91 thousand units of vehicles. While for cattle realized 87,49% that was 10,50 thousand cattle.

Although the realization of customer demand in terms of average realized by 75%, but the consolidated financial performance of the company was able to exceed the targets. For the year 2017, the Company managed to record consolidated profit of Rp307, 88 billion, exceeding the target of Rp305, 62 billion or reached at 100.74%. From the health condition, the Company successfully had the title of 'Sehat AA', exceeding the target of "Healthy A". The Company's gross profit margin and net profit margin were at 17.96% and 7.08% respectively, or realized at 105.00% and 99.49.49%.

THE OBSTACLES FACED BY THE COMPANY AND THE STEPS OF COMPLIANCE

As mentioned above, besides the challenges from external factors covering global and national economic conditions, the Company also faced challenges in terms of increasing competition with air carriers offering Low Cost Carriers. To overcome these challenges, the Company strives to maintain its market share by increasing its additional value.

Challenges in technological development that force the Company to quickly adapt in applying emerging technologies in the community, especially for providing fast and accurate online services. And the Company succeeded in developing customer service technology, such as ticket booking, payment or complaint through application that could be directly used in handphone.

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

ANALISIS PROSPEK USAHA TAHUN 2018

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3% setelah terjadinya krisis global dan tahun ini menurut Dana Moneter Internasional (IMF) diprediksi akan tumbuh 3,6% atau 3,9% dalam 2 tahun ke depan. Naiknya proyeksi ini sejalan dengan ekspektasi dampak dari kebijakan pemangkasan pajak yang dilakukan Amerika Serikat. Indonesia belum bisa secara maksimal memanfaatkan momentum ini. Menurut IMF, potensi penguatan pertumbuhan ekonomi akan terlihat di negara-negara pengekspor besar dan kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB hanya 25%.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh antara 5,1% - 5,5% di tahun 2018. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, langkah yang diambil untuk mencapai target tersebut dengan menempuh kebijakan moneter & kebijakan makro prudensial, reformasi struktural dan kebijakan sistem pembayaran & pengelolaan uang rupiah dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah berupa perairan dengan letak geografis antara 95° sampai 142° Bujur Timur dan membentang antara 6° Lintang Utara sampai dengan 11° Lintang Selatan yang memiliki 5 (lima) Pulau Besar dan 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu) pulau atau yang terbujur dari Sabang Sampai Merauke dan terbentang dari Miangas sampai Pulau Rote.

Oleh karenanya dalam rangka membuka isolasi peradaban dan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain diperlukan adanya sarana transportasi yang memadai yang dapat menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain, sehingga dapat mengkomunikasikan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang berada disuatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang tidak terlalu lama, meskipun daerah tersebut dipisahkan oleh geografis yang terpisah-pisah antara satu tempat dengan tempat yang lain yang tersebar diseluruh bumi Nusantara yang dihuni oleh sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa dengan penduduk dibelahan lain dunia ini. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan tranportasi yang memadai diantaranya menggunakan transportasi kapal laut yang salah satunya diusahakan oleh PT PELNI (Persero).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas PT PELNI (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara, memiliki tugas yang mulia sebagai perusahaan yang bergerak dalam transportasi laut, diharapkan akan dapat mengatasi segala hal yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain.

2018 BUSINESS PROSPECT ANALYSIS

The world economic conditions in 2017 grew by 3% after the global crisis and this year according to the International Monetary Fund (IMF) is predicted to grow 3.6% or 3.9% in the next 2 years. These rise in projection is in line with US tax-cutting policies expectations impact.Indonesia has not been able to take full advantage of this momentum. According to IMF, the potential for strengthening economic growth will be seen in major exporting countries. While, Indonesia export contribution to PDB only 25%.

The Bank of Indonesia projects the Indonesian economy will grow between 5.1% - 5.5% in 2018. To achieve these growth targets, the steps are taken to achieve these targets by adopting monetary policy & macroprudential policy, structural reform, and rupiah payment & money management system policy that carried out to maintain macroeconomic stability and nancial system.

Indonesia is an archipelago whose two per third of the territory is ocean and located at 95° until 142° East Longitude and 6° North Latitude until 11° South Latitude with 5 (five) Main Islands and 183,000 (one hundred and eighty three thousand) islands located from Sabang until Merauke and spread across Miangas until Rote Island.

In order to eliminate civilization and economy barrier among one region to antoher, an adequate means of transportation to connect one region to another is needed,as well as to communicate one person to another who are located in one place to other places in relatively short time, despite the regions are separated geographically where all of the area that are located nationwide are inhabited by total population of 250,000,000 (two hundred and ty million) where the remaining population live in other part of the globe. This is only possible to be done through suf cient transportation using marine vessels transportation as operated by PT PELNI (Persero).

To solve the issues mentioned above, PT PELNI (Persero) is one of company whos shares are folly owned by the Government with noble assignment as an enterprise that is operated in marine transportation business and expected to overcome every issue to bridge one area with another. In addition, PT PELNI (Persero) is also expected to be the

Selain itu PT PELNI (Persero) diharapkan menjadi katalisator terhadap tumbuhnya perekonomian daerah dan terbukanya isolasi yang memisahkan antara satu orang dengan yang lainnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu adat dengan istiadat yang lain dan akan menjadi perekat sesama anak bangsa dan dunia, sehingga dapat menjalin komunikasi antara negara-negara yang berada di belahan bumi ini.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia seperti yang telah disampaikan dalam pidatonya oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh yang menginginkan Indonesia dapat terhubung antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga meminimalisasi kesenjangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain memiliki tugas untuk menghubungkan dan membuka isolasi daerah yang terpencil, maka dengan keberadaan PT PELNI (Persero) yang memiliki core business Transportasi menggunakan kapal laut yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negara lain, diharapkan akan membawa perubahan *mindset* (pola pikir) masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi menjadi lebih moderat sehingga menjadi bangsa yang maju peradabannya di dunia dan tidak ada lagi istilah daerah tertinggal dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga semua orang menjadi manusia yang tinggi peradabannya. Disamping itu PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menggapai VISI-nya yaitu "Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat", dengan Misi:

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksebilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan, serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi dan pengembangan kompetisi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat *(stakeholder)* dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.*

Dengan demikian, PT PELNI (Persero) optimis menghadapi tahun 2018 dengan melihat prospek usaha di masa yang akan datang dan dapat mencapai target yang ditentukan di awal tahun 2018, yaitu mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan sebesar 8,65% dan pertumbuhan laba konsolidasi Perseroan sebesar 10,44%.

catalyst of regional economy growth and to eliminate barrier that separated one person to another as well as one location to another, one custom to another that will strengthen binding among all youth in the nation and the world, to engage in international communication around the world.

Furthermore, The Republic of Indonesia Government, as stated in the speech of seventh president of Republic of Indonesia that wished Indonesia to be connected on all regions and to minimize disparity among the regions, therefore, PT PELNI (Persero) is expected to safeguard the unity of Republic of Indonesia as a nation.

Besides the duty to connect and eliminate barrier of the remote area, existence of PT PELNI (Persero) which has a core business of Transportation using vessels as proud of Indonesia as a nation towards other countries, the Company is expected to bring mindset transformation for the society in rural area who are previously isolated to become more moderate into a nation with progressive civilization in the world and to aliminate the terms of marginal region in the mean time, to develop all people with high civilization. In addition, PT PELNI (Persero) is also expected to achieve its vision "To Become a Strong Shipping Company and Customers Preferred Choice," with the mission:

1. Managing and developing marine transportation to ensure public accessibility to support the realization of National Outlook (Wawasan Nusantara).
2. Raising revenue contribution for the country, employees, as well as taking part on the development of environment and public services.
3. Enhancing corporate value throughout creativity, innovation and human capital competency development.
4. Operating fair business by promoting mutual bene ciary principle for all stakeholders and implementing the Good Corporate Governance (GCG).

Moreover, PT PELNI (Persero) is optimistic to face the year 2018 by seeing at future business prospects and able to earn the target set in early 2018, which is to record the Company's revenue growth of 8.65% and the consolidated profit of the Company 10 .44%.

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

Tahun 2018 adalah fase transformasi PT PELNI (Persero) selanjutnya, yaitu *"Growth"* yang telah tergambar dalam *ROADMAP* TRANSFORMASI PELNI.

For 2018 is the next transformation phase of PT PELNI (Persero), which is "Growth" that can be described in PELNI TRASFORMATION ROADMAP.

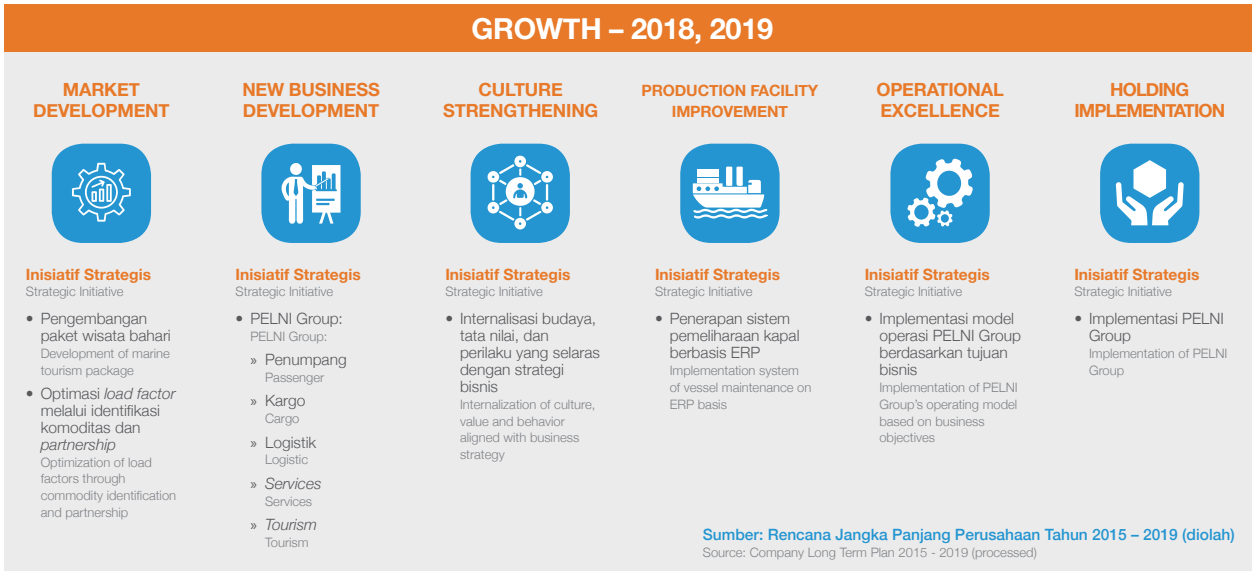

Sumber: Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2015 – 2019 (diolah)
Source: Company Long Term Plan 2015 - 2019 (processed)

Sehingga dapat dijelaskan bahwa *Grand Strategy* Perusahaan untuk tahun 2018 adalah:

1. ***Market Development***
   a. Pengembangan paket wisata bahari.
   b. Optimasi *load factor* melalui identifikasi komoditas dan *partnership.*
2. ***New Business Development***
   a. Penumpang.
   b. Kargo.
   c. Logistik.
   d. *Services.*
   e. *Tourism.*
3. ***Culture Strengthening***
   a. Internalisasi budaya, tata nilai dan perilaku yang selaras dengan strategi bisnis.
4. ***Production Facility Improvement***
   a. Penerapan sistem pemeliharaan kapal berbasis ERP.
5. ***Operational Excellence***
   a. Implementasi model operasi PELNI Group berdasarkan tujuan bisnis.
6. ***Holding Implementation***
   a. Implementasi PELNI Group.

So it can be explained that the Grand Strategy of the Company for the year 2018 are:

1. **Market Development**
   a. Development of marine tourism package.
   b. Optimization of load factors through commodity identification and partnership.
2. **New Business Development**
   a. Passenger.
   b. Cargo
   c. Logistic
   d. Service.
   e. Tourism
3. **Culture Strengthening**
   a. Internalization of culture, value and behavior aligned with business strategy
4. **Production Facility Improvement**
   a. Implementation system of vessel maintenance on ERP basis
5. **Operational Excellence**
   a. Implementation of PELNI Group's operating model based on business objectives.
6. **Holding Implementation**
   a. Implementation of PELNI Group.

PERKEMBANGAN PENERAPAN TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

PT PELNI (Persero) menempatkan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* sebagai landasan bagi seluruh aktifitas bisnis dan operasional untuk membangun BUMN yang berkinerja unggul dan beretika kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan. Komitmen terhadap GCG direalisasikan melalui pembentukan organ-organ Perseroan sesuai dengan kaidah dan landasan GCG di Indonesia baik Organ Utama seperti Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris dan Direksi maupun Organ Pendukung seperti komite-komite, Sekretaris Perusahaan, Internal Audit dan *Whistle Blowing System* (WBS).

Sebagai bentuk evaluasi terhadap penerapan GCG di Perseroan, PT PELNI (Persero) juga telah secara rutin melakukan GCG *Assessment* secara berkala setiap tahun, baik *Self-Assessment* maupun *Assessment* oleh asesor independen. Pada tahun 2017, Perseroan telah melaksanakan GCG *Assessment* bekerja sama dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dengan capaian skor 80,448 dan predikat BAIK.

Selain melalui GCG *Assessment,* Perseroan juga telah melaksanakan evaluasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) dengan mengadopsi *"Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence"* dan merujuk pada Surat Kementerian BUMN No. S-08/S.MBU/2013 tentang Penyampaian Pedoman Penentuan *Key Performance Indicators* (KPI) dan Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Pada Badan Usaha Milik Negara. Untuk tahun 2017, PT PELNI (Persero) memperoleh skor 483 dibandingkan target skor 480 atau nilai capaian sebesar 100,63%.

Segenap Manajemen dan Insan PELNI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas Tata Kelola Perusahaan yang Baik di Perseroan dan mencapai skor evaluasi penerapan GCG yang semakin baik di masa yang akan datang. Selama tahun 2017, anggota Direksi juga telah berparitispasi dalam program pelatihan dan pengembangan kompetensi yaitu Seminar Nasional Infrastruktur, Transportasi dan Logistik Nasional yang diselenggarakan oleh BUMN *Executive Club* dengan tema "Pengembangan Infrastruktur & Transportasi Terpadu dalam Mendukung Sistem Logistik Nasional."

DEVELOPMENT OF GOOD CORPORATE GOVERNANCE IMPLEMENTATION

PT PELNI (Persero) puts Good Corporate Governance as the foundation for all of business and operational activities to build state-owned enterprises with excellently and ethically performance to all shareholders and stakeholders. The Company is also Committed to perform GCG through the establishment of the Company's organs according to GCG principles and foundations in Indonesia, such as the General Meeting of Shareholders, Board of Commissioners and Directors and Supporting Organs such as Committes, Corporate Secretary, Internal Audit and Whistle Blowing System (WBS).

As a form of evaluation on GCG implementation in the Company, PT PELNI (Persero) has also regularly conducted GCG Assessment on a regular basis every year, either in Self-Assessment or Assessment by independent assessors. In 2017, the Company had implemented GCG Assessment in collaboration with the Financial and Development Supervisory Board (BPKP) with the achievement of 80.448 score and GOOD predicate.

Through GCG Assessment, the Company has also conducted an evaluation on the Superior Performance Assessment Criteria (KPKU) by adopting "Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence" and referring to Letter of the Ministry of SOEs. S-08/S.MBU/2013 about the Submission of Guidelines for the Determination of Key Performance Indicators (KPI) and Criteria for Superior Performance Appraisal (KPKU) at State-Owned Enterprises. For the year 2017, PT PELNI (Persero) obtained 483 score when compared to the target score 480 or achievement value of 100.63%.

All of PELNI Management are committed to continuously improve the quality of Good Corporate Governance in the Company and achieve a better evaluation score of GCG implementation in the future. For 2017, members of the Board of Directors had been participated in the training and competence development program namely National Infrastructure, Transportation and Logistics National Seminar organized by State Owned Enterprises Executive Club with "Integrated Infrastructure & Transportation Development in Supporting National Logistics System" theme.

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibility)*, Perseroan berkomitmen memberikan hubungan timbal balik yang positif antara Perusahaan dengan para pemangku kepentingan. Hubungan antara Perusahaan dan Pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha Perusahaan sehingga Perusahaan dapat senantiasa memberikan kontribusinya terhadap lingkungan.

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk pada landasan kebijakan tersebut, PT PELNI (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKBL tersebut juga melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup

PT PELNI (Persero) dalam melakukan aktivitasnya sebagai Perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi memastikan bahwa aktivitas Perusahaan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan yaitu keseimbangan antara *triple bottom line* yaitu *people, profit, planet.* Perseroan mengukur keberhasilan usaha berdasarkan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan keuntungan. Model yang dikembangkan tidak hanya mengejar keuntungan finansial namun juga tanggung jawab sosial. Partisipasi PT PELNI (Persero) dalam menjaga kelestarian lingkungan dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan melalui Program *Green Office.* Bantuan pelestarian lingkungan tersebut diantaranya diberikan kepada Yayasan Terumbu Rupa.

CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY

Through its Corporate Social Responsibility activities, the Company is committed to providing a positive mutual relationship between the Company and its stakeholders. The relationship between the Company and Stakeholders is expected to maintain the Company's business continuity so that the Company can always contribute to the environment.

Corporate Social Responsibility (CSR) implementation at PT PELNI (Persero) refers to the Minister of State-Owned Enterprise (BUMN) regulation No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 regarding to Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises and the latest amendment in accordance with the Minister of State-Owned Enterprise regulation No. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 about the Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation no. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

Referring to the policy foundation, PT PELNI (Persero) implemented the Partnership and Community Development Program (PKBL) with the aim of assisting the Government in implementing more equitable development and improving the community welfare. PKBL's activities also involve the stakeholders, especially the communities that are located around the business area of PT PELNI (Persero).

Corporate Social Responsibility in Environment

PT PELNI (Persero) in performing its activities as a company operating in the transportation sector ensures that the Company's activities are in accordance with the principle of sustainability that is the balance between triple bottom line which are people, profit, planet. The Company measures business success based on social responsibility, environmental stewardship and profitability. The developed model pursues not only financial gain but also social responsibility. PT PELNI (Persero) participation in preserving the environment is carried out by creating an environmentally friendly in work environment through the Green Office Program. Environmental conservation assistance was provided to the Foundation of Terumbu Rupa.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatan dan Kesehatan Kerja

Dalam melakukan operasi usahanya, PT PELNI (Persero) selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan, didasari atas kesadaran bahwa pengelolaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja yang prima sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja. Perseroan juga sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan. Seluruh aktivitas Perseroan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan. PT PELNI (Persero) menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karir hingga evaluasi kinerja. PT PELNI (Persero) tidak mengakui adanya diskriminasi berdasarkan gender maupun karakter lain seperti agama maupun etnis di mana kebijakan dan keputusan dalam aspek ketenagakerjaan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Praktik kesetaraan gender di PT PELNI (Persero) juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 tentang Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai PT PELNI (Persero).

Corporate Social Responsibility in Employment Occupational, Safety and Health

In conducting its business operations, PT PELNI (Persero) always prioritizes occupational safety and health, as well as environmental sustainability, based on the awareness that health and safety management is essential for long-term success. The Company always takes appropriate action to avoid accidents and health problems at work. The Company is also concerned with the problems and environmental impacts of all of the Company's activities. All of the Company's activities are scientifically evaluated their impact on the environment.Therefore, supervision and prevention actions are taken. PT PELNI (Persero) guarantees fair career equality and opportunity for all employees since recruitment, career development until performance assessment phase. PT PELNI (Persero) does not recognize any discrimination based on gender or other characters such as religion and ethnicity where the employment policy and decree are fully considered performance of the concerned employees. The gender equality practice at PT PELNI (Persero) is also stipulated in Board of Directors Decree Number 09.30/5/SK/HKO.01/2015 regarding to PT PELNI (Persero) Employee Career Development Scheme.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan Sosial dan Kemasyarakatan

PT PELNI (Persero) hadir tak sekadar mencari keuntungan semata. Sejak awal beroperasi, Perseroan berkomitmen agar kehadirannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya.Dengan kredo seperti itu, maka dari tahun ke tahun, Perseroan terus berupaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat. Secara keseluruhan PT PELNI (Persero) telah berhasil menyalurkan dana PKBL sebesar Rp3,9 miliar pada tahun 2017. Penyaluran dana tersebut dibagi atas Program Kemitraan, Pembinaan dan Bina Lingkungan.

Corporate Social Responsibility in Community and Society Development

PT PELNI (Persero) is not merely to collect profit. Since the beginning of its operation, the Company has been committed to make its presence can provide benefts to surrounding communities. With a creed like that, then from year to year, the Company continues to strive to improve the harmonious relationship with the community. Overall, PT PELNI (Persero) has successfully channeled PKBL funds amounting to Rp3,9 billion in 2017. Funds distribution was divided into Partnership and Community Development.

Tanggung Jawab Sosial Bidang Perlindungan Pelanggan

Pelanggan Perusahaan merupakan pihak eksternal Perusahaan yang sangat berpengaruh bagi keberlanjutan usaha PT PELNI (Persero) ke depan. Pelanggan merupakan pihak yang menjadi perhatian PT PELNI (Persero) untuk senantiasa ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan memuaskan, hingga diharapkan terciptanya *customer engagement* dan saling menguntungkan. Seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti melalu koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan masalah yang dikeluhkan.

Corporate Social Responsibility in Customer Protection

The Company's customers are external parties which very influential for the sustainability of PT PELNI (Persero) business in the future. Customer is a party to the attention of PT PELNI (Persero) to always supported with adequate facilities and satisfactory, until the expected creation of customer engagement and mutual benefit. All of the customer complaint have been followed-up through coordination with related working unit based on the complained issues.

LAPORAN DIREKSI
Report from Board of Directors

PERUBAHAN KOMPOSISI ANGGOTA DIREKSI DAN ALASAN PERUBAHANNYA

Pada tahun 2017, telah terjadi perubahan komposisi anggota Direksi PT PELNI (Persero) yang tertuang pada SK-62/MBU/04/2017 tanggal 3 April 2017 dan SK-210/MBU/09/2017 tanggal 26 September 2017 dengan bergabungnya Ibu Tri Andayani sebagai Direktur Keuangan dan Ibu Ganefi sebagai Direktur SDM danUmum. Kami berharap kehadiran mereka dapat meningkatkan nilai tambah pada kompetensi dan kapabilitas jajaran Direksi Perseroan.

Kami juga menyampaikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Bapak Elfien Goentoro dan Bapak Wibisono atas kontribusi yang telah diberikan selama menjabat sebagai anggota Direksi PT PELNI (Persero).

Berikut susunan anggota Direksi PT PELNI (Persero) tahun buku 2016:

Direktur Utama	: Elfien Goentoro
Direktur Keuangan	: Wibisono
Direktur Armada dan Teknik	: Olih Masolich Sodikin
Direktur Komersial	: Harry Boediarto Soewarto
Direktur Operasi dan Pelayanan	: Muhamad Tukul Harsono
Direktur SDM dan Umum	: Insan Purwarisyah L. Tobing

Setelah terjadi perubahan, maka susunan anggota Direksi PT PELNI (Persero) sampai dengan akhir tahun 2017 adalah sebagai berikut:

Direktur Utama	: Insan Purwarisyah L. Tobing
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	: Harry Boediarto Soewarto
Direktur Armada	: Muhamad Tukul Harsono
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	: Olih Masolich Sodikin
Direktur Keuangan	: Tri Andayani
Direktur SDM dan Umum	: Ganefi

Diharapkan melalui perubahan anggota Direksi ini, PT PELNI (Persero) dapat meningkatkan pertumbuhan kinerja dan mempercepat terwujudnya visi Perseroan.

CHANGES IN THE BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION AND THE REASONS

In 2017, there has been a change in the Board of Directors composition of PT PELNI (Persero) pursuant to SK-62/MBU/04/2017 dated 3 April 2017 and SK-210/MBU/09/2017 dated September 26, 2017 by joining Mrs. Tri Andayani as Finance Director and Mrs. Ganefi as Human Resources and General Director. We hope that their presence will increase the added value to the competence and capability of the Board of Directors of the Company.

We also express our greatest appreciation to Mr. Elfien Goentoro, and Mr. Wibisono for the contribution that given during his serving as a member of the Board of Directors of PT PELNI (Persero).

The composition of the Board of Directors of PT PELNI (Persero) fiscal year 2016 with the following:

President Director	: Elfien Goentoro
Director of Finance	: Wibisono
Director of Fleet and Technical	: Olih Masolich Sodikin
Director of Commercial	: Harry Boediarto Soewarto
Director of Operation and Services	: Muhamad Tukul Harsono
Director of HR and General Affairs	: Insan Purwarisyah L. Tobing

After the change, the composition of the Board of Directors of PT PELNI (Persero)up to the end of 2017 was as follows:

President Director	: Insan Purwarisyah L. Tobing
Director of Ocean Freight and Tol Laut	: Harry Boediarto Soewarto
Director of Fleet	: Muhamad Tukul Harsono
Director of Passenger Transport Business	: Olih Masolich Sodikin
Director of Finance	: Tri Andayani
Director of HR and General Affairs	: Ganefi

It is expected that through this change of members of the Board of Directors, PT PELNI (Persero) can enhance its performance growth and accelerate the realization of the Company's vision.

APRESIASI

Mewakili Direksi dan seluruh Manajemen PT PELNI (Persero), kami mengucapkan terima kasih kepada segenap pemegang saham dan pemangku kepentingan atas kepercayaan dan dukungan yang diberikan kepada PT PELNI (Persero) selama tahun 2017. Kami juga menyampaikan apresiasi mendalam kepada Dewan Komisaris atas setiap arahan dan rekomendasi yang diberikan terkait pengelolaan Perseroan yang kami jalankan selama tahun 2017.

Kepada segenap karyawan, terima kasih atas kerja keras dalam mencapai target kinerja PT PELNI (Persero) dan marilah kita terus berusaha lebih baik lagi. Kami juga mengucapkan terima kasih mendalam kepada seluruh mitra kerja dan pelanggan atas kepercayaan terhadap PT PELNI (Persero). Dengan kerja sama dan dukungan dari semua pihak, kami yakin PT PELNI (Persero) dapat terus melangkah dan berkembang sebagai penyedia layanan transportasi dan angkutan pelayaran terdepan di Indonesia.

APPRECIATION

Representing the Board of Directors and all the Management of PT PELNI (Persero), we would like to thank to all shareholders and stakeholders for the trust and support whose given to PT PELNI (Persero) during 2017. We also express our deep appreciation to the Board of Commissioners for every direction and recommendations had been made in relation to the Company management that operated during 2017.

We say thank you to all employees for their dedication and hard work in achieving PT PELNI (Persero) performance targets and let us continue to do better. We also express our deepest gratitude to all partners and customers for their trust. With the cooperation and support of all parties, we believe that PT PELNI (Persero) could continue to move and develop as a leading provider of services and shipping transportation in Indonesia.

Jakarta, 30 Mei 2018
Jakarta, May 30, 2018

Atas Nama Direksi PT PELNI (Persero)
On Behalf of the Board of Directors of PT PELNI (Persero)

Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

PROFIL DIREKSI
The Board of Director's Profile

Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Director

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
52 tahun per 31 Desember 2017
52 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Bandung Tahun 1965
Bandung, on 1965

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Utama sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-210/MBU/09/2017.
Appointed as President Director since September 26, 2017 based on Minister of State-Owned Enterprises decision Letter No. SK-210/MBU/09/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1988	Sarjana Hubungan Internasional Universitas Padjajaran Bachelor Degree of International Relation Universitas Padjajaran

Pengalaman Kerja / Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Utama PT PELNI (Persero) President Director PT PELNI (Persero)	2012 - 2016	SVP HR Development PT Pertamina (Persero) SVP HR Development PT Pertamina (Persero)
2016 – 2017	Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero) Director of HR and General Affairs PT PELNI (Persero)	2011 - 2015	Komisaris Pertamina EP Cepu Commissioner Pertamina EP Cepu
2015 – 2017	Komisaris PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi Commiissioner of PT Pertamina Internasional Eksplorasi & Produksi	2010 - 2012	VP People Management PT Pertamina (Persero) VP People Management PT Pertamina (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

24 Januari 2017 January 24, 2017	Executive Leadership Program (ELP -1) Executive Leadership Program (ELP -1)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
The Board of Director's Profile

Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Business Transportation

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
58 tahun per 31 Desember 2017
58 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Ciamis, Tahun 1959
Ciamis, on 1959

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Usaha Angkutan Penumpang sejak tanggal 03 April 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-62/MBU/04/2017.
Appointed as Director of Passenger Business Transportation since April 03, 2017 based on Minister of State-Owned Enterprises decision letter No. SK-62/MBU/04/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1984	Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Republik Indoensia Akademi Ilmu Pelayaran (AIP) Republic of Indonesia

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang Present)	Direktur Usaha Angkutan Penumpang PT PELNI (Persero) Director of Public Business Transportation PT PELNI (Persero)	2011 - 2012	Senior Manager Pengadaan Senior Manager of Procurement
2012 – 2017	Direktur Armada & Teknik PT PELNI (Persero) Director of Fleet & Technical PT PELNI (Persero)	2010 - 2011	Senior Manager Pemasaran & Pengembangan Usaha Senior Manager of Marketing & Business Development

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

24 Januari 2017 January 24, 2017	Executive Leadership Program (ELP -1) Executive Leadership Program (ELP -1)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Utama PT PIDC President Commissioner of PT PIDC

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
The Board of Director's Profile

Muhamad Tukul Harsono
Direktur Armada
Director of Fleet

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
50 tahun per 31 Desember 2017
50 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Demak, Tahun1967
Demak, on 1967

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Direksi sejak tanggal 01 Desember 2016 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-263/MBU/12-2016 dan sesuai dengan SK No. 62/MBU/04/2017 tentang perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi, diangkat sebagai Direktur Armada.
Appointed as member of the Board of Director since December 01, 2016 based on SOE's Decision Letter No. SK-263/MBU/12-2016 and accordance with Decree No. 62/MBU/04/2017 about the changes of the position nomenclature, assignment and appointment of members of the Board of Directors, appointed as Director of the Fleet.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2017	*Master Mariner* Universitas BP3IP Master Mariner BP3IP University	2010	S1 Profesi Kepelautan Universitas Al-Anwar Bachelor Degree of Marine Al-Anwar University

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Armada PT PELNI (Persero) Director of Fleet PT PELNI (Persero)	2016	Direktur PT Dok & Perkapalan Kodja Bahari Director of Dock & Vessels at Kodja Bahari
2016 - 2017	Direktur Operasi dan Pelayanan PT PELNI (Persero) Director of Operations and Services PT PELNI (Persero)	2014 - 2016	Direktur Utama PT PIDC (Anak Perusahaan PT PELNI (Persero)) President Director of PIDC (Subsidiary of PT PELNI (Persero))

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

24 Januari 2017 January 24, 2017	Executive Leadership Program (ELP -1) Executive Leadership Program (ELP -1)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
The Board of Director's Profile

Harry Boediarto Soewarto
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Director of Freight & Tol Laut

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
61 tahun per 31 Desember 2017
61 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Bandung, Tahun 1956
Bandung, on 1956

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Direksi sejak tanggal 21 Agustus 2015 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-148/MBU/08/2015 dan sesuai dengan SK 62/MBU/04/2017 tentang perubahan nomenklatur jabatan, pengalihan tugas dan pengangkatan anggota-anggota Direksi, diangkat sebagai Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut.
Appointed as Member of the Board of Directors since August 21, 2015 based on Minister of State-Owned Enterprises decision letter No. SK-148/MBU/08/2015 Decree No. 62/MBU/04/2017 about the changes of the position nomenclature, assignment and appointment of members of the Board of Directors, appointed as Director of Freight & Tol Laut.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1982	Sarjana Teknik Planologi Institut Teknologi Bandung Bachelor Degree of Planology Enginering Institut Teknologi Bandung

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut PT PELNI (Persero) Director of Freight & Tol Laut PT PELNI (Persero)	2014 – 2015	Direktur Lalu Lintas Angkutan Laut Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan. Director of Marine Transportation Traffic of Directorate General of Sea Transportation, Ministery of Transportation.
2015 – 2017	Direktur Komersial PT PELNI (Persero) Director of Commercial PT PELNI (Persero)	2012 – 2014	Kepala Pusat Kajian Kemitraan & Pelayanan Jasa Transportasi (PKKPJT). Partnership & Services Center of Transport Service (PKKPJT).
2015	Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Laut, BALITBANGHUB, Kementerian Perhubungan Director of Marine Transportation Reserach and Development, BALITBANGHUB, Ministry of Transportation	2011-2012	Direktur Kenavigasian, Dirjen Hubla, Kementerian Perhubungan. Director of Navigate Transportation Traffic of Directorate General of Sea Transportation, Ministery of Transportation.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

24 Januari 2017 January 24, 2017	Executive Leadership Program (ELP -1) Executive Leadership Program (ELP -1)

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
The Board of Director's Profile

Tri Andayani
Direktur Keuangan
Director of Finance

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
44 tahun per 31 Desember 2017
44 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Jakarta, Tahun 1973
Jakarta, on 1973

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur Keuangan sejak tanggal 03 April 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN RI No. SK-62/MBU/04/2017.
Appointed as Director of Finance since April 03, 2017 based on SOE's Decision Letter No. SK-62/MBU/04/2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2000	Pasca Sarjana Magister Manajemen Bidang Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta Magister of Human Resource Management Gajah Mada University, Yogyakarta	1996	Sarjana Bidang Akuntansi Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Perbanas Jakarta Bachelor Degree in Accounting Perbanas School of Economics, Jakarta

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur Keuangan PT PELNI (Persero) Director of Finance PT PELNI (Persero)	2015 - 2016	Direktur Keuangan & SDM PT LEN Industri (Persero) Director of Finance & Human Resource PT Len Industri (Persero)
2016 - 2017	Direktur Operasi I PT LEN Industri (Persero) Director of Operation I PT Len Industri (Persero)	2000 - 2015	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

29 Maret 2017 March 29, 2017	Indonesia's Railway Tech Conference Indonesia's Railway Tech Conference	12 Mei 2016 May 12, 2016	BUMN Paska Putusan MK No.62/PUU-XI/2013 SOE after the Constitutional Court Decision No.62/PUU-XI/2013
24 Januari 2017 January 24, 2017	Executive Leadership Program (ELP -1) Executive Leadership Program (ELP -1)	30 Maret 2016 March 30, 2016	Expand Leadership Program Expand Leadership Program
01 Juni 2016 June 01, 2016	Understanding of Financial Statement Understanding of Financial Statement		

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL DIREKSI
The Board of Director's Profile

Ganefi
Direktur SDM & Umum
Director of Human Capital & General Affairs

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
54 tahun per 31 Desember 2017
54 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & YOB
Jakarta, Tahun 1963
Bandung, on 1963

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Direktur SDM & Umum sejak tanggal 26 September 2017 berdasarkan SK Menteri BUMN No. SK-210/MBU/09/2017.
Appointed as Director of Human Capital & General since September 26, 2017 based on Minister of State-Owned Enterprises decision Letter No. SK-210/MBU/09/2017.

Latar Belakang Pendidikan Educational Background

1996	Magister *Banking & Finance* Monash University Master of Banking & Finance Monash University	1987	Sarjana Administrasi Fiskal Universitas Indonesia Bachlors Degree of Fiscal Administation Indonesia University

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Direktur SDM dan Umum PT PELNI (Persero) Director of HR and General Affairs PT PELNI (Persero)	2015 – 2016	Chief Auditor Jakarta BRI Jakarta Chief Auditor BRI
2016 – 2017	Direktur Komersial PTPN VII Director of Commercial PTPN VII	2012 – 2015	Kepala Divisi HC BRI Head of Human Capital Division BRI

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

24 Januari 2017 January 24, 2017	Executive Leadership Program (ELP -1) Executive Leadership Program (ELP -1)	

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik.
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33/POJK.04/2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company.

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama.
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder.

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

IPC
PORT OF TANJUNG PELIOPAS
KM. CAMARA

03

PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile

PT. PELNI
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA
PT.PELNI

IDENTITAS PERUSAHAAN
Corporate Identity

Nama Perusahaan Company Name	Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia	
Nama Panggilan Called Name	PELNI	
Bidang Usaha Line of Business	Pelayaran	Shipping
Badan Hukum Legal Entity	Perseroan Terbatas	Limited Liability Company
Status Perusahaan Company Status	Badan Usaha Milik Negara (BUMN)	State-Owned Enterprise (SOE)
Tanggal Pendirian Date of Establishment	28 April 1952	April 28, 1952
Tanggal Operasi Date of Operation	28 April 1952	April 28, 1952
Dasar Pendirian Establishment Deeds	Akta pendirian No. 92 tanggal 28 April 1952 yang dibuat dihadapan Raden Kadiran Notaris di Jakarta.	Establishment Deeds No. 92 dated April 28, 1952 drafted before Raden Kadiran Notary in Jakarta.
Kepemilikan Saham Shares Ownership	100% Pemerintah Indonesia	100% owned by The Republic of Indonesia Government
Modal Dasar Authorized Capital	Rp13.000.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Subscribed and Fully Paid-in Capital	Rp7.629.900.000.000	
NPWP NPWP	01.001.637.6-093.000	
TDP TDP	09.05.1.50.37082.	
SIUP SIUP	BXXV-845/AL.58	
Jumlah Karyawan Total Employees	4.563 (2016) / 4.436 (2017)	
Alamat Perusahaan Address	Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta Pusat 10130 T. (021) 6334342 F. (021) 63854130 E. infopelni162@pelni.co.id **www.pelni.co.id**	

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN

Company Brief History

Sejarah berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Latar belakang pendirian Yayasan PEPUSKA diawali dari penolakan pemerintah Belanda atas permintaan Indonesia untuk mengubah status maskapai pelayaran Belanda yang beroperasi di Indonesia, N.V. K.P.M *(Koninklijke Paketvaart Matschappij)* menjadi Perseroan Terbatas (PT). Pemerintah Indonesia juga menginginkan agar kapal-kapal KPM dalam menjalankan operasi pelayarannya di perairan Indonesia menggunakan bendera Merah Putih. Pemerintah Belanda dengan tegas menolak semua permintaan yang diajukan oleh Pemerintah Indonesia.

Dengan modal awal 8 (delapan) unit kapal dengan total *tonage* 4.800 DWT *(death weight ton),* PEPUSKA berlayar berdampingan dengan armada KPM yang telah berpengalaman lebih dari setengah abad. Persaingan benar-benar tidak seimbang ketika itu, karena armada KPM selain telah berpengalaman, jumlah armadanya juga lebih banyak serta memiliki kontrak-kontrak monopoli. Akhirnya pada 28 April 1952 Yayasan PEPUSKA resmi dibubarkan.

Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Akta Notaris Nomor 92 tahun 1952.

Dalam perkembangannya, PT PELNI (Persero) tidak hanya melayani jasa transportasi kapal laut, Kami pun memberikan layanan paket wisata bahari ke pulau-pulau yang memiliki keindahan bawah laut dan pemandangan alam yang mengagumkan, seperti Kepulauan Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Pulau Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan dan Tomini.

Pada tahun 2015, PT PELNI (Persero) dipercaya Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Establishment history of PT PELNI (Persero) was initiated after the issuance of Joint Decree between Minister of Transportation and Minister of Public Works on September 5, 1950 declaring establishment of Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Background of PEPUSKA Foundation establishment was begun when the Government of Netherlands rejected request from Indonesia to change status of N.V. K.P.M (Koninklijke Paketvaart Matschappij), a Netherlands shipping company operated in Indonesia into a Perseroan Terbatas (PT)/ Limited Liability Company. The Government of Indonesia also wished the vessels of KPN to use Red and White flag during their shipping operations in Indonesian water territory. The Government of Netherland firmly rejected all appeals submitted by the Republic of Indonesia Government.

With initial capital of 8 (eight) units vessel with total tonange of 4,800 DWT (death weight ton), PEPUSKA sailed side to side with KPM fleets with more than half of century experience. At that time, this was such an unbalanced competition not only due to bigger fleets but also monopoly contracts. Finally on April 28, 1952, Pepuska Foundation was officially dismissed.

At the same time, PT PELNI (Persero) was established pursuant to Minsiter of Transportation Decree Number M.2/1/2 dated February 28, 1952 and Number A.2/1/2 dated April 19, 1952 and Notarial deeds Number 92 of 1952.

During its progress, PT PELNI (Persero) does not only provide marine vessels transportation service but also marine tourisme package to islands with beautiful underwater and landscape such as Raja Ampat, Wakatobi, Banda Neira, Komodo, Takabonerate, Karimun Jawa, Bunaken, Anambas, Derawan and Tomini Islands.

In 2015, PT PELNI (Persero) was mandated by the RI Government to serve as operator for Perintis, Tol Laut and Cattle Ship which covering entire Indonesian territory.

RIWAYAT SINGKAT PERUSAHAAN
Company Brief History

Pada 2016, PT PELNI (Persero) meningkatkan kapasitas armadanya dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal.

Pada tahun 2017, PT PELNI (Persero) menetapkan Tata Nilai *(Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive),* Budaya Perusahaan (Peduli, Ekselen, Inovasi) dan Perilaku "JUARA" (Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat).

Sejak awal pendirian di tahun 1952 hingga 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) belum pernah melakukan pergantian nama.

In 2016, PT PELNI (Persero) increased fleets capacity by operating 80 (eighty) vessels.

In 2017, PT PELNI (Persero) established Value (Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive), Corporate Culture (Care, Excellent, Innovation) and Behavior "JUARA" (Honest, Excellent, Adaptable, Friendly, Accurate).

Since early establishment in 1952 up to December 31, 2017, PT PELNI (Persero) has never changed name of the Company.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN

The Company Milestones

1950

Terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dan Menteri Pekerjaan Umum tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

Issuance of Joint Decree (SKB) between Minister of Transportation and Minister of Public Works dated September 5, 1950 declaring Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PEPUSKA).

1952

PT PELNI (Persero) resmi didirikan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan R. Djuanda No. 2/1/2 tanggal 23 Februari 1952.

PT PELNI (Persero) was officially established under Minister of Transportation R. Djuanda Decree Number 2/1/2 dated February 23, 1952.

1953

Perubahan status hukum PT PELNI (Persero) menjadi Perusahaan Negara (PN) dan menjadikan PT PELNI (Persero) sebagai Agen Pemerintah *(Government Agency)*.

PT PELNI (Persero) legal entity was changed into Perusahaan Negara (PN)/State Company and brought PT PELNI (Persero) as Government Agency.

1975

Perubahan status hukum PN PELNI menjadi Perusahaan Perseroan berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 17 Maret 1973 dan Akta Notaris Nomor 31/1975.

PN PELNI legal entity was changed into Perusahaan Perseroan under Government Regulation Number March 17, 1973 and Notarial Deeds Number 31/1975.

1981

Penyerahan pengelolaan pelayaran perintis kepada PT PELNI (Persero) dengan mengoperasikan 35 unit Kapal Perintis.

Delegation of Perintis shipping management to PT PELNI (Persero) by operating 35 units Perintis ship.

JEJAK LANGKAH PERUSAHAAN
The Company Milestones

2014

PT PELNI (Persero) mulai menggelar paket wisata *Let's Go* dan *Event on Board.*

PT PELNI (Persero) launched Let's Go and Event on Board travel package.

2015

Penunjukkan PT PELNI (Persero) oleh Pemerintah RI sebagai operator Kapal Perintis, Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak yang menjangkau di wilayah Indonesia.

Appointment of PT PELNI (Persero) by The Republic of Indonesia Government as operator of Perintis, Tol Laut and Cattle vessels covering territory of Indonesia.

2016

PT PELNI (Persero) meningkatkan kapasitas armadanya dengan mengoperasikan 80 (delapan puluh) kapal.

PT PELNI (Persero) increased fleets capacity by operating 80 (eighty) vessels.

2017

PT PELNI (Persero) menetapkan Tata Nilai *(Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive),* Budaya Perusahaan (Peduli, Ekselen, Inovasi) dan Perilaku "JUARA" (Jujur, Unggul, Adaptasi, Ramah, Akurat).

PT PELNI (Persero) established Value (Integrity, Continuous Improvement, Customer Focus, Competitive), Corporate Culture (Care, Excellent, Innovation) and Behavior "JUARA" (Honest, Excellent, Adaptable, Friendly, Accurate).

BIDANG USAHA
Line of Business

KEGIATAN USAHA PERSEROAN MENURUT ANGGARAN DASAR

Sesuai Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perseroan yaitu untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijaksanaan dan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya serta pembangunan di bidang usaha pelayaran dalam dan luar negeri untuk angkutan penumpang, hewan dan barang dalam bentuk unit curah kering atau cair dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

KEGIATAN USAHA YANG DIJALANKAN

Sesuai dengan maksud dan tujuan pendirian Perseroan, kegiatan usaha yang diselenggarakan oleh PT PELNI (Persero) adalah:

a. Kegiatan usaha jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
b. Kegiatan usaha jasa keagenan usaha pelayaran.
c. Kegiatan usaha jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan rede dan ekspedisi/*forwarding.*
d. Kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok/reparasi kapal.
e. Kegiatan *charter* dan *broker* kapal.
f. Kegiatan jasa konsultan, pendidikan, pelatihan dan pelayanan kesehatan.

BUSINESS ACTIVITIES BASED ON ARTICLE OF ASSOCIATION

Pursuant to Articles of Association, purpose and objectives of the Company are to participate in implementing and supporting policy and program of the Government in economy sector and national development generally as well as development in domestic and overseas shipping business for passenger, cattle and cargo as liquid or dry bulk units by implementing Limited Liability Company.

BUSINESS ACTIVITIES OF THE COMPANY

According to the purpose and objective of the Company's establishment, business activity that is operated by PT PELNI (Persero) is among others:

a. Passenger and cargo transportation business with scheduled and on demand (charter) shipping network.
b. Shipping agency service business.
c. Terminal, warehouse, rede transportation and expedition/ forwarding operation services.
d. Vessels maintenance and ship docking/reparation services.
e. Ship charter and broker services.
f. Consulting, education, training and health services.

PRODUK DAN JASA
Products And Services

JASA PERKAPALAN

Kapal *2 in 1*

Kapal jenis *2 in 1* adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal *2 in 1* ini memiliki kapasitas 1583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe *2 in 1* ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

Kapal jenis *2 in 1* ini beroperasi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama di pulau-pulau kecil dan terdepan di Indonesia, yang tidak hanya memerlukan angkutan penumpang, tapi juga angkutan barang-barang kebutuhan pokok maupun barang-barang lain seperti pakaian, *furniture* hingga kendaraan bermotor.

Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis *3 in 1* adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan mobil sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis *3 in 1,* yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan mobil. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

Kemampuan kapal *3 in 1* PT PELNI (Persero) dalam mengangkut kontainer dan kendaraan roda empat, secara langsung berkontribusi dalam mendistribusikan kebutuhan pokok di wilayah Indonesia bagian timur yang dipasok dari kota-kota besar bagian barat seperti Jakarta, Surabaya dan Makassar.

Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, kami menyediakan kapal barang untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dan KM Caraka Jaya Niaga– 32 dengan kapasitas muat yang berbeda-beda. Ketiga kapal ini dibangun di Galangan PT PAL Surabaya, dengan spesifikasi:

1. KM Caraka Jaya Niaga III – 4 dibangun pada tahun 1988 memiliki DWT 3000 T/M.
2. KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dibangun pada tahun 1986 dengan DWT 3650 T/M.
3. KM Caraka Jaya Niaga III – 32 dibangun pada tahun1993 dengan DWT 3650 T/M.

SHIPPING SERVICES

2 in 1 Ship

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid-2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

The 2 in 1 ship is operated to serve public needs, primarily in small and outer islands of Indonesia, who not only requiring passenger vessels but also transportation for groceries and other commodities such as apparel, furniture and vehicle.

Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and car simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type, the multipurpose ships for carrying container at the front and back sides as well as passenger and car. The ships had been modified at Sembawang Shipyard, Singapore.

Capacity of PT PELNI (Persero)'s 3 in 1 ships in carrying containers and four-wheels vehicle contribute directly in distributing groceries to Eastern Indonesia that are supplied from western major cities such as Jakarta, Surabaya and Makassar.

Cargo Ship

For logistic distirbution across Indonesian region, we provide cargo ship to carry large-volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

PT PELNI (Persero) has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga– 32 with different capacities. These three ships were built at Shipyard of PT PAL Surabaya with specification, as follows:

1. KM Caraka Jaya Niaga III – 4 that was built in 1988 with DWT of 3000 T/M.
2. KM Caraka Jaya Niaga III – 22 that was built in 1986 with DWT of 3650 T/M.
3. KM Caraka Jaya Niaga III – 32 that was built in with DWT of 3650 T/M.

PRODUK DAN JASA
Products And Services

Kapal Tol Laut

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada:

- Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Presiden No. 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan No. PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 17 Tahun 2017 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation).*

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 7 (tujuh) armada Kapal Tol Laut yaitu KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Logistik Nusantara I, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III – 32 dan KM Caraka Jaya III – 4.

Jenis Muatan Kapal Tol Laut:

Jenis muatan Kapal Tol Laut terdiri dari 2 (dua) kategori barang yaitu Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting. Merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 Tentang Penetapan Dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, kategorisasi muatan Kapal Tol Laut dijelaskan sebagai berikut:

Tol Laut Ship

Tol Laut Ship is operated referring to:

- Presidential Decree No. 70 of 2017 regarding Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.
- Presidential Decree No. 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Primary Need Goods and Valuable Goods.
- Minister of Transportation Regulation No. PM. 4 of 2016 as Amendment to Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 regarding Public Service Obligation for Marine Cargo.
- Minister of Transportation Regulations No. 17 of 2017 regarding Marine Cargo Transportation Tariff in Public Service Obligation Implementation.

PT PELNI (Persero) currently operates 7 (seven) Tol Laut ships fleet, among others, KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Logistik Nusantara I, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III – 32 and KM Caraka Jaya III – 4.

Type of Tol Laut Ship Cargo:

Type of Tol Laut Ship Cargo consists of 2 (two) cargo categories, that are groceries and valuable goods. Pursuant to Presidential Regulation Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods, classification of Tol Laut cargo is explained below:

Barang Kebutuhan Pokok Groceries	Barang Penting Valuable Goods
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Pertanian : Agricultural groceries: 1. Beras | Rice 2. Kedelai bahan baku tahu dan tempe Cabai Soy as material for tofu and soybean cake 3. Cabai | Chili 4. Bawang Merah | Onion	1. Benih yaitu benih padi, jagung, dan kedelai Seeds, including rice, corn and soy 2. Pupuk Fertilizer 3. Gas Elpiji 3 (tiga) kilogram Elpiji Gas 3 (three) kilogram 4. Triplek Plywood 5. Semen Cement 6. Besi baja konstruksi Construction Steel 7. Baja ringan Light steel
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Industri : Industrial groceries: 1. Gula | Sugar 2. Minyak Goreng | Oil 3. Tepung Terigu | Wheat Flour	
Barang Kebutuhan Pokok Hasil Peternakan dan Perikanan: Livestock and Fisheries product groceries: 1. Daging Sapi | Meat 2. Daging ayam ras | Chicken 3. Telur ayam ras | Eggs 4. Ikan segar yaitu bandeng, kembung dan tongkol/tuna/cakalang Fresh fish, such as milkfish, mackarel and tuna/mackarel tuna/skipjack tuna	

Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang – Waingapu – Tanjung Priok – Cirebon – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. Dasar hukum pengelolaan Kapal Perintis, antara lain:

1. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
2. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.
3. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/1/DJPL-15 Tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/18/DJPL-15 Tentang Jaringan Trayek Dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2016 Serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya Tanggal 30 November 2015.

Saat ini, PT PELNI (Persero) mengoperasikan 46 (empat puluh enam) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

FASILITAS KAPAL

PT PELNI (Persero) menyediakan tenaga kerja profesional dan fasilitas terbaik demi kenyamanan penumpang dalam melakukan perjalanan menggunakan armada PELNI, meliputi:

1. Fasilitas yang umum yang tersedia di kapal:
   a. *Live Music;*
   b. *Charging Spot;*
   c. *Free* Kasur Ekonomi;
   d. Toilet;
   e. *Play Ground;*
   f. *Mini Gym;*
   g. *Jogging Track;*
   h. *Mini Theatre;*
   i. *Sun Bathing Area;*
   j. Mushola;
   k. Klinik;
   l. *Cafetaria;*

Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 1 (one) Cattle Ship, KM Camara Nusantara I with route of Kupang – Waingapu – Tanjung Priok – Cirebon – Kupang. The operation of cattle ship aims to help the Government implements lower meat price and increase welfare of the breeders in domestic cow breeding center.

Perintis Ship

Perintis ship flet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Tol Laut and Cattle ships. Legal Frameworks of Perintis Ship management are among others:

1. Presidential Regulation Number 2 of 2016 regarding State-Owned Perintis Ship Public Service Obligation Implementation.
2. The Republic of Indonesia Minister of Transportation Regulation Number PM. 6 of 2016 regarding State-Owned Perintis Ship Public Service Obligation Implementation.
3. Marine Transportation General Directorate Decree Number Al.108/7/1/DJPL-15 as the Second Amendment on Marine Transportation General Directorate Decree Number Al.108/5/18/DJPL-15 regarding Route Network and Requirement for Perintis Shipping Vessel Budget year 2016 and Implementation Provisions dated November 30, 2015.

PT PELNI (Persero) currently operates 46 (forty six) Perintis Ships covering remote area across Indonesia.

SHIP FACILITIES

PT PELNI (Persero) provides professional personnel and excellent facilities to ensure convenience of our passenger in using PELNI fleets, among others:

1. General Ship Facilities:
   a. Live Music;
   b. Charging Spot;
   c. Free Economic Mattress;
   d. Toilet;
   e. Play Ground;
   f. Mini Gym;
   g. Jogging Track;
   h. Mini Theatre;
   i. Sun Bathing Area;
   j. Mosque;
   k. Clinic;
   l. Cafetaria;

PRODUK DAN JASA
Products And Services

m. Wifi;
n. BTS on the ship;
o. Hot Water;
p. Cleaning Service;
q. TV.

2. Fasilitas permakanan:
   a. Restoran (Ruang Makan);
   b. *Bread Toaster*;
   c. *Combi Oven*;
   d. Menu Makan (bento *box*);
   e. *Additional* Suplemen (Susu UHT, biskuit kemasan dan jus botol);
   f. Air Minum dalam Kemasan Branding PELNI.

3. Event dalam kapal:
   a. *Meeting on Board;*
   b. *Tour on the ship;*
   c. *Entertainment;*
   d. *New Year Eve's Party;*
   e. *Solar Eclipse on Board;*
   f. *Photo Shoot;*
   g. *Event Charity;*
   h. *Floating Hotel.*

m. Wifi;
n. BTS on the ship;
o. Hot Water;
p. Cleaning Service;
q. TV.

2. Dining Facility:
   a. Restaurant (Dining Room);
   b. Bread Toaster;
   c. Combi Oven;
   d. Food menu (bento box);
   e. Additional Supplements (UHT milk, biscuits and bottled juice).
   f. Mineral Water in PELNI Branding Packaging.

2. Event On Board:
   c. Meeting on Board;
   d. Tour on the ship;
   e. Entertainment;
   f. New Year Eve's Party;
   g. Solar Eclipse on Board;
   h. Photo Shoot;
   i. Charity Event;
   j. Floating Hotel.

MANAJEMEN KESELAMATAN

1. Regulasi IMO:
   - SOLAS 1974 *Consolidated* 2004 (*Chapter* IX: ISM Code)
   - MARPOL 78 Consolidated 2006
   - STCW 95 (KM. 70 tahun 1998, PP No. 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan)
   - COLREG 72 (*Collision Regulation* tahun 72)
2. *International Load Line Convention* (ILLC) 1966

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Keagenan Kapal & *Tour*

1. Jenis Layanan Keagenan:
   a. *Clearance in & out;*
   b. *Bunker, Fresh Water, Provision Supply;*
   c. *Crew & Guest Attendance;*
   d. *Protecting Agent;*
   e. *Custom & Immigration Clearance;*
   f. Layanan *Sea Pollution;* dan
   g. Layanan *Garbage Removal.*

2. *Tour* Paket Wisata Bahari:
   a. Wisata Karimunjawa;
   b. Wisata Banda Neira;
   c. Wisata Pulau Komodo;
   d. Wisata Raja Ampat;
   e. Wisata Wakatobi;
   f. Wisata Kepulauan Seribu;
   g. Wisata Selat Lembeh *(Coming Soon);* dan
   h. Wisata Derawan *(Coming Soon).*

Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Galangan Surya Surabaya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin space dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Bisnis Properti

Persewaaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaaan toko dan *cafe* di atas kapal.

SAFETY MANAGEMENT

1. IMO Regulation:
   - SOLAS 1974 Consolidated 2004 (Chapter IX: ISM Code)
   - MARPOL 78 Consolidated 2006
   - STCW 95 (KM. 70 of 1998, PP No. 7 of 2000 on Marine)
   - COLREG 72 (Collision Regulation in 72)
2. International Load Line Convention (ILLC) 1966

STRATEGIC BUSINESS UNIT (SBU)

Ship Agency & Tour

1. Type of Agency Services:
   a. Clearance in & out;
   b. Bunker, Fresh Water, Provision Supply;
   c. Crew Attendance;
   d. Protecting Agent;
   e. Custom Immigration Clearance;
   f. Sea Pollution Service; and
   g. Garbage Removal Service.

2. Marine Tourism Packages:
   a. Karimunjawa Tours;
   b. Banda Neira Tours;
   c. Komodo Island Tours;
   d. Raja Ampat Tours;
   e. Wakatobi Tours;
   f. Seribu Islands Tours;
   g. Selat Lembeh Tours (Coming Soon); and
   h. Derawan Tours (Coming Soon).

Bahtera Hotel

Hotel that has meeting and training center facilities equipped with meeting room facility that has capacity over 200 pax as well as other supporting facilities.

Surya Surabaya Shipyard

Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500-type PELNI ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), strategic projection to guarantee docking and repair space for all vessels (including large ships) that are operated by PT PELNI (Persero).

Property Business

Rent office space from PT PELNI (Persero)'s building assets spread across branch office of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes onboard advertising space rental on PELNi ships as well as onboard store and café rental.

VISI, MISI, TATA NILAI, BUDAYA PERUSAHAAN & PERILAKU

Vision, Mission & Corporate Culture & Behavior

PENETAPAN VISI DAN MISI

Visi dan Misi PT PELNI (Persero) telah disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 81A/HKO.01/DIR/VI-2010 tentang Penetapan Visi dan Misi Perusahaan, serta dievaluasi oleh Dewan Komisaris secara periodik.

ESTABLISHMENT OF VISION AND MISSION

Vision and Mission of PT PELNI (Persero) have been authorized by Board of Directors Decree No. 81A/HK0.01/DIR/VI-2010 about the Corporate Vision and Mission establishment, also being evaluated periodically by the Board of Commissioners.

VISI
Vision

"Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Pilihan Utama Pelanggan"

"To Become a Strong Shipping Company and Customers Preferred Choice"

Tangguh:

1. Pertumbuhan perusahaan maksimal *(company's value growth).*
2. *Center of Excellence* usaha pelayaran nasional: SDM, Produksi, Distribusi, Pelayanan, dan Keselamatan & Kesehatan Lingkungan.
3. Memiliki Jaringan Trayek Nusantara yang optimal

Integrity:

1. Maximum growth of the company (company's value growth)
2. Centre of excellence of national marine: human resources, productions, distributions, services, environment safety and health.
3. Having optimum archipelago's route networks.

Pilihan Utama Pelanggan:

1. Fokus pada pelanggan untuk memberikan pelayanan prima.
2. *Load Factor* Minimum 90% untuk penumpang dan 90% untuk barang.

Customer's preferred choice:

1. Focus on customers, in order to give best services.
2. Load factors, minimum 90% for passengers and 90% for Goods.

MISI
Mission

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksesibilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Meningkatkan nilai Perusahaan melalui kreativitas, inovasi, dan pengembangan kompetensi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat (Stakeholders), dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* (GCG).

1. Managing and developing marine transportation to ensure public accessibility to support the realization of National Outlook (Wawasan Nusantara).
2. Raising revenue contribution for the country, employees, as well as taking part on the development of environment and public services.
3. Enhancing corporate value throughout creativity, innovation and human capital competency development.
4. Operating fair business by promoting mutual beneficiary principle for all stakeholders and implementing the Good Corporate Governance (GCG).

PENETAPAN TATA NILAI, BUDAYA PERUSAHAAN DAN PERILAKU

Tata Nilai, Budaya Perusahaan dan Perilaku Perseroan disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 11.30/02/SK/HKO.01/2017 Tentang Penetapan Tata Nilai Utama, Budaya Perusahaan dan Perilaku di Lingkungan PT PELNI (Persero).

ESTABLISHMENT OF VALUES, CORPORATE CULTURE AND BEHAVIOR

Values, Corporate Culture ulture and Behavior of the Company is ratified in Director Letter Decree No. 11.30/ 02/SK/HKO.01 /2017 On Stipulation of The Company's Main Values, Corporate Culture and Behavior at PT PELNI (Persero) environment..

TATA NILAI
Values

Integrity Integritas	Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu bertindak jujur, disiplin, komitmen, konsisten antara pikiran, perkataan dan tindakan, berani menyatakan kebenaran dan dapat dipercaya sesuai ketentuan Perusahaan dan standar etika. Tata Nilai Utama ***"Integity"*** diwujudkan dengan Perilaku **"Jujur".** Every member of PT PELNI (Persero) always act honestly, discipline, commitment, consistent between thoughts, words and actions, dare to declare the truth and be trustworthy in accordance with Company requirements and ethical standards. **"Integrity"** of Main Values is manifested by **"Honest"** Behavior.
Continuous Improvement Peningkatan Berkelanjutan	Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu semangat melakukan perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan nilai tambah dan selalu menjadi yang terbaik. Tata Nilai Utama "***Continuous Improvement"*** diwujudkan dengan Perilaku **"Unggul dan Adaptasi".** Every member of PT PELNI (Persero) always has the spirit to make continuous improvement for increasing the additional value and always do the best. The **"Continuous Improvement"** of Main Values is manifested by **"Excellence and Adaptation"** behavior.
Customer Focus Fokus pada Pelanggan	Setiap Insan PT PELNI (Persero) selalu berorientasi pada kepentingan pelanggan dan berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan. Tata Nilai Utama ***"Customer Focus"*** diwujudkan dengan Perilaku **"Ramah".** Every member of PT PELNI (Persero) is always oriented to the interests of customers and committed to provide the best service for customers. The **"Customer Focus"** of Main Values is manifested by **"Friendly"** Behavior
Competitive Kompetitif	Setiap Insan PT PELNI (Persero) mampu berkompetisi dalam skala nasional maupun regional, mendorong pertumbuhan melalui investasi, membangun budaya sadar biaya dan menghargai kinerja. Tata Nilai Utama ***"Competitive"*** diwujudkan dengan Perilaku **"Akurat".** Every member of PT PELNI (Persero) is able to compete in national and regional scale, encourage growth through investment, and build a cost conscious culture and appreciating performance. The **"Competitive"** of Main Values is manifested by **"Accurate"** Behavior.

VISI, MISI, TATA NILAI, BUDAYA PERUSAHAAN & PERILAKU
Vision, Mission, Values, Corporate Culture & Behavior

BUDAYA PERUSAHAAN
Corporate Culture

Untuk mendukung terwujudnya visi dan misi perusahaan, maka ditetapkan Budaya Perusahaan yang harus selalu dipelajari, dipahami, dihayati dan dilaksanakan oleh seluruh Insan PT PELNI (Persero) agar menjadi karakter atau kebiasaan seluruh insan PT PELNI (Persero). Budaya Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah "PELNI" yang terdiri dari :

To support the realization of the company's vision and mission, and has been settled that the Corporate Culture must be learned, understood, lived and implemented by all members of PT PELNI (Persero). The Corporate Culture of PT PELNI (Persero) is as its "PELNI" slogan which consists of:

Peduli Care	Setiap Insan PELNI mampu bekerja tuntas, cepat tanggap dan kepedulian tinggi terhadap keselamatan, kesehatan kerja di lingkungan internal & eksternal perusahaan, mampu untuk melayani dengan tulus dan ramah serta bersikap bijaksana dalam menghadapi keluhan pelanggan internal & eksternal perusahaan. Every member of PELNI is able to work completely, quick response and high care towards Safety, occupational health at internally & external environment of the company , and is able to serving sincerely and kindly and being wise in dealing with internal & external complaints of the company.
Ekselen Excellent	Setiap Insan PELNI mampu bekerja keras, tepat, akurat & berintegritas tinggi dengan melaksanakan amanah yang memberikan manfaat dan kinerja yang terbaik, selalu mengambil keputusan berdasarkan prinsip-prinsip bisnis yang kompetitif, dapat diandalkan dengan mencapai standar kualitas produk & jasa yang berdaya saing tinggi melampaui harapan pelanggan. Every member of PELNI is able to work hard, appropriate, accurate & high integrate by carrying out the trust that provides the best benefits and performance, always take decisions based on competitive business principles, reliable by achieving the product quality standard & high competitive services beyond customer expectations.
Inovasi Innovation	Setiap Insan PELNI selalu berinisiatif tinggi, bersifat kreatif dan proaktif mencari peluang-peluang baru dan tantangannya, bertanggung jawab penuh untuk selalu berupaya meningkatkan daya saing tinggi berkelanjutan terhadap diri, perusahaan, dan lingkungan agar menjadi Pemenang serta mampu bersinergi luas secara optimal. Every member of PELNI always has high initiative, creative and proactive to find new opportunities and challenging, be responsible to make serious effort for improving high competitiveness to self, company and environment in order to be a Winner and able to synergize wide optimally.

PERILAKU
Behavior

Perilaku yang merupakan acuan bertindak yang harus dipatuhi seluruh Insan PT PELNI (Persero) dalam melaksanakan aktivitas kerja sehari-hari, adalah sebagai berikut:

Behavior is a reference for action which must be obeyed by all members of PT PELNI (Persero) to daily working activities, are as follows:

- **J** — **Jujur** | Honest
- **U** — **Unggul** | Excellent
- **A** — **Adaptasi** | Adaptable
- **R** — **Ramah** | Friendly
- **A** — **Akurat** | Accurate

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure

Struktur Organisasi disahkan dalam Surat Keputusan Direksi No. 11.06/01/SK/HKO.01/2017 Tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 Tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).

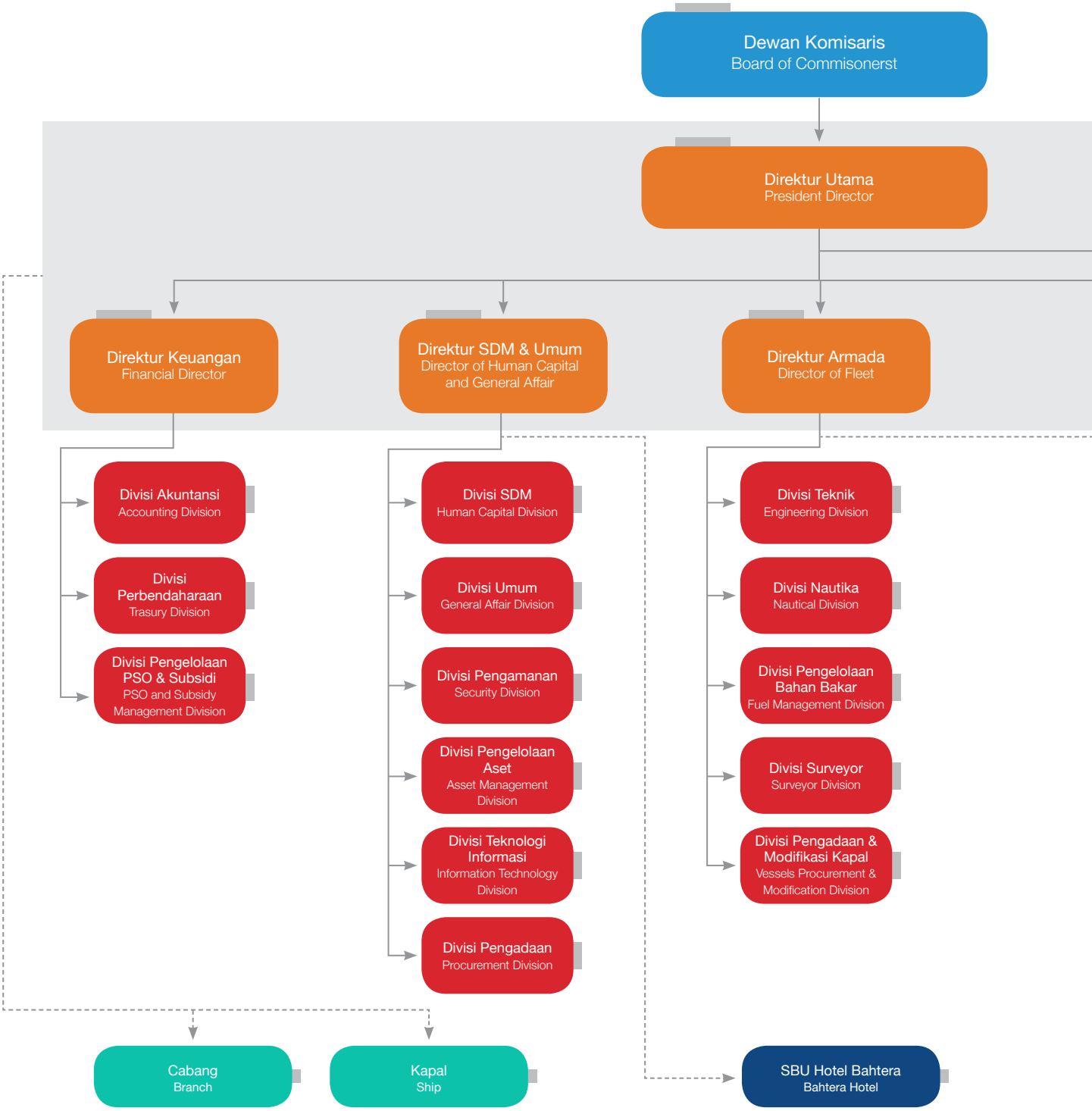

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure

Organization structure is validated under Board of Directors Decree Number 11.06/01/SK/HKO.01/2017 as Amendment to Board of Directors Decree No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 regarding Organization Structure, Main Duty and Function of (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

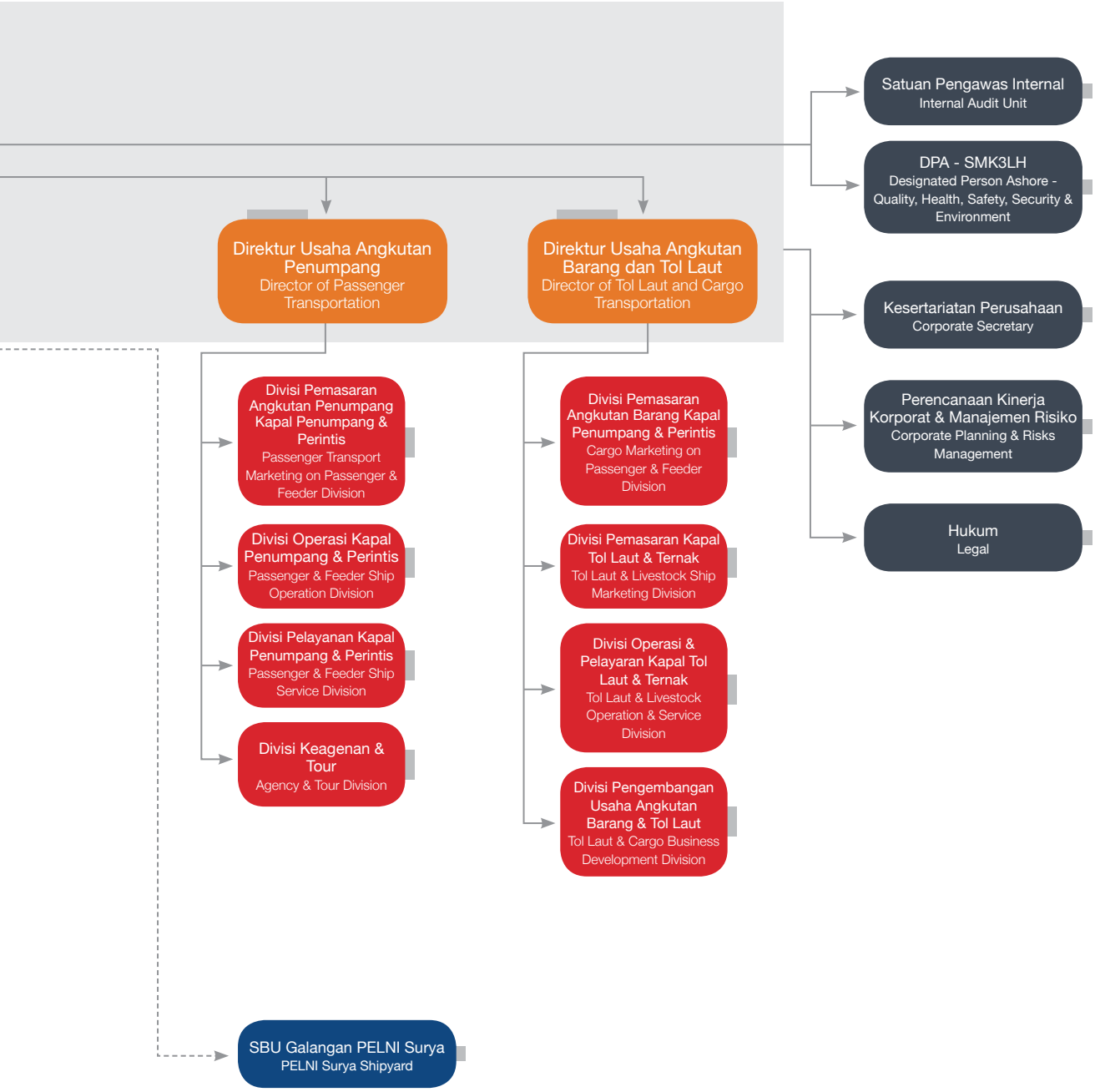

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure

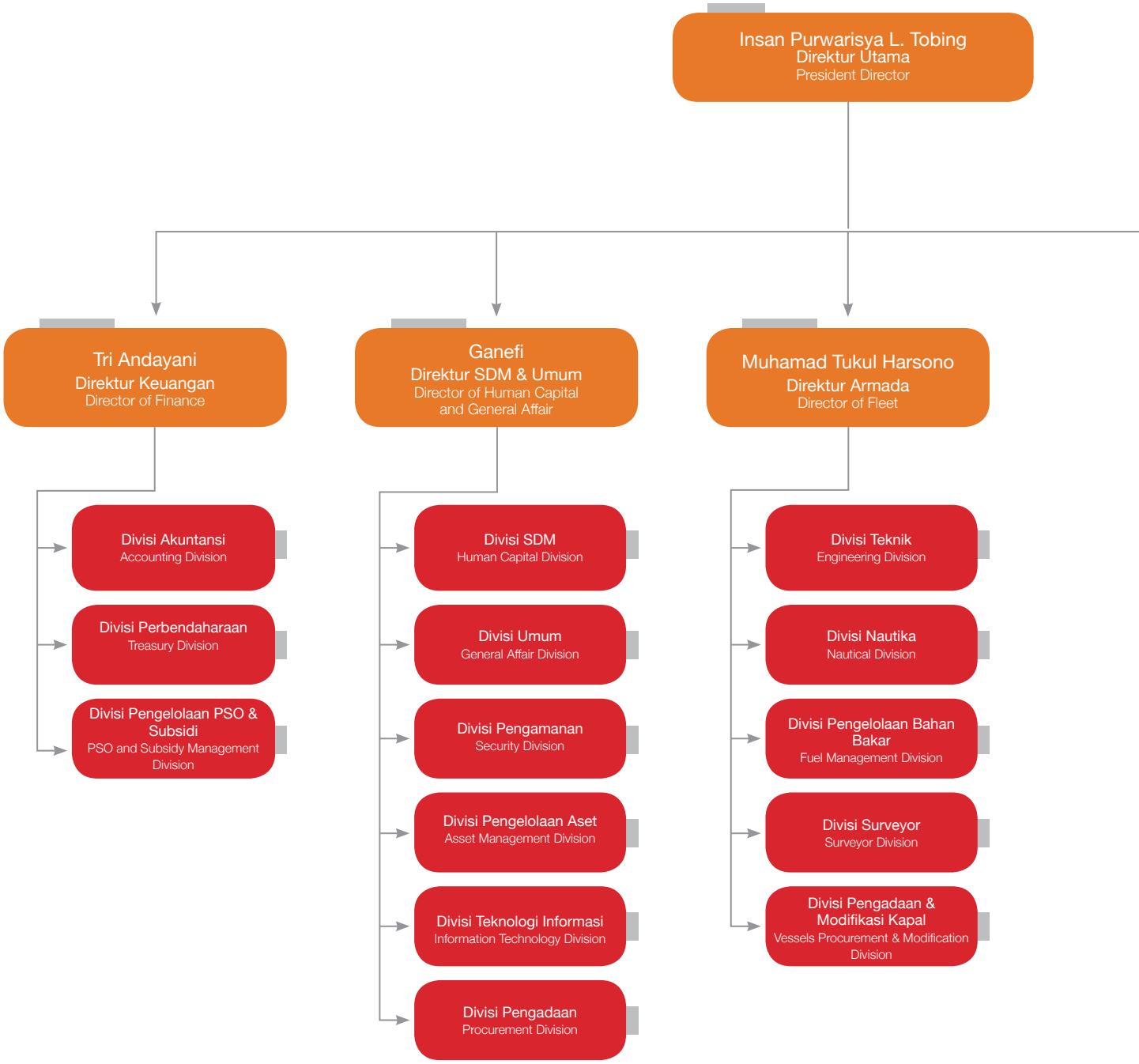

STRUKTUR ORGANISASI
Organization Structure

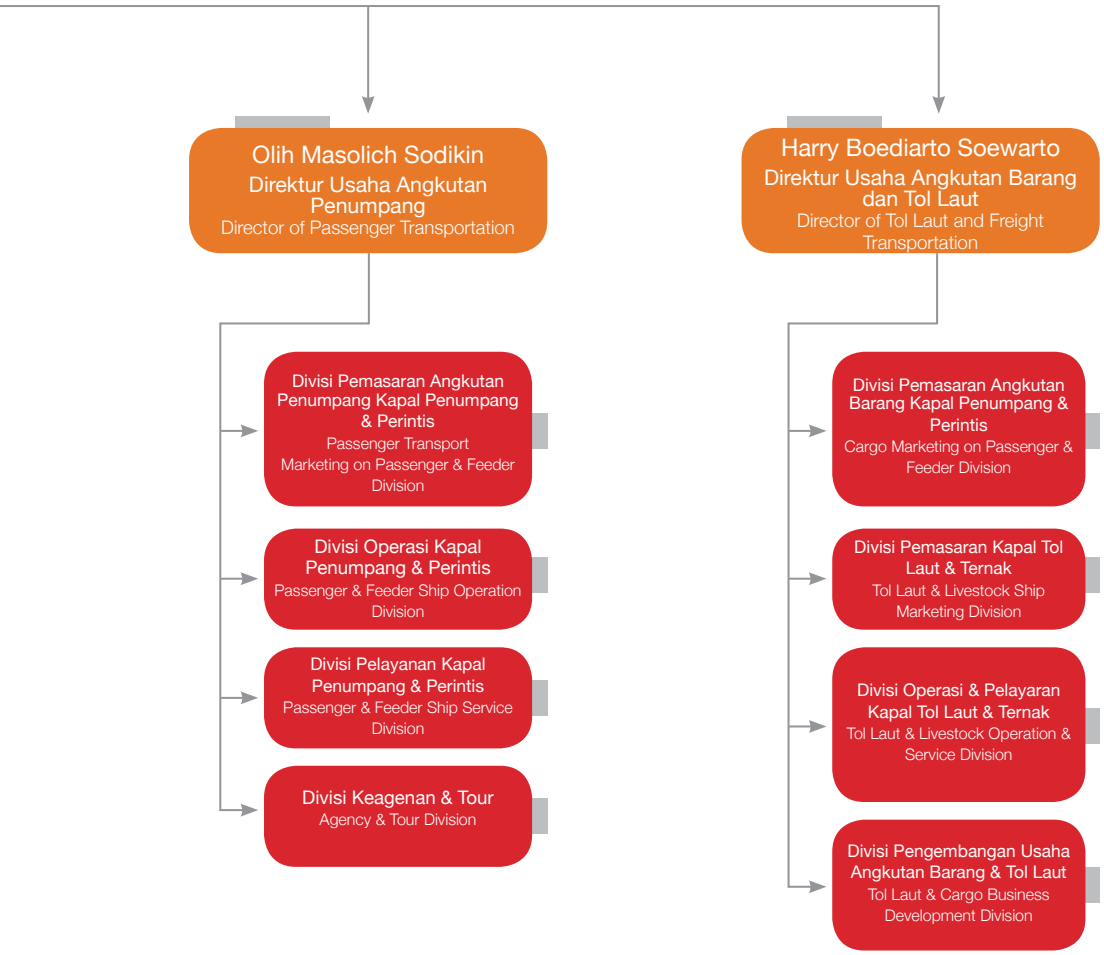

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan di tahun 2017, PT PELNI (Persero) melakukan fokus pada *Competency Assessment and Development serta Corporate Culture Development.”*

In line with Corporate Long-Term Plan, in 2017, PT PELNI (Persero) focused on Competency Assessment and Development as well as Corporate Culture Development.”

KEBIJAKAN PENGELOLAAN SDM 2017

Survival 2015

- Turn Around
- Retrenchment
- Main Business Focus
- Financial Restructuring
- Organizational Restructuring
- Asset Optimalization

Growth 2018 - 2019

- Market Development
- New Business Development
- Culture Strengthening
- Production Facility Development
- Operational Excellence

HR MANAGEMENT POLICY 2016

Consolidation 2016 - 2017

- Competency Assessment and Development
- Customer Development
- Corporate Culture Development
- Production Facility Improvement
- Strategic Alliances

Sejalan dengan Rencana Jangka Panjang Perusahaan di tahun 2017, PT PELNI (Persero) melakukan fokus pada *Competency Assessment and Development* serta *Corporate Culture Development.* Berdasarkan hal tersebut dijelaskan bahwa PT PELNI (Persero) sedang mengembangkan kebijakan dan sistem yang mendukung pengelolaan SDM berbasis kompetensi. Di tahun 2017, PT PELNI (Persero) memulai untuk merumuskan tranformasi organisasi, bisnis dan budaya. Struktur Organisasi PT PELNI (Persero) disahkan melalui SK Direksi No: 02.28/02/SK/ HKO.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Direksi No. 08.24/HKO.01/2017 tanggal 24 Agustus 2017 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat di PT PELNI (Persero), serta Surat Keputusan Direksi No. 11.06/01/SK/HKO.01/2017 tanggal 6 November 2017 tentang tentang Struktur Organisasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Selain itu beberapa program kerja unggulan pada tahun buku 2017 telah berhasil dilaksanakan antara lain:

In line with Corporate Long-Term Plan, in 2017, PT PELNI (Persero) focused on Competency Assessment and Development as well as Corporate Culture Development. Based on this consideration, PT PELNI (Persero) is currently policy and system to support developing competency based HR management. In 2017, PT PELNI (Persero) started to formulate transformation of organization, business and culture. Organization Structure of PT PELNI (Persero) is validated under Board of Directors Decree Number 02.28/02/SK/HKO.01/2017 dated on February 28, 2017 as amended by the Board of Directors decision letter no. 08.24/HKO.01/2017 dated on August 24, 2017 about the Organizational Structure, Main Duties and Functions of Head Office at PT PELNI (Persero), and Directors Decree No. 11.06/01/SK/HKO.01/2017 dated on November 6, 2017 regarding to PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Organization Structure. In addition, several excellent work programs in the fiscal year 2017 have been successfully implemented, among others:

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

a. Perumusan tata nilai, budaya Perusahaan dan perilaku JUARA sebagai pedoman perilaku seluruh insan PELNI;
b. Penetapan Peraturan Dinas Awak Kapal (PDAK);
c. Asesmen kompetensi untuk pejabat struktural mulai dari level manajerial utama sampai dengan madya, baik di Kantor Pusat, Cabang dan *Strategic Business Unit* (SBU);
d. Rekrutmen pegawai darat jalur Diploma 3 dan Strata 1 di tiga kota besar di Indonesia yaitu Jakarta, Makassar dan Surabaya;
e. *Review system* manajemen kinerja *(Performance Management System)* dan *merit system;*
f. Program pengembangan berbasis kompetensi melalui *coaching* & pelatihan penjenjangan yang berbasis kompetensi.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, tahun 2017 PT PELNI (Persero) masih dalam tahap awal dalam perumusan kebijakan pengelolaan pegawai yang berbasis kompetensi.

MERIT SYSTEM & PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

Perseroan menerapkan aplikasi *Merit System* sejak tahun 1999 dalam melakukan penilaian atas kinerja pegawai yang bertujuan untuk memperoleh hasil penilaian kinerja individu yang objektif dan transparan. *Merit System* ini diberikan kepada seluruh pegawai yang dilakukan secara berkala dalam rentang waktu 1 (satu) periode penilaian yaitu 6 (enam) bulan sekali atau per semester.

Sejak tahun 2009, PT PELNI (Persero) juga menerapkan program Penilaian Karya Pegawai (PKP). PKP Kelompok telah berjalan dengan baik dan konsisten dengan selalu dilaksanakan penilaian setiap triwulan. Hasil dari perhitungan PKP Kelompok ini setiap triwulan akan dihitung dan akan disahkan dalam sebuah Surat Keputusan Direksi. Surat Keputusan Direksi ini akan menjadi dasar dalam pemberian penghasilan pegawai. Pada tahun 2015 telah dilakukan penyempurnaan dan evaluasi terhadap sistem Penilaian Karya Pegawai, yang pada awalnya dilakukan setiap triwulan menjadi setiap semester dan pembobotan beberapa parameter yang disesuaikan kembali.

Untuk Penilaikan Karya Pegawai Individu baru dilaksanakan semenjak tahun 2012 dan sudah berjalan selama lima tahun. Dalam masa implementasinya, PKP Individu terus mengalami perbaikan dan penyesuaian, baik dari sistem penilaian maupun aplikasi di Sistem Informasi Manajemen SDM. Di tahun 2015 dilakukan evaluasi terhadap paramater dalam sistem Penilaian Karya Pegawai Individu agar dapat

a. The values formulation, corporate culture and JUARA behavior as guidelines for all of PELNI people behavior;
b. Determination of Official Crew Regulations (PDAK)
c. Competence assessment for structural officials is starting from the main managerial level to the middle, either at the Head Office, Branch or Strategic Business Unit (SBU);
d. Land employees recruitment for Diploma 3 and Bachelor degree in three major cities of Indonesia, namely Jakarta, Makassar and Surabaya;
e. Performance management system review and merit system;
f. Competency-based development program through Coaching & competency based training of leveling.

According to aspects that are mentioned above, in 2017, PT PELNI (Persero) was under early phase in the competencybased employee management policy formulation.

MERIT SYSTEM & PERFORMANCE MANAGEMENT SYSTEM

The Company implements Merit System application since 1999 and performs employee performance assessment to generate objective and transparent individual performance assessment result. The Merit System prevails for all employees and is done regularly within 1 (one) assessment period, or 6 (six) months or in every semester.

Since 2009,PT PELNI (Persero) also implement Performance Appraisal (PKP). Appraisal Team has been done very well and consistently through quarter assessment. Result of Appraisal Team assessment will be calculated and submitted in Board of Directors Decree quarterly. The Board of Directors Decree will become the basis for employee remuneration package. In 2015, there were improvement and evaluation on Performance Appraisal system which previously done quarterly to semester and the weight of paramters was also adjusted.

On the other hand, Individual Performance Appraisal has been implemented since 2012 and have been conducted for 5 years. In its implementation, Individual performance appraisal is improving and adjusted in terms of assessment system and application in HR Management Information System. In 2015, the Company evaluated the parameters in Individual Employee Work Assessment to be aligned

diselaraskan dengan *Key Performance Indicator* perusahaan dengan ditambahkan paramater *non-performance*. Hal-hal tersebut di atas tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No: 10.05/2/SK/HKO.01/2015 tentang Penilaian Kinerja Pegawai. Pada tahun 2017, sistem penilaian kinerja pegawai berbasis *Balanced Score Card* (BSC) mulai dicanangkan dengan tujuan untuk menyelaraskan sasaran strategis Perusahaan dan KPI Perusahaan sampai ke level individu sehingga kinerja korporasi dapat tercapai.

Divisi SDM sebagai pelaksana Sistem Manajemen Kinerja atau *Performance Management System* (PMS) memberikan data berupa laporan yang transparan terkait kinerja masing-masing pegawai per semester. Hasil penilaian kinerja tersebut menjadi dasar pertimbangan Manajemen Perusahaan dalam pemberian *reward*, peningkatan remunerasi, pengembangan karir pegawai seperti promosi, rotasi,dan sebagainya. Selain itu, hasil penilaian kinerja ini juga menjadi dasar dalam pemberian *punishment* seperti surat peringatan, penundaan kenaikan pangkat, demosi, mutasi sampai pemutusan hubungan kerja.

REKRUTMEN SDM

Sebagai BUMN yang bergerak dalam sektor pelayaran, Perseroan memberikan kesempatan berkarir yang sama berdasarkan standar kompetensi dan kebutuhan unit kerja di Perseroan. Peluang berkarir di PT PELNI (Persero) memberlakukan asas kesetaraan tanpa adanya diskriminasi gender, agama, suku bangsa maupun hal lainnya.

Sistem rekrutmen ini dilakukan secara transparan dan terbuka, yang didasarkan pada perencanaan kebutuhan pegawai untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan Perusahaan dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Selama tahun 2017, Perseroan melaksanakan 2 (dua) jenis program rekrutmen pegawai PT PELNI (Persero), antara lain:

Rekrutmen Pegawai Darat

Rekrutmen pegawai darat dilakukan bekerja sama dengan PT Gaia Solution dimulai pada bulan Juli sampai dengan November 2017 untuk jalur D3 dan S1 *(Management Trainee)*. Selain merekrut *fresh graduates,* Perusahaan merekrut tenaga profesional di bidang *survey* perbaikan kapal dan pegawai bagian operasi serta administrasi di cabang. Pegawai darat yang direkrut di tahun 2017 adalah sebagai berikut:

with corporate Key Performance Indicators by adding non-performance parameters. This has been stipulated in Board of Directors Decree Number 10.05/2/SK/HKO.01/2015 regarding Employee Performance Assessment In 2017, Balanced Score Card (BSC) based employee performance appraisal system is began to be launched with the aim of streamlining the Company's strategic objectives and KPI Company to individual level so that corporate performance can be achieved.

As executor of Performance Management System (PMS), the HR Division supplied data as transparent performance report ofeach employee in semester basis. The performance assessment report is used by the Management as consdieration of reward, remuneration appraisal, employee career development such as promotion, rotation and others. In addition, the performance assessment result is also applied as consideration of punishment such as warning letter, promotion postpone, demotion, mutation until employment termination.

EMPLOYEE RECRUITMENT

As SOE that is operated in shipping sector, the Company guarantees fair career opportunity based on competency standard and requirement in each working unit in the Company. Career opportunity at PT PELNI (Persero) adapts fairness principle without any discrimination based on gender, religion, ethnicity and other aspects.

The recruitment system will be done transparently based on man power planning to support achievement of the Company's short-term and long-term targets achievement. Throughout 2017, the Company held 2 (two) PT PELNI (Persero) employee recruitment program, as follows:

Ashore Employee Recruitment

The ashore employee recruitment was performed in cooperation with PT Gaia Solution from July to November 2017 for Diploma III and Bachelor Degree (Management Trainee). In addition to recruiting fresh graduates, the Company recruits professionals for ship repair surveys, branch operations and also administrative personnel. The ashore employee recruited in 2017 are as follows:

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

No.	Posisi Position	2017
1	Perjanjian Kerja Waktu Tertentu *(Non-Organic)* Specific Time Working Agreement (Non-Organic)	14
2	*Management Trainee* Management Trainee	26
3	Junior Officer Junior Officer	12
	Jumlah | Total	**52**

Rekrutmen program D3 dan S1 *(Management Trainee)* dilaksanakan di tiga Kota yaitu Jakarta, Makassar dan Jayapura dengan latar belakang akuntansi, manajemen, teknik perkapalan, ketatalaksanaan pelayaran niaga, logistik dan teknik industri. Selanjutnya dilakukan pelatihan kewiraan dan orientasi Perusahaan terhadap calon pegawai tersebut agar pada saat ditempatkan telah memiliki bekal pengetahuan dan keterampilan yang memadai.

Diploma III and Bachelor Degree (Management Trainee) recruitment program was conducted in three cities, namely Jakarta, Makassar and Jayapura with the educational background of accounting, management, shipping techniques, commercial shipping, logistics and industrial engineering. Furthermore, conducting the Company's predilection and orientation training to the prospective employee so that when placed already have adequate knowledge and skill.

Rekrutmen Pegawai Laut
Perekrutan untuk pegawai laut tidak dilakukan di tahun 2017. Namun terdapat satu orang ikatan dinas dari AMI Veteran Makassar jurusan ATT III yang bergabung sebagai Calon Pegawai Laut 2017. Sampai dengan tahun 2017, program Ikatan Dinas tahun 2013 untuk ANT III dan ATT III telah tergabung seluruhnya.

Offshore Employee Recruitment
Recruitment for offshore officers was not performed in 2017. However, there was one official association from AMI Veteran Makassar of ATT III Major who joined as Prospective Seafarers 2017. Until 2017, commitment to work for the government after graduation program of 2013 for ANT III and ATT III has been fully integrated.

Terdapat efisiensi dalam realisasi penggunaan dana rekrutmen pegawai darat sebesar Rp699.885.000 atau 71,78%. Langkah efisiensi ini diperoleh dengan melakukan rekrutmen secara semi swakelola atau mengkombinasikan antara internal dan eksternal dan menggunakan aplikasi rekrutmen sendiri *(e-recruitment)*. Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2017 untuk pelaksanaan kegiatan rekrutmen pegawai darat dan pegawai laut adalah sebagai berikut:

There is an efficiency in the realization of ashore employee recruitment fund of Rp699.885.000 or 71.78%. This efficiency step is obtained by recruiting semi-self-managed or combining internal and external and using its own recruitment (e-recruitment) application. Costs incurred by the company in 2017 for the implementation of recruitment activities for ashore and offshore employee are as follows:

No.	Keterangan Description	Anggaran 2017 2017 Budget	Realisasi 2017 2017 Realization
1	Rekrutmen Pegawai Darat Ashore Employee Recuitment	Rp975.000.000	Rp275.115.000
2	Rekrutmen Pegawai Laut Offshore Employee Recuitment	Rp574.250.000	-
	Jumlah | Total	**Rp1.549.250.000**	**Rp275.115.000**

PROFIL SDM 2017
Per 31 Desember 2017, jumlah pegawai Perseroan adalah 4.436 orang atau sedikit menurun sebesar 2,8% dibandingkan 4.563 pegawai pada tahun 2016. Penurunan jumlah pegawai tersebut disebabkan oleh pegawai pensiun dan keluar.

EMPLOYEE DEMOGRAPHY 2017
As of December 31, 2017, total employees achieved 4,436 employees or slightly decreased by 2,8% if compared with 4,563 employees in 2016. A decrease in employee number was due to retired and resigned employees.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Perseroan memberikan perlakuan dan kesempatan pengembangan karir yang setara kepada seluruh karyawan tanpa diskriminasi berdasarkan jenis kelamin, suku bangsa, agama, ras maupun hal lainnya yang bersifat diskriminasi.

The Company provides fair treatment and career opportunity to all employees without any discrimination by gender, ethnicity, religion, race and other discriminative aspects.

Deskripsi profil SDM berdasarkan level jabatan, jenis kelamin, status kepegawaian, tingkat pendidikan dan usia pada tahun 2017, sebagai berikut:

Description of employee demography based on position level, gender, employment status, educational level and age in 2017 are explained below:

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi

Berdasarkan level organisasi, 46% dan 26% didominasi oleh pegawai jenjang *officer* dan staf. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja operasional cabang dan kapal.

Total Employee Based on Organization Level

Based on the organization level, 46% and 26% are dominated by officer level and staff level of employees. This is in line with the Company's business model that absorbs more workers in the branches and ship operations.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Level Organisasi
Total Employee based on Organization Level

Jabatan Position	2017	2016	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2017 2017 Composition
Manajer Atas | Top Manager	128	131	(2.29%)	2.89%
Manajer Menengah | Middle Manager	522	488	6.97%	11.77%
Manajer | Lower Manager	556	510	9.02%	12.53%
Staf | Staff	1,169	566	106.54%	26.35%
Officer | Officer	2,061	2,868	(28.14%)	46.46%
Jumlah | Total	4,436	4,563	(2.78%)	100%

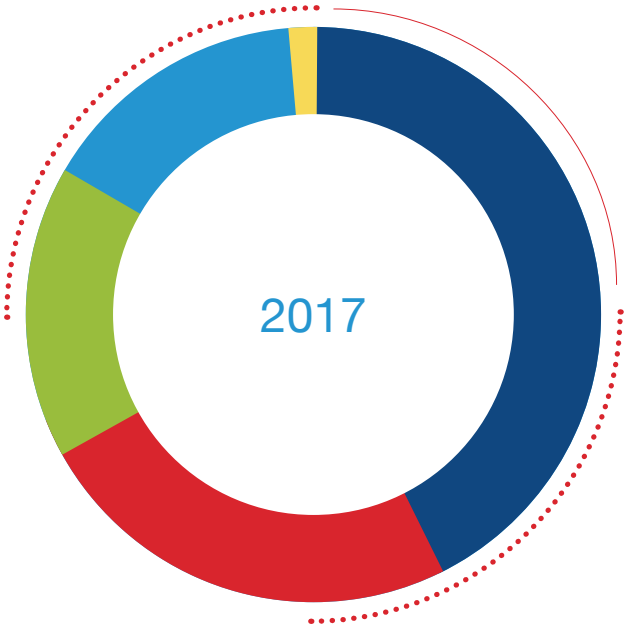

Manajer Atas | Top Manager
Manajer Menengah | Middle Manager
Manajer | Lower Manager
Staf | Staff
Officer | Officerr

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan

Berdasarkan jenjang pendidikan, 60% didominasi oleh pegawai dengan tingkat pendidikan SMA. Hal ini sejalan dengan model bisnis Perseroan yang lebih banyak menyerap tenaga kerja di cabang dan operasional kapal, namun demikian Perseroan tetap membekali pegawai dengan kompetensi-kompetensi yang dibutuhkan melalui pelatihan yang diberikan agar pegawai memiliki keahlian yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang dilakukan.

Total Employee Based on Education Level

Based on education level, 60% are dominated by high school level employees. This is in line with the business model of the Company that absorbs more workers in the branches and ship operations, however, the Company still provides employees with the required competencies through training provided so that employees have the necessary skills in the work performed.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan
Total Employee based on Education Level

Tingkat Pendidikan Education Level	2017	2016	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2017 2017 Composition
Pasca Sarjana | Master Degree	82	87	(5.75%)	1.85%
Sarjana | Bachelor Degree	617	621	(0.64%)	13.91%
Diploma | Diploma	560	346	61.85%	12.62%
< SLTA | < High School	2,697	2,971	(9.22%)	60.80%
ANT I | ANT I	51	89	(42.70%)	1.15%
ANT II | ANT II	32	50	(36.00%)	0.72%
ANT III | ANT III	103	97	6.19%	2.32%
< ANT IV | < ANT IV	15	14	7.14%	0.34%
ATT I | ATT I	63	97	(35.05%)	1.42%
ATT II | ATT II	30	33	(9.09%)	0.68%
ATT III | ATT III	139	120	15.83%	3.13%
< ATT IV | < ATT IV	47	38	23.68%	1.06%
Jumlah | Total	4,436	4,563	(2.78%)	100%

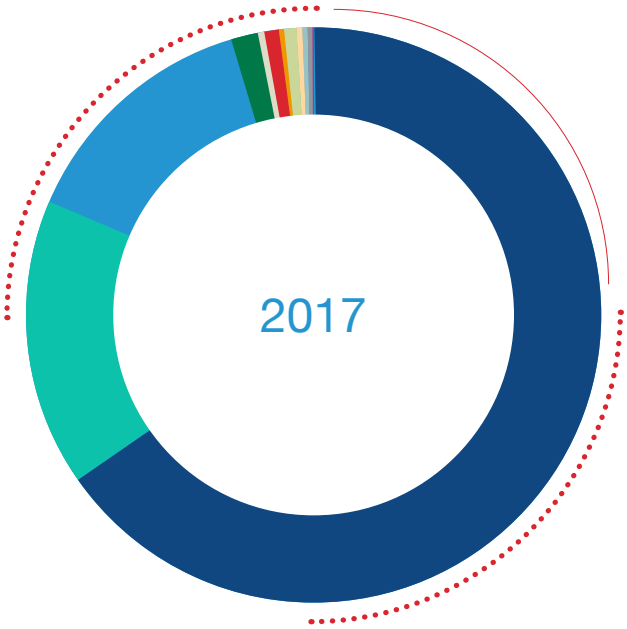

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian

Berdasakan komposisi karyawan berdasarkan status pegawai, 83% didominasi oleh pegawai tetap yang biasa disebut pegawai organik. Adanya pegawai kontrak atau pegawai non organik karena masih terdapat beberapa pekerjaan yang sifatnya temporer.

Total Employee Based on Employment Status

Based on employee composition based on employee status, 72% is dominated by permanent employees or could also said organic employee. The existence of contract employees or non organic employees because there are still some temporary jobs.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Kepegawaian
Total Employee based on Employment Status

Status Kepegawaian Employment Status	2017	2016	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2017 2017 Composition
Organik | Permanent	3,706	3,880	(4.48%)	83.54%
Non Organik | Non Permanent	730	683	6.88%	16.46%
Jumlah | Total	4,436	4,563	(2.78%)	100%

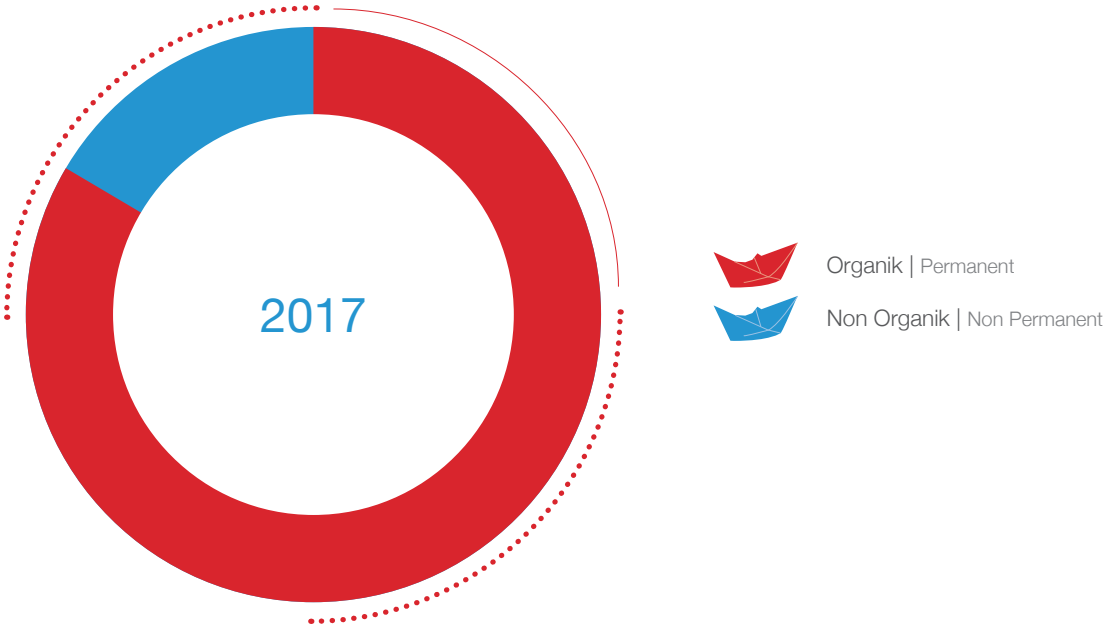

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi karyawan berdasarkan jenis kelamin, 85% didominasi oleh laki-laki. Hal ini disebabkan banyaknya pekerjaan yang lebih diminati oleh laki-laki, namun demikian Perseroan berkomitmen tetap memberlakukan kesetaraan *gender* dalam kesempatan berkarir di dalam Perseroan.

Total Employee Based on Gender

The composition of employee based on gender, 85% are dominated by men. This is due to the large number of mining jobs that are more attractive to men, however, the Company is committed to continue to apply gender equality in career opportunities within the Company.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin
Total Employee based on Gender

Jenis Kelamin Gender	2017	2016	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2017 2017 Composition
Pria | Male	3,806	3,897	(2.34%)	85.80%
Wanita | Female	630	666	(5.41%)	14.20%
Jumlah | Total	4,436	4,563	(2.78%)	100%

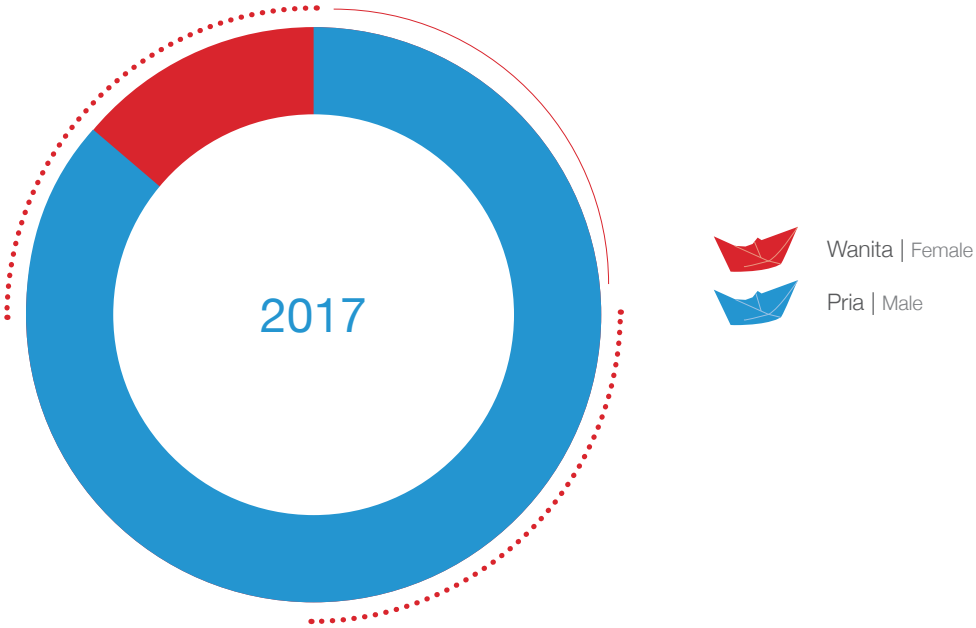

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Berdasarkan kelompok usia, 32% dan 38% didominasi oleh pegawai pada kelompok umur 50-55 tahun dan 40-49 tahun. Komposisi ini menunjukkan bahwa Perseroan memiliki tenaga produktif dalam mendukung pertumbuhan bisnis serta memiliki calon-calon pemimpin yang dapat dipersiapkan untuk masa depan.

Total Employee Based on Age
By age group, 32% and 38% are dominated by employees in the age group of 50-55 years and 40-49 years old . This composition shows that the Company has a productive workforce in supporting business growth and has prospective leaders who can be prepared for the future.

Jumlah Pegawai Berdasarkan Usia
Total Employee based on Age

Usia Age	2017	2016	Pertumbuhan Growth	Komposisi 2017 2017 Composition
> 55	297	262	13.36%	6.70%
50 - 55	1,454	1,081	34.51%	32.78%
40 - 49	1,689	2,114	(20.10%)	38.07%
31 - 39	530	515	2.91%	11.95%
< 30	466	591	(21.15%)	10.50%
Jumlah | Total	4,436	4,563	(2.78%)	100%

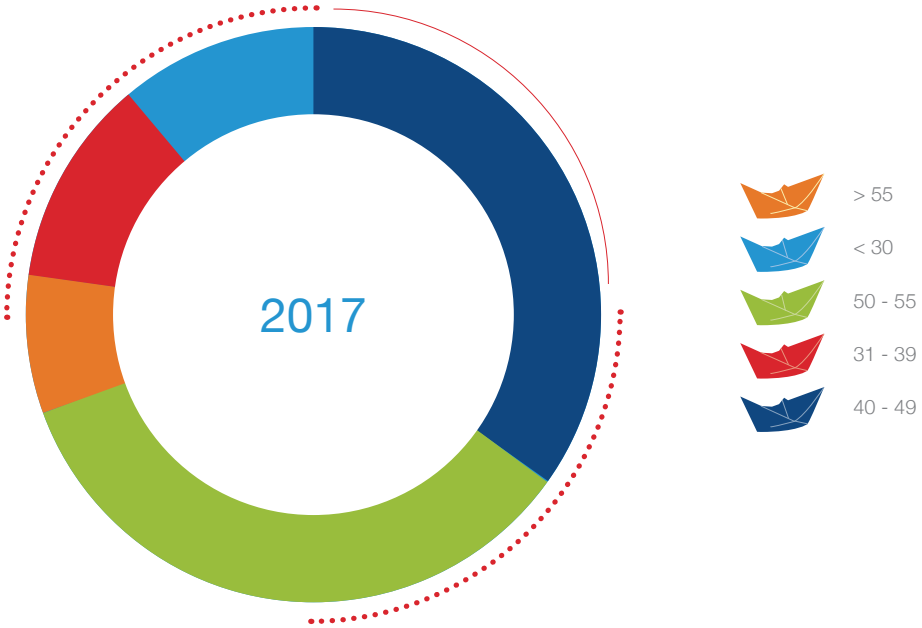

PENGEMBANGAN KOMPETENSI SDM

Dalam rangka menjamin kelangsungan bisnis Perusahaan yang berkesinambungan serta menghadapi era disruptif dengan persaingan bisnis yang semakin kompetitif, PT PELNI (Persero) senantiasa berupaya untuk terus meningkatkan semangat belajar pegawai untuk siap bertransformasi dengan meningkatkan kualitas pegawai sebagai aset utama

EMPLOYEE COMPETENCY DEVELOPMENT

In order to ensure the Company's business sustainability and to deal with disruptive era amidst fiercer business competition, PT PELNI (Persero) strives to ignite learning spirit of the employees to be ready for transformation and develop quality of the employees as main assets of the Company. The effort was implemented through training and

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Perusahaan. Upaya tersebut diimplementasikan melalui program pelatihan dan transfer pengetahuan yang dilakukan secara berkala, sehingga setiap pegawai PT PELNI (Persero) akan mendapakan pengetahuan dan keterampilan yang mumpuni sesuai dengan SK No: 24/HKO.01/DIR/I-2009 tentang Pola Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PT PELNI (Persero). Pelatihan dititikberatkan pada pembentukan personal yang berkualitas dengan memiliki keterampilan, kemampuan kerja dan loyalitas kerja yang menunjang transformasi bisnis perusahaan saat ini.

Jumlah Pegawai yang Mendapatkan Pelatihan

Sepanjang tahun 2017 PT PELNI (Persero) sudah mengirimkan sebanyak 2.021 orang melaksanakan pengembangan dan pelatihan guna memperkuat kompetensi inti pegawai. Pengembangan kompetensi yang dimaksud tersebut dapat berupa seminar, *workshop* dan sertifikasi serta pelatihan penjenjangan yang dilakukan oleh perusahaan.

Adapun kegiatan program pelatihan yang telah dilakukan sepanjang tahun 2017 adalah sebagai berikut:

knowledge transfer program that have been done regularly to provide adequate knowledge and skill to every employee of PT PELNI (Persero) in accordance with Decree Number 24/ HKO.01/ DIR/I-2009 regarding PT PELNI (Persero) Employee Education and Training scheme. The trainings are focused on developing qualified personal with epxertise, working competency and loyalty that support current business transformation in the Company.

Total Employees Who Attained Training

Throughout 2017, PT PELNI (Persero) delegated 2,021employees to particiapte in development and training programs to strengthen core competency of the employees. The competency building included seminar, workshop and certification as well as staging trainings that are provided by the Company.

The training program activities that have been conducted throughout the year 2017 are as follows:

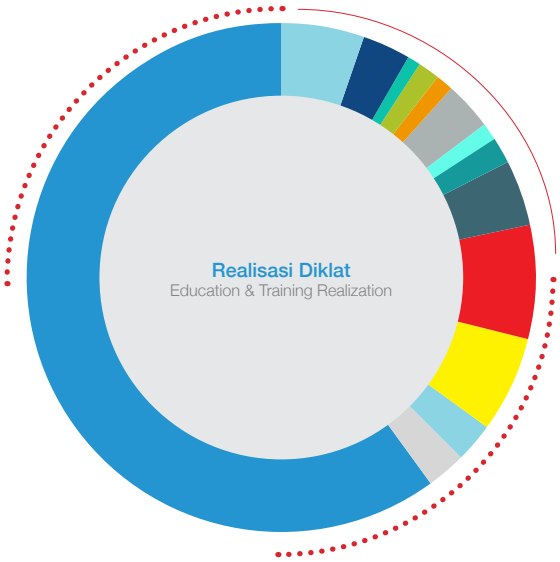

Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant	%
Orientasi Pegawai Employee Orientation	38	1,9%
Diklat Teknis Pegawai Darat (Penjenjangan) Onshore Technic Education & Training (Levelling)	80	4,0%
Managerial Pegawai Darat (Penjenjangan) Onshore Managerial (Leveling)	150	7,4%
Leadership Leadership	122	6,0%
Sertifikat Pegawai Darat Onshore Certification	51	2,5%
Pengayaan - *Public Training* Pegawai Darat Enrichment - Onshore Public Training	48	2,4%
Pengayaan - In House Training Pegawai Darat Enrichment - Onshore Inhouse Training	1.214	60,1%
Pelatihan Teknis Technic Training	107	5,3%
Pelatihan Pra Purnabakti Pre-Retirement Training	60	3,0%
Managerial Pegawai Laut Ofshore Empoyee Managerial	20	1,0%
Sertifikasi Pegawai Laut Ofshore Empoyee Certification	29	1,4%
Pengayaan - Public Training Pegawai Laut Enrichment - Ofshore Public Training	20	1,0%
Pengayaan - In House Training Pegawai Laut Enrichment - Ofshore Inhouse Training	64	3,2%
Pengayaan - In House Training Pegawai Laut Enrichment - Ofshore Inhouse Training	18	0,9%

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
Pegawai Darat | Ashore Employee			
1	Orientasi Pegawai Employee Orientation	Orientasi Calon Pegawai Baru DIII dan *Management Trainee* (MT) dengan lingkup sebagai berikut: New Diploma III Employee Candidate Orientation and Management Trainee (MT) with the following scope: 1. Diklat pembentukan karakter, kesamaptaan dan kedisplinan, tanggal 12-23 Desember 2017 di Rindam Jaya untuk seluruh peserta MT dan calon pegawai DIII. The Character formation training, Physical preparation and discipline, December 12-23, 2017 at Rindam Jaya for all MT participants and DIII employee candidates.	38
		2. Diklat Pengenalan Perusahaan, tanggal 4-17 Januari 2018 di Hotel Bahtera Cipayung untuk seluruh peserta MT dan calon pegawai DIII. Training Company Introduction, January 4-17, 2018 at Hotel Bahtera Cipayung for all MT participants and DIII employee candidates.	
		3. Diklat Pengayaan Kompetensi, tanggal 18 Januari – 2 Februari di Hotel Bahtera Cipayung untuk seluruh peserta MT. Competency Enrichment Training, January 18 - February 2 at Hotel Bahtera Cipayung for all MT participants.	
		4. Penempatan Calon Pegawai DIII, tanggal 18 Januari – 2 Februari di Kantor Pusat. DIII Employee Candidates Placement, January 18 - February 2 at the Head Office.	
		5. On The Job Training untuk peserta MT, dilaksanakan di 3 (tiga) tempat dengan jadwal: On The Job Training for MT participants, conducted in 3 (three) places with the schedule: a. Kantor Pusat : 5 Februari - 21 Maret 2018. Head Office : February 5, March 21, 2018. b. Kapal : 23-29 Maret 2018. Ship : March 23-29, 2018. c. Cabang : 2-20 April 2018. Branch : April 2-20, 2018.	
		6. Presentasi dan Evaluasi untuk peserta MT, tanggal 23-27 April 2018 di Kantor Pusat. Presentation and Evaluation for MT participants, April 23-27, 2018 at Head Office.	
		7. Kelulusan, tanggal 30 April 2018. Graduation, April 30, 2018.	
2	Diklat Penjenjangan Bidang Teknis Leveling Training for Technical Instruction	Diklat Teknis Administrasi Tingkat Mula Angkatan VI, Tanggal 18 – 22 Desember 2017 di Hotel Bahtera Cipayung. Technical Training Administration for Beginning Level Force VI, Date December 18-22, 2017 at Hotel Bahtera Cipayung.	40
		Diklat Teknis Administrasi Tingkat Lanjutan Angkatan VII, Tanggal 4 – 8 Desember 2017 di Hotel Bahtera Cipayung Advanced Technical Training for Administration Level Force VII, Date December 4 - 8, 2017 at Hotel Bahtera Cipayung	40
3	Diklat Penjenjangan Manajerial Leveling Managerial Training	Pelatihan Manajerial Tingkat Muda: Young Managerial Training: 1. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda angakatan VII Tanggal 24- 28 Juli 2017 di Hotel Ibis Jakarta Harmoni. Young Entrepreneurial Training of Generation VI Dated on July 24- 28, 2017 at Ibis Hotel Jakarta Harmony.	30
		2. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda angakatn VIII di Hotel All Season Jakarta Gajah Mada. Young Level Managerial Training class VIII at All Season Hotel, Jakarta Gajah Mada.	30
		3. Pelatihan Manajerial Tingkat Muda angkatan IX di Hotel Bahtera Cipayung. Young Level Managerial Training class IX at Bahtera Hotel, Cipayung.	30
		Pelatihan Manajerial Tingkat Madya Angkatan IX Tanggal 30 Oktober – 3 November 2017 di Hotel Bahtera Cipayung. Managerial Training for Junior Level Force IX Dated on October 30 - November 3, 2017 at Hotel Bahtera Cipayung.	30
		Pelatihan Manajerial Tingkat Utama Angakatan V Tanggal 23-27 Oktober 2017 di Hotel All Season. Key Level Managerial Training Force V Dated on October 23-27, 2017 at Hotel All Season	30

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program		Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
4	Leadership Leadership	1.	Program pengembangan eksekutif untuk VP dan setara dengan tahapan sebagai berikut : Executive development program for VP and equivalent to stages as following: • *BOD Alignment Session.* BOD Alignment Session. • *Individual Development Plan.* Individual Ddevelopment Plan. • *In Class Training* fase 1 dan 2. In Class Training phase 1 and 2. • *Excecutive Coaching.* Excecutive Coaching. • *Interview Behavior* (evaluasi). Interview Behavior (evaluation).	22
		2.	Program pengembangan Eksekutif untuk Manajer tanggal 18 Oktober 2017 – 28 Februari 2018, dengan tahapan sebagai berikut: Executive development program for Manager dated on October 18, 2017 - February 28, 2018, with the following stages: • *In Class Training* fase 1 dan 2 In Class Training phase 1 and 2. • *Group Coaching.* Group Coaching. • Evaluasi. Evaluation.	20
		3.	Program *"Basic Leadership for Supervisor"* di Auditorium Tgl. 24 Mei 2017 (peserta pegawai KJ Supervisor dan setara) "Basic Leadership for Supervisory" program at auditorium dated on May 24, 2017 (KJ employee participants and the Supervisor equivalent)	80
5	Sertifikasi Profesi Ahli Expert Profession Certification	1.	Diklat AK3 Umum di Yogyakarta, Tanggal 6 – 18 Maret 2017 a.n Budi H. & Hudaya (PT. Environesia). AK3 General Training in Yogyakarta, Dated on March 6-18, 2017 with the name of Budi H. & Hudaya (PT. Environesia).	2
		2.	Pelatihan Audit internal tingkat lanjutan I angkatan ke – 210 di Jakarta (YPIA) tgl. 6 – 17 Maret 2017 a.n Sriyanto. AK3 General Training in Yogyakarta, Dated on March 6-18, 2017 with the name of Budi H. & Hudaya (PT. Environesia).	1
		3.	Pelatihan ISO 31000 series 2 di Bandung, tgl. 14 – 17 Maret 2017, a.n. Rebecca. Training ISO 31000 series 2 in Bandung, dated on March 14-17, 2017, with the name of Rebecca.	1
		4.	Pelatihan AK3 Umum di Jakarta, tgl. 3 – 17 April 2017, a.n. Mohamad Abidin. General AK3 Training in Jakarta, dated on April 3-17, 2017, with the name of Mohamad Abidin.	1
		5.	Pelatihan DPA-ISM code di Hotel Puncak Raya Cisarua Bogor Tgl 26 – 28 April 2017 a.n. Simon. DPA-ISM Code Training at Puncak Raya Cisarua Hotel, Bogor dated on April 26-28, 2017 with the name of Simon.	1
		6.	Pelatihan Auditor SMK3 di Jakarta tanggal 16 – 19 Mei 2017, peserta a.n. Rinaldi Sudirman dan Heliana (PT. Phitagoras Global Duta). SMK3 Auditor training on Jakarta May 16-19, 2017 with the participant names of Rinaldi Sudirman dan Heliana (PT. Phitagoras Global Duta).	2
		7.	Perpanjangan surat keputusan dan ahli K3 Umum (SKP) a.n. Helianan Sinaga dan Rinaldi Sudirman. Extension of Decision Letter and General Safety Expert (SKP) with the name of Helianan Sinaga and Rinaldi Sudirman.	2
		8.	Pelatihan dan Pendidikan ahli kepelabuhan Indonesia tanggal 10 – 14 Juli 2017 peserta Indra Maulana Training and Education Port Indonesia expert dated on 10 - 14 July 2017 Indra Maulana as Participant.	1
		9.	Pelatihan pengadaan barang/jasa Pemerintahan tanggal 31 Juli s/d 14 Agustus 2017 (a.n Hariyanto dan Muhammad Faisal Arief). Goods / services procurement training Government from July 31 - August 14, 2017 (with the name of Hariyanto and Muhammad Faisal Arief).	2
		10.	Pelatihan CSO-ISPS *code* BKI tanggal 09 – 11 Agustus a.n Asmar Joni. CSO-ISPS code BKI Training dated on August 09-11 with the name of Asmar Joni.	1

No.	Program Pelatihan Training Program		Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
		11.	Pelatihan sertifikasi PPJK (Kepabeanan) tanggal 5 Agustus – 15 Oktober 2017 di Pusdiklat Bea dan Cukai Rawa Mangun Jakarta (setiap Sabtu dan Minggu). Training of PPJK certification (Customs) on August 5 - October 15, 2017 at Customs and Excise Education and Training Center, Rawa Mangun Jakarta (every Saturday and Sunday).	2
		12.	Brevet pajak AB terpadu dimulai tanggal 25 September 2017 (3 bulan). AB integrated tax brevet began September 25, 2017 (3 months).	4
		13.	Pelatihan Marine *surveyor* pada tanggal 6 – 10 November 2017 si PT BKI. Marine surveyor training on November 6-10, 2017 at PT BKI.	2
		14.	Diklat Audit Operasional pada tanggal 6 -15 November 2017. Operational Audit Training on November 6-15, 2017.	3
		15.	Pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang dan jasa tanggal 27 November – 2 Desember 2017 di PPM Manajemen. Training and certification of goods and services procurement dated on November 27 - December 2, 2017 at PPM Management.	25
		16.	Pelatihan Audit intern tingkat lanjut II, a.n Sriyanto. Internal Audit II Training, with the name of Sriyanto.	1
6	Pengayaan - *Public Training* Enrichment - Public Training	1.	Seminar Nasional "Upaya pencegahan dan penanggulangan Korupsi serta peningkatan kinerja pada pengelolaan BUMN/BUMD dan pebankan di Hotel Mercure Jakarta, tanggal 23 – Februari 2017 a.n Ivan dan Herman Timbul. Corruption prevention and repairment efforts and improvement performance on the management of State Owned Eterprises / Regional Owned Enterprises and banking National Seminar in Mercure Hotel Jakarta, dated on February 23, 2017 with the name of Ivan and Herman Timbul.	2
		2.	Diklat pengelolaan tata laksana & SOP yang efektif untuk mencapai kinerja unggul di Grand Mercure Hotel Jakarta, tanggal 30 – 31 Maret a.n Tatang R. Dasuki & Faturahman. Effective management & SOP management training for achieving superior performance at Grand Mercure Hotel, Jakarta, March 30-31 with the name of Tatang R. Dasuki & Faturahman.	2
		3.	*Workshop* strategi penghematan energy listrik di lingkungan kerja di Hotel Horison Yogyakarta tanggal. 17 – 19 Mei 2017 (peserta a.n Edi Heryadi & Hudaya). Electric energy saving strategy in work environment workshop at Hotel Horison, Yogyakarta Dated on May 17-19, 2017 (with the participants name of Edi Heryadi & Hudaya).	2
		4.	*Training for Secretary* tanggal 06 – 07 Juni 2017 di Hotel Grand Mercure Jakarta Harmoni (PT Lutan Edukasi). Training for secretary dated on June 06-07, 2017 at Grand Mercure Hotel, Harmoni, Jakarta (PT Lutan Edukasi).	3
		5.	Pelatihan *Workshop Negotiation Skill* tanggal 20 – 21 Juli 2017 di Bandung *(Intrinsic)*, (a.n Widya ningrum, Sila, dan Tenry – Divisi Pengadaan). Negotiation Skill Workshop on July 20-21, 2017 in Bandung (Intrinsic), (With the name of Widya ningrum, Sila, and Tenry - Procurement Division).	3
		6.	Pelatihan penyusunan laporan keungan PKBL BUMN tanggal 25 – 26 Juli 2017 di Bandung (a.n Sinta Zuraida & Septiani) dari PT Sucofindo Advisory Utama. Financial report preparation PKBL Training of SOE on July 25-26 2017 at Bandung (with the name of Sinta Zuraida & Septiani) from PT Sucofindo Advisory Utama.	2
		7.	*Workshop* aspek Hukum *Holding* dilingkungan BUMN a/n Rtna Ayu Utama dan Maria Apriyanti. Workshop on Legal aspects of Holding within the BUMN with the name of Ratna Ayu Utama and Maria Apriyanti.	2
		8.	*Workshop* penangan dan strategi Arbitrase Internasional pada tanggal 28 -30 November 2017 dari Intrinsic, peserta sebanyak 2 orang. International Arbitration Handling and Arbitration Workshop on November 28-30, 2017 from Intrinsic, 2 participants.	2
		9.	Pelatihan *Owner Estimate* tanggal 22 – 24 November 2017 dari PPM Manajemen, persentase sebanyak 2 orang. Owner Estimate Training on November 22-24, 2017 from PPM Management, Percentage as many as 2 people.	2
		10.	Pelatihan *Annual Report management* tanggal 24 – 25 Agustus 2017. Annual Report Management Training on August 24-25, 2017.	2

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program		Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
		11.	Webinar langkah praktis *job analysis* di PPM manajemen tanggal 16 – 18 Mei 2017. Webinar step practical job analysis in PPM management dated on May 16-18, 2017.	3
		12.	*Workshop* struktur dan skala upah a.n Rita Mahfudiah dan Andri Yudha Prawira. the structure and scale of wages workshop with the name of Rita Mahfudiah and Andri Yudha Prawira.	2
		13.	*The 19th Indonesia HR. Summit* Yogyakarta, 11 – 12 September 2017 a.n Mardiyanto dan Cristina Devyanti The 19th HR. Summit Yogyakarta, September 11-12, 2017 with the name of Mardiyanto and Cristina Devyanti.	2
		14.	*Workshop* Advokasi ketenagakerjaan a.n Ahmad Anshorullah dan Sayka Mansyur Employment Advocacy Workshop with the name Ahmad Anshorullah and Sayka Mansyur	2
		15.	*Workshop Practical key account management* khusus bagi BUMN dan anak perusahaan, a.n Fitriyaningsih dan Dini Wiyarti. Pratical key account management Workshop especially for SOE and subsidiaries, with the name of Fitriyaningsih and Dini Wiyarti.	2
		16.	*Evaluating Traning program* a.n Dessy Rahmiyati dan Sigit Sujatmoko. Evaluating Training Program with the name of Dessy Rahmiyati and Sigit Sujatmiko.	2
		17.	Pembekalan dan Ujian sertifikasi manajemen umum dana pensiun tanggal 23 – 27 Oktober 2017. Debriefing and Examination of general management certification of retirement fund dated on October 23-27, 2017.	2
		18.	*The 2nd Indonesia Human Capital Summit* yang dilakukan 3 orang peserta dari Divisi SDM pada tanggal 9 – 10 November 2017. The 2nd Indonesia Human Capital Summit that conducted 3 participants from HR Division dated on November 9-10, 2017.	3
		19.	*Asian Corporate Innovation Summit* tanggal 29 November 2017 di Jakarta, peserta sebanyak 2 orang. Asia Corporate Innovation Summit dated on November 29, 2017 in Jakarta, 2 participants.	2
		20.	*Workshop* nasional managemen pengaman dan penyelamatan Arsip Vital dari ancaman kerusakan dan bencana tanggal 22 – 25 November 2017 di Bandung, peserta 3 Orang. National Workshop on Security and Rescue Management of Vital Archives from damage and disaster threats on 22 - 25 November 2017 in Bandung, 3 people.	3
		21.	APC KPKU BUMN tanggal 9 – 10 November 2017 dari Forum Ekselen BUMN, peserta sebanyak 2 orang. Assessor Preparation Course (APC), Criteria for Superior Performance Assessment (KPKU) Of SOE dated on November 9-10, 2017 form Echelon forum of SOE, 2 Participants.	2
		22.	Seminar Nasional & pelatihan perpajakan BUMN tanggal 27 – 29 November 2017 di Yogyakarta. National Seminar & SOE's tax training on November 27-29, 2017 in Yogyakarta.	3
7.	Pengayaan - *In House Training* Pelatihan Teknis Enrichment - In House Technic Training	1.	*In house training* BEDAH OFI KPKU di all Season Hotel, tanggal 29 – 31 Maret 2017. In house Training BEDAH OFI KPKU at all season dated on March, 29-31,2017.	25
		2.	*In house training* proses Arbitrase, di PT Pelni tanggal 4 April 2017. In house training of Arbitration process, at PT PELNI on April 4, 2017.	53
		3.	*In house training* terkait dengan Transformasi Bisnis oleh Rhenald Kasali di Auditorium PT Pelni (Persero), tanggal 7 April 2017. In house training related to Business Transformation by Rhenald Kasali in Auditorium PT PELNI (Persero), dated on April 7, 2017.	300
		4.	*In house training* interpretasi KPKU (35) tanggal 17 – 18 April 2017. In house training of KPKU interpretation (35) dated on April 17 -18, 2017.	35
		5.	*In house training* admin KPI 2017 di Hotel All Season tanggal 8 – 10 Mei 2017, peserta sebanyak 37 orang (oleh Bpk. Yohanes Abdullah). In house training administration KPI 2017 at All Season Hotel on May 8-10, 2017, 37 participants (by Mr. Yohanes Abdullah).	37
		6.	Pelatihan korespondensi terkait ketentuan baku surat menyurat 17 Mei 2017, ruang rapat lt.9 Kantor Pusat PT PELNI (Persero). Correspondence training related to the correspondence provisions of May 17, 2017, meeting room, Floor 9, Head Office of PT PELNI (Persero).	45

No.	Program Pelatihan Training Program		Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
		7.	Program motivasi *"Innovate for Impact"* di Auditorium tanggal 22 Mei 2017 (peserta 150 pegawai KJ 16 -13). Innovate for Impact motivation program at Auditorium dated May 22, 2017 (150 participants from employees KJ 16 -13).	150
		8.	*Inspirational leadership* untuk pegawai KJ 10 – 12 tanggal 21 Juli 2017 di Auditorium PT PELNI (Persero) Kantor Pusat Inspirational leadership for KJ 10-12 employees on July 21, 2017 at Auditorium, Head Office of PT PELNI (Persero).	130
		9.	Seminar *Public Speaking* tanggal 19 Juli 2017 di Auditorium PT PELNI (Persero) Kantor Pusat. Public Speaking Seminar dated on July 19, 2017 at auditorium, Head Office of PT PELNI.	130
		10.	Pelatihan *Enterprise Risk management* tanggal 8 – 10 Agustus 2017 di Ibis Hotel Jakarta. Enterprise Risk Management Training on August 8 - 10, 2017 at Ibis Hotel, Jakarta.	33
		11.	*Workshop Marketing & Sales* tanggal 28 – 30 Agustus 2017 dan sosialisasi *booking* reserasi muatan *online* tanggal 25 – 27 Agustus 2017. Marketing & Sales Workshop on August 28 - 30, 2017 and socializing booking online load reseration dated on August 25 - 27, 2017.	60
		12.	Pelatihan investigasi kecelakaan kapal tanggal 28 – 19 September 2017 di Hotel All Season Jakarta. Ship accident investigation training on September 28 - 19, 2017 at All Season Hotel, Jakarta.	25
		13.	Pelatihan simulasi pemadam kebakaran tanggal 13 -14 September 2017. Fire-fighting simulation training on September 13-14, 2017.	40
		14.	*Follow Trough program Assignment & Evaluation Workshop marketing plan and persentantion* Follow through Assignment & Evaluation Program, Marketing plan and Presentation Workshop.	60
		15.	*Selling skill training* program tanggal 20 – 22 November 2017 di Hotel Bahtera Cipayung. Selling skill Training Program dated on November 20-22 at Bahtera Hotel, Cipayung.	22
		16.	Pelatihan *Supply Chain management* tanggal 12 – 14 Desember 2017 di Hotel All Season. Supply Chain Management Training dated on December 12-14, 2017 at All season Hotel.	20
		17.	Pelatihan *Risk Based audit* tanggal 14 – 15 Desember 2017 di Hotel All Season. Risk Based Audit Training dated on December 14-15, 2017 at All Season Hotel.	19
		18.	Motivasi untuk para Manajer oleh Renee Suhandono tanggal 28 Desember 2017 di Auditorum. Motivation for Managers by Renee Handono dated on December 28, 2017 at Auditorium.	76
		19.	*Workshop* Penyusunan KPKU Tahun 2017, tanggal 27 – 29 Desember 2017 di Hotel All Season Jakarta. Criteria for 2017 Superior Performance Assessment (KPKU) preparation Workshop 2017, December 27 - 29, 2017 at All Hotel, Jakarta	14
8	Pelatihan Teknis Technic Training	1.	*Basic Computing* untuk pegawai pergudangan Persmat dan pegawai *ex-driver* tanggal 13 November – 4 Desember 2017 di Kantor Pusat PT PELNI (Persero). Basic Computing for Persmat warehousing employees and ex-driver dated on November 13 - December 4, 2017 at the Head Office of PT PELNI (Persero).	22
		2.	Kursus bahasa inggris *(Business Communication)* 3 angkatan. English Language Course (Business Communication) 3 Forces.	75
		3.	*Pelatihan system adminstration* untuk Aplikasi QPR *Metrics (corplan)* tanggal 20 November 2017 di kantor pusat PT PELNI (Persero). Training system administration for QPR Metrics Applications (corplan) on November 20, 2017 at head office of PT PELNI (Persero).	10
9	Pelatihan Pra Purnabakti Pre - Retirement Training	1.	Pelatihan Pra Purnabakti pegawai PT PELNI (Persero) tanggal 21 – 24 Agustus 2017 di Hotel New Sani Rosa Bandung. Pre-Retirement Training for PT PELNI Employees dated on August 21-24, 2017 at New Sani Rosa, Bandung.	30
		2.	Pelatihan Pra Purnabakti pegawai PT PELNI (Persero) tanggal 9 - 12 Oktober 2017 di Hotel New Sani Rosa Bandung. Pre-Retiment Training for PT PELNI (Persero) employees dated on 9-12 October, 2017 at New Sani Rosa Hotel, Bandung.	30

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

No.	Program Pelatihan Training Program	Deskripsi Description	Jumlah Peserta Number of Participant
Pegawai Laut | Offshore Employee			
1	Managerial Pegawai Laut Offshore Employee Managerial	Pelatihan managerial perwira kapal angkatan 1 tanggal 23 – 26 Oktober 2017 di Hotel Bahtera Cipayung. Ship officers Managerial Training of Force 1 on October 23 - 26, 2017 at Bahtera Hotel ,Cipayung.	20
2	Sertifikasi Pegawai Laut Offshore Employee certification	1. Diklat GMDSS dan ORU untuk ETO di Binasena Ciawi, tanggal 3 – 29 April 2017. GMDSS and ORU Training and Education for ETO at Binasena, Ciawi, April 3 - 29, 2017.	17
		2. Pelaksanaan program ETO untuk ahli listrik kapal di BP3IP Jakarta 6 November 2017 s/d 22 Desember 2017. ETO program Implementation for ship electric experts at BP3IP, Jakarta November 6, 2017 until December 22, 2017.	12
3	Pengayaan *Public Relations* Public Relation Enrichment	1. Pelatihan *Basic Trauma* dan *Cardiovaskular Life Support*, tanggal 20 – 24 November 2017 di Pro Emergency Pakan Sari Bogor. Basic Trauma and Cardiovascular Life Support Training, Dated on November 20-24, 2017 at Pro Emergency, Pakan Sari, Bogor.	8
		2. Pelatihan *Basic Trauma* dan *Cardiovaskular Life Support*, tanggal 20 – 24 November 2017 di Pro Emergency - UI. Basic Trauma and Cardiovascular Life Support Training, Dated on November 20-24, 2017 at Pro Emergency - UI.	12
4	Pengayaan - *In House Training* In House Training Enrichment	1. *In house training Hospitality (Developing Service Communication & Attitude)* untuk P2, Jenang, Satpam di KM. In house training Hospitality (Developing Service Communication & Attitude) for P2, Jenang Securities at Ship (KM). a. Kelud tanggal 8 – 10 November 2017. Kelud dated on November 8-10, 2017.	30
		2. *In house training Hospitality (Developing Service Communication & Attitude)* untuk P2, Jenang, Satpam di KM. In house training Hospitality (Developing Service Communication & Attitude) for P2, Jenang Securities at Ship (KM). a. Dorolonda tanggal 10 – 12 November 2017. Kelud dated on November 8-10, 2017.	34
5	Beasiswa Pegawai Laut Offshore Employee Scholarship	Beasiswa pegawai laut dengan klasifikasi ANT II sebanyak 4 orang, ANT II sebanyak 7 orang, ATT II sebanyak 4 orang, dan ATT III sebanyak 3 orang periode Bulan April 2017. The Employee Scholarship with ANT II Clasification as much 4 people, ANT II as much 7 people, ANT II as much 4 people, and ANT III as much 3 people in April 2017 period.	18

Biaya pengembangan kompetensi pegawai

Biaya yang dikeluarkan oleh perusahaan pada tahun 2017 untuk pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai melalui pelatihan, pendidikan, seminar, *workshop,* sertifikasi dan beasiswa.

Terdapat efisiensi serapan anggaran pendidikan dan pelatihan pada tahun 2017 sebesar 39,38% atau senilai Rp6.977.921.411 yang disebabkan tidak adanya regulasi baru terkait STCW Amandemen Manila 2010. Penjelasan realisasi anggaran tahun 2017 terdapat pada tabel berikut:

Employee Competency Development Budget

Total budget that was disbursed by the Company in 2017 for implementation of employee competency development activities through training, education, seminar, workshop, certification and scholarship.

There was a budget absorption efficiency of education and training in 2017 of 39.38% or Rp6,977,921,411 due to the absence of new regulations related to STCW Amendment Manila 2010. Explanation of budget realization in 2017 is contained in the following table:

No.	Keterangan Description	Anggaran 2017 2017 Budget	Realisasi 2017 2017 Realization
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Darat. Education and Training for Ashore Employee.	Rp10.867.000.000	Rp9.601.469.974
2	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Laut Education and Training for Offshore Employee	Rp6.852.170.385	Rp1.139.779.000
	Jumlah | Total	**Rp17.719.170.385**	**Rp10.741.248.974**

REMUNERASI DAN KESEJAHTERAAN SDM

Dalam rangka meningkatkan motivasi kinerja dan loyalitas pegawai terhadap Perusahaan serta meningkatkan kesejahteraan pegawai, Perseroan telah menetapkan remunerasi pegawai yang didasarkan atas hasil penilaian kinerja. Pemberian remunerasi pegawai Perseroan telah disesuaikan dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk batas Upah Minimum Provinsi (UMP) dan peraturan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi terkait lainnya.

Komponen remunerasi yang diberikan kepada pegawai Perseroan, antara lain gaji pokok, insentif prestasi serta berbagai tunjangan dan fasilitas. sesuai dengan Surat Keputusan No. 06.09/01/SK/HKO.01/2017 tentang Pengupahan di Lingkungan PT PELNI (Persero), termasuk:

1. Gaji Pokok;
2. Insentif Prestasi;
3. Tunjangan Tetap;
4. Tunjangan Struktural;
5. Tunjangan Fungsional;
6. Tunjangan Komando;
7. Tunjangan Profesi;
8. Tunjangan Telekomunikasi;
9. Tunjangan Perumahan; dan
10. Asuransi/Premi Tetap.

Selain itu, Perseroan juga menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh pegawai organik PT PELNI (Persero), agar dapat menjamin kesejahteraan pegawai pada saat memasuki usia pensiun. Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Dana Pensiun PELNI (DPP) dan Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK). Adapun DPP diperuntukkan bagi pegawai organik yang bergabung/masuk sampai dengan tahun 2006, sedangkan DPLK diperuntukkan bagi pegawai organik yang bergabung dari tahun 2007 dan seterusnya.

SISTEM *REWARDS AND PUNISHMENT* PELNI

Sebagai bagian dari sistem manajemen SDM berbasis kinerja dan *Merit System* yang diterapkan oleh Perseroan, pengelolaan SDM juga dilengkapi oleh mekanisme *Reward and Punishment* di mana setiap pegawai yang berprestasi akan mendapatkan penghargaan sesuai dengan tingkat capaian dan, sebaliknya, bagi para pelaku pelanggaran yang terbukti dalam mekanisme yang sah, akan dijatuhkan hukuman.

EMPLOYEE REMUNERATION AND WELFARE

In order to raise employee performance motivationa nd loyalty to the Company and to improve the employee's welfare, the Company has stipulated employee remuneration based on performance assessment result. The employee remuneration package has also complied with prevailing Law and regulation, including Provincial Minimum Wage (UMP) and Ministry of Man Power and Transmigration regualtion and other related regulations.

Component of employee's remuneration package includes basic salary, performance incentives and other allowances and facilities. in accordance with Decree No. 06.09/01/ SK/ HKO.01/2017 on Wages in PT PELNI (Persero) Environment, including:

1. Basic Salary;
2. Achievement Incentives;
3. Fixed Benefit;
4. Structural Benefits;
5. Functional Benefits;
6. Command Allowances;
7. Professional Allowance;
8. Telecommunication Allowance;
9. Housing Benefits; and
10. Insurance/Fixed Premium.

In addition, the Company also provided defined-benefit pension program for all organic employees of PT PELNI (Persero) to guarantee employee welfare when entering pension age. This program is implemented in cooperation with PELNI Pension Funds (DPP) and Financial Institution Pension Funds (DPLK). The DPP that is dedicated for organic employees who joined/ was hired up to 2006, however, DPLK is provided for organic employees joining since 2007 onwards.

PELNI REWARD AND PUNISHMENT SYSTEM

As part of performance-based HR management system and Merit System that are implemented in the Company, the HR management is also supported with Reward and Punishment mechanism where every outstanding employees wil receive reward based on achievment, and who committed violation will be punished under legal mechanism.

SUMBER DAYA MANUSIA
Human Resources

Pada tahun 2017, PELNI memberikan penghargaan dedikasi kerja 30 tahun, 25 tahun dan 16 tahun kepada para pegawai di seluruh entitas kantor pusat, kantor cabang dan unit usaha Perseroan lainnya serta menjatuhkan 46 sanksi disiplin, dengan rincian sebagai berikut:

In 2017, PELNI awarded working dedication award for 30 years, 25 years and 16 years working period for employees in all head office, branch office and other business units and administered 42 discipline sanctions with detail explanation are as follows:

Penghargaan Pegawai PELNI 2017

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) mengenai penghargaan yang diberikan kepada pegawai, maka jumlah pegawai yang menerima penghargaan sesuai dengan masa kerja dan tertuang dalam SK No: 04.27/01/SK/HKO.01/2017 Tanggal 27 April 2017 tentang Pemberian Penghargaan Masa Kerja 30 tahun, 25 tahun dan 16 tahun adalah berikut ini:

PELNI Employee Reward 2017

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and PT PELNI (Persero) Workers Union on Employee Reward, total employees who received working period reward and stipulated in Decree Number 04.27/01/SK/HKO.01/2017 dated April 27, 2017 regarding Reward for 30 years, 25 years and 16 years working period are as follows:

No.	Penghargaan Award	Pusat Head Office	Cabang Branch Office	Awak Kapal Crew	Anak Perusahaan Subsidiaries	**Jumlah** Total
1	30 Tahun | 30 Years	6	7	37	37	**87**
2	25 Tahun | 25 Years	41	61	242	29	**373**
3	16 Tahun | 16 Years	16	24	128	19	**187**

Sanksi Disiplin Pegawai Tahun 2017

Sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama antara PT PELNI (Persero) dengan Serikat Pekerja PT PELNI (Persero) tentang pemberian sanksi disiplin untuk pegawai yang melanggar peraturan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Berdasarkan peraturan tersebut, maka berikut ini merupakan jumlah pemberian hukuman disiplin yang diberikan pegawai PT PELNI (Persero):

Employee Disciplion Sanction in 2017

According to Joint Working Agreement between PT PELNI (Persero) and PT PELNI (Persero) Workers Union regarding discipline sanction administration for employees who violate regulation that is stipulated by the Company. Based on this provision, total discipline sanction for employees of PT PELNI (Persero) are as follows:

No.	Jenis Hukuman Type of Punishment	Pegawai Employee		Jumlah Total
		Darat Ashore	Laut Offshore	
1	Teguran Tertulis Written Warning	1	8	9
2	Peringatan Tertulis Written Warning	-	2	2
3	Peringatan Keras Strong Warning	1	12	13
4	Peringatan Keras Terakhir Tha Last Strong Warning	2	7	9
5	Skorsing Suspension	3	7	10
6	PHK PHK	2	1	3
	Jumlah | Total	**9**	**37**	**46**

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

PENDAHULUAN

Divisi Teknologi informasi adalah unit kerja pengelola teknologi informasi di PT PELNI (Persero) yang berada dibawah Direktur SDM & Umum. Berdasarkan No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017, Divisi Teknologi Informasi mempunyai fungsi penyiapan rumusan kebijakan, pelaksanaan, penelaahan, pengendalian dan pelaporan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat *(hardware & software)* teknologi informasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja kesiapan pakai *(serviceability performance)* fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal. Dalam menjalankan fungsinya, Divisi Teknologi Informasi memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut :

1. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja perusahaan yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat *(hardware & software)* teknologi informasi;
2. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan sistem prosedur dalam pengelolaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat *(hardware & software)* teknologi informasi yang menjamin dapat dicapainya kinerja kesiapan pakai *(serviceability performance)* dan kehandalan *(reliability performance)* fasilitas, peralatan serta perangkat teknologi informasi perusahaan yang optimal;
3. Menyelenggarakan kegiatan penyediaan, perawatan, dan perbaikan untuk penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat *(hardware & software)* teknologi informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Memantau, mengkoordinir dan mengendalikan penyelenggaraan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai dan kehandalan fasilitas, peralatan serta perangkat *(hardware & software)* teknologi informasi di Kantor Pusat, Kapal, Kantor Cabang, dan SBU;
5. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat *(hardware & software)* teknologi informasi;
6. Menyiapkan laporan berkala dan atau laporan khusus kegiatan penyediaan, penyiapan pakai, dan kehandalan fasilitas, peralatan, serta perangkat *(hardware & software)* Teknologi Informasi perusahaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

INTRODUCTION

Information Technology Division is the working unit of information technology management in PT PELNI (Persero) which under the Director of Human Resources & General. According to No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017, Information Technology Division has the function of preparing policy formulation, implementing, reviewing, controlling and reporting management of procurement activities, preparation and facilities realibility, information technology equipments and devices (hardware & software) pursuant to the prevailing regulations in order to achieved the facilities readiness (Serviceability performance), an optimal performance of equipments and devices for optimal information technology of the Company. In performing its function, the Information Technology Division has the following key tasks:

1. Preparing work plans (long, medium and short) and the company's work programs related to the supply management, availability and facilities reliability, equipment and equipment (hardware & software) of information technology;
2. Preparing the regulatory policy concept and procedures system in the supply management, preparation and facilities reliability, equipment and devices (hardware & software) information technology for ensuring the achievement of serviceability performance and reliability performance facilities, as well as an optimal enterprise information technology devices;
3. Organizing the provision activities, maintenance and repair activities for the usage preparation and reliability of the company's information technology facilities, equipment and devices (hardware & software) in accordance with prevailing regulations;
4. Monitoring, coordinating and controling the provision activities, availability and reliability of facilities, equipment and hardware (software & hardware) information technology in Head Office, Ship, Branch Office and SBU;
5. Conducting the risk management and mitigation in the supply implementation, preparation and reliability of information technology facilities, equipment and devices (hardware & software);
6. Preparing the periodic reports and / or special reports on the provision, preparation and utilization of the company's Information Technology facilities, equipment and devices (hardware & software) in accordance with the prevailing regulations.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

PENCAPAIAN KINERJA 2017

Divisi Teknologi Informasi dalam menjalankan pekerjaannya di tahun 2017 didasarkan RKAP 2017 dan Kontrak Kerja Manajemen tahun 2017. Pada RKAP 2017, Divisi Teknologi Informasi menjalankan berbagai program kerja yang diamanatkan baik melalui Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) periode 2017-2021 maupun permintaan-permintaan dari unit-unit kerja yang ada. Sedangkan pada kontrak kerja manajemen tahun 2017, Divisi Teknologi Informasi dituntut untuk memenuhi *key performance indicator* (KPI) yang tertera pada *score card.*

2017 PERFORMANCE ACHIEVEMENTS

Information Technology Division in running their tasks in 2017 is based on the Company work and budget plan (RKAP) 2017 and Work Contract of Management for the year of 2017. In RKAP 2017, Information Technology Division runs some various work programs which are mandated, either in Information Technology Strategic Plan PT PELNI (Persero) 2017-2021 period and also request from existing work units. Meanwhile, the management work contract in 2017, Information Technology Division is required to meet the key performance indicator (KPI) listed on the score card.

EVALUASI PENCAPAIAN RENCANA STRATEGIS 2017

Sesuai SK Direksi No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 tentang Prosedur Tata Kelola dan Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero), PT PELNI (Persero) memiliki *roadmap* pengembangan Teknologi Informasi perusahaan periode 2017-2021. Divisi Teknologi Informasi sebagai unit kerja pengelola teknologi informasi, menjalankan inisiatif-inisiatif yang telah diamanatkan dalam *roadmap* rencana strategis tersebut. Tabel berikut ini pencapaian inisiatif-inisiatif tersebut.

2017 STRATEGIC PLANNING ACHIEVEMENT EVALUATION

According to the Board of Directors decision letter No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 about Governance Procedures and Information Technology Strategic Plan of PT PELNI (Persero), The Company has a roadmap for the Company Information Technology development for the period of 2017-2021. Information Technology division is as an Information Technology management unit, conducting the initiatives that have been mandated in the strategic plan's roadmap. The following table attains these initiatives.

Tabel Pencapaian Inisiatif
Table of Initiative Achievement

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Description
Inisiatif Kerja Kategori Aplikasi/Sistem Informasi Working Initiative Categories of Applications/ Information Systems			
1	Pengembangan aplikasi *Document Managemet System.* Development of Document Management System Application.	80%	Aplikasi DMS ini telah digunakan oleh Biro Hukum untuk penyimpanan *file-file* regulasi internal maupun eksternal dan *workflow* (rekam jejak salinan). This DMS Application has been used by Law bureau for Internal or external regulation files saving and workflow (Copy Recording).
2	Pengembangan aplikasi kapal perintis Perintis Ships Application Development	100%	Pengembangan aplikasi kapal perintis telah selesai dilaksanakan menggunakan aplikasi *mobile* berbasis android dan diimplementasikan di 22 kapal. Tahun 2018, direncanakan diimplementasikan ke semua kapal perintis yang beroperasi. Perintis Ships development application have been completed which using mobile android based on Android applications and implemented in 22 Ships. Year 2018, planned to be implemented to all operated Perintis Ships.
3	Pengembangan aplikasi (penyesuaian) *dashboard;* penyesuaian BI dan tabel silang. Dashboard application development (customization); BI and cross table adjustment.	100%	Tabel silang dan *origin-destination* (OD) penumpang sudah dibuatkan di aplikasi PTS. Sedangkan untuk muatan tetap menggunakan aplikasi BI. Cross table and origin-destination (OD) passengers have been created in PTS application. For fixed payload by using BI applications.
4	Pengembangan aplikasi ERP (*Oracle* EBS) Modul *Financial Management.* ERP application development (Oracle EBS) Financial Management Module.	100%	Aplikasi *Oracle* EBS *Finance* sudah mulai diimplementasikan mulai 1 April 2017. Oracle EBS Finance application has been implemented since April 1, 2017.
5	Pengembangan aplikasi PTS: PTS application development: 1. Modul *Online Payment.* PTS application development. 2. Modul *Baggage Handling.* Baggage Handling Module. 3. Modul *Admin User.* User Admin Module	50%	Modul *Admin user* pada aplikasi PTS sudah selesai dilakukan. Modul *Baggage Handling* sudah selesai dibangun, namun belum diimplementasikan. Menunggu kebijakan dari *user*/manajemen. Modul *Online Payment* belum dilakukan. User Admin Module on the PTS application has been completed. Baggage Handling Module has been completed, but not yet implemented. Waiting for policy from user / management. Online Payment module has not been done yet.

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Description
6	Pengembangan aplikasi ESS: ESS application development: 1. Modul *Leaving Notice.* Leaving Notice Module. 2. Modul Hak Cuti. Leave Rights Module. 3. Modul KPI. KPI Module..	75%	Pengembangan modul-modul *leaving notice,* hak cuti dan KPI pada aplikasi ESS sudah dilakukan, namun belum diimplementasikan. leaving notice modules development, leave entitlements and KPI in ESS applications has been done, but not implemented yet.
7	Penyesuaian DCS tahap lanjut. Advance DCS adjustment.	100%	Modul DCS pada aplikasi PTS sudah disesuaikan dengan proses bisnis dan kebutuhan dari user. DCS Modul on PTS application has been adjusted with Business process and needs from user.
8	Penyesuaian aplikasi *Noon Monitoring (Operation Monitoring)* Noon Monitoring application adjustment (Operation Monitoring)	100%	Aplikasi *Operation Monitoring* telah disesuaikan dengan kebutuhan user. Operation Monitoring application has been adjusted with user needs.
Inisiatif Kerja Kategori Jaringan/Infrastruktur TI Working Initiative Categories of Applications/ Information Systems			
1	Perbaikan ruang *server* PELNI. PELNI server space repairment.	15%	Program kerja baru memasuki tahapan perencanaan (konsultan) dan akan diselesaikan pada tahun 2018. The project is in the planning stage (planning by consultant) and will be completed by 2018.
2	Peremajaan Perangkat *Server* dan Jaringan. Server and Networking Devices Rejuvenation.	100%	Program kerja ini telah berhasil untuk melakukan peremajaan untuk *wifi router* yang ada di kantor pusat, perbaikan perkabelan dan *switch* di kantor cabang dan kapal. This work program has been successful to rejuvenate the existing wifi routers at headquarters, repair cables and switches in branch offices and ships.
3	Penyediaan UPS tambahan. Additional UPS Provision.	100%	Telah dilaksanakan pengadaan 1 unit UPS sebesar 20 KVA, namun belum diimplementasikan. 1 UPS unit of 20 KVA procurement has been conducted, but has not been implemented.
4	Penyediaan *Redundant* Perangkat Jaringan. Redundant Network Device Provision.	75%	Beberapa perangkat jaringan cadangan sudah disediakan sepeeti *wifi router,* kabel, dan *switch.* Some backup network devices have been provided such as wifi routers, cables, and switches.
5	Mempersiapkan DRP. Preparing DRP.	15%	Inisiatif ini baru memaparkan analisis dampak bisnis, belum selesai hingga ke pertimbangan biaya (karena *data center* baru belum selesai dibangun). This new initiative exposes business impact analysis, not finalized to cost considerations (because the new data center has not been completed).
6	Pemasangan VSAT Pada Kapal. VSAT installation on Ships.	40%	Hingga Desember 2017, pemasangan VSAT Kapal hanya baru di 10 kapal penumpang. Until December 2017, VSAT Ship installation is in 10 passenger ships only.
Inisiatif Kerja Kategori Tata Kelola Teknologi Informasi Initiative Achievement of Information Technology Governance			
1	Menyesuaikan struktur organisasi Teknologi Informasi. Adjusting Information Technology Organizational Structure.	60%	Sesuai kebijakan manajemen, struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi telah mengikuti tata kelola dan *best practice.* Namun untuk level fungsional dan *supervisor* belum terisi. According to the management policy, Information Technology organizational structure division has followed the governance and best practice. But for the functional level and supervisors have not been filled.
2	Menjalankan *training* peningkatan kompetensi personil Teknologi Informasi sesuai spesialisasi perannya. Implementing the Information Technology Personnel Competency Improvement Training in accordance with specialization role	18%	Divisi Teknologi Informasi telah memberikan pelatihan bagi para pegawai terkait implementasi aplikasi *Oracle* EBS, *database administration Oracle* 12c, dan pelatihan administrator *system* nutanix. Information Technology division has provided training to employees regarding to the implementation of Oracle EBS applications, Oracle administration 12c database, and training system nutanix administrators.
3	Pematangan tata kelola tahap I – mengadopsi *best practice* tata kelola untuk sebagian proses. The first phase of governance maturity - adopting best practice governance for some processes.	100%	Beberapa proses *best practice* tata kelola telah dilakukan yaitu, manajemen resiko, manajemen. Some of the best practice governance processes have been conducted, i.e risk management, management.
4	Mendorong setiap area Teknologi Informasi melakukan riset terhadap tren teknologi dan *best practice* yang relevan. Encouraging each of Information Technology area to research the relevant technology trends and relevant best practices.	100%	Pada tahun 2017, Divisi Teknologi Informasi telah melakukan riset pengembangan aplikasi kapal perintis berbasis tren teknologi saat ini yaitu, aplikasi berbasi teknologi *mobile* dan *wireless.* In 2017, Information Technology Division has been researched Perintis ship application development based on current technology trends namely, mobile and wireless technology based applications.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

No	Inisiatif Initiative	Pencapaian Achievement	Penjelasan Description
5	Survey kepuasan Teknologi Informasi Tahunan. Information Technology Satisfaction Annual Survey.	95%	Inisiatif ini bersifat rutin tahunan. Kuisioner telah dilakukan dengan hasil skor 2,86 (skala 1-4). Hasil tersebut akan dilaporkan kepada manajemen pada awal 2018. This initiative is an annual routine. The questionnaires have been performed with a score of 2.86 (scale 1-4). The results will be reported to management in early 2018.
6	Memberikan laporan periodik Teknologi Informasi ke manajemen. Giving Information Technology Periodic report to the Management.	100%	Laporan perkembangan Teknologi Informasi mingguan *(weekley progress report)* telah disampaikan kepada direksi. Laporan tahunan juga disampaikan kepada manajemen. Information Technology Weekly progress report has been submitted to directors. Annual reports are also submitted to management.
7	Melakukan pengujian teknis keamanan Teknologi Informasi dan tindak lanjut. Performing technical Information Technology security testing and follow-up	100%	Inisiatif ini diusahakan bersifat rutin tahunan. Pada September 2017, PELNI melakukan penetration test terhadap dua aplikasi penting, yaitu aplikasi PTS dan aplikasi portal Teknologi Informasi. Adapun hasil dari pengujian tersebut adalah telah diimplementasikan. This initiative is endeavored to be an annual routine. In September 2017, PELNI conducted penetration tests on two important applications, namely PTS applications and Information Technology portal application. The result of the test is already implemented.
8	Penyusunan dan pemutakhiran arsitektur dan standar Teknologi Informasi. Preparation and updating of Information Technology architecture and standards.	100%	Beberapa standar terbaru dalam dunia teknologi informasi, seperti versi terbaru *database oracle* 12c, penerapan *fiber optic*, sebagai *backbone* jaringan kantor pusat, penerapan *web services* untuk integrasi dengan aplikasi eksternal. Some of the latest standards in the world of information technology, such as the latest version of oracle 12c database, the fiber optic application, as the backbone of the central office network, web services application for integration with external applications.

PENCAPAIAN DAN PENGHARGAAN

PT PELNI (Persero) sebagai BUMN diwajibkan mengikuti kelompok Penilaian Kinerja Unggul (KPKU). Pada tahun 2017, menurut tim asesor KPKU Kementrian BUMN, Divisi Teknologi Informasi dinyatakan sebagai organisasi unit kerja yang berkinerja paling tinggi. Pencapaian prestise lainnya, PT PELNI yang diwakili oleh Divisi Teknologi Informasi, berhasil meraih dua penghargaan TOP IT & TOP Telco yaitu TOP IT *Implementation on Sea Transportation* dan TOP *IT Manager* (kepada VP Teknologi Informasi). Penghargaan ini merupakan ajang tahunan yang diselenggarakan oleh Majalah iTech.

ACHIEVEMENT AND REWARD

PT PELNI (Persero) as a State-Owned Enterprise is required to follow the Superior Performance Assessment group (KPKU). In 2017, according to the KPKU assessor team of the Ministry of State-Owned Enterprises, Information Technology Division is declared as the organization of the highest performing work unit. Other prestige achievements, PT PELNI, represented by Information Technology Division, won two TOP IT & TOP Telco awards, TOP IT Implementation on Sea Transportation and TOP IT Manager (to VP of Information Technology). This award is an annual event that organized by iTech.

STRUKTUR ORGANISASI

Pada tahun 2017, bentuk struktur organisasi Divisi Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) mengalami dua kali perubahan, baik dari sisi Direktur yang menaungi maupun departemen-departemen yang menjadi bagiannya. Pada tanggal 6 November 2017, untuk percepatan dan penguatan implementasi teknologi informasi Perseroan, manajemen berinisiatif melakukan perubahan pada organisasi Direktorat SDM & Umum. Perubahan tersebut termasuk pemindahan Biro Teknologi Informasi dari di bawah arahan Direktur Utama menjadi di bawah DIrektur SDM & Umum. Berikut ini gambaran struktur organisasi Divisi sesuai SK Direksi per tanggal 6 November 2017. Berikut ini gambaran struktur organisasi Divisi sesuai SK Direksi per tanggal 6 November 2017:

ORGANIZATION STRUCTURE

The organization structure of Information Technology Division of PT PELNI (Persero) in 2017 experienced two changes either from the side of the sheltering Director or the departments that were part of it. On November 6, 2017, for accelerating and strengthening the information technology implementation in PELNI, management took the initiative to make changes into the organization Directorate of Human Resources & General. the changes include removal of the Information Technology Bureau from under the direction of the President Director to be under the Director of Human Resources & General. The description of the organizational division structure in accordance with the Decree of the Board of Directors as of November 6, 2017 is as follows:

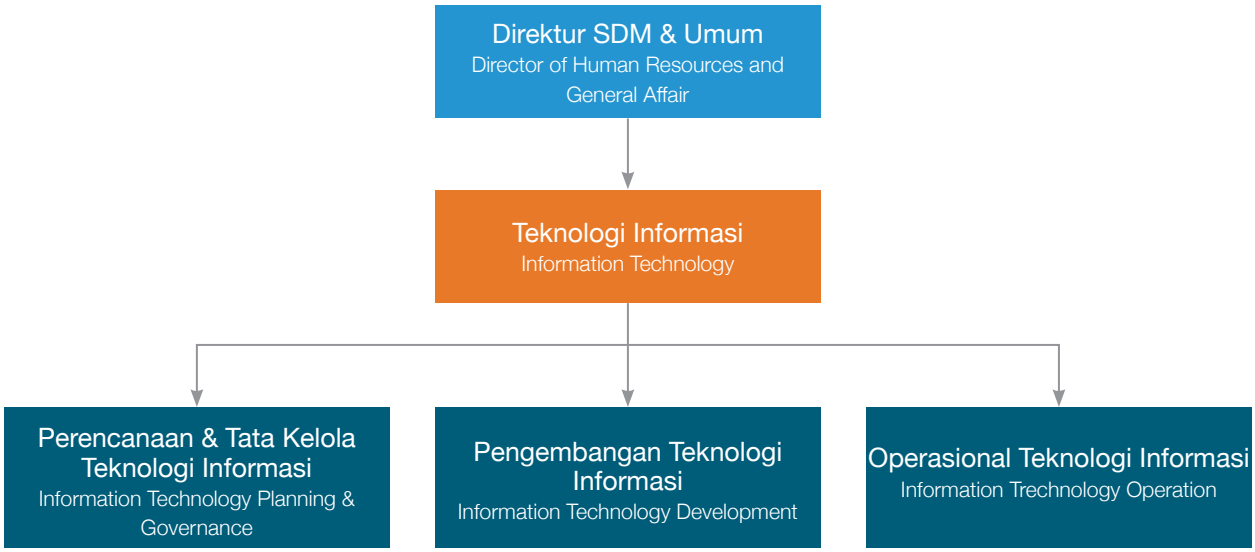

JUMLAH SUMBER DAYA MANUSIA

Sampai dengan 31 Desember 2017, jumlah pegawai Divisi Teknologi Informasi sebanyak 26 orang. Berdasarkan SK Direksi No 11.28/04/SK/HKO.01/2017 tentang Formasi Unit Kerja dan Jabatan pada Lingkup Kantor Pusat, ada 33 formasi yang ada di Divisi Teknologi Informasi PT PELNI. Masih terdapat formasi yang belum terisi sehingga akan dilakukan penyesuaian dan pengisian pejabat pada formasi *level supervisor* untuk lebih meningkatkan kinerja organisasi.

TOTAL OF HUMAN RESOURCES

Until December 31, 2017, the number of Information Technology Division employees are 26 people. Based on Decree No. 11.28/04/ SK/HKO.01/2017 about the Formation of Work Unit and Position on the Scope of Head Office, there are 33 formations in Information Technology Division of PT PELNI. There is still a formation that has not been filled then will be made adjustments and filling officials in supervisor level formation for further improving the organization performance.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

APLIKASI/SISTEM INFORMASI

Aplikasi-aplikasi dan sistem informasi yang ada di PT PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan dari setiap unit kerja/fungsi bisnis yang ada di Perusahaan. Berdasarkan RKAP 2017 dan roadmap inisiatif aplikasi/sistem informasi pada tahun 2017 yang tercantum dalam Rencana Strategis Teknologi Informasi 2017-2021, ada beberapa aplikasi yang telah berhasil diimplementasikan dan ada beberapa aplikasi yang sudah masuk tahapan pembangunan. Berikut pencapaian pengembangan aplikasi-aplikasi di PT PELNI (Persero).

Aplikasi PELNI *Ticketing System* (PTS)

Aplikasi PTS adalah bentuk kerja sama antara PT PELNI (Persero) dengan PT Peruri Digital Security (PDS) sesuai kontrak No. TH.3.2-01/SS/2015 tanggal 30 Januari 2015 yang di-addendum per tanggal 27 September 2016. Pada tahun 2017, Perseroan telah berhasil mengimplementasikan beberapa modul utama yaitu modul *Reservation Online,* modul *Payment Processing & Settlement,* modul *Departure Control System* dan modul Admin Kapal, sedangkan untuk Manajemen Bagasi baru sampai tahap pengembangan.

Selain pencapaian terkait modul-modul aplikasi tersebut, berikut beberapa pencapaian lainnya terkait dengan aplikasi PTS pada tahun 2017:

1. Perluasan/penambahan kanal-kanal penjualan tiket berskala nasional, yaitu bekerja sama dengan Indomaret, Alfamart, Bima Sakti, Dharmawisata Indonesia, ATA Tour dan Medussa Multi Business Center (MMBC).
2. Implementasi penukaran tiket di pelabuhan untuk pembelian tiket melalui *travel agent* untuk 5 pelabuhan/cabang yang dinilai siap secara SDM dan infrastruktur, yaitu Tanjung Priok, Semarang, Tanjung Perak, Balikpapan dan Bitung.
3. Penyediaan *server* aplikasi *backup* yang berada di DRC milik PT PDS di *data center* Biznet Tehnovillage. Penyediaan aplikasi *mirroring* ini sebagai bagian dari implementasi rencana *business continuity* dalam mengantisipasi jika *server* utama di *data center* bermasalah.

APPLICATION/INFORMATION SYSTEM

The existing applications and information systems in PELNI are built on the needs of every business unit/business function in the company. Based on the 2017 Company work and budget plan (RKAP) and roadmap of information / system information initiatives in 2017 which stated in Information Technology Strategic Plan 2017-2021, some applications have been successfully implemented and there are several applications that have entered the development stage. Here is the achievement of application development in PT PELNI (Persero).

PELNI Ticketing System Application

PTS Application is a form of cooperation between PT PELNI (Persero) and PT Peruri Digital Security (PDS) pursuant to the contract No.TH.3.2-01/SS/2015 dated January 30, 2015 which was addendum as of September 27, 2016. PELNI has successfully implemented several main modules In 2017 namely, Online Reservation module, Payment Processing & Settlement module, Departure Control System module, and Ship Administration module. While, for new Baggage Management is on development stage.

Besides, the achievements related to these application modules, some other achievements related to PTS applications by 2017 are as follows:

1. Expansion/addition of national scale ticket sales channels, in collaboration with Indomaret, Alfamart, Bima Sakti, Dharmawisata Indonesia, ATA Tour and Medussa Multi Business Center (MMBC).
2. Implementation of ticket exchanges at the port for ticket purchases through travel agents for 5 ports / branches that are considered ready for human resources and infrastructure, namely Tanjung Priok, Semarang, Tanjung Perak, Balikpapan and Bitung.
3. Provision of backup application server located in DRC is owned by PT PDS at Biznet Tehnovillage data center. Provision of this mirroring application as a part of the business continuity plan implementation for anticipation if the main server in the data center problematic.

Aplikasi *e-Business Suite Modul Finance Application*

Pada 1 Maret 2017, PT PELNI (Persero) telah mulai menerapkan aplikasi *Oracle Enterprise Suite* (EBS) Modul *Financial* untuk manajemen akuntansi dan keuangan. Secara arsitektur aplikasi ini telah berhasil diintegrasikan dengan beberapa aplikasi/sistem *legacy* seperti PTS, aplikasi BL dan aplikasi SDM *(payroll).* Aplikasi inipun terintegrasi dengan sistem perbankan BRI dan Mandiri. Berikut ini arsitektur aplikasi Oracle EBS Modul *Financial* dan aplikasi-aplikasi yang berkaitan.

Oracle e-Business Suite Modul Finance Application

On March 1, 2017, PT PELNI (Persero) had began to implement Oracle Enterprise Business Suite (EBS) Financial Module for accounting and financial management. Architecturally this application has been successfully integrated with some applications/legacy systems, such as PTS, BL, and HR applications (payroll). The Oracle EBS Finance Module application is also integrated with BRI and Mandiri banking systems. Here is the application architecture of Oracle EBS Finance Module and related applications.

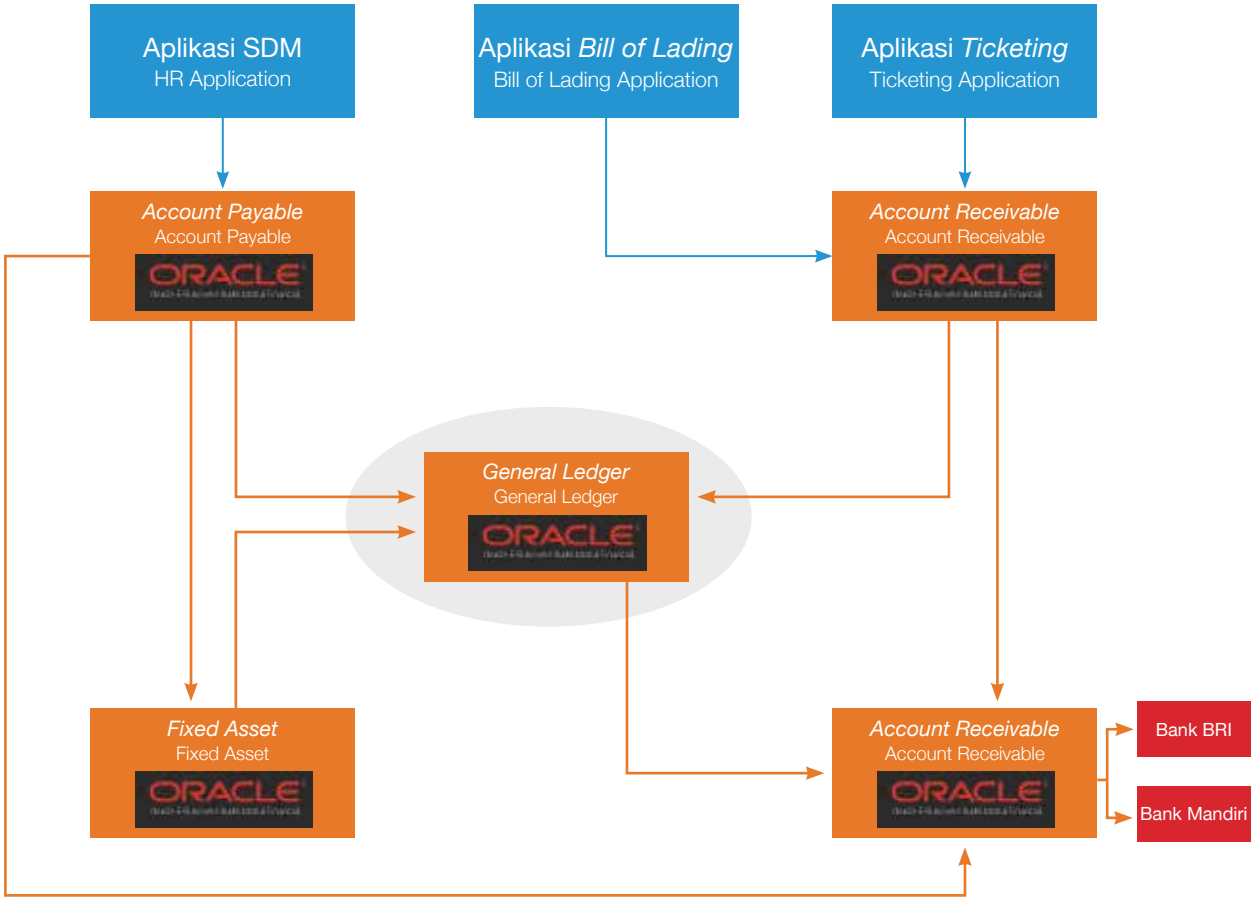

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

Aplikasi Portal PELNI

Aplikasi Portal PELNI beralamat di https://portal.pelni.co.id telah diimplementasikan dan digunakan oleh para pegawai PT PELNI sejak tahun 2015. Aplikasi ini merupakan pintu masuk untuk mengakses semua aplikasi yang dikembangkan secara internal oleh Divisi Teknologi Informasi.

Aplikasi Portal PELNI dibangun berdasarkan kebutuhan pengguna/unit kerja. Adapun modul-modul aplikasi dari Aplikasi Portal PELNI adalah sebagai berikut:

PELNI Portal Application

PELNI Portal application can be accessed at https://portal.pelni.co.id has been implemented and used by PT PELNI employees since 2015. The PELNI Application Portal is the entrance to access all applications which developed internally by the Information Technology Division.

The PELNI Portal application builds on the needs of users/work units. The application modules from PELNI Portal Application are as follows:

No	Nama Modul Aplikasi Name of Module Application	Fungsi Function	Keterangan Description	Pengguna User
1	*Human Resource Management* (HRM) Human Resource Management (HRM)	Manajemen sumber daya manusia (SDM). Human Resources Management.	Aplikasi sudah diimplementasikan sebagian untuk *approval* perbaruan data kepegawaian di ESS, namun masih dalam tahap pengembangan. The application has been partially implemented for the approval of the personnel data update in ESS, but is still under development.	Divisi SDM HR Division
2	*Employee Self Services* (ESS) Employee Self Services (ESS)	Manajemen layanan mandiri untuk informasi & data kepegawaian. Self services management for information & employement data.	Aplikasi sudah secara luas digunakan oleh para pegawai. Application was already widely used by employees.	Divisi SDM dan seluruh pegawai PELNI HR Division and whole employees of PELNI
3	*Asset Management* Asset Management	Manajemen aset milik PELNI termasuk pencatatan, penyewaan dan pelaporan. Self services management for information & employement data.	Aplikasi sudah digunakan oleh Divisi Pengelolaan Aset. Application has been already used by the Asset Management Division.	Divisi Pengelolaan Aset Asset Management Division
4	*Helpdesk Information Technology Ticketing System* Helpdesk Information Technology Ticketing System	Manajemen penanganan insiden dan layanan teknologi informasi. Management of incident handling and information technology services.	Aplikasi sudah digunakan oleh para pegawai *helpdesk* Teknologi Informasi PELNI. Application has been used by all helpdesk employees of PELNI's Information Technology.	Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division
5	Aplikasi Kapal Perintis Perintis Ship Application	Manajemen pemasaran dan penjualan tiket kapal perintis. Marketing management and ticket sales of Perintis Ships.	Aplikasi ini sudah diimplementasikan di 22 kapal perintis. Application has been already used on 22 Perintis ships.	Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang & Perintis Passenger Transportation Marketing Division of Passenger & Perintis Ships
6	*Document Management System* Document Management System	Manajemen kearsipan dokumen dan *workflow* PELNI. Document archive management and workflow of PELNI.	Aplikasi ini sudah digunakan sebagian oleh Biro Hukum untuk penyimpanan dokumen regulasi eksternal maupun internal dan pengelolaan salinan bekas. This application has been partially used by the Legal Bureau for the storage of external and internal regulatory documents and the management of scrap copies.	*Corporate Secretary,* Biro Hukum Corporate Secretary, Legal Bureau
7	*Dashboard Management* Dashboard Management	*Dashboard* untuk manajemen terkait produksi dan penghasilan PELNI. Dashboard for management related to PELNI production and revenues.	Aplikasi ini sudah digunakan namun masih dalam perbaikan dan pengembangan. This application has been already used but still in repairment and development.	Divisi Nautika *(Operation Room),* Direksi Nautica Division (Operation Room), The Board of Director

No	Nama Modul Aplikasi Name of Module Application	Fungsi Function	Keterangan Description	Pengguna User
8	*Operation Monitoring* Operation Monitoring	Manajemen untuk *monitoring* operasional kapal-kapal PELNI (terkait posisi, haluan, kecepatan, *noon positon).* Management for operational monitoring of PELNI ships (related to position, bow, speed, noon positon).	Aplikasi ini sudah digunakan oleh *Operation Room* sejak tahun 2015. This application has been used by Operation Room since 2015.	Divisi Nautika *(Operation Room)* Nautica Division (Operation Room)
9	Wiki PELNI Wiki PELNI	Manajemen pengetahuan yang terkait dengan PELNI. Knowledge management related to PELNI.	Aplikasi ini diperuntukkan bagi Divisi SDM pada departemen Pengembangan SDM, namun belum sepenuhnya digunakan. This application is for Human Resource Division in Human Resources Development department, but has not been fully used.	Divsis SDM HR Division
10	*Project Management* Project Management	Pengelolaan dan pengawasan terhadap proyek-proyek yang ada di PELNI. Management and supervision of the projects in PELNI.	Aplikasi ini merupakan permintaan dari Komisaris dan Direksi untuk mengawasi kinerja proyek-proyek yang ada di PELNI. This application is a request from the Board of Commissioners and the Board of Directors for supervising the performance of projects in PELNI.	*Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management,* Direksi Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, The Board of Director
11	*Logistic Management* Logistic Management	Pengelolaan proses pengadaan, mulai dari pembuatan paket pengadaan hingga dokumen hasil negosiasi/klarifikasi. Procurement management processes, from procurement packages to negotiated / clarification documents.	Aplikasi ini merupakan permintaan dari Direktur Keuangan dan Divisi Pengadaan untuk mempermudah pengelolaan pengadaan, namun aplikasi ini belum sepenuhnya digunakan karena PELNI berencana menggunakan *Oracle* EBS SCM. This application is a request from the Finance Director and Procurement Division to facilitate procurement management, but this application has not been fully used because PELNI is using Oracle EBS SCM.	Divisi Pengadaan Procurement Division
12	*Master Data* Master Data	Manajemen dan *master* terkait dengan aplikasi-aplikasi di dalam Portal. Management and master associated with the applications within the Portal.	Aplikasi ini telah digunakan untuk mendukung pengelolaan data-data. This application has been used to support data management	Divisi Teknologi Informasi Information Technology Division
13	*Agency Management* Agency Management	Pengelolaan transaksi keagenan kapal-kapal eksternal. Agency transactions management of external ships.	Aplikasi ini sedang dalam tahap pengembangan. This application is currently under development.	Divisi Keagaenan & Tur Agency & Tur Division

Aplikasi Kapal Perintis

Aplikasi Kapal Perintis merupakan inisiatif dari Divisi Teknologi Informasi untuk mendukung proses bisnis pemasaran dan penjualan serta operasional kapal-kapal perintis yang dioperasikan oleh PELNI. Aplikasi ini dibangun secara internal oleh Divisi Teknologi Informasi mulai akhir tahun 2016 dan mulai diimplementasikan pada triwulan kedua tahun 2017. Ada tiga modul yang menjadi bagian dari modul ini. Tabel berikut ini menjelaskan modul-modul yang ada di aplikasi Kapal Perintis.

Perintis Ships Application

The Perintis Ship Application is an initiative of the Information Technology Division for supporting the business processes of marketing, sales and operational of Perintis ships which operated by PELNI. This application is built internally by the Information Technology Division since the end of 2016 and began to be implemented in the second quarter of 2017. There are three modules that are part of this module. The Perintis ship application modules is described with the following table.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

No	Modul Aplikasi Module Application	Keterangan Description	Pengguna User
1	Modul Administrasi Pusat Central Administration Module	Modul aplikasi ini berada di dalam aplikasi Protal PELNI yang berfungsi untuk mengelola master data seperti, kapal, pelabuhan, rute, jadwal/ emplooi, dan tarif. This application module is inside the PELNI Portal application that serves for managing data master such as, ship, port, route, schedule/emplooi, and tariff.	Kantor Pusat: Head Office: • Divisi Pemasaran Angkutan Penumpang Kapal Penumpang & Perintis. Passenger Transportation Marketing Division of Passenger & Perintis Ships. • Divisi Operasi Kapal Penumpang & Perintis. Passenger & Perintis Ship Operations Division.
2	Modul Administrasi Kapal Ships Administration Module	Modul aplikasi ini di-*install* di *server* kapal yang berfungsi untuk mengelola *upload* data penghasilan/penumpang, *download data master,* dan pelaporan daftar penumpang serta penghasilan kapal. This application module is installed on the ship server that serves for managing the upload data of revenues / passenger, download master data, and reporting passenger list and ship income.	Kapal Ships
3	Modul *Mobile* Mobile Module	Modul aplikasi ini bersifat *mobile* dan di-*install* di *smartphone* android. Modul ini berfungsi untuk melakukan penjualan dan *check-in*/pemeriksaan tiket penumpang. This application module is mobile and installed on android smartphone. This module serves for conducingt sales and check-in / checking passenger tickets.	Kapal Ships

Spesifikasi dan Arsitektur Aplikasi Kapal Perintis

Secara gambaran umum berikut ini arsitektur aplikasi Kapal Perintis:

Specification and Architecture Application of Perintis Ships

In general view, the architecture application of Perintis ships is as follows:

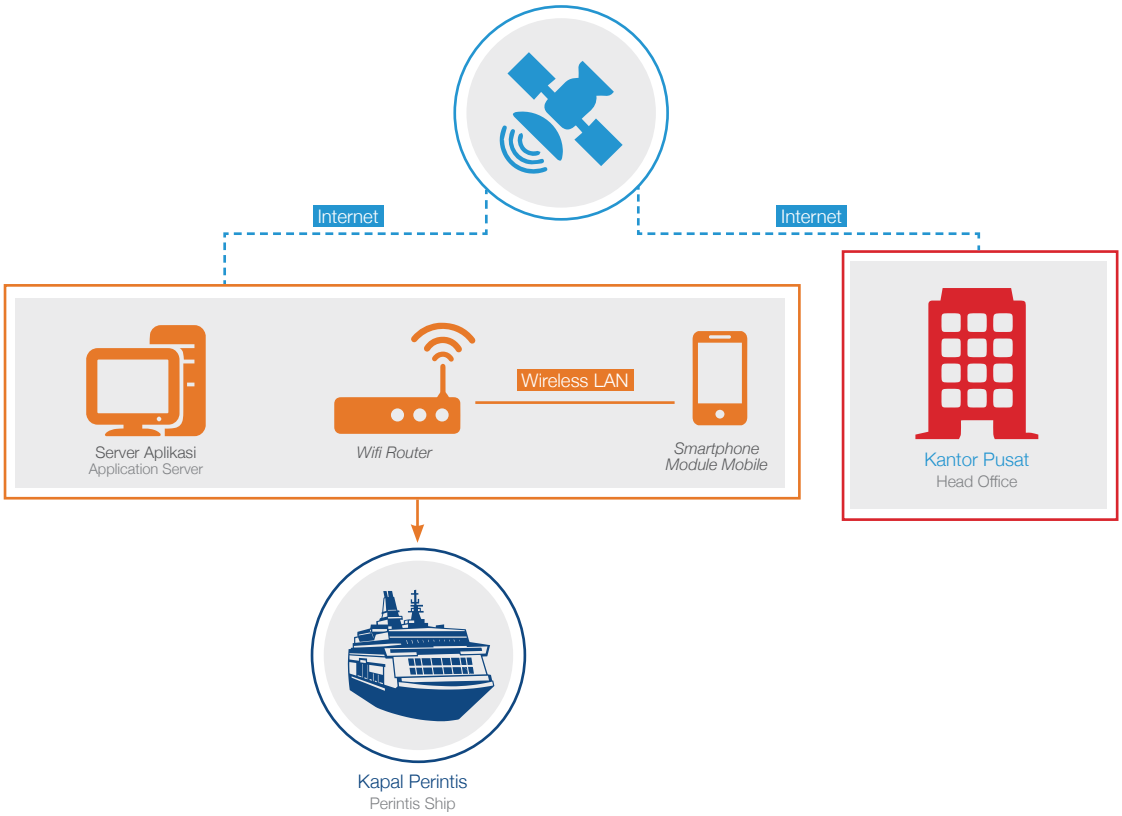

Server modul Administrasi Kapal melakukan *download* data-data *master* dan *upload* data penumpang dan penjualan dengan memanfaatkan modem internet seluler. Modem internet seluler menggunakan kartu SIM dan terhubung dengan internet. Rute kapal-kapal perintis melalui daerah pelosok seluruh Indonesia yang memiliki konektivitas kurang baik. Oleh karena itu, proses *download* dan *upload* pada modul Administrasi Kapal dilakukan secara otomatis jika sinyal telekomunikasi seluler terdeksi/tersedia. Modul *mobile* aplikasi Kapal Perintis melakukan *download* data-data master dan *upload* data penumpang dan penjualan dari modul Administrasi kapal dan ke modul Administrasi Kapal melalui jaringan *wireless LAN* yang tersedia di modem internet seluler. Pada modul Administrasi Pusat, proses *upload* data-*data master* ke kapal dan *download* data-data penumpang dan penjualan dilakukan melalui jaringan internet.

Implementasi Aplikasi Kapal Perintis

Aplikasi Kapal Perintis berhasil diimplementasikan di 21 kapal dan 11 cabang/sub cabang/*terminal point.* Sisa kapal yang belum diimplementasikan adalah 26 kapal dengan 9 cabang/terminal point. Saat ini, aplikasi Kapal Perintis belum terintegrasi dengan aplikasi *Oracle* EBS *Finance* sehingga data penghasilan penjualan dari aplikasi Kapal Perintis masih dimasukkan secara manual ke aplikasi Kapal Perintis akan difokuskan pada integrasi kedua aplikasi tersebut.

Aplikasi *New Bill of Lading* (New BL)

Berdasarkan roadmap perusahaan yaitu, perubahan fokus bisnis dari angktuan penumpang ke angkutan muatan *(total logistics)* dan menanggapi kemajuan teknologi informasi akhir-akhir ini, manajemen berinisiatif untuk membangun aplikasi *New BL* yang dimaksudkan untuk mengganti aplikasi BL (lama) baik dari sisi teknologi maupun proses bisnis. Aplikasi *New BL* akan menggunakan teknologi *open source* dan berfungsi sebagai *platform* terbuka untuk semua perusahaan bisnis yang bergerak dibidang logistik.

Aplikasi *Oracle EBS Supply Chain Management*

Aplikasi *Oracle EBS Supply Chain Management* (SCM) adalah inisiatif manajemen dalam rangka pengembangan sistem-sistem informasi best practice yang berkaitan dengan *enterprise resource planning* (ERP). Kebutuhan aplikasi ini dikarenakan aplikasi ILMS (yang mendukung proses bisnis pembelian/pengadaan dan pergudangan) telah tertinggal dalam hal teknologi.

Pembangunan aplikasi *Oracle EBS* SCM menggunakan konsep yang sama dengan pembangunan aplikasi *Oracle EBS Finance*. Ada tiga tahapan yang akan dilalui yaitu,

The Ship Administration of module server downloads master data and uploads passenger and sales data by utilizing modern mobile internet. The mobile internet modem uses a SIM card and connects to the internet. Route of Perintis Ships through outlying areas throughout Indonesia that have poor connectivity. Therefore, the download and upload process of the Ship Administration module is performed automatically if the mobile telecom signal is detected / available. The Perintis Ship Mobile app module downloads master data and uploads passenger data and sales from the Ship Administration module to the Ship Administration module via wireless LAN network available on mobile internet modem. In the Central Administration module, the process of uploading master data to the ship and downloading passenger and sales data is done through internet network.

Implementation of Perintis Ships Application

The Perintis Ship Application was successfully implemented in 21 ships and 11 branches / sub branches / terminal points. The remaining ships that have not been implemented to 26 ships with 9 branches / terminal points. Currently, the Perintis Ship app has not been integrated with the Oracle EBS Finance application. Therefore, sales revenue data from the Perintis Ship app still manually inserted into the Perintis Ship app will be focused on the integration of both applications.

New Bill of Lading Application

Based on the company's roadmap is namely the business focus changing from passengers to cargo ships (Total Logistic) and responding to the latest information technology advances, management has initiative to build a New BL application which intended to replace BL (old) applications both in technology and process business. New BL application will use open source technology and serves as an open platform for all business companies engaged in logistics.

Oracle EBS Supply Chain Management Application

The Oracle EBS Supply Chain Management (SCM) application is a management initiative in the development of best practice information systems related to enterprise resource planning (ERP). The need for this application is because the application of ILMS (which supports business purchasing / procurement and warehousing) has been left behind in technology.

The development of Oracle EBS SCM applications uses the same concept as Oracle EBS Finance application

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

perencanaan, pengembangan, dan implementasi. Untuk mendukung pembangunan aplikasi tersebut, manajemen membentuk Tim Implementasi Aplikasi *Oracle EBS Supply Chain Management* sesuai SK No.03.21/03/SK/HKO.01/2017 dan perubahannya SK No.08.24/02/SK/HKO.01/2017 yang terdiri dari para pegawai lintas direktorat.

INFRASTRUKTUR & *WORKSTATION*

Infrastruktur *Data Center*

Pada tahun 2017, PELNI memiliki beberapa tempat/lokasi penempatan perangkat keras *server (data center)* yaitu, Ruang *Server* Kantor Pusat dan *Co-Location Data Center* Telkom Sentul. *Server-server* yang ada di kedua lokasi tersebut dikelola dan merupakan tanggung jawab langsung Divisi Teknologi Informasi. Selain kedua lokasi ruang *server* tersebut, berdasarkan kerja sama dengan PT Peruri Digital Security, PELNI juga memiliki *server-server* pendukung aplikasi PELNI *Ticketing System* (PTS) yang berlokasi di Gedung *Cyber* 2 Kuningan dan di Biznet Technovillage Cimanggis, yang dialokasikan untuk *server-server mirroring* aplikasi PTS. Namun, *server-server* aplikasi PTS tersebut sepenuhnya dikelola dan merupakan tanggung jawab PT PDS dengan tingkat ketersediaannya diatur dalam SLA.

Infrastruktur Jaringan

Infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero) terdiri dari beberapa jenis konektivitas yang menghubungkan kantor pusat, kantor cabang/pelabuhan, dan beberapa kapal penumpang.

Berikut ini topologi secara umum infrastruktur jaringan PT PELNI (Persero):

development. There are three stages to be passed namely planning, development, and implementation. To support the application development, management formed the Oracle EBS Supply Chain Management Application Team pursuant to Decree No.03.21/03/SK/HKO.01/2017 and the amendment of SK No.08.24/02/SK/HKO.01/2017 consisting of cross-directorate staff.

INFRASTUCTURE & WORKSTATION

Data Center Infrastucture

In 2017, PELNI has some several place / location for hardware server placement (data center), those are Server Room of head office and Co-Location Data Center Telkom Sentul. The servers in both locations are managed and directly under Information Technology Division responsibility. In addition to those two server space locations, pursuant to collaboration with PT Peruri Digital Security, PELNI also has PELNI Ticketing System (PTS) server support located in Cyber 2 Kuningan Building and Biznet Technovillage Cimanggis which are allocated for mirroring servers of PTS application. However, this PTS application servers are fully managed and under PT PDS responsibility with the level of availability set forth in the SLA.

Network Infrastructure

PT PELNI (Persero) network infrastructure consists of several types of connectivity which connecting head office, branch / port, and some passenger ships.

Topology in general network infrastructure of PT PELNI (Persero) is as follows:

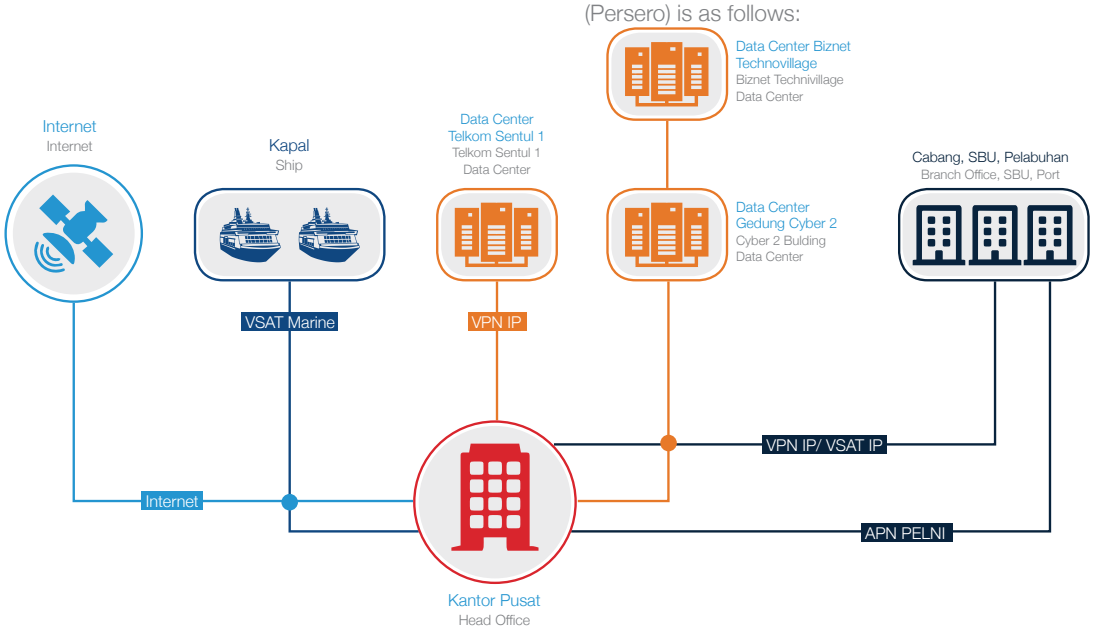

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

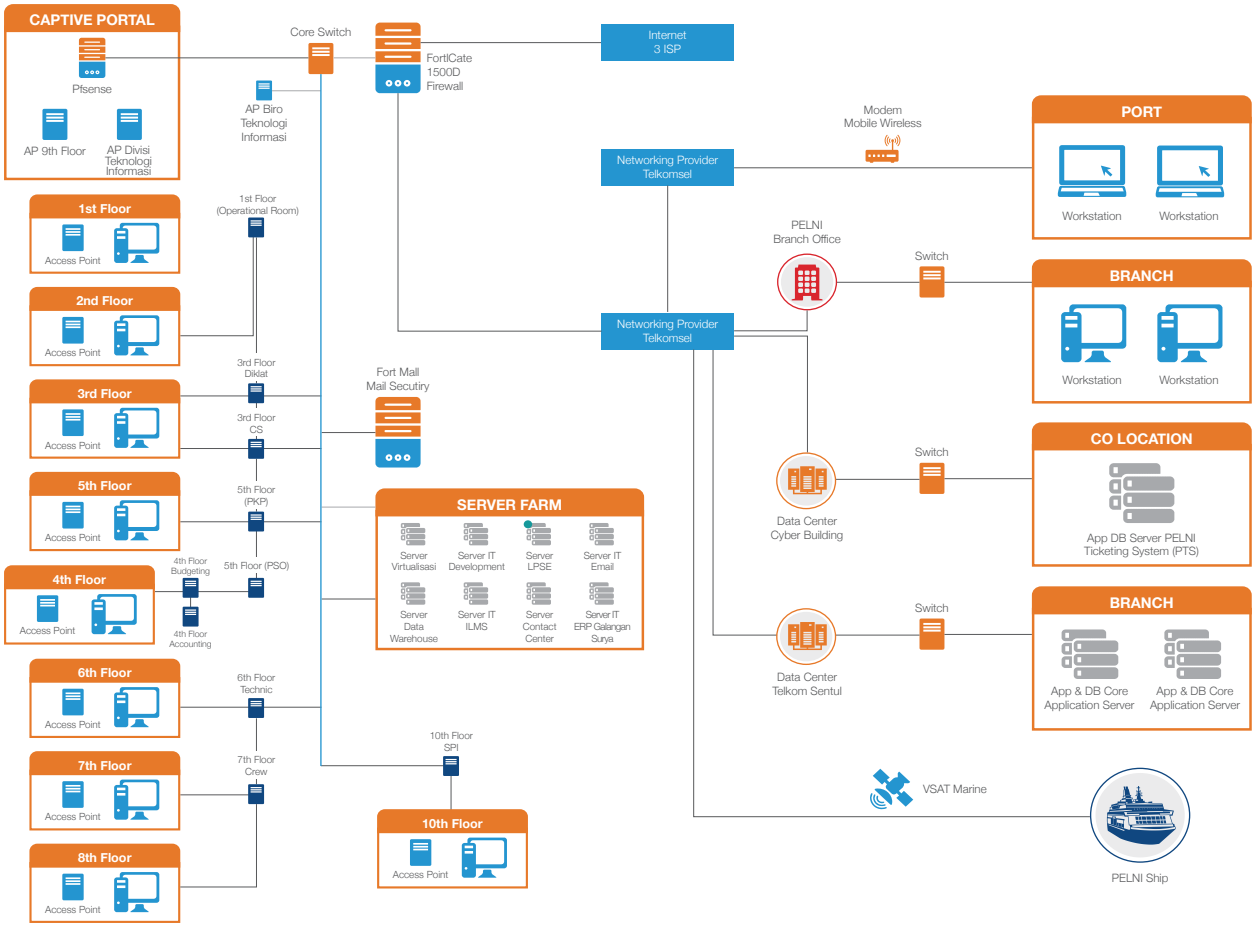

Perangkat *Workstation*

Sejak tahun 2015, untuk penyediaan perangkat *workstation* (perangkat kerja) bagi para pegawai PELNI dilakukan dengan metode sewa *(seat management).* Perangkat-perangkat yang dimaksud berupa *personal computer (PC)*, laptop, *scanner, printer,* dan proyektor. Layanan tersebut diukur dan dijamin dalam bentuk *Service Level Agreement* (SLA) yang disepakati baik PELNI maupun *vendor* dalam suatu kontrak.

Workstation Devices

Since 2015, To the provision of workstation devices for PELNI employees have been done by lease (seat management) method. Those devices are personal computers (PCs), laptops, scanners, printers, and projectors. The service is measured and guaranteed in the form of Service Level Agreement (SLA) which agreed by either in PELNI or vendor in a contract.

TEKNOLOGI INFORMASI
Information Technology

TATA KELOLA TEKNOLOGI INFORMASI & MANAJEMEN RISIKO

Tata kelola Teknologi Informasi dan manajemen risiko Teknologi Informasi merupakan bagian penting dalam pengelolaan teknologi informasi di semua perusahaan. Tingkat kematangan tata kelola Teknologi Informasi yang tinggi akan mempengaruhi kinerja dan kualitas dari layanan Teknologi Informasi yang dihasilkan, sedangkan manajemen risiko yang baik akan melindungi pengelolaan layanan Teknologi Informasi perusahan.

Sesuai SK Direksi No.07.28/02/SK/HKO.01/2017 dan Peraturan Menteri BUMN No.Per-02/MBU/2013, Tata Kelola Teknologi Informasi PELNI mengadopsi proses-proses yang ada pada *framework* (kerangka kerja) COBIT 5.

Gambar berikut ini merupakan kerangka kerja tata kelola Teknologi Informasi di PELNI:

INFORMATION TECHNOLOGY & RISK MANAGEMENT GOVERNANCE

Information Technology governance and Information Technology risk management are an important part of managing information technology in all companies. The high maturity level of Information Technology governance will affect the performance and quality of Information Technology services that generated. Meanwhile good risk management will protect The Company Information Technology services management

Pursuant to Board of Directors decission letter No.07.28/02 /SK/HKO.01/2017 and Minister of State-Owned Enterprises Regulation No.Per-02/MBU/2013, Information Technology Governance of PELNI adopts the processes which contained in the COBIT 5 framework.

Information Technology governance framework at PELNI with the following picture:

PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) - *Framework* Tata Kelola Teknologi Informasi
PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI) - Information Technology Governance Framework

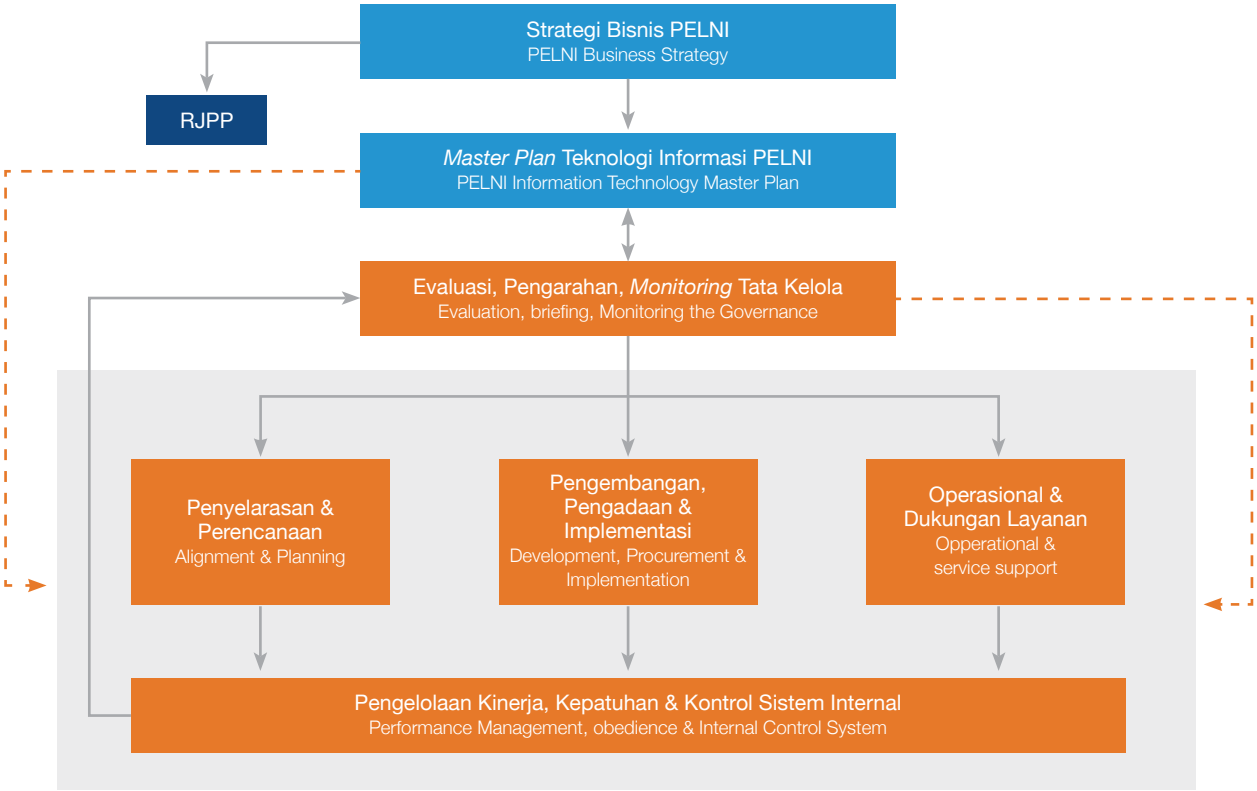

No	Nama Proses Name of Process	Perangkat Penerapan Devices Application
1	Pengelolaan insiden dan permintaan layanan Teknologi Informasi. Incident management and Information Technology service demand .	**Aplikasi *Information Technology Helpdesk Ticketing System*** untuk pencatatan tiket dan pelaporan insiden dan layanan Teknologi Informasi. **Information Technology Helpdesk Ticketing System application** for ticket recording and incident reporting and Information Technology services.
2	Pengelolaan risiko Teknologi Informasi. Information Technology Risk management.	Penyusunan laporan ***risk register* dan *response plan*** Divisi Teknologi Informasi setiap triwulan kepada manajemen. Preparation of **risk registers and response plans** of Information Technology Division quarterly to management.
3	Pengelolaan *release* dan *deployment.* Management of Release and deployment	**Berita Acara Rilis dan *Deployment*** yang ditandatangani oleh Divisi Teknologi Informasi dan pemilik proses bisnis *(user).* Minutes of Release and Deployment signed by the Information Technology Division and business process owner (user).
4	Pengelolaan konfigurasi Teknologi Informasi Information Technology Configuration Management	Pencatatan setiap perubahan konfigurasi di perangkat *server,* jaringan, administrator aplikasi/ database menggunakan fasilitas ***cloud* (cloud.pelni.co.id)** sehingga dapat diketahui oleh pihak-pihak yang berwenang. Recording for any configuration changes on server, network, application/database administrator using **cloud (cloud.pelni.co.id)** facility so that it can be recognized by the authorities.
5	Pengelolaan perubahan. Changes Management.	Pengisian ***form Information Technology Change Request* (ITCR)** dan persetujuan perubahan/modifikasi pada aplikasi, *server,* maupun perangkat kerja. Completion of **Information Technology Change Request (ITCR) form** and approval of changes / modifications to applications, servers, or work devices.

MANAJEMEN RISIKO TEKNOLOGI INFORMASI

Manajemen Risiko Teknologi Informasi dilakukan mengikuti implementasi Perusahaan berdasarkan SK Direksi No.10.06/2/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko Berbasis ISO 31000 di PT PELNI (Persero). Setiap unit kerja/cabang/SBU diminta menyampaikan laporan risk register dan response plan per triwulan kepada Biro Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko untuk dilaporkan kepada manajemen (Direksi dan Komisaris). Dari daftar risk response plan pada tahun 2017, ada beberapa program yang penting terkait infrastruktur dan layanan Teknologi Informasi yaitu, perencanaan pembangunan data center dan pembuatan DRC. Kedua Program tersebut diharapkan dapat diimplementasikan di tahun 2018.

INFORMATION TECHNOLOGY RISK MANAGEMENT

Information Technology Risk Management is conducted following the implementation of the Company based on Decree of the Board of Directors No.10.06/2/SK/HKO.01/2016 on the Establishment of ISO 31000 Risk Management Guideline at PT PELNI (Persero). Each work unit/branch/SBU is required to submit a quarterly risk register and response report to the Corporate Planning & Risk Management Bureau to reported to management (Board of Directors and Commissioners). From the list of risk response plans in 2017, there are several important programs related to Information Technology infrastructure and services namely, data center development planning and manufacturing of DRC. Both programs are expected to be implemented in 2018.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA

Procurement Governance

Transformasi bisnis proses dan operasional yang dilaksanakan oleh PT PELNI (Persero) selama tahun 2016 juga didukung oleh penguatan dan perbaikan prosedur pengadaan barang dan jasa. Hal ini bertujuan untuk memastikan proses pengadaan barang dan jasa yang sesuai dengan kaidah Tata Kelola Perusahaan yang Baik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam setiap tahap proses pengadaan barang dan jasa, PT PELNI (Persero) menerapkan etika dan prinsip-prinsip pengadaan (efisien, efektif, transparan, terbuka, bersaing, adil dan akuntabel) yang telah terkandung dalam kebijakan pengadaan Barang dan Jasa Perseroan. Di sisi lain, PT PELNI (Persero) juga mengedepankan pemilihan Penyedia Barang dan Jasa yang berpengalaman dan mampu memberikan mutu layanan terbaik, harga kompetitif, garansi purna jual terbaik dan dilaksanakan oleh perusahaan berpengalaman memiliki keahlian sesuai dengan kebutuhan barang dan jasa.

Pelaksanaan proses pengadaan barang dan jasa merujuk pada *Standard Operational Procedure* Pengadaan Barang dan Jasa yang berlaku di PT PELNI (Persero) yang ditetapkan sesuai Surat Keputusan Direksi Nomor 29A/HKO.01/DIR/II-2012 dengan perubahan terakhir terkait dengan kewenangan Direksi dalam proses pengadaan barang dan jasa atau penggunaan anggaran sesuai dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 01.17/3/SK/HKO.01/2017 telah memiliki jiwa yang sama dengan Peraturan Menteri BUMN terkait Pengadaan Barang dan Jasa dengan Nomor Per-5/MBU/2008 dan Nomor Per-15/MBU/2012.

STRUKTUR ORGANISASI DIVISI PENGADAAN

Struktur Organisasi divisi Pengadaan PT PELNI (Persero) digambarkan sebagai berikut:

Business process and operational transformation that was done by PT PELNI (Persero) throughout 2016 was also supported by strengthening and improving the procurement procedure. This aims to ensure the procurement process has complied with Good Corporate Governance principles as well as other prevailing Law and regualtion. In every procurement process, PT PELNI (Persero) adapts procurements ethics and principles (efficient, effective, transparent, competitive, fair and accountable) as contained in the Company procurement policy. On the other hand, PT PELNI (Persero) also prioritizes the Product and Service supplier with experience and best service quality offering, competitive price, after-sales guarantee as well as project execution by well-experienced and expert company in accordance with the product and service requirement.

The implementation process of goods and services procurement implementation refers to prevailing Procurement Standard Operational Procedure at PT PELNI (Persero) that is stipulated under Board of Directors Decree Number 29A/HKO.01/DIR/II.2012 with the latest amendment related with the Board of Directors' authority in procurement process according to Board of Directors Decree Number 01.17/3/SK/HKO.01/2017 with similar consent with Minister of SOE Regulation on Procurement under Regulation Number PER-5/MBU/2008 and Number PER-15/MBU/2012.PT PELNI (Persero) Procurement Bureau .

PROCUREMENT DIVISION ORGANIZATION STRUCTURE

Procurement Division Organization Structure is illustrated below:

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement Governance

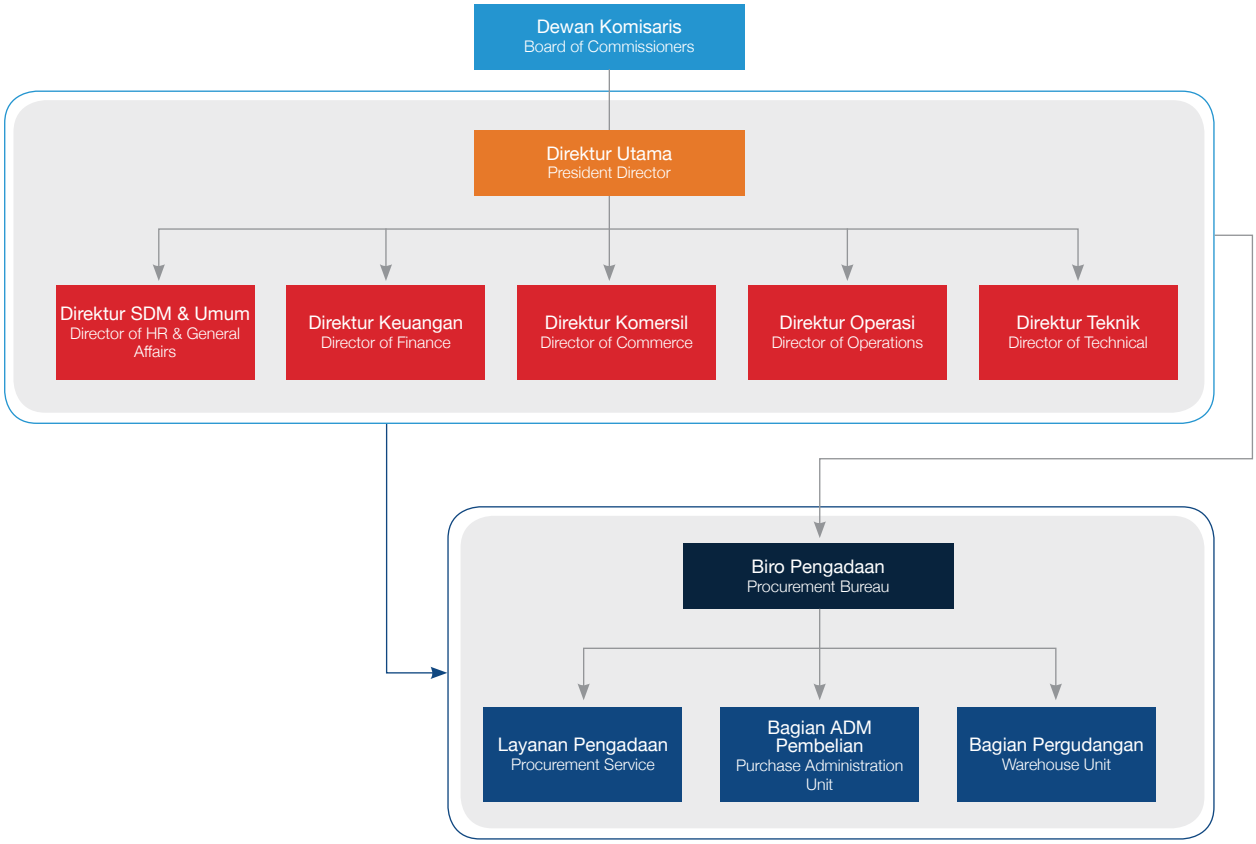

Dalam pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, Perseroan berusaha mengoptimalkan sinergi BUMN sebagai upaya untuk pemberdayaan BUMN dengan prinsip saling menguntungkan. Pemilihan Penyedia telah dilakukan secara terbuka bagi pihak yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat. Seluruh proses pengadaan dilakukan berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan, Perseroan juga telah memiliki Harga Perkiraan Sendiri (HPS) yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan. Untuk pekerjaan yang bersifat kompleksitas dan bernilai tinggi, PT PELNI (Persero) menggunakan sarana LPSE untuk mengundang Penyedia berkompetensi melalui http://lpse.pelni.co.id. Perubahan dan perbaikan sistem terus dilakukan secara bertahap agar seluruh informasi mudah diakses oleh pihak manapun dan dapat cepat memperoleh informasi apabila dibutuhkan.

In the implementation of goods and services procurement, the Company strives to optimize SOE Synergy as an effort to empower SOE with mutual beneficiary principle. The vendor selection has been done transparently for parties who meet the requirements and implemented under fair competition. The entire procurement process was implemented according to clear and transparent procedures. The Company also has Owner Estimation (OW) price that is calculated based on expertise and accountable data. For complex and high-value projects, PT PELNI (Persero) applies LPSE channel to invite the vendor to compete via http://lpse.pelni.co.id. System revision and improvement are done continuously and gradually in order to ensure the information is accessible for every party to acquire necessary information quickly.

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement Governance

DIAGRAM ALUR PENGADAAN BARANG DAN JASA PT PELNI (PERSERO)

FLOW CHART OF GOODS AND SERVICES PROCUREMENT OF PT PELNI (PERSERO)

Divisi Pengadaan
Procurement Division

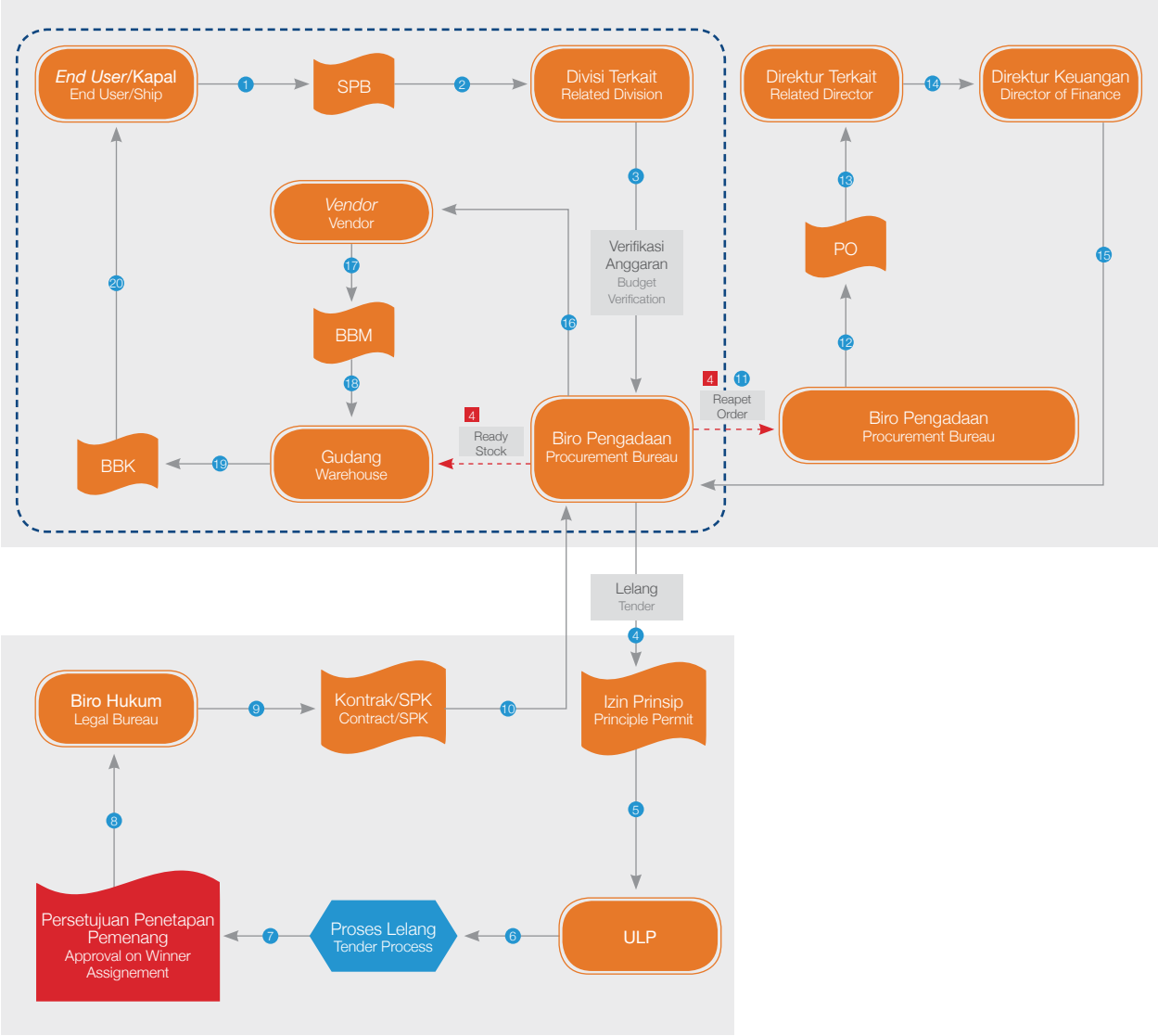

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement Governance

Permintaan Barang *Ready Stock*
Rady Stock Product Request

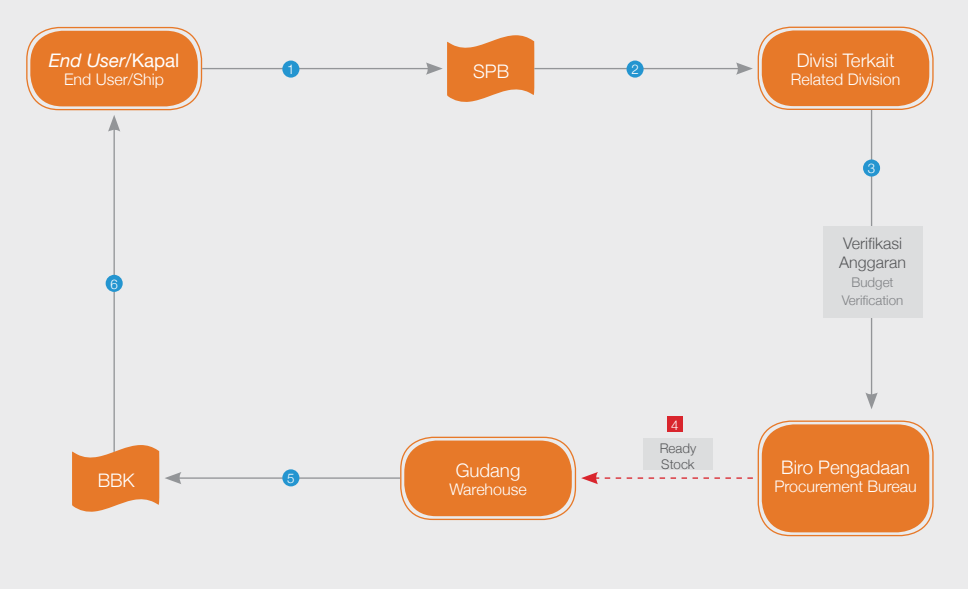

Pengadaan Barang
Goods Procurement

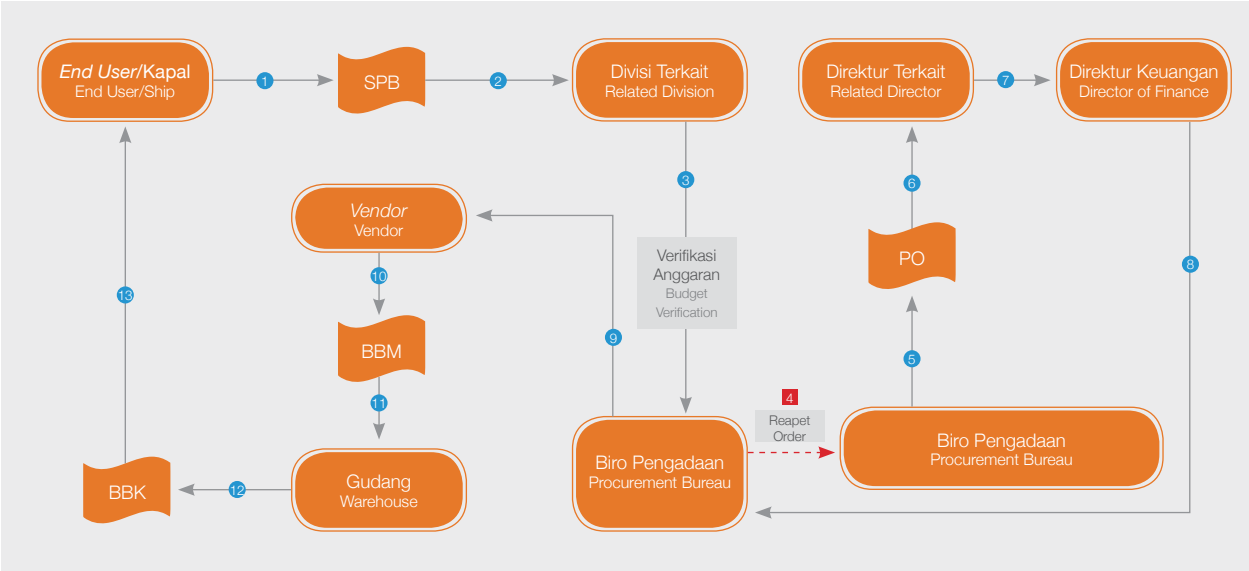

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement Governance

Pengadaan Barang Melalui Lelang
Procurement of Goods via Tender

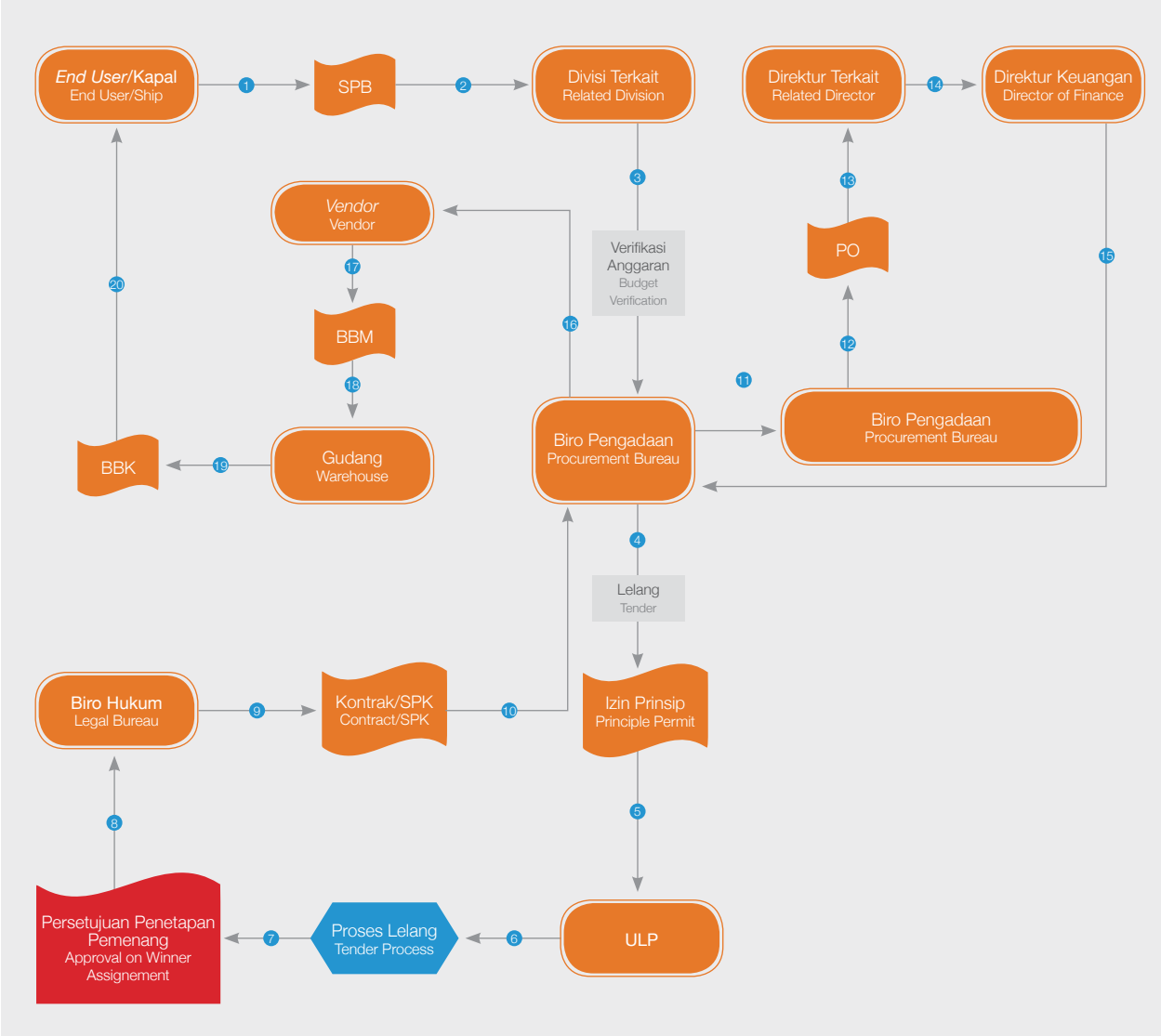

TATA KELOLA PENGADAAN BARANG DAN JASA
Procurement Governance

Sistem Pembayaran Pengadaan Barang Dan Jasa PT PELNI (Persero)
PT PELNI (Persero) Procurement of Goods and Services Payment System

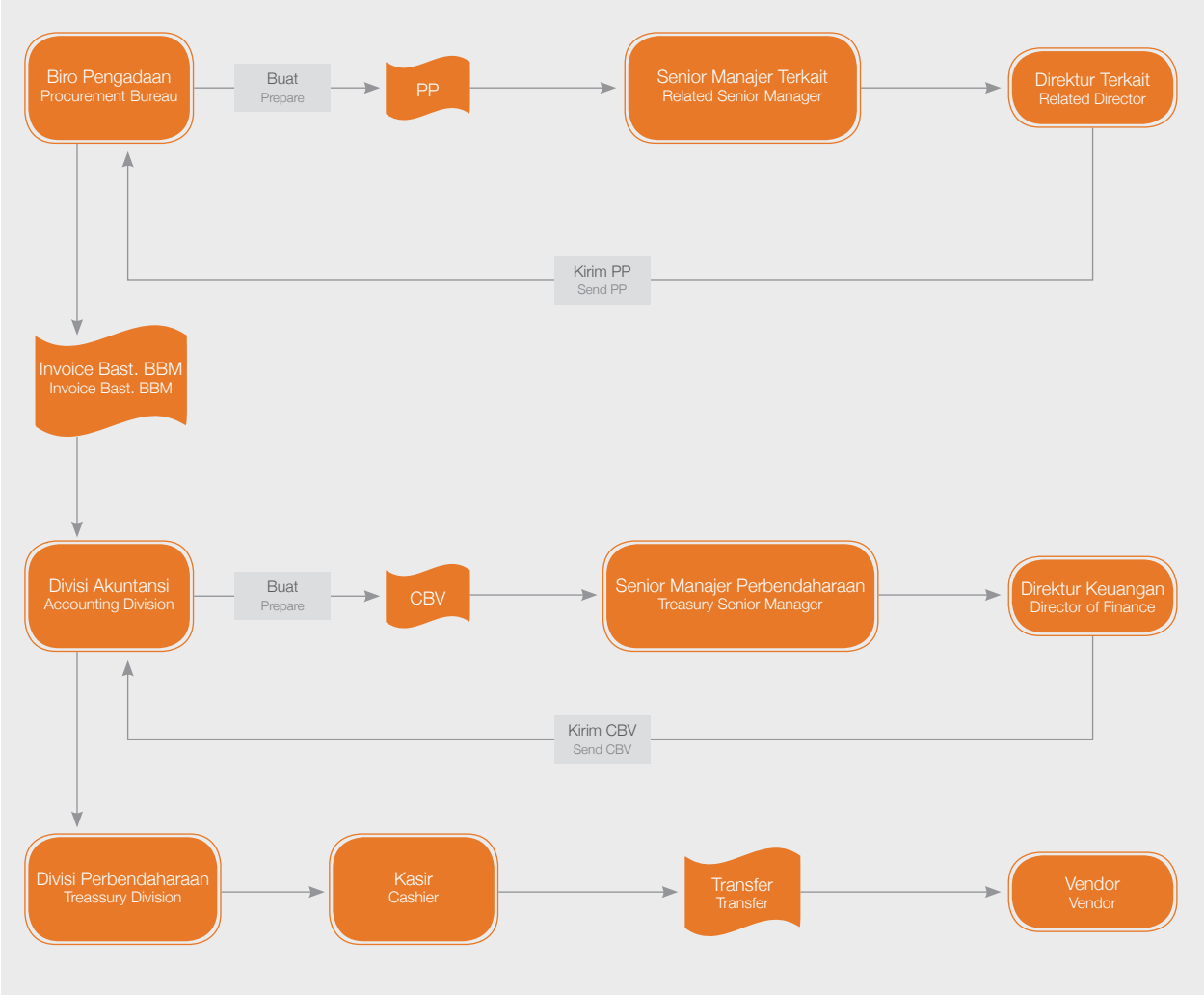

PEJABAT EKSEKUTIF PER 31 DESEMBER 2017

Executives Officer as of December 31, 2017

Didik Dwi Prasetio, S.sos
Kepala Sekretariat Perusahaan
Head of Corporate Secretary
VP Pemasaran Angkutan Barang Kapal Tol Laut dan Ternak
VP of Tol Laut & Livestock Ship Marketing

Ernesto
Kepala Satuan Pengawas Internal
Head of Internal Audit Unit

Yanto Duriyanto, Capt.
Kepala DPA - Sistem Mutu, Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3) dan Lingkungan Hidup
Head of DPA - Quality, Health, Safety, Security & Environment (SMK3)

Andi Samsul Hadi
VP Perencanaan Korporat & Manajemen Risiko
VP of Corporate Planning & Risks Management

Lenggo Geni Arbi S. SH, MH.
VP Hukum
VP of Legal

Yuke Togas, SE
VP Perbendaharaan
VP of Treasury

Wane Habib
VP Pengelolaan PSO dan Subsidi
VP of PSO and Subsidy Management

Bayu Sochmawardi A. Capt
VP SDM
VP of Human Capital

Eko Sugiarto
VP Pemasaran Kapal Penumpang
VP of Passenger Ship Marketing

Hefi Aprianto
VP Akuntansi
VP of Accounting

PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officer

A.A.N Budi Tresnawan, SE. MM
VP Umum
VP of General Affairs

Udjang Kerdjawan Agung
VP Pengamanan
VP of Security

Kunto Handono, MM
VP Pengelolaan Asset
VP of Asset Management

Nelson, Drs.
VP Teknologi Informasi
VP of Information Technology

Niken Sekar Melathi, SH. MM
Plh VP Pengadaan
VP of Procurement

Didik Martono
VP Teknik
VP of Technic

Labani, Capt.
VP Nautika
VP Nautical

Cahyono Rubiyan
VP Pengelolaan Bahan Bakar
VP of Fuel Management

Aprisman Dedi
VP Surveyor
VP of Surveyor

Alamsyah
VP Pengadaan & Modifikasi Kapal
VP of Vessels Procurement & Modification

PEJABAT EKSEKUTIF
Executive Officer

Muhisi ,Capt.
VP Operasi Kapal Penumpang & Perintis
VP of Passenger & Feeder Ship Operation

Robert Irianto Mandagie
VP Pelayanan Kapal Penumpang & Perintis
VP of Passenger & Feeder Ship Service

Yahya Kuncoro
VP Keagenan & Tour
VP of Agency & Tour

Irwan Sudirwan, ST
VP Pemasaran Angkutan Barang Kapal Penumpang & Perintis
VP of Cargo Marketing on Passenger & Feeder

Ahdiyat Andi Susanto
VP Operasi & Pelayanan Kapal Tol Laut & Ternak
VP of Tol Laut & Livestock Operation & Service

Siswandi Kadir
VP Pengembangan Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut
VP of Tol Laut & Cargo Business Development Division

KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

Shareholders Composition

PT PELNI (Persero) merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang kepemilikannya 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Per 31 Desember 2017, tidak ada Direktur dan Komisaris yang memiliki saham PT PELNI (Persero).

PT PELNI (Persero) is a State-Owned Enterprise (SOE) whose shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government.

As of December 31, 2017, there was neither Board of Directors and Board of Commissioners with shares ownership of PT PELNI (Persero).

KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

Shares Listing Chronology

Per 31 Desember 2017, Perseroan belum melakukan melakukan penawaran saham kepada publik dan kepemilikan saham 100% dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia. Dengan demikian informasi mengenai tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, harga penawaran saham dan tindakan korporasi serta nama busa di mana saham dicatatkan tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2017, the Company had not executed shares offering to public and the shares are 100% owned by The Republic of Indonesia Government. Therefore, information about shares listing year, total shares outstanding, shares par value, shares public offering and corporate action as well as name of stock exchange where the shares are listed are irrelevant to be presented in this Annual Report.

KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

Other Securities Listing Chronology

Per 31 Desember 2017, Perseroan tidak melakukan pencatatan efek lainnya sehingga informasi mengenai nama efek, nilai penawaran, nama bursa tempat efek dicatatkan dan peringkat efek tidak relevan untuk disajikan di dalam Laporan Tahunan ini.

As of December 31, 2017, the Company had not listed other securities, therefore, information about name of securities, offering price, name of stock exchange where the securities are listed and securities rating are irrelevant to be presented in this Annual Report.

STRUKTUR GRUP PERUSAHAAN

Corporate Group Structure

PT PELNI (Persero) memliki 3 (tiga) anak perusahaan yaitu PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dengan kepemilikan saham 99,47%, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) dengan kepemilikan saham 99,50% dan PT Rumah Sakit PELNI dengan kepemilikan saham 99,96%.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Struktur Grup PT PELNI (Persero) sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) has 3 (three) subsidiaries that are PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) with 99.47% shares ownership, PT Pelita Indonesia Djaya Grup (PIDC) with 99.50% shares ownership and PT Rumah Sakit PELNI with 99.96% shares ownership.

As of December 31, 2017, Structure Group of PT PELNI (Persero) is as follows:

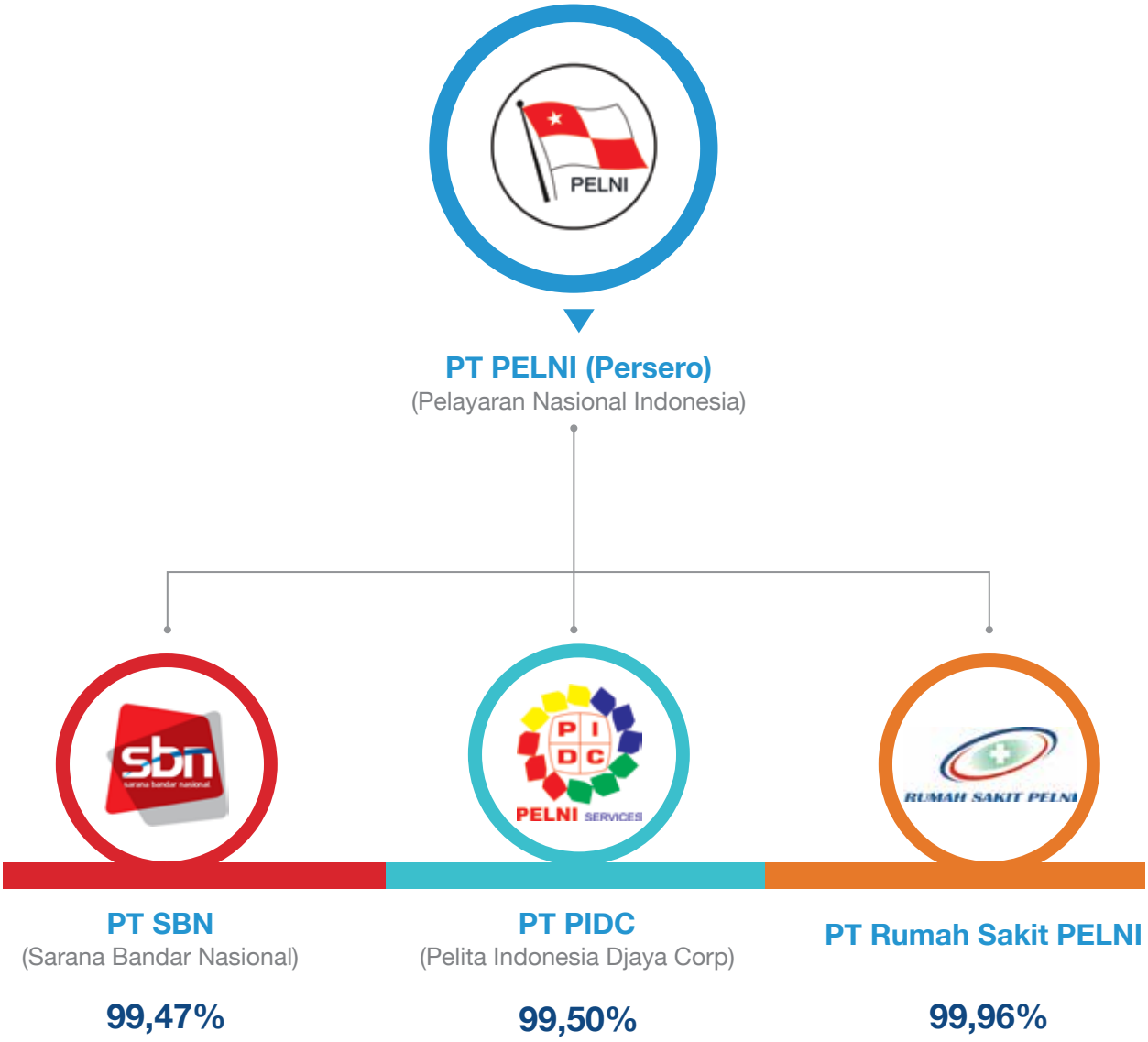

ENTITAS ANAK & ASOSIASI
Subsidiary & Association

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2017, Anak Perusahaan PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

As of December 31, 2017, subsidiaries of PT PELNI (Persero) are as follows:

No.	Nama Perusahaan Name of Company	Saham PELNI Shares of PELNI	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasi Operating Status
1	PT Sarana Bandar Nasional (SBN)	99,47%	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo. Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.	Beroperasi Operating
2	PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)	99,50%	Jasa perdagangan umum, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal. General trading, custom delegation company, cleaning service, security service, management service for bed, drinking and bottled water supply, hotel management service, onboard entertainment service.	Beroperasi Operating
3	PT Rumah Sakit PELNI	99,96%	Rumah Sakit Hospital	Beroperasi Operating

Per 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) tidak memiliki entitas asosiasi.
As of December 31, 2017, PT PELNI (Persero) did not have associated entity.

INFORMASI MENGENAI ANAK PERUSAHAAN

Berikut adalah informasi mengenai anak perusahaan PT PELNI (Persero):

1. **PT Sarana Bandar Nasional (SBN)**

   PT Sarana Bandar Nasional (SBN) merupakan anak perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang jasa bongkar muat barang dari dan ke kapal milik induk perusahaan maupun kapal-kapal lainnya yang meliputi kegiatan *stevedoring, cardogoring, receiving delivery.* Wilayah usaha PT SBN meliputi seluruh wilayah Indonesia dengan didukung oleh 56 kantor cabang dan sub-cabang yang beroperasi di pelabuhan besar dan kecil yang tersebar dari Sabang sampai Merauke dengan kantor pusat di Jakarta.

   Pada tahun 2017, PT SBN membukukan laba sebesar Rp45,60 miliar atau meningkat sebesar 11,55% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp40,79 mliar.

INFORMATION ABOUT SUBSIDIARY

Information about PT PELNI (Persero) subsidiaries is described below:

1. **PT Sarana Bandar Nasional (SBN)**

   PT Sarana Bandar Nasional (SBN) is subsidiary of the Company that is operated in loading and unloading of ships owned by the Company and other ships including stevedoring, cardogoring, receiving delivery. Operational area of PT SBN covers Indonesian territory supported by 56 branches and sub-branches which were operated in major and small ports located from Sabang to Merauke with Head Office in Jakarta.

   In 2017, PT SBN booked the profit of Rp45.60 billion or increased by 11.55% compared to the previous year which amounted to Rp40, 79 billion.

ENTITAS ANAK & ASOSIASI
Subsidiary & Association

Susunan Manajemen SBN per 31 Desember 2017, sebagai berikut:

As of December 31, 2017, composition of SBN Management is as follows:

Komisaris Utama	Daniel E. Bangonan	President Commissioner
Komisaris	August Haris	Commissioner
Direktur Utama	Suharyanto	President Director
Direktur Operasional	Murdiyoto	Director of Operations
Direktur Keuangan	Nofiyetti Edizar	Director of Finance

Alamat	Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144, Cempaka Putih, Jakarta – 10510	Address
Telp	021- 4287 9000 Fax: 021-4287 8389	Phone
Email	info@ptsbn.co.id	Email
Web	www.ptsbn.co.id	Web

2. **PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)**
PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) merupakan anak Perusahaan Perseroan yang bergerak di bidang Jasa Kepengurusan Transportasi (JPT), Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK), *cleaning service, bunkering* BBM, Jasa Pengamanan, Sewa Pergudangan, Sewa Forklift, Multimoda Transportasi, hotel dan restoran.

Pada tahun 2017, PT PIDC membukukan laba sebesar Rp33,77 miliar atau meningkat sebesar 45,38% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp23,23 mliar.

Susunan Manajemen PIDC per 31 Desember 2017, sebagai berikut:

2. **PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PIDC)**
PT Pelita Indonesia Djaya (PIDC) is subsidiary of Company that is operated in Transprotation Management Service (JPT), Custom Service Management (PPJK), cleaning sevice, Oil Fuel bunkering, Security Services, Warehouse Service, Forklift Service, Multi-modal Transportation, hotel and restaurant.

In 2017, PT PIDC booked the profit of Rp33.77 billion or increased by 45.38% compared to the previous year which amounted to Rp23,23 billion.

As of December 31, 2017, composition of PIDC Management is as follows:

Komisaris Utama	O.M. Sodikin	President Commissioner
Direktur Utama	Effendi	President Director
Direktur Operasi	Asiano Y. I. Lontoh	Director of Operations

Alamat	Gedung PT PELNI (Persero) Cabang Tanjung Priok Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok Jakarta Utara	Address
Telp	021- 43933184	Phone
Fax	021- 43931623	Fax

3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI (RS PELNI) merupakan anak usaha Perseroan yang bergerak di bidang pelayanan dan pendidikan kesehatan, dengan bidang usaha secara khusus meliputi:

a. Pelayanan Kesehatan.
b. Pendidikan dan Pelatihan Kesehatan.
c. Pelayanan Jasa Konsultan Manajemen Kesehatan.
d. Perdagangan Farmasi dan Peralatan Kesehatan.
e. Pelayanan Gizi Masyarakat.
f. Pelayanan Kebugaran Kesehatan Masyarakat/ Senam Ibu Hamil.
g. Pelayanan ASKES/BPJS.
h. Pelayanan Kegiatan Penunjang Kesehatan Lainnya.

Pada tahun 2017, PT RS PELNI membukukan laba sebesar Rp37,02 miliar atau meningkat sebesar 13,03% dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar Rp32,76 mliar.

Susunan Manajemen RS PELNI per 31 Desember 2017, sebagai berikut:

3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI (RS PELNI) is subsidiary that operated in health services and education with particular business lines are including:

a. Health Services.
b. Health Education and Training.
c. Health Management Consulting Service.
d. Pharmacy and Medical Device Trading.
e. Community Nutrients Service.
f. Community Health Fitness/Maternity Gym Service.
g. ASKES/BPJS Service.
h. Other Health Supporting Services.

In 2017, PT RS PELNI booked the profit of Rp37.02 billion or increased by 13.03% compared to the previous year which amounted to Rp32.76 billion.

As of December 31, 2017, Management composition of RS PELNI is as follows:

Komisaris Utama	Wibisono	President Commissioner
Komisaris	Darmansyah	Commissioner
Direktur Utama	Fathema Djan Rachmat	President Director
Direktur	Muhamad Kartobi	Director
Direktur	Rooshardianty Suryandari	Director
Direktur Medis	Astari Mayang Anggarani	Director of Medical

Alamat	Jl. Aipda KS Tubun No. 92-94 Jakarta Pusat – DKI Jakarta 11410	Address
Telp	021-5306901	Phone
Fax	021-4287 8389	Fax
Email	pemasaran@rspelni.net	Email
Web	www. rspelni.co.id	Web

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL

Stock Market Supporting Institution and Professions

KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Djoko, Sidik & Indra

PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

Djoko, Sidik & Indra

Kantor Pusat	Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia	Head Office
Phone	62-21 39838734,39838735	Phone
Fax	62-21 39832081	Fax
Website	kapdsi.comm	Website
Email	kapdsi.kpusat@gmail.com	Email
NIUKAP	959/KM.1/2014	NIUKAP
Biaya	Rp658.000.000	**Fee**
Jasa yang Diberikan	Jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan. Financial audit report services are compliance audit services and the company's performance reports.	Provided Service

NOTARIS:

Ida Adiningsih, S.H

Alamat: Jl Kembang Raya No 15 A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Hasbullah Abdul Rasyid, S.H

Alamat: Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A. Jl. H.R. Rasuna S aidKav. C 20-2 Kuningan Jakarta Selatan

NOTARY:

Ida Adiningsih, S.H

Address: Jl Kembang Raya No 15 A, Kwitang, Senen, Jakarta Pusat

Hasbullah Abdul Rasyid, S.H

Address: Gedung The "H" Tower Lt. 20 Suite A. Jl. H.R. Rasuna S aidKav. C 20-2 Kuningan Jakarta Selatan

KUASA HUKUM:

LQQ media Law Office

Alamat: Gedung Citylofts Unit 10.12 Jl KH Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat

Kantor Advokat Deni Simorangkir SH MH

Alamat: Jl. Tebet Timur Dalam V K Nomor 3 Jakarta Selatan

Dedy Kurniadi & CO

Alamat: Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor Jl. Raden Saleh Raya No 44 Jakarta Pusat

Anggraeni & Partner

Alamat: Jl. Wolter Mongonsidi No 122-124 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

LEGAL ATTORNEY:

LQQ media Law Office

Address: Gedung Citylofts Unit 10.12 Jl KH Mas Mansyur No. 121 Jakarta Pusat

Deni Simorangkir SH MH Advocate Office

Address: Jl. Tebet Timur Dalam V K Nomor 3 Jakarta Selatan

Dedy Kurniadi & CO

Address: Wisma Tugu Raden Saleh, 5th floor Jl. Raden Saleh Raya No 44 Jakarta Pusat

Anggraeni & Partner

Address: Jl. Wolter Mongonsidi No 122-124 Kebayoran Baru Jakarta Selatan

LEMBAGA DAN PROFESI PENUNJANG PASAR MODAL
Stock Market Supporting Institution and Professions

M & G Associates
Alamat: Senayan Trade Center Lt 5 No 17-22 Jl Asia Afrika Gelora Senayan Jakarta Pusat

Effendy & Remy Attorney & Counselor at Law
Alamat: Gedung Lina 2nd Floor Suite 205 Jl. HR Rasuna Said Kav B-7 Kuningan – Jakarta Selatan

Tekky Toreh & Partner
Alamat: Jl Pulomas Barat XI No. 22 Jakarta Timur

BIRO ADMINISTRASI EFEK
Per 31 Desember 2017, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Biro Administrasi Efek.

PERUSAHAAN PEMERINGKAT EFEK
Per 31 Desember 2017, Perseroan belum mencatatkan saham dan efek-efek sehingga belum menggunakan jasa Perusahaan Pemeringkat Efek.

M & G Associates
Address: Senayan Trade Center Lt 5 No 17-22 Jl Asia Afrika Gelora Senayan Jakarta Pusat

Effendy & Remy Attorney & Counselor at Law
Address: Gedung Lina 2nd Floor Suite 205 Jl. HR Rasuna Said Kav B-7 Kuningan – Jakarta Selatan

Tekky Toreh & Partner
Address: Jl Pulomas Barat XI No. 22 Jakarta Timur

SECURITIES REGISTRAR
As of December 31, 2017, the Company had neither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Securities Registrar.

RATING AGENCY
As of December 31, 2017, the Company had not listed hadneither listed shares nor securities, therefore, the Company did not hire any Rating Agency.

PETA WILAYAH OPERASI JARINGAN TRAYEK KAPAL

Ship Route Network Operational Area

- Jumlah Pelabuhan Singgah Tahun 2017 adalah 91 Pelabuhan
- Jumlah Kapal PSO tahun 2017 adalah 26 Kapal
- Jumlah Ruas Tahun 2017 adalah 1100 ruas
- Total Nil tahun 2017 adalah 96.329 Mil Laut

- Total port of call in 2017 were 91 ports
- Total PSO Ship in 2017 were 26 Ships
- Total Lines in 2017 were 1,100 lines
- Total Nil in 2017 were 96,329 Sea Miles

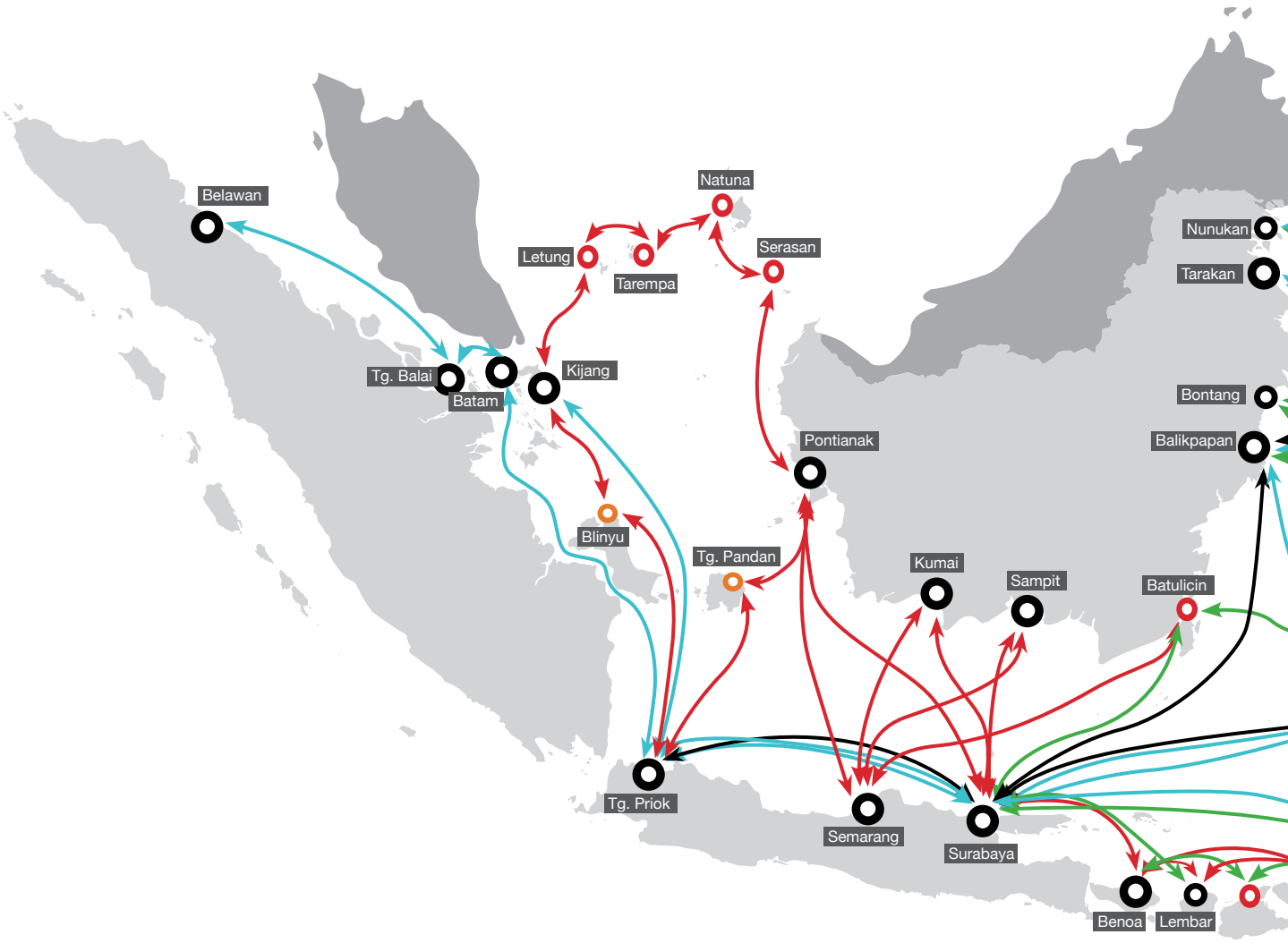

PETA WILAYAH OPERASI JARINGAN TRAYEK KAPAL
Ship Route Network Operational Area

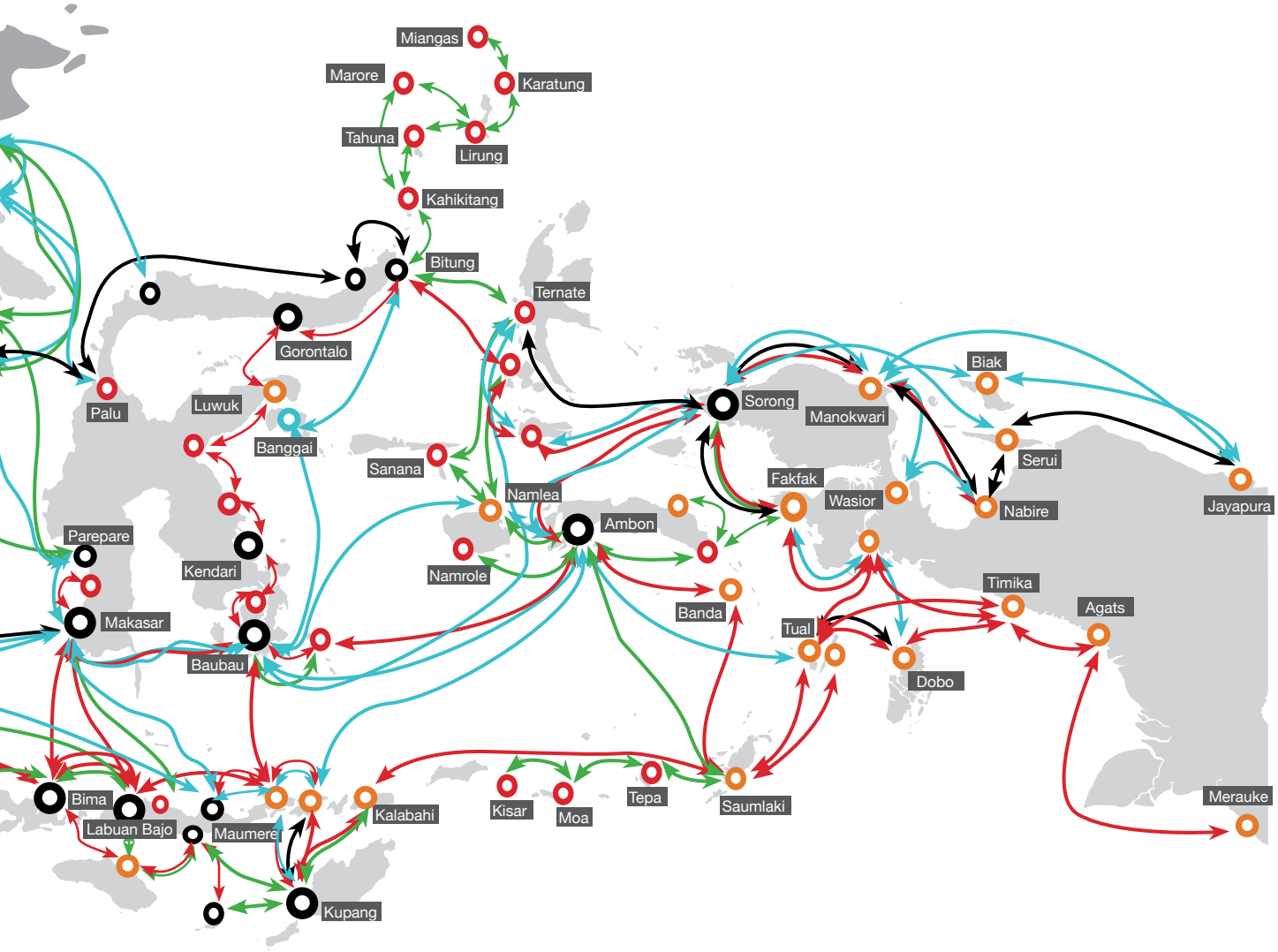

JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TAHUN 2017

The Tol Laut Network Sea 2017

JARINGAN TRAYEK TOL LAUT TAHUN 2017

The Tol Laut Network Sea 2017

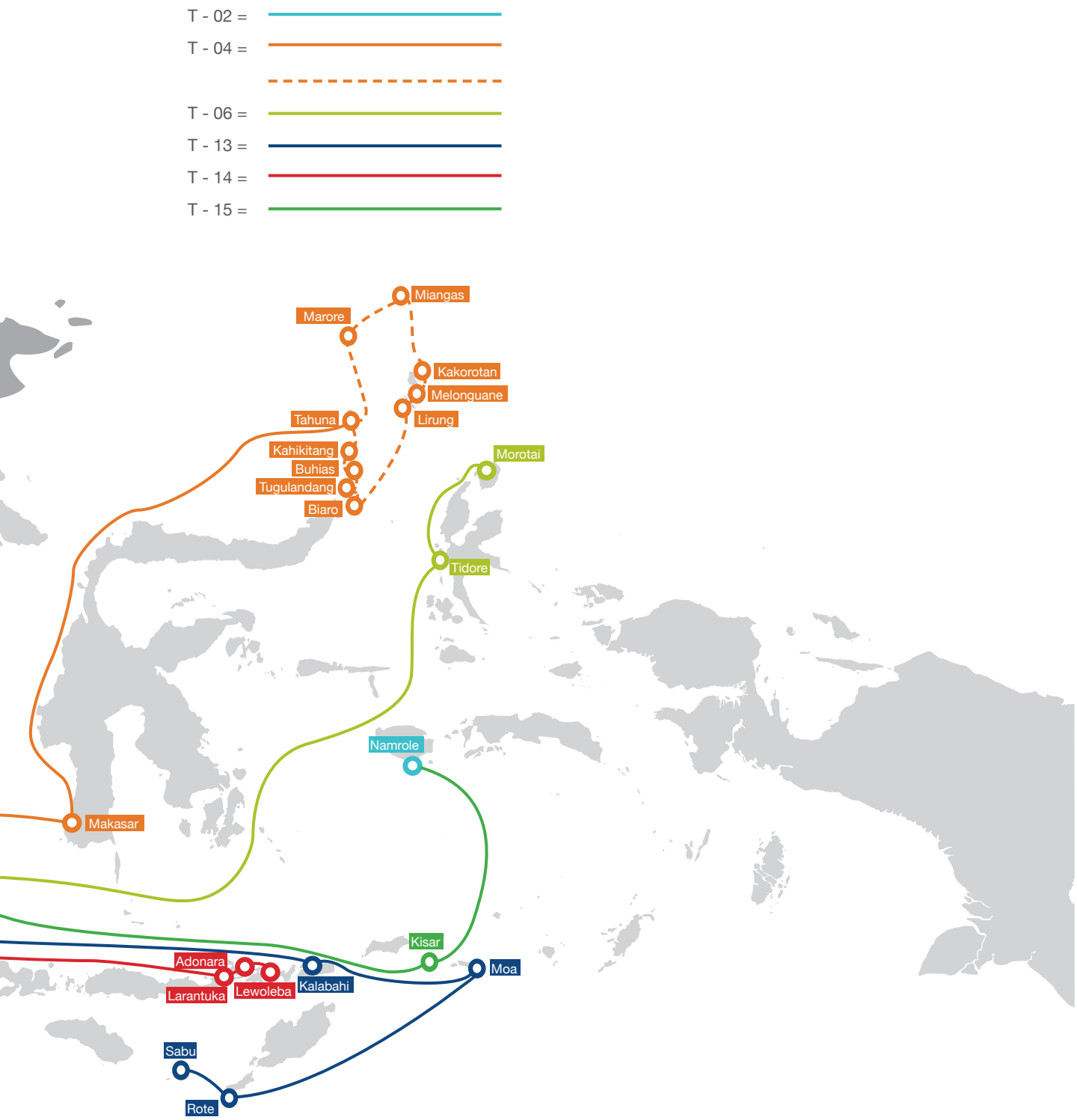

JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS TAHUN 2017

National Route Network Ship Perintis 2017

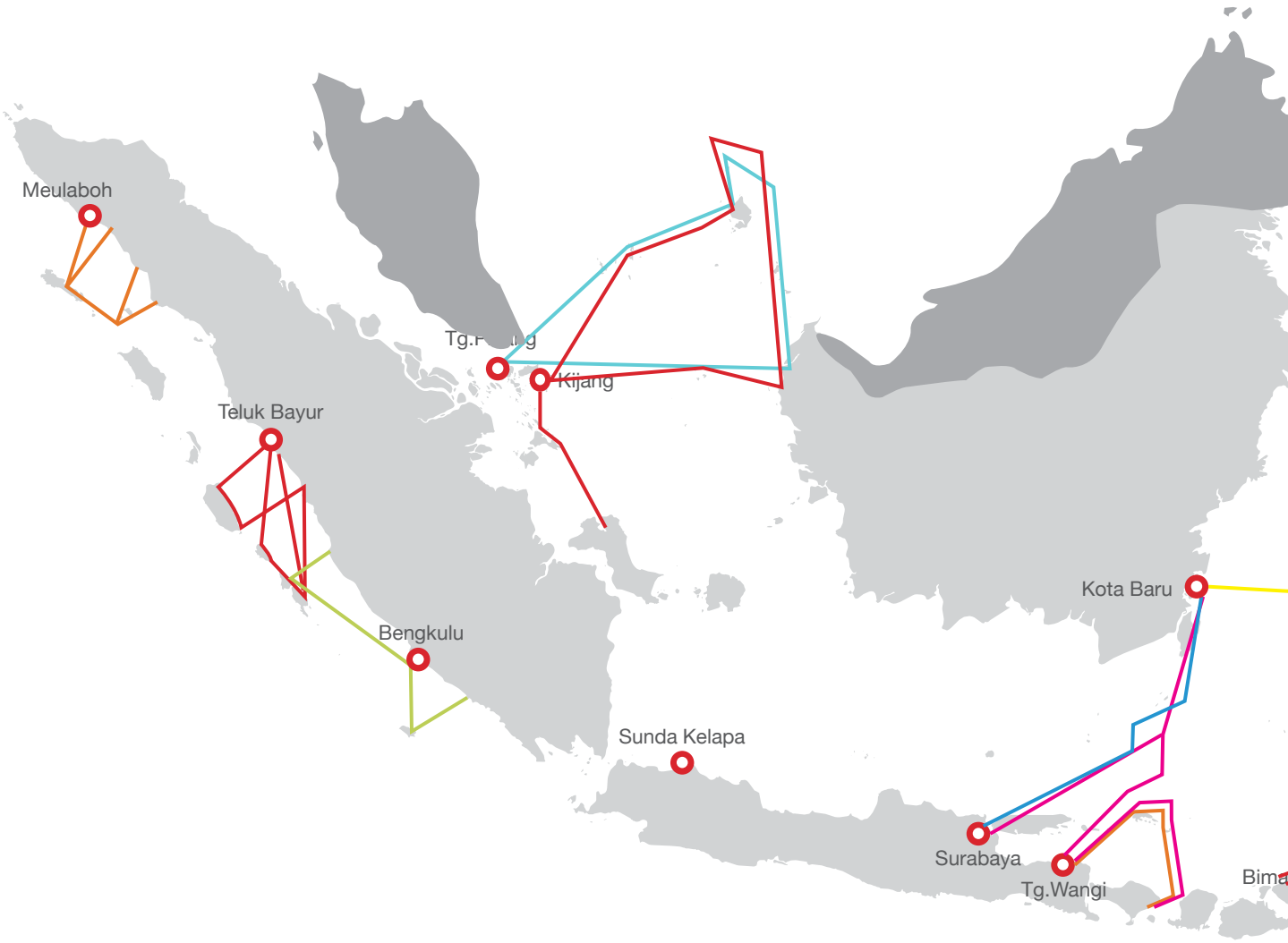

JARINGAN TRAYEK NASIONAL KAPAL PERINTIS TAHUN 2017

National Route Network Ship Perintis 2017

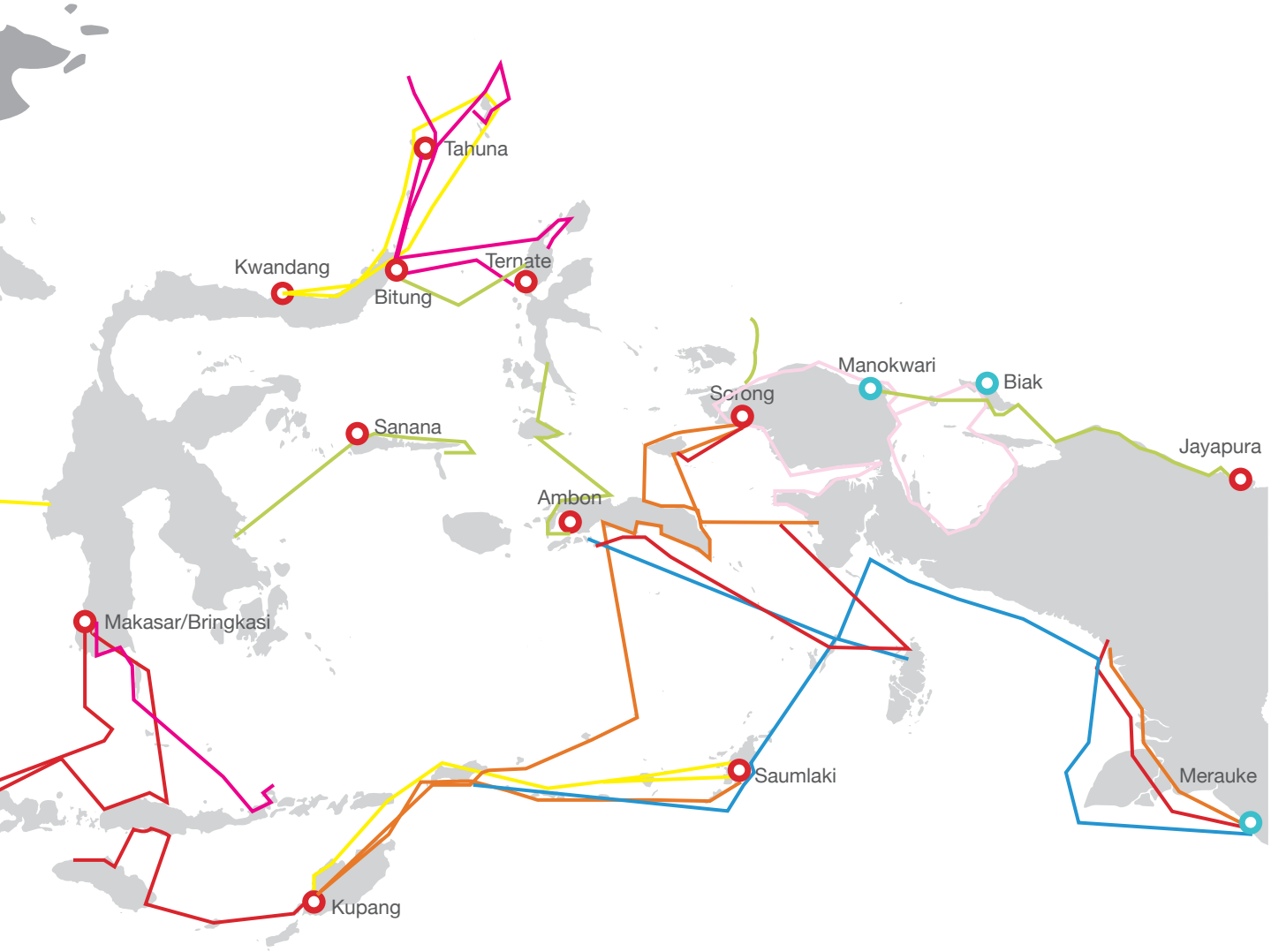

RUTE KAPAL TERNAK 2017

Cattle Ship Route 2017

No.	Provinsi/ Pangkalan Province/Base	Kode Trayek Route Code	Jaringan Trayek dan Jarak Mil A network of Routes and distance Miles	Jumlah Jarak The Amount of Distance
1	Kupang, NTT	RT-1	Kupang - 201 - Waingapu - 867 - Tg. Priok - 150 - Cirebon - 1.063 - Kupang	2.256

RUTE KAPAL TERNAK 2017
Cattle Ship Route 2017

RT - 1 KM. Camara Nusantara 1

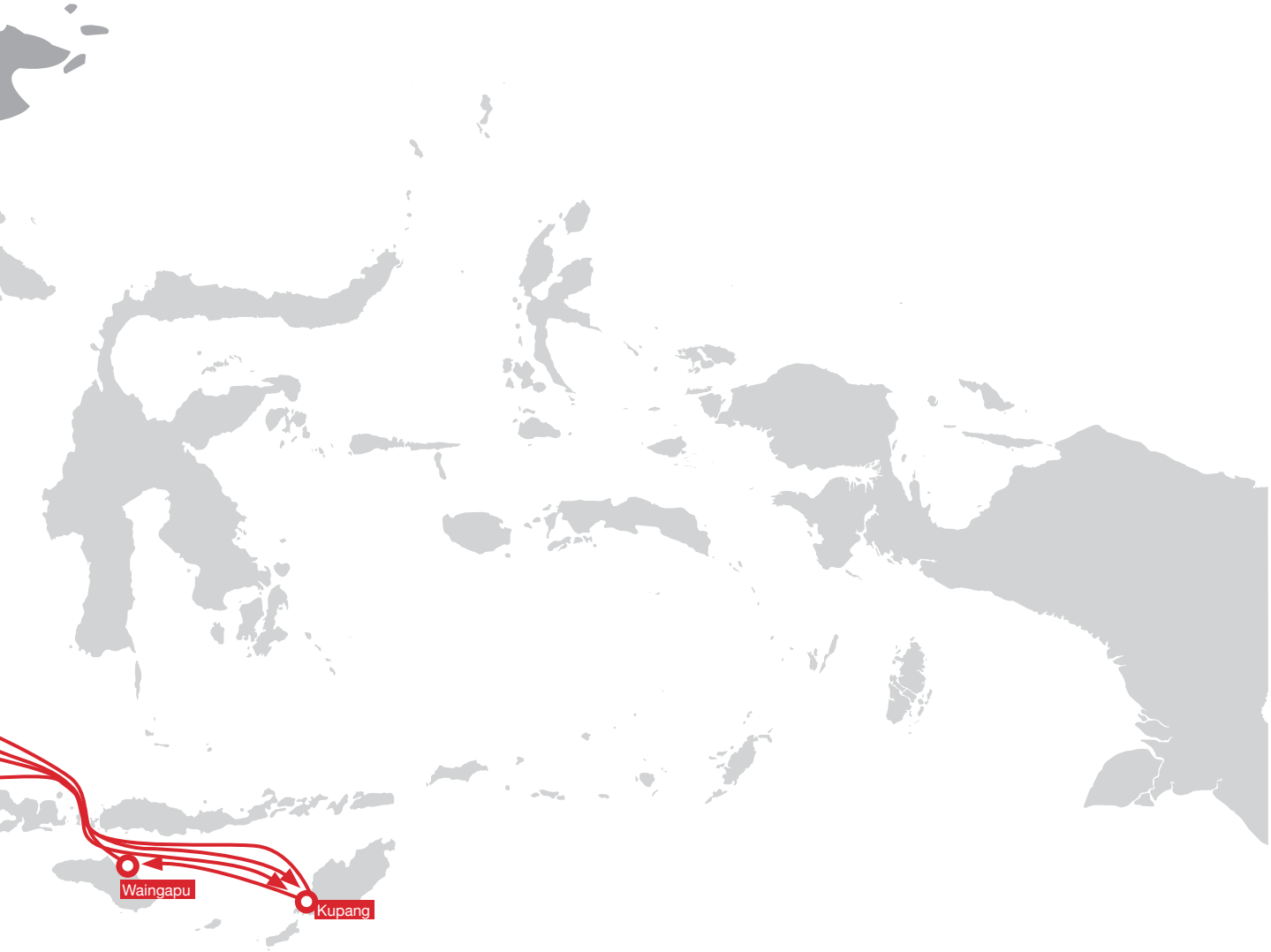

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

PT PELNI (Persero)

Kantor Pusat | Head Office
Jl. Gajah Mada No. 14
Jakarta 10130
Telp. +6221-6334342
Fax. +6221-63854130
Email: humas@pelni.co.id

Pemasaran | Marketing
Telp. +6221 6385 50962
Email. divisi.pemasaran@pelni.co.id

ANAK PERUSAHAAN

Subsidiaries

PT Sarana Bandar Nasional (SBN)
Jl. Cempaka Putih Tengah II B.13-144
Cempaka Putih,
Jakarta -10510
Telp. 021 - 4287 9000
Fax. 021 – 4287 8389
Email. info@ptsbn.co.id
Web. www.ptsbn.co.id

Rumah Sakit PELNI Petamburan
Jl. Aipda Ks Tubun No. 92-94
Jakarta Pusat – DKI Jakarta 11410
Telp. 021 – 5306901
Fax. 021 – 5483145
Email. pemasaran@rspelni.net
Web. www.rspelni.co.id

Pelita Djaya Indonesia Corporation (PIDC)
Ruko Cempaka Mas
Jl. Suprapto Blok Q No. 5
Jakarta Pusat
Telp. 021 – 4393 3184
Fax. 021 – 4393 1623
Email. pt.pidc@gmail.com

STRATEGIC BUSINESS UNITS

Strategic Business Units

Galangan Surya Surabaya
Jl. Nilam Barat No. 39
Surabaya 60165
Telp. 031) 3291909, 3292961
Fax. (031) 3291909
Email. galangan@pelni.co.id

Hotel Bahtera Cipayung
Jl. Raya Puncak Cipayung No. 256
Bogor
Telp. (0251) 8254251, 8257451.
Fax. (0251) 8256663.
Email. hotelbahtera@hotelbahtera-pelni.co.id

CABANG A

Branch A

Tg Priok
Jl. Palmas No. 2, Tanjung Priok
Jakarta Utara
Telp. 021-43933184
Fax. 021-43931623
Email. tg-priok@pelni.co.id

Makassar
Jl. Sawerigading No. 14,
Makassar
Telp. 0411 – 3614861
Fax. 0411-3631395, 3614788
Email. makassar@pelni.co.id

Surabaya
Jl. Pahlawan No.112-114,
Surabaya
Telp. 031-3293197
Fax. 031-3538958, 3293195
Email. surabaya@pelni.co.id

CABANG B

Branch B

Jayapura
Jl. Argapura No. 15,
Jayapura Selatan, Papua
Telp. 0967-533270, 533070, 531412
Fax. 0967-531921, 533370
Email. jayapura@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Argapura No. 15,
Jayapura Selatan, Papua
Telp. 0967-533270

Sorong
Jl. Jend. A. Yani, Kompleks Pelabuhan,
Sorong
Telp. 0951-321860
Fax. 0951-323873
Email. sorong@pelni.co.id

Ambon
Jl. D.I. Panjaitan No. 19,
Ambon
Telp. 0911-348219, 353161 , 342328
Fax. 0911-352049
Email. ambon@pelni.co.id

Semarang
Jl. Mpu Tantular 25-27,
Semarang
Telp. 024-3540238, 3546722
Fax. 024-3555156
Email. semarang@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Mpu Tantular 25-27 Semarang
Telp. 024 3546722

Bau-bau
Jl. Pahlawan No.1, Bau Bau
Sulawesi Tenggara
Telp. 0402-2821258, 2821905, 2822705
Fax. 0402-2821188
Email. bau-bau@pelni.co.id

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

Balikpapan
Jl. Yos Sudarso No. 1
Balikpapan
Telp. 0542-424171,422410
Fax. 0542-735009
Email. balikpapan@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Yos Sudarso No. 1 Balikpapan
Telp. 0542-424171,422410

Kupang
Jl. Pahlawan No.7 RT 002/001Kel.Fatufeto -
Kec. Alak Kupang, NTT
Telp. 0380-821944, 823898
Fax. 0380-833646
Email. kupang@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Pahlawan No.7 RT 002/001Kel.Fatufeto
Kec. Alak Kupang, NTT
Telp. 0380-821944

Bitung
Jl. Sam Ratulangi no 7 Bitung,
Bitung Kota - Sulawesi Utara
Telp. 0438-36352
Fax. 0438-33588
Email. bitung@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Sam Ratulangi no 7 Bitung,
Bitung Kota - Sulawesi Utara
Telp. 0438- 35818

Manokwari
Jl. Siliwangi No. 24 Manokwari,
Papua Barat
Telp. 0986-215166, 215167, 215165
Fax. 0986-215168
Email. manokwari@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Siliwangi No.24 Manokwari,
Papua Barat
Telp. 0986-215166, 215167

Tg. Pinang
Jl. Jend. A. Yani No. 06 Tg. Pinang
Kepulauan Riau
Telp. 0771-21513, 21933
Fax. 0771-23427
Email. tg-pinang@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Jend. A. Yani No. 06 Tg. Pinang
Kepulauan Riau
Telp. 0771-21513

CABANG C

Branch C

Batam
Jl. DR Cipto Mangunkusumo No. 4,
Tanjuung Pinggir, Sekupang, Pulau Batam
Telp. 0778-322181, 321070
Fax. 0778-321085, 325586
Email. batam@pelni.co.id

Pare-pare
Jl. Lasiming No. 44 Pare Pare,
Sulawesi Selatan
Telp. 0421-21017, 24709
Fax. 0421-23079
Email. pare-pare@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Lasiming No. 44 Pare Pare,
Sulawesi Selatan
Telp. 0421-21017

Nabire
Jl. Frans Kaisepo No. 14,
Nabire Papua
Telp. 0984-22850, 23181 , 25072
Fax. 0984-21350
Email. nabire@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Frans Kaisepo No. 14,
Nabire Papua
Telp. 0984- 23181

Ternate
Jl. Jend.A.Yani, Kompleks Pelabuhan,
Ternate, Maluku Utara
Telp. 0921-3121434, 4124434
Fax. 0921-3121276
Email. ternate@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Jend.A.Yani, Kompleks Pelabuhan,
Ternate, Maluku Utara
Telp. 0921-3125474

Medan/Belawan
Jl. Gunung Krakatau No 17A, Medan
Telp. 061 42065268
Fax. 061-42065267
Email. belawan@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. Gunung Krakatau No 17A, Medan
Telp. 061 42065268

Pontianak
Jl. St. Abdurahman No.12 Pontianak,
Kalimantan Barat
Telp. 0561-748124 , 748129
Fax. 0561-748131
Email. pontianak@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. St. Abdurahman No. 12 Pontianak
Kalimantan Barat
Telp. 0561-748124 , 748129

Kumai
Jl. Sudirman, SH No. 16 Pangkalan Bun /
Kumai Kalimantan Tengah
Telp. 0532-24420
Fax. 0532-24073
Email. kumai@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. Sudirman SH No. 16 Pangkalan Bun,
Kumai Kal-Teng
Telp. 0532-24420

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

Tarakan
Jl. Kusuma Bangsa No. 100 Kec.Gunung Lingkas Kel. Tarakan Timur - Tarakan Kota
Telp. 0551-51169, 25440
Fax. 0551-21529
Email. tarakan@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. Kusuma Bangsa No. 100 Kec.Gunung Lingkas Kel.Tarakan Timur - Tarakan Kota
Telp. 0551- 25440

Nunukan
Jl. A. Yani No. 11 Nunukan, Kalimantan Tenggara
Telp. 0556-21309, 22984
Fax. 0556-21029
Email. nunukan@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. A. Yani No. 11 Nunukan, Kalimantan Tenggara
Telp. 0556-21309

Fak-fak
Jl. D.I. Panjaitan, Fak Fak Papua Barat
Telp. 0956-23230, 23371
Fax. 0956-22556
Email. fak-fak@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. D.I. Panjaitan, Fak Fak Papua Barat
Telp. 0956-23230

Maumere
Jl. Don Juan No. 6 kota Uneng Kab. Sikka, Flores NTT
Telp. 0382-2427060
Emai. maumere@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sale
Jl. Don Juan No. 6 kota Uneng Kab. Sikka, Flores NTT
Telp. 0382-2427060

Serui
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Serui Yapen Papua
Telp. 0983-32309, 32347
Fax. 0983-31552
Email. serui@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sale
Jl. Dr. Wahidin Sudiro Husodo, Serui- Papua
Telp. 0983-32309

Biak
Jl. Jendral Sudirman No. 37, Biak
Telp. 0981-23255, 23256
Fax. 0981-22225
Email. biak@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sale
Jl. Jendral Sudirman No. 37, Biak
Telp. 0981-23255, 23256

Sampit
Jl. Jendral A. Yani No. 70 Sampit, Kalimantan Tengah
Telp. 0531-22006, 23994
Fax. 0531-24502
Email. sampit@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. Jendral A. Yani No. 70 Sampit, Kalimantan Tengah
Telp. 0531 22006

Bali/Denpasar
Jl.Raya Kuta No. 299 Kuta Badung, Denpasar - Bali
Telp. 0361-762263
Fax. 0361-763964
Email. denpasar@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. Raya Kuta No. 299 Kuta Badung, Denpasar - Bali
Jl. Raya Pelabuhan Benoa, Bali
Telp. 0361 763 964

Larantuka
Jl. Basuki Rahmat No 60, Flores Timor
Telp. 0383-21155
Fax. 0383-21153
Email. larantuka@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. F. Basuki Rahmat No 60 Flores Timor

Tual
Jl. Ahmad Yani No. 2 Lodar El Kota Tual Maluku Tenggara
Telp. 0916-22520, 24092
Fax. 0916-21181
Email. tual@pelni.co.id

Namlea
Jl. Bandar Angin, Namlea, Kepuluauan Buru, Maluku
Telp. 0913 – 21272
Email. namlea@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales
Jl. Bandar Angin, Namlea
Telp. 0913 – 21272

CABANG D

Branch D

Palu
Jl. R.A. Kartini No. 96 Palu, Sulawesi Tenggara
Telp. 0451-421696
Fax. 0451-423237
Email. palu@pelni.co.id

Timika
Jl. Kartini No. 5, Mimika Baru, Timika Papua
Telp. 0901-3126660
Fax. 0901-321106
Email. timika@pelni.co.id

Ende
Jl. Kathedral No. 2, Ende, Flores NTT
Telp. 0381-21043
Fax. 0381-21419
Email. pelniende@yahoo.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Kathedral No. 2, Ende, Flores NTT
Telp. 0381-21043

Kendari
Jl. Lakidende No.10, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3121935
Fax. 0401-3122156
Email. kendari@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Lakidende No.10, Kendari, Sulawesi Tenggara
Telp. 0401-3121935

NAMA DAN ALAMAT ANAK PERUSAHAAN, KANTOR CABANG DAN KANTOR PERWAKILAN

Name and Address of Subsidiary, Branch Office and Representative Office

Bima
Jl. Kesatria No. 2,Kota Bima, NTB
Telp. 0374-42046
Fax. 0374-42625
Email. bima@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Marthadinata Kota Bima, NTB
Telp. 0374 – 42203

Waingapu
Jl. Hasanuddin No. 1 Waingapu
Telp. 0387-61028
Fax. 0387-61027
Email. waingapu@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Hasanuddin No. 1 Waingapu
Telp. 0387-61665

Kotabaru/Batulicin
Jl. Pelabuhan Samudera No. 125,
Butulicin, Kotabaru
Telp. 0518-70822
Fax. 0518-71419
Email. kotabaru@pelni.co.id

Dobo
Jl. Yos Sudarso No. 22 Dobo,
Kepulauaan Aru - Maluku
Telp. 0917-21300, 21400
Fax. 0917-21500
Email. dobo@pelni.co.id

Toli-toli
Jl. Yos Sudarso No. 399 Kel. Sidoarjo
Kab. Toli- Toli, Sulawesi Tengah
Telp. 0453-23210, 22357
Fax. 0453-21376
Email. toli-toli@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Yos Sudarso No. 399 Kel. Sidoarjo
Kab. Toli-Toli, Sulawesi Tengah
Telp. 0453- 22537 – 23210

Kaimana
Jl. Pelabuhan No. 4, Kaimana
Telp. 0957-21009
Fax. 0957-21464
Email. kaimana@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Pelabuhan No.4, Kaimana
Telp. 0957-21009

Tg. Balai Karimun
Jl. Mayjen MT. Haryono No. 11
Sei Ayam, Tebing Tg. Balai Karimun
Telp. 0777-325446
Fax. 0777-325460
Email. tg-balai@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Mayjen MT. Haryono No. 11
Sei Ayam, Tebing Tg. Balai Karimun
Telp. 0777-325446

Merauke
Jl. Sabang No. 318, Merauke Papua
Telp. 0971-3330373
Email. merauke@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Sabang No.318, Merauke Papua
Telp. 0971-3330373

Luwuk
Jl. Sungai Danau Limboto No. 74 Luwuk,
Sulawesi Tengah
Telp. 0461-21564, 23013
Fax. 0461-21888
Email. luwuk@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Sungai Danau Limboto No. 74 Luwuk,
Sulawesi Tengah
Telp. 0461-21564

TERMINAL POINT

Terminal Point

Gorontalo
Jl. 23 Januari No. 182, Kelurahan
Biawao, Kecamatan kota Selatan,
Gorontalo
Telp. 0435 82089
Fax. 0435 821145
Email. gorontalo@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. 23 Januari No. 182
Telp. 0435 82089

Labuan Bajo
Jl. Trans Flores, pasar Baru Labuan Bajo
Kab. Manggarai Barat NTT
Telp. 0385- 2440304
e-mail. labuan-bajo@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Trans Flores,pasar Baru Labuan Bajo
Kab. Manggarai Barat NTT
Telp. 0385- 2440304

Ampenan
Jl. Industri No 1 Ampenan, Mataram NTB
Telp. 0370 637212
Fax. 0370 631604
Email. ampenan@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Industri No 1 Ampenan, Mataram NTB
Telp. 0370 637212

Pangkalpinang
Jl. Hamidah No. 67 Pangkalpinang
Telp. 0717-422216,43316
Fax. 0717-421304
Emai. pk-pinang@pelni.co.id

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Hamidah No. 67 Pangkalpinang
Telp. 0717-422216

Tahuna
Jl. Sudirman No. 35 Kota Tahuna,
Kab. Kepulauan Sangie
Telp. 0432- 21053
Fax. 0432- 22566

Penjualan Tiket | Ticket Sales :
Jl. Sudirman No. 35 Kota Tahuna,
Kab. Kepulauan Sangie
Telp. 0432- 21053

INFORMASI PADA WEBSITE PERUSAHAAN

Information at Company Website

PT PELNI (Persero) memberikan kemudahan akses informasi secara transparan dan akurat kepada seluruh pemegang saham dan pemangku kepentingan melalui Website Perusahaan.

PT PELNI (Perseroa) provides transparent and accurate information access to all shareholders and stakeholders through the Company Website

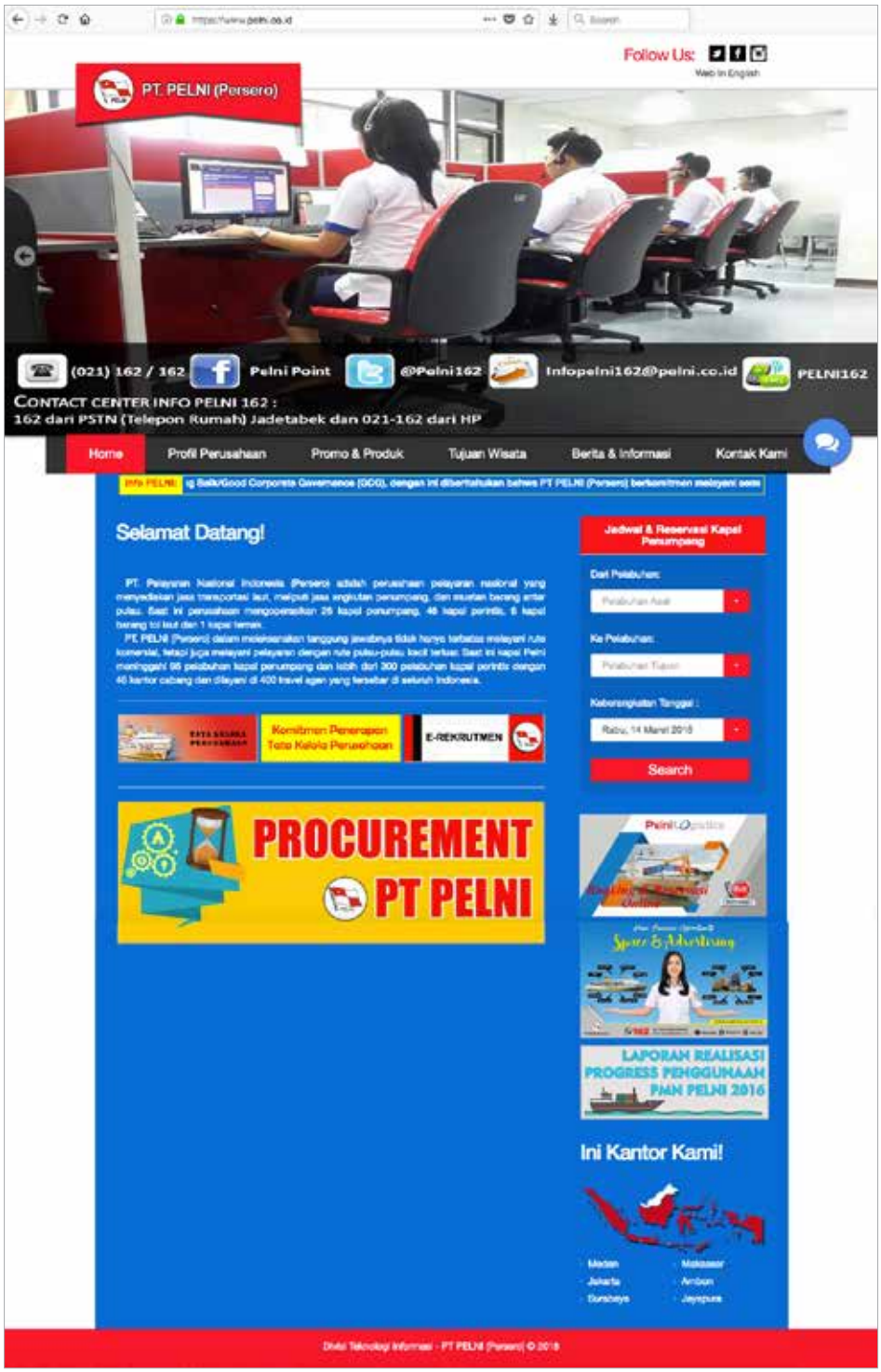

Situs web resmi Perusahaan www.pelni.co.id, telah memenuhi informasi yang meliputi:

1. Informasi Pemegang Saham;
2. Isi Kode Etik (Etika Bisnis);
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);
4. Laporan Keuangan Tahunan terpisah (5 tahun terakhir);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi;
6. Piagam/*Charter* Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan dan Audit Internal.

Selain informasi yang disebutkan di atas, Website PT PELNI (Persero) juga membuat informasi yang lebih spesifik, yaitu:

The Company's official website, www.pelni.co.id has fulfilled the following information:

1. Shareholders informations;
2. Code of Ethic (Business Ethic);
3. Information of General Meeting of Shareholders;
4. Annual Financial Report (AGMS);
5. Profile of Board of Commissioners and Board of Directors
6. Board Charter of Board of Commissioners, Board of Directors, Corporate Secretary and Audit Internal.

Other than the above information, Website of PT PELNI (Persero) also provides more specific information, such as:

Profil Profile	Direksi PT PELNI (Persero) | Board of Directors PT PELNI (Persero)
	Kegiatan Usaha | Business Activities
	Sejarah Perusahaan | History of the Company
	Struktur Organisasi | Organization Structure
	Sumber Daya Manusia | Human Resources
	Tata Kelola Perusahaan PT PELNI (Persero) | Good Corporate Governance PT PELNI (Persero)
	Tata Nilai Utama, Budaya Perusahaan dan Prilaku di Lingkungan PT PELNI (Persero) Primary Value, Company Culture and Behaviour in Environment of PT PELNI (Persero)
	Visi dan Misi PT PELNI (Persero) | Vision and Mission of PT PELNI (Persero)
Promo & Produk Promotion & Product	Paket Wisata | Tour Package
	Reservasi Online Angkutan Muatan Kapal PT PELNI (Persero) | Online Reservation Freight Ship of PT PELNI (Persero)
	Tol Laut dan Angkutan Ternak | Tol Laut and Cattle Ship
Tujuan Wisata Tourism Destination	Kepulauan Komodo | Komodo Islands
	Kepulauan Raja Ampat | Raja Ampat Islands
	Kepulauan Wakatobi | Wakatobi Islands
Berita Informasi Information	Program CSR | CSR Program
	Waspada Penipuan Bermodus Rekrutmen | Alert for Fraud Recruitment
	Berita | News
Kontak Kami Contact Us	Alamat | Address
	Call Center | Call Center
	Social Media | Social Media

04

ANALISA & PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion & Analysis

xxx

TINJAUAN MAKRO EKONOMI

Macro Economic Review

Perekonomian dunia pada 2017 masih dalam situasi yang kurang kondusif, ditandai dengan berbagai gejolak, baik di bidang ekonomi maupun non-ekonomi, yang secara langsung maupun tidak langsung mempengaruhi laju perekonomian dunia. Berdasarkan data Bank Dunia, perekonomian dunia 2017 tercatat tumbuh sebesar 3,6%. Peningkatan ini didorong oleh peningkatan pada sektor manufaktur dan perdagangan serta didukung juga oleh peningkatan kepercayaan pasar. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju meningkat sebesar 1,9% pada tahun 2017 yang juga akan menguntungkan mitra dagang negara-negara tersebut.

The world economy in 2017 was still in a less conducive situation, characterized by some various fluctuation, either in the economic or non-economic aspects, which are directly or indirectly affect the pace of the world economy. Based on the data from the World Bank, the world's 2017 economy grew by 2.7%. This increase was driven by an increase in the manufacturing and trading sectors and also supported by increase of market confidence. Economic growth of advance countries increased by 1.9% in 2017 which would also benefit for the trading partners of those countries.

Perubahan di kawasan Asia juga telah terjadi dengan aliansi yang dibuat negara-negara di kawasan Asia Pasifik dengan bergabungnya negara-negara di kawasan tersebut ke dalam APEC. Kedepannya kawasan Asia diperkirakan akan menjadi kekuatan ekonomi baru pada masa mendatang karena tingkat pertumbuhannya sedang berlangsung dengan pesat, yang ditopang dengan jumlah penduduknya yang sangat besar, seperti di China, India, Rusia dan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN. Jumlah penduduknya yang luar biasa akan menjadi modal yang sangat besar untuk mengalihkan perekonomian dunia ke kawasan Asia, serta sebagai roda penggerak perekonomian dunia di masa yang akan datang.

Changes in the Asian region have also occurred with alliances made by countries in the Asia Pacific region by joining countries in the region into APEC. In the future, the Asian region is expected to become a new economic power in the future because of its rapid growth rate, which is supported by a very large population, such as in China, India, Russia and Indonesia incorporated in ASEAN. The extraordinary population will be a huge capital to divert the world economy to the Asian region, as well as the driving force of the world economy in the future.

Sedangkan kondisi di dalam negeri Indonesia telah dihiasi dengan berbagai ragam peristiwa ekonomi, politik dan budaya yang cukup dinamis yang mempengaruhi perilaku kehidupan masyarakat Indonesia. Perekonomian Indonesia menurut Badan Pusat Statistik (BPS) bertumbuh sebesar 5,07%, yang merupakan angka pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2014. Penguatan ini didukung oleh kenaikan harga komoditas, pertumbuhan global yang lebih kuat, naiknya perdagangan internasional, serta kondisi moneter dan keuangan yang relatif akomodatif. Pertumbuhan PDB (Produk Domestik Bruto) riil menguat dari 5,0% tahun-ke-tahun di kuartal kedua menjadi 5,1% pada kuartal ketiga tahun 2017, sebagian akibat investasi yang kuat dan pertumbuhan ekspor.

While conditions in Indonesia have been decorated with a variety of dynamic economic, political and cultural events that affect the behavior of Indonesian society. The Indonesian economy, according to the Central Bureau of Statistics (BPS), grew by 5.07%, had been the highest growth rate since 2014. This gain was supported by increasing commodity prices, stronger global growth, rising international trade, relatively accommodative monetary and financial conditions. Real GDP growth increased from 5.0% year-on-year in the second quarter to 5.1% in the third quarter of 2017, was partly due to strong investment and export growth.

Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan kemandirian daerah yang berkelanjutan di seluruh wilayah di Indonesia, melalui sinergi pembangunan di seluruh sektor yang berkualitas, transparan, akuntabel, dan inovatif. Sehingga pada gilirannya pembangunan yang berkelanjutan ini akan mengantarkan Indonesia menjadi kekuatan ekonomi baru dunia pada tahun 2025.

The Government continues to strive promoting equitable regional development and sustainability across the region in Indonesia, through synergies development in all sectors of quality, transparency, accountability and innovation. So that this sustainable development will bring Indonesia into a new world economic power by 2025.

TINJAUAN INDUSTRI PELAYARAN

Shipping Industry Review

Pada tahun 2017, industri pelayaran nasional relatif sama dan tidak banyak mengalami perubahan. Perubahan hanya terjadi pada beberapa sektor pelayaran, seperti sektor kontainer yang mulai bergairah sebagai dampak positif dari kebijakan Kemenhub yang melibatkan swasta dalam 3 trayek tol laut 2017. Keterlibatan pihak swasta pada trayek tol laut akan meningkatkan konektivitas antar pulau dan menggairahkan industri pelayaran. Sektor lain yang mengalami perubahan pada tahun 2017 ini adalah sektor *offshore* yang akan mulai menggeliat, dengan dimulainya operasi 3 perusahaan pengeboran. Selain itu, geliat sektor pelayaran mulai terlihat pada sektor pelayaran ekspor batubara, seperti jenis kapal bulk. Hal ini tidak lepas dari pencabutan moratorium terhadap pelayaran ekspor batu bara oleh pemerintah.

Karena memang tidak banyak perubahan pada tahun depan, tentunya perusahaan pelayaran hanya berusaha untuk dapat bertahan, sambil menunggu kondisi lebih baik dengan deregulasi perizinan yang dilakukan pemerintah yang diharapkan akan memberikan dampak positif untuk menggairahkan pelayaran nasional. Kendala juga masih sama yakni terkait kebijakan yang belum memihak industri pelayaran. Misalnya pada sisi moneter yang juga belum

In 2017, the national shipping industry was relatively the same and there was not much changed. Changes were only occurring for some shipping sectors, such as the container sector which was getting excited as a positive impact of Menistry of transportation policy involving the private sector in three 2017 Tol Laut routes. The involvement of private parties on TOL Laut routes would increase inter-island connectivity and excite the shipping industry. Another sector experienced changes in 2017 was the offshore sector that would start to stretch, by started of 3 drilling companies operation. In addition, the stretched shipping sector began to be seen at the shipping sector of coal exports, such as bulk vessels. This could not be separated from the lifting of the moratorium on coal export shipping by the government.

Because of there is not much changes for the next year, shipping companies will only try to survive, meanwhile waiting for better conditions by government licensing deregulation which is expected to have a positive impact for stimulating national shipping. The constraints are also still the same related to policies that have not been impartially to the shipping industry. For example,the monetary side has also not changed due to keep on highly ship investment and

TINJAUAN INDUSTRI PELAYARAN
Shipping Industry Review

berubah karena investasi kapal masih tetap tinggi dan bunga dari bank dan lembaga pembiayaan yang masih sekitar 11%-12%. Pada sisi fiskal, kebijakan pajak pembelian bahan bakar kapal juga belum dihapuskan yang membuat biaya operasional kapal nasional tinggi.

Pada tahun 2017 pemerintah menerapkan asas *cabotage.* Asas *cabotage* yang dimaksud, tertuang dalam Undang-undang No 17/2008 tentang Pelayaran pada pasal 8 poin satu disebutkan kegiatan angkutan laut dalam negeri dilakukan oleh perusahaan angkutan laut nasional dengan menggunakan kapal berbendera Indonesia serta diawaki oleh awak kapal berkewarganegaraan Indonesia. Hai ini diharapkan dapat mendorong geliat industri pelayaran Indonesia. Perkuatan industri perkapalan nasional juga wajib dilakukan oleh Pemerintah dengan menetapkan kawasan industri perkapalan terpadu, mengembangkan pusat desain, penelitian dan pengembangan industri kapal nasional, mengembangkan standardisasi dan komponen kapal dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan melakukan alih teknologi, mengembangkan industri bahan baku dan komponen kapal.

Selain itu, memberikan insentif kepada perusahaan angkutan perairan nasional yang membangun dan/atau mereparasi kapal di dalam negeri dan/atau yang melakukan pengadaan kapal dari luar negeri. Insentif juga perlu dilakukan pada perusahaan yang membangun kapal pada industri galangan kapal nasional apabila biaya pengadaannya dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah, membangun kapal yang pendanaannya berasal dari luar negeri dengan menggunakan sebanyak-banyaknya muatan lokal dan pelaksanaan alih teknologi.

Berdasarkan hal itu, setiap kebijakan yang dikeluarkan baik di tingkat pusat maupun daerah yang berkaitan dengan transportasi laut harus mengedepankan kebijakan asas *cabotage,* terutama yang terkait perbaikan iklim investasi ataupun kemudahan berbisnis.

interest from banks and financing institutions which are still around 11% -12%. On the fiscal side, the tax policy on the purchase of ship fuels has also not been abolished which makes highly operational costs for national vessels.

The government has applied the cabotage principle in 2017. The cabotage principle in question, was set forth in Law No. 17/2008 about Shipping on Article 8 point one as mentioned domestic sea transport activities is carried out by national sea transport companies using Indonesian-flagged ships and manned by crew ship with Indonesian citizenship. This is expected to encourage the shipping industry in Indonesia. For the strengthening of the national shipping industry must be undertaken by the Government which is establishing an integrated shipping industry zone, developing a national ship design, research and development center, developing standardization and ship components using as much local content as possible and transferring technology, developing raw materials and ship components.

On the oher hand, providing incentives to national shipping transport companies that build and / or repair ships domestically and / or procure ships from abroad. Incentives also need to be made on companies that build vessels in the national shipyard industry, if their procurement costs are charged to the State Revenue Budget or the Regional Revenue Budget, building ships with funding from abroad by using as much local content as possible and implementing technology transfer.

Based on this case, any policies have been issued at the central and regional levels related to sea transportation should prioritize the cabotage principle policy. Particularly, which related to improving the investment climate or the ease for doing business.

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA

Operation Performance per Business Segment

KINERJA TAHUN 2017 TERMASUK ASPEK PRODUKSI, KAPASITAS PRODUKSI DAN PENJUALAN/PENDAPATAN USAHA

Usaha pokok PT PELNI (Persero) adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Berdasarkan usaha pokok tersebut, bidang usaha yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) antara lain:

Segmen Jasa Pengangkutan Penumpang dan Barang dengan Jaringan Pelayaran Tetap, Teratur dan Terjadwal Maupun Pelayaran yang Melayani Permintaan Tertentu

Pendapatan yang diperoleh Segmen usaha jasa pengangkutan ini berasal dari pendapatan:

- **Penugasan Pemerintah**
  Segmen usaha penugasan pemerintah PT PELNI (Persero) melaksanakan kegiatan berupa Pelayanan Umum Bidang Angkutan Penumpang Kelas Ekonomi Angkutan laut Dalam Negeri (PSO/*Public Service Obligation*) yaitu Kewajiban melaksanakan angkutan penumpang kelas ekonomi angkutan laut ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang ditetapkan Pemerintah, sehingga memungkinkan masyarakat dapat bepergian dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kapal laut dan Subsidi Pemerintah yang meliputi Tol Laut, Kapal Perintis dan Kapal Ternak.

- **Tambang Pasasi**
  Segmen usaha Tambang Pasasi melaksanakan kegiatan angkutan berupa angkutan penumpang yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dimana Pendapatan tambang pasasi sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A). Tambang Pasasi terdiri dari Tambang pasasi Kelas I, Kelas II dan Tambang Pasasi Kelas Ekonomi.

- **Tambang Muatan**
  Segmen usaha Tambang Pasasi melaksanakan kegiatan angkutan berupa muatan barang tertentu sesuai spesifikasi yang ditentukan, yang dikelola oleh PT PELNI (Persero) Pusat dimana Pendapatan segmen usaha tambang muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang muatan (B60). Tambang muatan terdiri dari Tambang Muatan Palka, Muatan *Dry Container* dan Muatan *Reefer Container*.

2017 PERFORMANCE INCLUDES PRODUCTION ASPECTS, PRODUCTION CAPACITY AND SALES / OPERATING INCOME

The primary business line of PT PELNI (Persero) is the provision of the marine transportation which serves the commercial and logistic among islands. Based on that primary business, the services provided by PT PELNI (Persero) are as follows:

Segment of passengers and freight services with fixed, regular, scheduled shipping lines and shipping that serves certain requests

Revenues earned on This segment of the transportation services business is derived from revenues:

- **Government Assignments**
  Govenment Assignments business segment, PT PELNI (Persero) carries out activities in the form of Public Service of Passenger Transportation (PSO/Public Service Obligation) Class Economy for Domestic Marine Transportation is the obligation to implement passenger economy economy class transportation all over the country with the tariff that set by the Government, enabling people to travel from one place to another by ship and subsidy by the Government in Tol Laut, Perintis Ships and Cattle Vessel.

- **Ticketing**
  Ticketing business segment carries out freight activities in the form of passenger ships which is managed by Head of PT PELNI (Persero) where ticketing Revenue is in line with the service settlement level on the basis of the Mining Bid List (B60A). Ticketing consists of Class I, Class II and Economy Class ticketing.

- **Cargo**
  Cargo business segment carries out freight activities in the form of cargo of certain goods in accordance with the specified specifications, which is managed by Head of PT PELNI (Persero) where cargo business segment Revenue is recognized at the rate of completion of services on the basis of cargo money list (B60). The loading mine consists of the Palka Load Mine, Dry Container Loads and Reefer Container Loads.

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operation Performance per Business Segment

- **Usaha Perkapalan Lainnya**
  Segmen usaha perkapalan lainnya mencakup usaha pelayanan jasa yang diberikan perseroan dengan beberapa jenis kapal seperti sewa ruang di atas kapal, iklan di atas kapal dan *event on board.*

Segmen Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap, teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu ini berkontribusi sebesar 83,95% dari total pendapatan Perusahaan selama tahun 2017 atau sebesar Rp3,71 triliun, meningkat 2,61% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp3,61 triliun.

Segmen Jasa Keagenan
Segmen Usaha keagenan dan angkutan bandar merupakan salah satu usaha andalan PT PELNI (Persero) yang dimulai sejak tahun 1960 yang meliputi jasa keagenan kapal-kapal baik domestik maupun luar negeri. Jenis kapal yang dioperasikan untuk mendukung segmen usaha ini meliputi:
1. *Clearance in 7 out.*
2. *Bunker, Fresh Water, Provision Supply.*
3. *Crew Attendance.*
4. *Protecting Agent.*
5. *Custom Clearance.*
6. Layanan *Sea Pollution.*
7. Layanan *Garbage Removal.*

Sejak tahun 2017, Usaha keagenan menyediakan paket wisata bahari ke berbagai destinasi wisata di tanah air. Dimana para peserta dapat menikmati floating hotel sambil mengeksplor keindahan wisata bahari di tempat yang dituju.

Tahun 2017 Usaha Keagenan mencatatan pendapatan sebesar Rp4,63 miliar atau meningkat 5,05% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,41 miliar. Usaha Wisata Bahari mencatatkan pendapatan sebesar Rp67 juta atau menurun 82,91% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp392 juta.

Segmen jasa keagenan selama tahun 2017 berkontribusi sebesar 0,11% dari total pendapatan usaha Perusahaan atau sebesar Rp4,7 miliar, menurun 2,14% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp4,8 miliar.

- **Other Shipping Business**
  Other shipping business segments include business services provided by the company with several types of vessels such as room for rent on board, advertisement on board and event on board.

Segment Transport Services of passenger and freight with fixed, regular and scheduled shipping lines and shipping serving this particular demand contributed 83.95% of the Company's total revenue during 2017 or Rp3.71 trillion, increased by 2.61% when compared to the previous year which amounted to Rp3.61 trillion.

Segment of Agency services.
Segments of Agent business and port transportation have been one of the mainstay business of PT PELNI (Persero) whose started since 1960 covering agency services of ships for both domestic and abroad. The types of ships that operated to support this business segment including:
1. Clearance in 7 out.
2. Bunker, Fresh Water, Provision Supply.
3. Crew Attendance.
4. Protecting Agent.
5. Custom Clearance.
6. Sea Pollution Service.
7. Garbage Removal Service.

Since 2017, the Agency Business provides maritime tourism packages to various tourist destinations in Indonesia. Where the participants can enjoy floating hotel while exploring the beauty of marine tourism destination.

In 2017, Agency Business recorded revenues of Rp4.63 billion, an increase of 5.05% when compared to the previous year of Rp4.41 billion. Maritime Tourism Business recorded revenue of Rp67 million or decreased by 82.91% when compared to the previous year which amounted to Rp392 million.

The agency services segment for 2017 have been contributed 0.11% of the Company's total operating revenues or Rp4.7 billion, decreased 2.14% from Rp4.8 billion in the previous year.

Segmen Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan *Red* dan Ekspedisi/*Forwarding*

Segmen usaha ini memperoleh penghasilan dengan menyediakan jasa penunjang lainnya seperti operasi terminal, pergudangan dan ekspedisi muatan kapal laut bergerak dalam penyediaan alternatif terkait Jasa Pengiriman Barang murah ke seluruh kota kota di Indonesia yang berbentuk Kepulauan. Dengan menggunakan Armada Pelayaran Kapal Laut, setiap pengirim diuntungkan karena dapat melakukan pengiriman barang dalam jumlah tonase dan volume yang besar serta dapat melakukan pengiriman barang yang dilarang melalui jalur cargo udara.

Dari total pendapatan Perusahaan Segmen Jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan *Red* dan ekspedisi/*forwarding* berkontribusi sebesar 5,45%.atau sebesar Rp240,76 miliar, meningkat 14,23% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp210,77 miliar.

Segment of Terminal operation, warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services

This business segment generates revenue by providing other supporting services such as terminal operations, warehousing and expedition cargo ships in the provision of alternatives related to cheap cost for freight services to all of cities around Indonesia in the form of islands. By using the Marine Shipping Fleet, each sender benefits because it could deliver goods in large quantities of tonnage and volume or deliver goods that prohibited in air cargo lines.

From the total revenues of the Company's Terminal services, warehousing, Red and expedition/forwarding services segments that contributed 5.45%, or Rp240.76 billion, increased by 14.23% from Rp210.77 billion in the previous year.

Segmen Jasa Pemeliharaan Kapal dan Usaha Dok atau Reparasi Kapal

Penghasilan dari segmen usaha ini berasal dari usaha Perbengkelan yang dilakukan oleh SBU *(Strategic Business Unit)* Perusahaan PT PELNI (Persero) yakni Galangan "Pelni Surya" yang Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space* dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

Segmen jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal berkontribusi sebesar 0,38% dari total pendapatan usaha Perusahaan atau sebesar Rp16,96 miliar, meningkat 0,53% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp16,87 miliar.

Segment of Ship Maintenance and Dock Business or Ship Reparation Services

The revenue from this business segment is derived from the workshop of Strategic Business Unit of PT PELNI (Persero), namely Surya shipyard, which has been established since May 20, 1996 and worked on the PELNI type 500 ships, i.e KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), is a strategic projection to guarantee dock space and repairs for all ships (including large ships) whose operated by PT PELNI (Persero).

The ship maintenance and docking or ship repair business segment contributed 0.38% of the Company's total operating revenues or Rp16.96 billion, increased by 0.53% when compared to the previous year of Rp16.87 billion.

Segmen *Charter* dan *Broker* Kapal

Perusahaan juga menyediakan jasa *charter* dan *broker* kapal. Segmen *charter* dan *broker* kapal sepanjang tahun 2017 belum memberi kontribusi terhadap Perseroan.

Segment of Ship Charter and Broker.

The company also provides charter services and ship brokers. Segment of ship charter and ship brokers during 2017 have not contributed to the Company.

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operation Performance per Business Segment

Segmen Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan

Penghasilan yang dihasilkan oleh segmen ini berasal dari usaha Perseroan yang meliputi:

- **Usaha Layanan Kesehatan**
  Segmen usaha Layanan kesehatan melaksanakan kegiatan berupa pelayanan jasa kesehatan yang dilaksanakan oleh Perusahaan anak PT PELNI (Persero) yakni PT RS PELNI yang berlokasi di Jakarta Barat. Layanan kesehatan yang diberikan oleh RS PELNI diantaranya adalah Konsultasi Dokter, Rawat Jalan serta Rawat inap.

- **Usaha Perhotelan**
  Segmen sewa ruangan wisma dilakukan oleh anak Perusahaan PT PELNI (Persero) yakni Bahtera Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

Segmen jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan berhasil berkontribusi sebesar 10,11% dari total pendapatan usaha Perusahaan atau sebesar Rp446,50 miliar, meningkat 8,07% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp410,47 miliar.

KINERJA TAHUN 2017 DALAM ASPEK PRODUKSI

Dalam menjalankan kegiatan usahanya yang sebagian besar memberi pelayanan dalam bidang jasa angkutan dan jasa penunjang perkapalan dan pelayaran maka kapasitas produksi Perseroan dapat kita lihat dengan beragam jenis kapal yang dimiliki Perseroan guna memberikan ragam pelayanan kepada konsumennya. Produk dan jasa yang disediakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. **Kapal *2 in 1***
   Kapal jenis *2 in 1* adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal *2 in 1* ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

2. **Kapal Penumpang Serbaguna**
   Kapal jenis *3 in 1* adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan mobil sekaligus. Kapal Motor

Segment of Consultant, training, health care services, and hospitality business

Revenues that generated by this segment is derived from the Company's business which includes:

- **Health Service Business**
  Health services business segment carries out activities in the form of health services implemented by subsidiary of the PT PELNI (Perserio) namely PT RS PELNI located in West Jakarta. Health services provided by PELNI Hospital are Doctor Consultation, Outpatient and Inpatient.

- **Hospitality**
  The rental segment of the guesthouse is conducted by the subsidiary of PT PELNI (Persero), the Bahtera Hotel with facilities for the meeting and training center equipped with meeting room facilities with a capacity of more than 200 people and other supporting facilities.

The consultant, training, health services and hotel business segments managed to contribute 10.11% of the Company's total revenues or Rp446.50 billion, increased by 8.07% from Rp410.47 billion in the previous year.

2017 PERFORMANCE IN PRODUCTION ASPECT

In carrying out its business activities which mostly provide services in the field of freight, fleet and shipping support services then the Company's production capacity could be seen with some various types of ships owned by the Company to provide the variety of services to its customers. The products and services provided by the Company are as follows:

1. **2 in 1 Ship**
   2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid 2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

2. **Multipurpose Passenger Ship**
   The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and car simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are

Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis *3 in 1,* yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan mobil. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

3. **Kapal Barang**
Untuk keperluan distribusi barang logistik keseluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka JayaNiaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 danKM Caraka Jaya Niaga– 32 dengan kapasitasmuat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo *volume* besar dengan layanan terbaik dandukungan SDM profesional.

4. **Kapal Tol Laut**
PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 (sembilan) armada Kapal Tol Laut yaitu KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III – 32 dan KM Caraka Jaya III – 4, KM.Logistik Nusantara I, II dan III.Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 70 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM161 tahun 2015 tentang penyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, PT PELNI (Persero) ditunjuk sebagai pelaksanapenyelenggarakan kewajiban pelayanan publik tersebut atau yang disebut sebagai program Tol Laut (layanan angkutan barang yang terjadwal, tetap, dan teratur).

5. **Kapal Ternak**
PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu)armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang – Waingapu – Tanjung Priok – Cirebon – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

6. **Kapal Perintis**
Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak. PT PELNI (Persero) mengoperasikan 46 (empat puluh enam) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type, the multipurpose ships for carrying container at the front and back sides as well as passenger and car. The ships had beenmodified at Sembawang Shipyard, Singapore.

3. **Cargo Ship**
For logistic distirbution across Indonesian region, PT PELNI (Persero) has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga– 32 with different capacities for provide cargo ship to carry large volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

4. **Tol Laut Ship**
PT PELNI (Persero) operates 9 (nine) fleet of Tol Laut Ship that is KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Caraka Jaya Niaga III - 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III - 32 and KM Caraka Jaya III - 4, KM.Logistik Nusantara I, II and III. Tol Laut Ship is operated referring to the RI Presidential Decree No. 70 of 2017 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Marine Freight Transportation and the Regulation of the Minister of Transportation No. PM161 year 2015 concerning on public service obligations for the marine freight transportation, PT PELNI appointed as executor of the public service obligations or the so called Tol Laut program (scheduled, fixed, and regular freight services).

5. **Cattle Ship**
PT PELNI (Persero) operates 1 (one) Cattle Ship, KM Camara Nusantara I with route of Kupang – Waingapu – Tanjung Priok – Cirebon – Kupang. The operation of cattle ship aims to help the Government implements lower meat price and increase welfare of the breeders in domestic cow breeding center.

6. **Perintis Ship**
Perintis ship flet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Tol Laut and Cattle ships. PT PELNI (Persero) operates 46 (forty six) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operation Performance per Business Segment

KINERJA TAHUN 2017 DALAM ASPEK PENDAPATAN

2017 PERFORMANCE IN REVENUE ASPECT

Tabel Kinerja Segmen Usaha Perseroan
Table of Company's Business Segment Performance

Uraian Description	2017	2016	Δ Nominal Nominal	Δ % %	Kontribusi Description
Segmen Jasa pengangkutan Freight Services Segment					
Penugasan Pemerintah Government Assignments	2.461.770	2.301.298	160.472	6,97%	
Tambang Pasasi Ticketing	889.395	978.980	(89.585)	(9,15%)	
Tambang Muatan Cargo	320.479	320.081	398	0,12%	
Usaha Perkapalan Lainnya Other Shipping Business	35.137	11.994	23.143	192,95%	
Jumlah Total	**3.706.781**	**3.612.353**	**94.428**	**2,61%**	**83,95%**
Segmen Jasa Keagenan Agency Services Segment					
Usaha Keagenan Agency Business	4.633	4.411	222	5,03%	
Usaha Wisata Bahari Marine Tourism Business	67	392	(325)	(82,91%)	
Jumlah Total	**4.700**	**4.803**	**(103)**	**(2,14%)**	**0,11%**
Segmen Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan *Red* dan Ekspedisi/*Forwarding* Segment of Terminal operation, warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services.					
Usaha Penunjang Lainnya Other Supporting Enterprises	240.756	210.768	29.988	14,23%	
Jumlah Total	**240.756**	**210.768**	**29.988**	**14,23%**	**5,45%**
Segmen Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal Segment of Ship maintenance and dock business or ship reparation services.					
Usaha Perbengkelan Workshop Business	16.956	16.867	89	0,53%	
Jumlah Total	**16.956**	**16.867**	**89**	**0,53%**	**0,38%**
Segmen *Charter* dan *broker* kapal Segment of Ship Charter and Broker.					
Charter dan *Broker* Kapal Ship Charter and Broker	0	0	0	-	
Jumlah Total	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**
Segmen Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan Segment of Consultant, Training, Health Care Services, and Hospitality Business					
Layanan Kesehatan Health services	441.409	402.763	38.646	9,60%	
Usaha Perhotelan Hospitality Business	5.090	7.710	(2.620)	(33,98%)	
Jumlah Total	**446.499**	**410.473**	**35.976**	**8,78%**	**10,11%**
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**4.415.692**	**4.255.264**	**160.428**	**3,77%**	**100%**

dalam jutaan Rupiah
(in million Rupiah)

KINERJA OPERASI PER SEGMEN USAHA
Operation Performance per Business Segment

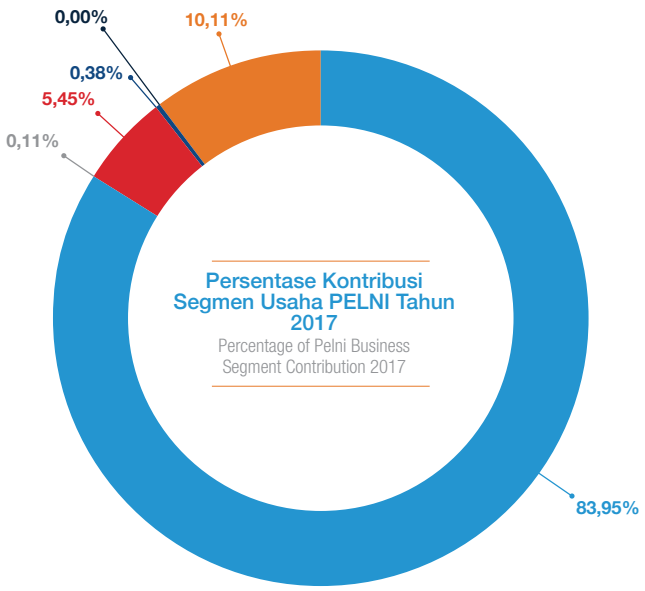

- Segmen Jasa Pengangkutan
  Freight Services Segment
- Segmen Jasa Keagenan
  Agency Services Segment
- Segmen Jasa Operasi Terminal, Pergudangan, Angkutan *Red* dan Ekspedisi/*Forwarding*
  Segment of Terminal operation, warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services.
- Segmen Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal
  Segment of Ship maintenance and dock business or ship reparation services.
- Segmen Charter dan broker kapal
  Segment of Ship Charter and Broker.
- Segmen Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan
  Segment of Consultant, Training, Health Care Services, and Hospitality Business

KINERJA TAHUN 2017 DALAM ASPEK PROFITABILITAS
Tingkat profitabilitas tidak dapat disajikan per-segmen usaha dikarenakan beban usaha dicatat secara konsolidasi.

2017 PERFORMANCE IN PROFABILITY ASPECT
The level of profitability could not be presented per business segment because of the operating expenses are consolidated.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN

The Company Financial Performance Description

LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Aset

Kinerja keuangan PT PELNI (Persero) telah menunjukkan prestasi yang baik. Hal ini terlihat dari adanya peningkatan kinerja baik dari sisi laporan posisi keuangan maupun laporan laba rugi perusahaan. Dari sisi laporan posisi keuangan, jumlah aset perseroan tercatat sebesar Rp6,43 triliun, mengalami kenaikan sebesar Rp220,42 milar atau 8,71% dibandingkan 2016 sebesar Rp6,21triliun. Kenaikan ini disebabkan naiknya jumlah aset lancar perusahaan. komposisi aset Perusahaan di 2017 terdiri dari 42,99% aset lancar dan 57,01% aset tidak lancar.

CONSOLIDATED FINANCIAL POSITION STATEMENTS

Assets

PT PELNI (Persero) financial performance had shown good performance. It can be seen from the increase in performance both in terms of financial position statements and income (loss) statements of the Company. In terms of financial position statements, total assets recorded at Rp6,43 trillion, increased by Rp220.42 billion or 8.71% when compared to 2016 of Rp6.21 trillion. The increase was due to the increase in the total of current assets. The Company's assets composition in 2017 consisted of 42.99% current assets and 57.01% non-current assets.

Tabel Jumlah Aset
Table of Total Assets

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ Nominal Nominal	Δ %
Aset Lancar Current Assets	2.765.448	42,99%	2.542.571	40,93%	222.877	8,77%
Aset Tidak Lancar Non-current Assets	3.666.616	57,01%	3.669.071	59,06%	2.455	(0,07%)
Jumlah Aset Total Assets	**6.432.064**	**100%**	**6.211.642**	**100%**	**220.973**	**8,71%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Aset Lancar

Pada akhir tahun 2017, aset lancar Perseroan mengalami kenaikan sebesar 8,77% atau sebesar Rp222,88 miliar. aset lancar pada 2017 sebesar Rp2,77 triliun, sedangkan aset lancar pada 2016 sebesar Rp2,54 triliun. Peningkatan ini terutama disebabkan oleh:

- Naiknya kas dan setara kas yang cukup signifikan yakni sebesar Rp453,17 miliar atau sebesar 51,17% menjadi Rp1,34 triliun pada tahun 2017 dimana jumlah kas dan setara kas pada tahun 2016 adalah sebesar Rp885,61 miliar. Kas dan setara kas mencapai 48,41% dari jumlah aset lancar yang dimiliki Perseroan.
- Kenaikan jumlah uang muka yang diperoleh Perseroan juga ikut mempengaruhi naiknya jumlah aset lancar Perseroan pada tahun 2017, uang muka pada tahun 2017 meningkat sebesar 68,66% menjadi Rp42,91 miliar.
- Adanya penurunan pada piutang usaha sebesar 24,93% dan aset keuangan lancar lainnya sebesar Rp24,08% berpengaruh pada jumlah aset lancar Perseroan, namun secara jumlah aset lancar Perseroan masih mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2016.

Current Asset

At the end of 2017, the Company's current assets increased by 8.77% or Rp222.88 billion. current assets in 2017 amounted to Rp2, 77 trillion, while current assets in 2016 amounted to Rp2, 54 trillion. This increase is mainly due to:

- Significant increase in cash and cash equivalents amounting to Rp453.17 billion or 51.17% to Rp1.34 trillion in 2017, in which the total cash and cash equivalents in 2016 amounted to Rp885.61 billion. Cash and cash equivalents reached at 48.41% of total current assets owned by the company.
- An increase in Total advances payment by the company also contributed to the increase in total current assets of the company in 2017, advances payment in 2017 increased by 68.66% to Rp42.91 billion.
- Decrease in trade receivables of 24.93% and other current financial assets of Rp24.08% affected the total current assets of the company, but the total current assets were still increased when compared to the year 2016.

Tabel Aset Lancar
Table of Current Assets

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	1.338.781	48,41%	885.615	34,83%	453.166	51,17%
Piutang Usaha Accounts Receivables	204.787	7,41%	272.795	10,73%	(68.008)	(24,93%)
Aset Keuangan Lancar Lainnya Other Receivables	649.901	23,50%	856.019	33,67%	(206.118)	(24,08%)
Persediaan Inventories	473.078	17,11%	462.927	18,21%	10.151	2,19%
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	33.257	1,20%	22.152	0,87%	11.105	50,13%
Uang Muka Advances Payment	42.912	1,55%	25.443	1,00%	17.469	68,66%
Biaya Dibayar Dimuka Prepaid Expenses	22.732	0,82%	17.620	0,69%	5.112	29,01%
Jumlah Aset Lancar **Total Current Assets**	**2.765.448**	**100%**	**2.542.571**	**100%**	**222.877**	**8,77%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Aset Tidak Lancar

Perseroan membukukan jumlah aset tidak lancar per 31 Desember 2017 sebesar Rp3,67triliun, mengalami penurunan sebesar Rp2,46 miliar atau 0,07% bila dibandingkan dengan 2016 yang tercatat sebesar Rp3,67 triliun. Penurunan tersebut disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- Turunnya nilai aset tidak lancar lainnya yang cukup signifikan yakni sebesar 89,45 yakni menjadi Rp1,21 miliar pada tahun 2017 dimana nilai aset lancar lainnya pada tahun 2016 adalah sebesar Rp11,53 miliar.
- Alat produksi juga mengalami penurunan sebesar Rp23,53 miliar menjadi Rp3,21 triliun. Alat produksi mencapai 87,42% pada aset tidak lancar Perseroan.
- Aset tetap dan aset tidak berwujud mengalami kenaikan yakni masing-masing sebesar 2,82% dan 378,17% menjadi Rp365,25 miliar dan 2Rp21,69 miliar. Namun, secara keseluruhan nilai aset lancar mengalami penurunan dari tahun 2016.

Non-Curent Assets

The Company recorded total non-current assets as of December 31, 2017 amounting to Rp3.67 trillion, decreased by Rp2.46 billion or 0.07% when compared to 2016 recorded at Rp3.67 trillion. The decrease is caused by the following matters:

- Other non-current assets significantly decreased by 89.45 billion to Rp1.21 billion in 2017, while other current assets in 2016 amounted to Rp11.53 billion.
- Production equipment also decreased by Rp23.53 billion to Rp3.21 trillion. Production equipment reached at 87.42% on non-current assets of the company.
- Fixed assets and intangible assets increased by 2.82% and 378.17% to Rp365.25 billion and Rp21.69 billion respectively. However, the overall value of current assets had been being decreased from 2016.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Tabel Aset Tidak Lancar
Table of Non-current Assets

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Properti Investasi Invesment Properties	22.088	0,60%	22.981	0,63%	(893)	(3,89%)
Alat Produksi Production Equipment	3.205.175	87,42%	3.228.704	88,00%	(23.529)	(0,73%)
Asset Tetap Fixed Assets	365.254	9,96%	355.224	9,68%	10.030	2,82%
Asset Tidak Berwujud Intangible Assets	21.690	0,59%	4.536	0,12%	17.154	378,17%
Aset Tidak Lancar lainnya Other Non-current Assets	1.216	0,03%	11.529	0,31%	(10.313)	(89,45%)
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	51.192	1,40%	46.097	1,26%	5.095	11,05%
Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-current Assets	**3.666.615**	**100%**	**3.669.071**	**100%**	**(2.456)**	**(0,07%)**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Liabilitas
Jumlah liabilitas Perseroan mengalami penurunan sebesar 2,60% dari Rp747,85 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp728,42 miliar per tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh turunnya nilai Liabilitas jangka pendek sebesar Rp64,06 miliar. Walaupun nilai liabilitas jangka panjang mengalami kenaikan Rp44,63 miliar namun kenaikan ini lebih kecil jika dibandingkan dengan penurunan yang terjadi pada nilai liabilitas jangka pendek.

Liabilities
Total liabilities of the Company decreased by 2.60% from Rp747.85 billion as of December 31, 2016 to Rp728.42 billion as of December 31, 2017. This increase was mainly due to the decrease in the value of short-term liabilities amounting to Rp64.06 billion. Although the value of long-term liabilities increased by Rp44, 63 billion but this increase was smaller when compared with the decrease in the value of short-term liabilities.

Tabel Jumlah Liabilitas
Table of Total Liabilities

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	526.146	72,23%	590.203	78,92%	(64.057)	(10,85%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	202.270	27,77%	157.644	21,08%	44.626	28,31%
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	**728.416**	**100%**	**747.847**	**100%**	**(19.431)**	**(2,60%)**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Liabilitas Jangka Pendek
Jumlah liabilitas jangka pendek turun sebesar 10,85% dari Rp590,33 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp526,15 miliar per tanggal 31 Desember 2017. Secara komposisi, liabilitas jangka pendek mencapai 72,23% terhadap total liabilitas Perseroan. Kenaikan pada liabilitas jangka pendek diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

Short-term Liabilities
Total short-Term liabilities decreased by 10.85% from Rp590.33 billion as of December 31, 2016 to Rp526.15 billion as of December 31, 2017. In composition, short Term liabilities reached at 72.23% total liabilities of the company. The increase in short-term liabilities is detailed as follows:

- Utang usaha selama tahun 2017 mengalami penurunan sebesar Rp1,62 miliar atau sebesar 1,03% menjadi Rp155,77 miliar. Utang usaha mencapai 29,61% pada liabilitas jangka pendek Perseroan.
- Penurunan yang cukup signifikan pada beban akrual yakni sebesar Rp48,51 miliar menjadi Rp171,42 mliar. Beban akrual mencapai 32,58% pada liabilitas jangka pendek Perseroan.
- Nilai liabilitas keuangan jangka pendek lainnya mengalami penurunan sebesar 27,84% menjadi Rp52,36 miliar.

- Accounts payable during 2017 decreased by Rp1.62 billion or 1.03% to Rp155.77 billion. Accounts payable accounted for 29.61% of the company's short-term liabilities.
- Significant decrease in accrual expense of Rp48.51 billion to Rp171,42 mliar. Accrued expenses accounted for 32.58% of the company's short-term liabilities.
- Other short-term financial liabilities value decreased by 27.84% to Rp52.36 billion.

Tabel Liabilitas Jangka Pendek
Table of Short-term Liabilities

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Utang Usaha Accounts Payable	155.769	29,61%	157.386	26,67%	(1.617)	(1,03%)
Beban Akrual Accrued Expenses	171.423	32,58%	219.932	37,26%	(48.509)	(22,06%)
Utang Pajak Tax Payable	63.471	12,06%	51.601	8,74%	11.870	23,00%
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang Curent Portion of Long term Liabilities	33.571	6,38%	40.086	6,79%	(6.515)	(16,25%)
Pendapatan Diterima Dimuka/Deposit/Uang Jaminan Perpaid Revenues/Deposit/Deposit Guarantee	49.554	9,42%	48.641	8,24%	913	1,88%
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya Other Short-term Financial Liabilities	52.357	9,95%	72.557	12,29%	(20.200)	(27,84%)
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek **Total Short-term Liabilities**	**526.145**	**100,00%**	**590.203**	**100,00%**	**(64.058)**	**(10,85%)**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Liabilitas Jangka Panjang

Liabilitas jangka panjang naik sebesar 28,31% dari Rp157,64 miliar per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp202,27 miliar per tanggal 31 Desember 2017. Secara komposisi, Liabilitas Jangka Panjang mencapai 27,77% terhadap jumlah liabilitas Perseroan. Kenaikan yang terjadi selama tahun 2017 diperinci lebih lanjut sebagai berikut:

- Kenaikan liabilitas imbalan paska kerja jangka panjang berkontribusi dalam total kenaikan liabilitas jangka panjang Perseroan, kenaikan yang terjadi adalah sebesar Rp56,17 miliar atau sebesar 71,48%, sehingga liabilitas mbalan paska kerja jangka panjang tahun 2017 menjadi Rp134,74 miliar. Liabilitas imbalan paska kerja jangka panjang mencapai 66,61% dalam jumlah liabiltas jangka panjang Perseroan.

Long-term Liabilities

Long-term liabilities increased by 28.31% from Rp157.64 billion as of December 31, 2016 to Rp202.27 billion as of December 31, 2017. In composition, long-term liabilities reached at 27.77% total liabilities of the company. The increase occurring during 2017 is detailed as follows:

- The increase in long-term employment benefits contributed to the total increase in the Company's long-term liabilities, increased by Rp56.17 billion, or 71.48%, resulting in long-term employment benefits of 2017 to Rp134.74 billion. Long-term-employment benefits accounted for 66.61% of total long-term liabilities.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Tabel Liabilitas Jangka Panjang
Table of Long-term Liabilities

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Utang Non Usaha Jangka Panjang Long-Term Non Operating Payables	37.687	18,63%	43.523	27,61%	(5.836)	(13,41%)
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang Long-Term Finacial Institution and Bank Loan	29.841	14,75%	35.547	22,55%	(5.706)	(16,05%)
Liabititas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang Long Term Employee Benefits	134.742	66,61%	78.574	49,84%	56.168	71,48%
Jumlah Liabilitas Jangka Panjang **Total Long-term Liabilities**	**202.270**	**100%**	**157.644**	**100%**	**44.626**	**28,31%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Ekuitas
Jumlah ekuitas Perseroan naik sebesar 4,39% dari Rp5,46triliun per tanggal 31 Desember 2016 menjadi Rp5,70 triliun per tanggal 31 Desember 2017. Kenaikan ini terutama disebabkan oleh meningkatnya dana cadangan umum sebesar Rp248,40 miliar atau sebesar 151,29% yang menjadi Rp412,59 miliar pada tahun 2017 ini.

Equity
The Company's total equity increased by 4.39% from Rp5.46 trillion as of December 31, 2016 to Rp5.70 trillion as of December 31, 2017. This increase was primarily due to the increase in general reserve funds by Rp248.40 billion or 151.29% to Rp412.59 billion in 2017.

Tabel Ekuitas
Table of Equity

Uraian Description	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Modal Saham Capital Stock	7.065.092	123,87%	7.065.092	129,31%	0	-
Penyertaan Modal Pemerintah Government Equity	564.951	9,91%	564.951	10,34%	0	-
Cadangan Reserves	412.593	7,23%	164.190	3,01%	248.403	151,29%
Saldo Laba (Rugi) Retained Earnings (Defisits)	(2.250.844)	(39,46%)	(2.278.860)	(41,71%)	28.016	(1,23%)
Komponen Ekuitas Lainnya Other Component Equity	(89.999)	(1,58%)	(52.980)	(0,97%)	(37.019)	69,87%
Kepentingan Non Pengendali Non-controlling Interest	1.855	0,03%	1.402	0,03%	453	32,31%
Jumlah Ekuitas **Total Equity**	**5.703.648**	**100%**	**5.463.795**	**100%**	**239.853**	**4,39%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN

CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME

Tabel Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian
Table of Consolidated Statements of Comprehensive Income

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Pedapatan Usaha Operating Revenue	4.415.692	4.255.263	160.429	3,77%
Reduksi Pendapatan Usaha Reduction in Operating Revenues	(20.847)	(10.648)	(10.199)	95,78%
Pendapatan Usaha Bersih Gross Profit	4.394.845	4.244.615	150.230	3,54%
Beban Pokok Usaha Operating Expenses	(3.652.044)	(3.445.001)	(207.043)	6,01%
Laba (Rugi) Kotor Profit (Loss) Gross	742.801	799.614	(56.813)	(7,11%)
Biaya Administrasi dan Umum General and Administrative Expenses	(457.369)	(524.024)	981.393	(187,28%)
Biaya Pemasaran Marketing Expenses	(23.152)	(15.175)	(7.977)	52,57%
Laba (Rugi) Usaha Profit (Loss) Business	262.280	260.413	1.867	0,72%
Pendapatan (Beban) Non Usaha Financial Expenses	95.047	56.581	38.466	67,98%
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Income (Loss) Before Tax	357.327	316.995	40.332	12,72%
Penghasilan (Beban) Pajak: Benefit (Expense) Income Tax:				
Kini Current Tax	(85.431)	(77.316)	(8.115)	10,50%
Tangguhan Deferred Tax	4.986	8.868	(3.882)	(43,78%
	(80.445)	**(68.448)**	**(11.997)**	**17,53%**
Laba Tahun Berjalan Other Comprehensive Income	**276.881**	**248.547**	**28.334**	**11,40%**
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income				
Keuntungan (Kerugian) Akturia Subsequently To Profit Or Loss Actuaria Gain (Loss)	(37.429)	(33.627)	(3.802)	11,31%
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Income Current Year	**239.452**	**214.920**	**24.532**	**11,41%**
Laba Yang Diatribusikan kepada: Profit attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	276.419	248.177	28.242	11,39%
Pemilik Non Pengendali Non-controlling Interest	462	370	92	24,86%
	276.881	**248.547**	**28.334**	**11,40%**
Jumlah Penghasilan Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada : Total Comprehensive Income attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owner of Parent Entity	238.990	214.550	24.440	11,39%
Pemilik Non Pengendali Non-controlling Interest	462	370	92	24,86%
	239.452	**214.920**	**24.532**	**11,41%**
Laba Bersih Per Saham Dasar asic Earnings Per Share	39.124,62	35.127,22	3.997	11,38%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Penjualan/Pendapatan Usaha

Pendapatan di 2017 tercatat sebesar Rp4,42 triliun mengalami kenaikan 3,77% jika dibandingkan dengan pendapatan di 2016 yaitu sebesar Rp4,26 triliun. Diantara komposisi pendapatan bersih tahun 2017, Kenaikan pendapatan usaha juga disebabkan karena:

- Naiknya pendapatan yang berasal dari penugasan pemerintah sebesar 6,97% atau sebesar Rp160,48 miliar, jumlah pendapatan usaha dari segmen penugasan pemerintah adalah sebesar Rp2,46 triliun yang memberikan kontribusi sebesar 55,75% terhadap total pendapatan usaha Perseroan.
- Pendapatan perusahaan yang berasal dari layanan kesehatan juga memberikan kontribusi terhadap naiknya jumlah pendapatan usaha yang diperoleh Perseroan, kenaikan yang terjadi di segmen layanan kesehatan adalah sebesar 9,60% atau sebesar Rp38,65 miliar.

Sales/Operating Revenue

Revenue in 2017 booked at Rp4.42 trillion, increased by 3.77% when compared to 2014 revenues of Rp4.26 trillion. Among the composition of Gross Profit in 2017, the increase in operating revenues was also due to:

- The increase in revenues generated from the government's assignment of 6.97% or Rp160.48 billion, total operating revenues from the government assignment segment amounted to Rp2.46 trillion which contributed 55.75% of the total operating revenues.
- The Company revenues from healthcare also contributed to the increase in total of operating revenues that earned by the company, an increase in the health care segment amounted to 9.60% or Rp38.65 billion.

Tabel Penjualan/Pendapatan Usaha
Table of Sales/Operating Revenue

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penugasan Pemerintah Government Assignments	2.461.770	2.301.298	160.472	6,97%
Tambang Pasasi Ticketing	889.395	978.980	(89.585)	(9,15%)
Layanan Kesehatan Health Services	441.409	402.763	38.646	9,60%
Tambang Muatan Cargo	320.479	320.081	398	0,12%
Usaha Perkapalan Lainnya Other Shipping Business	35.137	11.994	23.143	192,95%
Usaha Perbengkelan Workshop Business	16.956	16.867	89	0,53%
Usaha Perhotelan Hospitality Business	5.090	7.710	(2.620)	(33,98%)
Usaha Keagenan Agency Business	4.633	4.411	222	5,03%
Usaha Wisata Bahari Marine Tourism Business	67	392	(325)	(82,91%)
Usaha Penunjang Lainnya Other Supporting Enterprises	240.756	210.768	29.988	14,23%
Jumlah Pendapatan Total Revenue	**4.415.692**	**4.255.264**	**160.428**	**3,77%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Reduksi Pendapatan Usaha

Reduksi pendapatan usaha adalah diskon atau potongan tarif penumpang atau muatan. Reduksi pendapatan usaha Perusahaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp20,85 miliar atau meningkat 95,78% dibandingkan dengan tahun sebelumnya yang sebesar Rp10,65 miliar.

Pendapatan Usaha Bersih

Pendapatan usaha bersih merupakan perolehan pendapatan usaha setelah dikurangi reduksi pendapatan usaha. Pada tahun 2017, Perseroan membukukan pendapatan bersih sebesar Rp4,39 triliun atau mencatat pertumbuhan sebesar Rp150,23 miliar atau 3,54% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp4,24 triliun. Pertumbuhan tersebut disebabkan oleh meningkatnya pendapatan usaha dan menurunnya reduksi pendapatan atas tiket penumpang.

Beban Usaha

Secara keseluruhan beban usaha Perseroan mengalami peningkatan sebesar 6,01%. Beban usaha meningkat sebesar Rp207,04 miliar menjadi Rp3,65 triliun dari Rp3,45 triliun yang didorong oleh hal-hal dibawah ini:

- Naiknya beban usaha terkait pegawai yang cukup signifikan yakni sebesar 83,90% atau sebesar Rp382,86 miliar, dimana beban usaha terkait pegawai yang dibukukan oleh Perseroan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp839,20 miliar.
- Beban penyusutan dan amortisasi yang dicatat oleh perusahaan pada tahun 2017 adalah sebesar Rp362,85 miliar, naik sebesar 55,93% atau sebesar Rp130,14 miliar. Kenaikan ini disebabkan karena pada tahun 2017 Perseroan melakukan penambahan aset tetap sehingga nilai penyusutan dan amortisasi menjadi meningkat.
- Kenaikan beban usaha terkait penumpang juga mengalami kenaikan yang cukup signifikan yakni sebesar Rp127,65 miliar yakni menjadi Rp306,73 miliar.

Reduction in Operating Revenues

Reduction of operating revenues is a discount or deduction on passenger or cargo rates. The reduction of the Company's operating revenues in 2017 amounted to Rp20.85 billion or increased by 95.78% when compared to the previous year which amounted to Rp10.65 billion.

Gross Profit

Gross Profit is earned after deducting the reduction in operating revenues. In 2017, the Company booked a net income of Rp4.39 trillion, or recorded growth by Rp150.23 billion, or 3.54% when compared to 2014 of Rp4.24 trillion. The growth was attributed to increase operating revenues and decreased the reduction in revenue on passenger ticket.

Operating Expenses

Overall, the Company's operating expenses increased by 6.01%. Operating expenses increased by Rp207.04 billion to Rp3.65 trillion from Rp3.45 trillion driven by the following matters:

- Significant increase in operating expenses related to employees amounted to 83.90% or Rp382.86 billion, of which business expenses related to employees booked by the company during 2017 amounted to Rp839.20 billion.
- Depreciation and amortization recorded by the company in 2017 amounted to Rp362.85 billion, increased by 55.93% or Rp130.14 billion. The increase was caused that in 2017 the company added fixed assets so that the value of depreciation and amortization increased.
- The increase in operating expenses related to passengers also had a significant increase of Rp127.65 billion to Rp306.73 billion.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Tabel Beban Usaha
Table of Operating Expenses

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Perkapalan Shipping	1.432.966	1.490.103	(57.137)	(3,83%)
Pegawai Employee	839.200	456.342	382.858	83,90%
Pemeliharaan dan Perbaikan Maintenance and Repair	384.945	426.351	(41.406)	(9,71%)
Penyusutan dan Amortisasi Amortization and Depreciation	362.848	232.705	130.143	55,93%
Penumpang Passenger	306.731	179.079	127.652	71,28%
Pelayanan Kesehatan Health services	172.122	268.605	(96.483)	(35,92%)
Sewa Rent	58.267	42.995	15.272	35,52%
Asuransi Insurance	56.987	59.150	(2.163)	(3,66%)
Perhotelan Hospitality	12.500	3.735	8.765	234,67%
Perbengkelan Workshop	12.299	11.121	1.178	10,59%
Kendali Mutu Pelayanan Quality Service Control	6.473	9.362	(2.889)	(30,86%)
Muatan Ternak Animal Cargo	4.733	265.406	(260.673)	(98,22%)
Pajak dan Retribusi Taxes and Levies	1.851	8	1.843	23037,50%
Beban Pokok Lainnya Other Cost of Revenues	122	38	84	221,05%
Jumlah Beban Usaha Total Operating Expenses	**3.652.044**	**3.445.001**	**207.043**	**6,01%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Laba Kotor
Pada akhir tahun 2017, laba kotor Perseroan mengalami penurunan sebesar 7,11%. Laba kotor Perseroan pada 2017 sebesar Rp742,80 miliar, sedangkan Laba kotor Perseroan pada 2016 sebesar Rp799,61 miliar.

Beban Umum Dan Administrasi
Secara keseluruhan beban umum dan administrasi Perseroan mengalami penurunan sebesar 12,72% atau sebesar Rp66,67 miliar menjadi Rp457,37 miliar dari Rp507 miliar yang didorong oleh hal-hal dibwah ini:

- Beban umum dan administrasi terkait pegawai dicatat sebesar Rp288,03 miliar turun sebesar Rp39,07 miliar dibandingkan dengan tahun 2016 yang sebesar Rp327,10 miliar adalah salah satu kontributor turunnya beban umum dan administrasi.

Gross Profit
At the end of 2017, the Company's gross profit decreased by 7.11%. The Company's gross profit in 2017 amounted to Rp742.80 billion, while the Company's gross profit in 2016 amounted to Rp799.61 billion.

General and Administrative Expenses
Overall, general and administrative expenses of the Company decreased by 12.72% or Rp66.67 billion to Rp457.37 billion from Rp507 billion prompted by the following issues:

- General and administrative expenses related to employee recorded at Rp288.03 billion decreased by Rp39.07 billion when compared to 2016 amounting to Rp327.10 billion was one of the contributors to the decrease in general and administrative expenses.

- Perseroan tidak mencatat adanya provisi penurunan nilai piutang pada tahun 2017, sedangkan tahun 2016 Perseroan mencatat provisi penurunan piutang sebesar Rp38,63 miliar, hal ini menjadi salah satu penyebab turunnya jumlah beban umum dan administrasi.

- The Company did not record any provision for impairment of receivables by 2017, meanwhile in 2016 the company recorded provision for the decrease of receivables amounting to Rp38.63 billion, this became one of the causes of the decrease in the amount of general and administrative expenses.

Tabel Beban Umum dan Administrasi
Table of General and Administrative Expenses

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Pegawai Employees	288.026	327.091	(39.065)	(11,94%)
Pajak dan Restribusi Taxes and Levies	27.235	18.873	8.362	44,31%
Pemeliharaan dan Perbaikan Maintenance and Repair	24.422	16.650	7.772	46,68%
Rumah Tangga Household	21.913	37.995	(16.082)	(42,33%)
Imbalan Paska Kerja Post-Employment Benefits	21.417	9.230	12.187	132,04%
Adminsitrasi Perkantoran Office Administration	16.513	20.751	(4.238)	(20,42%)
Penyusutan dan Amortisasi Amortization and Depreciation	12.841	15.066	(2.225)	(14,77%)
Konsultan dan Audit Audit and Consultant	10.457	10.303	154	1,49%
Sewa Rent	9.133	7.549	1.584	20,98%
Perencanaan dan Pengembangan Development and Planning	6.905	439	6.466	1472,89%
Asuransi Insurance	4.809	14.126	(9.317)	(65,96%)
PKBL PKBL	2.112	94	2.018	2146,81%
Provisi Penurunan Nilai Piutang Provision of Impairment of Receivables	0	38.628	(38.628)	(100,00%)
Denda/Klaim Penalties/Claims	1.218	2.284	(1.066)	(46,67%)
Keamanan dan Keselamatan Security and Safety	1.213	0	1.213	0,00%
Olah Raga dan Kesenian Sport and Art	539	300	239	79,67%
Sumbangan Donations	303	1.037	(734)	(70,78%)
Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Keuangan Loss on Impairment of Non-Financial Assets	287	0	287	-
Lainnya Others	8.025	3.065	4.960	161,83%
Jumlah Beban Umum dan Administrasi Total General and Operating Expenses	**457.369**	**524.024**	**(66.655)**	**(12,72%)**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Laba Usaha
Laba usaha di tahun 2017 tercatat sebesar Rp262,28 miliar, naik 0,72% apabila dibandingkan dengan tahun 2016 yang mencapai Rp260,41 miliar.

Laba Sebelum Pajak
Pada tahun 2017, Perseroan membukukan laba sebelum pajak sebesar Rp357,33 miliar, mengalami peningkatan sebesar Rp1,87 miliar atau 12,72% dibandingkan tahun 2016 yaitu Rp316,99 miliar. Peningkatan ini disebabkan oleh pendapatan yang diperoleh Perseroan dari bunga lebih besar dari beban bunga yang harus ditanggung oleh Perseroan.

Beban Pajak
Perseroan membukukan beban pajak sebesar Rp80,45 miliar pada tahun 2017 meningkat dari tahun 2016 sebesar 17,53% yang sebesar Rp68,45 miliar. Hal ini disebabkan meningkatnya jumlah PPh pasal 15 yang terutang.

Laba Tahun Berjalan
Per 31 Desember 2017, Perseroan membukukan laba tahun berjalan sebesar Rp276,88 miliar, meningkat sebesar Rp28,33 miliar atau 11,40% dibandingkan tahun 2016 sebesar Rp248,55 miliar. Realisasi pertumbuhan laba tahun berjalan dikontribusikan oleh naiknya pendapatan usaha dan pendapatan non usaha yang berhasil diperoleh Perusahaan serta turunnya beban beban umum dan administrasi.

Laba Komprehensif Tahun Berjalan
Laba komprehensif yang diperoleh Perseroan selama tahun 2017 adalah sebesar Rp239,45 miliar, meningkat dari tahun sebelumnya sebesar 11,41% atau Rp24,53 miliar.

Profit Business
Profit Business in 2017 was recorded at Rp262.28 billion, increased by 0,72% when compared to 2014 reached at Rp260.41 billion.

Profit Before Tax
In 2017, the Company posted profit before tax of Rp357.33 billion, increased by Rp1.87 billion or 12.72% when compared to the year 2016 of Rp316.99 billion. The increase was due to the company's revenue from interest was bigger than interest expense to be borne by the company.

Income Tax
The Company recorded tax expenses of Rp80.45 billion in 2017, increased from the year 2016 of 17.53% amounting to Rp68.45 billion. This was due to the increase in the amount of income tax Article 15 that had been stated.

Profit for The Year
As of December 31, 2017, the Company booked profit for the year at Rp276.88 billion, increased by Rp28.33 billion or 11.40% when compared to 2016 of Rp248.55 billion. The realization of the profit for the year growth contributed by increased operating and non-operating revenues earned by the company as well as the decrease in general and administrative expenses.

Comprehensive Income Current Year
The comprehensive income earned by the company during 2017 was Rp239.45 billion, increased from the previous year of 11.41% or Rp24.53 billion.

LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN

Kenaikan bersih kas dan setara kas di 2017 sebesar Rp102,75 miliar, menurun 86,52% dibandingkan kenaikan bersih kas dan setara kas di 2016 sebesar Rp762,51 miliar. Penurunan tersebut disebabkan oleh kenaikan arus kas dari aktivitas investasi sebesar 867,48% atau sebesar Rp469 miliar.

CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS

The net increase in cash and cash equivalent 2017 amounted to Rp102.75 billion, decreasing to 86.52% when compared with net increase in cash and cash equivalents in 2016 of Rp762.51 billion. The decrease was due to an increase in cash flow from operating activities by 867.48% or Rp469 billion.

Tabel Arus Kas
Table of Cash Flows

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Arus Kas dari Aktvitas Operasi Cash Flows from Operating Activities	439.262	788.812	(349.550)	(44,31%)
Arus Kas dari Aktivias Investasi Cash Flows from Operating Activities	(323.426)	(54.066)	(269.360)	498,21%
Arus Kas dari Aktivias Pendanaan Cash Flows from Financing Activities	(13.087)	27.760	(40.847)	0,00%
Penurunan Bersih Kas dan Setara Kas Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalent	102.748	762.507	(659.759)	(86,52%)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Beginning Balance Cash and Cash Equivalent	1.601.598	839.091	762.507	90,87%
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Ending Balance Cash and Cash Equivalent	1.704.346	1.601.598	102.748	6,42%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih Perseroan yang diperoleh dari aktivitas operasi menurun sebesar 44,31% dari Rp788,81 miliar per 31 Desember 2016 menjadi Rp439,26 miliar per 31 Desember 2017. Penurunan ini terutama disebabkan oleh tidak sebandingnya penerimaan dari pelanggan dengan dengan kenaikan pembayaran kepada pemasok dan pegawai.

Cash Flow From Operating Activities

Net cash flows of the company generated from operating activities decreased by 44,31% from Rp788.81 billion as of December 31, 2016 to Rp439.26 billion as of December 31, 2017. This decrease was primarily due to unequal receipt of customers and increased payments to suppliers and employees.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Operasi
Table of Cash Flow From Operating Activities

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan Kas dari Pelanggan dan Pihak Terkait Receipt from Customer	2.251.600	3.424.308	(1.172.708)	(34,25%)
Penerimaan dari *Public Service Obligation* Receipt from Public Service Obligation	2.461.770	2.363.974	97.796	4,14%
Pembayaran Kepada Pemasok Payment to Suppliers	(3.685.537)	(3.037.676)	(647.861)	21,33%
Penerimaan Kas Lain-lain Cash Receipt Others	58.865	20.510	38.355	187,01%
Pembayaran Biaya Operasional Payment of Operating Expenses	(495.157)	(612.061)	116.904	(19,10%)
Pembayaran Biaya *Overhead* Payment of Overhead Expense	(21.903)	(148.878)	126.975	(85,29%)
Pengeluaran Kas Biaya Lain-lain Receipt from Other Revenues	(64.075)	(4.706)	(59.369)	1261,56%
Penempatan Jangka Pendek Short Term Placement	0	(1.237.338)	1.237.338	(100,00%)
Penerimaan Uang Jaminan dari Pelanggan Receipt of Cash Collateral from Customer	3.938	145.636	(141.698)	(97,30%)
Pencairan Uang Jaminan Receipt of Cash Collateral from Customer	0	(1.611)	1.611	(100,00%)
Pembelian Persediaan Purchase of Supplies	(5.929)	(107)	(5.822)	5441,12%
Penerimaan Bunga Interest Receipt	42.694	33.862	8.832	26,08%
Pembayaran Bunga Pinjaman Payment of Interest Loan	(3.399)	(26.842)	23.443	(87,34%)
Pembayaran Pajak Tax Payment	(103.606)	(130.257)	26.651	(20,46%)
Arus Kas Besih dari Aktivitas Operasi Net Cash Flows from Operating Activities	**439.262**	**788.813**	**(349.551)**	**(44,31%)**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Arus kas bersih Perseroan yang digunakan untuk aktivitas investasi mengalami penurunan sebesar 498,24% dari minus Rp54,06 miliar per 31 Desember 2016 menjadi minus Rp323,43 miliar per 31 Desember 2017. Penurunan ini disebabkan meningkatnya jumlah pembelian aset tetap yang dilakukan perusahaan selama tahun 2017.

Cash Flow from Operating Activities
The Company's net cash flows used for Operating Activities was significantly decreasing to 498.24% from Rp54.06 billion as of December 31, 2016 to minus Rp323.43 billion as of December 31, 2017. This decrease was primarily due to the total of purchase of fixed asset that performed by the company during 2017.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Investasi
Table of Cash Flow from Operating Activities

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Hasil Penjualan Aset Tetap Sale of Fixed Assets	11.818	2.337	9.481	405,69%
Pembelian Aset Tetap Purchase of Fixed Assets	(255.875)	(54.279)	(201.596)	371,41%
Perolehan Aset dalam Penyelesaian Construction in Progress	(70.412)	(12)	(70.400)	586666,67%
Perolehan Aset Tak Berwujud Intangible Assets	(5.404)	0	(5.404)	0,00%
Pembelian Aset Lain-lain Purchase of Other Assets	(3.554)	(2.110)	(1.444)	0,00%
Arus Kas Besih dari Aktivitas Investasi Net Cash Flows from Investment Activities	**(323.427)**	**(54.063)**	**(269.363)**	**498,24%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih Perseroan yang digunakan dalam aktivitas pendanaan menurun sebesar 147,14% dari tahun 2016 yakni sebesar Rp27,76 miliar menjadi Rp 13,09 miliar pada tahun 2017.

Cash Flows from Financing Activities

The Company's net cash flows generated from financing activities decreased by 147.14% from 2016 was amounted to Rp27.76 billion to Rp13.09 billon in 2017.

Tabel Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan
Table of Cash Flows from Financing Activities

Uraian Description	2017	2016	Δ	
			Nominal Nominal	%
Penerimaan Pinjaman Bank/Pihak Ketiga Receipt from Bank Loan/Third Parties	0	35.557	(35.557)	0%
Penerimaan (Pengeluaran) Deviden Receipt (Issuence) Deviden	0	0	0	0%
Pembayaran Utang Bank Payment of Bank Loan	(13.087)	(7.797)	(5.290)	0%
Arus Kas Besih dari Aktivitas Pendanaan Net Cash Flows from Financing Activities	**(13.087)**	**27.760**	**(40.847)**	**(147,14%)**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

RASIO KINERJA KEUANGAN / FINANCIAL PERFORMANCE RATIO

Uraian Description	Satuan Unit	2017	2016
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	%	525,60	430,80
Rasio Kas Cash Ratio	%	293,37	196,27
Rasio Cepat Quick Ratio	%	254,45	150,05
Rasio *Leverage* Leverage Ratio			
Rasio Kewajiban atas Aset Debt to Asset Ratio	%	11,32	12,04
Rasio Kewajiban atas Ekuitas Debt to Equity Ratio	%	12,77	13,69
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas Long Term Debt to Equity	%	3,55	2,89
Rasio Aktivitas Activity Ratio			
Rasio Perputaran Persediaan Inventory Turnover Ratio	kali Times	0,11	0,11
Rasio Perputaran Aset Asset Turnover Ratio	%	70,94	69,81
Rasio Penagihan Rata-rata Average Collection Ratio	hari days	17	23
Rasio Profitabilitas Profitability Ratio			
Imbalan terhadap Ekuitas Return on Equity	%	4,41	4,12
Imbalan terhadap Investasi Return on Investment	%	10,82	6,61
Marjin Laba Kotor atas Penjualan Gross Profit on Sales	%	16,90	18,84
Marjin Laba Bersih atas Penjualan Nett Profit on Sales	%	6,14	5,74
Rasio EBITDA atas Aset EBITDA Ratio on Asset	%	10,82	6,61

Per 31 Desember 2017, berdasarkan capaian rasio atas kinerja keuangan, PT PELNI (Persero) mencatat pertumbuhan pada beberapa aspek, hal ini tercermin dalam posisi likuiditas yang mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, hal ini tercermin dari peningkatan rasio lancar semula 430,80% menjadi 525,60%; rasio cepat dari 196,27% menjadi 293,37% dan rasio kas dari 150,05% menjadi 254,45%.

As of December 31, 2017, based on the ratio achievement of financial performance, PT PELNI (Persero) recorded growth in some several aspects, this was reflected in the increasing liquidity position in 2017 when compared to 2016, this was reflected from the increased in the current ratio of 430.80% to 525.60%; the quick ratio from 196.27% to 293.37% and the cash ratio from 150.05% to 254.45%.

Tingkat kemampuan PT PELNI (Persero) tahun 2017 dalam memenuhi seluruh kewajiban apabila dilakukan likuidasi pada saat ini mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2016, hal ini tercermin dari penurunan rasio total liabilitas terhadap jumlah aset dari 12,04% menjadi 11,32%, rasio total liabilitas terhadap ekuitas dari 13,69% menjadi 12,77% dan meskipun rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas mengalami peningkatan dari 2,89% menjadi 3,55%. Hal ini dipengaruhi peningkatan jumlah liabilitas jangka panjang 28,31% lebih besar dari peningkatan jumlah ekuitas 4,39% dan jumlah aset 3,55%.

Dibandingkan dengan tahun 2016, tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya relatif mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari rasio perputaran aset dari 69,81% menjadi 70,94% dan rasio penagihan rata-rata piutang dari 23 hari menjadi 17 hari, meskipun rasio perputaran persediaan stabil.

Pada tahun 2017, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya secara umum mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari hasil imbalan *(return)* terhadap ekuitas meningkat dari 4,12% menjadi 4,41%, rasio imbalan terhadap investasi meningkat dari 6,61% menjadi 10,82%, margin laba bersih meningkat dari 5,74% menjadi 6,14%, dan rasio EBITDA terhadap aset meningkat dari 6,61% menjadi 10,82%, sedangkan margin laba kotor mengalami penurunan dari 18,84% menjadi 16,90%.

PT PELNI (Persero) capability fulfilled all obligations in 2017 if liquidated at this time has decreased when compared to the achievement in 2016, this was reflected by the decrease of debt to asset ratio from 12.04% to 11.32%; debt to equity ratio from 13.69% to 12.77% and although the long-term debt to equity increased from 2.89% to 3.55%. This was influenced by the increase in total long-term liabilities 28.31%, greater than the increase in total equity 4.39% and total assets of 3.55%.

Compared to the year 2016, the level of company effectiveness in utilizing the relative resources has increased, this was reflected in the asset turnover ratio from 69.81% to 70.94% and the average collection of accounts receivable from 23 days to 17 days, although the rotation ratio of inventory was stable.

In 2017, the level of effectiveness use of resources in general has increased, as seen from the return on equity increased from 4.12% to 4.41%, the ratio of return on investment increased from 6.61% to 10,82%, net profit margin increased from 5.74% to 6.14%, and EBITDA to asset ratio increased from 6.61% to 10.82%, while gross profit margin decreased from 18.84% to 16.90%.

KEMAMPUAN MEMBAYAR HUTANG DAN KOLEKTABILITAS PIUTANG PERUSAHAAN

SOLVABILITY AND COLLECTABILITY OF COMPANY RECEIVABLES

Uraian Description	Satuan Unit	2017	2016
Rasio Likuiditas Liquidity Ratio			
Rasio Lancar Current Ratio	%	525,60	430,80
Rasio Kas Cash Ratio	%	293,37	196,27
Rasio Cepat Quick Ratio	%	254,45	150,05

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Kemampuan Membayar Hutang

Rasio kemampuan membayar pinjaman terefleksikan dalam rasio lancar dan rasio kas. Di akhir tahun 2017, rasio lancar tercatat sebesar 525,60% sementara rasio kas *(cash ratio)* tercatat sebesar 254,45%. PELNI memiliki rasio cepat *(quick ratio)* sebesar 93,37% dengan jumlah aset lancar Rp2,77 triliun dan liabilitas lancar Rp526,14 miliar.

PT PELNI (Persero) melakukan pengelolaan risiko likuiditas dengan memonitor profil jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan, menjaga saldo kecukupan kas dan surat berharga dan kesiapan untuk menjaga posisi pasar. Perseroan juga mempertahankan kemampuannya untuk melakukan pembiayaan atas pinjaman yang dimiliki dengan cara mencari berbagai sumber fasilitas pembiayaan yang mengikat dari pemberi pinjaman yang andal.

Tanggal jatuh tempo kontraktual dari liabilitas keuangan seperti utang usaha, biaya masih harus dibayar, utang lain-lain dan pinjaman bank jangka pendek adalah kurang dari satu tahun, kecuali untuk liabilitas keuangan seperti utang obligasi dan pinjaman investasi.

Tingkat Koletabilitas Piutang

Kolektibilitas piutang usaha dan piutang lain-lain ditinjau secara berkala. Piutang yang diketahui tidak tertagih, dihapuskan dengan secara langsung dengan mengurangi nilai tercatatnya. Akun penyisihan digunakan ketika terdapat bukti yang objektif bahwa Perseroan tidak dapat menagih seluruh nilai terutang sesuai dengan persyaratan awal piutang. Kesulitan keuangan signifikan yang dialami debitur, kemungkinan debitur dinyatakan pailit atau melakukan re-organisasi keuangan dan gagal bayar atau menunggak pembayaran merupakan indikator yang dianggap dapat menunjukan adanya penurunan nilai piutang.

Solvability

Solvability ratio is reflected in current ratio and cash ratio. At the end of 2017, current ratio was recorded at 525.60% while cash ratio was recorded at 254.45%. PELNI had a quick ratio of 93.37% with total of current assets of Rp2.77 trillion and current liabilities of Rp526.14 billion.

PT PELNI (Persero) performs liquidity risk management by monitoring the profile of loan maturity and funding sources, maintaining sufficient cash and securities balance and readiness to maintain market position. The Company also retains its solvability to finance loans by seeking sources of binding financing facilities from reliable lenders.

The contractual due date of financial liabilities is such as accounts payable, accrued expenses, other recievable and short-term bank loans are less than one year, except for financial liabilities such as bond debt and investment loans.

Collateral Rate of Receivables

The collateral Rate of receivable and other receivables are reviewed periodically. Receivables are known to be uncollectible that written off directly by reducing the carrying amount. An allowance account is used when there is objective evidence that the Company can not collect all outstanding amounts in accordance with the initial terms of receivables. Significant financial difficulties experienced by the debtor, the possibility of the debtor being declared bankrupt or reorganizing the finances and failing to pay or delinquent payment is an indicator considered to indicate a decrease in the value of receivables.

Pada tahun 2017 analisis umur piutang Perseroan dapat dilihat pada tabel dibawah ini, tercatat jumlah umur piutang dalam kategori lancar lebih besar bila dibandingkan jumlah piutang yang jatuh tempo lebih dari satu tahun yaitu Rp159,67 miliar dibandingkan dengan Rp49,85 miliar dan ini membuktikan bahwa tingkat kolektabilitas piutang Perseroan masih dalam kategori lancar sehingga dapat mendukung kegiatan modal kerja lainnya.

In 2017, the aging analysis of receivables of the Company can be seen in the table below, it was recorded that the aging amount of receivables in current category was bigger than the amount of receivables that overdue more than 90 days namely Rp159 billion when compared to Rp48,85 billion and this proves that the level of collateral Rate of receivable of the Company is still in the current category so that to can be supporting other working capital activities.

Tabel Analisis Umur Piutang
Table of The Aging Analysis of Trade Receivable

Uraian Description	2017	2016
Kurang dari 1 tahun Less than 1 year	159.666	205.806
1 - 2 tahun 1 - 2 years	32.254	48.960
2 - 3 tahun 2 - 3 years	5.351	16.457
3 - 4 tahun 3 - 4 years	0	2.393
4 - 5 tahun 4 - 5 years	12.242	5.417
Di atas 5 tahun over 5 years	0	1.961
Jumlah Total	**209.514**	**280.995**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

STRUKTUR MODAL DAN KEBIJAKAN STRUKTUR MODAL

Struktur Modal

Selama tahun 2017, rincian struktur modal yang dimiliki oleh Perseroan adalah 11,32% berasal dari utang dan 88,68% berasal dari ekuitas. Struktur modal ini tidak mengalami banyak perubahan jika dibandingkan dengan tahun 2016 yaitu 12,01% berasal dari utang dan 87,97% berasal dari ekuitas.

CAPITAL STRUCTURE AND CAPITAL STRUCTURE POLICY

Capital Structure

During 2017, details of the capital structure that owned by the Company were 11.32% derived from receivables and 88.68% from equity. This capital structure changed when compared to the year 2016 that 12.01% came from receivables and 87.97% from equity.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Tabel Struktur Modal
Table of Capital Structure

Komposisi Struktur Modal Capital Structure Composition	2017	Komposisi Composition	2016	Komposisi Composition	Δ	
					Nominal Nominal	%
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilites	526.146	8,18%	590.203	9,50%	(64.057)	(10,85%)
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilites	202.270	3,14%	157.644	2,54%	44.626	28,31%
Jumlah Liabilitas Total Liability	**728.416**	**11,32%**	**745.765**	**12,01%**	**(17.349)**	**(2,33%)**
Ekuitas Equity	**5.703.648**	**88,68%**	**5.463.795**	**87,97%**	**239.853**	**4,39%**
Jumlah Liabilitas dan Ekuitas **Total Liability and Equity**	**6.432.064**	**100%**	**6.211.091**	**100%**	**220.973**	**3,56%**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

PT PELNI (Persero) menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Kebijakan manajemen atas struktur modal didasarkan untuk melindungi kemampuan Perseroan dalam mempertahankan kelangsungan usaha sehingga dapat tetap memberikan imbalan hasil bagi pemegang saham dan manfaat bagi pemangku kepentingan lainnya dan mempertahankan struktur permodalan yang optimal untuk mengurangi biaya modal.

Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

PT PELNI (Persero) menetapkan kebijakan struktur permodalan yang optimal agar dapat memaksimalkan nilai Perseroan. Berikut dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal:

1. Senantiasa berupaya menetapkan target struktur modal yang optimal.
2. Penggunaan proporsi utang yang lebih besar (dari ekuitas) dapat dilakukan bila risiko usaha lebih kecil.
3. Struktur modal senantiasa ditinjau dengan mempertimbangkan keseimbangan antara risiko keuangan dan tingkat pengembalian dalam upaya meningkatkan nilai Perseroan.
4. Struktur modal diusahakan memberi kontribusi optimal dengan mengatur kombinasi hutang dan modal sendiri (ekuitas) yang dapat memaksimalkan nilai Perseroan.

Management Policy on Capital Structure

PT PELNI (Persero) established the optimal capital structure policy in order to maximize the Compay value. The management policy of capital structure is based on protecting the Company's ability to maintain its business continuity. So, can keep on returning shareholders and other stakeholder benefits and maintain optimal capital structure to reduce capital costs.

Basis of Management Policy Selection on Capital Structure

PT PELNI (Persero) established optimal capital structure policy in order to maximize the value of the Company. The basic selection of management policies on capital structure are as follows:

1. Always strive to set optimal capital structure targets.
2. The use of a larger proportion of receivables (from equity) can be done if the business risk is less.
3. Capital structure is always reviewed by considering the balance between financial risk and the returning level as an effort to increase the Company value.
4. The capital structure is made to contribute optimally by arranging a combination of receivables and equity capital that can maximize the Company value.

IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

THE MATERIAL COMMITMENTS FOR INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

Investasi Investment	Tujuan Purpose	Sumber Dana Source of Funds	Mata Uang Denominasi Denominated Currency	Nilai Investasi (dalam jutaan Rupiah) Investment Value (in million Rupiah)	Langkah-langkah yang Direncanakan Perseroan untuk Melindungi Risiko dari Mata Uang Asing yang Terkait Initiative Planned by the Company to Prevent Risk from Related Foreign Currency
Kapal Barang (Tol Laut) Cargo Ship (Tol Laut)	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	167.708	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Modifikasi Kapal Ship Modification	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	90.736	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Alat Kesehatan Health Equipment	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	13.611	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Bangunan Rumah Sakit Hospital Building	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	11.883	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Container Container	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Supporting Operational Equipment	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	7.530	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Forklift Forklift	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Supporting Operational Equipment	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	12.605	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Pembangunan/Renovasi /gedung Construction Renovation/Builing	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	5.736	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Tanah Land	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	983	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Supporting Operational Equipment	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	6.564	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Mesin Kantor Office Machine	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Supporting Operational Equipment	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	5.785	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Pengembangan Komputerisasi Computerization Development	Menunjang Fasilitas Kelengkapan Kantor Supporting Office Facility	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	10.193	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Investaris Kantor Office Investories	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Supporting Operational Equipment	Dana Sendiri Equity	Rupiah IDR	3.333	Tidak ada risiko mata uang asing No foreign currency risk
Jumlah Total				**336.667**	

INVESTASI BARANG MODAL

Dari jumlah pembelian aset tetap tersebut, Perseroan telah mengalokasikan dana untuk penambahan aset berupa properti tanah dan gedung serta alat produksi untuk menunjang operasional Perseroan.

Realisasi dana investasi barang modal Perseroan pada tahun 2017 sebesar Rp46,81 miliar.

INVESTMENT OF CAPITAL GOODS

From the total purchase of fixed assets, the Company has allocated funds for assets addition in the form of land and building property and production equipment, this is done in order to support the Company's operational.

The Company's investment realization of capital good in 2017 amounted to Rp46.81 billion.

URAIAN ATAS KINERJA KEUANGAN PERUSAHAAN
The Company Financial Performance Description

Jenis Investasi Barang Modal
Investasi Barang Modal yang dilakukan pada tahun 2017:

The types of Investment of Capital Goods
The Investment of capital goods was conducted in 2017:

Investasi Investment	Tujuan Purpose	Nilai Investasi 2017 (dalam jutaan Rupiah) 2017 Investment Value (in million Rupiah)	Nilai Investasi 2016 (dalam jutaan Rupiah) 2016 Investment Value (in million Rupiah)
Alat Produksi Production Equipment			
Kapal Barang (Tol Laut) Cargo Ship (Tol Laut)	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	167.708	-
Modifikasi Kapal Ship Modification	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	90.736	-
Alat Kesehatan Health Equipment	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	13.611	10
Bangunan Rumah Sakit Hospital Building	Menunjang Fasilitas Kelengkapan Kantor Supporting Office Facility	11.883	9
Container Container	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional	7.530	-
Forklift Forklift	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional	12.605	6.329
Perluasan Gedung Bengkel Container	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	0	6.472
Jumlah Investasi Alat Produksi Total Investment of Production Equipment		**304.073**	**31.798**
Sarana Penunjang Supporting Facilities			
Pembangunan/Renovasi/ gedung Construction/Renovation/Builing	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	5.736	13.484
Tanah Land	Penunjang Operasional Perusahaan Supporting Operation of the Company	983	-
Kendaraan Bermotor Motor Vehicle	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional	6.564	1.141
Mesin Kantor Office Machine	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional	5.785	-
Pengembangan Komputerisasi Computerization Development	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional	10.193	-
Investaris Kantor Office Investories	Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional Menunjang Kelengkapan Peralatan Operasional	3.333	21.244
Jumlah Investasi Sarana Penunjang Total Investment of Supporting Facilities		**32.594**	**35.869**
Jumlah Investasi Total Investment		**336.667**	**67.667**

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

Tujuan Investasi Barang Modal
Investasi barang modal bertujuan untuk pengembangan produksi Perseroan.

Investment of Capital Goods Purpose
The Investment of capital goods aims to the Company's production development.

Nilai Investasi Barang Modal yang Dikeluarkan Pada Tahun 2017
Total investasi barang modal yang di tahun 2017 adalah sebesar Rp336,67 miliar untuk investasi properti seperti tanah dan gedung serta investasi kendaraan bermotor serta alat produksi lainnya.

The Capital Structure Composition Value that issued on year 2017
The total of investment of capital goods in 2017 amounted to Rp336.67 billion for property investment such as land and buildings and investment of vehicles and other production equipment.

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017 SERTA PROYEKSI UNTUK TAHUN MENDATANG

Comparison Between Target and Realization in 2017 also Projection for The Next Year

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI

Setiap periode operasional, Perseroan melakukan evaluasi terhadap hasil-hasil operasional yang dicapai pada tahun buku. Ukuran kinerja berdasarkan Realisasi dibandingkan dengan target atau Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) yang ditetapkan di awal tahun anggaran.

Gambaran perbandingan RKAP 2017 dan realisasi dapat terlihat pada table berikut:

COMPARISON BETWEEN TARGET AND REALIZATION

Each operational period, the Company evaluates the operational results that achieved in the book year. A performance measure based on Realization compared to the target or The Company's Budget Plan (RKAP) set at the beginning of the fiscal year.

The comparison picture between RKAP 2017 and realization can be seen in the following table:

Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Target) dan Realisasi 2017
Table of Company's Budget Plan and Realization 2017

Uraian Description	RKAP 2017 2017 CBP	Realisasi 2017 2017 Realization	%
Operasional Operational			
Kapal Milik owned ship			
Kapal Penumpang Passenger Ship	26	26	100%
Kapal Perintis Perintis Ship	47	46	100%
Kapal Ternak Cattle Ship	1	1	100%
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	9	9	100%
Kapal Sewa/*Charter* Charter Ship			
Kapal Wisata cruise ship	1	0	-
Jumlah Kapal Beroperasi Number of Ships Operated	**84**	**82**	**97,62%**
Permintaan Pelanggan Customer Requests			
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	4.256.275 orang | Person	3.521.873 orang | Person	82,75%
Angkutan Barang Goods Transportation	206.995 Ton/M3	74.719 Ton/M3	36,10%
Container Container	24.935 Teus	14.782 Teus	59,28%
Kendaraan Vehicle	7.716 Unit	6.915 Unit	89,62%
Ternak Animal	12.000 Ekor | Animals	7.999 Ekor | Animals	66,66%
Keuangan Finance			
Laba Konsolidasi Consolidated Profit	Rp305,624 juta | million	Rp276.419 juta | million	90,44%
Kondisi Kesehatan Health Condition	Sehat A | healthy A	Sehat AA | healthy AA	-
Commission Day Commission Day	27.350 Hari | days	20.084 Hari | days	73,43%
Gross Profit Margin Gross Profit Margin	17,10%	16,90%	98,83%
Net Profit Margin Net Profit Margin	7,11%	6,14%	86,36%

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017 SERTA PROYEKSI UNTUK TAHUN MENDATANG
Comparison Between Target and Realization in 2017 also Projection for The Next Year

TARGET TAHUN 2018

Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan RKAP 2018 dilakukan dengan mempertimbangkan kondisi eksternal dan internal yang sangat mempengaruhi perkembangan bisnis Perseroan di tahun 2018.

Berdasarkan Aspirasi KBUMN S-487 MBU/08/2017, asumsi pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2018 berada pada kisaran 5,4%, meningkat dibandingkan dengan perkiraan pencapaian pertumbuhan perekonomian tahun 2017 yang berada pada kisaran 5,2%. Sedangkan tingkat inflasi Indonesia tahun 2018 diprediksi berada pada kisaran 3,5% dan nilai tukar Rupiah terhadap Dollar AS diprediksi pada kisaran Rp13.500 per US$1.

Data yang diperoleh dari Bank Indonesia, asumsi terhadap suku bunga pinjaman diprediksi akan berada pada level 8,75%. Sejalan dengan indikator tersebut, maka target operasional dan keuangan yang ditetapkan pada tahun 2018 sebagai berikut:

2018 TARGET

The Company Budget Plan (RKAP) 2018 Preparation is conducted by considering external and internal condition which greatly affect the Company business development in 2018.

Pursuant to the Aspiration of KBUMN S-487 MBU/08/2017, Indonesia economic growth asumption in 2018 is in the range of 5.4%, increased when compared to the estimated growth of 2017 economic growth in the range of 5.2%. Meanwhile, the inflation rate of Indonesia in 2018 is predicted to be in the range of 3.5% and the exchange rate of Rupiah to US Dollar is predicted to be arround Rp13,500 per US $1.

Data were obtained from the Bank of Indonesia, the assumption on lending rates is predicted to be at 8.75%. Along with these indicators, the operational and financial targets which set for 2018 are as follows:

Tabel Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (Target) 2018
Table of Company's Budget Plan 2018

Uraian Description	RKAP 2018 2018 CBP
Operasional Operational	
Kapal Milik owned ship	
Kapal Penumpang Passenger Ship	26
Kapal Perintis Perintis Ship	47
Kapal Ternak Cattle Ship	3
Kapal Tol Laut Tol Laut Ship	7
Kapal Barang Caraka Caraka Cargo Ship	2
Kapal Tanker Tanker Ship	1
Kapal Sewa/*Charter* Charter Ship	
Kapal Wisata cruise ship	1
Jumlah Kapal Beroperasi Number of Ships Operated	**87**

PERBANDINGAN ANTARA TARGET DAN REALISASI TAHUN 2017 SERTA PROYEKSI UNTUK TAHUN MENDATANG
Comparison Between Target and Realization in 2017 also Projection for The Next Year

Uraian Description	RKAP 2018 2018 CBP
Permintaan Pelanggan Customer Requests	
Angkutan Penumpang Passenger Transportation	3.927.174 orang | Person
Angkutan Barang Goods Transportation	140.627 Ton/M3
Container Container	23.083 Teus
Kendaraan Vehicle	6.028 Unit
Ternak Animal	36.000 Ekor | Animals
Keuangan Finance	
Laba Konsolidasi Consolidated Profit	Rp340.013 juta | million
Kondisi Kesehatan Health Condition	Sehat AA | healthy AA
Commission Day Commission Day	28.284 Hari | days
Gross Profit Margin Gross Profit Margin	19,19%
Net Profit Margin Net Profit Margin	7,37%

dalam jutaan Rupiah
in million Rupiah

INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

Information and Facts Material that Happened after the Date of Accountant Report

Tidak terdapat informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan, sehingga tidak berdampak terhadap kinerja dan risiko usaha Perseroan di masa mendatang.

There is no information and material facts that occurred after the date of the accountant's statement, so that will be not affected to Company's performance and business risk in the future.

KEBIJAKAN DIVIDEN

Dividend Policy

Untuk Periode tahun buku 2017 manajemen tidak membagikan Dividen. Manajemen menetapkan penggunaan laba yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk tahun buku 2016 sebesar Rp248.402.904.439 sebagai cadangan.

For the Period of the fiscal year 2017 the Management did not give divident. Management stated that allocation of profit attributable to owner of parent entity for the year 2016 amounted Rp248,402,904,439 to be reserved.

PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN (MSOP)

Employee Stock Ownership Program (Msop)

Pada tahun 2017 PELNI tidak memiliki program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Perusahaan *(Employee Stock Ownership Program/Management Stock Ownership Program)*. PELNI telah menyelesaikan program ESOP/MSOP tersebut di tahun 1999.

In 2017 PELNI did not have the Employee Stock Ownership Program and/or Management Stock Ownership Program that conducted by the Company. PELNI had completed the ESOP/MSOP program in 1999.

REALISASI PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Fund Uses Realization from Public Offers

Perseroan tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum.

The Company does not have any information on the fund uses realization from the public offers.

INFORMASI TRANSAKSI YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN SIFAT TRANSAKSI DENGAN PIHAK AFILIASI

Material Information Containing Conflict of Interest and Transactions with Affiliates Parties

Perseroan melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi yang dilakukan dengan kebijakan dan syarat yang telah disepakati bersama, sehingga Perseroan melakukan transaksi secara wajar tanpa adanya benturan kepentingan.

The Company engages in transactions with related parties that conducted under mutually agreed terms and conditions, so that the Company transacts fairly without any conflict of interest.

INFORMASI MATERIAL YANG MENGENAI EKSPANSI, DIVESTASI, AKUISISI DAN RESTRUKTURISASI HUTANG DAN MODAL

Material Information on Expansion, Divestment, Acquisition and Debt and Capital Restructuring

Perseroan tidak memiliki informasi material yang mengenai ekspansi, divestasi, akuisisi dan restrukturisasi hutang dan modal.

The Company doesn't have any material information on expansion, divestment, acquisition and debt and capital restructuring.

PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DAMPAKNYA TERHADAP PERUSAHAAN

Amendment of Regulatory Regulations and its Impact on Company

DAMPAK PERUBAHAN PERUNDANG-UNDANGAN TERHADAP PERUSAHAAN

Penerapan Peraturan Pelaksanaan PP No. 1/2017 tidak berdampak material atau signifikan terhadap kinerja Perusahaan, baik secara kuantitatif dan atau kualitatif.

THE IMPACT OF LEGAL CHANGES FOR THE COMPANY

The Implementation of Regulation PP No. 1/2017 has no material or significant impact on the Company's performance, either quantitatively or or qualitatively.

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Amendment of Accounting Policies and its Impact on Company Financial Statements

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

1. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup.
   - PSAK 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan: Tentang Prakarsa Pengungkapan".
   - PSAK 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja".
   - PSAK 58 (Penyesuaian 2016), " Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan".
   - PSAK 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan".
   - ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi".
   - ISAK 32, "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan".

2. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:
   - PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan".
   - PSAK 16 (Amandemen 2015), Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur.
   - PSAK 46 (Amandemen 2016), Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi.
   - PSAK 69 (2015), Agrikultur.

3. Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:
   - PSAK 71 (Amandemen 2017), "Instrumen Keuangan".
   - PSAK 72 (Amandemen 2017), "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan".

CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

1. The Amendments and Adjustments to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements
   - PSAK 1 (Ammendment 2015), "Presentation of Financial Statements: about Disclosure Initiative".
   - PSAK 24 (Improvement 2016), "Employee Benefits".
   - PSAK 58 (Improvement 2016), "Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation".
   - PSAK 60 (Improvement 2016), "Financial Instruments: Disclosure".
   - ISAK 31, "Interpretation of PSAK 13 "Investing Property".
   - ISAK 32, "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards".

2. Amendments Standards and Standard that have been issued but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018 as follows:
   - PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative".
   - PSAK 16 (Amendment 2015), Fixed Asset: about adding paragraphs related to Agricultural Assets.
   - PSAK 46 (Amendment 2016), Income Tax; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses.
   - PSAK 69 (2015), Agricultural.

3. Amendments to Statements of Financial Accounting Standards that have been issued and are relevant to the Company but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020 as follows:
   - PSAK 71 (Amandment 2017), "Financial Instruments"
   - PSAK 72 (Amandment 2017), "Revenue from Contract with Customers"

PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI DAN DAMPAKNYA TERHADAP LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN

Amendment of Accounting Policies and its Impact on Company Financial Statements

ALASAN PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang dikeluarkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia mengatur perlakuan akuntansi secara menyeluruh untuk berbagai aktivitas bisnis perusahaan di Indonesia. Standar-standar tersebut selain ditujukan untuk mengatur perlakuan akuntansi dari awal sampai ke tujuan akhirnya yaitu untuk pelaporan terhadap pengguna, standar-standar tersebut juga meliputi pedoman perlakuan akuntansi mulai dari perolehan, penggunaan, sampai dengan saat penghapusan untuk setiap elemen-elemen akuntansi. Standar-standar tersebut juga mengatur tentang pengakuan, pengukuran, penyajian dan pelaporan atas keuangan Perseroan. Dan alasan terjadinya perubahan pada Kebijakan Akuntansi yang berlaku adalah untuk dapat mengakomodir perubahan-perubahan yang berimplikasi pada dunia akuntansi.

DAMPAK SECARA KUANTITATIF TERHADAP LAPORAN KEUANGAN

1. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup.
2. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018, memiliki dampak yang bervariatif, yaitu ada yang berdampak dan ada yang tidak berdampak terhadap Laporan Keuangan. Dapat dilihat pada notes 3b Laporan Keuangan Konsolidasian PT PELNI (Persero) Tanggal 31 Desember 2017.
3. Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan dan relevan bagi Perusahaan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020, Perseroan sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

REASONS FOR CHANGES IN ACCOUNTING POLICIES

Statement of Financial Accounting Standards had been issued by the Indonesian Institute of Accountants controls the overall accounting treatment for the Company various business actvities in Indonesia. These standards are not only intended to govern the accounting treatment from the beginning to the ultimate goal for reporting to the users, they also cover accounting treatment guidelines from the acquisition, use, until the moment of deletion for each accounting element. They also arrange for the recognation, measurement, presentation and reporting of Company finances. And the reason for the change in the applicable accounting policy is to be able to accomodate changes that have implication for the world of accounting.

QUANTITATIVE IMPACT ON FINANCIAL STATEMENTS

1. The Amendments and Adjustments to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements.
2. Amendments Standards and Standard that have been issued but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018, have a variative impact, which have an impact and and have no impact to the Group's Financial Statements. It can be seen on the Notes 3b in PT PELNI (Persero) Financial Statement as of December 31, 2017.
3. Amendments to Statements of Financial Accounting Standards that have been issued and are relevant to the Company but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020. The Company is evaluating the possible impact on the issuance of these financial accounting standards.

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

Business Continuity Information

HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN PADA TAHUN 2018

Dalam menjalankan bisnisnya, Perseroan tentu menghadapi beberapa tantangan dan dari semua tantangan tersebut terdapat beberapa hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku 2017 diantaranya adalah:

1. Risiko keselamatan kapal dan penumpang (Armatek, Operasi, *Designed Person Ashore*);
2. Risiko *public service obligation;*
3. Risiko *pax factor* kapal penumpang;
4. Risiko subsidi kapal barang tol laut; dan
5. Risiko kenaikan BBM.

ASESSMEN MANAJEMEN ATAS HAL-HAL YANG BERPOTENSI BERPENGARUH SIGNIFIKAN TERHADAP KELANGSUNGAN USAHA PERUSAHAAN PADA TAHUN 2017

Asesmen manajemen atas hal-hal yang berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha Perseroan, PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan *framework* ISO 31000 yang menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Dalam menyikapi perubahan konteks eksternal secara berkala atau periode triwulanan dilakukan pembahasan risiko-risiko yang ada terhadap pengelolaan Perseroan antara unit manajemen risiko, Dewan Komisaris dan Direksi.

ASUMSI YANG DIGUNAKAN MANAJEMEN DALAM MELAKUKAN ASSESSMEN

Dalam penyusunan RKAP 2018 PT PELNI (Persero) salah satu acuannya berdasarkan *Risk Based Budgeting,* dalam ini penyusunan anggaran berdasarkan risiko-risiko yang telah terpetakan.

Adapun beberapa asumsi yang digunakan Perseroan berkaitan dengan kelangsungan usaha PT PELNI (Persero) di masa yang akan datang diantaranya adalah kondisi makro ekonomi, kondisi industri maritim dan perkapalan nasional serta kebijakan Pemerintah. Adapun data asumsi tersebut sebagai berikut:

1. Pertumbuhan ekonomi adalah sebesar 5,40%;
2. Tingkat inflasi adalah sebesar 3,50%;
3. Tingkat suku bunga adalah sebesar 5,30%;
4. Kurs 1USD = Rp13.500;
5. Harga BBM adalah sebesar Rp5.360/liter;
6. Harga minyak pelumas Rp38.000/liter;

THINGS THAT HAVE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S CONTINUITY BUSINESS IN 2018

In conducting its business, the Company certainly faces several challenges and from all these challenges there are some potentially influential things significant to the company's business continuity in the fiscal year 2017 are:

1. Ship and passenger safety risk (Armatek, Operation, Designed Person Ashore);
2. Public service obligation risk;
3. Passenger ship pax risk;
4. Subsidizing sea freight vessels risk; and
5. Increase of fuel price risk.

MANAGEMENT ASSESSMENT ON THINGS THAT HAVE POTENTIAL TO SIGNIFICANTLY AFFECT THE COMPANY'S CONTINUITY BUSINESS IN 2017

Management assessment on matters that have a significant effect to the company's business continuity, PT PELNI (Persero) implements Risk Management System in accordance with ISO 31000 framework that produces risk management practices with broader perspective, easy to understand, measurable and support coordination and integration between work units in the Company.

In response to changes in the external context on a regular basis or quarterly period, discussions of risks to the Company's management exist between the risk management unit, the Board of Commissioners and the Board of Directors.

ASSUMPTIONS THAT USED BY MANAGEMENT IN CONDUCTING ASSESSMENT

In The Company's Budget Plan 2018 preparation of PT PELNI (Persero) is one of its references according to Risk Based Budgeting, in this budget preparation based on the risks that have been mapped.

The several assumptions used by the Company related to the future business of PT PELNI (Persero) are macroeconomic conditions, maritime industry, national shipping industry and Government policies. The assumption data are as follows:

1. Economic growth is 5.40%;
2. The inflation rate is 3.50%;
3. The interest rate is 5.30%;
4. Currency 1USD = Rp13.500;
5. Fuel price is Rp5.360/liter;
6. Lubricating oil price Rp38.000/liter;

INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA
Business Continuity Information

7. Jaringan (Pola) Trayek tahun 2018 dengan rata-rata frekuensi 23 *voyages;*
8. Kenaikan tarif penumpang kelas ekonomi sebesar 10%; dan
9. Biaya makan minum penumpang Rp38.000/ penumpang per hari.

Asumsi tersebut juga didukung oleh peran PT PELNI (Persero) dalam beberapa aspek, antara lain:

1. **Infrastruktur Negara**
   PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik antar pulau (daerah yang sudah dan sedang berkembang) termasuk angkutan transmigrasi dan TKI (Tenaga Kerja Indonesia).
2. **Agen Pembangunan**
   PT PELNI (Persero) menyediakan akses transportasi publik ke wilayah pulau terpencil dan terluar guna mempercepat pembangunan dan membuka isolasi geografis, seperti: Miangas, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Nunukan.
3. **Sistem Logistik**
   PT PELNI (Persero) mengangkut kebutuhan pokok dan kebutuhan lainnya bagi masyarakat seluruh Indonesia termasuk di pulau-pulau terpencil dan terluar guna stabilisasi harga antara daerah dan pusat.
4. **Kedaulatan NKRI**
   PT PELNI (Persero) menyediakan akses untuk keperluan sosial politik Negara dan pertahanan nasional melalui kunjungan regular antar pulau.
5. **Tanggap Darurat**
   PT PELNI (Persero) menyediakan angkutan dengan kapasitas besar, cepat dan handal ke seluruh pelosok Nusantara untuk kondisi darurat nasional.

KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Perseroan juga melakukan penghitungan kelangsungan usaha dengan menggunakan metode *Z-score* model yakni model yang dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum *go-public* oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

7. Network (Pattern) 2018 route with an average frequency of 23 voyages;
8. Increase in passenger economy class ticket by 10%; and
9. The cost of eating a passenger drink is Rp38,000/ passenger per day.

The assumptions are also supported by role of PT PELNI (Persero) in several aspects, as follows:

1. **State Infrastructure**
   PT PELNI (Persero) provides inter islands public transportation access (developed and developing regions) including transmigration and TKI (Indonesian Workers).
2. **Agent of Development**
   PT PELNI (Persero) provides public transportation access to remote and border islands to accelerate development and eliminate geographical isolation, such as: Miangas, Letung, Tarempa, Natuna, Midai, Serasan, Nunukan.
3. **Logistic System**
   PT PELNI (Persero) carries groceries and other essentials for society across Indonesian territory including in remote and border islands to stabilzie price between rural and urban (central) area.
4. **NKRI Sovereignity**
   PT PELNI (Persero) provides access for national social and political needs as well as national security through inter-island regular visit.
5. **Emergency**
   PT PELNI (Persero) provides large-capacity, fast and reliable fleets nationwide for national emergency condition.

REVIEW OF BUSINESS CONTINUITY

The Company also conducts business continuity calculation using Z-score model, it is developed from combination of several financial ratio analysis formula for companies that have not go public by Edwards Altman with the formula as follows:

$$\text{Z – Score} = \frac{6{,}56 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (Earning Before Tax \& Interest)}}{\text{Jumlah Aset (Total Assets)}} + \frac{6{,}56 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (Earning Before Tax \& Interest)}}{\text{Jumlah Aset (Total Assets)}} + \frac{1{,}05 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak (Earning Before Tax \& Interest)}}{\text{Jumlah Kewajiban (Total Liabilities)}} + \frac{6{,}72 \times \text{Nilai Buku Ekuitas (Equity)}}{\text{Jumlah Kewajiban (Total Liabilities)}}$$

Berdasarkan hasil perhitungan *Z-score* model tahun 2017 diperoleh skor 52,27 sedangkan skor tahun 2016 sebesar 48,66 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas 'tidak pailit' atau diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, Perseroan dan entitas anaknya **sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya.**

Pursuant to the results of Z-score calculation model 2017 had been obtained score 52.27 while the score of 2016 of 48.66 so that indicating above the limit 'not bankrupt' or in carrying out its activities, the Company and its subsidiaries are **very capable for maintaining continuity of its business.**

ASPEK PEMASARAN
Marketing Aspect

STRATEGI PEMASARAN

Pada tahun 2017, Perseroan merealisasikan sasaran strategis di bidang pemasaran, sebagai berikut:

1. Meningkatkan penjualan angkutan penumpang di kapal penumpang dan kapal perintis;
2. Meningkatkan penjualan angkutan barang di kapal tol laut, kapal penumpang dan perintis;
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan; dan
4. Mengembangkan bisnis keagenan dan wisata.

Adapun langkah strategis atau rencana kerja yang akan dilakukan sejalan dengan sasaran strategis di bidang pemasaran, diantaranya adalah:

1. Meningkatkan penjualan angkutan penumpang di kapal penumpang dan kapal perintis.
   a. Pengembangan *New* PELNI *Ticketing System.*
   b. Optimasi produktivitas melalui penjualan kegiatan *on board.*
   c. Penerbitan *emplooi* 3 bulan ke depan.
2. Meningkatkan penjualan angkutan barang di kapal tol laut, kapal penumpang dan perintis.
   a. Kerjasama muatan dengan PT Pos Indonesia dan Bank Indonesia.
   b. Pengembangan aplikasi transaksi dan pelaporan angkutan barang.
3. Meningkatkan kepuasan pelanggan.
   a. Implementasi SOP Makan berdasarkan ISO 22000.
   b. Implementasi sistem pengendalian katering berbasis IT.
   c. Pengembangan sarana *contact center.*
   d. Standarisasi sarana toilet siap pakai.
4. Mengembangkan bisnis keagenan dan wisata.
   a. Pembelian/modifikasi kapal wisata.
   b. Otomatisasi sistem *online booking.*
   c. Otomatisasi sistem pelayanan wisata.
   d. Mengembangkan aplikasi keagenan.
   e. Pengembangan paket wisata bahari.

PANGSA PASAR

Pangsa pasar PT PELNI (Persero) didominasi oleh karakter penumpang menengah ke bawah dengan barang bawaan (kargo) yang signifikan serta penumpang yang tinggal atau menuju daerah tanpa adanya layanan transprotasi udara. Pangsa pasar Perseroan lainnya adalah *shipper* yang membutuhkan alat angkut terjadwal.

MARKETING STRATEGY

In 2017, the Company implemented strategic objectives in marketing sector, as follows:

1. Increasing the pessanger transport sales on passenger and perintis ships;
2. Increasing the freight sales on Tol Laut, Passenger and Perintis ships;
3. increasing customer satisfaction;
4. Developing agency and tourism business.

The strategic steps or work plan that will be done along with the strategic objectives in marketing aspect, including:

1. Increasing the sales of passenger transport on passenger ships and pioneer ships.
   a. New PELNI Ticketing System Development.
   b. Productivity optimization through on-board sales activities.
   c. Issuance of emplooi for 3 months ahead.
2. Increasing the sales of freight on Tol, passenger and perintis ships.
   a. Co-operation with PT Pos Indonesia and Bank Indonesia.
   b. Development of transaction applications and reporting of goods transport.
3. Improving customer satisfaction
   a. SOP Eating Implementation based on ISO 22000.
   b. Implementation of IT-based catering control system.
   c. Contact center facilities Development.
   d. Standardization of ready-made toilet facilities.
4. Developing agency and tourism business.
   a. Purchase / modification of tourist boats.
   b. Online booking system Automation.
   c. Tourist service system Automation.
   d. Developing agency applications.
   e. Marine tourism package development.

MARKET SHARE

Market share of PT PELNI (Persero) is dominated by characteristic of middle-low passenger with signficant cargo as well as passengers who stays or departs to several areas without aircraft transportation service. Another market share of the Company is the shipper with regular transportation needs.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PERUSAHAAN

Business Prospects and Company Strategies

PROSPEK USAHA

Kondisi perekonomian dunia pada tahun 2017 tumbuh sebesar 3% setelah terjadinya krisis global dan tahun ini menurut Dana Moneter Internasional (IMF) diprediksi akan tumbuh 3,6% atau 3,9% dalam 2 tahun ke depan. Naiknya proyeksi ini sejalan dengan ekspektasi dampak dari kebijakan pemangkasan pajak yang dilakukan Amerika Serikat. Indonesia belum bisa secara maksimal memanfaatkan momentum ini. Menurut IMF, potensi penguatan pertumbuhan ekonomi akan terlihat di negara-negara pengekspor besar dan kontribusi ekspor Indonesia terhadap PDB hanya 25%.

Bank Indonesia (BI) memproyeksikan perekonomian Indonesia akan tumbuh antara 5,1% - 5,5% di tahun 2018. Untuk mencapai target pertumbuhan tersebut, langkah yang diambil untuk mencapai target tersebut dengan menempuh kebijakan moneter & kebijakan makro prudensial, reformasi structural dan kebijakan sistem pembayaran & pengelolaan uang rupiah dilakukan untuk menjaga stabilitas ekonomi makro dan sistem keuangan.

Indonesia adalah negara kepulauan yang dua pertiga wilayahnya adalah berupa perairan dengan letak geografis antara 95° sampai 142° Bujur Timur dan membentang antara 6° Lintang Utara sampai dengan 11° Lintang Selatan yang memiliki 5 (lima) Pulau Besar dan 183.000 (seratus delapan puluh tiga ribu) pulau atau yang terbujur dari Sabang Sampai Merauke dan terbentang dari Miangas sampai Pulau Rote.

Oleh karenanya dalam rangka membuka isolasi peradaban dan ekonomi antara satu daerah dengan daerah lain diperlukan adanya sarana transportasi yang memadai yang dapat menghubungkan antara satu daerah ke daerah lain, sehingga dapat mengkomunikasikan antara orang yang satu dengan orang yang lain yang berada disuatu tempat ke tempat yang lain dengan waktu yang tidak terlalu lama, meskipun daerah tersebut dipisahkan oleh geogra yang terpisah-pisah antara satu tempat dengan tempat yang lain yang tersebar diseluruh bumi Nusantara yang dihuni oleh sekitar 250.000.000 (dua ratus lima puluh juta) jiwa dengan penduduk dibelahan lain dunia ini. Hal ini hanya dapat dilakukan dengan tranportasi yang memadai diantaranya menggunakan transportasi kapal laut yang salah satunya diusahakan oleh PT PELNI (Persero).

BUSINESS PROSPECTS

The world economic conditions in 2017 grew by 3% after the global crisis and this year according to the International Monetary Fund (IMF) is predicted to grow 3.6% or 3.9% in the next 2 years. These rise in projection is in line with US tax-cutting policies expectations impact.Indonesia has not been able to take full advantage of this momentum. According to IMF, the potential for strengthening economic growth will be seen in major exporting countries. While, Indonesia export contribution to GDP only 25%.

The Bank of Indonesia projects the Indonesian economy will grow between 5.1% - 5.5% in 2018. To achieve these growth targets, the steps are taken to achieve these targets by adopting monetary policy & macroprudential policy, structural reform, and rupiah payment & money management system policy that carried out to maintain macroeconomic stability and financial system.

Indonesia is an archipelago whose two per third of the territory is ocean and located at 95° until 142° East Longitude and 6° North Latitude until 11° South Latitude with 5 (five) Main Islands and 183,000 (one hundred and eighty three thousand) islands located from Sabang until Merauke and spread across Miangas until Rote Island.

In order to eliminate civilization and economy barrier among one region to antoher, an adequate means of transportation to connect one region to another is needed, as well as to communicate one person to another who are located in one place to other places in relatively short time, despite the regions are separated geographically where all of the area that are located nationwide are inhabited by total population of 250,000,000 (two hundred and ty million) where the remaining population live in other part of the globe. This is only possible to be done through suf cient transportation using marine vessels transportation as operated by PT PELNI (Persero).

Dalam rangka mengatasi permasalahan tersebut di atas PT PELNI (Persero) yang merupakan salah satu perusahaan yang sahamnya dimiliki oleh negara, memiliki tugas yang mulia sebagai perusahaan yang bergerak dalam transportasi laut, diharapkan akan dapat mengatasi segala hal yang dapat menghubungkan satu daerah dengan daerah yang lain. Selain itu PT PELNI (Persero) diharapkan menjadi katalisator terhadap tumbuhnya perekonomian daerah dan terbukanya isolasi yang memisahkan antara satu orang dengan yang lainnya antara satu tempat dengan tempat yang lain, satu adat dengan istiadat yang lain dan akan menjadi perekat sesama anak bangsa dan dunia, sehingga dapat menjalin komunikasi antara negara-negara yang berada di belahan bumi ini.

Selanjutnya Pemerintah Republik Indonesia seperti yang telah disampaikan dalam pidatonya oleh Presiden Republik Indonesia ketujuh yang menginginkan Indonesia dapat terhubung antara satu daerah dengan daerah lain, sehingga meminimalisasi kesenjangan antara satu dengan lainnya, oleh karenanya PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Selain memiliki tugas untuk menghubungkan dan membuka isolasi daerah yang terpencil, maka dengan keberadaan PT PELNI (Persero) yang memiliki *core business* Transportasi menggunakan kapal laut yang menjadi kebanggaan bangsa Indonesia terhadap negara lain, diharapkan akan membawa perubahan *mind set* (pola pikir) masyarakat di daerah yang sebelumnya terisolasi menjadi lebih moderat sehingga menjadi bangsa yang maju peradabannya di dunia dan tidak ada lagi istilah daerah tertinggal dalam waktu yang tidak terlalu lama, sehingga semua orang menjadi manusia yang tinggi peradabannya. Disamping itu PT PELNI (Persero) diharapkan akan dapat menggapai VISI-nya yaitu " Menjadi Perusahaan Pelayaran yang Tangguh dan Menjadi Pilihan Utama Masyarakat "dengan MISI:

1. Mengelola dan mengembangkan angkutan laut guna menjamin aksebilitas masyarakat untuk menunjang terwujudnya Wawasan Nusantara.
2. Meningkatkan kontribusi pendapatan bagi negara, karyawan, serta berperan di dalam pembangunan lingkungan dan pelayanan kepada masyarakat.

To solve the issues mentioned above, PT PELNI (Persero) is one of company whos shares are folly owned by the Government with noble assignment as an enterprise that is operated in marine transportation business and expected to overcome every issue to bridge one area with another. In addition, PT PELNI (Persero) is also expected to be the catalyst of regional economy growth and to eliminate barrier that separated one person to another as well as one location to another, one custom to another that will strengthen binding among all youth in the nation and the world, to engage in international communication around the world.

Furthermore, The Republic of Indonesia Government, as stated in the seventh speech of Republic of Indonesia Prsident that wished Indonesia to be connected on all regions and to minimize disparity among the regions, therefore, PT PELNI (Persero) is expected to safeguard the unity of Republic of Indonesia as a nation.

Besides the duty to connect and eliminate barrier of the remote area, existence of PT PELNI (Persero) with Transportation as core business uses marine vessels as proud of Indonesia as a nation towards other countries, the Company is expected to bring mindset transformation for the society in rural area who are previously isolated to become more moderate into a nation with progressive civilization in the world and to aliminate the terms of marginal region in the mean time, to develop all people with high civilization. In addition, PT PELNI (Persero) is also expected to achieve its VISION "To Become a Strong Shipping Company and Customers Preferred Choice," with the MISSION:

1. Managing and developing marine transportation to ensure public accessibility to support the realization of National Outlook (Wawasan Nusantara).
2. Raising revenue contribution for the country, employees, as well as taking part on the development of environment and public services.

PROSPEK USAHA DAN STRATEGI PERUSAHAAN
Business Prospects and Company Strategies

3. Meningkatkan nilai perusahaan melalui kreativitas, inovasi dan pengembangan kompetisi Sumber Daya Manusia.
4. Menjalankan usaha secara adil dengan memperhatikan azas manfaat bagi semua pihak yang terlibat *(stakeholder)* dan menerapkan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance.*

Dengan demikian, PT PELNI (Persero) optimis menghadapi tahun 2018 dengan melihat prospek usaha di masa yang akan datang dan dapat mencapai target yang ditentukan di awal tahun 2018, yaitu mencatatkan pertumbuhan pendapatan usaha Perseroan sebesar 8,65% dan pertumbuhan laba konsolidasi Perseroan sebesar 10,44%.

STRATEGI PERUSAHAAN TAHUN 2018
Tahun 2018 adalah fase transformasi PT PELNI (Persero) selanjutnya, yaitu *"Growth"* yang telah tergambar dalam *ROADMAP* TRANSFORMASI PELNI.

3. Enhancing corporate value throughout creativity, innovation and human capital competency development.
4. Operating fair business by promoting mutual bene ciary principle for all stakeholders and implementing the Good Corporate Governance (GCG).

Therefore, PT PELNI (Persero) is optimistic to face the year 2018 by looking at future business prospects and able to achieve the target which set in early 2018, which is to record the Company's revenue growth amount 8.65% and the consolidated profit of the Company amount 10.44%.

THE COMPANY STRATEGIES 2018
2018 is the next transformation phase of PT PELNI (Persero), that is "Growth" which has been reflected in PELNI ROADMAP TRANSFORMATION.

GROWTH – 2018, 2019

MARKET DEVELOPMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Pengembangan paket wisata bahari
  Development of marine tourism package
- Optimasi *load factor* melalui identifikasi komoditas dan *partnership*
  Optimization of load factors through commodity identification and partnership

NEW BUSINESS DEVELOPMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- PELNI Group:
  PELNI Group:
  - » Penumpang
    Passenger
  - » Kargo
    Cargo
  - » Logistik
    Logistic
  - » *Services*
    Services
  - » *Tourism*
    Tourism

CULTURE STRENGTHENING

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Internalisasi budaya, tata nilai, dan perilaku yang selaras dengan strategi bisnis
  Internalization of culture, value and behavior aligned with business strategy

PRODUCTION FACILITY IMPROVEMENT

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Penerapan sistem pemeliharaan kapal berbasis ERP
  Implementation system of vessel maintenance on ERP basis

OPERATIONAL EXCELLENCE

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Implementasi model operasi PELNI Group berdasarkan tujuan bisnis
  Implementation of PELNI Group's operating model based on business objectives

HOLDING IMPLEMENTATION

Inisiatif Strategis
Strategic Initiative
- Implementasi PELNI Group
  Implementation of PELNI Group

Sumber: Rencana Jangka Panjang Perusahaan Tahun 2015 – 2019 (diolah)
Source: Company Long Term Plan 2015 - 2019 (processed)

Sehingga dapat dijelaskan bahwa *Grand Strategy* Perusahaan untuk tahun 2018 adalah:

1. ***Market Development***
   a. Pengembangan paket wisata bahari.
   b. Optimasi *load factor* melalui identifikasi komoditas dan *partnership.*
2. ***New Business Development***
   a. Penumpang.
   b. Kargo.
   c. Logistik.
   d. *Services.*
   e. *Tourism.*
3. ***Culture Strengthening***
   a. Internalisasi budaya, tata nilai dan perilaku yang selaras dengan strategi bisnis.
4. ***Production Facility Improvement***
   a. Penerapan sistem pemeliharaan kapal berbasis ERP.
5. ***Operational Excellence***
   a. Implementasi model operasi PELNI Group berdasarkan tujuan bisnis.
6. ***Holding Implementation***
   a. Implementasi PELNI Group.

So it can be explained that the Grand Strategy of the Company for the year 2018 are:

1. **Market Development**
   a. Development of marine tourism package.
   b. Optimization of load factors through commodity identification and partnership.
2. **New Business Development**
   a. Passenger.
   b. Cargo
   c. Logistic
   d. Service.
   e. Tourism
3. **Culture Strengthening**
   a. Internalization of culture, value and behavior aligned with business strategy.
4. **Production Facility Improvement**
   a. Implementation system of vessel maintenance on ERP basis.
5. **Operational Excellence**
   a. Implementation of PELNI Group's operating model based on business objectives.
6. **Holding Implementation**
   a. Implementation of PELNI Group.

KM.CAMARA NUSANTARA 1
TOL LAUT

05

TATA KELOLA PERUSAHAAN YANG BAIK

Good Corporate Governance

PENDAHULUAN
Introduction

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

The Company implements GCG structure and mechanism aiming to operate process and structure to achieve performance target and accountability of the Company to generate added value for the Shareholders and Stakeholders by considering interests of other Stakeholders.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practice at PT PELNI (Persero) refers several prevailing Laws in Indonesia, among others, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and Minister of State-Owned Enterprise Decree No. Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise (SOE)

IMPLEMENTASI PRINSIP GCG PT PELNI (PERSERO)

IMPLEMENTATION OF PT PELNI (PERSEO) GCG PRINCIPLE

Prinsip Principle	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Transparency Transparansi	Prinsip transparansi yaitu keterbukaan dalam melaksanakan proses pengambilan keputusan dan keterbukaan dalam mengemukakan informasi material dan relevan mengenai Perseroan. Perseroan akan mematuhi peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah keterbukaan informasi yang berlaku bagi Perseroan. Transparansi juga mencakup hal-hal yang relevan dengan informasi yang dibutuhkan oleh publik berkaitan dengan produk dan aktivitas operasional Perseroan yang secara potensial dapat mempengaruhi perilaku pemangku kepentingan. The principle of transparency is openness in implementing the decision-making process and openness in disclosing material and relevant information about the Company. The Company shall comply with laws and regulations governing information disclosure issues applicable to the Company. Transparency also includes matters relevant to the information required by the public in relation to the Company's products and operational activities that potentially influence stakeholder behavior.	Melaksanakan aktivitas keterbukaan informasi melalui pemenuhan kewajiban pelaporan kepada Pemegang Saham, dan melalui pelaporan keuangan dan melalui media komunikasi resmi. Perform information disclosure activity by fulfilling reporting obligation to the Shareholders as well as financial reporting and through official communication media.
Accountability Akuntabilitas	Prinsip akuntabilitas yaitu kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Organ Perusahaan sehingga pengelolaan Perseroan terlaksana secara efektif. The principle of accountability is the clarity of functions, implementation and accountability of the Company's Organs which enable the Company's management effectively implemented. Akuntabilitas berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan wewenang yang dimiliki seseorang atau satuan kerja dalam melaksanakan tanggung jawab yang dibebankan Perseroan. Akuntabilitas ini meliputi penjelasan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, pelaporan atas pelaksanaan tugas dan wewenang, serta pertanggungjawaban atas aktivitas dalam melaksanakan tugas dan wewenang tersebut. Accountability relates to the execution of duties and authorities owned by a person or work unit in carrying out the responsibilities imposed by the Company. This accountability includes explanations of the performance of duties and authorities, reporting on the execution of duties and authorities, and accountability for activities in performing these duties and authorities.	Memiliki struktur tata kelola perusahaan yakni organ utama yang saling menunjang terciptanya pelaksanaan tugas yang transparan dan independen. Perseroan juga telah melengkapi pedoman-pedoman yang berfungsi untuk menjadi panduan penerapan tata kelola perusahaan. Having corporate governance structure including main structures that are supports implementation of transparent and independent duty. The Company also has equipped manuals that are functioned as corporate governance implementation guideline.

Prinsip Principle	Penjelasan Description	Implementasi Implementation
Responsibility Pertanggungjawaban	Prinsip pertanggungjawaban yaitu kesesuaian di dalam pengelolaan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of accountability is the suitability in the management of the Company with the prevailing laws and regulations and the principles of sound corporations.	Menerapkan mekanisme tata kelola perusahaan yang bersifat *cross check* untuk memastikan responsibilitas dari masing-masing fungsi struktur tata kelola perusahaan melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebaik-baiknya tanpa benturan kepentingan dan intervensi. Implementation of cross-check corporate governance mechanism to ensure responsibility of each function of the corporate governance structure to exercise their duty and responsibility properly without conflict of interest and intervention.
Independency Kemandirian	Prinsip kemandirian yaitu keadaan di mana Perseroan dikelola secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh/tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip korporasi yang sehat. The principle of independence is the state in which the Company is professionally managed without conflict of interest and influence / pressure from any party that is inconsistent with the prevailing laws and regulations and sound corporate principles.	Perseroan dikelola secara profesional tanpa adanya benturan kepentingan ataupun intervensi dan dominasi dari pihak manapun. The Company is managed professionally without conflict of interest and intervention from any party.
Fairness Kewajaran	Prinsip kewajaran yaitu keadilan dan kesetaraan di dalam memenuhi hak-hak pemangku kepentingan yang timbul berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. The principle of fairness is justice and equality in fulfilling the rights of stakeholders arising under the applicable laws and regulations.	Perseroan menerapkan kesetaraan kepada segenap pemangku kepentingan sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. The Company implements fairness principle to all stakeholders in accordance with prevailing law and regulation.

KOMITMEN TERHADAP PENERAPAN GCG

Perseroan menempatkan GCG sebagai landasan penting untuk menciptakan pertumbuhan secara berkelanjutan dengan penguatan struktur dan mekanisme pengelolaan secara internal yang didukung oleh kepatuhan eksternal terhadap seluruh perangkat peraturan perundang-undangan. Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

1. Pedoman GCG PT PELNI (Persero)
2. Pedoman *Code of Conduct* PT PELNI (Persero)
3. Tata Laksana Kerja (*Board Manual)* Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
4. Pedoman Benturan Kepentingan *(Conflict of Interest)* PT PELNI (Persero)
5. Pakta Integritas PT PELNI (Persero)
6. Pedoman Penanganan Gratifikasi PT PELNI (Persero)
7. Pedoman dan Sistem Manajemen Risiko PT PELNI (Persero)
8. Tata Kelola Teknologi Informasi PT PELNI (Persero)
9. Pedoman *Whistle Blowing System* PT PELNI (Persero)
10. Laporan Tahunan *(Annual Report)* PT PELNI (Persero)

COMMITMENT ON GCG IMPLEMENTATION

The Company places GCG as fundamental aspect to create sustainable growth through management structure and management consolidation internally that is also supported with external compliance with all regulatory frameworks. GCG implementation commitment in the Company is manifested as several manual books related with GCG implementation and GCG integrity pact signing by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

1. PT PELNI (Persero) Code of GCG
2. PT PELNI (Persero) Code of Conducts
3. PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and Board of Commissioners
4. PT PELNI (Persero) Conflict of Interest
5. PT PELNI (Persero) Integrity Pact
6. PT PELNI (Persero) Anti-Gratification Manual
7. PT PELNI (Persero) Risk Management Guideline and System
8. PT PELNI (Persero) Information Technology governance
9. PT PELNI (Persero) Whistleblowing System Manual
10. PT PELNI (Persero) Annual Report

PENDAHULUAN
Introduction

ROADMAP GCG

Sebagai sebuah sistem yang membutuhan komitmen dalam penerapaan penegakan secara terencana, sistemik, dan berkelanjutan, maka tantangan terbesar dalam implementasi GCG adalah memberikan kesadaran *(awareness),* kepemilikan bersama *(ownership),* serta keterlibatan *(involvement)* seluruh insan Perseroan.

Menghadapi tantangan implementasi tersebut, dibutuhkan suatu "peta jalan" atau *Road Map* GCG yang menjadi pedoman bagi seluruh unit dan insan Perseroan dalam memberikan dukungan dan kontribusi bagi terciptanya GCG yang efektif secara sistemik dan sistematik.

Implementasi GCG membutuhkan komitmen dan kemauan kuat, keyakinan terhadap visi dan misi Perseroan, didukung kerja keras semua lini dan seluruh insan Perseroan. Top manajemen dituntut merumuskan tahapan implementasi, tata nilai, etika bisnis, budaya dan tujuan akhir Perseroan yang akan dicapai melalui dedikasi dan keyakinan terhadap manfaat penerapan GCG.

GCG ROADMAP

As a system that requires commitment in the implementation of planned, systemic and sustainable enforcement, the biggest challenges in implementing GCG are awareness, ownership, and involvement of all Company's Personnel.

Facing such challenge in the implementation, a "roadmap" or GCG Road Map is a guide for all units and Company's personnel in providing support and contribution to the creation of systemically and systematically effective GCG.

Implementation of GCG requires commitment and strong will, confidence in the vision and mission of the Company, supported by Company's personnel hard work. Top management is required to formulate the stages of implementation, values, business ethics, culture and corporate end-goals to be achieved through dedication and confidence in the benefits of GCG implementation.

SELF ASSESMENT GCG

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG *(GCG Assessment)* secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk periode tahun buku 2017, dilakukan *self assesment* GCG yang didampingi oleh BPKP denga capaian skor 80,448 atau predikat BAIK dengan rincian sebagai berikut:

SELF ASSESSMENT OF GCG

The Company evaluated GCG practice through GCG Assessment activity periodically to evaluate quality of GCG implementation in each Corporate structure. For fiscal year 2017 period, GCG self assessment was accompanied by BPKP with 80.448 score achievement or GOOD predicate with details are as follows:

Ringkasan Hasil GCG Asesmen PT PELNI (Persero) 2017
PT PELNI (Persero) GCG Assessment Result Summary

No.	Penjelasan Kriteria Criteria Explaination	Bobot Weight	Capaian Tahun 2017 2017 Achievement		Predikat Predicate
			Skor Score	Persentase Persentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,000	5,795	82,79	Baik Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	9,000	8,301	92,23	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	29,764	85,04	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35,000	29,290	85,43	Sangat Baik Very Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	6,688	74,32	Cukup Baik Fair
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,000	0,00	-
Skor Keseluruhan Total Score		100,000	80,448	80,448	Baik Good

REALISASI REKOMENDASI *ASSESSMENT* GCG 2016

Pada tahun 2016, PT PELNI (Persero) melaksanakan *assessment* yang dilakukan oleh BPKP. Hasil skor *Assessment* GCG untuk praktek tahun 2016 menunjukkan capaian skor 80,785 atau predikat "BAIK," dengan rincian sebagai berikut:

REALIZATION OF 2016 GCG ASSESSMENT RECOMMENDATION

In 2016, PT PELNI (Persero) conducted assessment by BPKP. GCG Assessment score for practice in 2016 with score of 80.785 or "GOOD" predicate with detail as follows:

Ringkasan Hasil GCG Asesmen PT PELNI (Persero) 2016
PT PELNI (Persero) GCG Assessment 2016 Result Summary

No.	Penjelasan Kriteria Criteria Explaination	Bobot Weight	Capaian Tahun 2016 2016 Achievement		Predikat Predicate
			Skor Score	Persentase Persentage	
1	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan. Commitment on Sustainable Corporate Governance	7,000	5,681	81,157	Baik Good
2	Pemegang Saham dan RUPS/Pemilik Modal Shareholders and GMS/Capital Owner	9,000	8,135	90,388	Sangat Baik Very Good
3	Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Board of Commissioners/Supervisory Board	35,000	31,461	89,888	Sangat Baik Very Good
4	Direksi Board of Directors	35,000	29,389	83,968	Baik Good
5	Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,000	6,119	67,994	Cukup Baik Fair
6	Aspek Lainnya Other Aspects	5,000	0,000	0,000	-
Skor Keseluruhan Total Score		100,000	80,785	80,785	Baik Good

PENDAHULUAN
Introduction

Status tindak lanjut usulan rekomendasi *Assessment* GCG tahun 2016, adalah sebagai berikut:

Follow-up status of GCG Assessment recommendation for the year of 2016 is as follows:

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
ASPEK I Aspect I			
1	Pelaksanaan Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku. GCG Guidelines Implementation and Code of Conduct.	Disarankan kepada Direksi penanggung jawab GCG agar mengagendakan sosialisasi Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku, supaya tingkat pemahaman terhadap Pedoman GCG dan Pedoman Perilaku lebih meningkat. It is recommended to the Board of Directors responsible for GCG to schedule the socialization of the GCG Guidelines and the Code of Conduct, so that the understanding level of the GCG Guidelines and the Code of Conduct will increase.	1. Sosialisasi Pedoman GCG sudah dilakukan melalui milis pegawai setiap bulan. GCG Guidelines Socialization has been done through mailing list of employees every month. 2. Penyampaian pedoman kepada Direksi melalui Nota Dinas Kepala Kesekretariatan Perusahaan No. 08.11/01/ND/093/2017. Guidelines submission to the Board of Directors through the Head Office of the Secretariat Company No. 08.11/01/ND/093/2017. 3. Penyampaian pedoman kepada VP melalui Nota Dinas Kepala Kesekretariatan Perusahaan No. 08.11/02/ND/093/2017. Guidelines submission to the VP through the Head of Secretariat Company's official note No.08.11/02/ND/093/2017. 4. Penyampaian pedoman kepada Manager melalui Nota Dinas Kepala Kesekretariatan Perusahaan No.09.15/01/ND/093/2017. Guidelines submission to the Manager through the Head of Secretariat Company's official note No. 09.15/01/ND/093/2017.
2	Pelaksanaan kebijakan *whistle blowing system.* Whistleblowing system Policies Implementation.	a. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola WBS untuk melakukan sosialisasi kepada karyawan Perseroan & *stakeholder.* Recommendation for The Directors, To Instruct the WBS management officers to perform socialization over the employees & stakeholders.	1. Sosialisasi pedoman WBS sudah dilakukan melalui milis pegawai, penyampaian Pedoman kepada Kepala Cabang pada saat Rapat Pimpinan di Solo Tahun 2017. WBS guidelines Socialization has been performed through mailing list of employees, delivery of Guidelines to the Branch Head at the Leadership Meeting for 2017 in Solo.. 2. Penyampaian pedoman kepada Direksi melalui Nota Dinas Kepala Kesekretariatan Perusahaan No. 08.11/01/ND/093/2017. Guidelines submission to the Board of Directors through the Head of Corporate Secretariat Notary note No. 08.11/01/ND/093/2017. 3. Penyampaian pedoman kepada VP melalui Nota Dinas Kepala Kesekretariatan Perusahaan No. 08.11/02/ND/093/2017. Guidelines submission to VP through the Head of Corporate Secretariat Notary note No. 08.11/02/ND/093/2017. 4. Penyampaian pedoman kepada Manager melalui Nota Dinas Kepala Kesekretariatan Perusahaan No. 09.15/01/ND/093/2017. Guidelines submission to Manager through the Head Office of Corporate Secretariat notary note No. 09.15/01/ND/093/2017. 5. Masing-masing Pimpinan Unit Kerja berkewajiban mensosialisasikan pedoman kepada unit kerjanya. Each working Department Leaders is obliged to socialize the guidelines to its work Department. 6. Setiap bulan dipublikasi melalui millis karyawan sejak Oktober 2017 published through mailing list employees every month since October 2017.

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
		b. Disarankan kepada Direksi, agar menginstruksikan kepada petugas pengelola *WBS* untuk melakukan penanganan tindak lanjut atas pengaduan yang diterima Perseroan. Recommendation for The Directors, To instruct the WBS management officer to conduct follow-up handling of complaints that received by the company.	Belum ada pengaduan. Pengelolaan pengaduan tertuang dalam Surat Keputusan Direksi No. 12.29/04/SK/HKO.01/2016 perihal Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran *(Whistle Blowing System).* No complaints yet. Directors letter decree No. 12.29/04/SK/HKO.01/2016 regarding to (Whistleblowing System) Guideline that contain on Grievance management
ASPEK II Aspect II			
1	Direksi melakukan pembagian tugas/fungsi, wewenang dan tanggung jawab secara jelas. The Board of Directors clearly devides duties/function, authority and responsibility	a. Kepada Direksi agar menyusun prosedur penyusunan SOP. for The Directors To arrange SOP preparation procedures.	Sedang disusun Pedoman Manajemen Proses Bisnis; *progress review* di Internal *Corporate Planning.* Business Process Management Guidelines are being drafted; progress review on Internal Corporate Planning.
		b. Kepada Direksi agar melakukan reviu dan pemutakhiran SOP secara berkala, setidaknya setiap 3 tahun dilakukan reviu dan evaluasi. For the Directors To perform regularly reviewing and updating of the SOP, at least every 3 years.	Telah dilakukan pembaharuan tentang Prosedur Tata Kelola dan Rencana Strategis Teknologi Informasi PT PELNI (Persero) 2017 - 2021, ditetapkan pada tanggal 28 Juli 2017 Has been conducted corporate governance procedure and information strategic planning renewable of PT PELNI (Persero) 2017-2021, was established on July 28, 2017.
2	Direksi menyusun perencanaan Perseroan. The Board of Directors develops corporate planning	a. Kepada Direksi agar menyampaikan rencana promosi dan mutasi jabatan satu level di bawah Direksi belum seluruhnya yang disampaikan kepada Dewan Komisaris untuk mendapatkan masukan dari Dewan Komisaris. For Directors To Deliver a promotion plan and mutation one level under the Board of Directors has not been fully submitted to the Board of Commissioners for input from the Board of Commissioners.	Rencana promosi dan mutasi yang dilaporkan kepada Dewan Komisaris antara lain: Pengisian formasi Direksi Anak Perusahaan, *Corporate Secretary*. Sedangkan rencana promosi dan mutasi *Vice President* tidak disampaikan kepada Dekom. Namun pada saat Sk ditandatangani, Dewan Komisaris mendapat tembusan sebagai laporan. Dokumen: Surat No. 03.01/01/S/001/2017 tentang Laporan Hasil *Assessment* Kompetensi *Vice President* PT PELNI (Persero). Promotion and mutation plans that reported to the Board of Commissioners which follows: the board of directors formation fulfillment, Corporate Secretary. Otherwise, the Vice President's promotion and mutation plan is not submitted to the Board of Commissioners. Although at the same time decree is signed, The Board of Commissioners received a copy as a report. Document: Letter No. 03.01/01/S/001/2017 about Competence Assessment Report Vice President PT PELNI (Persero).
		b. Kepada Direksi agar menyusun mekanisme bagi Direksi untuk merespon usulan peluang bisnis dari manajemen di bawah Direksi/anggota Direksi/Dewan Komisaris. For The Directors To arrange mechanism for the Board of Directors to respond to business opportunities proposed from management under the Board of Directors / the Board of Director's members/ Board of Commissioners.	Sedang *review* di Internal *Corporate Planning.* Reviewing at Internal Corporate Planning.

PENDAHULUAN
Introduction

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
3	Direksi berperan dalam pemenuhan target kinerja Perseroan. The Board of Directors play a role in fulfilling the Company's performance target..	a. Kepada Direksi agar melakukan reviu atas penerapan aplikasi Oracle untuk penilaian kinerja dan menindaklanjuti hasil reviu tersebut For The Directors To review the application Oracle for performance assesment and follow up on the review results.	**SDM** | Human Resources Telah dilaksanakan rapat dengan Divisi Teknologi Informasi untuk mengupdate aplikasi oracle, namun masih mengalami kendala dalam *coding* unit kerja. Dokumen: Nota Dinas No. 09.06/02/S/041/2017 perihal Undangan Rapat Agenda: Penyelesaian Kendala *Information Technology* Aplikasi Oracle SDM. Hasil dari rapat tersebut adalah PT Solusi telah melakukan *deploy* namun *coding* masih belum sesuai. For updating oracle aplication, Meeting was held with Information Technology Division but still has had problems in coding unit work. Document: Notary Note. 09.06/02/S/041/2017 regarding Agenda Meeting Invitation: Solving Information TechnologyConstraints Oracle HR Application. The meeting result is PT Solusi has done deploy but the coding is still not appropriate.
		b. Kepada Direksi agar melakukan evaluasi atas kendala yang dihadapi dalam penerapan capaian kinerja dan menindaklanjuti hasilnya For The Directors To evaluate the constraints that faced by implementing performance outcomes and follow up on its results.	Evaluasi atas kendala yang dihadapi dalam penerapan capaian kinerja dilakukan melalui mekanisme rapat evaluasi kinerja setiap bulan oleh Direksi dan pimpinan senior terkait Evaluation of the constraints that faced in the performance achievement implementation is performed through the monthly performance evaluation meeting mechanism by the Board of Directors and senior leaders related.
		c. Kepada Direksi agar menetapkan target dan menyampaikan capaian kinerja individu Direksi kepada Dewan Komisaris For the The Directors To set targets and deliver the Board of Directors individual performance to the Board of Commissioners.	Penetapan Target Kinerja: Target Performance Determination: 1. Indikator kinerja untuk setiap Direksi/ Direktorat merupakan indikator turunan dari indikator korporat. The performance indicators for each of the Directors/Directorate is an indicator derived from the corporate indicators. 2. Perumusan serta penetapan indikator kinerja dan target untuk tahun berikutnya, dilaksanakan setiap bulan September dan Oktober bersamaan dengan proses penyusunan RKAP dan Kontrak Manajemen untuk tahun berikutnya. Formulation and determination of performance indicators and targets for subsequent years, implemented on every September and October are equal to the process of preparing RKAP and Contract Management for the next year. 3. Status per 31 Oktober 2017 : indikator kinerja tahun 2018 untuk setiap Direktorat telah dirumuskan, sedangkan penetapan targetnya akan dilaksanakan setelah RKAP 2018 dan Kontrak Manajemen disahkan oleh RUPS. Status as of 31 October 2017: 2018 performance indicators for each Directorate have been formulated, while targeting will be implemented after the RKAP 2018 and Management Contracts are approved by the GMS.

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
			Penyampaian Capaian Kinerja kepada Dewan Komisaris Performance Achievements delivery to the Board of Commissioners 1. Capaian kinerja Direksi secara khusus tidak disampaikan kepada Dewan Komisaris. The performance of the Board of Directors is not specifically submitted to the Board of Commissioners. 2. Mekanisme yang berjalan saat ini adalah penyampaian progress realisasi KPI Kontrak Manajemen kepada Dewan Komisaris melalui rapat Direksi dengan Dewan Komisaris setiap triwulan. The current mechanism is the delivery of the KPI Realization progress of Management Contract to the Board of Commissioners through the Board of Directors' meeting with the Board of Commissioners every quarter. 3. Status per 31 Oktober 2017 : tanggal 30 Oktober 2017 telah dilaksanakan rapat Direksi dengan Dewan Komisaris untuk membahas kinerja triwulan III Status as of October 31, 2017: dated October 30, 2017, the Board of Directors and Board of Commissioners meetings held to discuss the third quarter performance.
		d. Kepada Direksi agar menyelesaikan dan menetapkan SOP pelayanan minimal For The Directors To complete and define minimum service SOP.	Divisi Pelayanan Jasa telah menyelesaikan Pembuatan SOP Keamanan Pangan ISO 22000 Services Division has completed Food Safety SOP making as ISO 22000.
		e. Kepada Direksi agar melakukan reviu atas SOP pengadaan barang dan jasa dan menindaklanjuti hasilnya For The Directors To review the procurement of goods and services SOP also following up on the results.	SOP Pengadaan Barang dan Jasa telah dalam proses *review* dengan menggandeng dengan target selesai pada Desember minggu ke 2, sedangkan untuk ketentuan baku dalam PO yang mengatur hak-hak dan kewajiban masing-masing pihak sudah mulai berlaku pada Juli 2017. SOP's goods and services Procurement has been in the review process with target completion by December on 2nd week, in PO which regulates the rights and obligations for each party as the standard provisions have come into force in July 2017.
		f. Kepada Direksi agar menyampaikan total HPS kepada calon penyedia barang dan jasa For The Directors To deliver total HPS to potential goods and services suppliers	HPS disampaikan dalam dalam kolom tersendiri, untuk proses pengadaan melalui LPSE, sedangkan untuk proses pengadaan Barang dan Jasa dengan metode lelang terbatas dan pemilihan langsung, HPS pengadaan di sampaikan pada waktu *Aanwizjing* (Penjelasan Pekerjaan) dan dituangkan dalam Berita Acara *Aanwizjing.* HPS is submitted in separate columns for procurement process through LPSE, while to process the Goods and Services procurement with limited auction method and direct election, the procurement HPS is conveyed at the time of Aanwizjing (Explanation of Works) and stated in the Minutes of Aanwizjing.
		g. Kepada Direksi agar menerapkan pengadaan barang dan jasa sesuai SOP. For The Directors To Update the regulations / policy education and training programs.	Sudah Dilakukan. Performed.

PENDAHULUAN
Introduction

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
		h. Kepada Direksi agar melakukan pemutakhrian ketentuan/kebijakan program pendidikan dan pelatihan For The Directors To Update the regulations/policy education and training programs.	Sedang disusun SOP untuk pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai PELNI dan SOP *Knowledge Management*. Telah dilakukan pengajuan draft SK Direksi tentang Ketentuan Pemagangan di Lingkungan PT PELNI (Persero) dan Dinas Belajar. Pedoman mengenai pola diklat masih sama seperti SK terdahulu namun kurikulum menyesuaikan dengan TNA berdasarkan hasil asesmen kompetensi PELNI's SOP Education and Training implementation also Knowledge Management Employees SOP are being prepared. Draft decree of Directors in Terms of Apprenticeship in the Environment PT PELNI (Persero) and learning department has been submitted. Guidance on training pattern is still same as previous decree but curriculum adjust to TNA based on competency assessment result
		i. Kepada Direksi agar merencanakan program pengembangan sesuai kebutuhan dan merealisasikannya. For The Directors To plan the development program as its needed and applied.	Perencanaan program pelatihan dibuat berdasarkan RKAP dan dilaporkan realisasinya setiap triwulan maupun semester kepada *Corporate Planning* dan Bidang Anggaran. Perencanaan program masih bedasarkan usulan dari setiap Unit Kerja. Idealnya dibutuhkan kamus kompetensi dalam penyusunan TNA. Kamus kompetensi masih dalam tahap proses. Kompetensi *Leadership* sudah dibuat draftnya, tinggal menunggu dipresentasikan. Training program planning is made based on The Company's work and Budget plan (RKAP) and its realization reported on semester or quarterly to Corporate Planning and Budget Sector. Program planning is still based on each Unit proposal. An ideal competence dictionary is required in TNA drafting. The competence dictionary is still on process stage. Kompetensi teknis SDM, Legal, Teknologi Informasi, dalam proses penyusunan. Kompetensi teknis Keuangan belum dibuat. Rencananya akan menggandeng konsultan yang dirasa lebih *expert* dan dipercaya untuk menjembatani. Telah dilaksanakan asesmen kompetensi untuk *Vice President* sebagai data *talent pool*. Hasil asesmen tersebut dijadikan dasar program pengembangan *Vice President* dan *Manager.* Dokumen: Nota Dinas perihal izin Prinsip Program Pengembangan Kompetensi Level *Upper Manager* Technical competence of HR, Legal, Information Technology, in the drafting process. Technical competence. No finances made. The plan will be holding a consultant who felt more expert and trusted to bridge. Assessment has been conducted competence for VP as talent pool data. The assessment results are made as a basis VP and Manager development programs. Document: Office Notes on Zin Principles Upper Manager Level Competence Development Program

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
		j. Kepada Direksi agar melakukan reviu penerapan *reward* untuk prestasi individu dan prestasi unit kerja, menyusun kebijakan, dan menerapkannya For The Directors To Review the reward application of individual and work unit achievements, developing and applying the policies.	Telah dibuat *project charter* PMS pada tahun 2017 dalam rangka riviu pedoman PMS, *reward and concequences*. Dokumen: *project charter* no.13 dan *project plan* PMS project charter was created in 2017 in order to reviewing PMS guidelines, reward and concequences. Document: project charter no.13 and project plan.
		k. Kepada Direksi kebijakan, penetapan target, dan penilain kinerja individu Direksi anak perusahaan For The Directors To Evaluate the reward and punishment implementation and follow up the results.	Telah dibuat *project charter* PMS pada tahun 2017 dalam rangka riviu pedoman PMS, *reward and concequences*. Dokumen: *project charter* no.13 dan *project plan*. PMS project charter was created in 2017 in order to reviewing PMS guidelines, reward and concequences. Document: project charter no.13 and project plan.
		l. Kepada Direksi kebijakan, penetapan target, dan penilain kinerja individu Direksi anak perusahaan For The Directors To determine the policies, targeting, and individual performance assessment of the Board of Directors of subsidiaries.	Kebijakan, penetapan target, dan penilaian kinerja individu Direksi anak perusahaan ada di Divisi *Corporate Planning & Risk Management* The Corporate Planning and Risk Management division are charged to policies, targeting, and individual performance assessment of the Subsidiaries Board of Directors.
4	Direksi melaksanakan pengendalian operasional dan keuangan terhadap implementasi rencana dan kebijakan Perseroan. The Board of Directors conducts operational and financial control over the implementation plans and company policies.	a. Kepada Direksi agar meningkatkan lagi progres pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi Auditor (eksternal dan internal) For The Directors To increase the follow-up progress based on Auditor's recommendations (external and internal)	Progress yang telah dilakukan antara lain: Progress has been performed which as follows: 1. SK Direksi No. 07.24/2/SK/HKO.01/2017 tanggal 24 Juli 2017 tentang Standar Operasional Prosedur Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Auditor Internal dan Eksternal di Lingkungan PELNI. The Board of Directors decree letter No. 07.24/2/SK/HKO.01/2017 dated July 24, 2017 on Standard Operating Procedure for Follow-Up Monitoring based on Internal and External Auditor Results Recommendation in PELNI. 2. SK. Direksi No. 09.14/01/SK/HKO.01/2017 tanggal 14 September 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Unit Kerja Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Lingkungan PELNI. The Board of Directors Decree letter No.: 09.14/01/SK/HKO.01/2017 dated 14 September 2017 on Internal Control Unit Guidelines for Work Unit Management (SPI) within PELNI.

PENDAHULUAN
Introduction

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
5	Direksi melakukan hubungan yang bernilai tambah bagi Perseroan dan *stakeholders*. The Board of Directors conducts addition value relationships for the company and its stakeholders.	a. Kepada Direksi agar menyusun rencana tindak lanjut hasil *survey* kepuasan pelanggan dan memantau progres pelaksanaannya For The Directors To develop follow-up plan based on customers satisfaction survey and monitoring its implementation progress	Tindak Lanjut Hasil *Survey* Kepuasan Pelanggan Tahun 2016 : Customer Satisfaction Survey Results Follow - Up for the year of 2016: 1. Melakukan evaluasi, perbaikan, penambahan atau penggantian hal - hal yang terkait dengan jenis makanan dan minuman yang diharapkan diatas kapal atas Evaluating, repairing, replenishment or replacement of things related to the type food and beverage expected on board a. Cita Rasa Makanan tindak lanjut Pelaksanaan Pendidikan & Pelatihan secara bertahap kepada Jenang & Koki di atas kapal berkoordinasi dengan Bagian Diklat Divisi SDM. Food Taste Follow-up Implementation Education & Training gradually to servant & chef on board coordinated with Human Resources Training Division. b. Menu & Variasi Makanan diatas kapal tindak lanjut Perencanaan Variasi Menu Makanan berdasarkan segmentasi wilayah trayek kapal penumpang. Menu & Variety of Food on the ship Food Menu Variation follow-up Planning based on the the passengers ship route area segmentation. c. Kualitas Makanan yang disajikan (tidak basi, porsi makanan, metode memasak, cara penyajian & komposisi lauk) tidak lanjut telah diatur dan ditetapkan dalam SOP Keamanan Pangan ISO 22000. Quality of Food that served (no stale, food portions, cooking methods, presentation methods or side composition) is set and fixed in the ISO 22000 Food Safety SOP.
			2. Melakukan evaluasi, perbaikan, penambahan, penggantian dan peningkatan fasilitas yang ada diatas kapal. tindak lanjut Evaluating, repairing, addition, replacement and upgrading of existing facilities on board. Follow-up implementation which as follows a. Pemenuhan/Penggantian & Perbaikan fasilitas hiburan tv, kasur sesuai kondisi & permintaan kapal. Fulfillment/Replacement and Repairment facilities such as tv entertainment , mattresses according to ships conditions & requests . b. Evaluasi atas Kinerja Mitra Peljas atas Pekerjaan *Cleaning Service*, Hiburan *Band*/Organ Tunggal, Pengelolaan Kasur Ekonomi dan *Pest Control* diatas kapal. Peljas Partners Performance evaluation on Cleaning Service, Band / Solo Entertainment, Economy Mattress Management and Pest Control on board.

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
		b. Kepada Direksi agar melakukan *Assessment* pemasok secara berkala berdasarkan QCDS (*quality, cost, delivey, service*) For The Directors To perform on regular basis supplier Assessment based on QCDS (quality, cost, delivery, service)	Pelaksanaan *Assessment* Pemasok terkait dengan QCD (*Quality, cost, delivery* dan *service*), kami laksanakan dengan memberikan Form Penilaian kepada *User* untuk pekerjaan *Repeat Order.* Supplier Assessment Implementation related to QCD (Quality, cost, delivery and service), we define by providing Assessment Form to User for Repeat Order job.
		c. Kepada Direksi agar melakukan survei kepuasan pemasok. For The Directors To perform supplier satisfaction surveys.	*Survey* Kepuasan Pemasok atau Kinerja Divisi Pengadaan terkait Kepuasaan Pelayanan proses pengadaan masing dalam proses pelaksanaan dengan target pencapaian pada 30 November 2017. Adapun Pelaksanaan *survey* melalui pengisian pada link http://bit.ly/kuesionerrekananptpelni. Supplier Satisfaction Survey or Performance of Procurement Division on Service Purchasing Satisfaction of each procurement process in its implementation by target of achievement on November 30, 2017. The survey Implementation through filling in link http://bit.ly/kuesionerrekananptpelni.
		d. Kepada Direksi agar menyusun dan menetapkan kebijakan kredit For The Directors To arrange and establish credit policy.	Unit Pengelolaan Dana dan Investasi belum menyusun dan menetapkan Kebijakan kredit dalam suatu SK Direksi, namun dalam setiap mengambil keputusan Pinjaman Kredit Bank, ada beberapa hal pertimbangan yang dilakukan: Fund and Investment Management Department has not compiled and established Credit Policy in a Decree of the Board of Directors, moreover in every decision making of the Bank Loan, there are several considerations which as follows: a. Menetapkan kebutuhan kredit diperuntukan untuk kredit investasi atau kredit modal kerja. Determining the credit requirements are intended for investment credit or working capital credit. b. Menetapkan besaran investasi atau modal kerja tersebut dapat dikreteriakan sebagai investasi/modal kerja yang perlu di *cover* melalui pinjaman kredit. Determining the investment amount or working capital can be categorized as investment / working capital that needs to be covered through credit loans. c. Menetapkan kredibilitas bank. Determining the bank credibility. d. Mendapatkan komparasi pinjaman bunga bank yang diajukan oleh bank. Obtaining the bank interest loans comparison which is proposed by the bank. e. Menetapkan tenor pinjaman sesuai dengan kemampuan *cashflow* Perseroan *in line* dengan tenor pinjaman tersebut. Determining the loan tenor according to the company's online cash flow capability with the tenor of loan. f. Melakukan komparasi biaya yang timbul pada saat pengajuan kredit yang ditawarkan oleh beberapa bank yang telah ditentukan kredibilitasnya. Comparing the costs incurred at the time of credit application offered by several banks that have determined its credibility.

PENDAHULUAN
Introduction

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
		e. Kepada Direksi agar menetapkan jenis kebijakan Perseroan yang harus dikomunikasikan kepada karyawan dan jenis kebijakan yang harus melibatkan karyawan dalam perumusannya For The Directors To determine the company policy type that should be communicated to employees and the types of policies that should involve employees on its formulation	Belum ada pedoman tentang hal ini. Namun sudah diatur dalam PKB tentang Bipartit dan Tripartit There is no guidance on this yet. But it was set out in the PKB on Bipartite and Tripartite
		f. Kepada Direksi agar melakukan pemutakhiran SOP Pelaksanaan PKBL For The Directors To perform SOP update of PKBL Implementation	Unit PKBL PT PELNI (Persero) telah melakukan perubahan SOP PKBL yang tertuang dalam SK Direksi No. 0502/01/SK/HKO.01.2017 yang sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan dan saat ini juga sedang dalam proses di Biro Hukum untuk pembaharuan SOP PKBL terbaru sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN terbaru dengan No. PER-02/MBU/7/2017 tentang perubahan kedua atas peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. PKBL department of PT PELNI (Persero) has made changes SOP PKBL which is contained in the Board of Directors decree No. 0502/01/SK/HKO.01.2017 in accordance with the Regulation of SOE Minister No. PER-09/MBU/07/2015 About the Partnership and Community Development Program which is being processed in the Legal Bureau for the latest update of SOP PKBL according to prevailing regulation of Minister of State-Owned Enterprises by No. PER - 02/MBU/7/2017 concerning the second changes to the Regulation of Minister of State-Owned Enterprises No. PER-09/MBU/07/2015 on the Partnership Program and Environmental Development of State-Owned Enterprises.

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
		g. Kepada Direksi agar melakukan sosialisasi penanganan keadaan darurat kepada seluruh karyawan For The Directors To perform the socialization of emergency handling to all employees	1. Dilaksanakan nya *in house training* dan simulasi pemadam kebakaran pada tanggal 15 September 2017. Implemented in house training and fire fighting simulation on September 15, 2017. 2. Telah dilaksanakan *in house training* SMK3 dan P2K3 dari Disnaker pada tanggal 23-24 Agustus 2016. Implemented in house training SMK3 and P2K3 from Employment Department on August 23-24, 2016. 3. Adanya inspeksi dan sosialisasi SMK3 di Kantor Cabang PT PELNI (Persero) (Antara lain Sampit, Surabaya, Jayapura) Inspection and socialization of SMK3 in Branch Office of PT PELNI (Persero) (Among others Sampit, Surabaya, Jayapura). Familiarisasi ISM-*Code* bagi *crew* baru yang akan bertugas di kapal perintis (KM. Sabuk Nusantara 39 dan KM. Sabuk Nusantara 30) ISM-Code familiarization for new crew who will serve on Perintis vessel (KM Sabuk Nusantara 39 and KM Sabuk Nusantara 30).
		h. Kepada Direksi agar mengupayakan penurunan tunggakan program kemitraan For The Directors To seek the reducing of partnership program arrears	Unit PKBL telah melakukan beberapa kegiatan dengan tujuan penurunan tunggakan Program Kemitraan maupun pencegahan piutang macet yaitu : PKBL Department has conducted several activities with the aim of reducing arrears of Partnership Program and the prevention of bad debts, namely: a. Melakukan *monitoring* secara berkala. Monitoring periodically b. Membentuk cluster mitra binaan untuk memudahkan monitoring dan pencegahan piutang macet Shaping the partner clusters to facilitate monitoring and prevention of bad debts c. Bekerja sama dengan lembaga/Kementrian dalam melakukan Program Kemitraan Working with Department/Ministries in Partnership Program

PENDAHULUAN
Introduction

No.	Indikator Indicator	Rekomendasi Recomendation	Progress Progress
ASPEK IV Aspek IV			
1	Perseroan menyediakan bagi *stakeholder* akses atas informasi Perseroan yang relevan, memadai, dan dapat diandalkan secara tepat waktu dan berkala. The Company provides stakeholders with access to relevant, adequate, and reliable company information in a timely and periodically.	a. Perseroan disarankan melaksanakan pengelolaan *website* sesuai dengan kebijakan yaitu memuat kebijakan-kebijakan Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan kebijakan terbaru yang telah dilakukan revisi. Suggestion for the company To implement website management in accordance with the policy that contains the Good Corporate Governance policies with the latest revised policy.	Pedoman *soft structure* sudah di-*upload* pada *website* PELNI. Soft structure guidelines was uploaded on PELNI Website
		b. Perseroan disarankan memublikasikan Pedoman-pedoman Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik edisi Tahun 2016. Suggestion for the company To implement website management in accordance with the policy that contains the Good Corporate Governance policies with the latest revised policy.	Tertuang dalam *annual report* tahun 2016 Included in the 2016 annual report
2	Perseroan mengungkapkan informasi penting dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. The Company discloses important information in the Annual Report and Financial Statements in accordance with the laws and regulations.	Laporan Tahunan berikutnya dilengkapi dengan muatan pengungkapan praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik dengan mengungkapkan pelaksanaan program pelatihan Direksi, Program perbaikan kesehatan, Program pengembangan seni budaya dan biaya yang dikeluarkan berkaitan dengan tanggung jawab sosial perusahaan terutama aktivitas lingkungan. The subsequent Annual Report will be supplemented with Good Corporate Governance disclosure report by disclosing the implementation of Directors training, Health improvement, Cultural arts development program and expenses that incurred related to corporate social responsibility, especially for environmental activity.	Tertuang dalam *annual report* tahun 2016 Included in the 2016 annual report
3	Perseroan memperolah penghargaan atau *award* dalam bidang GCG dan bidang-bidang lainnya. The Company earned appreciation or awards in the field of GCG and other fields.	a. Agar Perseroan mengikuti *Annual Report Award*. The Company follows Annual Report Award.	Tahun 2017. PELNI sudah ikut serta dalam *annual report award* 2016. Year 2017. PELNI participated in the 2016 annual report.

INFORMASI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

Ultimate and Controlling Shareholders Informations

Sampai dengan saat ini, pemegang saham utama dan pengendali dari PT PELNI (Persero) adalah Pemerintah Indonesia melalui Kementerian BUMN dengan jumlah kepemilikan saham 100% atau kepemilikan penuh.

Until nowadays, the main shareholder and controller of PT PELNI (Persero) is the Indonesian Government through the Ministry of SOEs with 100% or full ownership.

STRUKTUR ORGAN GCG PERUSAHAAN

Coporate GCG Structure

Dalam Undang-undang Republik Indonesia No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Perseroan telah memiliki struktur *Governance* yang terdiri terdiri dari Organ Utama dan Organ Pendukung Perseroan. Organ Utama PT PELNI (Persero) terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham, Direksi dan Dewan Komisaris. Adapun Organ Pendukung PT PELNI (Persero) diantaranya Komite Audit, Komite Kebijakan Risiko, Sekretaris Perusahaan, Unit Audit Internal dan Manajemen Risiko. Berikut adalah Struktur GCG PT PELNI (Persero):

In compliance with The Republic of Indonesia Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, the Company has established Governance Structure comprises of Main Structure and Supporting Structure. Main Structure of PT PELNI (Persero) consisted of General Meetings of Shareholders, Board of Directors and Board of Commissioners. Supporting Structure of PT PELNI (Persero) includes Audit Committee, Risk Policy Commitee, Corporate Secretary, Internal Audit Unit and Risk Management. Here is GCG Structure PT PELNI (Persero):

STRUKTUR ORGAN GCG PERUSAHAAN

Corporate GCG Organ Structure

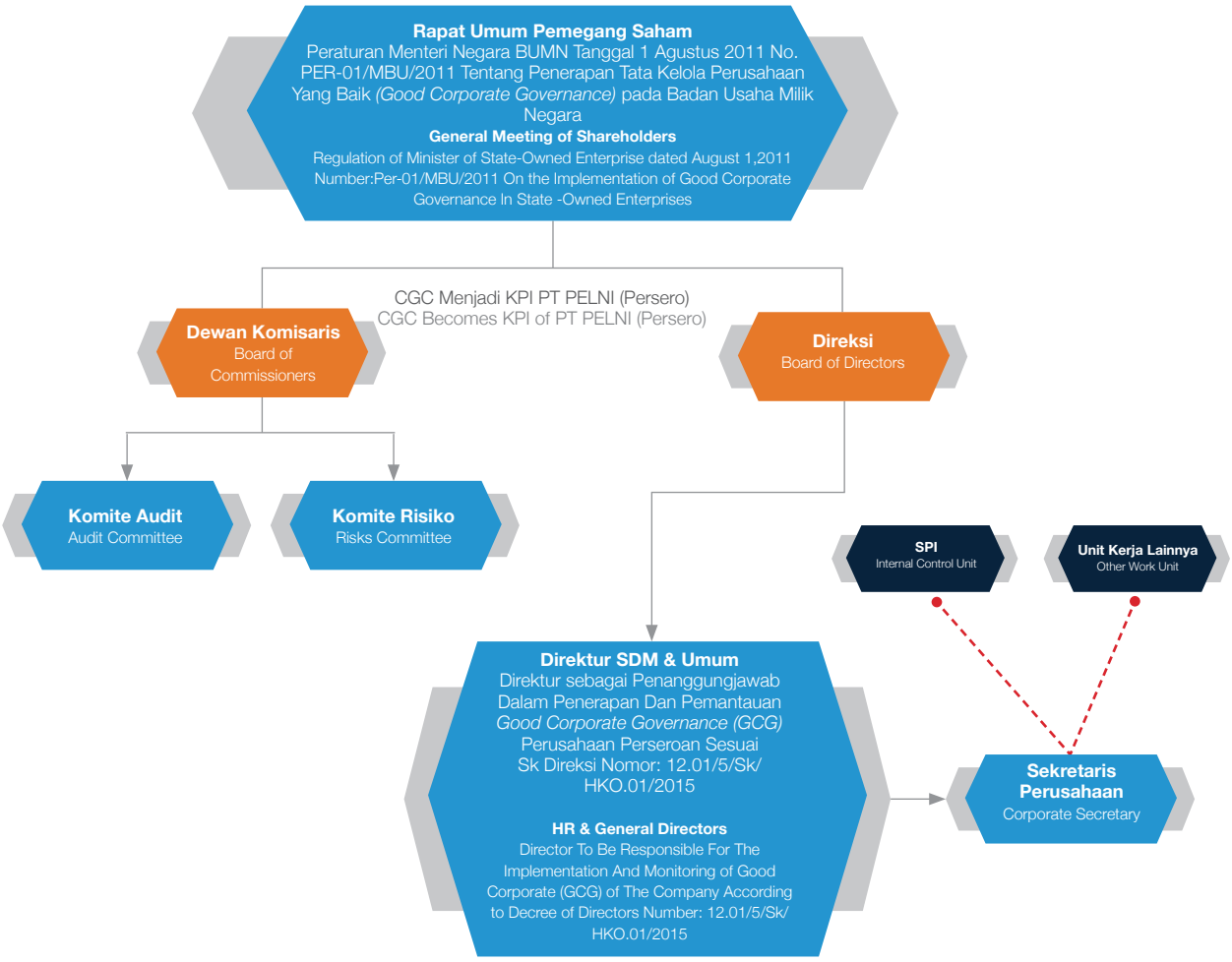

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM

General Meeting of Shareholders

RUPS Menurut UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan terbatas adalah Organ atau bagian Perseroan yang memiliki Kewenangan khusus yang tidak diberikan kepada Direksi maupun Dewan Komisaris dalam batas yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan/atau anggaran dasar.

Berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan terdapat 2 (dua) jenis RUPS, yaitu:

1. RUPS Tahunan, yang diselenggarakan setiap tahun, selambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun buku berakhir.
2. RUPS Luar Biasa, yang dapat diadakan setiap kali apabila dianggap perlu oleh Direksi atas permintaan tertulis dari Dewan Komisaris atau dari Pemegang Saham.

Pada tahun 2017, PT PELNI (Persero) menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS Tahunan yaitu RUPS RKAP tahun buku 2017 pada tanggal 23 Januari 2017 dan RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2016 pada 16 Mei 2017.

RUPS RKAP

Agenda dan Keputusan RUPS

Pada RUPS RKAP Tahun Buku 2017 yang diselenggarakan pada tanggal 23 Januari 2017 telah diagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

GMS under the law Number 40 Year 2007 about Limited Liability Company is an organ or part of a Company that has special powers which are not granted to the Board of Directors or the Board of Commissioners within the limits specified by law and/or articles of association.

According to provisions in the Articles of Association, there are two types of GMS, as follows:

1. Annual GMS, that is held every year minimum 6 (six) months after the end of fiscal year.
2. Extraordinary GMS, that is held any time if considered necessary by the Board of Directors under written request from the Board of Commissioners or Shareholders.

PT PELNI (Persero) held 2 (two) Annual General Meeting of Shareholders (RUPS) in 2017 namely the GMS of the Company's work and budget plan for fiscal year 2017 dated on January 23, 2017 and the GMS Book of Management statement for fiscal year 2016 dated on 16 May 2017.

GMS OF THE COMPANY'S WORK AND BUDGET PLAN

Agenda and Resolution of GMS

At the GMS of The Company Work and Budget Plan for fiscal Year 2017 held on January 23, 2017 that has been scheduled with the following decisions:

No No	Agenda RUPS RKAP Annual GMS of CBP	Keputusan Decision
1	Pemaparan dari Direksi PT PELNI (Persero) berikut Pembahasan terkait RKAP. Presentation from the Board of Director of PT PELNI (Persero) with the following discussion related to RKAP.	Persetujuan/Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta Rencana Kerja dan Anggaran Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Approval / Ratification of the Company Work and Budget Plan (RKAP) and also Work and Budget plan for Partnership and Community Development Program (PKBL) 2017 (two thousand and seventeen) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
2	Pemaparan dari Direksi PT PELNI (Persero) terkait KPI. Presentation from the Board of Director of PT PELNI (Persero) related to KPI.	Menetapkan *Key Performance Indicators* (indikator Kinerja Kunci) tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang tertuang dalam kontrak manajemen yang ditanda tangani oleh pemegang saham, Direksi, Dewan Komisaris Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Establishing Key Performance Indicators 2017 which was stipulated in management contracts signed by shareholders, the Board.
3	Pembacaan Pengesahaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Ratification of General Meeting of Shareholders (GMS).	Menetapkan Indikator Aspek Operasional PT PELNI (Persero) untuk Perhitungan Tingkat Kesehatan Perusahaan Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Establishing the Operational Aspect Indicators of PT PELNI (Persero) for Company Health Level Calculation for Year 2017.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

Arahan RUPS RKAP

Pada RUPS RKAP tersebut telah dihasilkan arahan RUPS dengan status tindak lanjut sebagai berikut:

Direction for The GMS of The Company Work and Budget Plan

At the GMS of The Company Work and Budget Plan has been generated The direction for GMS with follow-up status are as follows:

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	RKAP Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah disahkan agar dirinci menjadi target per bulan dan *cascading* ke seluruh jajaran Perusahaan. Dewan Komisaris agar melaporkan hasil rincian *cascading* dimaksud kepada Pemegang Saham dalam triwulan 1 tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). The Company work and Budget Plan 2017 (two thousand and seventeen) that have been ratified in order to be detailed into monthly targets and cascading for all members of the Company. The Board of Commissioners to report the details of the cascading which referred to the Shareholders in the first quarter of 2017 (two thousand and seventeen).	RKAP 2017 telah di-*breakdown* per bulan, per Cabang, per Divisi dan perkapal serta di-*upload* ke *system Oracle EBS*. The Company's budget plan has been breakdown per mounth, per branch, per division and per ship and also uploaded to Oracle EBS System
2	Untuk menunjang pertumbuhan perusahaan, termasuk peningkatan *market share* di industri pelayaran serta konektivitas, agar menyusun rute yang optimal didasarkan pada utilisasi aset eksisting dan peningkatan sinergi antar BUMN. To support the Comapny growth, including the increase of market share in the shipping industry and connectivity, in order to establish an optimum route based on existing asset utilization and synergy increasing among State-owned enterprises (SOE).	Penyusunan trayek 2017 memperhatikan MICE dan wisata bahari sebagai *output* produknya. Untuk tahun 2017 terdapat 6 Kapal yang memiliki rute wisata reguler (KM. Kelimutu, KM. Sangiang, KFC. Jetliner, KM. Binaiya, KM. Lawit, dan KM. Pangrango) dan 1 Kapal Untuk kegiatan MICE yaitu KM. Kelud. 2017 routes preparation paid attention to MICE and marine tourism which is as the output of its products. For the year 2017, there have been 6 Ships that have regular tourist routes (KM.Kelimutu, KM.Sangiang, KFC.Jetliner, KM.Binaiya, KM.Lawit, and KM.Pangrango) and 1 Ship For MICE activities namely KM.Kelud
3	Hasil penyusunan rute tersebut agar dibahas bersama Dewan Komisaris dan disampaikan kepada Pemegang Saham. Dalam hal terjadi penyimpangan signifikan atas asumsi-asumsi yang digunakan dalam rute baru dimaksud pada *point* di atas, Direksi dan Dewan Komisaris dapat mengajukan permohonan revisi target dan angka RKAP tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) paling lambat akhir Triwulan 1 tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). The route preparation results to be discussed with the Board of Commissioners and submitted to the Shareholders. In significant deviation of the assumptions that used in new route referred to the above points, the Board of Directors and the Board of Commissioners may apply for revision of the target and The Company work and budget plan figures for 2017 (two thousand and seventeen) the end of the first Quarter of 2017 (two thousand and seventeen) at last.	Pada Tahun 2017 terjadi 2 kali revisi trayek, yaitu pada Bulan Januari 2017 (Triwulan 1) dan September 2017 (Triwulan IV). In the year of 2017 occurred 2 times the route revision, in January 2017 (Quarter 1) and September 2017 (Quarter IV).
4	Mengupayakan peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya di semua lini usaha *(cost reduction program)* guna mewujudkan pengelolaan perusajaan yang semakin efektif dan efisien, dan laba bersih merupakan target minimal yang harus dicapai oleh segenap jajaran manajemen perusahan. Striving to increase revenue and cost control in all business lines (cost reduction program) in order to realize the management to be more effective and efficient, and net profit is as minimum target that must be achieved by all levels of company management.	Tindak lanjut upaya peningkatan pendapatan dan pengendalian biaya dari Divisi PAPKPP: Following up the efforts to increase revenue and cost control of the PAPKPP Division: 1. Pengembangan Channel Penjualan (7 channel: Indomart, Alfamart, Darmawisata, MMBC, Bimasakti, Ata Tour, Versa). Sales Channel Development (7 channels: Indomart, Alfamart, Darmawisata, MMBC, Milky Way, Ata Tour, Versa). 2. Penghapusan tiket kategori anak. Deletion of child category tickets. 3. Pengembangan produk *lifestyle*. Lifestyle products development. 4. Persetujuan penambahan ruas-ruas baru yang belum di-*cover* PSO. Approval on the addition of new segments that have not been covered by PSO. 5. Kenaikan Tarif Penumpang sebesar 10%. Increase in Passenger Fares by 10%
5	Untuk meningkatkan likuiditas dan kemampuan permodalan perusahaan, Direksi agar meningkatkan *cash flow*, pencairan dana PSO tepat waktu dan segera mengupayakan penyelesaian piutang bermasalah. To improve the liquidity and capital capability of the company, the Board of Directors is to increase cash flow, disbursement of PSO funds on time and immediately seeking the troubled receivables settlement	Tepat waktunya pencairan PSO & Subsidi dipengaruhi oleh kesiapan data/dokumen dari unit terkait sebagai syarat pencairan. Direktur Keuangan telah menerbitkan Nota Dinas perihal Kewajiban Masing-masing Unit Kerja Terkait Dokumen yang diperlukan untuk pencairan tersebut. The timely disbursement of PSO & Subsidies was influenced by the readiness of data/documents from related units as a condition of disbursement. Director of finance has issued a Memorandum of Understanding on the Obligations of Each Working Unit Related to Documents required for the disbursement.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
6	Dalam rangka memperkuat dan mengembangkan bisnis inti perusahaan pelaksanaan investasi agar diprioritaskan pada perbaikan infrastruktur dan sistem untuk meningkatkan produktivitas usaha. In order to strengthen and develop the company's core business of investment implementation to be prioritized on infrastructure and systems repairment for improving business productivity.	Tindak lanjut upaya perbaikan dan peningkatan produktivitas: Following up efforts to repair and improve productivity: 1. Pemasangan dan Instalasi Perangkat Aplikasi Penjualan Tiket di Kapal Perintis (telah terimplementasi 27 dari 46 kapal perintis). Fixing and Installing the Ticket Sales Application device on Perintis Ship (27 of 46 Perintis ships have been implemented). 2. Pemasangan dan Instalansi Perangkat Admin Kapal di Kapal Penumpang (telah terimplementasi 1 dari 26 kapal penumpang). Fixing and installing the Ship Admin Device on Passenger Ships (has implemented 1 of 26 passenger ships). 3. Implementasi *E-Ticketing* di *Agent Travel* (telah terimplementasi di 5 pelabuhan embarkasi: Tg. Priok, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Bitung). Implementing the E-Ticketing in Agent Travel (has Implemented in 5 embarkation ports: Tg Priok, Semarang, Surabaya, Balikpapan, Bitung). 4. Pembangunan *data center* PELNI sesuai dengan standar minimum untuk menjamin ketersediaan layanan infrastruktur Teknologi Informasi. PELNI data center development along with minimum standards to ensure the availability of Information Technology infrastructure services. 5. Pembangunan aplikasi *New Bill of Lading* (BL) yang bertujuan untuk meningkatkan produktivitas angkutan muatan dengan menerapkan aplikasi sebagai platform pemasaran dan penjualan angkutan muatan. New Bill of Lading (BL) application development that aims to improve the productivity of cargo transport by applying the application as marketing platform and sales of cargo transportation. 6. Pembangunan ulang *website* PELNI agar sesuai dengan perkembangan teknologi terkini dan memenuhi kebutuhan kebutuhan bisnis digital. Rebuilding PELNI's website to suit with the latest technological developments and fulfilling digital business needs. 7. Pembangunan dan implementasi aplikasi *Oracle EBS SCM* untuk mendukung efektivitas dan efisiensi proses bisnis pengadaan barang/ jasa di PELNI. Construction and implementation of Oracle EBS SCM applications to support the effectiveness and efficiency of the procurement process of goods / services in PELNI. 8. Pembangunan aplikasi *dashboard management* dan *voyage account* yang berfungsi sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajemen dalam menyikapi dinamika bisnis perusahaan. Development of dashboard management and voyage account application that serves as a decision-making tool for management in addressing the dynamics of the company's business.
7	Seluruh layanan baik darat maupun laut sudah harus menerapkan ICT *(information and communication technology)* untuk meminimalkan proses bisnis dilakukan secara manual. All services in both of land and sea have to apply ICT (information and communication technology) for minimizing business processes which is done manually.	Saat ini penerapan ICT di darat meliputi beberapa bidang, yaitu: Currently the application of ICT on land covers several fields, those are: 1. Angkutan Penumpang, dengan menggunakan aplikasi PELNI *Ticketing System* (PTS) dan aplikasi Kapal Perintis (untuk penjualan tiket). Passenger Transportation, using PELNI Ticketing System (PTS) application and Perintis Ship Application (for ticket sales). 2. Keuangan, melalui aplikasi Oracle EBS *Finance.* Finance, through Oracle EBS Finance application. 3. SDM, melalui penerapan aplikasi. HR, through application implementation. 4. Pengadaan barang dan jasa, melalui penerapann LPSE (lpse.pelni.co.id). Goods and services procurement, through the application of LPSE (lpse.pelni.co.id). 5. Angkutan Muatan, melalui penerapan reservasi muatan *online.* Cargo transport, through the application of online payload reservations. Untuk penerapan ICT di laut, direncanakan pada tahun 2018 akan diimplementasikan aplikasi admin kapal di kapal-kapal penumpang PELNI. For the application of ICT on sea, will be implemented ship admin application on passenger ships of PELNI in 2018.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
		Pada tahun 2018, beberapa penerapan ICT akan dilakukan di beberapa bidang, diantaranya: By 2018, some ICT applications will be implemented in several areas, including: 1. SDM, melalui implementasi aplikasi baru HRM yang terintegrasi dengan aplikasi *Oracle EBS Finance.* HR, through the implementation of new HRM applications that are integrated with Oracle EBS Finance applications. 2. Angkutan muatan, melalui implementasi aplikasi *New BL* (aplikasi baru) yang akan mengubah skema proses bisnis pemasaran dan operasional angkutan muatan PELNI. Cargo transport, through the implementation of New BL application (new application) which will change the business marketing process and operational scheme of PELNI cargo transport. 3. Pengadaan, melalui implementasi aplikasi *Oracle EBS SCM* untuk meningkatkan efektivtas dan efisiensi proses pengadaan. Procurement, through the implementation of Oracle EBS SCM applications to improve the effectiveness and efficiency of the procurement process
8	Pelaksanaan kegiatan *Public Service Obligation* (PSO) baik untuk angkutan penumpang maupun angkutan barang harus dilaksanakan sebaik - baiknya sesuai pertauran yang berlaku dan sesuai prinsip – prinsip GCG. Selain itu Direksi perlu melakukan pemisahan laporan keuangan antara kegiatan komersial dengan kegiatan PSO sesuai ketentuan yang berlaku. Public Service Obligation (PSO) activities implementation for both passenger and freight transport should be carried out in a manner according to the prevailing regulations and GCG principles. In addition, the Board of Directors needs to separate the financial statements between commercial activities and PSO activities in accordance with prevailing regulations.	Pada saat perhitungan penagihan PSO & Subsidi, divisi PSO telah memisahkan komponen biaya yang ditanggung PSO dan yang tidak ditanggung *(deductable cost & non deductable cost).* when calculating PSO & Subsidy billing, the PSO division has separated the cost components covered by the PSO and the non-deducted cost (PSO).
9	Melakukan penataan SDM baik di induk maupun di anak-anak perusahaan serta peningkatan mutu secara berkesinambungan guna meningkatkan produktifitas. Structuring human resources in either the parent or subsidiaries and continuous quality improvement for increasing productivity.	Salah satu program kerja unggulan Divisi SDM terkait dengan pengelolaan SDM adalah sebagai berikut: One of the leading work programs of Human Resource Division related to HR management is as follows: 1. Meningkatkan efektivitas *manpower planning* dengan cara: Increasing the effectiveness of manpower planning by: a. Rekrutmen pegawai darat dan laut; Ashore and offshore employees recruitment; b. Program kaderisasi pejabat structural; dan Structural officials regeneration program; and c. Program *individual development planning.* Individual development planning program 2. Penyusunan kamus kompetensi teknis. Technical competency dictionaries arrangement. 3. Program internalisasi budaya, tata nilai dan perilaku perusahaan yang selaras dengan strategi bisnis di seluruh unit kerja. The program of cultural internalization, corporate values and behavior in harm. 4. Implementasi *ERP Human Capital (Oracle HRM).* ERP Human Capital (Oracle HRM) Implementation. 5. Pemutakhiran sistem penilaian kinerja yang dihubungkan dengan pemberian kompensasi dan benefit untuk pegawai. Updating the performance appraisal system associated with the provision of compensation and benefits to employees. 6. Pelatihan pengembangan untuk Nakhoda & Perwira. Development training for Captain & Officers. 7. Sertifikasi untuk pegawai darat dan laut. Certification for ashore and offshore employees. 8. Melakukan kajian lengkap cabang rangkap antara PT PELNI (Persero) dan PT SBN. Conducting the full review of the double branch between PT PELNI (Persero) and PT SBN.
10	Posisi satuan Pengawasan internal (SPI) perusahaan agar diperkuat dalam rangka *early warning system*. Selanjutnya, Dewan Komisaris agar melakukan evaluasi atas efektivitas peran SPI dan melaporkan hasilnya kepada Pemegang Saham. Internal Control Unit (SPI) position of the company to be strengthened in the framework of early warning system. Furthermore, the Board of Commissioners shall evaluate the SPI's role effectiveness and report its results to the Shareholders.	Telah dilakukan pemberdayaan penguatan posisi Satuan Pengawasan Internal (SPI) dalam rangka *early warning system.* It has been done empowerment strengthening the position of Internal Supervision Unit (SPI) in the framework of early warning system.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
11	Melanjutkan langkah dan tahapan menuju *holding* maritim, termasuk meningkatkan koordinasi dengan *stakeholders.* Continuing steps and stages towards maritime holding, including for improving coordination with stakeholders. Melakukan langkah-langkah persiapan dalam rangka pembentukan *Holding* rumah Sakit BUMN dan melakukan koordinasi dengan PT Pertamina (Persero) selaku koordinator pembentukan *Holding* Rumah Sakit BUMN dimaksud. Conducting the preparatory steps in the form of SOE Holding hospitals establishment and coordinating with PT Pertamina (Persero) as the coordinator of the State Owned Enterprise Holding Hospital establishment.	Pembentukan *Holding* Rumah Sakit BUMN telah dilakukan dengan PT Pertamina Bina Medika selaku Holding Induk Rumah Sakit sesuai Surat Menteri BUMN No. S-736/MBU/12/2016 tanggal 21 Desember 2016 tentang Pembentukan *Holding* Rumah Sakit BUMN. Saat ini sedang dibuat Perjanjian Kerjasama (PKS) antara PT Pertamina Bina Medika dengan PT RS. PELNI. SOE Hospital Holding establishment has been done with PT Pertamina Bina Medika as Main Holding of Hospital according to Letter of Minister of State-Owned Enterprises No. S-736/MBU/12/2016 dated December 21, 2016 about Establishment of Holding of State-Owned Hospital. There is currently the Cooperation Agreement (PKS) between PT Pertamina Bina Medika with PT RS. PELNI.
12	Direksi agar memperhatikan temuan dan rekomendasi auditor internal maupun eksternal yang belum dapat terselasaikan hingga tahun 2016 (dua ribu enam belas) dan menjadikan hal tersebut sebagai target untuk dilakukan penyelesaian pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas). The Board of Directors is to observe the findings and recommendations of internal and external auditors that have not been able to finished until 2016 (two thousand and sixteen) and making this as a target for completion in 2017 (two thousand and seventeen).	Sudah dilakukan *review* atas rekomendasi temuan untuk diusulkan selesai untuk temuan auditor internal maupun eksternal. Terdapat 70 rumah sakit yang dikelola oleh BUMN yang dijadikan satu menjadi *holding* yang dinamakan *Indonesia Healthcare Corporation* (IHC) The review has been performed on the recommendation of the findings to be completed for the findings of internal and external auditors. There are 70 hospitals conducted by state-owned enterprises (SOEs) that are made into one holding the so-called Indonesia Healthcare Corporation (IHC).
13	Terkait PKBL: Related to Community Development Program: • Menyampaikan laporan berkala secara tepat waktu sesuai yang diatur dalam Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal tiga Juli dua ribu lima belas (03-07-2015) tentang PKBL BUMN melalui Portal PKBL dengan alamat http://pkbl.bumn.go.id. Submitting periodic reports in a timely manner as stipulated in the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-09/MBU/07/2015 dated on July 3, two thousand and fifteen (03-07-2015) about Community Development Program of SOE through PKBL Portal with address http: //pkbl.bumn.go.id. • Menganggarkan program BL yang diprioritaskan pada kegiatan untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia dalam rangka membantu menurunkan angka kemiskinan melalui elektrifikasi rumah tangga, penyeriaan sarana air bersih dan MCK bagi masyarakat. Budgeting the priority Community Development programs on activities for improving the human development index in order to help reducing poverty through household electrification, clean water facilities and public toilets for the community. • Memprioritaskan penyaluran PK dan BL di daerah wilayah kerja perusahaan atau kegiatan yang berkaitan dengan rantai nilai/pasok perusahaan dalam skema klaster sehingga dapat mendorong peningkatan kualitas hidup masyarakat dan meningkatkan nilai perusahaan secara berkesinambungan sekaligus untuk memitigasi risiko gagal bayar. Penyaluran dapat melibatkan lembaga yang mempunyai kompetensi seperti peguruan tinggi dalam hal pendampingan. Prioritizing the PK and BL distribution in the Company work or activities areas related to the company's value chain / supply in the cluster scheme so that can encourage the people's quality of life improvement and increase the Company values on a continuous basis as well as to mitigate the risk of default. Distribution may be involving institutions that have competencies such as college in terms of mentoring.	PKBL PT PELNI (Persero) sampai dengan saat ini dan ke depannya akan tetap menyampaikan laporan tepat waktu sesuai dengan ketetuan-ketentuan yang berlaku. PKBL of PT PELNI (Persero) in nowadays and future will still deliver the report on time in accordance with the applicable provisions. PKBL PT PELNI (Persero) telah menganggarkan program BL yang diprioritaskan pada pelestarian lingkungan dan pembangunan daerah tertinggal (3T), seperti penyediaan sarana air bersih dan MCK bagi masyarakat yang membutuhkan. PKBL of PT PELNI (Persero) has budgeted priority BL program on environmental conservation and development in underdeveloped areas (3T), such as the provision of clean water facilities and toilets for people in those areas. PKBL PT PELNI (Persero) di tahun 2018 tetap akan memprioritaskan penyaluran PKBL di wilayah operasi perusahaan sehingga meningkatkan taraf hidup masyarakat dengan membentuk cluster mitra binaan agar memudahkan pendampingan atau monitoring mitra binaan untuk mitigasi risiko gagal bayar. PKBL of PT PELNI (Persero) in 2018 will still prioritize channeling PKBL in the company's operational area so can improve the living standard of the community by forming a partner cluster built to facilitating assistance or monitoring the partner for risk mitigation that failed to pay.
14	Direksi agar memperhatikan dan menindak lanjuti saran dan rekomendasi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dalam pelaksanaan RKAP Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) sebagaimana disampaikan melalui surat akta No. 01/DK/I-2017 tanggal empat Januari dua ribu tujuh belas (04-01-2017). The Board of Directors is to observe and follow up on the suggestions and recommendations of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) in the Community Development Program 2017 implementation (twelve seventeen) as submitted by deed No. 01/DK/I-2017 dated on January 4, two thousand and seventeen (04-01 -2017).	Telah dilaksanakan sesuai Arahan RUPS. It has been implemented according to the GMS Direction

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
15	Buku RKAP, RKA PKBL, RKA Dewan Komisaris dan KPI *(Key Performance Indicators)* Dewan Komisaris Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) yang telah disetujui dan disahkan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Keputusan RUPS ini dan menjadi pedoman bagi Direksi dalam melaksanakan program kerja dan target kinerja pada tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) serta sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. The Company Work and Budget plan book, RKA PKBL, RKA of Board of Commissioners and KPI (Key Performance Indicators) of the Board of Commissioners for the year of 2017 (two thousand and seventeen) have been approved and ratified by the General Meeting of Shareholders (GMS), constituting as an integral part of this resolution of GMS Decision and becoming the guidance for the Board of Directors in implementing the work program and performance targets in 2017 (two thousand and seventeen) as well as monitoring and supervising the facilities for the Board of Commissioners.	Telah dilaksanakan sesuai Arahan RUPS. It has been implemented according to the GMS Direction
16	Terkait dengan kegiatan PT PELNI (Persero) yang dominan merupakan kegiatan PSO, dimana Kinerja operasionalnya lebih dari 50% (lima puluh persen) ditahun 2016 (dua ribu enam belas) dan 2017 (dua ribu tujuh belas) masih dari PSO atau Subsidi, sehingga diharapkan Manajemen dapat memisahkan kegiatan kegiatan terkait PSO dan kegiatan Non PSO, termasuk pada Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) agar penyerapan subsidi dipisahkan/ dikeluarkan. Demikian pula pada KPI PT PELNI (Persero), diharapkan akuntansi dan perhitungannya tanpa PSO. Relating to PT PELNI (Persero) dominant activities are the PSO activity, where operational performance is more than 50% (fifty percent) in 2016 (two thousand sixteen) and 2017 (seventeen seventeen) remained from PSO or Subsidy, so that, Management is expected to separate activities related to PSO and non PSO activities, including Partnership and Community Development Program (PKBL) for the absorption of subsidies must be separated/issued. Similarly, KPI of PT PELNI (Persero) accounting and calculation is expected without PSO. Terkait dengan Dana Penyertaan Modal Negara (PMN) baik cash maupun *non cash*, Direksi diharapkan segera menindaklanjuti dan melaporkannya kepada pemegang saham. Relating to Government Capital (PMN) Fund either cash or non cash, Directors are expected to follow up and report it to shareholders.	Dalam penghitungan penyerapan PSO, divisi PSO telah memisahkan komponen biaya yang ditanggung PSO dan yang tidak ditanggung *(deductable cost & non deductable cost)*. In the calculation of PSO absorption, the PSO division had separated the cost components covered by the deductable and the non-deductable cost of PSO Laporan penggunaan Dana PMN telah dilaporkan kepada Pemegang Saham setiap Triwulan dan telah diupload dalam Portal FIS BUMN. The report of PMN Fund usage has been reported to the Shareholders every Quarter and has been uploaded in FIS BUMN portal.
17	Secara terperinci sesuai Proposal PT PELNI (Persero) sebelumnya serta selaras dengan tujuan diberlakukannya Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia No. 72-Tahun 2016 (dua ribu enam belas), tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 (dua ribu lima) Tentang Tata cara Penyertaan dan Penata usahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas. In detail, according to the previous PT PELNI (Persero) Proposal and in line with the purpose enactment of Government Regulation (PP) of the Republic of Indonesia No. 72-Year 2016 (two thousand six), on Amendment to Government Regulation Number 44 Year 2005 about State Capital Inclusion and Administration Procedures in State-Owned Enterprises And Limited Liability Company.	

RUPS LAPORAN TAHUNAN 2016

Agenda dan Keputusan RUPST 2016

Pada RUPS Laporan Manajemen Tahun Buku 2016 yang diselenggarakan pada tanggal 16 Mei 2017 telah diagendakan dengan keputusan sebagai berikut:

GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS FOR ANNUAL REPORT 2016

Agenda and Resolution of 2016 AGMS

At the GMS of Management report for fiscal year 2016 that held on May 16, 2017 has been scheduled with the following resolutions:

No No	Agenda RUPS Tahunan 2016 AGMS 2016 Agenda	Keputusan Decision
1	Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) termasuk Laporan Pelaksanaan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian untuk Tahun Buku yang Berakhir pada Tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12- 2016) serta Pengesahan Laporan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). The Annual Report for the Fiscal Year 2016 (two thousand and sixteen)approval including the supervisory duties implementation Report of the Board of Commissioners and Ratification for The Consolidated Financial Statements Ended on December 31, 2016 and the Ratification for Partnership and Community Development Program Report for the Fiscal Year 2016 (two thousand sixteen)	Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan termasuk Laporan Tugas Pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Komisaris untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12-2016), dan mengesahkan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tanggal tiga puluh satu Desember dua ribu enam belas (31-12- 2016) yang telah di audit oleh Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra dengan pendapat wajar dalam semua hal yang material sebagaimana Laporan Auditor Independen No. DSI.IS/HO/023.PELNI-LAI/17 tanggal dua puluh tujuh Februari dua ribu tujuh belas (27-02- 2017), Approving the Company Annual Report including the Supervisory Reports which have been performed by the Board of Commissioners for the Fiscal Year ended on December 31, 2016, and ratifying the Consolidated Financial Statements of the Company for the Fiscal Year ended on December 31, 2016 which has been audited by Djoko, Sidik & amp; Indra Public Accounting Firm with reasonable opinion in all of material matters as stated on independent auditor's report No. DSI.IS/HO/023.PELNI-LAI/17 dated on 27 February 2017,
2	Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perseroan untuk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). The Company's Net Income usage determination for the Fiscal Year 2016.	Menetapkan penggunaan laba yang dapat di distribusikan kepada pemilik entitas induk Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas) sebesar Rp248.402.904.439 (dua ratus empat puluh delapan Miliar empat ratus dua juta sembilan ratus empat ribu empat ratus tiga puluh sembilan rupiah sebagai cadangan Determining the use of profit which may be distributed to the owner of the entity for the fiscal year 2016 of Rp248,402,90,439 as reserves
3	Penetapan Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk Tahun Buku 2017 (dua ribu tujuh belas) dari Laporan Keuangan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan Tahun Buku-2017 (dua ribu tujuh belas). Determination of a Public Accountant to Audit the Company Consolidated Financial Statements for the Fiscal Year 2017 and Financial Report of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year 2017.	Dewan Komisaris diminta untuk melakukan seleksi Kantor Akuntan Publik (KAP) yang akan melakukan audit Laporan Keuangan Perseroan serta Pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Tahun Buku yang berakhir pada tiga puluh satu Desember dua ribu tujuh belas (31-12- 2017) dengan berpedoman pada ketentuan yang berlaku. Hasil seleksi Dewan Komisaris agar disampaikan kepada Rapat Umum Pemegang Saham. The Board of Commissioners was required to conduct the selection of Public Accounting Firm (KAP) which will audit the Company's Financial Report and the Implementation of Partnership and Community Development Program for the Fiscal Year ended on December 31, 2017 based on the prevailing regulations. The selection results of the Board of Commissioners shall be submitted to the General Meeting of Shareholders.
4	Penetapan Tantiem Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) Determination of Tantiem for Book Year 2016, Salary, Honorarium and Allowances and Other Facilities for Board of Directors and Board of Commissioners Members for the Year 2017	Tantiem Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas), Gaji, Honorarium dan Tunjangan serta Fasilitas Lainnya bagi Anggota Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun 2017 (dua ribu tujuh belas) ditetapkan dalam keputusan tersendiri. Tantiem for fiscal Year 2016, Salary, Honorarium and Allowances and Other Facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners members for the Year 2017 which set out in a separate decision.
5	Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Tambahan Penyertaan Modal Negara (PMN) Tahun Buku 2016 (dua ribu enam belas). Accountability Report on the Fund Usage Realization of Additional State Equity for the Fiscal Year 2016.	Menerima laporan realisasi penggunaan tambahan dana Penyertaan Modal Negara yang berasal dari APBN Tahun Anggaran 2015 (dua ribu lima belas), untuk periode tahun buku 2016 (dua ribu enam belas). Receiving the report about the Fund usage realization of additional State Equity Participation from The Indonesian Budget for Fiscal Year 2015, for the fiscal year 2016 period.

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

Status dan Tindak Lanjut Hasil Keputusan RUPS Tahunan 2016

Pada RUPS Laporan Manajemen tersebut telah dihasilkan arahan RUPS dengan status tindak lanjut sebagai berikut:

Status and Follow up for The Resolution results of the 2016 Annual GMS

In the GMS of the Management Report has been generated the direction of GMS with follow-up status as follows:

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
1	RKAP dan RKA PKBL Tahun 2016 yang disahkan merupakan pedoman kerja dalam pengelolaan perusahaan oleh Direksi dan sebagai sarana pemantauan dan pengawasan bagi Dewan Komisaris. Untuk memudahkan pengelolaan dan pengawasan, maka RKAP Tahun 2016 agar dirinci dalam Rencana Kerja Operasional (RKO) bulanan dengan mengupayakan pendapatan merupakan target minimal dan peningkatan biaya harus lebih rendah daripada peningkatan pendapatan. The Company Budget Plan and RKA PKBL had been approved in Year 2016, that are the work guidelines for the Company management by the Board of Directors and as a means of monitoring and supervision for the Board of Commissioners. To facilitate the management and supervision, the Company Budget Plan of 2016 to be detailed in the monthly Operational Work Plan (RKO) by seeking revenue was the minimum target and the cost increase that should be lower than the increase of revenue.	RKAP tahun 2016 telah dijabarkan secara bulanan. The Company Budget Plan 2016 had been mounthly elaborated
2	Kesanggupan Direksi untuk merealisasikan target-target dalam RKAP Tahun 2016 dan dituangkan dalam Kontrak Manajemen yang terdiri dari beberapa indikator kinerja kunci (KPI) yang dijabarkan dan diterapkan ke seluruh unit perusahaan. The Board of Directors' ability to realize the targets in the Company Budget Plan of 2016 and set forth in the Management Contract consisting of several key performance indicators (KPI) that are elaborated and applied to all of the company unit.	KPI telah dijabarkan dan dilakukan penandatanganan kontrak manajemen antara Direksi dengan Senior Manager, Manager dan seluruh pegawai. Key Performance Indikator has been elaborated and undertaken the signing of management contract between the Board of Directors, Senior Manager, Manager and all employees.
3	RKAP Tahun 2016 ini merupakan bagian dari Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) tahun 2016-2018. Direksi diminta untuk segera menyampaikan RJPP tahun 2016-2018 kepada Pemegang Saham. The 2016 RKAP is part of the Company's Long Term Plan (RJPP) 2016-2018. The Board of Directors is required to immediately submit the Company's Long Term Plan of 2016-2018 to the Shareholders.	RJPP tahun 2016-2018 telah disampaikan kepada Pemegang Saham dan sedang menunggu pembahasan lanjutan RJPP tahun 2016-2018. The Company's long Term Plan of 2016-2018 has been submitted to Shareholders and awaiting further discussion.
4	Direksi diminta untuk membuat MPTI (*master plan* teknologi informasi) selaras dengan RJPP (Rencana Jangka Panjang Perusahaan) paling lambat Februari 2016 sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN Nomor:PER-02/MBU/2015 tanggal 27 Februari 2015. The Board of Directors is required to make the MPTI (information technology master plan) in line with RJPP (The Company's long term plan) is at the latest February 2016 pursuant to Regulation of Minister of SOE Number PER-02 / MBU / 2015 dated February 27, 2015.	Telah dibuat *Master Plan* dan Tata Kelola Teknologi Informasi. Master Plan and Information Technology Governance has been created
5	Direksi agar konsisten dalam melengkapi pengisian portal-portal BUMN, yakni Portal *Financial Information System,* Portal Aset, Portal SDM, dan Portal Publik. Pemutakhiran data dalam portal tersebut agar dilaporkan dalam laporan kinerja triwulanan. The Board of Directors to be consistently completing the filling of SOE portals, namely Financial Information System, Asset, Human Resource, and Public Portal. Updating data within the portal to be reported in quarterly performance reports.	Telah dilaksanakan pengisian data sampai dengan laporan unaudit tahun 2016 pada portal BUMN. Updating data has been conducted, up to 2016 Audit Report on SOE Portal.
6	Sesuai dengan ketentuan dalam pasal 65 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005 tentang Pendirian, Pengurusan, Pengawasan, dan Pembubaran BUMN, Direksi diminta untuk melakukan pemisahan pembukuan mengenai penugasan tersebut dengan pembukuan dalam rangka pencapaian sasaran usaha perusahaan. Pemisahan pembukuan tersebut agar mulai dilakukan dalam detail breakdown RKAP 2016 serta pelaporan kinerja baik triwulanan maupun tahunan. In accordance with the provisions of Article 65 paragraph (5) of Government Regulation No. 45/2005 on the Establishment, Management, Supervision and Dissolution of SOEs, the Board of Directors is required to separate the books of accounting with bookkeeping in order to achieve the company's business objectives. Bookkeeping separation to be done in detail breakdown The Company's Budget Plan 2016 and reporting performance either quarterly or annual.	Secara pelaporan manajemen telah dilakukan pemisahan pembukuan PSO baik secara bulanan, triwulan maupun tahunan dan telah dipisahkan sesuai dengan Audit BPK-RI. Management reporting has been done separation of PSO bookings on a monthly, quarterly and annual basis and has been separated in accordance with the audit from Supreme Audit Agency.
7	Direksi diminta untuk menjalankan program BUMN bersih yang mengacu kepada Surat Edaran Menteri BUMN No. SE/05/MBU/2015 tanggal 20 September 2015 tentang *Road Map* menuju BUMN Bersih dan Surat No. S-684/MBU/2015 tanggal 12 November 2015. The Board of Directors is required to perform BUMN Bersih program referring to the Minister of SOE Letter No. SE-05/MBU/2015 dated September 20, 2015 on Road Map towardBUMN Bersih and Letter No. S-684 / MBU / 2015 dated November 12, 2015.	Telah dilaksanakan *assesment* oleh BPKP mengenai Pelaksanaan BUMN Bersih pada PT PELNI (Persero). Assessment had been conducted by State Development Audit Agency regarding to BUMN Bersih implementation on PT PELNI (Persero).

RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
General Meeting of Shareholders

No No	Arahan RUPS RKAP Direction for The GMS of CBP	Status Tindak Lanjut Follow-up Status
8	Dalam rangka meningkatkan pengawasan atas Penyelesaian Rekening Dana Investasi (RDI) dan *Soft Loan Agreement* (SLA), sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 17/PMK/05/2007 tanggal 19 Februari 2007 serta Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. 31/PB/2007, RKAP agar memuat informasi mengenai posisi RDI dan SLA, skema rencana dan jadwal penyelesaian, serta informasi yang relevan lainnya dalam satu bab tersendiri dan menjadi bagian tak terpisahkan dari RKAP Tahun 2016. In order to improve the supervision on the Settlement of Investment Fund Account (RDI) and Soft Loan Agreement (SLA), pursuant to the Minister of Finance Regulation No. 17/PMK/05/2007 dated February 19, 2007 and Director General of Treasury Regulation No. 31/PB/2007, the Company Budget Plan includes information about RDI and SLA positions, plan schemes and completion schedules, as well as other relevant information in a separate chapter become an integral part of the Company Budget Plan of 2016.	Telah mendapat persetujuan oleh Menteri Keuangan sesuai No. S-608/MK.05/2016 tanggal 7 Agustus 2016 perihal persetujuan penyelesaian piutang Negara pada PT PELNI (Persero). Telah disahkan sesuai PP Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT PELNI (Persero). It has been approved by the Minister of Finance in accordance with No. S-608/MK.05/2016 dated August 7, 2016 regarding to the approval of the settlement of state receivables at PT PELNI (Persero). It has been ratified pursuant to Government Regulation Number 87 Year 2016 About Addition of State Equity Participation of Republic of Indonesia Into Share Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT PELNI (Persero).
9	RKAP bersifat fleksibel sehingga apabila terdapat perubahan asumsi atau kondisi tertentu diluar kendali manajemen yang berdampak signifikan terhadap target-target, maka RKAP tersebut dapat segera diajukan revisi kepada Pemegang Saham setelah terlebih dahulu mendapat rekomendasi Dewan Komisaris termasuk penyesuaian KPI. The Company's Budget Plan is flexible so that if there is a change of certain assumptions or conditions beyond management control which have significant impact to the targets, the Company's Budget Plan can be submitted to the Shareholders immediately after obtaining recommendation from the Board of Commissioners including the Key Performance Indicator adjustment.	Telah dilaksanakan revisi RKAP, sesuai surat persetujuan pemegang saham No. S-531/MBU/09/2016 Perihal Persetujuan Revisi RKAP Tahun 2016 PT PELNI (Persero). The Company's Budget Plan revision had been conducted, in accordance with shareholder approval letter No. S-531/MBU/09/2016 regarding to the Company's Budget Plan 2016 Revision Approval of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
10	Dalam pengadaan kapal agar didasarkan pada studi kelayakan yang memadai. Selain itu dalam pelaksanaannya agar senantiasa mengutamakan prinsip transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas, sumber pembiayaan yang paling menguntungkan serta mempertimbangkan risiko-risiko termasuk operasional dan keuangan. In ship procurement is based on an adequate feasibility study. Therefore, in its implementation always prioritizes the principles of transparency, prudence, accountability, the most profitable source of financing and consider the risks including operational and financial.	Telah dibuat studi kelayakan terkait rencana pengadaan kapal dan telah dibuat SOP pengadaan kapal dengan BPKP. A feasibility study had been made regarding to the ship procurement plan and SOP of Ship procurement with State Development Audit Agency.
11	Direksi diminta untuk melaksanakan perawatan dan *docking* kapal sesuai dengan jadwal yang direncanakan sehingga dapat memaksimalkan produksi dan pendapatan perusahaan serta mengendalikan biaya pemeliharaan dan *docking* kapal. The Board of Directors is required to carry out maintenance and docking of the vessel in accordance with the planned schedule so can maximize the production and income of the company and control the cost of ship maintenance and docking.	Pelaksanaan *dock* perawatan pada saat *low session.* Implementation of maintenance dock is at low session.
12	Direksi diminta untuk mengoptimalkan anggaran investasi, dimana setiap rencana investasi agar ditujukan untuk menjaga tingkat pertumbuhan serta memperbaiki mutu layanan perusahaan. Directors are required to optimize the investment budget, whereby each investment plan is aimed for maintaining the growth rate and improving the quality of the company's services.	Realisasi investasi hanya 67,66% dari anggaran karena keterbatasan *cash flow* perusahaan. Investasi pengadaan kapal Tol Laut belum dapat dilaksanakan menungggu pencairan dana PMN dari Pemerintah. Investment realization was only 67.66% from the budget due to limited cash flow of the Company. Investment in the procurement of Tol Laut ships that cannot be implemented because of awaiting the PMN funds disbursement from the Government.
13	Direksi diminta untuk memperhatikan saran dan pendapat Dewan Komisaris, sebagaimana yang telah disampaikan dalam suratnya No. 76/DK/XII-2015 tanggal 17 Desember 2015. Tanggapan Dewan Komisaris tersebut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan RUPS ini. The Board of Directors is requested to pay attention to the advice and opinion from the Board of Commissioners as stated in No. 76/DK/XII-2015 dated December 17, 2015. The response of the Board of Commissioners is an integral part of this GMS Decision.	Dilaksanakan sesuai arahan RUPS. It has been conducted along with the referrals of GMS .
14	Buku RKAP tahun 2016 yang disampaikan oleh Direksi kepada Pemegang Saham dengan memperhatikan pembahasan pembahasan dalam RUPS ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan RUPS ini. The Company's Budget Plan Book of 2016 had been submitted by the Board of Directors to Shareholders taking into account the discussions in this GMS which is an inseparable part of the resolution of this GMS.	Dilaksanakan sesuai arahan RUPS. It has been conducted along with the referrals of GMS .

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

Sesuai dengan fungsi dan kewenangan yang tertuang dalam anggaran Dasar Perseroan, Dewan Komisaris bertanggung jawab atas fungsi pengawasan atas pelaksanaan strategi dan pengelolaan Perseroan oleh Direksi serta pemberian rekomendasi pada Direksi guna memastikan kesinambungan aktivitas bisnis. Selain itu, Dewan Komisaris juga diharapkan mampu melakukan pemantauan atas pelaksanaan dan efektivitas penerapan GCG termasuk di dalamnya memberikan saran konstruktif untuk penyempurnaan implementasi GCG oleh Perseroan.

In accordance with the functions and authorities contained in the Company's Articles of Association, the Board of Commissioners is responsible for the oversight function of the Company's strategy and management implementation by the Board of Directors and the recommendation to the Board of Directors to ensure the continuity of business activities. In addition, the Board of Commissioners is also expected to monitor the implementation and effectiveness of GCG implementation, including providing constructive advice for the improvement of GCG implementation by the Company.

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DEWAN KOMISARIS

Pengangkatan dan Pemberhentian Dewan Komisaris ditentukan dalam Rapat Umum Pemengang Saham (RUPS). Keputusan pengangkatan dan pemberhentian Dewan Komisaris berpedoman pada Anggaran Dasar PT PELNI (Persero), Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroran Terbatas, Undang-Undang No. 19 tahun 2003 tentang BUMN, Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2009 tentang Pedoman Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Dewan Komisaris BUMN serta Board Manual Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

BOARD OF COMMISSIONERS APPOINTMENT AND DISCHARGE

Appointments and Dismissals of the Board of Commissioners are determined at the General Meeting of Shareholders (GMS). The resolution on the appointment and dismissal of the Board of Commissioners is guided by the Articles of Association of PT PELNI (Persero), Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company, Law Number 19 of 2003 on SOE, Minister of SOE Regulation No. PER-04/MBU/2009 on Board of Directors and Board of Commissioners Appointment and Discharge in SOE and PT PELNI (Persero) Articles of Association.

KOMPOSISI DAN PEMBAGIAN TUGAS DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2017, komposisi Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) mengalami perubahan. Pada bulan Desember 2017 telah terjadi pergantian Komisaris Independen. Per 31 Desember 2017 susunan komposisi Dewan Komisaris PT PELNI (Pesero) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

BOARD OF COMMISSIONERS COMPOSITION AND SEGREGATION OF DUTY

During 2017, the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) has changed. In December 2017, there has been a change of Independent Commissioners. As of December 31, 2017 the composition of the Board of Commissioners of PT PELNI (Pesero) can be seen in the table below:

No No	Nama Komisaris Name of Commissioner	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Jabatan Date of Appointment	SK Pengangkatan Appointment Decree
1	H. Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commisioner	17 November 2015 November 17, 2015	SK-232/MBU/11/2015
2	Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commisioner	08 Desember 2017 December 08, 2017	SK-264/MBU/12/2017
3	Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	17 November 2015 November 17, 2015	SK-232/MBU/11/2015
4	Sudarto	Komisaris Commissioner	17 September 2014 September 17, 2014	SK-218/MBU/2014
5	Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	08 Januari 2014 January 08, 2014	SK-01/MBU/2014

Integritas, kompetensi, reputasi, dan pengalaman adalah nilai yang dimiliki Seluruh anggota Dewan Komisaris Perseroan untuk dapat menjalankan tugasnya masing - masing.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DEWAN KOMISARIS

Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris menurut pedoman kerja Dewan Komisaris PT PELNI (Persero):

1. Tugas Pengawasan.
2. Tugas dalam Rapat Umum Pemegang Saham.
3. Tugas dalam Manajemen Risiko.
4. Tugas dalam Sistem Pengendalian Internal.
5. Tugas dalam Keterbukaan dan Kerahasiaan Informasi.
6. Tugas dalam Sistem Teknologi Informasi.
7. Tugas dalam Pengelolaan Sumber Daya Manusia.
8. Tugas dalam Pengadaan Barang dan Jasa .
9. Tugas dalam Sistem Pengelolaan dan Tindak Lanjut Pelaporan Pelanggaran *(Whistle Blowing).*
10. Tugas dalam pengelolaan Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
11. Tugas dalam Pemilihan calon anggota Direksi dan Dewan Komsiaris Anak Perusahaan/Perusahaan Patungan.
12. Tugas menilai kinerja Direksi.
13. Tugas dalam Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi.
14. Tugas dalam Nominasi dan Seleksi Calon Direksi.

Dalam melaksanakan tugasnya, masing-masing Dewan Komisaris memiliki tugas dan tanggung jawab sesuai dengan bidang dan keahliannya. Berikut adalah tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugasnya:

All of the Board of Commissioners members have necessary integrity, competency, reputation and experience as well as expertise to exercise their function and duty.

BOARD OF COMMISSIONERS DUTIES AND RESPONSIBILITIES

Duties and responsibilities of the Board of Commissioners according to the Board Manual of the Board of Commissioners PT PELNI (Persero) are following:

1. Duties of Supervision.
2. Duties in the General Meeting of Shareholders.
3. Tasks in Risk Management.
4. Tasks within the Internal Control System.
5. Tasks in Transparency and Confidentiality of Information.
6. Tasks in Information Technology Systems.
7. Tasks in the Management of Human Resources.
8. Assignment in Procurement of Goods and Services.
9. Tasks in the Management and Follow-up Reporting System of Breach (Whistle Blowing).
10. Duties in the management of a Subsidiary/Joint Venture
11. Duties in the Election of candidates for members of the Board of Directors and Board of Commissioners of Subsidiaries / Joint Ventures..
12. The task of assessing the performance of the Board of Directors.
13. Duties in the Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors.
14. Duties in Nomination and Selection of Prospective Directors.

In performing their duties, each Board of Commissioner has duties and responsibilities in accordance with his area and expertise. The following are the duties and responsibilities of the Board of Commissioners in performing their duties:

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

No No	Nama Name	Jabatan Position	Tugas dan Tanggung Jawab Duty and Responsibility
1	H. Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commisioner	Mengkoordinir pelaksanaan tugas dan kegiatan pengawasan Dewan Komisaris serta memberikan arahan kepada Direksi terhadap hal-hal strategis dan *Good Corporate Governance.* To coordinate Board of Commissioners duty and activity implementation as well as recommendation to the Board of Directors regarding strategic issues and Good Corporate Governance
2	Johannes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang pengawasan internal dan akuntansi serta sebagai Ketua Komite Audit. Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on internal audit and accounting fields and Chairman of Audit Committee.
3	Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang sumber daya manusia, hukum, dan organisasi serta sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko. Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on human resources, legal and organization fields as well as Chairman of Risk Policy Committee.
4	Sudarto	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang armada dan teknik serta pelaksanaan sistem teknologi informasi serta melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang usaha dan komersial. Supervisory and advisory to the Board of Directors on fleet & technic and Information technology system implementation field and Supervisory and advisory to the Board of Directors on business and Commercial fields.
5	Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	Melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian arahan kepada Direksi terhadap pengurusan usaha Perseroan bidang keuangan dan anggaran. Supervisory and advisory duties to the Board of Directors on fiance and budget.

PROGRAM PENGENALAN DEWAN KOMISARIS

Perseroan menyelenggarakan program pengenalan Dewan Komisaris agar Dewan Komisaris yang berasal dari berbagai latar belakang dan pengalaman dapat mengenal dan memahami kegiatan dan kondisi Perseroan. Program pengenalan Dewan Komisaris diadakan ketika ada pengangkatan anggota Dewan Komisaris baru. Tanggung jawab untuk mengadakan program pengenalan tersebut berada pada Sekretaris Perusahaan.

Materi program pengenalan setidaknya memuat:
1. Prinsip-prinsip GCG.
2. Gambaran umum Perseroan.
3. Kewenangan yang didelegasikan.
4. Tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris.

Pada tahun 2017, program orientasi Dewan Komisaris diberikan kepada Anggota Dewan Komisaris baru yaitu Johanes Widodo Hario Mumpuni sebagai Komisaris Independen Perseroan.

BOARD OF COMMISSIONERS ORIENTATION PROGRAM

The Company conducts an introduction to the Board of Commissioners program to enable the Board of Commissioners from various backgrounds and experiences to be familiar with and understand the Company's activities and conditions. The responsibility for conducting the recognition program rests with the Corporate Secretary or any person who performs the functions of the Corporate Secretary.

Introduction program material at least includes:
1. GCG Principles.
2. Company overview.
3. Delegated authority.
4. Duties and responsibilities of the Board of Directors and Commissioners.

In 2017, the Board of Commissioners orientation program was provided for new Board of Commisioners members Johanes Widodo Hario Mumpuni as Company's Independent Commissioner.

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DEWAN KOMISARIS

Selama tahun 2017, Dewan Komisaris tidak mengikuti program pelatihan dan pengembangan Dewan Komisaris.

PELAKSANAAN KEGIATAN DEWAN KOMISARIS 2017

Berdasarkan pada tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana diatur dalam pasal 15 Anggaran Dasar Perseroan, kegiatan yang dilakukan Dewan Komisaris pada tahun 2017, meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Pemberian tanggapan atas Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) dan Rencana Kerja dan Anggaran PKBL (RKA-PKBL) PT PELNI (Persero) Tahun 2017.
2. Pengawasan atas pelaksanaan RKAP tahun 2017.
3. Pengawasan dan pemberian nasihat atas hasil audit dan *review* pengendalian intern.
4. Pengawasan dan pemberian nasihat atas penyusunan RKAP tahun 2018.
5. Pemantauan penerapan *Good Corporate Governance* Dewan Komisaris.
6. Pemantauan pengendalian internal Perseroan.
7. Memberikan usulan penunjukan dan evaluasi penugasan Kantor Akuntan Publik (KAP).
8. Pemantauan pengembangan SDM dan kepatuhan hukum Perseroan.
9. Pemantauan pengelolaan risiko Perseroan.
10. Pemantauan kinerja operasional Perseroan.
11. Pemantauan pelaksanaan kewajiban pelayanan umum.
12. Pemantauan penggunaan dan penyusunan anggaran Perseroan.
13. Pemantauan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia (SAK).
14. Pemantauan kehandalan alat produksi.
15. Pemantauan pelaksanaan sistem teknologi informasi.

REKOMENDASI DAN KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS TAHUN 2017

Sesuai dengan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) selama Tahun Buku 2017 No. 26/DK/V/2018, Dewan Komisaris telah memberikan Saran dan Rekomendasi atas pencapaian kinerja tahun 2017 khususnya pada poin no 8 yang berisi sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

During 2017, the Board of Commissioners did not attend the training and development program of the Board of Commissioners

BOARD OF COMMISSIONERS ACTIVITY REPORT 2017

Based on duty, authority and responsibility regualted in Article 15 of Articles of Association, the activities implemented by the Board of Commissioners in 2017 are as follows:

1. Opinion to PT PELNI (Persero) Budget Plan (RKAP) and PKBL Budget Plan (RKA-PKBL) 2017.
2. Monitoring over the implementation of RKAP 2017.
3. Supervision and advise on internal audit report and review.
4. Supervision and advise on RKAP 2018 preparation.
5. Monitoring implementation of Board of Commissioners Good Corporate Governance.
6. Monitoring the company's internal control.
7. Provide Public Accountant Firm (KAP) assignment appointment and evalaution.
8. Monitoring Human Resources development and legal compliance.
9. Monitoring risk management.
10. Monitoring operational performance.
11. Monitoring public service obligation implementation.
12. Monitoring budget realization and formulation.
13. Monitoring preparation of financial statements based on accounting standard that is generally applied in Indonesia (SAK).
14. Monitoring reliability of production tools.
15. Monitoring implementation of information technology system.

BOARD OF COMMISSIONERS RECOMMENDATION AND DECREE 2017

Pursuant to the Supervisory Report of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) during the Fiscal Year 2017 No. 26/DK/V/2018, the Board of Commissioners has provided Suggestions and Recommendations for the achievement of 2017 performance specially in point 8 which contains as follows:

DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners

a. Terkait dengan pengawasan efisiensi BBM disarankan agar Direksi tetap fokus dan tetap memperhatikan kualitas BBM yang digunakan, jangan sampai BBM yang digunakan berkualitas rendah karena justru dapat merusak mesin dan menghambat operasional kapal itu sendiri.
b. Direksi disarankan untuk menyusun *roadmap* mengenai tindak lanjut terhadap kapal-kapal yang *idle* dan justru menjadi beban bagi PT PELNI (Persero) seperti KM Jetliner. Direksi perlu segera mencari solusi yang tepat dalam upaya mengurangi beban Perseroan yang besar akibat tidak beroperasinya kapal-kapal tersebut.
c. Dengan adanya kebijakan Pemerintah untuk melakukan pembatasan jumlah penumpang, tentunya berdampak pada penurunan pendapatan bagi PT PELNI (Persero). Dewan Komisaris menyarankan kepada Direksi untuk mengantisipasi hal tersebut, salah satunya dengan mengupayakan peningkatan penghasilan di luar usaha perkapalan atau mengupayakan peningkatan angkutan barang.
d. Seiring dengan kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi waktu, mendapatkan data yang akurat dan meningkatkan kualitas pelayanan, maka Direksi diminta untuk segera merealisasikan *Information Technology* (IT) di PT PELNI (Persero) sesuai dengan *blue print* yang telah disusun sebagai landasan kebijakan atas pengembangan Teknologi Informasi tersebut.
e. Aset-aset tanah dan bangunan PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh Indonesia masih banyak yang *idle,* Direksi diminta untuk tetap mengupayakan optimalisasi terhadap aset-aset tersebut agar lebih bermanfaat dan menjadi tambahan pendapatan bagi PT PELNI (Persero). Pelaksanaan optimalisasi aset disarankan untuk tetap dilaksanakan dengan berdasarkan kajian yang matang, perkembangan optimalisasi aset tersebut diminta untuk selalu dilaporkan kepada Dewan Komisaris.
f. Direksi diminta untuk menindaklanjuti program-program dan arahan RUPS, temuan-temuan dan arahan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), temuan-temuan dan saran SPI maupun saran auditor eksternal yang melakukan audit terhadap laporan keuangan Perseroan.

a. Related to the fuel efficiency supervision, it is suggested that the Board of Directors should remain focused and pay attention to the quality of fuel used, do not use low-quality fuel because it can damage the engine and hamper the operation of the ship itself.
b. The Board of Director is advised to prepare roadmap regarding to follow up on idle ships and become a burden for PT PELNI (Persero) such as KM Jetliner. The Board of Directors has to find the right solution in an effort to reduce the large burden of the Company due to the non-operation of the ships.
c. Along with the Government's policy to limit the number of passengers, so it can affect to the decrease of income for PT PELNI (Persero). The Board of Commissioners recommends to the Board of Directors to anticipate that matters, one of them by seeking to the increase of income beyond shipping business or improving the cargo transportation.
d. Along with the need to improve time efficiency, obtaining accurate data and improving service quality, the Board of Directors is required to immediately realize Information Technology (IT) in PT PELNI (Persero) in accordance with the blue print that has been prepared as a policy base on the Information Technology develoment.
e. PT PELNI (Persero) land and building assets arround Indonesia are still idle, the Board of Directors is required to keep optimizing the assets to be more useful and an additional income for PT PELNI (Persero). Implementation of asset optimization is recommended to be carried out based on mature review basis, the optimum development of those assets is requested to always be reported to the Board of Commissioners.
f. The Board of Directors is required to follow up the programs and direction of the GMS, the findings and directives of the Supreme Audit Board (BPK), the findings and suggestions of the SPI as well as the advice from the external auditor who audits the Company financial statements.

PEDOMAN KERJA DEWAN KOMISARIS

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memiliki Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* bagi Dewan Komisaris, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Dewan Komisaris yang berisikan, antara lain:

1. Persyaratan dan Komposisi Dewan Komisaris;
2. Tanggung Jawab Dewan Komisaris;
3. Tugas dan Kewajiban Dewan Komisaris;
4. Wewenang Dewan Komisaris;
5. Hak Dewan Komisaris;
6. Rapat Dewan Komsiaris;
7. Komite-Komite Dewan Komisaris;
8. Sekretaris Dewan Komisaris;

SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Demi terciptanya fungsi dan efektivitas kerja, Dewan Komisaris dibantu oleh seorang Sekretaris. Sekretaris Dewan Komisaris Tahun 2017 dijabat oleh Nani Sukamto.

Fungsi dan tugas Sekretaris Dewan Komisaris tahun 2017 antara lain:

1. Menyiapkan bahan rapat dan menyusun risalah rapat Dewan Komisaris.
2. Melakukan tugas kesekretariatan lainnya.
3. Memberikan bantuan ringkasan laporan manajemen.
4. Mengumpulkan bahan dan informasi yang relevan dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris.
5. Melakukan koordinasi dengan Sekretaris Perusahaan tentang hal-hal yang berkaitan dengan Dewan Komisaris dan Direksi.
6. Mengadministrasikan undangan rapat Dewan Komisaris.
7. Sebagai penghubung Dewan Komisaris dan Direksi.
8. Urusan surat menyurat Dewan Komisaris.

BOARD MANUAL FOR BOARD OF COMMISSIONERS

In terms of relationship with other corporate structures regarding implementation of duty and responsibility, the Board of Commissioners has Board Manual for Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is validated under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Joint Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Working Manual (Board Manual) for Board of Directors and Board of Commissioners. The Baord Manual dicloses guideline for the Board of Commissioners, among others:

1. Board of Commissioners requirement and composition;
2. Board of Commissioners Responsibility;
3. Board of Commissioners Task and Obligation;
4. Board of Commissioners Authority;
5. Board of Commissioners Rights;
6. Board of Commissioners Meeting;
7. Committees Under the Board of Commissioners;
8. Board of Commissioners Secretary;

BOARD OF COMMISSIONERS SECRETARY

For the sake of function and effectiveness of work, the Board of Commissioners is assisted by a Secretary. Secretary of the Board of Commissioners in 2017 is served by Nani Sukamto.

Function and assignment of Board of Commissioners in 2017 are including:

1. Preparing Board of Commissioners meeting material and minutes of meeting.
2. Perform other secretariate duties.
3. Provide support to management report summary.
4. Collect relevant material and information related with Board of Commissioners duty implementation.
5. Coordinate with Corporate Secretary regarding any issue related with the Board of Commissioners and Board of Directors.
6. Administer Board of Commissioners meeting invitation.
7. As liaison officer between Board of Commissioners and Board of Directors.
8. Prepare outgoing letters and document the Board of Commissioners letters.

PROFIL SEKRETARIS DEWAN KOMISARIS

Profile of Board of Commissioners Secretary

Nani Sukamto
Sekretaris Dewan Komisaris
The Board of Commissioners Secretary

Kewarganegaraan / Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat &Tanggal Lahir / Place & DOB
Sleman, 6 Agustus 1985
Sleman, August 6, 1985

Usia / Age
Berusia 32 tahun per 31 Desember 2017
32 years old as of December 31, 2017

Domisili / Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Sekretaris Dewan Komisaris berdasarkan SK No. 03/DK/VI-2016
Appointed as The Board of Commissioners Secretary based on Decision letter No. 03/DK/VI-2016

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2007	Sarjana Hukum Universitas Gadjah Mada Bachelor of Law Gadjah Mada University

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Sekretaris Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). The Board of Commissioner Secretary at PT PELNI (Persero)
2010 - Sekarang (Present)	Analis Hukum dan Kepala Subbidang Layanan Hukum BUMN 1B Legal Analyst and Head of SOE's Services Sub Division 1B

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

KOMISARIS INDEPENDEN
Independent Commissioner

Komisaris Independen adalah anggota Dewan Komisaris yang tidak terafiliasi dengan Direksi, anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham pengendali, serta bebas dari hubungan bisnis atau hubungan lainnya yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen atau bertindak semata-mata demi kepentingan Perseroan serta dapat bertindak secara objektif dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

Independent Commissioner is a member of the Board of Commissioners who is not affiliated with the Board of Directors, other members of the Board of Commissioners and the controlling shareholder, and is free from any business relationship or other relationship which may affect his ability to act independently or act solely for the benefit of the company and can act objectively as guided by GCG principles.

Per 31 Desember 2017, Perseroan memliki 1 (satu) anggota Dewan Komisaris yang menjadi Komisaris Independen yaitu Bapak Johannes Widodo Hario Mumpuni.

As of December 31, 2017, the Company has appointed 1 (one) Board of Commissioners member, Mr. Johanes Widodo Hario Mumpuni.

KRITERIA KOMISARIS INDEPENDEN

Mengacu pada Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-83/MBU/06/2015 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Dewan Komisaris, maka Kriteria Komisaris Independen yaitu sebagai berikut:

- Bukan merupakan orang yang bekerja atau mempunyai tanggung jawab untuk merencanakan, memimpin, mengendalikan, atau mengawasi kegiatan Perseroan dalam waktu 6 (enam) bulan terakhir.
- Tidak mempunyai saham baik langsung maupun tidak langsung pada Perseroan.
- Tidak mempunyai hubungan Afiliasi dengan perseroan anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, atau Pemegang Saham Utama.
- Tidak mempunyai hubungan usaha baik langsung maupun tidak langsung yang berkaitan dengan kegiatan usaha Perseroan.

INDEPENDENT COMMISSIONER CRITERIA

Referring to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-83/MBU/06/2015 on Dismissal and Appointment of Members of the Board of Commissioners, the Criteria of Independent Commissioners are as follows:

- Not working or having responsibility to plan, manage, control or supervise the Company's activity within the last 6 (six) months.
- Not having any shares either directly or non-directly in the Company.
- Not having any affiliation with the Company, other remembers of Board of Commissioners, Board of Directors or Ultimate Shareholders.
- Not having any business affiliation either directly or non-directly related with the Company's business activity.

PERNYATAAN TENTANG INDEPENDENSI KOMISARIS INDEPENDEN

Pemenuhan Kriteria Komisaris Independen telah sesuai dengan pernyataan di atas dengan lampiran pada tabel dibawah ini.

STATEMENT OF INDEPENDENT COMMISSIONER

The fulfillment of the Criteria of Independent Commissioners is in accordance with the above statement with the attachment in the table below.

Aspek Independensi Aspects of Independence	Johannes Widodo Hario Mumpuni
Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan Direktur dan/atau anggota Dewan Komisaris lain Not having any affiliation with other Directors and/or Board of Commissioners members	V
Tidak menjabat sebagai Direksi di Perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan Not serving as Board or Directors in the Company that is affiliated with the Company	V
Tidak bekerja pada lembaga pemerintahan dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working in government agency within the last three years	V
Tidak bekerja di Perseroan atau afiliasinya dalam kurun waktu tiga tahun terakhir Not working in the Company or its affiliation within three last years	V
Tidak mempunyai keterkaitan finansial, baik langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan atau perusahaan lain yang menyediakan jasa dan produk kepada Perseroan dan afiliasinya Not having any financial affiliation either directly or non-directly with the Company or other companies providing service and product to the Company and its affiliation	V
Bebas dari kepentingan dan aktivitas bisnis atau hubungan lain yang dapat menghalangi atau mengganggu kemampuan Dewan Komisaris untuk bertindak atau berpikir secara bebas di lingkup Perseroan Free from business interest and activity or other relationships that may constraint or disrupt the Board of Commissioners' capability to act and think independently in the Company's circumstances.	V

DIREKSI
Board of Directors

Direksi adalah organ Perseroan yang menjalankan tindakan pengurusan untuk mencapai visi dan misi Perseroan demi kepentingan terbaik Perseroan. Direksi juga bertanggung jawab mewakili Perseroan baik di dalam dan di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan yang berlaku. Tiap-tiap anggota Direksi dapat melaksanakan tugas dan mengambil keputusan sesuai dengan pembagian tugas dan wewenangnya.

The Board of Directors is the organ of the Company which carries out the management actions to achieve the Company's vision and mission in the best interests of the Company. The Board of Directors is also responsible for representing the Company both inside and outside the court in accordance with the applicable Articles of Association of the Company. Each member of the Board of Directors can perform the task and make decisions according to the division of duties and authority.

PERSYARATAN, KOMPOSISI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI

Mengenai Persyaratan, Komposisi, Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, yaitu persyaratan yang harus dipenuhi oleh seorang calon Anggota Direksi meliputi persyaratan formal dan persyaratan material. Selain persyaratan formal dan material, calon anggota Direksi juga harus memenuhi persyaratan kemampuan dan kepatutan *(fit & proper test)*. Anggota Direksi wajib memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan dengan jabatannya serta pengalaman di bidang usaha Perseroan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

BOARD OF DIRECTORS APPOINTMENT AND DISCHARGE REQUIREMENT, COMPOSITION

The Terms, Composition, Appointment and Dismissal of the Board of Directors refers to Regualtion Articles of Association and Minister of SOE Regulation No. Per-03/MBU/02/2015 regarding Board of Directors Member Appointment and Discharge Requirement and Procedure. The mandatory requirement for Board of Directors member candidate includes formal and material requirements. Other than formal and material requirements, the Board of Directors member candidate shall also comply with fit and proper test requriement. The Board of Directors member shall have sufficient and relevant knowledge with their position as well as experience in the Company's business field and/or other fields that are relevant with their positions.

KOMPOSISI DIREKSI

Menurut Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. SK-148/MBU/08/2015, SK-263/MBU/12-2016, SK-210/MBU/09/2017 dan SK-62/MBU/04/2017 , susunan Direksi Perseroan per 31 Desember 2017, adalah sebagai berikut:

BOARD OF DIRECTORS COMPOSITION

Pursuant to Copy of Minister of State-Owned Enterprise Decree No. SK-148/MBU/08/2015, SK-263/MBU/12-2016, SK-210/MBU/09/2017 dan SK-62/MBU/04/2017 , the Board of Directors composition as of December 31, 2017 is as follows:

No No	Nama Direksi Name of Director	Jabatan Position	Tanggal Pengangkatan Jabatan Date of Appointment	SK Pengangkatan Appointment Decree
1	Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	26 September 2017 September 26, 2017	SK-210/MBU/09/2017
2	Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Ocean Freight and Toll Laut	21 Agustus 2015 August 21, 2015	SK-148/MBU/08/2015
3	Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	01 Desember 2016 December 01, 2016	SK-263/MBU/12-2016
4	Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	03 April 2017 April 03, 2017	SK-62/MBU/04/2017
5	Tri Andayani	Direktur Keuangan Director of Finance	03 April 2017 April 03, 2017	SK-62/MBU/04/2017
6	Ganefi	Direktur SDM dan Umum Director of HR & General Affairs	26 September 2017 September 26, 2017	SK-210/MBU/09/2017

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB DIREKSI

Dalam menjalankan tugas dan wewenang pengelolaan Perseroan, Direksi Perseroan berpedoman pada *Board Manual* yang disusun dengan memperhatikan ketentuan Undang-Undang Perseroan Terbatas, Anggaran Dasar Perusahaan dan peraturan di bidang pasar modal. Piagam ini dimaksudkan menjadi pedoman bagi Direksi dalam menjalankan peran dan tanggung jawab serta kewenangannya secara objektif dan efektif guna merealisasikan visi dan misi Perseroan.

Pembagian tugas masing-masing fungsi Direksi adalah sebagai berikut:

Direktur Utama

Tugas pokok Direktur Utama selaku anggota Direksi adalah sebagai berikut:

1. Menjalankan pengurusan Perseroan sesuai dengan peraturan yang berlaku bagi Perseroan dan melakukan tugas lain sesuai dengan yang ditetapkan oleh Pemegang Salam;
2. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh para Direktur;
3. Mengendalikan pelaksanaan tugas Internal Audit, DPA-QHSSE, *Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, Legal,* bersama dengan para Direktur dalam kedudukannya selaku Direksi Perseroan mengendalikan pelaksanaan fungsi staf Kantor Pusat;
4. Mengendalikan pelaksanaan kebijakan Direksi yang diselenggarakan oleh unit kerja Kapal dan Kantor Cabang/ *Terminal Point* serta Unit Bisnis Strategis/*Strategic Business Unit* (SBU) Perseroan secara menyeluruh.

Direktur Usaha Angkutan Penumpang

Membina pengelolaan pemasaran, operasi dan pelayanan kapal penumpang dan perintis serta keagenan & *tour* agar dicapai kinerja citra produk jasa *(brand image),* pangsa pasar *(market share),* volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa Perseroan, pendapatan usaha jasa angkutan penumpang Perseroan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal;

THE BOARD OF COMMISSIONERS TASKS AND RESPONSIBILITIES

In executing the Company's management duties and authority, the Company's Directors are guided by Board Manual composed with due regard to the Company's Limited Liability Company Law, Company's Articles of Association, and capital market regulations. The Charter is intended to serve as a guideline for the Board of Directors in carrying out its roles and responsibilities and authorities objectively and effectively in order to realize the Company's vision and mission.

As for the tasks division of each function of the Board of Directors is as follows:

President Director

The main duties of the President Director as a member of the Board of Directors are as follows:

1. Conducting the Company management in accordance with the prevailing regulations for the company and performing other tasks as specified by Shareholders;
2. Controlling the Directors policies implementation is conducted by the Board of Director
3. Controlling the Internal Audit duties implementation, DPA-QHSSE, Corporate Secretary, Corporate Planning & Risk Management, Legal, along with Directors in its position as the Company's Board of Directors controlling the implementation of Head Office staff function;
4. Controlling the Board of Directors policies implementation which is organized by the Ship and Branch / Terminal Point work units as well as the overall Business Strategic Business Unit (SBU).

Passenger Transportation Director

Fostering the marketing management, operation and service of passenger and perintis ships and for the agent & tour in order to achieve the performance of brand image, market share, service sales volume, customer service growth, optimum and prioritize safety performance of shipping, service quality and optimal service user satisfaction;

DIREKSI
Board of Directors

Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Membina pengelolaan kegiatan pemasaran angkutan barang kapal penumpang & perintis, pemasaran kapal tol laut dan temak, operasi dan pelayanan kapal tol laut & ternak serta pengembangan usaha angkutan barang & tol laut sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dapat dicapai kinerja citra produk jasa *(brand image)*, pangsa pasar *(market share)*, volume penjualan jasa, pertumbuhan pelanggan jasa Perseroan, pendapatan usaha jasa angkutan barang Perseroan yang optimal serta mengutamakan kinerja keselamatan pelayaran, kualitas layanan jasa dan kepuasan pengguna jasa yang optimal;

Direktur Armada
Membina pengelolaan kegiatan penyediaan dan penyiapan pakai sertifikat, fasilitas serta peralatan nautika, teknika, penyediaan dan modifikasi kapal, bahan bakar kapal dan surveyor serta parenting SBU Galangan PELNI Surya Surabaya agar dicapai kinerja kelaikan laut *(seaworthiness),* kesiapan pakai *(semiceability performance),* kehandalan *(reliability performance),* efektivitas dan efisiensi penyediaan serta penyiapan pakai alat produksi jasa angkutan laut Perseroan yang optimal;

Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum
Membina kegiatan pengelolaan sumber daya manusia dan organisasi, administrasi dan pelayanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan di wilayah kerja Perseroan serta pengelolaan aset dan sebagai parenting untuk SBU Hotel Bahtera sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja produktivitas sumber daya manusia dan organisasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, ketertiban dan kelancaran penyelenggaraan administrasi serta layanan umum kerumahtanggaan kantor, pengamanan dan ketertiban umum serta pemanfaatan aset pada wilayah kerja Perseroan yang optimal, mengendalikan pelaksanaan tugas Teknologi Informasi serta pengadaaa barang dan jasa.

Tol Laut & Cargo Transportation Director
Building the management of passenger & perintis ship, marketing activities, Tol Laut and Cattle ships marketing, operation and service of Tol Laut & Cattle ships and also the development of Tol Laut & freight shipping transportation business in accordance with the prevailing provisions, in order to achieve the performance of the service products image (brand image) , market share, sales volume of services, The Company customers growth for secvices, optimal corporate freight services income and prioritizing shipping safety performance, service quality and optimal service user satisfaction;

Fleet Director
Fostering the management of supply and preparatory activities using certificates, facilities and nautical equipment, technics, provision and modification of ships, ship fuel and surveyors and parenting SBU PELNI Surya Surabaya shipyard to achieve the performance of sea worthiness, semi capability performance, reliability (reliability performance), effectiveness and efficiency of the provision and preparation of the optimal production equipment of the company's sea transportation services;

Human Capital & General AffairDirector
Fostering human resource management activities and organization, administration and public service of office household, safeguarding in the Company work area and asset management and as parenting for SBU Hotel Bahtera in accordance with applicable provisions in order to achieve the productivity performance of human resources and organizational, human resources quality improvement, order and smoothness of administration implementation and public service of office household, security and general order as well as asset utilization in optimal company work area, controlling the Information Technology implementation and goods and services procurement.

Direktur Keuangan

Membina pengelolaan keuangan Perseroan yang meliputi pengelolaan kegiatan akuntansi, perbendaharaan, serta kewajiban layanan publik (*Public Service Obligation*/PSO) dan subsidi sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar dicapai kinerja pengelolaan keuangan, serta PSO dan subsidi yang optimal;

Director of Finance

Fostering the Company's financial management which includes the management of accounting activities, treasury, as well as public service obligations (PSO) and subsidies along with the prevailing provisions in order to achieve financial management performance, as well as the optimal PSO and subsidies;

PROGRAM PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN KOMPETENSI DIREKSI

Peningkatan kapabilitas dinilai penting agar Direksi dapat selalu memperbaharui informasi tentang perkembangan terkini dari bisnis Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan sebagai bentuk antisipasi atas masalah yang timbul di kemudian hari bagi keberlangsungan dan kemajuan Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS TRAINING AND COMPETENCY DEVELOPMENT PROGRAM

Capacity enhancement is deemed important for the Board of Directors to keep updating information on the latest developments of the Company's business, the prevailing laws and regulations and to anticipate future problems for the sustainability and progress of the Company.

Nama Direksi Name of Director	Jabatan Position	Program Peingkatan Kapasitas Capacity Building Program		
		Tanggal Date	Subyek Subject	Tempat Venue
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	24 Januari 2017 January 24, 2017	Pelatihan Executive Leadership Program (ELP-1) Executive Lieadership Program Training (ELP-1)	Ciawi, Bogor
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut Director of Ocean Freight and Tol Laut	24 Januari 2017 January 24, 2017	Pelatihan Executive Leadership Program (ELP-1) Executive Lieadership Program Training (ELP-1)	Ciawi, Bogor
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	24 Januari 2017 January 24, 2017	Pelatihan Executive Leadership Program (ELP-1) Executive Lieadership Program Training (ELP-1)	Ciawi, Bogor
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	24 Januari 2017 January 24, 2017	Pelatihan Executive Leadership Program (ELP-1) Executive Lieadership Program Training (ELP-1)	Ciawi, Bogor

DIREKSI
Board of Directors

PROGRAM PENGENALAN/ORIENTASI DIREKSI

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas, wajib diberikan program pengenalan dan pendalaman pengetahuan bagi Anggota Direksi Perseroan. Program Pengenalan sangat penting untuk dilaksanakan, karena Anggota Direksi dapat berasal dari berbagai latar belakang sehingga untuk dapat membentuk suatu tim kerja yang solid, Program Orientasi tersebut wajib untuk dijalankan.

Program Pengenalan yang diberikan kepada Anggota Direksi antara lain meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan hukum.
2. Pelaksanaan prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* oleh Perseroan.
3. Gambaran mengenai Perseroan berkaitan dengan tujuan, sifat, lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.

Pada tahun 2017, program orientasi Direksi diberikan kepada Anggota Direksi baru yaitu Tri Andayani dan Ganefi.

BOARD OF DIRECTORS ORIENTATION PROGRAM

For smooth duty implementation, the Board of Directors member shall be provided by orientation and knowledge development programs. The orientation program is essential to be conducted due to the Board of Directors members may be appointed from various background, therefore, to establish as solid team work, the Orientation Program becomes mandatory.

The orientation program provided to the Board of Directors members includes aspects as follows:

1. Explanation about duty and responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors based on the legal aspect.
2. Implementation of Good Corporate Governance principles by the Company.
3. Explanation about the Company in relationw ith purpose, nature, scope of activity, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plan, competitive position, risk and other strategic issues.

In 2017, the Board of Directors orientation program was provided for new Board of Directors members Tri Andayani and Ganefi.

PEDOMAN KERJA DIREKSI

Dalam menjalin hubungan yang baik dengan organ perusahaan lainnya terkait pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris dan Direksi telah memiliki Tata Laksana Kerja *(Board Manual)* bagi Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai pedoman kerja Dewan Komisaris dan Direksi yang disahkan melalui Surat Keputusan Bersama antara Dewan Komisaris & Direksi PT PELNI (Persero) No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 tentang tentang Tata Laksana

BOARD MANUAL FOR BOARD OF DIRECTORS

In relation with other corporate structures related with duty and responsibility implementation, the Board of Commissioners has Working Guideline (Board Manual) for the Board of Commissioners as working guideline for the Board of Commissioners that is ratified under under PT PELNI (Persero) Board of Directors and Board of Commissioners Joint Decree No. 12.29/05/SK/HKO.01/2016 regarding PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and

Kerja *(Board Manual)* Direksi dan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Tata laksana kerja tersebut berisi panduan bagi Direksi yang berisikan, antara lain:

1. Kriteria Anggota Direksi dan Masa Jabatan Direksi;
2. Tanggung Jawab Direksi;
3. Tugas dan Kewajiban Direksi;
4. Wewenang Direksi;
5. Hak-Hak Direksi;
6. Program Pengenalan dan Peningkatan Kapabilitas;
7. Etika Jabatan;
8. Penetapan Kebijakan Pengelolaan Perusahaan;
9. Komposisi dan Pembidangan Tugas;
10. Rapat Direksi;
11. Organ Pendukung Direksi.

PENILAIAN ATAS KINERJA KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

Hingga 31 Desember 2017, Direksi Perseroan belum membentuk komite-komite di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas Direksi dibantu oleh Sekretaris Perusahaan dan Satuan Pengawas Intern (SPI) sebagai Organ Pendukung Direksi.

Board of Directors that discloses:

1. Board of Directors Members Criteria and Serving Period;
2. Board of Directors' Responsibility;
3. Board of Directors' Duty and Obligation;
4. Board of Directors' Authority;
5. Board of Directors' Rights;
6. Orientation Program and Capacity Building;
7. Position Ethics;
8. Stipulation of Company Management Policy;
9. Composition and Segregation of Duty;
10. Board of Directors Meeting;
11. Board of Directors Supporting Structure.

EVALUATION TO COMMITTEES UNDER THE BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2016, the Board of Directors had not yet established Committee under the Board of Directors. Implementation of the Board of Directors' duty is assisted by Corporate Secretary and Internal Audit Unit as Board of Directors' Supporting Structure.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Board of Commissioners Attendance Frequency

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Demi terciptanya efektifitas dan efisiensi jalannya perusahaan, maka selama 2017 Dewan Komisaris telah menyelenggarakan 25 kali Rapat Dewan Komisaris. Adapun tingkat kehadiran rapat Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

THE BOARD OF COMMISSIONNERS MEETING

To effectively and efficiently run the Company, during 2017 the Board of Commissioners has held 25 times of the Board of Commissioners Meeting. The attendance levels of the Board of Commissioners are as follows:

Frekuensi Kehadiran Rapat Dewan Komisaris 2017

Board of Commissioners Attendance Frequency 2017

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Total Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	21	20	95%
Johanes Widodo Hario Mumpuni*	Komisaris Independen Independent Commissioner	21	1	5%
Sudarto	Komisaris Commissioner	21	18	86%
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	21	14	67%
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	21	10	48%
Omo Dahlan**	Komisaris Independen Independent Commissioner	21	18	86%
Wolter B. Hesege**	Komisaris Commissioner	21	7	33%

* Menjabat mulai Desember 2017 | Served from December 2017

** Menjabat sampai dengan Desember 2017 | Served until December 2017

Agenda Rapat Dewan Komisaris 2017

Dalam pelaksanaannya, rapat Dewan Komisaris memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan di diskusikan. Berikut ini adalah agenda rapat Direksi tahun 2017:

Board of Commissioners Meeting Agenda 2017

The Board of Commissioner's meeting has an agenda to arrange meeting topic that coukd be discussed. There are the Director's meeting agenda year 2017 as follows:

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2017 Board of Commissioners Meeting Agenda 2017
1	23 Januari 2017 January 23, 2017	1. Pembahasan Persiapan RUPS PT PELNI (Persero) tahun Anggaran 2017. Discussion on the General Meeting of Shareholders preparation of PT PELNI (Persero) for Budget Year 2017. 2. Lain-lain. Others.
2	20 Februari 2017 February 20, 2017	1. Pembahasan laporan manajemen PT PELNI (Persero) Tahun 2016. Discussion about Management Statemant of PT PELNI (Persero) for 2016. 2. Lain-lain. Others.
3	02 Maret 2017 March 02, 2017	1. Asesmen Calon Direksi Assessment of Candidates for the Board Of Directors 2. Lain-lain. Others.
4	26 April 2017 April 26, 2017	1. Laporan Realisasi bulan Maret dan s/d triwulan I/2017 PT PELNI (Persero). Realization report in March and until Q1 / 2017 PT PELNI (Persero) 2. Antisipasi dan persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Enicipation and preparation of Lebaran transportation in 2017. 3. Surat Direksi terkait usulan remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris 2017. Board of Directors' Securities related to the proposed remuneration of directors and Board of Commissioners for 2017.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2017 Board of Commissioners Meeting Agenda 2017
		4. Persiapan RUPS (audited) 2016 dan penunjukan KAP untuk audit tahun buku 2017. GMS (audited) 2016 preparation and appointment of Company Budget Plan for audit of fiscal year 2017 . 5. Lain-lain. Others.
5	03 Mei 2017 May 03, 2017	1. Pembahasan persiapan RUPS Manajemen Audited tahun 2016 PT PELNI (Persero). Discussion on the GMS preparation for Audit Management in 2016 of PT PELNI (Persero). 2. Lain-lain. Others.
6	12 Mei 2017 May 12, 2017	1. Wawancara terbuka Assessment GCG Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tahun Buku 2016. Discussion on Management Mounthly Report for April, 2016 of PT PELNI (Persero). 2. Lain-lain. Others.
7	30 Mei 2017 May 30, 2017	1. Pembahasan laporan manajemen bulan April PT PELNI (Persero) Tahun 2016. Discussion on Management Mounthly Report for April, 2016 of PT PELNI (Persero). 2. Pembahasan Laporan Realisasi bulan April 2017. Discussion about Mountly Realization Report for April, 2017. 3. Persiapan angkutan Lebaran tahun 2017. Preparation for 2017 Lebaran Transportation. 4. Lain-lain. Others.
8	15 Juni 2017 June 15, 2017	1. Perubahan logo PT PELNI (Persero). Changes in PT PELNI (Persero) logo. 2. Persetujuan konversi hutang menjadi penyertaan modal PT PELNI (Persero) kepada PT RS PELNI. Debt conversion approval to be PT PELNI (Persero)'s capital investment for PT RS PELNI. 3. Penggantian Komisaris anak perusahaan. The Commissioner replacement of subsidiary. 4. Lain-lain. Others.
9	12 Juli 2017 July 12, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi bulan Mei 2017. Discussion about Realization Mounthly Report for May ,2017. 2. Evaluasi angkutan Lebaran tahun 2017 /1438 H. Lebaran Transportation 2017/1438 H Evaluation. 3. Lain-lain. Others.
10	21 Juli 2017 July 21, 2017	1. Pembahasan persiapan wawancara dengan Tim PT PWC Indonesia. Discussion on Interview Preparation with PT PWC Indonesia Team. 2. Lain-lain. Others.
11	28 Juli 2017 July 28, 2017	1. Pembahasan Laporan realisasi anggaran triwulan II dan semester I tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on PT PELNI (Persero) Budget Realization Report for Quarter II and Semester I of year 2017. 2. Pembahasan surat-surat masuk Dewan Komisaris. Discussion on incoming Letters from the Board of Commissioner. 3. Lain-lain. Others.
12	03 Agustus 2017 August 03, 2017	1. Pengenalan dan penyerahan SKI anggota komite –komite dewan komisaris PT PELNI (Persero) periode tahun 2017 s/d 2019. Introduction and submission of SKI from committee members of the board of commissioners of PT PELNI (Persero) for 2017 until 2019 period. 2. Lain-lain. Others.
13	06 September 2017 September 06, 2017	1. Penasehatan Dewan Komisaris mewakili Pemegang Saham PT PELNI (Persero). Advisory from the Board of Commissioner represented Shareholders of PT PELNI (Persero) 2. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on PT PELNI (Persero) Budget Realization report for July, 2017. 3. Lain-lain. Others.
14	29 September 2017 September 29, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on PT PELNI (Persero) Budget Realization Reoprt for August, 2017. 2. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Dewan Komisaris 2017 Board of Commissioners Meeting Agenda 2017
15	10 Oktober 2017 October 10, 2017	1. Presentasi *Risk Management* PT PELNI (Persero). Presentation from Risk Management of PT PELNI (Persero). 2. Lain-lain. Others.
16	27 Oktober 2017 October 27, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran TW- III Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on Quarter – III Budget Realization Report of PT PELNI (Persero) for 2017. 2. Lain-lain. Others.
17	30 Oktober 2017 October 30, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on Quarter – III Budget Realization Report of PT PELNI (Persero) for 2017. 2. Lain-lain. Others.
18	24 November 2017 October 30, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan Oktober Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on October Budget Realization Report of PT PELNI for 2017. 2. Lain-lain. Others.
19	08 Desember 2017 December 08, 2017	1. Pembahasan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) PT PELNI (Persero) Tahun 2017. Discussion on Quarter – III Budget Realization Report of PT PELNI (Persero) for 2017. 2. Pembahasan SK K. BUMN Terkait Pergantian Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Discussion on Ministry of Mineral and Energy Decree Letters related to changes in The Board of Commissioner of PT PELNI (Persero). 3. Lain-lain. Others.
20	15 Desember 2017 December 15, 2017	1. Pembahasan permohonan persetujuan Kredit *Refinacing* PT RUMAH SAKIT PELNI. Discussion on approval for Refinancing credit agreement of PT RUMAH SAKIT PELNI. 2. Lain-lain. Others.
21	27 Desember 2017 December 27, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan November PT PELNI Tahun 2017. Discussion on October Budget Realization Report of PT PELNI for 2017. 2. Lain-lain. Others.

RAPAT DIREKSI

Direksi dapat menyelenggarakan rapat untuk mengambil keputusan penting terkait kegiatan operasional dan bisnis Perseroan. Keputusan Direksi harus diambil secara musyawarah untuk mufakat. Apabila hal ini tidak tercapai, maka keputusan harus diambil berdasarkan suara terbanyak dan apabila suara setuju dan tidak setuju berimbang maka keputusan rapat akan diputuskan oleh Direktur Utama.

Selama tahun 2017, Rapat Direksi secara internal telah terselenggara sebanyak 32 kali. Berikut adalah frekuensi kehadiran rapat Direksi yang terselenggara selama tahun 2017, antara lain:

BOARD OF DIRECTORS MEETING

The Board of Directors may organize meeting to take important decisions related with the Company's operational and business activities. The Board of Directors' resolutions shall be taken based on collective consensus. If the consensus is failed to be achieved, the resolutions will be taken by voting and if agree and not agree voting are equal, the meeting resolution will be decided by President Director.

Board of Directors Internal Meeting were held in 32 meetings throughout 2017. List of attendance and discussed agenda in the Board of Directors meetings in 2017 are as follows:

Frekuensi Kehadiran Rapat Direksi 2017 / **Board of Directors Meeting Frequency 2017**

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	32	29	91%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	32	31	97%

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Direksi Total Board of Directors Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	32	31	97%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkatan Penumpang Director of Passenger Transport Business	32	29	91%
Tri Andayani*	Direktur Keuangan Director of Finance	32	21	65%
Ganefi**	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	32	3	9%
Elfien Goentoro***	Direktur Utama President Director	32	27	82%
Wibisono****	Direktur Keuangan Director of Finance	32	8	26%

* Menjabat mulai April 2017 | Served from April 2017
** Menjabat mulai September 2017 | Served from September 2017
*** Menjabat sampai Agustus 2017 | Served until August 2017
**** Menjabat sampai Maret 2017| Served until March 2017

Agenda Rapat Direksi 2017
Dalam pelaksanaannya, rapat Direksi memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan didiskusikan. Berikut ini adalah agenda rapat Direksi tahun 2017:

Board of Directors Meeting Agenda 2017
In its implementation, the Board of Directors' meeting has an agenda to organize the topics to be discussed. The Board of Directors Meeting Agenda 2017 are as follows:

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
1	03 Januari 2017 January 03, 2017	1. Kapal PELNI ke kepulauan seribu. PELNI ship goes to Seribu Islands. 2. Kapal perintis melayani kepulauan seribu. Perintis ship serves Seribu Island. 3. Kesiapan peralatan keselamatan kapal. Ship safety equipment readiness 4. Data pengadaan kapal tol laut. Procurement Data of Tol Laut ships. 5. Persiapan pelaksanaan *town hall meeting*. Preparation of town hall meeting implementation. 6. Evaluasi trayek tahun 2017. 2017 Routes evaluation. 7. Persiapan *Mapping* SDM. Human Resources Mapping preparation. 8. Struktur Organisasi tahun 2017. 2017 Organization Structure. 9. Penambahan Trayek kapal perintis kepulauan seribu. Route addition for Perintis ship in Seribu Islands. 10. Keselamatan kapal. Ship Safety. 11. Lain-lain. Others.
2	10 Januari 2017 January 10, 2017	1. *Mapping* SDM. Human Resources Mapping. 2. Pariwisata bahari. Marine Tourism. 3. Klasifikasi cabang. Branches Classification. 4. Operasional kapal cepat muara angke ke kepulauan seribu. Muara Angke speed boat operational to Seribu Islands. 5. Trayek KM.Dobonsolo dan KM.Ciremai tahun 2017. Dobonsolo ship and Ciremai boat 2017 routes. 6. Operasional Kapal cepat. Speed boat operational. 7. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
3	17 Januari 2017 January 17, 2017	1. Struktur organisasi nomenklatur. Nomenclature Organization structure. 2. Penarikan data penumpang, muatan dan penghasilan. Withdrawal of passenger data, cargo and income 3. Lain-lain. Others.
4	24 Januari 2017 January 24, 2017	1. Materi Rapim 1 tahun 2017. Chair Meeting material 1 of 2017. 2. Angkutan tol laut. Tol Laut Freight transportation. 3. Evaluasi Angkutan Natal 2016 dan tahun baru 2017. Evaluation of Christmas 2016 and new year 2017 transport. 4. *Mapping* SDM. Human Resources Mapping. 5. *Holding* RS PELNI Petamburan. PELNI Petamburan Hospital Holding. 6. Lain-lain. Others.
5	31 Januari 2017 January 31, 2017	1. Angkutan penumpang kepulauan seribu. Seribu islands passenger transport. 2. Pelelangan kapal ternak tahun 2017. Cattle ship customers 2017. 3. *Asessment* senior manajer. Senior Manager Assessment. 4. PKB dan SDM Organisasi baru PKB and HR New Organization. 5. Lain-lain. Others.
6	14 Februari 2017 February 14, 2017	1. Program wisata bahari tahun 2017. 2017 Marine Tourism Program. 2. Utilisasi penumpang. Passengers Utilization. 3. Progres pengadaan *spare part.* Spare parts procurement progress. 4. Progres pelaksanaan NPTS NPTS Implementation Progress 5. Pengadaan kapal baru. New Ships Procurement. 6. Program *hospitality.* Hospitality Program. 7. Progres kerjasama dengan MSI. Cooperation with MSI Progress. 8. Lain-lain. Others.
7	22 Februari 2017 February 22, 2017	1. Trayek untuk kapal tol laut KM. Logistik nusantara 1. Route for Logistik Nusantara 1 Tol Laut ship. 2. Laporan pengoperasian kapal perintis. Report on Perintis ships operation. 3. Tindak lanjut hasil Rapim 1 tahun 2017. Followed up on Chair Meeting 1 results of 2017. 4. Progres admin kapal. Administration Ships Progress. 5. Konversi BBM dikapal penumpang. Fuel conversion on Passenger Ships. 6. Progres Pelaksanaan Program rumah kita. Rumah Kita Program implementation progress 7. Lain-lain. Others.
8	01 Maret 2017 March 01, 2017	1. Tindak lanjut Rapim 1 tahun 2017. Followed up on Chair Meeting 1 of 2017. 2. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
9	07 Maret 2017 March 07, 2017	1. Pengembalian subsidi kapal perintis. Restoring Perintis ships subsidies. 2. Progres pengadaan *spare part.* Spare part procurement progress. 3. Remunerasi ABK kapal perintis. Crews Remuneration of Perintis Ships. 4. Penetapan proyek transformasi bisnis dan budaya. Business and cultural transformation projects establishment. 5. Penyelesaian permasalahan SDM. Resolving Human Resources Problems. 6. Lain-lain. Others.
10	14 Maret 2017 March 14, 2017	1. Pengembangan Teknologi Informasi dalam pelaksanaan EBS. Information Technology Development in EBS implementation. 2. Progres realisasi PMN 500 M. PMN 500 M realization progress. 3. Pengadaan *spare part.* Spare part procurement. 4. Operasional 16 unit kapal perintis yang melaksanakan *docking.* 16 Perintis ships unit operational performing docking. 5. Program pengembangan SDM. Human Resources development progress. 6. Lain-lain. Others.
11	04 April 2017 April 04, 2017	1. Arahan untuk Direksi. Direction for the Board of Directors. 2. Progres pengadaan *spare part.* Spare part procurement progress. 3. Penanggung jawab pengadaan kapal. People in charge for Ships procurement. 4. Penyelesaian permasalahan aset. Resolving Asset problems. 5. Premasalahan di Galangan Surya. Problems in Surya Shipyard. 6. Pengadaan kapal *cruise*. Criuse Ships procurement. 7. Persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Eid mubarak 2017 transport preparation. 8. Progres pelaksanaan kapal perintis dan operasional kapal penumpang. Progress of Perintis ships implementation and Passenger ships operational. 9. Lain-lain. Others.
12	18 April 2017 April 18, 2017	1. Persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Eid mubarak 2017 transport preparation. 2. Lain-lain. Others.
13	25 April 2017 April 25, 2017	1. Kegiatan BOD padatgl 25 april 2017. The Board of Directors activities on April 25, 2017. 2. Pemafaatan ruang penumpang untuk barang. Passenger rooms utilization for goods. 3. Rapimda 1 tahun 2017. First Leaders Meeting 2017. 4. Lain-lain. Others.
14	09 Mei 2017 May 9, 2017	1. Progres program SISKOMKAP. SISKOMKAP program progress. 2. Rencana kenaikan upah. Salary increasing plans. 3. Progres kontrak tol laut dan kapal perintis. TOL LAUT and Perintis ships contract progress. 4. Proses kapal tol laut. TOL LAUT ships process.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT

Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
	09 Mei 2017 May 9, 2017	5. Pengadaan *spare part.* Spare part procurement. 6. Persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Eid Mubarak 2017 transport preparation. 7. Penyelesaian RS PELNI Petamburan. PELNI Petamburan Hospital completion. 8. Angkutan untuk Wisata Bahari. Transports for marine tourism. 9. Permasalahan Galangan Surya Surabaya. Surya Surabaya shipyard problems. 10. Lain-lain. Others.
15	15 Mei 2017 May 15, 2017	1. Pengadaan *spare part Fast moving* angkutan lebaran 2017. Eid Mubarak 2017 fast moving transport spare parts procurement. 2. Penggantian Komisaris PT SBN. Changes in PT SBN' Board of Commissioners. 3. Lain-lain. Others.
16	23 Mei 2017 May 23, 2017	1. Pemberian sanksi kepegawai. Giving sanction to the employees. 2. Status gudang di Tanjung Priok. Warehouse status at Tanjung Priok. 3. Persedian minyak pelumas selama *peak season.* Lubricants stock during Peak Season. 4. Laporan LHKPN. LHKPN report. 5. Penanganan aset bermasalah. Handling of Troubled Assets. 6. Pengadaan kapal tol laut. Tol Laut Ships procurement 7. Kerja sama MSL. MSL cooperation. 8. Remunerasi. Remuneration. 9. Lain-lain. Others.
17	30 Mei 2017 May 30, 2017	1. Pengelolaan Aset. Asset management. 2. Pengadaan *spare part.* Spare part procurement. 3. Lain-lain. Others.
18	06 Juni 2017 June 06, 2017	1. Pengaturan *port stay* KM.Kelud di Tg.Priok. Kelud ship port stay arrangement at TG. Priok. 2. *Feasibility Study* kapal penumpang baru. Feasibility Study of New Passenger ships. 3. Progres pengurusan KM.Logistik Nusantara 1. Logistik Nusantara 1 management progress. 4. Penerbitan ID Card. ID Card issuance. 5. Persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Eid Mubarak 2017 transport preparation. 6. Hasil Pra RUPS anak perusahaan atas kinerja tahun 2016. Pra-GMS results of subsidiaries on 2016 performance. 7. Tindak lanjut temuan BPK. Followed up for Indonesian Supreme Audit Institution findings. 8. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
19	13 Juni 2017 June 13, 2017	1. Administrasi keuangan. Financial Administration. 2. Organisasi kapal. Ship organization. 3. Persiapan angkutan lebaran 2017. Eid Mubarak 2017 transport preparation. 4. Pengadaan kapal tol laut. Tol laut ships procurement. 5. Pengadaan kapal *cruise*. Criuse Ships procurement. 6. Laporan keuangan. Financial report. 7. Lain-lain. Others.
20	13 Juni 2017 June 13, 2017	1. *Holding* RS BUMN. State-Owned Enterprises Hospital Holding. 2. Reposisi SDM. Human Resources Reposition. 3. Persiapan mudik motor 2017. Homecoming Motorcycle 2017 Preparation. 4. Evaluasi angkutan lebaran 2017. Eid Mubarak 2017 transport evaluation. 5. Pengadaan kapal *cruise* dan kapal penumpang baru. New ships procurement for cruise and passenger ships. 6. Evaluasi angkutan barang dikapal penumpang. Cargo transportation on passenger ships evaluation. 7. Evaluasi angkutan penumpang di kapal penumpang. Passenger transportation on passenger ships evaluation 8. Lain-lain. Others.
21	04 Juli 2017 July 04, 2017	1. Pola rekrutmen pegawai. Employee recruitment patterns. 2. Laporan manajemen bulan mei 2017. Management report May, 2017. 3. Lelang KM.Ganda Dewata. Ganda Dewata ship auction. 4. Aplikasi *monitoring spare part.* Spare parts monitoring application. 5. Lain-lain. Others.
22	06 Juli 2017 July 06, 2017	1. Kondisi *Cash flow.* Cash flow condition. 2. Perhitungan kenaikan gaji dan tantiem Direksi anak perusahaan. The calculation on the increase of salary and tantiem for the Board of Directors of the subsidiary. 3. Lain-lain. Others.
23	11 Juli 2017 July 11, 2017	1. Arahan kinerja Direksi. The Board of Directors performance direction. 2. *Master plan* IT. IT Master plan. 3. Kontrak pemasaran terpadu. Integrated marketing conract. 4. Rekrument pegawai. Employee recruitment. 5. Pembelian kapal penumpang. Passenger ship buying. 6. Pencairan subsidi kapal penugasan. Subsidies disbursement of assigned ships.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
		7. Pembelian kapal tol laut. Tol laut ships buying. 8. Rencana Rapim 2 tahun 2017. Second chair meeting 2017 plan. 9. Lain-lain. Others.
24	14 Juli 2017 July 14, 2017	1. Progres PMN. PMN progress. 2. Kapal *Cruise.* Cruise ship. 3. Muatan balik kapal tol laut. shipback charge of TOL LAUT ships. 4. Lain-lain. Others.
25	28 Juli 2017 July 28, 2017	1. Pembahasan hasil kajian keuangan oleh konsultant Provalindo. Discussion on Finance research results by Provalindo consultant. 2. Pembahasan revisi RKAP 2017. Discussion about The Company work and budget plan 2017. 3. Pembahasan kunjungan ibu Menteri ke P. Liran. Discussion on Mother of Ministry visiting Liran islands. 4. Pembahasan kapal perintis. Discussion about Perintis ship. 5. Pembahasan pembangunan Merial *tower* RS PELNI. Discussion on Merial Tower construction of PELNI Hospital. 6. Lain-lain. Others.
26	15 Agustus 2017 August 15, 2017	1. Hasil Kunker Komisi VI di KALTIM tgl 10/8/2017. IV Commission work visit results on East Borneo dated August 10, 2017. 2. *Monitoring* muatan dikapal penumpang. Cargo monitoring on Passenger ship. 3. *Vessel web analyzer.* Vessel web analyzer. 4. Admin kapal. Ships adminstration. 5. MSL. MSL. 6. PMN. PMN. 7. Perbaikan kapal. Ships repairment. 8. Bisnis Wisata. Tourism Business. 9. SPPD. SPPD. 10. *Loose cargo.* Loose cargo. 11. *Docking* kapal perintis. Tourism Business. 12. Pernyataan hari pelanggan nasional 2017. National Costumers Day 2017 Statement. 13. Lain-lain. Others.
27	21 Agustus 2017 August 21, 2017	1. Penjelasan laporan produksi penumpang. Passenger Production Report explanation. 2. Tindak lanjut *Cruise.* Follow-up cruise ship. 3. Laporan manajemen bulan Juli 2017. Management Report July 2017. 4. Progres rekrutmen. Recruitment Progress. 5. Pemilihan Nahkoda. Captain selection.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
		6. Pengembangan IT/Aplikasi IT. IT application development. 7. Penjualan dan produksi kapal barang. Freight ships Sales and production. 8. Pengembangan tol laut. TOL LAUT ships development. 9. Pengadaan *spare part.* Spare parts procurement. 10. Lain-lain. Others.
28	05 September 2018 September 05, 2017	1. Progres pengerjaan seragam baru untuk pegawai. Progress of processing new uniforms for employee. 2. Perubahan logo. Logo changes. 3. Evaluasi Hari pelanggan 2017. Costumers day 2017 evaluation. 4. PMN. PMN. 5. Pembahasan rapat gabungan BOD & BOC. Discussion on BOD & BOC Joint Meeting . 6. Lain-lain. Others.
29	12 September 2018 September 12, 2017	1. Progres pengadaan kapal MV Sanmari. MV Sanmari ship procurement progress. 2. *Docking* kapal. Ship docking. 3. KM Ganda Dewata. Ganda Dewata ship. 4. Kondisi kapal. Ship condition. 5. Lain-lain. Others.
30	03 Oktober 2017 October 03, 2017	1. Arahan pemegang saham terkait RKAP 2018. Shareholders direction related to The Company work and Budget plan. 2. E *Procurement.* E Procurement. 3. Laporan kondisi kapal. Ships condition report. 4. Prospek bisnis logistik. Logistic Business Report. 5. Persiapan Rapim Ke 3 tahun 2017. third chair meetings 2017 preparation. 6. Lain-lain. Others.
31	10 Oktober 2017 October 10, 2017	1. Arahan DIRUT. President Director direction. 2. Lain-lain. Others.
32	19 Oktober 2017 October 19, 2017	1. Pengembangan RS PELNI. PELNI Hospital development. 2. Struktur Organisasi PELNI. PELNI organization structure. 3. Seragam Pegawai PELNI. PELNI employee uniforms. 4. Wisata Bahari. Marine Tourism. 5. Persiapan Rapim Ke 3 tahun 2017. third chair meetings 2017 preparation. 6. Lain-lain. Others.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

RAPAT GABUNGAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Sebagai realisasi dari hubungan kerja antara Dewan Komisaris dan Direksi, selama tahun 2017, Dewan Komisaris dan Direksi menyelenggarakan 11 (sebelas) Rapat Gabungan. Adapun agenda dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi selama tahun 2017 adalah sebagai berikut:

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS CONSOLIDATION MEETING

As realization of working relation between Board of Commissioners and Board of Directors, throughout 2016, the Board of Commissioners and Board of Directors held 11 (eleven) Management Meetings. The agenda and Board of Commissioners and Board of Directors members attendance levels in the Management Meeting throughout 2017 are as follows:

Frekuensi Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2017

Board of Commissioners and Board of Directoers Consoldiation Meeting Attendance Frequency of the 2017

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Dewan Komisaris Total Board of Commissioners Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
Dewan Komisaris | Board of Commissioners				
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	6	6	100%
Johanes Widodo Hario Mumpuni*	Komisaris Independent Independent Commissioner	6	-	0%
Sudarto	Komisaris Commissioner	6	6	100%
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	6	4	67%
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	6	3	50%
Omo Dahlan**	Komisaris Independent Independent Commissioner	6	5	83%
Wolter B. Hesege**	Komisaris Commissioner	6	4	67%
Direksi | Board of Directors				
Insan Purwarisya L. Tobing	Direktur Utama President Director	6	3	50%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	6	5	83%
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	6	5	83%
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkatan Penumpang Director of Passenger Transport Business	6	4	67%
Tri Andayani***	Direktur Keuangan Director of Finance	6	5	83%
Ganefi****	Direktur SDM & Umum Director of HR & General affairs	6	-	0%
Elfien Goentoro*****	Direktur Utama President Director	6	2	33%
Wibisono******	Direktur Keuangan Director of Finance	6	-	0%

* Menjabat mulai Desember 2017 | Served from December 2017
** Menjabat sampai dengan Desember 2017 | Served until December 2017
*** Menjabat mulai April 2017 | Served from April 2017
**** Menjabat mulai September 2017 | Served from September 2017
***** Menjabat sampai Agustus 2017 | Served until August 2017
****** Menjabat sampai Maret 2017| Served until March 2017

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT
Board of Commissioners Attendance Frequency

Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2017

Dalam pelaksanaannya, Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi memiliki agenda untuk mengatur topik bahasan rapat yang akan didiskusikan. Berikut ini adalah agenda rapat Dewan Komisaris dan Direksi tahun 2017:

Board of Commissioners and Board of Directoers Consoldiation Meeting Agenda 2017

In its implementation, the Board of Commissioners and the Board of Directors Consolidation meeting has an agenda to organize the topics to be discussed. The Board of Commissioners and the Board of Directors Consolidation meeting Agenda 2017 are as follows:

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi 2017 Board of Commissioners and Board of Dorectors Consolidation Meeting Agenda 2017
1	30 Mei 2017 May 30, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan April 2017. Discussion on Budget Realization Report for April, 2017. 2. Persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Lebaran Transportation 2017 Preparation. 3. Klasifikasi cabang. Branches Classification. 4. Lain-lain. Others.
2	06 September 2017 September 6, 2017	1. Penasehatan Dewan Komisaris mewakili Pemegang Saham PT PELNI (Persero). Advisory from The Board of Commissioner represented to Shareholders of PT PELNI (Persero). 2. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran bulan Juli Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion about PT PELNI Budget Realization Report for July, 2017. 3. Lain-lain. Others.
3	29 September 2017 September 29, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Bulan Agustus tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion about PT PELNI (Persero) Budget Realization Report for August, 2017. 2. Lain-lain. Others.
4	10 Oktober 2017 October 10, 2017	1. Presentasi *Risk Management* PT PELNI (Persero). Presentation from Risk Management of PT PELNI (Persero). 2. Lain-lain. Others.
5	30 Oktober 2017 October 30, 2017	1. Pembahasan Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III Tahun 2017 PT PELNI (Persero). Discussion on Quarter III Budget Realization Report of PT PELNI for 2017). 2. Lain-lain. Others.
6	15 Desember 2017 December 15, 2017	1. Pembahasan permohonan persetujuan Kredit *Refinacing* PT RUMAH SAKIT PELNI. Discussion on approval for Refinancing credit agreement of PT RUMAH SAKIT PELNI. 2. Lain-lain. Others.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi diberikan sesuai dengan Risalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk surat kuasa Menteri BUMN Nomor SR-467/MBU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 dan memperhatikan keputusan RUPS PT PELNI (Persero) tentang persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun buku 2017, maka ditetapkan Penghasilan Dewan Komisaris dan Direksi serta insentif kinerja tahun Buku 2017 adalah sebagai berikut:

1. Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas
   a. Gaji Direktur Utama ditetapkan sebesar Rp126.000.000,- (seratus dua puluh enam juta) per bulan. Gaji Direktur sebesar 90% dari gaji Direktur Utama.
   b. Honorarium Komisaris Utama ditetapkan sebesar 45% dari gaji Direktur Utama, sedangkan honorarium Anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
   c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris diberikan dengan mengacu pada PER-04/MBU/2014 jo. PER-02/MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 (sebagaimana tabel terlampir).
   d. Gaji/honorarium serta tunjangan dan fasilitas bagi Direksi dan Dewan Komisaris untuk tahun 2017 berlaku efektif sejak tanggal 1 Januari 2017.
2. Total tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun buku 2016 ditetapkan sebesar Rp9.335.000.000,- (sembilan miliar tiga ratus tiga puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan :
   a. Tantiem Direktur dan Komisaris Utama masing-masing sebesar 90% dan 45% dari Tantiem Direktur Utama, sedangkan tantiem anggota Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama. Besaram tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa jabatan masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2016.

Board of Commissioners and Board of Directors remuneration is paid based on PT PELNI (Persero) GMS Minutes of Meeting on Aprpoval to Annual Report and Validation of Financial Statements referring to Minister of SOE RI Regulation Number PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014 regarding Board of Directors, Board of Commisisoners and Shareholders Remuneration Policy in State-Owned Enterprise.

Referring to Minister of SOE Attorney Letter Number SR-467/MBU/D4/06/2017 dated on June 22, 2017, considering PT PELNI (Persero) GMS resolutions on approval to Annual Report and validation of Financial Statements Fiscal Year 2017, Board of Commissioners and Board of Directors remuneration as well as performance bonus in fiscal year 2017 are as follows:

1. Salary / Honorarium, Allowances and Facilities
   a. The salary of the President Director is set at Rp126,000,000,- (one hundred and twenty six million Rupiah) per month. The salary of the Director is 90% of the salary of the President Director.
   b. The Honorarium of the President Commissioner is set at 45% of the salary of the President Director, while the honorarium of the Board of Commissioners is set at 90% of the Honorarium of the President Commissioner.
   c. Allowances and/or facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners are provided with reference to PER-04/MBU/2014 jo. PER-02 / MBU/06/2016 jo. PER-01/MBU/06/2017 (as the table is attached).
   d. Salaries / honorarium as well as allowances and facilities for the Board of Directors and Board of Commissioners for 2017 has been effective since January 1, 2017.
2. Total incentives for Board of Directors and Board of Commissioners for fiscal year 2016 is set at Rp9.335.000.000, - (nine billion three hundred and thirty five million rupiah) with the following conditions:
   a. Incentives for Director and President Commissioner Performance are 90% and 45% respectively from Incentives for President Director performance, while Incentives for the Board of Commissioners members are 90% from the Incentives for the President Commissioner performance. The Incentives for performance are calculated proportionally in accordance with the respective period of each Board of Directors and Board of Commissioners in Fiscal Year 2016.

b. Pajak Penghasilan (PPh) atas tantiem menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perseroan.

PROSEDUR PENGUSULAN DAN PENETAPAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi ditetapkan melalui RUPS. Besaran Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi didasarkan atas capaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi, sesuai hasil analisis dan rekomendasi Komite Audit dan Komite Risiko. Komite Audit dan Komite Risiko mengusulkan hal tersebut kepada Dewan Komisaris, untuk kemudian hasilnya diteruskan kepada RUPS.

Pada tahun 2017, Prosedur Pengusulan dan Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 serta tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016 untuk Dewan Komisaris dan Direksi adalah sebagai berikut:

a. Direksi membuat kajian perhitungan penghasilan diterima *(take home pay)* yang terdiri atas gaji, tunjangan, fasilitas dan tantiem/insentif kinerja berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara terbaru tentang Pedoman Perhitungan Gaji Direktur Utama dan Tantiem/Insentif Kinerja Direksi, Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

b. Usulan penghasilan ini dibahas bersama Dewan Komisaris yang selanjutnya akan diusulkan kepada Pemegang saham, dalam hal ini Kementerian BUMN.
c. RUPS mengesahkan besaran penetapan Gaji/ Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 serta tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016.
d. Pemegang Saham akan memberikan penetapan Gaji/ Honorarium, Tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 serta tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016. Untuk tahun 2017, Kementerian BUMN telah menetapkan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk tahun 2017 serta Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016 melalui Surat Kuasa Menteri BUMN Nomor SR-467/ MBU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017.

b. Income Tax (PPh) on Incentives for Performance is the recipient's load and not allowed to be charged as a company expense.

PROCEDURE OF PROPOSAL AND DETERMINATION OF REMUNERATION OF BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

The amount of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is determined through the GMS. The amount of Remuneration of the Board of Commissioners and the Board of Directors is based on the performance of the Board of Commissioners and the Board of Directors, based on the results of the analysis and recommendations of the Audit Committee and Risk Committee. The Audit Committee and Risk Committee proposes the matter to the Board of Commissioners, and the results are then forwarded to the GMS.

In 2017, Procedure of Proposing and Estimating Salary, Honorarium, Benefit and facilities for 2017 and incentives for performance booked in 2016 for Board of Commissioners and Board of Directors are as follows:

a. The Board of Directors shall prepare a take home pay study consisting of salaries, allowances, facilities and performance Tantiem/Incentives based on new Decree of the Minister of State-Owned Enterprises on Guidelines for Salary of President Director and Tantiem/ Performance Incentive Board of Directors, Board of Commissioners and Board of Trustees of State-Owned Enterprises.
b. This proposal of income is discussed with the Board of Commissioners which will be proposed to the Shareholders in this case the Ministry of SOEs.
c. The GMS authorizes the determination of salary / honorarium, allowances and facilities for 2017 and tantiem for the Performance of the fiscal Year 2016.
d. Shareholders will provide Salary / Honorariums, Allowances and facilities for 2017 and Incentive for the Fiscal Year 2016 Performance . For year 2017, The Ministry of State-Owned Enterprises has established Salary / Honorarium, Allowances and Facilities for 2017 and Incentives for Performance of the Fiscal Year 2016 through the Letter of Attorney of the SOE Minister No. SR-467 / MBU / D4 / 06/2017 dated June 22, 2017.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DEWAN KOMISARIS

Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari Gaji/Honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, komunikasi dan santunan purna jabatan dan tunjangan transportasi. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan, bantuan hukum dan perkumpulan profesi. Struktur Remunerasi Dewan Komisaris Perseroan merujuk kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: SR-467/MBU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016.

BOARD OF COMMISSIONERS REMUNERATION STRUCTURE AND AMOUNT

Board of Commissioners Remuneration structure comprised of salary/honorarium, allowance including religious day allowance, transportation and communication as well as post-employment allowance and transportaiton allowance. The facilities include health facility, general support and professional association. The Board of Commissioners remuneration structure refers to Minsiter of SOE as the Shareholders Number SR-467/MBU/D4/06/2017 date June 22, 2017 on the Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Year 2017 and Tantiem for the Performance of the Book Year 2016.

Uraian Penghasilan Remuneration Type	Keterangan Description
Honorarium Salary	• Komisaris Utama = 45% dari gaji Direktur Utama. President Commissioner = 45% of President Director Salary. • Komisaris = 90% dari honorarium Komisaris Utama. Commissioner = 90% of President Commissioner honorarium

Remunerasi Dewan Komisaris untuk tahun 2017
Board of Commissioners Remuneration 2017

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	Rp56.700.000	45% dari Tantiem Direktur Utama 45% of President Director's Incentives
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Rp51.030.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Sudarto	Komisaris Commissioner	Rp51.030.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Commissioner	Rp51.030.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Rp51.030.000	90% dari Tantiem Komisaris Utama 90% of President Commissioner's Incentives

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Tunjangan Fasilitas Allowance Facility	Komisaris Utama President Commissioner	Komisaris Commissioner
Pendapatan bulanan | Monthly Salary		
Gaji Pokok Basic Salary	Rp56.700.000	Rp51.030.000
Tunjangan Transportasi Transportation Allowance	20% dari honorarium perbulan 20% of monthly salary	20% dari honorarium perbulan 20% of monthly salary
Pendapatan Tahunan | Annual Salary		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month salary	Dibayarkan 1 kali Honorarium Paid equal with 1 month salary
Asuransi Purna Jabatan Post-Employement Benefit	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year salary	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari Honorarium dalam 1 tahun Premium Paid by the Company is 25% of 1 year salary
Tantiem Incentives	Dibayarkan sebesar 45% dari Tantiem Direktur Utama Paid 45% of President Director's Incentives	Dibayarkan sebesar 90% dari Tantiem Komisaris Utama Paid 90% of President Commissioner's Incentives
Fasilitas | Facilities		
Kesehatan Health	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance
Bantuan Hukum Legal Assisstance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost

Keterangan: *) Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 ditetapkan sebesar Rp6.497.750.000.
Remarks *) Board of Directors and Board of Commissioners incentive bonus for fiscal year 2017 was stipulated of Rp6.497.750.000.

STRUKTUR DAN JUMLAH REMUNERASI DIREKSI

Remunerasi Direksi didasarkan kepada Surat Kementerian BUMN sebagai Pemegang Saham Nomor: SR-467/MBU/D4/06/2017 tanggal 22 Juni 2017 tentang Penetapan Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas untuk Tahun 2017 serta Tantiem atas Kinerja Tahun Buku 2016.

Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris tahun Buku 2016 ditetapkan sebagai berikut:

1. Tantiem Direktur Utama, Direktur & Komisaris Utama masing-masing 100%, 90% dan 45% dari Tantiem Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari tantiem Komisaris Utama. Besaran tantiem dihitung proporsional sesuai dengan masa kerja masing-masing Direksi dan Dewan Komisaris dalam Tahun Buku 2016.

2. PPH menjadi beban penerima dan tidak diperkenankan untuk dibebankan sebagai biaya Perseroan.

BOARD OF DIRECTORS REMUNERATION STRUCTURE AND AMOUNT

The remuneration of the Board of Directors is based on the Letter of the Ministry of SOE as Shareholder Number SR-467/MBU/D4/06/2017 date June 22, 2017 on the Determination of Salary/Honorarium, Allowances and Facilities for the Year 2017 and Tantiem for the Performance of the Book Year 2016.

Incentives for the Board of Directors and Board of Commissioners for Fiscal Year 2016 are stipulated as follows:

1. Incentives for President Director, Director & President Commissioner are 100%, 90% and 45%, respectively, from President Director's incentive, however, Board of Commissioners' incentive is 90% of the President Commissioners incentive. Amount of the incentive is calculated proportionally based on working period of every Board of Directors and Board of Commissioners in Fiscal Year 2016.
2. Income Tax is paid by the recipient and not allowed to be charged as Company's expense.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Uraian Penghasilan Remuneration Type	Keterangan Description
Honorarium Salary	• Direktur Utama =100% President Director = 100% • Direksi = 90% dari Direktur Utama Board of Directors = 90% of President Director

Remunerasi Direksi pada 2017
Board of Directors Remuneration 2017

Nama Name	Jabatan Position	Honor per Bulan (Rp) Monthly Salary (Rp)	Tantiem (Rp) Incentives (Rp)
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	Rp126.000.000	100%
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Director	Rp113.400.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Director	Rp113.400.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Olih Masolich Sodikin	Direktur Director	Rp113.400.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Tri Andayani	Direktur Director	Rp113.400.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives
Ganefi	Direktur Director	Rp113.400.000	90% dari Tantiem Direktur Utama 90% of President Director's Incentives

Tunjangan Fasilitas Allowance Facility	Direktur Utama President Director	Direktur Director
Pendapatan bulanan | Monthly Remuneraiton		
Gaji Pokok Basic Salary	Rp126.000.000	Rp113.400.000
Tunjangan Perumahan Housing Allowance	Rp27.500.000	Rp27.500.000
Pendapatan Tahunan | Annual Remuneraiton		
Tunjangan Hari Raya Religious Day Allowance	Dibayarkan 1 kali Gaji Paid at Cost	Dibayarkan 1 kali Gaji Paid at Cost
Asuransi Purna Jabatan Post-Employement Benefit	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premium paid by the Company is 25% of 1 year salary.	Premi yang ditanggung oleh Perseroan sebesar 25% dari Gaji dalam 1 tahun Premium paid by the Company is 25% of 1 year salary.

KEBIJAKAN REMUNERASI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI
Board of Commissioners and Board of Directors Remuneration Policy

Tunjangan Fasilitas Allowance Facility	Direktur Utama President Director	Direktur Director
Tantiem Incentives	Berdasarkan penetapan RUPS/Menteri dalam pengesahan laporan tahunan dan dikaitkan dengan target-target KPI sesuai RKAP tahun yang bersangkutan dan telah ditetapkan dalam anggaran Perseroan Based on GMS/Minister stipulation in annual report and related with KPI targets based on RKAP of the current year.	Dibayarkan sebesar 90% dari Tantiem Direktur Utama Paid 90% of President Director's Incentives
Fasilitas | Facilities		
Kendaraan Vehicle	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan 1 (one) unit altogether with maintenance and operational cost by considering financial condition	1 (satu) unit beserta biaya pemeliharaan dan biaya operasional dengan memperhatikan kondisi keuangan 1 (one) unit altogether with maintenance and operational cost by considering financial condition
Kesehatan health	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance	Dalam bentuk asuransi kesehatan as health insurance
Bantuan Hukum Legal Assisstance	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost	Dibayarkan sesuai pengeluaran Paid at cost

Keterangan: *) Insentif Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris untuk Tahun Buku 2017 ditetapkan sebesar Rp6.497.750.000.
Remarks *) Board of Directors and Board of Commissioners incentive bonus for fiscal year 2017 was stipulated of Rp6.497.750.000.

INDIKATOR PENGUKURAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Untuk memastikan struktur di perseroan berjalan dengan baik, Perseroan memiliki sistem penilaian kinerja bagi Dewan Komisaris dan Direksi yang dilaksanakan pada saat pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Indikator Pengukuran Kinerja untuk mengukur kinerja Direksi tahun 2017 ditetapkan dalam Kontrak Manajemen Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2017.

INDICATORS DETERMINATION OF REMUNERATION OF THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

To ensure that structure in the Company has been running well. The Company has performance appraisal system to stipulate remuneration for Board of Commissioners an Board of Directors that was implemented during the General Meetings of Shreholders (GMS). Key performance indicators to evaluate Board of Directors in 2017 is stipulated in Management Contract between Board of Directors and Board of Commissioners in 2017.

KEBERAGAMAN KOMPOSISI DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Board of Directors and Board of Commissioners Composition Diversity

PELNI meyakini bahwa keragaman keahlian, pengalaman, dan latar belakang pendidikan sangat diperlukan untuk efektivitas pelayanan tugas pengawasan Dewan Komisaris dan pengurusan Perseroan oleh Direksi dengan tidak mengenal perbedaan *gender*. Dewan Komisaris dan Direksi PELNI yang ditunjuk berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham berdasarkan usulan Pemegang Saham memiliki komposisi yang cukup beragam, baik berdasarkan usia, latar belakang pendidikan, keahlian serta pengalaman yang dibutuhkan dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya. Berikut keberagaman komposisi yang dimiliki oleh masing-masing anggota dewan komisaris dan direksi perseroan untuk Periode 2017:

PELNI believes that the diversity of expertise, experience, and educational background is indispensable for the effectiveness of the supervisory services of the Board of Commissioners and the management of the Company by the Board of Directors with no recognition of gender differences. The Board of Commissioners and the Board of Directors of PELNI appointed by the resolution of General Meeting of Shareholders based on the proposal of the Shareholders have a fairly diverse composition, based on their age, education background, expertise and experience required in the performance of their duties and responsibilities. The following is the diversity of composition held by each member of the company's Boards of Commissioners and Directors for the period of 2017:

Nama Name	Jabatan Position	Kualifikasi Akademik dan Keahlian Academic Qualification and Expertise	Usia Age	Jenis Kelamin Gender
Dewan Komisaris | Board of Commissioners				
Leon Muhamad	Komisaris Utama President Commissioner	Akademi Ilmu Pelayaran Shipping Academy	63	Pria Male
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Komisaris Independen Independent Commissioner	Ekonomi dan Akuntasi Economic and Accounting	60	Pria Male
Sudarto	Komisaris Commissioner	Ekonomi dan Manajemen Bisnis Economics and Business Management	48	Pria Male
Raldi Hendro Koestoer	Komisaris Independen Independent Commissioner	Sains, *Regional Science* dan *Environmental Planning* Science, Regional Science and Environmental	59	Pria Male
Satya Bhakti Parikesit	Komisaris Commissioner	Hukum Legal	45	Pria Male
Direksi | Board of Directors				
Insan Purwarisya L Tobing	Direktur Utama President Director	Hubungan Internasional International Relations	52	Pria Male
Harry Boediarto Soewarto	Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut Director of Freight & Tol Laut	Planologi Planology	61	Pria Male
Muhamad Tukul Harsono	Direktur Armada Fleet Director	Nautika dan Master Mariner Nautical and Master Mariner	50	Pria Male
Olih Masolich Sodikin	Direktur Usaha Angkutan Penumpang Director of Passenger Transport Business	Ilmu Pelayaran Shipping Science	58	Pria Male
Tri Andayani	Direktur Keuangan Director of Finance	Akuntansi dan Manajemen SDM Accounting and HR Management	44	Wanita Female
Ganefi	Direktur SDM & Umum Director of HR & General Affair	Perbankan dan Keuangan Banking and Finance	54	Wanita Female

Hingga akhir tahun 2017, Perseroan belum memiliki kebijakan spesifik yang mengatur mengenai keberagaman dalam komposisi Dewan Komisaris dan Direksi. Akan tetapi, kebijakan *Board Manual* di PT PELNI (Persero) telah mengatur kriteria bagi anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan secara umum kebijakan tersebut mendorong terpilihnya orang-orang dari latar belakang yang beragam untuk kandidat anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

By the end of 2017, the Company had not formulated specific policy regulating diversity in the Board of Commissioners and Board of Directors composition. However, Board Manual Policy at PT PELNI (Persero) stipulates criteria for every Board of Commissioners and Board of Directors members, and generally the policy encouraged selection of candidates from various background as the Board of Commissioners and Board of Directors members.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assesment

PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Mekanisme penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi di Perseroan mengacu pada surat Kementerian BUMN Nomor SK S-676/ BUMN/ MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen. Berdasarkan ketentuan tersebut, landasan penilaian kinerja Anggota Dewan Komisaris dan Direksi dijabarkan dalam *Key Performance Indicators* (KPI) Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi Perseroan. Target-target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators* (KPI) mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis.

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dan Direksi dilaksanakan dalam Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS).

MEKANISME PENILAIAN KINERJA DEWAN KOMISARIS

Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) dalam Rapat Umum Pemegang Saham pada saat melakukan pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) untuk Badan Usaha Milik Negara.
2. Kuasa Pemegang Saham bersama Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) mempersiapkan *Key Performance Indicators* (KPI) yang akan dituangkan dalam Kontrak Manajemen antara pihak Pemegang Saham/Pemilik Modal dengan Pihak Direksi dan Komisaris/Dewan Pengawas PT PELNI (Persero).
3. *Key Performance Indicators* (KPI) yang dipilih haruslah disesuaikan dengan karakteristik masing-masing Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan mencerminkan kegiatan yang dominan pada Perseroan yang sekurang-kurangnya mencakup aspek operasional/teknis dan aspek finansial.
4. Kontrak Manajemen dimaksud merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) pada saat Pengesahan Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP).

BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT

Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment mechanism refers to Minister of SOE Letter No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract. According to this regulation, basis for the Board of Commissioners and Board of Directors Members performance assessment is explained in the Management Key Performance Indicators (KPI) and formulated as Management Contract between Shareholders and Board of Directors. The agreed targets are disclosed in the Management Contract and based on the Key Performance Indicators (KPI) including financial, operational including customer and dynamic aspects.

Board of Commissioners and Board of Directors performance assessment is done in the General Meetings of Shareholders (GMS).

BOARD OF COMMISSIONERS PERFORMANCE ASSESSMENT MECHANISM

The performance appraisal of the Board of Commissioners is carried out under the following mechanism:

1. Implementation of Key Performance Indicators (KPI) in the General Meetings of Shareholders during the validation of Budget Plan (RKAP) of the State-Owned Enterprise.
2. Altogether with the Board of Directors and Board of Commissioners/Supervisory Board, the Shareholders Attorney prepares Key Performance Indicators (KPI) that will be disclosed as Management Contract between the Shareholders/Capital Owner with the Board of Diretors and Board of Commissioners/Supervisory Board of PT PELNI (Persero).
3. The selected Key performance Indicators (KPI) shall be adjsuted with characteristic of each State-Owned Enterprise (SOE) and reflected dominan activity in the Company at leat covering operational/technical aspect and financial aspect.
4. The concerned Management Contract is integrated part of General Meetings of Shareholders (GMS) Minutes of Meeting on Budget Plan (RKAP) ratification.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assesment

HASIL PENILAIAN KINERJA DIREKSI TAHUN 2017

Berdasarkan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap perusahaan BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicators (KPI)* Manajemen dan menjadi suatu Kontrak Manajemen antara Pemegang saham dengan Direksi BUMN.

Kontrak manajemen merupakan kesanggupan manajemen untuk mencapai target-target yang telah disepakati oleh kedua belah pihak yaitu Pemegang Saham dengan Direksi dan Dewan Komisaris. Target- target yang telah disepakati bersama tertuang dalam Kontrak Manajemen berdasarkan *Key Performance Indicators (KPI)* mencakup aspek finansial, operasional termasuk pelanggan dan aspek dinamis.

Dari hasil penilaian diperoleh skor KPI Perseroan Tahun 2017 adalah sebesar 93,15% dengan rincian sebagai berikut:

1. **Perspektif Keuangan dan Pasar**
   Diperoleh skor *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 20,81%.
2. **Perspektif Fokus Pelanggan**
   Diperoleh skor *Key Performance Indicator (KPI)* sebesar 18,23%.
3. **Perspektif Efektivitas Produk dan Proses**
   Diperoleh skor *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 13,96%.
4. **Perspektif Fokus Tenaga Kerja**
   Diperoleh skor *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 16,63%.
5. **Perspektif Kepemimpinan, Tata Kelola, dan Tanggung jawab Kemasyarakatan.**
   Diperoleh skor *Key Performance Indicator* (KPI) sebesar 16,00%.
6. **Keseluruhan Perspektif**
   Diperoleh skor *Key Performance Indicator* (KPI) secara total sebesar 18,63%.

Dapat disimpulkan berdasarkan hasil KPI diatas, hasil pencapaian KPI Perseroan tahun 2017 memperoleh skor 85,63% dengan predikat “BAIK”

PERFORMANCE APPRAISAL RESULTS OF BOARD OF DIRECTORS 2017

According to Minister of SOE Letter No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract, every SOE is regulated to formulate Management Key Performance Indicators (KPI) as Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors in respectice SOE.

Management Contract is agreement of the management to achieve targets agreed by both parties that are Shareholders with Board of Directors and Board of Commissioners. Targets that have been agreed upon are contained in Contract Management based on Key Performance Indicators (KPI) covering financial, operational aspects including customer and dynamic aspects.

From the assessment result, score KPI Company 2016 achievedo 93,15% with details as follows:

1. **Financial and Market Perspective**
   Key Performance Indicator score (KPI) achieved 20.81%.
2. **Perspective of Customer focus**
   Key Performance Indicator score (KPI) achieved 18.23%.
3. **Products and Processes Effectiveness.**
   Key Performance Indicator (KPI) Score achieved 13.96%.
4. **Employee Focus Perspective**
   Key Performance Indicator score (KPI) achieved at 16.63%.
5. **Leadership, Governance, and Social Responsibility Perspective**
   Key Performance Indicator score (KPI) achieved 16.00%.
6. **Overall Perspective**
   Total Key Performance Indicator score (KPI) score achieved 18.63%.

According to the KPI score mentioned above, result of the Company’s KPI achievement in 2016 achieved 85.63% with “GOOD” predicate.

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assesment

Perspektif Perspective	No No	Indikator Indicators	Target Tahun 2017 2017 Target	Realisasi Tahun 2017 Realization in 2017	Satuan Perspective
Keuangan dan Pasar Financial and Market	1	EBITDA Margin EBITDA Margin	16,52	16,24	Kali Times
	2	Pembayaran utang SLA (bunga + denda) SLA Loan Payment (interest + penalty)	4.654.777	3.692.596	Rp juta Rp million
	3	Jumlah penghasilan perkapalan Total Shipping Revenue	Mei, Juni, November, dan Desember May, June, November and December	Mei, Juni, November, dan Desember May, June, November and December	Bulan Month
	4	Penyerapan Dana PMN PMN Funds Absorption	100	42	%
Fokus Pelanggan Customer Focus	5	Indeks Kepuasan Pelanggan (1-5) Customer Satisfaction Index (1-5)	4,20	4,15	Skor Score
	6	Tindak Lanjut Terhadap Keluhan Pelanggan Follow Up on Customer Complaints	97	81	%
Efektivitas Produk dan Proses Product and process effectiveness	7	*Pax Factor* Kapal Penumpang Fax Factor of Passenger Ship	75	55	%
	8	*Load Factor* Muatan Kapal Penumpang Load Factor of Passenger Ship Cargo	70	43	%
	9	*Fleet Utilization Rate* Fleet Utilization Rate	27.350	20.876	Hari days
	10	Realisasi Biaya Pemeliharaan Kapal Ship Repairment Costs Realization	100	47,66	%
	11	*Improvement in Tourism Route* Improvement in Tourism Route	7	4	Paket Package
Fokus Tenaga Kerja Employee Focus	12	Indeks Keterikatan Pegawai (1-5) Employee Engagement Index (1-5)	3,70	4.07	Skor Score
	13	Pegawai PELNI yang Memenuhi Standar Kompetensi Employee Competency Standard Fulfillment	95	98	%
Kepemimpinan, Tata Kelola & Tanggung Jawab Kemasyarakatan Leadership, Governance & Social Responsibility	14	Skor GCG GCG Score	85	80,78	Skor Score
	15	Skor KPKU KPKU Score	460	483	Skor Score
	16	Ketepatan Penyampaiaan Laporan Berkala BUMN On time SOE Regular Report Submission	100	100	%

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assesment

PIHAK YANG MELAKUKAN *ASSESSMENT*

Sesuai dengan surat Kementerian BUMN No. SK S-676/BUMN/MBU/2004 tanggal 24 Desember 2004 tentang Kontrak Manajemen, maka setiap BUMN diwajibkan membuat *Key Performance Indicator* (KPI) Manajemen yang dijadikan Kontrak Manajemen antara Pemegang Saham dengan Direksi BUMN tersebut.

Pihak yang melakukan *assessment* terhadap Perseroan adalah Akuntan Publik, dalam hal ini dilakukan melalui audit *Key Performance Indicator* (KPI). Pada tahun 2017 di lakukan oleh KAP Djoko, Sidik & Indra.

ASSESSOR

According to Minister of SOE Letter No. SK S-6767/BUMN/MBU/2004 dated December 24, 2004 on Management Contract, every SOE is regulated to formulate Management Key Performance Indicators (KPI) as Management Contract between the Shareholders with the Board of Directors in respectice SOE.

The Company's assessor is Public Accountant, in this course, was done by Key Performance Indicators (KPI) audit. In 2016, the assessor was KAP Djoko, Siddik & Indra.

PROSEDUR PELAKSANAAN *ASSESSMENT* ATAS KINERJA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Kinerja Direksi juga dinilai oleh Tim yang ditunjuk Kementerian BUMN untuk menilai keunggulan kinerja Perseroan mengacu pada kriteria lain adalah kriteria penilaian keunggulan kinerja berbasis *Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE).*

Penilaian Kinerja Direksi dan Dewan Komisaris didasarkan pada Pasal 44 Bab XII, Peraturan Menneg BUMN No. PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 dan surat dari Kementerian BUMN No. S-281/S.MBU/2014 tentang Pelaksanaan Evaluasi Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) Tahun 2015 dan 2016, serta dilakukan dengan hasil sebagai berikut:

BOARD OF COMMISISONERS AND BOARD OF DIRECTORS PERFORMANCE ASSESSMENT PROCEDURE

Board of Directors performance is also evaluated by Team appointed by Ministry of SOE to assess excellence performance of the Company referring to other Criteria, which is performance excellence assessment based on Malcolm Baldrige Criteria for Performance Excellence (MBCFPE).

Implementation of Board of Directors and Board of Commissioners performance assessment in the Company refers to Article 44 Chapter XII, Minister of SOE Regulation Number PER-01/MBU/2011 dated August 1, 2011 and Letter from Minister of SOE Number S-281/S.MBU/2014 regarding Implementation of Excellent Performance Assessment Criteria (KPKU) in 2015 and 2016 with result as follows:

Evaluasi Kinerja Direksi Berdasarkan Implementasi Kriteria Penilaian Kinerja Unggul (KPKU) BUMN
Board of Directors Performance evaluation Based on SOE Excellent Peformance Criteria (KPKU) Implementation

Sub Kategori Sub-Category	Maksimal Skor Maximal Score	Pencapaian Skor Tahun 2016 Score Achievement 2016	Maksimal Skor Maximal Score	Pencapaian Skor Tahun 2017 Score Achievement 2017
Kepemimpinan | Leadership				
Kepemimpinan Senior Senior Leadership	70	38,50	70	**38,50**
Tata Kelola dan Tanggung Jawab Sosial/Masyarakatan Governance and Social Responsibility	50	27,50	50	**25,00**
Strategis | Strategic				
Pengembangan Strategi Strategy Development	40	20,00	40	**24,75**
Implementasi Strategi Strategy Implementation	45	20,25	45	**22,00**

PENILAIAN KINERJA DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS
Board of Commissioners and Board of Directors Performance Assesment

Sub Kategori Sub-Category	Maksimal Skor Maximal Score	Pencapaian Skor Tahun 2016 Score Achievement 2016	Maksimal Skor Maximal Score	Pencapaian Skor Tahun 2017 Score Achievement 2017
Pelanggan | Customer				
Suara Pelanggan Customer Inquiry	45	20,25	45	**18,00**
Keterikatan Pelanggan Customer Engagement	40	18,25	40	**20,25**
Pengukuran, Analisis dan Manajemen Pengetahuan | Assessment, Analysis and Knowledge Management				
Pengukuran, Analisis, dan Peningkatan Kinerja Perseroan Assessment, Analysis and Performance Improvement	45	18,00	45	**20,25**
Informasi dan Manajemen Pengetahuan Information, Knowledge Management	45	18,00	45	**20,25**
Tenaga Kerja | Employee				
Lingkungan Tenaga Kerja Employee Circumstances	40	18,00	40	**22,00**
Keterikatan dengan Pekerja Employee Engagement	45	16,00	45	**22,50**
Operasional | Operational				
Proses Kerja Working Process	45	18,00	45	**22.50**
Efektivitas Operasional Operational Effectivity	40	16,00	40	**20,00**
Skor Kategori Proses Category Process Score	550	249	550	**276.00**
Hasil Produk dan Layanan Product and Service Results	110	38,50	110	**54.00**
Hasil/Kinerja Pelanggan Customer Result	90	34,00	90	**32.00**
Hasil/Kinerja Tenaga Kerja Employee Result/Performance	80	34,00	80	**40.00**
Kepemimpinan dan Tata Kelola Leadership and Governance	80	36,00	80	**36.00**
Hasil Keuangan dan Pasar Financial and Market Result	90	40,00	90	**45.00**
Skor Kategori Hasil Result Category Score	450	182,5	450	**207.00**
Total Skor Total Score	**1000**	**431,50**	**1000**	**483.00**
Peringkat Rate	**Early Development**		**Good Performance**	

HUBUNGAN AFILIASI ANTARA DIREKSI, DEWAN KOMISARIS, DAN PEMEGANG SAHAM

Affiliation of Board of Directors, Board of Commissioners and Shareholders

Antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Direksi serta Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali tidak ada memiliki hubungan keluarga sedarah sampai dengan derajat ketiga, baik menurut garis lurus maupun garis kesamping atau hubungan semenda.

Hubungan keluarga dan keuangan antara Anggota Dewan Komisaris dengan sesama Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris serta Pemegang Saham Perseroan periode tahun 2017 digambarkan dalam tabel berikut:

Between members of the Board of Commissioners and members of the Board of Directors and the Main Shareholders and / or controlling Shareholder do not have any blood relation up to the third degree, either on a straight line or a lateral line or in law relationship.

Family and financial affiliation among the Board of Commissioners members with Board of Directors and/ or Board of Commissioners members and Shareholders in 2016 are explained in the table below:

Tabel Hubungan Afiliasi Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham
Table of Board of Directos, Board of Commissioners and Shareholders Affiliation

Nama Name	Hubungan Keluarga Dengan Family Affiliation With						Financial Relationship with Financial Affiliation with					
	Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders		Dewan Komisaris Board of Commissioners		Direksi Board of Directors		Pemegang Saham Shareholders	
	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No	Ya Yes	Tidak No
Dewan Komisaris | Board of Commissioners												
H. Leon Muhamad		√		√		√		√		√		√
Johanes Widodo Hario Mumpuni		√		√		√		√		√		√
Sudarto		√		√		√		√		√		√
Raldi Hendro Koestoer		√		√		√		√		√		√
Satya Bhakti Parikesit		√		√		√		√		√		√
Direksi | Board of Directors												
Insan Purwarisya L Tobing		√		√		√		√		√		√
Harry Boediarto Soewarto		√		√		√		√		√		√
Muhamad Tukul Harsono		√		√		√		√		√		√
Olih Masolich Sodikin		√		√		√		√		√		√
Tri Andayani		√		√		√		√		√		√
Ganefi		√		√		√		√		√		√

Selama tahun 2017, seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki hubungan keluarga dan keuangan dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi maupun dengan Pemegang Saham.

Throughout 2017, all of Board of Commissioners and Board of Directors members were not having family and financial affiliations with other members of Board of Commissioners and Board of Directors or with the Shareholders.

KEPEMILIKAN SAHAM DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Shares Ownership

Diantara anggota Dewan Komisaris maupun anggota Direksi, masing- masing tidak memiliki saham perusahaan, dengan rincian sebagai berikut:

The Board of Commissioners and Board of Directors do not have any shares ownership with detail as follows:

No No	Nama Name	Kepemilikan Saham di Shares Ownership at		
		Anak Perusahaan Subsidairy	Perusahaan Lain Other Companies	Perusahaan Lain Other Companies
Dewan Komisaris | Board of Commissioners				
1	H. Leon Muhamad	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Johanes Widodo Hario Mumpuni	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Sudarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Raldi Hendro Koestoer	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Satya Bhakti Parikesit	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
Direksi | Board of Directors				
1	Insan Purwarisya L Tobing	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
2	Harry Boediarto Soewarto	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
3	Muhamad Tukul Harsono	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
4	Olih Masolich Sodikin	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
5	Tri Andayani	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None
6	Ganefi	Tidak ada None	Tidak ada None	Tidak ada None

RANGKAP JABATAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Board of Commissioners and Board of Directors Dual Position

Penjelasan rangkap jabatan di perusahaan atau instansi lain juga dijabarkan sebagai berikut:

Explanation of dual position in the Company or other institutions is as follows :

No No	Nama Name	Rangkap Jabatan Dual Position	
		Anak Perusahaan Subsidairy	Perusahaan / Instansi Lain Other Companies Institutions
Dewan Komisaris | Board of Directors			
1	H. Leon Muhamad	-	-
2	Johanes Widodo Hario Mumpuni	-	-
3	Sudarto	-	Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan Direktorat Jenderal Kementerian Keuangan Diretor of Information and Technology System Treasury Directorate General of the Ministry of Finance
4	Raldi Hendro Koestoer	-	Analis Kebijakan Ahli Utama di Kemenko Expert Policy Analyst at Kemenko
5	Satya Bhakti Parikesit	-	Deputi Bidang Kemaritiman Sekretariat Kabinet Deputy of the Ministry of Marine Affairs Secretariat Cabinet
Direksi | Board of Directors			
1	Insan Purwarisya L Tobing	-	-
2	Harry Boediarto Soewarto	-	-
3	Muhamad Tukul Harsono	-	-
4	Olih Masolich Sodikin	Komisaris Utama PT PIDC President Commissioners of PT PIDC	-
5	Tri Andayani	-	-
6	Ganefi	-	-

KOMITE AUDIT
Audit Committee

Komite Audit dibentuk di bawah Dewan Komisaris untuk membantu Dewan Komisaris melakukan fungsi pengawasan, dan bertanggung jawab secara langsung kepada Dewan Komisaris. Komite Audit bersifat mandiri, baik dalam pelaksanaan tugas maupun pelaporan.

Komite Audit dibentuk oleh, dan bekerja untuk, serta bertanggung jawab kepada Dewan Komisaris. Pembentukan Komite Audit merupakan manifestasi kepatuhan Perseroan terhadap Peraturan Pemerintah tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit, yang dinyatakan melalui Peraturan Bapepam-LK No. XI. 1. 5, Lampiran Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK No. Kep-305/BEJ/07/2004 tanggal 19 Juli 2004 tentang Peraturan No. 1-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang diterbitkan oleh Perseroan tercatat.

PIAGAM KOMITE AUDIT DAN PEDOMAN KERJA

Dalam rangka pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero), sebagaimana yang tercantum dalam Piagam Komite Audit Nomor: 01/DK/I/2016 tanggal 8 Januari 2016, perlu disusun Rencana Kerja Komite Audit sebagai panduan dalam melakukan pengawasan terhadap proses pelaporan keuangan Perseroan, monitoring dan mengevaluasi proses pelaksanaan audit oleh auditor eksternal dan auditor internal.

Audit Committe Charter (Piagam Komite Audit) mengatur hal-hal mengenai Struktur Komite Audit, Persyaratan Keanggotaan, Tanggung Jawab Komite Audit, Tugas Komite Audit, Wewenang Komite Audit, Rapat Komite Audit, Tanggung Jawab Pelaporan dan Masa Tugas.

PERSYARATAN KOMITE AUDIT

1. Pihak ekstern yang diangkat menjadi Komite Audit tidak mempunyai hubungan usaha maupun hubungan afiliasi dengan Perseroan, Direktur, Komisaris atau Pemegang Saham Mayoritas.
2. Memiliki integritas yang tinggi, Kemampuan, Pengetahuan dan Pengalaman yang memadai dalam bidang tugasnya serta mampu berkomunikasi dengan baik.
3. Salah seorang dari Anggota Komite Audit harus memiliki latar belakang Pendidikan Akuntansi atau Keuangan.

The Audit Committee is established under the Board of Commissioners to assist the Board of Commissioners performing the supervisory function, and is directly responsible to the Board of Commissioners. The Audit Committee is independent, both in the performance of duties and reporting.

The Audit Committee is established by, and works for, and is responsible to the Board of Commissioners. The establishment of the Audit Committee is a manifestation of the Company's compliance with the Government Regulation on the Establishment and Implementation Guidelines of the Audit Committee, as stated in Bapepam-LK Regulation No. XI. 1. 5, Attachment of Decree of Chairman of Bapepam-LK No. Kep-305/BEJ/07/2004 dated July 19, 2004 concerning Regulation No. 1-A regarding Recording of Shares and Equity Securities Other than Shares issued by the Listed Company.

AUDIT COMMITTEE CHARTER AND WORKING GUIDELINE

In order to execute the duties of Audit Committee of PT PELNI (Persero), as stated in the Audit Committee Charter Number: 01/DK/I/2016 dated January 8, 2016, it is necessary to formulate the Audit Committee Work Plan as a guide in supervising the Company's financial reporting process, monitoring and evaluating the audit implementation process by external auditors and internal auditors.

Audit Committee Charter regulates aspects related to Audit Committee Structure, Membership Requirement, Audit Committee Responsibility, Audit Committee Duty, Audit Committee Authority, Audit Committee Meeting, Reporting Responsibility and Serving Period.

AUDIT COMMITTEE REQUIREMENT

1. External party to be appointed as Audit Committee shall not have any business relation or affiliation with the Company, Director, Commissioner or Majority Shareholders.
2. To have high integrity, competency, sufficient knowledge and experience in the working field and good communication skill.
3. One of the Audit Committee Members shall have Accounting or Finance educational background.

KOMITE AUDIT
Audit Committee

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN KOMITE AUDIT

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Komite Audit dilakukan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Surat Keputusan yang dikeluarkan oleh Dewan Komisaris.

Pemberhentian anggota Komite Audit dapat dilakukan apabila yang bersangkutan berakhir masa jabatan keanggotaannya dan berdasarkan keputusan Dewan Komisaris, diberhentikan karena tidak memenuhi kinerja yang telah ditetapkan dan/atau tidak kompeten dalam menjalankan tugasnya.

AUDIT COMMITTEE APPOINTMENT AND DISCHARGE

Appointment and discharge of the Audit Committee members are done by Board of Commissioners based on a Decree issued by Board of Commissioners.

The Audit Committee members discharge may be administered if the concerned member entered end of his serving period and under the Board of Commissioners Decree is terminated due to not complying with the expected performance and/or being not competent in exercising the duty.

KOMPOSISI KOMITE AUDIT

Bedasarkan keputusan Dewan Komisaris No. KEP.03/DK/VIII/2017 tanggal 1 Agustus 2017 tentang pemberhentian dan pengangkatan Anggota-anggota Komite Audit dan berdasarkan Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-264/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Perseroan Perseroan PT PELNI (Persero), terjadi pergantian Komisaris Independen sekaligus sebagai Ketua Komite Audit, sehingga susunan Komite Audit PT PELNI (Persero) adalah sebagai berikut:

AUDIT COMMITTEE COMPOSITION

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-264/MBU/12/2017 dated December 4, regarding the Dismissal and Appointment of Board of Commissioners of PT PELNI (Persero), there was a change of Independent Commissioner as well as Chairman of the Audit Committee, and thus the composition of PT PELNI (Persero)'s Audit Committee is as follows:

Komposisi Komite Audit 2017
Audit Committee Composition 2017

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Penunjukkan Basis of Appointment
Johanes Widodo Hario Mumpuni	Ketua Komite Audit Audit Committee Chairman	KEP.03/DK/VIII/2017
Subagio	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP.03/DK/VIII/2017
Joko Murdyono	Anggota Komite Audit Audit Committee Member	KEP.03/DK/VIII/2017

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE AUDIT

Pengangkatan setiap anggota Komite Audit Perseroan didasarkan atas pemikiran untuk memastikan independensi Komite Audit sehingga dapat melakukan tugasnya dengan baik dan semestinya. Oleh karena itu, Perseroan menunjuk anggota Komite Audit yang memenuhi syarat independensi atau tidak berbenturan kepentingan dengan Perseroan terutama dalam hal tidak memiliki hubungan keluarga, keuangan, kepengurusan, dan kepemilikan terhadap Perusahan.

INDEPENDENCY OF AUDIT COMMITTEE

The appointment of each member of the Audit Committee of the Company is based on the premise of ensuring the independence of the Audit Committee so that it can perform its duties well and properly. Therefore, the Company appoints a member of the Audit Committee that meets the independence requirements or does not conflict with the Company, principally regarding having no relationship in terms of family, financial, management, and ownership of the Company.

Tabel Pengungkapan Independensi Komite Audit 2017
Table of Audit Committee Independency Disclosure 2017

Komite Audit Audit Committee	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accountant Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	Memiliki Saham Perseroan (Langsung/Tidak Langsung) Shares Ownership in he Company (Direct/Non-Direct)	Hubungan Bisnis dengan Perseroan Business Affiliation with the Company
Johanes Widodo Hario Mumpuni	x	x	x	x	x
Subagio	x	x	x	x	x
Joko Murdyono	x	x	x	x	x

HUBUNGAN KELUARGA DAN KEUANGAN KOMITE AUDIT

Untuk memenuhi syarat independensi sesuai dengan peraturan yang berlaku di Indonesia, seluruh anggota Komite Audit tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/ atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi, yang dapat mempengaruhi kemampuannya bertindak independen.

FAMILY RELATIONSHIP AND FINANCIAL AUDIT COMMITTEE

To qualify for independence in accordance with Indonesian regulations, all members of the Audit Committee have no financial, management, share ownership and / or family relationship with the Board of Commissioners and Board of Directors, which may affect their ability to act independently.

TUGAS DAN WEWENANG KOMITE AUDIT

Komite Audit bertugas untuk memberikan pendapat kepada Dewan Komisaris terhadap laporan atau hal-hal yang disampaikan oleh Direksi kepada Dewan Komisaris, mengidentifikasikan hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, dan melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan tugas Dewan Komisaris. Tugas Komite Audit tersebut secara rinci adalah:

Tugas Komite Audit

1. Menilai atas efektivitas pelaksanan Satuan Pengawasan Intern (SPI) yaitu :
   a. Me-*review* perencanaan audit SPI terutama dengan cara :
      1. Mengevaluasi Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) termasuk penentuan sampel audit.
      2. Mengevaluasi penentuan audit *issue* di luar PKPT
      3. Mengevaluasi program audit dalam rangka pelaksanaan PKPT
   b. Mereviu pelaksanaan audit yang telah dilakukan SPI untuk memastikan bahwa audit telah dilaksanakan sesuai rencana dan supervisi audit telah dilakukan secara memadai untuk menjamin mutu pelaksanaan audit.

THE AUDIT COMMITTEE DUTIES AND AUTHORITIES

The Audit Committee is in charge to provide recommendations to the Board of Commissioners on report or issue that is presented by the Board of Directors to the Board of Commissioners, to identify other issues that require concern from the Board of Commissioners and perform other duties related with the Board of Commissioners' duties. The Audit Committee's duties are explained as follows:

Audit Committee Duties

1. Assessing the effectiveness of the implementation of the Internal Audit Unit (SPI), namely:
   a. Reviewing the Internal Audit Unit plans mainly by:
      1. Evaluating the Annual Audit Work Program (PKPT) including determining the audit sample.
      2. Evaluating the determination of audit issues outside of Annual Audit Work Program
      3. Evaluating the audit program in the implementation of Annual Audit Work Program
   b. Reviewing the audit conducted by the Internal Audit Unit (SPI) to ensure that the audits are carried out as planned and its supervision has been adequately conducted to ensure the quality of the audit.

KOMITE AUDIT
Audit Committee

c. Mereviu pelaporan SPI terutama mengevaluasi Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) SPI dan secara uji petik menguji Kertas Kerja Pemeriksaan dari LHP tersebut untuk meyakinkan bahwa Laporan Pemeriksaan yang disajikan telah didukung dengan bukti- bukti memadai. Apabila dianggap perlu, Komite Audit mengadakan pemeriksaan ulang ke unit-unit yang terkait dengan pemeriksaan yang telah dilakukan SPI.
d. Memonitor dan menilai tindak lanjut hasil audit untuk kemudian mengambil langkah-langkah yang diperlukan dalam hal audit tidak menindaklanjuti laporan SPI.
e. Melakukan komunikasi secara periodik dengan SPI dalam rangka mendiskusikan permasalahan-permasalahan yang menjadi perhatian Komite Audit.

2. Menelaah kualitas informasi keuangan yang akan dikeluarkan oleh Perseroan selain laporan tahunan seperti laporan bulanan, laporan triwulanan, laporan semesteran, rencana kerja dan anggaran Perseroan serta informasi keuangan lainnya.
3. Menelaah efektivitas pengendalian intern.
4. Menelaah tingkat kepatuhan Perseroan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan komisaris.

Wewenang Komite Audit

1. Untuk melaksanakan tugas-tugasnya, Komite Audit berwenang untuk mengakses secara penuh, bebas, dan tidak terbatas terhadap catatan, karyawan, sumber daya dan dana serta aset Perseroan lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dalam setiap penugasan yang berhubungan dengan permintaan data dan informasi kepada unit selain SPI diberikan surat tugas yang ditandatangani Komisaris.

FREKUENSI DAN TINGKAT KEHADIRAN RAPAT KOMITE AUDIT

Komite Audit selama tahun 2017 melakukan rapat sebanyak 11 (sebelas) kali pertemuan yang seluruhnya telah didokumentasikan dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran masing-masing Anggota Komite Audit sesuai tabel berikut:

c. Reviewing the Internal Audit Unit reporting primarily evaluating the its Inspection Result Report (LHP) and assessing the Examination Working Paper from the Inspection Result Report (LHP) to ensure that the Inspection Report presented has been supported by sufficient evidence. If deemed necessary, the Audit Committee shall conduct a re-examination of the units relating to the inspection conducted by the Internal Audit Unit.
d. Monitoring and assessing follow-up audit results to take the necessary steps in the event that the audit does not follow up on the Internal Audit Unit report.
e. Periodically communicates with SPI in order to discuss issues of concern to the Audit Committee.

2. Reviewing the quality of financial information to be issued by the company in addition to annual reports such as monthly reports, quarterly reports, semiannual reports, work plans and Company's budgets as well as other financial information.
3. Reviewing the effectiveness of internal control.
4. Reviewing the level of corporate compliance with applicable laws and regulations.
5. Carrying out other tasks assigned by the Board of Commissioners

Audit Committee Authority

1. To perform its duties, the Audit Committee is authorized to access full, free, and unlimited records, employees, resources and funds and other company assets relating to the performance of its duties.
2. In any assignment relating to data and information requests to non-Internal Audit Units are assigned a letter of duty signed by the Board of Commissioners.

AUDIT COMMITTEE MEETING FREQUENCY AND ATTENDANCE LEVEL

In 2017, Audit Committee held 11 (eleven) meetings which all had been documented in Minutes of Meeting. Detail of Audit Committee member attendance is presented in table below:

KOMITE AUDIT
Audit Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Johanes Widodo Hario Mumpuni*	Ketua Chairman	2	2	100%
Subagio**	Anggota Member	7	7	100%
Joko Murdyono**	Anggota Member	7	7	100%
Omo Dahlan***	Ketua Chairman	9	9	100%
Fatoni****	Anggota Member	4	4	100%
Awal Susmanto****	Anggota Member	4	4	100%

* Menjabat mulai Desember 2017 | Served from December 2017
** Menjabat mulai Agustus 2017 | Served from August 2017
*** Menjabat sampai dengan November 2017 | Served until November 2017
**** Menjabat sampai dengan Juli 2017 | Served until July 2017

AGENDA RAPAT KOMITE AUDIT 2017

AUDIT COMMITTEE MEETING AGENDA 2017

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
1	18 Januari 2017 January 18, 2017	1. Rapat Rutin Bulanan. Mounthly Routine Meeting. 2. Rencana Membuat Buku Kenangan PT PELNI Dalam Angka Periode 10 Tahun (2007-2017) Dalam Jabatan Komisaris Independen Making Memories book plan of PT PELNI in Figures for 10 Years (2007-2017) period in Independent Commissioner Position. 3. Lain-lain. Others.
2	01 Maret 2017 March 01, 2017	1. Pembahasan LHA - SPI Triwulan IV Tahun 2016. Discussion about Quarter IV LHA – SPI for 2016. 2. Lain-lain. Others.
3	18 April 2017 April 18, 2017	1. Evaluasi Kinerja Triwulan I/2017 Komite Audit. Quarter I/2017 Performance of Audit Committee Evaluation. 2. Usulan Rencana Kegiatan TW-II/2017. Proposed Activity Plan TW-II / 2017. 3. Surat Masuk tanggal 24 maret 2017 NO.108/SXX/03/207 perihal pemantauan TL.Rekomendasi BPK-RI Pada PT PELNI (Persero). Incoming Letter dated 24 March 2017 NO.108 / SXX / 03/207 regarding to monitoring TL.Recommendation of Indonesian Supreme Audit Institution to PT PELNI (Persero). 4. Lain-lain. Others.
4	19 Juli 2017 July 19, 2017	1. Pembahasan LHA-SPI Semester I/2017. Discussion on LHA – SPI Semester I/2017. 2. Lain-lain. Others.
5	22 Agustus 2017 August 22, 2017	1. Rapat Rutin Bulanan Dan Perkenalan Anggota Komite Baru Mounthly Routine Meeting and New Committee Members introduction. 2. Lain-lain. Others.
6	20 September 2017 September 20, 2017	1. *Monitoring* Tindak lanjut Hasil Audit internal dan Eksternal PT PELNI (persero). Monitoring Followed-up for Internal and External Audit Results of PT PELNI (Persero). 2. Lain-lain. Others.

KOMITE AUDIT
Audit Committee

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Direksi 2017 Board of Dorectors Meeting Agenda 2017
7	11 Oktober 2017 October 11, 2017	1. Evaluasi Kinerja Komite Audit Dewan Komisaris PT PELNI (persero) Triwulan III 2017. Audit committee of The Board of Commissioner performance evaluation for PT PELNI (Persero) Quarter III of 2017 . 2. Lain-lain. Others.
8	25 Oktober 2017 October 25, 2017	1. Hasil Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Triwulan III /2017 PT PELNI (persero). Evaluation Results of PT PELNI (Persero) Quarter III/2017 budget realization report. 2. Lain-lain. Others.
9	8 November 2017 November 8, 2017	1. Pembahasan LHA -SPI TW-III/2017. Discussion about LHA – SPI TW-III/2017. 2. Lain-lain. Others.
10	20 November 2017 November 20, 2017	1. Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran Bulan Oktober. Evaluation on Budget Realization Report for October. 2. Lain-lain. Others.
11	20 Desember 2017 December 20, 2017	1. Evaluasi Laporan Realisasi Anggaran PT PELNI (Persero) Evaluation on PT PELNI (Persero) Budget Realization report. 2. Lain-lain. Others.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS KOMITE AUDIT 2017

Pada tahun 2017, manajemen PT PELNI (Persero) mengalami perubahan direksi. Hal ini ditandai dengan pergantian Direktur Utama, Direktur Operasi dan Direktur SDM dan Umum. Pergantian direksi ini disebabkan karena masa tugas direksi sebelumnya telah menyelesaikan masa tugas 5 tahun.

Komite Audit dalam menjalankan tugas melakukan telah dan memberikan rekomendasi atas Laporan Manajemen bulanan, triwulanan ataupun semesteran kepada PT PELNI (Persero). Selama tahun 2017 tercatat ada beberapa poin yang perlu mendapatkan perhatian manajemen PT PELNI (Persero):

a. Bidang Manajemen

Komite Audit telah melakukan penelaahan dengan beberapa hasil rekomendasi terkait bidang manajemen, sebagai berikut:

1. Terkait dengan laporan bulanan yang di buat Manajemen sudah baik, namun belum mencerminkan kinerja anggaran dan operasional Kantor Cabang di daerah. Oleh karena itu perlu dipertimbangkan pentingnya Laporan Realisasi Anggaran dan Kinerja Kantor Cabang PT PELNI (Persero), agar dapat tergambar Kantor cabang mana saja yang kinerjanya baik dan kantor cabang mana saja yang kinerjanya masih belum optimal.

THE AUDIT COMMITTEE DUTIES AND AUTHORITIES IN 2017

In 2017, the management of PT PELNI (Persero) made a change in the composition of Board of Directors. This is marked by the turn of the President Director, Director of Operations and Director of Human Resources and General Affairs. The change of Board of Directors is due to the completed 5 years term of the Board of Directors.

Audit Committee in performing its task, has reviewed and provided recommendation on Management Report monthly, quarterly or in semester to PT PELNI (Persero). During the year 2017, there are some points that need to be concerned by the management of PT PELNI (Persero):

a. Management

Audit Committee had conducted review with recommendations related with management aspect, as follows:

1. Related to the monthly report by the Management is good already, but it does not reflect budget performance and operational Branch Office in area yet. Therefore, it is necessary to consider the importance of Budget Realization Report and Performance of PT PELNI (Persero) Branch Offices, in order to be able to describe which branch offices are performing well and which ones are not performing optimally.

2. Masih terdapat 1 kapal yang masih membebani Perseroan selama bertahun-tahun, yaitu kapal Jetliner. Sedangkan permasalahan untuk kapal KM Ganda Dewata sudah selesai terjual bulan Agustus 2017. Aset Tetap KM Ganda Dewata sudah terjual dan sudah dihapus buku dari Neraca PT PELNI (Persero) dan hasil penjualan sudah tersaji dalam Kas dan Setara Kas PT PELNI (Persero).
3. Terdapat pengelolaan kapal perintis yang masih inefisiensi (penggunaan BBM masih sangat boros) dan mengalami berbagai macam kendala teknis (kerusakan mesin dan dokumen administrasi kapal). Sementara dari sisi manajemen, bagian/ unit yang khusus menangani kapal perintis masih belum sepenuhnya bekerja dengan optimal.
4. Adanya program pemerintah (Tol Laut), membuka peluang bagi PT PELNI (Persero) untuk memanfaatkan kapal barangnya. Meskipun dari sisi efisiensi, kapal-kapal barang milik PT PELNI (Persero) yang ada saat ini sudah tidak layak lagi dari sisi operasional. Dari sisi PT PELNI (Persero), meskipun di tahun 2017 ini mencatat laba, namun laba tersebut bukan berasal dari operasional kapal yang optimal, tetapi disebabkan karena adanya tambahan dana PSO untuk pengoperasian kapal barang PT PELNI (Persero).
5. Permasalahan keterlambatan pencairan dana PSO selama bertahun-tahun menjadi problem yang terus berulang. Hal ini menyebabkan manajemen kas PT PELNI (persero) kurang likuid dan berisiko, sehingga PT PELNI (Persero) mau tidak mau akhirnya selalu manambah pinjaman modal kerja untuk mengatasi kesulitan likuiditas tersebut. Padahal dengan tambahan pinjaman tersebut, justru makin membebani PT PELNI (Persero) khususnya untuk pembayaran bungan pinjamannya. Untuk itu percepatan penandatanganan kontrak dengan Ditjen Perhubungan Laut harus dilakukan di awal tahun (bulan januari).
6. Laporan kemajuan program kerja Perseroan masih terlalu umum dan tidak *up to date* dengan kenyataan sebenarnya. Di samping itu juga tidak mencantumkan target waktu untuk pencapaian program secara lebih spesifik.
7. Selama tahun 2017, proses penyampaian Laporan Manajemen Bulanan dan Triwulanan kepada Komite Audit berjalan cukup baik dan tepat waktu, kecuali untuk Laporan Triwulan III yanga agak terlambat.
8. Dari sisi laba, kinerja PT PELNI (Persero) semakin membaik jika dibandingkan dengan kinerja tersebut

2. There is still one ship that burdens the company for years, namely the Jetliner ship, whereas the problem for the KM Ganda Dewata ship has been sold in August 2017. Fixed assets of KM Ganda Dewata already is sold and has been removed from the book of balance PT PELNI (Persero) and the sales results are presented in Cash and Cash Equivalents PT PELNI (Persero).
3. There was inefficiency in the Perintis ship management (the use of fuel is still very wasteful). Also there were various technical constraints (engine damage and ship administration documents). While from the management side, the part /unit that specifically handles the Perintis ship is still not fully working optimally.
4. The existence of government Tol Laut program opens the opportunity for PT PELNI (Persero) to utilize its cargo ships. Despite efficiency, PT PELNI (Persero)'s existing ships are no longer feasible from the operational side. From PT PELNI (Persero)'s side, although in 2017 it recorded profit, but the profit was not from the optimal ship operational, but due to additional PSO fund for the operation of PT PELNI (Persero)'s ship.
5. The problem of late disbursements of PSO funds over the years has been a recurring problem. This makes the cash management of PT PELNI (Persero) liquid and risky. Therefore, want it or not, PT PELNI (Persero) always adds working capital loan to overcome the liquidity difficulties. In fact with the additional loans, it increasingly burdens PT PELNI (Persero)especially for the payment of the loan interest. Therefore, the signing of the contract with the Directorate General of Sea Transportation must be done immediately at the beginning of the year (in January).
6. The progress report of the company's work program is still too general and not up to date with actual reality. In addition, it does not include the target time for achieving the program more specifically.
7. During 2017, the process of delivering the Monthly and Quarterly Management Report to the Audit Committee is working fairly and on time, except for the late Quarter III Report.
8. In terms of earnings, PT PELNI (Persero) performance is getting better compared to that of

KOMITE AUDIT
Audit Committee

pada periode yang sama tahun sebelumnya. Meskipun demikian, capaian laba tersebut tidak mengindikasikan posisi *cash flow* yang baik. Bahkan selama beberapa bulan terakhir, posisi kas untuk kegiatan operasional selalu mencatat nilai negatif, yang artinya beban operasional Perseroan lebih besar dibanding pendapatan operasional.

9. Program pengetatan/pengawasan terhadap penggunaan BBM yang dicanangkan PT PELNI (Persero) mencatatkan hasil yang cukup baik, karena mampu menekan biaya BBM rata-rata hampir 10% dibandingkan dengan penggunaan BBM dalam RKAP 2017.
10. Dari sisi kinerja kapal penumpang, terlihat bahwa terdapat fluktuasi yang bervariasi dari setiap kapal. Pada periode *peak season* (arus mudik dan arus balik hari raya Idul Fitri), kinerja kapal penumpang menunjukkan kenaikan pendapatan. Namun secara umum, tren jumlah penumpang kapal PELNI dari tahun ke tahun menunjukkan penurunan. Hal ini harus diperhatikan oleh manajemen PT PELNI (Persero) dalam merencanakan.
11. Pengelolaan kapal ternak sepanjang tahun 2017 secara umum hampir mendekati target RKAP dan juga mencatat laba. Meskipun jika dilihat dari tujuan adanya kapal angkutan ternak (menurunkan harga daging), belum sepenuhnya terwujud.
12. Penggunaan dana PMN selama tahun 2017 masih belum signifikan dan ditemukan beberapa kendala internal (Penyusunan SOP, proses lelang, dan lain-lain) yang tidak sesuai dengan perencanaan semula. Untuk itu pada tahun 2018 diharapkan semua kendala internal yang menghambat penggunaan PMN harus diantisipasi oleh manajemen PT PELNI (Persero).

b. Bidang Audit Internal

Kinerja SPI di tahun 2017 terus membaik dari kualitas penyajian laporan, adapun dari sisi penyampaian Laporan triwulanan kepada Komite Audit belum sepenuhnya tepat waktu. Dalam beberapa pertemuan rutin triwulanan dengan SPI, komite audit mencatat ada beberapa hal yang menjadi perhatian manajemen, yaitu:

1. Terkait temuan SPI, masih banyak temuan yang belum ditindaklanjuti oleh auditan. Merujuk pada kondisi tersebut, agar tindak lanjut yang belum dilaksanakan menjadi fokus pada tahun 2018 serta perlunya penyelenggaraan pertemuan rutin antara

the previous year. Nevertheless, the achievement of the profit does not indicate a good cash flow position. Even during the last few months, cash position for operational activities always recorded a negative value, which means that the company's operational expenses are greater than operational income.

9. The program of tightening/supervision on the use of fuel oil which is proclaimed by PT PELNI (Persero) recorded good results, because it can reduce the cost of fuel an average of almost 10% compared with the use of fuel in the Company's Budget Plan (RKAP) 2017.
10. In terms of passenger vessel performance, it can be seen that there are variations in fluctuations from each ship. During the peak season period (Homecoming Traffc in Eid Holiday), the passenger ship performance shows an increase in revenue. In general, however, the trend of PELNI ship passenger numbers from year to year shows a decline. This should be considered by the management of PT PELNI (Persero) in the planning.
11. The management of livestock vessels throughout 2017 is generally close to the target of Company's Budget Plan (RKAP) and also profits. Although if viewed from the purpose of the cargo ships (lowering the price of meat), it has not been fully realized.
12. The use of Government Capital (PMN) during the year 2017 was still not significant and there were internal constraints (SOP Preparation, auction process, etc.) not in accordance with the original planning. Therefore, by 2018 it is expected that all internal constraints hampering the use of Government Capital should be anticipated by the management of PT PELNI (Persero).

b. Internal Audit

Internal Audit Unit (SPI) performance in 2017 continues to improve from the quality of report presentation, on the other side the Quarterly Report submission to the Audit Committee has not been fully timely. In some quarterly routine meetings with the Internal Audit Unit, the Audit Committee noted that there were several issues of concern to management:

1. Related to findings of Internal Audit Unit, there were still many findings that have not been acted upon by the audits. Referring to these conditions, the follow-up that has not been implemented will be the focus in 2018 and the need for the holding

semua pihak yang diaudit dan SPI yang akan difasilitasi oleh Komite Audit untuk membahas tindak lanjut temuan pemeriksaan SPI.

2. Kualitas penyajian laporan hasil pemeriksaan SPI (triwulanan) sudah menunjukkan perbaikan kualitas. Atribut temuan seperti judul temuan, kondisi, kriteria, sebab, akibat, dan rekomendasi sudah cukup baik sehingga laporan tersebut menjadi lebih informatif. Hanya saja dibutuhkan konsistensi penyajian atribut temuan pada setiap laporan pemeriksaan. Karena beberapa temuan yang disajikan masih belum konsisten antara uraian kondisi dan uraian sebab atau sebaliknya.
3. Permasalahan SDM SPI yang sering mengalami rotasi menjadi kendala bagi SPI dalam melaksanakan PKPT. Di samping itu, program pendidikan dan pelatihan audit bagi SDM SPI perlu untuk ditingkatkan untuk meningkatkan kualitas SDM SPI. Untuk itu usulan anggaran diklat perlu direalisasikan sesuai dengan kebutuhan diklat SDM SPI.
4. Objek pemeriksaan sudah mulai banyak ke kapal dan juga kantor pusat. Hal ini perlu ditingkatkan kualitas pemeriksaannya.

c. Bidang Audit Eksternal

1. Penunjukkan KAP
   Untuk audit keuangan Tahun Buku 2017, telah dilakukan tender untuk menunjuk KAP yang akan melakukan general audit tahun buku 2017 dan saat ini sedang dalam proses audit. Pemenang tender adalah KAP Djoko, Sidik, & Indra.
2. Monitoring Proses Audit
   Selama pelaksanaan proses audit oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra, komite audit melakukan komunikasi dengan KAP dilakukan sesuai dengan kebutuhan, paling sedikit 3 kali selama proses audit. Sampai dengan akhir tahun 2017 telah dilakukan entry meeting dengan KAP Djoko, Sidik, & Indra yang membahas mengenai ruang lingkup, metodologi dan hal-hal lain yang terkait dengan proses audit dan progres temuannya akan disampaikan tiap minggu untuk dapat segera ditindaklanjuti oleh manajemen dengan disupervisi oleh Komite Audit.

of regular meetings between all parties audited and the Internal Audit Unit will be be facilitated by the Audit Committee to discuss the follow up of the Internal Audit Unit examination findings.

2. The quality of the presentation of SPI inspection report (quarterly) has shown quality improvement. Attribute findings such as title findings, conditions, criteria, causes, effects, and recommendations are good enough to make the report more informative. It only takes the consistency of presenting the attribute findings on each inspection report because some of the findings presented are still not consistent between the description of the condition and the description of cause or otherwise.
3. The problem of SPI Human Resources that often experience rotation becomes an obstacle for SPI in implementing Annual Audit Work Program (PKPT). In addition, the education and training programs for the SPI human resources need to be improved to enhance the quality of SPI's human resources. Therefore, the proposed training budget needs to be realized in accordance with the needs of the SPI HR Training.
4. The object of examination has started towards many ship and also the headquarters. The quality of the examination needs to be improved.

c. External Audit

1. KAP Appointment
   For the financial audits of Fiscal Year 2017, tender has been made to appoint a Public Accounting Firm (KAP) that will conduct general audit of fiscal year 2017 and is currently in the process of auditing. The winning bidder is Public Accounting Firm Djoko, Sidik, & Indra.
2. Audit Process Monitoring
   During the audit process conducted by Public Accounting Firm Djoko, Sidik, & Indra, the Audit Committee communicates with KAP conducted as needed, at least 3 times during the audit process. Until the end of 2017, an entry meeting with KAP Djoko, Sidik, & Indra discussing the scope, methodology and other matters related to the audit process and the progress of its findings will be submitted every week to be followed up by management and supervised by Audit Committee.

KOMITE AUDIT
Audit Committee

3. Menilai Hasil Pelaksanaan Audit Eksternal (KAP)

   Karena sampai laporan ini dibuat proses audit masih sedang berlangsung, kami belum dapat menilai hasil pelaksanaan audit oleh KAP Djoko, Sidik, & Indra secara lebih detail.
4. Menilai Hasil Audit (BPK)
   Komite Audit bersama dengan SPI melakukan update atas tidak lanjut rekomendasi hasil audit BPK pada PT PELNI (Persero) yang masih belum selesai/masih belum ditindaklanjuti, bahkan pada tahun 2017 Komite Audit bersama SPI melakukan pertemuan dengan seluruh auditan yang membahas tindak lanjut rekomendasi pemeriksaan BPK RI. Selain itu juga komite audit memberikan tanggapan lisan atas hasil pemeriksaan BPK terkait dengan pertanggungjawaban penggunaan dana PSO.

d. Bidang Penugasan dari Dewan Komisaris

1. Mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris
   Selama tahun 2017 Komite Audit belum menemukan adanya masalah yang memerlukan perhatian Dewan Komisaris, sehingga laporannya juga tidak disusun. Hanya saja Komite Audit memberikan masukan secara lisan terkait permintaan rekomendasi perubahan organisasi, melakukan raoat pembahasan mengenai proses pemeliharaan kapal dengan direktorat Armatek, kemudian melakukan rapat pembahasan mengenai pengelolaan kapal perintis dan lain-lain.
2. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Dewan Komisaris
   Selama tahun 2017 Komite Audit telah melaksanakan penugasan Dewan Komisaris yaitu penugasan untuk mengecek pengaduan konsumen atas pungutan ganda tiket Jakarta-Surabaya dan penugasan untuk mengevaluasi Sistem Pengendalian Internal terkait Struktur Organisasi PT PELNI (Persero). Sementara untuk penugasan monitoring pengelolaan operasional di lapangan belum dilakukan.

3. Evaluate External Audit (KAP) Implementation Report.
   Because until this report is made the audit process is still in progress, we have not been able to assess the results of the audit by Public Accounting Firm Djoko, Sidik, & Indra in more detail.
4. Evaluate Audit Report (BPK)
   The Audit Committee together with the Internal Audit Unit (SPI) updated the recommendation of Financial Audit Board (BPK) audit results to PT PELNI (Persero) which is still unfinished / has not been followed up yet, even in 2017 Audit Committee together with SPI held a meeting with all auditors discussing the follow up of BPK RI's audit recommendations. In addition, the audit committee provided an oral response to the BPK audit results related to the accountability of PSO funds.

d. Assignment from the Board of Commissioners

1. Identified issues that required concern from the Board of Commissioners
   During the year 2017, the Audit Committee has not found any problems requiring the attention of the Board of Commissioners, so the report is also not compiled. It is just that the Audit Committee provides verbal feedback related to the request of recommendation of organizational change, conducting discussion on the process of ship maintenance with the Fleets and Technical Directorate, then conducting a meeting discussion on the management of Perintis ship etc.
2. Carried out the duties assigned by the Board of Commissioners
   During the year 2017, the Audit Committee has conducted the assignment of the Board of Commissioners, namely the assignment to check the consumer complaints of the double ticket charge of Jakarta-Surabaya ticket and the assignment to evaluate the Internal Control System related to the Organizational Structure of PT PELNI (Persero), as for the assignment of monitoring operational management in the field has not been done.

PROFIL KOMITE AUDIT
Audit Committee Profile

Johanes Widodo Hario Mumpuni
Ketua Komite Audit
Head of Audit Committee

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
60 tahun per 31 Desember 2017
60 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Yogyakarta, 15 Mei 1957
Yogyakarta, May 15, 1957

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Komite Audit berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. SK-264/MBU/12/2017
Appointed as Head of Audit Committee based on SOE's Decision Letter No. SK-264/MBU/12/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1993	Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University Halifax, Nova Scotia, Canada Master of Business Administration (MBA) in Accounting, Saint Mary's University Halifax, Nova Scotia, Canada
1983	Sarjana Ekonomi, Fakultas Ekonomi, Jurusan Akuntansi, Universitas Gadjah Mada,Yogyakarta Bachelor Degree of Economy, Economic Faculty, Accounting Major, Gajah Mada University, Yogyakarta

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014 - Sekarang (Present)	Staf Ahli BPK Bidang Keuangan Pemerintah Pusat. Indonesian Supreme Audit Institution (BPK) Expert Staff of Central Government Finance Field.
2007 – 2009	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
1984 - Sekarang (Present)	Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Indonesian Supreme Audit Institution (BPK).
2005 – 2007	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara VII. Main Auditor (Tortama) State Finance VII.
2009 – 2014	Auditor Utama (Tortama) Keuangan Negara III. Main Auditor (Tortama) State Finance III.

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Independen Perseroan
Independent Commissioner of the Company

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL KOMITE AUDIT
Audit Committee Profile

Subagio
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
48 tahun per 31 Desember 2017
48 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Kediri, 15 Juni 1969
Kediri, June 15, 1969

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No KEP.03/DK/VIII/2017
Appointed as Committee Audit member based on decree of board of Commissioner No. KEP.03/DK/VIII/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2014	Master of Public Administration University of Canbera Australia Master of Public Administration University of Canbera Australia	1998	Sarjana Ekonomi Studi Pembangunan Universitas Terbuka Pondok Cabe Bachelor of Economic Development Studies at Terbuka University, Pondok Cabe
2011	Magister Manajemen STIE IPWIJA Master of Management STIE IPWIJA	1991	Diploma Spesialisasi Anggaran STAN Diploma of Budget Specialization at Indonesian State College of Accountancy
2006	Sarjana Sains Terapan Akuntansi STAN Bachelor of Applied Accounting Science at Indonesian State College of Accountancy		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Audit Perseroan Member of Audit Committee of the Company	2011- 2013	Kepala Bagian Perencanaan dan Anggaran Komisi Pemberantasan Korupsi Head of Planning and Budget Division of Indonesia's Corruption Eradication Commission
2015 – 2016	Pengolah Data Sistem Informasi & Layanan SDM Senior Direktorat Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan Data Processor Information Systems & Senior HR Services of Directorate General of Treasury at Ministry of Finance	2010 – 2011	Bendahara Pengeluaran Komisi Pemberantasan Korupsi Spending Treasurer of Indonesia's Corruption Eradication Commission
2013 – 2015	Spesialis Perencanaan dan Anggaran Madya Komisi Pemberantasan Korupsi Planning and Budget Associate Specialist of Indonesia's Corruption Eradication Commission	2006 – 2009	Fungsional Pada Kedeputian Bidang Penindakan KPK Functional On Deputy for Action of Indonesia's Corruption Eradication Commission

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL KOMITE AUDIT
Audit Committee Profile

Joko Murdyono
Anggota Komite Audit
Audit Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
46 tahun per 31 Desember 2017
46 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Pati, 7 Oktober 1971
Pati, October 7, 1971

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Audit berdasarkan KeputusanDewanKomisaris No KEP.03/DK/VIII/2017
Appointed as Audit Committee Member based on decree of Board of Commissioner No. KEP.03/DK/VIII/2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2006	Magister Administrasi Bisnis STIA LAN Master of Business Administration at STIA LAN

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Audit Perseroan Member of Audit Committee of the Company	2010 - 2014	Kasubag Akuntansi dan Verifikasi, Biro Keuangan dan Perlengakapan Head of Accounting and Verification, Finance and Equipment Bureau
2014 - Sekarang (Present)	Kabag Akuntansi dan BLU, Biro Keuangan dan Perlengakapan Head of Accounting and public service agency, Finance and Equipment Bureau		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO
Risk Policy Committee

Komite Kebijkan Risiko merupakan komite di bawah Dewan Komisaris yang bertugas untuk memberikan masukkan kepada Dewan Komisaris atas penyusunan dan perbaikan manajemen risiko. Komite Kebijakan Risiko menerapkan berbagai pendekatan pengelolaan risiko sesuai dengan pedoman dan peraturan perundang-undangan terkait guna meminimalkan dampak risiko terhadap kegiatan usaha dan operasional Perseroan. Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero).

The Risk Policy Committee is a committee under the Board of Commissioners assigned to provide input to the Board of Commissioners on the preparation and improvement of risk management. The Risk Policy Committee applies various risk management approaches in accordance with relevant legislation and regulations to minimize the impact of risks on the Company's business and operations. PT PELNI (Persero) Risk Policy Committee is established under PT PELNI (Persero) Risk Policy Committee Board of Commissioners Decree No. SK: Kep.03/DK/XII/2015 dated December 10, 2015 regarding Appointment and discharge of PT PELNI (Persero) regarding appointment and discharge of Risk Policy Committee Chairman under PT PELNI (Persero) Board of Commissioners.

KOMPOSISI KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris No. Kep-03/DK./VIII/2017, tanggal 01 Agustus 2017, Tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Kebijakan Risiko, telah diberhentikan dan diangkat Anggota Komite Kebijakan Resiko.

Berikut ini adalah susunan Komite Kebijakan Risiko per 31 Desember 2017 :

RISK POLICY COMMITTEE COMPOSITION

Based on Board of Commissioners' Decree No. Kep-03/DK/VIII/2017, dated August 1, 2017, Concerning Dismissal and Appointment of Risk Policy Committee Members, the following names have been dismissed and appointed Member of Risk Policy Committee.

The following is the composition of Risk Policy Committee as of December 31, 2017:

KOMPOSISI KOMITE KEBIJAKAN RISIKO 2017

RISK POLICY COMMITTEE COMPOSITION 2017

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Pengangkatan Basis of Appointment
Satya Bhakti Parikesit	Ketua Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Chairman	Kep-03/DK/XII-2015
Abdul Kholik Sutrisno	Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member	Kep-06/DK/XII-2017
Radjalis	Anggota Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee Member	Kep-06/DK/XII-2017

INDEPENDENSI ANGGOTA KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Salah satu persyaratan Komite Kebijakan Risiko dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya adalah independensi. Anggota Komite Kebijakan Risiko harus bersikap independen, obyektif dan profesional.

Berikut adalah tabel pengungkapan Independensi dari Komite Kebijakan Resiko sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 :

INDEPENDENCY OF RISK POLICY COMMITTEE MEMBERS

One of requirements for the Risk Policy Committee in implementing duty and responsibility is independency. The Risk Policy Committee members shall be independent, objective and professional.

The following is table of Independency Disclosure of Risk Policy Committee until December 31, 2017:

Tabel Pengungkapan Independensi Komite Kebijakan Risiko 2017
Table of Risk Policy Committee Independency Disclosure 2017

Komite Kebijakan Risiko Risk Policy Committee	Pejabat Eksekutif Kantor Akuntan Publik Executives of Public Accountant Firm	Afiliasi dengan Pemegang Saham Affiliation With Shareholders	Hubungan Keluarga dengan Dewan Komisaris dan Direksi Family Affiliation with Board of Commissioners and Board of Directors	Memiliki Saham Perseroan (Langsung/Tak Langsung) Shares Ownership in the Company (Direct/Non-Direct)	Hubungan Bisnis dengan Perseroan Business Affiliation with the Company
Satya Bhakti Parikesit	X	X	X	X	X
Abdul Kholik Sutrisno	X	X	X	X	X
Radjalis	X	X	X	X	X

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Komite Kebijakan Risiko bertugas untuk:

1. Memberikan masukan kepada Dewan Komisaris mengenai penyusunan dan perbaikan manajemen risiko yang berkaitan dengan pengendalian risiko semua bidang Perseroan sebelum mendapat persetujuan Dewan Komisaris;
2. Melakukan diskusi dengan Direksi atau unit kerja yang terkait dengan manajemen risiko, jika diperlukan;
3. Mempelajari, mengkaji ulang kebijakan dan peraturan-peraturan tentang kebijakan manajemen risiko yang dibuat oleh Direksi;
4. Melakukan kaji ulang secara berkala terhadap kebijakan manajemen risiko beserta pedoman pelaksanaanya serta semua perubahan serta penyesuaian kebijakan manajemen risiko tersebut;
5. Melakukan evaluasi terhadap akurasi model dan validitas data yang digunakan untuk mengukur risiko; dan
6. Menyampaikan masukan kepada Dewan Komisaris atas hal-hal yang mendapat perhatian dan yang perlu dibicarakan dengan Direksi, agar melakukan tidak lanjut dari hasil evaluasi manajemen risiko oleh Komite Kebijakan Risiko.

RAPAT KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Komite Kebijakan Risiko selama tahun 2017 melakukan rapat sebanyak 10 (sepuluh) kali pertemuan dan telah didokumentasi dalam notulen rapat. Rincian jumlah kehadiran rapat masing-masing Anggota Komite Kebijakan sesuai tabel berikut:

DUTY AND RESPONSIBILITY OF RISK POLICY COMMITTEE

The Risk Policy Committee has duty as follows:

1. Provide input to the Board of Commissioners regarding the preparation of risk management improvements related to risk control all areas of the company prior to the approval of the Board of Commissioners;
2. Discuss with the Board of Directors or unit of work related to risk management, if necessary;
3. Study, reviewing policies and regulations on risk management policies made by the Board of Directors;
4. Conduct periodic review of the risk management policies and their implementation guidelines as well as all the changes and adjustments to the risk management policies;
5. To evaluate the model's accuracy and validity of the data used to measure the risk; and
6. Delivering input to the Board of Commissioners on matters that received attention and which need to be discussed with the Board of Directors, so could be followed up from the evaluation of the risk management by the Risk Policy Committee

RISK POLICY COMMITTEE MEETING

In 2017, the Risk Policy Committee organized 10 (ten) meetings which all have been documented in the Minutes of Meeting. Detail explanation about attendance of each Policy Committee member is as follows:

KOMITE KEBIJAKAN RISIKO
Risk Policy Committee

Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meetings	Kehadiran Attendance	Persentase Kehadiran Attendance Percentage
Satya Bhakti Parikesit	Ketua Chairman	10	10	100%
Abdul Kholik Sutrisno*	Anggota Member	1	1	100%
Radjalis*	Anggota Member	1	1	100%
Purjono**	Anggota Member	9	9	100%
Suyatman**	Anggota Member	9	9	100%

* Menjabat mulai Desember 2017 | Served from December 2017
** Menjabat sampai Desember 2017 | Served until December 2017

AGENDA RAPAT KOMITE KEBIJAKAN RISIKO 2017 / RISK POLICY COMMITTEE MEETING AGENDA 2017

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda
1	20 Januari 2017 January 20, 2017	1. Pembahasan hasil evaluasi Kinerja Unit Manajemen (ERM). Management unit evaluation results discussion. 2. Masukan untuk penyusunan Laporan Manajemen Risiko Tw-IV/2016. Input for the Risk Management Report preparation Tw-IV/2016. 3. Lain-lain. Others.
2	23 Februari 2017 February 23, 2017	1. Pembahasan laporan Manajemen Risiko tahun 2016 2016 Management Risk Report Discussion. 2. Lain-lain. Others.
3	16 Maret 2017 March 16, 2017	1. Pembahasan perkembangan pengelolaan Manajemen Risiko pada Direktorat SDM & Umum PT PELNI (Persero). The Risk Management Development Discussion at the Directorate of Human Resources & General of PT PELNI (Persero). 2. *Issue* SDM yang paling untuk dikerjakan. The most human resource issues to work on. 3. Lain-lain. Others.
4	22 Mei 2017 May 22, 2017	1. Persiapan angkutan lebaran. Preparation of Lebaran transportation. 2. Lain-lain. Others.
5	23 Mei 2017 May 23, 2017	1. Persiapan angkutan lebaran. Preparation of Lebaran Transportation. 2. Lain-lain. Others.
6	7 Juni 2017 June 7, 2017	1. Pembahasan Laporan Manajemen Resiko TW-I/2017. The Risk Management Report Discussion TW-I/2017. 2. Pembahasan pemaparan persiapan angkutan lebaran tahun 2017. Discussion of Lebaran transportation preparation exposure in 2017. 3. Lain-lain. Others.
7	26 Juli 2017 July 26, 2017	1. Pemaparan Direktur SDM & Umum terkait Perembangan *Asset Iddle.* The Director exposure of Human Resources & Public Affairs related to the Development of Idle Assets. 2. Lain-lain. Others.

No No	Tanggal Date	Agenda Rapat Komite Audit Audit Committee Meeting Agenda
8	22 September 2017 Septermber 22, 2017	1. Pembahasan Laporan TW-II/2017. TW-II/2017 Discussion. 2. Lain-lain. Others.
9	31 Oktober 2017 October 31, 2017	1. Pembahasan Perawatan Kapal sebagai bagian dari Mitigasi Risiko menghadapi Natal, Liburan sekolah dan Tahun Baru 2018. Discussion on Ship Maintenance as part of Risk Mitigation facing Christmas, School holidays and New Year 2018.
10	13 Desember 2017 December 13, 2017	1. Pembahasan Laporan Manajemen Risiko TW-III/2017. The Risk Management Report Discussion TW-III/2017. 2. Lain-lain. Others.

REALISASI PROGRAM KERJA KOMITE KEBIJAKAN RISIKO 2017

Pada tahun 2017, Komite Kebijakan Risiko telah merealisasikan program dan kegiatan kerja, sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan 12 (dua belas) Rapat Internal Komite Kebijakan Risiko dan membahas laporan kinerja Perseroan, Laporan Manajemen Risiko dan hal lain yang dianggap perlu.
2. Melakukan 4 (empat) pertemuan dengan Unit Manajemen Risiko guna membahas potensi risiko, proses mitigasi risiko dan kecukupan staf yang ditugaskan serta pelaporan.
3. Melakukan 4 (empat) pertemuan dengan Direksi PT PELNI (Persero) dan melakukan monitoring potensi dan mitigasi risiko di Direktorat Armada dan Direktorat SDM serta Direktorat Keuangan secara periodik.
4. Melakukan evaluasi manajemen risiko Perseroan dengan menyampaikan 4 (empat) laporan evaluasi manajemen risiko Perseroan kepada Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan penugasan khusus dari Dewan Komisaris serta memberikan saran dan/atau pendapat atas penugasan tersebut sebanyak 2 kali.

RISK POLICY COMMITTE WORKING PROGRAM REALIZATION 2016

In 2017, Risk Policy Committee had realized working program and activity, as follows:

1. Organize 12 (twelve) Risk Policy Committee Internal Meetings and discuss the Company's performance, Risk Management report and other important aspects.
2. Organize 4 (four) meetings with Risk Management Unit to discuss risk potential, risk mitigation process and adequacy of assigned staffs and reporting process.
3. Conducting 4 (four) meetings with the Board of Directors of PT PELNI (Persero) and monitoring potential and risk mitigation at the Fleet Directorate and Directorate of Human Resources and Finance Directorate periodically.
4. Evaluate the risk management by submitting 4 (four) risk management evaluation report (quarter) to the Board of Commissioners.
5. Carrying out special assignments from the Board of Commissioners and provide advice and / or opinion on the assignment twice.

PROFIL KOMITE KEBIJAKAN RISIKO

Risk Policy Committee Profile

Satya Bhakti Parikesit
Ketua Komite Kebijakan Risiko
Head of Risk Policy Committe

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
45 tahun per 31 Desember 2017
45 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Cimahi, 6 November 1972
Cimahi, November 6, 1972

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Ketua Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
Appointed as Head of Risk Policy Committee based on Decision Letter No. Kep-06/DK/XII-2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2000	Ph.D of International Law, University of Nottingham, Inggris Ph.D of International Law, University of Nottingham, England	1995	Sarjana Hukum, Universitas Indonesia Bachelor Degree of Law, Universitas Indonesia
1999	Magister, Universitas Padjajaran Master Degree of Law from Universitas Padjajaran		

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2015-Sekarang (Present)	Komisaris PT PELNI (Persero) Commissioner at PT PELNI (Persero)	2011	Sekretariat Kabinet dan Asisten Deputi Bidang Perundang-Undangan bidang Perekonomian Cabinet Secretariate and Assistant of Deputy in Legal, Economy Sector
2015	Staf Ahli Bidang Hukum dan Hubungan Internasional Expert Staff in Legal and International Relation		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

-

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Komisaris Perseroan
Commissioner of the Company

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL KOMITE KEBIJAKAN RISIKO
Risk Policy Committee Profile

Abdul Kholik Sutrisno
Anggota Komite Kebijakan Risiko
Risk Policy Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
33 tahun per 31 Desember 2017
33 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Tasikmalaya, 14 April 1984
Taskmalayai, April 14, 1984

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
Appointed as Committee Audit member based on SK No. Kep-06/DK/XII-2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2009	Sarjana Ekonomi STIE Muhammadiyah Jakarta Bachelor of Economy STIE Muhammadiyah Jakarta	2005	Diploma Akuntansi STAN Diploma of Accounting STAN

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2017 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Kebijakan RisikoPerseroan Member of Risk Policy Committee of the Company	2013	PT Bina Karya (Persero) PT Bina Karya (Persero)
2017	PT Barata Indonesia (Persero) PT Barata Indonesia (Persero)		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

PROFIL KOMITE KEBIJAKAN RISIKO
Risk Policy Committee Profile

Radjalis
Anggota Komite Kebijakan Risiko
Risk Policy Committee Member

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
55 tahun per 31 Desember 2017
55 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Padang, 3 Desember 1962
Padang, December 3, 1962

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat sebagai Anggota Komite Kebijakan Risiko berdasarkan SK No. Kep-06/DK/XII-2017
Appointed as Committee Audit member based on SK No. Kep-06/DK/XII-2017

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2006	Magister Administrasi Bisnis STIA LAN Master of Business Administration at STIA LAN	1988	Sarjana Ekonomi Universitas Jayabaya Bachelor Degree of Jayabaya University

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2016 - Sekarang (Present)	Anggota Komite Kebijakan Risiko Perseroan Member of Risk Policy Committee of the Company	2015	Kepala Kajian Kemitraan dan Pelayanan Transportasi laut & Manajemen Transportasi Head of Partnership Studies and Services of Marine Transportation & Transportation Management
2016	Kepala Bidang Tata Kelola Sistem Pelayanan Prasarana Transportasi Head of Governance of Transportation Services Infrastructure System	2013	Kasubag Perlengkapan Transportasi Laut Biro Keuangan Head of the Sea Transportation Division of the Finance Bureau

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Anggota Komite Kebijakan Risiko
Member of Risks Policy Committee

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

FUNGSI NOMINASI DAN/ATAU REMUNERASI

Nomination and/or Remuneration Function

KOMITE NOMINASI, REMUNERASI DAN TATA KELOLA

Secara struktural, Perseroan tidak memiliki Komite Nominasi dan Remunerasi di bawah koordinasi Dewan Komisaris. Namun fungsi nominasi dan remunerasi Perseroan tetap dilakukan oleh Dewan Komisaris dengan dibantu oleh Komite Audit dan Komite Risiko.

NOMINATION, REMUNERATION AND GOVERNANCE COMMITTEE

Structurally, the Company has no Nomination and Remuneration Committee under the coordination of the Board of Commissioners. However, the Company's nomination and remuneration functions are still conducted by the Board of Commissioners, assisted by the Audit Committee and the Risk Committee.

KEBIJAKAN MENGENAI SUKSESI DIREKSI

Perseroan telah memiliki mekanisme penetapan kandidat pengganti/suksesor Direksi, yaitu dengan mempunyai *"Talent Pool"* satu tingkat di bawah Direksi. Proses penilaian kompetensi dilakukan oleh Konsultan Independen. *Talent Pool* tersebut akan diajukan oleh Dewan Komisaris kepada Pemegang Saham.

BOARD OF DIRECTORS SUCCESSION POLICY

The Company has a mechanism to appoint Board of Directos successior candidate with "Talent Pool" one level below the Board of Directors. The competency assessment process is done by Independent Consultant. Talent Pool will be proposed by the Board of Commissioners to the Shareholders.

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

Sekretaris Perusahaan merupakan pejabat penghubung *(liaison officer)* antara Perseroan dengan pihak-pihak berkepentingan *(stakeholders)* serta menjaga kepatuhan PT PELNI (Persero) terhadap hukum dan perundang-undangan. Sekretariat Perusahaan juga mengemban misi untuk mendukung terciptanya citra Perseroan yang baik secara konsisten dan berkesinambungan melalui pengelolaan program komunikasi yang efektif kepada segenap pemangku kepentingan.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SEKRETARIS PERUSAHAAN

Dalam menjalankan fungsinya tersebut *Corporate Secretary* memiliki tugas-tugas pokok sebagai berikut:

a. Menyiapkan rencana kerja (jangka panjang, menengah dan pendek) dan program kerja Perseroan yang berkaitan dengan Humas, Kelembagaan & CSR, Kesekretariatan Direksi & GCG serta Pengelolaan Dokumen Korporat;
b. Menyiapkan konsep peraturan kebijakan dan system prosedur dalam pengelolaan hubungan korporat, GCG, CSR, dokumentasi dan keprotokolan Perseroan, kesekretariatan layanan umum rumah tangga kantor Direksi;
c. Menyelenggarakan kegiatan hubungan korporat, tata kelola perusahaan yang baik (GCG) dan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), dokumentasi dan keprotokolan Perseroan, kesekretariatan serta layanan umum rumah tangga kantor Direksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
d. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan Direksi diKantor Cabang, Kapal, SBU, Instansi terkait dilingkup intemal dan ekstemal Perseroan;
e. Melakukan pengelolaan dan mitigasi risiko dalam pelaksanaan kegiatan Sekretariat Perusahaan;
f. Menyiapkan laporan berkala dan/atau laporan khusus kegiatan Sekretariat Perusahaan sesuai ketentuan yang berlaku.

LAPORAN PELAKSANAAN TUGAS SEKRETARIS PERUSAHAAN TAHUN 2017

Adapun kegiatan-kegiatan Sekretaris Perusahaan selama tahun 2017 antara lain:

- Sebagai pejabat penghubung *(liaison officer)* meliputi hubungan Perusahaan dengan Pemegang Saham, regulator, lembaga lain dan publik;
- Penanggung jawab Sekretariat Perusahaan;
- Memastikan bahwa PT PELNI (Persero) mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan yang berlaku;

Corporate Secretary is a liaison officer between the Company and stakeholders as well sa to maintain compliance of PT PELNI (Persero) with the Law and regulatory frameworks. The Corporate Secretary also carries mission to support positive corporate image building consistently and continuously through effective communication program management to all Stakeholders.

DUTY AND RESPONSIBILITY OF CORPORATE SECRETARY

Description of duties and responsibilities of the Corporate Secretary is as follows:

a. Preparing thework plans (long, medium and short term) and corporate work programs related to Public Relation, Institutional & CSR, Secretariat of the Board of Directors & GCG and Corporate Document Management;
b. Preparing the concept of regulatory policies and system procedures in management of corporate relationships, GCG, CSR, corporate documentation and protocol, secretarial, household general services of the Board of Directors;
c. Conducting corporate relations activities, good corporate governance and corporate social responsibility (CSR), corporate documentation and protocol, secretarial and the household general services of the Board of Directors in accordance with applicable regulations;
d. Coordinating the activities implementation of the Board of Directors in Branch Offices, Ships, SBUs, related Institutions covering internal and external of the Company;
e. To manage and mitigate risks in the implementation of the secretariat activities of the Company;
f. Preparing periodic reports and / or special reports on the secretariat activities of the Company in accordance with applicable regulations.

CORPORATE SECRETARY DUTY IMPLEMENTATION REPROT 2017

Activities of the Corporate Secretary in 2017 are among others:

- As a liaison officer including the company's relationship with shareholders, regulators, other agencies and the public;
- Responsible for Corporate Secretariat;
- Ensure that PT PELNI (Persero) has obliged the applicable regulations on disclosure requirements;

SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary

- Membuat perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian kegiatan komunikasi terhadap publik internal dan eksternal;
- Mengikuti perkembangan peraturan-peraturan yang berlaku dan mematikan Perseroan untuk mematuhi peraturan tersebut;
- Membuat dokumentasi;
- Mengawal jalannya GCG dan CSR.

- Make the planning, implementation and control of public communication activities to internal and external;
- Following the development of the applicable regulations for the company to comply with these regulations;
- Creating documentation;
- Escorting the course of GCG and CSR.

PROFIL SEKRETARIS PERUSAHAAN
Corporate Secretary Profile

Didik Dwi Prasetio
Sekretaris Perusahaan
Head of Corporate Secretary

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Usia | Age
Berusia 50 tahun per 31 Desember 2017
50 years old as of December 31, 2017

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Malang, 15 Otober 1967
Malang, October 15, 1967

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

Diangkat menjadi Sekretaris Perusahaan berdasarkan SK No.07.30/1/SK/HKO.01/2015.
Appointed as Corporate Secretary based on SK No.07.30/1/SK/HKO.01/2015.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

1997	Sarjana Administrasi Niaga Bachelor Degree of State Administration	1986	D3 Pelayaran Tata Laksana Diploma 3 of Shipping Management

Pengalaman Kerja | Work Experiences

Mei 2017 May 2017	VP Pemasaran Kapal Tol Laut & Ternak, IVA/ KANTOR PUSAT/ 05.04/03/SK/HKO.01/2018. VP Marketing of Tol Laut & Livestock Vessels, IVA/CENTER OFFICE/05.04/03/SK/HKO.01/2018.	Juli 2015	Sekretaris Perusahaan, IVA/ KANTOR PUSAT/ 07.30/1/SK/HKO.01/2015. Corporate Secretary, IVA/KANTOR PUSAT/ 07.30/1/SK/HKO.01/2015
April 2017 April 2017	VP Tol Laut & Livestock Ship Marketing, IVA/ KANTOR PUSAT/ 04.26/01/SK/HKO.01/20. VP of Tol Laut & Livestock Ship Marketing, IVA/OFFICE CENTER/04.26/01/SK/HKO.01/20.		

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

Tidak Ada
None

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Tidak Ada
None

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

SATUAN PENGAWASAN INTERN (SPI)

Internal Audit Unit (SPI)

Satuan Pengawasan Intern (SPI) di Perseroan telah dilengkapi dengan Piagam Pengawasan Internal *(Internal Audit Charter)* yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No: 12.22/2/SK/HKO.01/2014 tanggal 22 Desember 2014 yang menjelaskan visi, misi, tujuan, ruang lingkup struktur, standar dan kode etik, wewenang, tugas dan tanggung jawab dari unit Satuan Pengawasan Intern. In*ternal Audit Charter* disusun sebagai pedoman bagi SPI untuk dapat melaksanakan kewenangan, tugas dan tanggung jawabnya secara profesional, kompeten, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat diterima oleh semua pihak yang berkepentingan dalam melaksanakan aktivitas Perseroan. Satuan Pengawasan Intern Perseroan dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Pengawasan Intern (Ka. SPI) yang diangkat dan diberhentikan Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.

Internal Audit Unit in the Company has been equipped with Internal Audit Charter that is stipulated under Board of Directors Decree No. 12.22/2/SK/HKO.01/2014 dated December 22, 2014 that explains vision, mission, objectives, scope of structure, standard and code of ethics, authority, duty and responsibility of Internal Audit Unit. The Internal Audit Charter is prepared as guideline for SPI to exercise authority, duty and responsibility professionally, competent, independent and accountable to be accepted by all interested parties in carrying out the Company's activities. The Internal Audit Unit is supervised by Head of Internal Audit Unit (Ka. SPI) who is appointed and discharged by President Director with approval from the Board of Commissioners.

KEDUDUKAN SATUAN PENGAWASAN INTERN DAN PIHAK YANG MENGANGKAT/MEMBERHENTIKAN KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERN

Satuan Pengawasan Intern (SPI) berkedudukan di Kantor Pusat dan bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama untuk mewujudkan sistem pengendalian internal yang dapat menjamin pelaksanaan tugas Perseroan sesuai mandat yang diterima dan peraturan yang berlaku, dengan mengacu kepada prinsip efisiensi dan efektivitas serta prinsip-prinsip dasar GCG yaitu transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, kemandirian dan kewajaran.

Kedudukan Satuan Pengawasan Intern di Perseroan dijelaskan sebagai berikut:

1. Dalam struktur organisasi Perseroan, SPI berada di bawah Direktur Utama dan dipimpin oleh seorang Kepala SPI.
2. Kepala SPI diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama atas persetujuan Dewan Komisaris.
3. Kepala SPI secara struktural bertanggungjawab kepada Direktur Utama dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit.
4. Personil SPI bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala SPI.

Kepala Satuan Pengawasan Intern diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama. Hal ini didasarkan pada Piagam SPI yang telah ditetapkan dalam Surat Keputusan Direksi No: 12.22/2/SK/HKO.01/2014 tanggal 22 Desember 2014.

POSITION OF INTERNAL AUDIT UNIT AND PARTY WHO APPOINTED/DISCHARGED THE HEAD OF INTERNAL AUDIT UNIT

Internal Audit Unit is assigned at Head Office and responsible directly to the President Director to establish internal control system to ensure implementation of Company's duty according to the delegated mandate and prevailing Law by referring to efficiency and effectiveness principels as well as GCG basic principles, among others, transparency, accountability, responsibility, independency and fairness.

Position of Internal Audit Unit in the Company is explained as follows:

1. In the organization structure, SPI is under the President Director and supervised by Head of SPI.
2. Head of SPI is appointed and discharged by President Director with approval from Board of Commissioners
3. Head of SPI is responsible structurally to President Director and functionally to Board of Commissioners through Audit Committee.
4. SPI Personnel is responsible directly to Head of SPI.

The head of the Internal Audit Department is appointed and dismissed by the President Director. This is based on the SPI Charter as stipulated in The Directors Decree No: 12.22/2/SK/HKO.01/2014 dated December 22, 2014.

Struktur Organisasi SPI
SPI Organization Structure

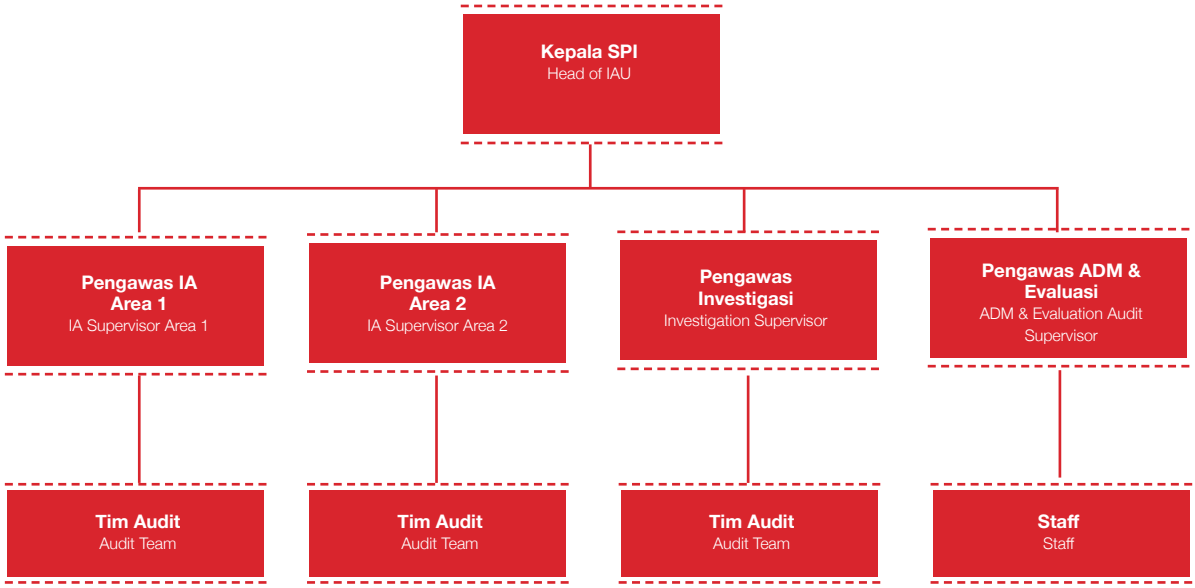

JUMLAH DAN KUALITAS AUDITOR INTERNAL

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan Pengawasan Intenal dalam pelaksanaan pekerjaannya dibantu oleh Pengawas Intern Area I, Pengawas Intern Area II, Pengawas investigasi, Pengawas Administrasi & Evaluasi. Saat ini, jumlah pegawai SPI Perseroan berjumlah 16 (enam belas) orang dengan susunan internal auditor Perseroan per 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut :

NUMBER AND QUALITY OF INTERNAL AUDITOR

In carrying out its duties, the Head of the Internal Audit Unit is assisted by Internal Controller Area I, Internal Auditor Area II, Investigative Auditor, and Administration & Evaluation Auditor. Currently, the total number of SPI employees of the Company is 16 (sixteen) personnel and the internal composition of the Company's auditors as of December 31, 2017 is as follows:

SATUAN PENGAWAN INTERN (SPI)
Internal Audit Unit (SPI)

KOMPOSISI PERSONIL SATUAN PENGAWASAN INTERN 2017

INTERNAL AUDIT UNIT PERSONNEL COMPOSITION 2017

No No	Nama Name	Jabatan Position
1	Ernesto	Kepala SPI Head of Internal Audit Unit
2	Christoforus Aries Basanggu	Pengawas Intern I Supervisor of Intern I
3	Agung Topo BS	Pengawas Intern II Supervisor of Intern II
4	Dahlia	Pengawas Administrasi & Evaluasi Administration & Evaluation Supervisor
5	Donni Rachmadi	Pengawas Investigasi Investigation Supervisor
6	Damli, SE	Pemeriksa Utama Primary Examiner
7	Agus Purwo Sartono	Pemeriksa Utama Primary Examiner
8	M. Suwadi	Pemeriksa Utama Primary Examiner
9	Sriyanto	Pemeriksa Utama Primary Examiner
10	Deni Hendayana	Pemeriksa Utama Primary Examiner
11	Yusman Sugeng	Pemeriksa Madya Madya Examiner
12	Sudjito	Pemeriksa Madya Madya Examiner
13	Nunung Nuraeni	Pemeriksa Madya Madya Examiner
14	Bastian Ronald Ephraim G	Pemeriksa Pratama Pratama Examiner
15	Ivan Eka Aditya	Senior Officer Senior Officer
16	Rohanah	Senior Officer Senior Officer

PIAGAM AUDIT INTERNAL

SPI merujuk Piagam Audit Internal *(Internal Audit Charter)* yang ditetapkan oleh Direktur Utama tanggal 22 Desember 2014 sebagai landasan formal tertulis yang menjadi pedoman bagi Satuan Pengawasan Intern Perseroan dalam menjalankan wewenang, tugas dan tanggung jawabnya secara kompeten, independen dan dapat dipertanggungjawabkan. Piagam Audit Internal memuat:

1. Pendahuluan.
2. Visi dan Misi.
3. Tujuan.
4. Penyempurnaan.
5. Struktur dan Kedudukan.
6. Independensi dan Objektivitas.
7. Tugas dan Tanggung Jawab.

INTERNAL AUDIT CHARTER

Internal Audit Unit (SPI) refers to the Internal Audit Charter stipulated by the President Director dated December 22, 2014 as a written formal basis which guides the Company's Internal Audit Unit in exercising its authorities, duties, and responsibilities competently, independently and accountably. The Internal Audit Charter includes:

1. Introduction.
2. Vision and Mission.
3. Objectives.
4. Improvement.
5. Structure and Position.
6. Indepenedncy adn Objectiveness.
7. Duty and Responsibility.

8. Wewenang.
9. Persyaratan Auditor.
10. Standar dan Kode Etik.
11. Larangan Rangkap Tugas.
12. Pola Hubungan.
13. Riviu Internal *Audit Charter.*
14. Penutup.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB SPI

Uraian Tugas dan tanggung jawab SPI yang ditetapkan berdasarkan Piagam Internal Audit adalah sebagai berikut:

a. Menyusun dan melaksanakan Program Kerja Audit Tahunan (PKAT);
b. Mengevaluasi integritas dan kehandalan, informasi dan sarana yang digunakan untuk mengidentifikasikan, mengukur, mengklasifikasikan dan melaporkan informasi tersebut;
c. Mengevaluasi sistem yang diciptakan untuk menjamin kepatuhan terhadap kebijakan, rencana kerja, prosedur, peraturan perundangan yang memiliki dampak besar terhadap organisasi Perseroan;
d. Menguji dan mengevaluasi pelaksanaan pengendalian internal dan sistem manajemen risiko sesuai dengan kebijakan Perseroan;
e. Melakukan audit dan penilaian atas efisiensi dan efektivitas di bidang keuangan, akuntansi, operasional, sumber daya manusia, pemasaran, teknologi informasi dan penggunaan aset/alat produksi serta kegiatan lainnya.
f. Melakukan audit atas badan usaha afiliasi dan Anak Perseroan, atas permintaan Direktur Utama dan laporan disampaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris Anak Perusahaan;
g. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang objektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan manajemen;
h. Membuat laporan hasil audit dan menyampaikan laporan tersebut kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, up. Komite Audit;
i. Memantau, menganalisa dan melaporkan pelaksanaan tindak lanjut perbaikan yang telah disarankan oleh SPI dan/atau Auditor Eksternal;
j. Melakukan evaluasi mutu kegiatan audit internal yang dilakukan;
k. Melakukan audit khusus, apabila diperlukan atas permintaan Direktur Utama atau sebagai pengembangan hasil audit sebelumnya.
l. Melakukan kegiatan konsultasi berkaitan dengan pengelolaan risiko, sistem pengendalian internal, serta praktik tata kelola dalam upaya meningkatkan kinerja dan nilai Perseroan secara berkesinambungan.

8. Authority.
9. Auditor Requirement.
10. Standard and Code of Conducts.
11. Dual Position Prohibition.
12. Relationship Mechanism.
13. Internal Audit Charter Review.
14. Closing.

DUTY AND REPSONSIBILITY OF SPI

Description of SPI's duty and responsibility is stipulated based on Internal Audit Charter, as follows:

a. Develop and implement the Annual Audit Work Program (PKAT);
b. Evaluate the integrity and reliability, information and the tools used to identify, measure, classify and report such information;
c. Evaluate system created to ensure compliance with policies, plans, procedures, laws and regulations that have a major impact on the organization of the company;
d. To test and evaluate the implementation of the internal control and risk management system in accordance with the company's policies;
e. Perform an audit and assessment of the efficiency and effectiveness of finance, accounting, operations, human resources, marketing, information technology and the use of assets/tools of production and other activities.
f. Conduct an audit of a business affiliates and subsidiaries, at the request of the President Director and the report submitted to the Director and the Board of Commissioners of the subsidiaries;
g. Provide suggestions for improvements and information on the activities examined at all levels of management;
h. Create audit reports and submit the report to the Director and the Board of Commissioners, up. Audit Committee;
i. Monitor, analyze and report on implementation of the improvements that have been suggested by Internal Control Unit and/or the External Auditors;
j. Evaluate the quality of internal audits that being carried out;
k. Conduct special audit, if necessary, at the request of the President Director or as a development of the previous audit results.
l. Conduct consultations with regard to risk management, internal control systems, as well as corporate governance practices in an effort to improve the performance and value of the company on an ongoing basis.

SATUAN PENGAWAN INTERN (SPI)
Internal Audit Unit (SPI)

PELATIHAN INTERNAL AUDITOR 2017

Demi menunjang kebutuhan, tingkat efektifitas dan lancarnya operasional Perseroan dalam melakukan Audit Internal, maka selama tahun 2017, Perseroan telah memberikan pelatihan bagi para personil SPI. Rincian pelatihan yang diikuti oleh masing-masing internal auditor, sebagai berikut:

INTERNAL AUDITOR TRAINING 2016

In order to support the need, the level of effectiveness, and smooth operation of the company in conducting Internal Audit, then during 2017, the Company has provided training for SPI personnel. Detail explanation of trainings participated by each internal auditors is as follows:

No No	Nama Name	Pelatihan Training
1	Ernesto	AK PPA, PO PPA, EDP, DDA, KPA, PPP Pusdiklat BPKP
2	Christoforus Aries Basanggu	TPPA, AID, ADTT, AP, APSP, AL, RBA, GA, AO, ACL
3	Agung Topo BS	DDA, AO
4	Dahlia	DDA, AO, AK
5	Donni Rachmadi	DDA,AK,PTTA
6	Damli, SE	DDA, AO
7	Agus PS	DDA, AK, AO, KPA, PTTA, IAD 1, AS, PLHAE, EDP, AUDIT
8	M. Suwadi	DDA, IAD 1, AO
9	Sriyanto	AA, SA, P. EXIM, KC, TPIG, AID, IAL I, IAL II
10	Deni Hendayana	*AUDIT UPON PROCEDURES*
11	Yusman Sugeng	IAD 1
12	Sudjito	IAD 1
13	Nunung Nuraeni	DDA, AO
14	Bastian Ronald Ephraim G	-
15	Ivan Eka Aditya	IAD 1
16	Rohanah	DDA

Catatan | Notes:
- DDA : Dasar Dasar Audit | Basic Audits
- AO : Audit Operasional | Operational Audit
- KPA : Komunikasi dan Psikologi Audit | Audit Communication And Psychology
- AK : Audit Kecurangan | Fraud Audit
- PTTA : Pengelolaan Tugas Tugas Audit | Audit Duties Management
- IAD1 : Internal Audit Tingkat Dasar 1 | Basic Internal Audit 1
- KKP : Kertas Kerja Pemeriksaan | Inspection Working Paper
- PLHAE : Penulisan Laporan Hasil Audit Yang Efektif | Effective Audit Report Preparation
- AS : *Audit Sampling* | Audit Sampling
- EDP : *Electronic Data Procesing* | Electronic Data Procesing
- INSW : *Indonesia National Single Windows* | Indonesia National Single Windows
- AK PPA : Audit Kinerja PPA | PPA Audit Performance
- PO PPA : Pemeriksaan Operasional PPA | PPA Operational Inspection
- PPP Pusdiklat BPKP : Pengetahuan Pengusutan Penyidikan Pusdiklat BPKP | BPKP Training Center Knowledge Investigation
- TPPA : *The International Training Programe on Performance Audit* | The International Training Programe on Performance Audit
- AID : Audit Investigatif Dasar | Basic Investigative Audit
- ADTT : Audit Dengan Tujuan Tertentu | Audit With Certain Purpose
- AP : Audit Psikologi | Psychology Audit
- APSP : Audit Penilaian Sistem Pengendalian Intern | Internal Control System Assesment Audit
- AL : Audit Lingkungan | Environmental Audit
- RBA : *Risk Based Audit* | Risk Based Audit
- GA : *General Audit* | General Audit
- ACL : *Audit Command Language* | Audit Command Language
- AA : Auditor Ahli | Expert Auditor
- SA : Sistem Akuntansi | Accounting System
- P. EXIM : Perizinan Ekspor Impor | Export Import Licence
- KC : Kepabeanan Cukai | Customs Excise
- TPIG : Teknik Pemeriksaan Infrastruktur Gedung dan Bangunan | Building Infrastructure Examination Technic
- IAL I : Internal Audit Tingkat Lanjutan I | Internal Audit Advance I Level

REALISASI PENGAWASAN INTERNAL TAHUN 2017

Realisasi PKAT Tahun 2017

Posisi: Per 31 Desember 2017

REALIZATION OF INTERNAL CONTROL YEAR 2016

Realization of PKAT Year 2017

Position: As of December 31, 2017

No.	P I C	Temuan Findings	Rekomendasi Recomendation	Status Tindak Lanjut Follow up Status					
				TLS		MDP		BDL	
				Jumlah Total	%	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
A	Kantor Pusat Head Office	46	314	191	61%	27	9%	96	31%
B	Cabang Branch Office	169	226	58	26%	8	4%	160	71%
C	Kapal Ship	205	85	19	22%	1	1%	65	76%
D	SBU	22	25	0	0%	1	4%	24	96%
	Total Total	**442**	**650**	**268**	**41%**	**37**	**6%**	**345**	**53%**

Keterangan | Remarks:
P = Perencanaan | Planning
R = Realisasi | Realization
TLS = Tindak Lanjut Selesai | Follow-Up Completed
BDL = Belum Ditindaklanjuti | Not Followed yet
MDP = Masih DalamProses | On progress

Monitoring Tindak Lanjut Temuan Pemeriksaan Bpk RI Tahun Buku 2007 s.d. 2016, posisi: 31 Desember 2017.

BPK RI Audit Finding Follow-Up Monitoring Fiscal Year 2007 up to 2016, position: December 31, 2017.

SATUAN PENGAWAN INTERN (SPI)
Internal Audit Unit (SPI)

Tahun Buku Fiscal Year	Tujuan Audit Audit Target	Jumlah Total		Hasil *Review* Bpk Ri (01-08-17) BPK RI Review Report (01-08-17)		
				Selesai FInished		% Penyeles. % Settlement
		Temuan Findings	Rek Rek	Temuan Findings	Rek Rek	Rekomdasi Recommendation
1	2	3	4	5	6	7=6:4
2007	GA	18	32	13	29	90.6%
	PSO	0	0	0	0	0%
2008	GA	0	0	0	0	0%
	PSO	0	0	0	0	0%
2009	PSO	0	0	0	0	0%
2009 SD. SM I 2010	SPI	7	20	5	18	90.0%
2010	PSO	9	26	5	21	80.8%
2011	PSO	11	17	8	14	82.4%
2012	PSO	7	12	2	6	50.0%
2013	PSO	6	17	2	10	58.8%
2014	PSO	10	21	3	10	47.6%
2015	PSO	10	20	3	13	65.0%
	Jumlah Total	78	165	41	121	73.3%

SATUAN PENGAWAN INTERN (SPI)
Internal Audit Unit (SPI)

Sisa Setelah *Review* BPK Sisa Setelah Review BPK				Diusulkan : (DS) Diusulkan : (DS)			Sisa Posisi 31 Desember 2017 Sisa Posisi 31 Desember 2017			
Temuan Findings	Rekomdasi Recommendation		% Penyelesaian % Settlement	Temuan Findings	Rekomdasi Recommendation		Temuan Findings	Rekomdendasi Recommendation		% Penyelesaian % Settlement
	PELNI	Kementrian Ministry	Rekomdasi Recommendation		PELNI	Kementrian Ministry		PELNI	Kementrian Ministry	Rekomdasi Recommendation
8 = 3-5	9	10	11 = 9:4	12	13	14	15	16	17	18 = 16:4
5	3	0	9.4%	0	0	0	5	3	0	9.4%
0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
0	0	0	0%	0	0	0	0	0	0	0%
2	2	0	10.0%	0	0	0	2	2	0	10.0%
4	5	0	19.2%	2	2	0	2	3	0	11.5%
3	2	1	17.6%	1	1	0	2	1	1	5.9%
5	3	3	50.0%	1	1	0	4	2	3	16.7%
4	7	0	41.2%	0	0	0	4	7	0	41.2%
7	10	1	52.4%	0	0	0	7	10	1	47.6%
7	7	0	35.0%	1	1	0	6	6	0	30.0%
37	39	5	26.7%	5	5	0	32	34	5	23.6%

PROFIL KEPALA SATUAN PENGAWASAN INTERNAL

Head of Internal Audit Unit (SPI) Profile

Ernesto
Kepala Satuan Pengawasan Intern
Head of Internal Audit Unit

Kewarganegaraan | Citizenship
Indonesia
Indonesian

Tempat &Tanggal Lahir | Place & DOB
Bukittinggi, 7 Juni 1959
Bukittinggi, June 7, 1959

Usia | Age
Berusia 50 tahun per 31 Desember 2017
50 years old as of December 31, 2017

Domisili | Domicile
DKI Jakarta, Indonesia
DKI Jakarta, Indonesia

Dasar Hukum Pengangkatan | Legal Basis of Appointment

- Diangkat sebagai Kepala Satuan Pengawas Internal berdasarkan SK Direksi nomor 05.04/03/SK/HKO.01/2017 Tanggal 4 Mei 2017.
  Appointed as Head of Internal Audit Unit based on Board of Directors Decision Letter Number 05.04/03/SK/HKO.01/2017 dated May 4, 2017.

Latar Belakang Pendidikan | Educational Background

2001	Magister Manajemen Master Management

Pengalaman Kerja | Work Experiences

2014 – 2017	Ka SPI PT PELNI (Persero) Internal Audit Unit at PT PELNI (Persero)

Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi | Training and Competence Development

4 April 2017 April 4, 2017	Lokakarya Penyelesaiana Sengketa Bisnis. Workshop on Business Dispute Resolution

Jabatan Rangkap | Concurrent Position

Rangkap jabatan tidak bertentangan pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik
Dual positions do not conflict with Regulation of the Financial Services Authority No. 33 / POJK.04 / 2014 on the Board of Directors and Board of Commissioners Issuer or Public Company

Hubungan Afilisasi | Afiliated Relationships

Tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham utama
No affiliation with other members of the Board of Commissioners, the Board of Directors and the majority shareholder

Jumlah Kepemilikan saham PELNI | Share Ownership in PELNI

Tidak Ada
None

AUDITOR EKSTERNAL
External Auditor

Auditor Eksternal berkewajiban memberikan pendapat tentang kewajaran dan kesesuaian Laporan Keuangan dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Laporan keuangan yang benar akan membantu menambah kepercayaan masyarakat terhadap perusahaan atau organisasi terkait, termasuk untuk meningkatkan kinerja Perseroan. Penyajian laporan keuangan dengan benar sesuai standar adalah kewajiban di mata hukum, dan sebagai Perusahaan yang baik selayaknya kita patuh terhadap hukum dan peraturan yang telah diatur.

External auditor is obliged to provide opinion on fairness and compliance of the Financial Statements with accounting principle that is commonly prevailed in Indonesia. Correct financial statements will help increase public confidence in the company or related organization, including improving the company's performance. The presentation of financial statements correctly according to the standards is a legal obligation, and as a good Company we should comply with laws and regulations that have been regulated.

AUDIT LAPORAN KEUANGAN

Dalam pelaksanaan audit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, PT PELNI (Persero) telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) Djoko, Sidik & Indra untuk melaksanakan tugasnya berdasarkan standar auditing yang ditetapkan oleh Ikatan Akuntan Indonesia dan etika profesi yang berlaku.

FINANCIAL STATEMENTS AUDIT

In the implementation of Financial Statements Audit in Fiscal Year 2017, PT PELNI (Persero) had appointed Public Accountant Firm (KAP) Djoko, Sidik & Indra to perform the duty based on auditing standard prevailed by Indonesia Accountant Association and applicable professional ethics.

Adapun *Fee* Audit 5 tahun Terakhir adalah sebagai berikut:

Explanation about audit fee in 5 recent years is as follows:

JUMLAH PERIODE AKUNTAN PUBLIK DAN KANTOR AKUNTAN PUBLIK (KAP)

Berikut Kantor Akuntan Publik yang telah mengaudit Laporan Keuangan Perseroan selama tahun 2013- 2017:

TOTAL PERIOD OF THE PUBLIC ACCOUNTANT AND PUBLIC ACCOUNTANT FIRM

List of Public Accountant Firm who audited Financial Statements in 2013 – 2017 period is as follows:

Tahun Buku Fiscal Year	Nama KAP Name of KAP	Biaya Audit (Rp) Audit Fee (RP)	Opini Audit Audit Opinion
2017	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp.658.000.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2016	KAP Djoko, Sidik & Indra	Rp.652.025.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2015	KAP Bambang Mudjiono & Widiarto	Rp449.900.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2014	KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta	Rp579.250.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect
2013	KAP Hendrawinata, Eddy & Siddharta	Rp527.300.000	Wajar, dalam semua hal yang material Fair in all material aspect

Selama tahun 2017, KAP Djoko, Sidik & Indra memberikan jasa lain selain jasa audit laporan keuangan yaitu jasa audit kepatuhan dan laporan kinerja Perseroan.

Throughout 2017, KAP Djoko, Sidik & Indra provided other services than financial statements audit which was compliance audit and performance report audit.

MANEJEMEN RISIKO
Risk Management

Aktivitas Perseroan senantiasa dihadapkan pada risiko-risiko yang berkaitan erat dengan fungsinya untuk menciptakan nilai bagi para pemangku kepentingan *(stakeholders).* Pesatnya perkembangan lingkungan eksternal dan internal menyebabkan risiko bisnis menjadi semakin kompleks. Terciptanya *good corporate governance* tidak terlepas dari penerapan manajemen risiko sehingga manajemen risiko merupakan kekuatan vital bagi *good corporate governance.* Manajemen risiko sangatlah penting sehingga menjadi hal mendesak yang harus diterapkan,karena melalui penerapan manajemen risiko secara formal, terstruktur dan terintegrasi Perseroan akan mampu beradaptasi dengan lingkungan bisnis.

The Company activities are always faced with risks and closely related to its function to create value for the stakeholders. The rapid development of external and internal environments causes business risks for becoming increasingly complex. The creation of good corporate governance is inseparable from the risk management implementation. Therefore, risk management is a vital power for good corporate governance. Risk management is very important that it becomes an urgent matter to be implemented, because through formally, structured and integrated implementation of The Company's Risk Management will be able to adapt with the business environment.

MANAJEMEN RISIKO DI PT PELNI (PERSERO) BERDASARKAN ISO 31000 FRAMEWORK

Sebagai salah satu sistem dalam mencapai sasaran Perseroan, pengelolaan risiko Perseroan tetap harus dilaksanakan dengan baik, terukur, terintegrasi antar unit kerja dan konsisten dalam melaksanakan *response plan* yang telah ditetapkan. Dalam upaya melakukan hal tersebut maka pada tanggal 5 Juni 2017 diterbitkan Surat Keputusan Direksi No.06.05/01/SK/HKO.01/2017 tentang *Risk Owner* dan *Risk Management Officer* di Lingkungan PT PELNI (Persero).

Ditetapkannya *Risk Owner* dan *Risk Management Officer* yang baru pada Bulan Juni 2017 bertujuan untuk menumbuhkan kesinambungan pengendalian risiko dan menjaga kelangsungan proses pengelolaan risiko di tiap Divisi.

Oleh karena itu dalam tahapan pelaksanaan kerangka kerja *Risk Management Based On* ISO 31000 maka dilakukan proses *Learning and Growth* melalui pembelajaran dan peningkatan kompetensi *risk owner* dan *risk management officer* dengan agenda yaitu :

1. Peningkatan kompetensi *(transfer knowledge)* bagi *risk management officer* melalui *workshop risk management* pada tanggal 8 s/d 10 Agustus 2017 agar tetap terjaga efektifitas pengendalian risiko Perseroan (durasi materi 24 jam);
2. Peningkatan pemahaman dan penanaman budaya risiko bagi seluruh *Risk Owner* level Direksi, *Vice President* dan beberapa Manager pada bulan September 2017 melalui *Workshop Tone of The Top Enterprise Risk Management* (durasi materi 3 jam);

Dengan Proses Pembelajaran dan Pertumbuhan diatas diharapkan dapat meningkatkan *Awareness* bagi seluruh elemen di Perseroan.

RISK MANAGEMENT AT PT PELNI (PERSERO) BASED ON ISO 31000 FRAMEWORK

As one of the systems in achieving The Company goals, Company risk management should be still implemented properly, measurable, integrated unit work and consistent in implementing the agreed response plan. As an effort to do so on June 5, 2017 issued Letter Decree of the Board of Directors No.06.05/01/SK/HKO.01/2017 on Risk Owner and Risk Management Officer in PT PELNI (Persero).

The establishment of new Risk Owner and Risk Management Officer in June 2017 aims to grow continuity of risk control and maintain the risk management process continuity in each Division.

Therefore, in the stages of the implementation of the Risk Management Based On ISO 31000 framework, the Learning and Growth process is performed through learning and increasing of risk owner and risk management officer competency with agenda that is:

1. Increased competency (transfer knowledge) for risk management officer through risk management workshops on August 8 to 10, 2017 in order to maintain the effectiveness of corporate risk control (24 hour material duration);
2. Increased understanding and risk culture cultivation for all Risk Owners of the Board of Directors, Vice President and some Managers in September 2017 through Workshop Tone of The Top Enterprise Risk Management (3 hours material duration);

With the above Learning and Growth Process is expected to increase awareness for all elements in the Company.

PERKEMBANGAN MANAJEMEN RISIKO DI PT PELNI (PERSERO)

Disamping itu dalam upaya Perbaikan Berkesinambungan dilakukan Benchmarking agar diketahui sampai seberapa jauh keefektifan dan kematangan *(maturity)* tentang Pengelolaan Manajemen Risiko Perusahan. Untuk mengetahui hal tersebut oleh karena itu pada Tahun 2017 Unit Manajemen Risiko mengikuti Asean *Risk Awards* 2017 yang diselenggarakan oleh *Enterprise Risk Management Academy* berkedudukan di Singapore dengan anggotanya lebih dari 100 negara dan panelis independent dari berbagai negara.

Pada Asean Risk Awards 2017 tersebut yang diikuti oleh 38 Company dari 10 Negara maka PT PELNI (Persero) memperoleh Nominasi 4 kategori yaitu:

a. *Public Risk;*
b. *Public Initiative Risk;*
c. *Technology Risk; dan*
d. *Innovation Risk;*

Setelah melalui proses penjurian PT PELNI (Persero) berhasil memperoleh sebagai Pemenang Kategori *Public Risk* dalam Asean *Risk Awards* 2017 tersebut yang diselenggarakan pada tanggal 7 Desember 2017.

RISIKO DINAMIS DAN PENTING PADA TAHUN 2017

Unit Manajemen Risiko sebagai Pengelola Manajemen Risiko Perseroan dengan berperan sebagai Fasilitator, Katalisator dan *Evaluator Risk Management* sesuai Kerangka Kerja ISO 31000 telah memetakan 15 Risiko Utama Perseroan *(Top Fiftheen)* dan Risiko Dinamis & Penting Perseroan pada Tahun 2017. Penetapan Risiko Dinamis dan Penting Perseroan Tahun 2017 ini bertujuan agar Perseroan fokus prioritas dan segera menangani risiko-risiko tersebut.

Pada tahun 2017 PT PELNI (Persero) menetapkan Program *Quick Wins* 17 *Project Management* yang bertujuan meningkatkan kinerja Perseroan melalui pelaksanaan 17 Proyek lintas Direktorat. Maka Risiko Dinamis Perseroan adalah Keterlambatan atau kegagalan proyek *quick wins* tersebut yang harus ditangani dengan baik. Mitigasi Risiko dari Risiko Dinamis tersebut adalah Pengelolaan *Project Plan* dan Implementasi *Work Breakdown Structure* dengan baik. Sehingga ke 17 *Project Management* tersebut dapat terlaksana sesuai dengan tujuan yang diharapkan.

Melalui *risk assesment* sesuai kerangka kerja Manajemen Risiko ISO 31000 diperoleh risiko-risiko penting Perseroan yang harus ditangani segera yakni sebagai berikut:

RISKS MANAGEMENT DEVELOPMENT IN PT PELNI (PERSERO)

Besides, in the Continuous Improvement effort is conducted Benchmarking to known how far the effectiveness and maturity (maturity) about Risk Management of the Company. Therefore, in 2017 the Risk Management Unit follows the Asean Risk Awards 2017 which organized by the Enterprise Risk Management Academy based in Singapore with members of more than 100 countries and independent panelists from various countries.

At Asean Risk Awards 2017 was followed by 38 Companies from 10 countries then PT PELNI (Persero) received Nomination of 4 categories namely:

a. Public Risk;
b. Public Initiative Risk;
c. Technology Risk; and
d. Innovation Risk;

After going through the judging process, PT PELNI (Persero) was awarded as the Winner of Public Risk Category in the Asean Risk Awards 2017, which was held on December 7, 2017.

DYNAMIC AND IMPORTANT RISK IN 2017

Risk Management Unit is as Risk Management Manager of the Company by acting as Facilitator, Catalyst and Evaluator Risk Management in accordance with The ISO 31000 framework has mapped the Company's Top 15 Risks (Top Fiftheen) and the Company's Dynamic & Important Risk in 2017. The Company's Dynamic and Important Risk determination in year of 2017 is aimed in order to the Company can focus on priorities and handles those risks immediately.

PT PELNI (Persero) set the Quick Wins 17 Project Management Program in 2017 which aims to improve the company's performance through the implementation of 17 Cross Project Directorate. So, The Company's Dynamic Risk is the delay or failure of the quick wins project that should be handled properly. Risk Mitigation from the Dynamic Risk is a good Project Plan Management and Work Breakdown Structure Implementation. So that the 17 Project Management can be implemented in accordance with the expected goals.

Through risk assessment according to the ISO 31000 Risk Management framework, there are important corporate risks that must be handled immediately as follows:

MANAJEMEN RISIKO
Riisk Management

1. Risiko Keselamatan Kapal di Direktorat Armada telah dilaksanakan beberapa tindaklanjut *response plan* yang telah ditetapkan;
2. Pada Triwulan II/2017, audit ISPS Code mulai dipetakan *profiling* risikonya sebagai bagian dari Risiko Keselamatan Kapal perspektif DPA;
3. *Budget Risk* masih menempati risiko utama ke 2, terutama untuk *risk driver* pendapatan. Kontrol anggaran tidak hanya pada Biaya tetapi juga pada Pendapatan sehingga dapat mendorong Direktorat atau unit kerja yang bertindak sebagai *profit center* lebih terpacu mencapai target pendapatan yang ditetapkan dalam RKAP.

15 RISIKO UTAMA DAN TINDAKAN MITIGASI

Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang (Perspektif Armatek, Operasi dan DPA)

Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang PT PELNI (Persero) dipetakan menjadi tiga perspektif yang dijabarkan sebagai berikut:

Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Armatek

Menjadi urutan pertama dalam 15 Risiko Utama karena karena risiko keselamatan kapal & penumpang merupakan komitmen Perseroan dalam bisnis pelayaran sehingga tetap menjadi perhatian dan fokus manajemen risiko. Sesuai kerangka kerja Risk Management ISO 3100 besaran *gross risk* dari risiko ini merupakan gambaran utuh risiko terjadi pada semua kapal. Hal ini tidak menurunkan rating risiko ini walau terjadi hanya pada 1 (satu) kapal saja.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):

Melakukan sistem perawatan kapal *(maintenance system)* yang telah ditetapkan dalam SOP Direktorat Armada dan Teknik secara konsisten dengan menerapkan *Integrated Maintenance System* dan penerapan *Fleet Management* berbasis Tekonologi Informasi serta pelaksanaan *Project Management* Pengelolaan *spareparts* menggunakan aplikasi berbasis IT;

Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Operasi;

Merupakan salah satu alat untuk mengelola risiko ini Keselamatan Kapal & Penumpang agar lebih ter-*manage* dengan baik *(well manage)* melalui *risk assesment* atas *risk driver on time performance* kapal, tantangan ketidakpastian cuaca, kondisi dermaga dan fasilitas kepelabuhanan, rambu-rambu kenavigasian, kondisi alur pelayaran dan optimalisasi penggunaaan alat-alat keselamatan;

1. Ship Safety Risk in the Directorate of Fleet has been implemented several follow-up response plan that has been set;
2. In Quarter II / 2017, ISPS Code audits began to mapped profiling its risks as part of DPA's Ship Safety Risk perspective;
3. Budget Risk still occupies on the 2nd major risk, especially for revenue driver risk. Budget control is not only Cost but also Revenue. So, to encourage the Directorate or work unit acting as profit center more driven to achieve revenue targets that set in the Company's work and budget plan (RKAP).

15 MAIN RISKS AND MITIGATION ACTION

Ship & Passenger Safety Risk (Armatek Perspective, Operation and DPA)

Ship & Passenger Safety Risk PT PELNI (Persero) mapped into three perspectives are outlined as follows:

Ship Safety & Passenger's Armatek perspective Risk

Being the first in 15 Major Risks due to ship & passenger safety risk is the company's commitment in the shipping business remains a concern and focus for risk management. In accordance with the ISO 3100 Risk Management framework, the gross risk scale of this risk is a complete picture of risk occurring on all vessels. This does not degrade this risk rating even if it occurs on 1 (one) ship only.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Conducting a system maintenance ship (maintenance system) which has been established in the SOP Directorate Fleet and Technic consistently by applying Integrated Maintenance System and Fleet Management application based on Information Technology and Project Management implementation by using spare parts IT-based applications;

Ship Safety & Passenger Operations perspective Risk;

It is one of the tools to manage this Ship & Passenger Safety risk to be more well manageable (well manage) through risk assessment on risk driver on time performance vessels, weather uncertainty challenges, dock conditions and port facilities, navigational signs, cruise line conditions and optimizing the use of safety devices;

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):
Pengoperasian kapal dengan mengedepankan Kemampuan Kecakapan Pelaut yang Baik bagi seluruh Nakhoda dan ABK di seluruh kapal-kapal yang dioperasikan PT PELNI (Persero) serta pengelolaan *risk driver* Fasilitas Navigasi dan Kepelabuhanan sehingga dapat mencapai tingkat kehandalan *On Time Performance* Kapal dan mampu memitigasi Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang.

Response Plan Action (Risk Mitigation):
The vessel operation by putting forward Good Seaman Skills Capability for all skippers and crew on all ships that operated by PT PELNI (Persero) and risk drivers management for Navigation and Port Facility. Therefore, to achieve reliability level On Time Performance Ship and be able to mitigate Ship & Passenger Safety Risk.

Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang Perspektif *Designated Persons Ashore* (DPA);
Suatu Unit Khusus yang dibentuk untuk melakukan pemeriksaan *(internal safety audit)* dan pemantauan kepatuhan *(compliance)* terhadap semua peraturan dan ketentuan nasional dan internasional yang berlaku di lingkungan pelayaran yaitu ISM *Code* dan ISPS *Code.*

Ship & Passenger Safety Risk Perspective Designated Persons Ashore (DPA);
A Special Unit that established for internal safety audit and compliance monitoring to all of the prevailing national or international rules and regulations in the shipping environment which is namely the ISM Code and ISPS Code.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko) :
Penyelesaian tindak lanjut dari Ketidaksesuaian *(Non Conformity/NC)* hasil dari Audit Eksternal hingga diadakan perbaikan *(improvement)* dan pemenuhan NC yang bermanfaat untuk peningkatan kesiapan peralatan keselamatan, kecukupan alat keselamatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil temuan dari pemeriksaan keselamatan harus segera ditindaklanjuti.

Response Plan Action (Risk Mitigation):
Follow-up settlement of Non Conformity (NC) results from External Audits to NC improvements and fulfillments that are useful for improving the safety equipment readiness, safety equipment adequacy in accordance with the prevailing rules and regulations. The findings of the safety check should be acted immediately.

Tabel Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang (Perspektif Armatek, Operasi dan DPA)
Ship & Passenger Safety Risk (Fleets & Technical, Operations & DPA Perspective) Table

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	12,6 T *(Catastropic)* 12,6 T (Catastropic)	12,6 T *(Extreme)* 12,6 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	630 *(Catastropic)* 630 (Catastropic)	630 *(Extreme)* 630(Extreme)	Program *Response Plan* yang ditetapkan & dijalankan telah berhasil menurunkan tingkat risiko sebesar 11,70 T dan tingkat tinggi risiko ini dapat diterima dengan kondisi bahwa kontrol yang ada dapat menjaga stabilitas keselamatan kapal. The established & implemented of Response Plan program has successfully decreased a risk level of 11.70 T and a high level of risk is acceptable with conditions that the existing controls can maintain the ship safety stability.

Risiko *Budget* (Anggaran);
Merupakan suatu risiko yang harus ditangani Perseroan dalam hal pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan melalui RKAP. Dilakukan *risk assesment* secara periodik triwulanan dengan *risk driver* komponen biaya dan pendapatan serta dilakukan langkah-langkah tindaklanjut *(detail response plan)* untuk menangani risiko ini sehingga dapat mengelola anggaran Perseroan secara efektif.

Budget Risk;
this Is a risk that must be handled by company in terms of budget management that has been established through the Company's work and budget plan (RKAP). Periodic risk assessment is conducted quarterly with risk drivers of cost and revenue components and follow-up steps (detailed response plan) to handle these risks so that can effectively manage to the Company's budget.

MANAJEMEN RISIKO
Riisk Management

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):
Melakukan Tata Kelola Anggaran dengan menerapkan Sistem *Enterprise Business Suite* sehingga dapat memenuhi RKAP yang telah ditetapkan.

Response Plan Action (Risk Mitigation):
Perform Budget Governance by implementing The Enterprise Business Suite System in order to fulfill the Company's work and budget plan (RKAP) has been established.

Risiko *Budget*
Budget Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Biaya | Budget						
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	2,6 T *(Catastropic)* 2,6 T (Catastropic)	2,6 T *(Extreme)* 2,6 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	Biaya di bawah anggaran Expenses below the budget	Nil	Program *Response Plan* yang ditetapkan & dijalankan telah berhasil menurunkan tingkat risiko ini dan disiplin anggaran dengan Tata Kelola *by System* merupakan salah satu mitigasinya. The established & implemented of Response Plan program has successfully decreased this level of risk and budgetary discipline with Governance by System is one of the mitigations.
Pendapatan | Revenue						
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	3,5 T *(Catastropic)* 3,5 T (Catastropic)	3,5 T *(Extreme)* 3,5 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	Pendapatan Tercapai Revenue target achievement	Nil	Program *Response Plan* yang ditetapkan & dijalankan telah berhasil menurunkan tingkat risiko ini dan disiplin anggaran dengan Tata Kelola *by System* merupakan salah satu mitigasinya. The established & implemented of Response Plan program has successfully decreased this level of risk and budgetary discipline with Governance by System is one of the mitigations

Risiko *Public Service Obligation;*
Pengelolaan Dana *Public Service Obligation* (PSO) merupakan suatu risiko cukup besar bagi finansial Perseroan karena masuk dalam struktur pendapatan Perseroan, sehingga masuk dalam 15 Risiko Utama Perseroan agar dapat melakukan Mitigasi Risiko yang ada.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):
Mengendalikan Risiko Pendapatan PSO ini dengan menjaga *risk driver* Penyerapan Dana PSO dan Pencairan Dana PSO disamping tahap-tahap teknis lainnya.

Public Service Obligation Risk;
Public Service Obligation Fund Management (PSO) is a significant risk for corporate finance because it is included in the company's revenue structure, so it is included in the Company's 15 Main Risk in order to perform the Risk Mitigation.

Response Plan Action (Risk Mitigation):
Controlling The PSO Revenue Risk by maintaining the risk driver of PSO Absorption and PSO Fund Disbursement in addition to other technical stages.

Risiko *Public Service Obligation* (PSO)
Public Servisce Obligation (PSO) Risks

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Penyerapan Dana PSO | PSO funds Absorption						
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	2,060 T *(Catastropic)* 2,060 T (Catastropic)	2,6 T *(Extreme)* 2,6 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	0 M 0 Bio	Nil	Program *Response Plan* yang ditetapkan & dijalankan telah berhasil menurunkan tingkat risiko ini dan Pendapatan PSO tercapai. The established & implemented of Response Plan program has successfully lowered this level of risk and PSO Revenue were achieved.
Pencairan Dana PSO | PSO funds Disbursement						
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	2,060 T *(Catastropic)* 2,060 T (Catastropic)	3,5 T *(Extreme)* 3,5 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	0 M 0 Bio	Nil	Program *Response Plan* yang ditetapkan & dijalankan telah berhasil menurunkan tingkat risiko ini dan Pendapatan PSO tercapai The established & implemented of Response Plan program has successfully lowered this level of risk and PSO Revenue were achieved

Risiko *Pax Factor* Kapal Penumpang;

Masih termasuk dalam Risiko Utama Perseroan karena Tingkat *Pax Factor* penumpang yang rendah serta terdapat trend penurunan jumlah penumpang kapal-kapal PELNI dari tahun ke tahun maka menjadi suatu risiko bagi Perseroan yang harus ditangani segera untuk menciptakan pertumbuhan pelanggan.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):

Penerapan *Marketing Mix* secara intensif, salah satunya melalui *Lifestyle Business* di kapal, *MICE on Board,* Penyelesaian *Quick Wins Project Management* di Pemasaran Kapal Penumpang, Promosi melalui media sosial serta *Chanelling Ticketing* sehingga mampu menurunkan risiko ini.

Passenger Ship's Pax Factor Risk;

Still included in the Company's Main Risk is due to the low rate of Passenger Pax Factor and the passengers declining trend on PELNI vessels from year to year, it becomes a risk for the Company which must be managed immediately to create customer growth.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Marketing Mix intensively aplication, one of them through Lifestyle Business, MICE on Board, Quick Wins Project Management Completion in Passenger Ship Marketing, Promotion via social media and Chanelling Ticketing are be able to reduce this risk.

Risiko Faktor Penumpang Kapal
Pax Factor Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	1,1 T *(Catastropic)* 1,1 T (Catastropic)	1,1 T *(Extreme)* 1,1 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	209 M *(Catastopic)* 209 Bio (Catastopic)	209 M *(Extreme)* 209 Bio (Extreme)	Program *Response Plan* yang ditetapkan & dijalankan secara intensif terus menerus untuk menurunkan tingkat risiko sebesar 900 M serta untuk menciptakan pertumbuhan pelanggan. Response Plan Program is set & ran intensively and continuously to lower the risk level by Rp.900 Billion as well as to create customer growth.

MANAJEMEN RISIKO
Riisk Management

Risiko Pemakaian BBM dan Pelumas;

Pada Tahun 2017, Biaya BBM dan pelumas tetap merupakan biaya variabel terbesar bagi PT PELNI (Persero) dalam mengoperasikan seluruh armada kapal. Pengelolaan risiko ini dengan baik diharapkan dapat meningkatkan efisiensi pemakaian bahan bakar dan mitigasi risiko perubahan harga dengan cepat.

Tindakan *Respone Plan* (Mitigasi Risiko) :

Pembentukan Biro Pengelolaan Baha Bakar yang bertugas *monitoring* pemakaian BBM dan pelumas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan *(Standard Fuel Oil Consumption)* akan berdampak pada efisiensi pemakaian BBM & Pelumas.

Fuel and Lubricant Usage Risk;

In 2017, Fuel and lubricant costs remain the largest variable cost for PT PELNI in operating the entire vessels. Risk management this is well expected to improve fuel efficiency and mitigate the risk of price changes quickly.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Establishment of Fuel Management Bureau responsible for monitoring the fuel and lubricants usage in accordance with established standards (Standard Fuel Oil Consumption) will have an impact on the Fuel & Lubricant efficiency usage.

Risiko Pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM)
Fuel Management Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	1,1 T *(Catastropic)* 1,1 T (Catastropic)	1,1 T *(Extreme)* 1,1 T (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	10,5 M *(High)* 10,5 Bio (High)	10,5 M *(High)* 10,5 Bio (High)	Pengelolaan risiko ini dengan baik melalui *Standard Fuel Oil Consumption* (SFOC) mampu menurunkan risiko ini sebesar Rp1,090 T. Well management of this risk through Standard Fuel Oil Consumption (SFOC) is able to reduce this risk by Rp1,090 Trillion.

Risiko Kelayakan dan Keamanan Gedung;

Pemakaian gedung yang dibangun lebih dari 10 tahun merupakan risiko yang besar bagi penggunanya oleh karena itu Risiko Kelayakan dan Kemanan Gedung termasuk dalam Risiko Utama Perseroan dan harus ditangani dengan baik.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):

Penyusunan SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Gedung menjadi *risk response plan* risiko ini.

Building Eligibility and Security Risk;

The buildings usage that built over 10 years is a great risk for its users therefore the Risk of the building's Feasibility and Security is included in the Company's Main Risk and should be handled properly.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

SOP Usage preparation and Building Maintenance becomes the response plan risk for this risk.

Risiko Kelayakan dan Keamanan Gedung
Building feasibulity and sercurity risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	680 M *(Catastropic)* 680 M (Catastropic)	680 M *(Extreme)* 680 M (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	71,5 M *(Major)* 71,5 Bio (Major)	71,5 M *(High)* 71,5 Bio (High)	Pengelolaan risiko ini dengan baik melalui beberapa Standar Pemeriksaan secara Berkala mampu menurunkan risiko ini sebesar Rp608 M. Well management of these risks through several regular Inspection Standards can reduce this risk by Rp608 Billion.

Risiko Pengadaan Barang & Jasa;

Pengadaan barang & jasa di Perseroan harus sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku maka Risiko ini masuk dalam 15 Risiko Utama Perseroan agar tidak menimbulkan kerugian yang signifikan bagi Perseroan dan pada tahun 2017 *Case* : Nil, maka termasuk dalam *risk tolerance.*

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko) :

Menjaga *existing controls* yang telah ditetapkan agar risiko ini tidak terjadi dan pada tahun 2017 mampu mengurangi *gross risk* sebesar Rp608 M.

Goods and Services Procurement Risk;

The goods and services procurement in the Company must comply with the prevailing rules and regulations. This risk is included in the Company's 15 main risks in order not to causing significant losses for the Company and in 2017 Case: Nile, it is included in risk tolerance.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Maintain the existing controls that have been set so that this risk does not occur and be able to reduce gross risk of Rp608 Billion In 2017.

Risiko Pengadaan Barang dan Jasa
Procurement Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	520 M *(Catastropic)* 520 Bio (Catastropic)	520 M *(Extreme)* 520 Bio (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	11,6 M *(Major)* 11,6 Bio (Major)	11,6 M *(High)* 11,6 Bio (High)	Pengelolaan risiko ini dengan baik melalui beberapa Standar Pemeriksaan secara Berkala mampu menurunkan risiko ini sebesar Rp580 M. Well Management of these risks through several regularInspection Standards can reduce this risk by Rp580 Billion.

Risiko Kinerja Efektifitas & Efisiensi Jasa Angkutan Barang;

Tata Kelola Jasa Angkutan Barang yang efektif dan efisien yang mampu berfungsi mendorong perolehan pendapatan Perseroan dan berkontribusi memperoleh *revenue* merupakan tujuan Pengembangan Usaha. Maka pengelolaan risiko kinerja jasa angkutan barang menjadi kebutuhan yang harus dipenuhi pada tahun 2017 ini.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko) :

Penetapan *Risk Driver* yang tepat merupan kunci dari Pengelolaan Risiko ini sehingga mampu menurunkan *gross risk* yang ada.

Performance Effectiveness & Efficiency Risk of Goods Transportation Services;

Effective and efficient Goods Transport Governance that is able to function to encourage the company's revenue and contribute to revenue is a Business Development Goal. So, the performance risk management of goods transport services becomes a necessity that must be fulfilled in 2017.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

The Right Risk Drivers determination is a key part of the Risk Management so that it can reduce the gross risk.

Risiko Efektifitas Kinerja dan Jasa Angkutan Barang
Risks Performance Effectiveness and Goods Transportation Services

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	376 M *(Catasthropic)* 376 M (Catasthropic)	376 M *(Extreme)* 376 M (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	105 M *(Major)* 105 M (Major)	105 M *(High)* 105 M (High)	Pengelolaan risiko ini dengan baik dapat mendorong dan mendukung pencapaian *revenue* angkutan barang This Good Risks Management is able to encourage and support The Freight Reavenue Achievement

MANAJEMEN RISIKO
Riisk Management

Risiko Subsidi Kapal Barang Tol Laut;
Pengelolaan penyerapan subsidi pada kapal barang tol laut merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko ini, sehingga mampu memberikan kontribusi yang optimal bagi pendapatan Perseroan.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):
Pemenuhan *voyage* kapal barang tol laut menjadi hal yang utama dalam mitigasinya oleh karena itu koordinasi yang intens dengan Divisi Tehnik terkait kesiapan kapal harus selalu dilakukan.

Risk of Subsidy on Tol Laut Freight Vessel;
The subsidized absorption management of Tol Laut freight ship is one of the keys to risk management success, thereby contributing optimally for the company's revenue.

Response Plan Action (Mitigation Risk):
Voyage Fulfillment of Tol Laut freight ship becomes the main thing in its mitigation therefore intense coordination with the Technical Division concerning the readiness of the ship must always be done.

Risiko Kapal Barang Tol Laut
Risk of Tol Laut Ship

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	266 M *(Catasthropic)* 266 M (Catasthropic)	266 M *(Extreme)* 266 M (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	21,3 M *(Major)* 21,3 M (Major)	21,3 M *(High)* 21,3 M (High)	Dengan melaksanakan *Respose Plan* yang ditetapkan secara konsisten mampu mengendalikan risiko ini dan menurunkan *gross risk* sebesar 245 M *(residual risk).* By implementing Response Plan which is consistantly set can control this risk and reduce Gross Risk of 245 M (Residual Risk).

Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia;
Pengembangan Sumber Daya Manusia termasuk dalam 15 Risiko Utama Perseroan karena merupakan salah satu sumber daya Perseroan yang penting dalam mecapai Visi dan Misi Perseroan sehingga harus memperoleh perhatian yang lebih untuk ditangani dan dikelola dengan baik.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):
Penanganan risiko secara komprehensif dengan fokus pada pengembangan kompetensi pegawai dan *performance appraisal.*

Human Resources Development Risk
Human Resource Development is included in the Company's 15 Major Risks because it is one of the company's critical resources in achieving The Company's Vision and Mission so that it should pay more attention to be handled and managed properly.

Response Plan Action (Risk Mitigation):
Comprehensive risk management with focus on developing employee competency and performance appraisal.

Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia
Human Resources Development Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	252 M *(Catastrophic)* 252 M (Catastrophic)	252 M *(Extreme)* 252 M (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	116 M *(Major)* 116 M (Major)	116 M *(High)* 116 M (High)	Dengan melaksanakan *Response Plan* yang ditetapkan secara konsisten mampu mengendalikan risiko ini dan menurunkan gross risk sebesar 116 M *(residual risk)* By implementing a consistently capable Response Plan for controlling this risk and reducing gross risk by 116 Billion (residual risk).

Risiko Audit;

Risiko Audit merupakan salah satu risiko bagi Perseroan yang berdampak cukup signifikan apabila temuan dan rekomendasi tindak lanjut hasil audit baik dari internal maupun eksternal auditor tidak dilaksanakan.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko) :

Menetapkan sistem *monitoring* tindak lanjut audit atas rekomendasi temuan internal dan eksternal adalah salah satu langkah tepat dalam menangani risiko ini.

Audit Risk;

Audit risk is one of the risks for a company that has a significant impact if findings and recommendations follow up the audit results, either internally or external auditors are not implemented.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Establishing an auditee follow-up monitoring system on the recommendation of internal and external findings is one appropriate step for managing these risks.

Risiko Internal dan Eksternal Audit
Internal and External Audit Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
AlmostCertain (100%) Almost Certain (100%)	147 M *(Catastrophic)* 147 M (Catastrophic)	147 M *(Extreme)* 147 M (Extreme)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	75,6 M *(Major)* 75,6 M (Major)	75,6 M *(High)* 75,6 M (High)	Salah satu *Response Plan* yang tepat adalah menetapkan sistem *monitoring* tindak lanjut atas temuan internal dan eksternal audit sehingga mampu menurunkan *gross risk* atas Risiko Audit ini menjadi sebesar 75,6 M dari semula sebesar 147 M. One of the appropriate Response Plan is to establish a follow-up monitoring system for internal and external audit findings. Therefore, to reduce gross risk on this Audit Risk to be 75.6 Billion from the original of 147 Billion.

Risiko Pengadaan & Modifikasi Kapal;

Risiko penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan dalam Pengadaan Kapal dapat memberikan dampak yang cukup signifikan bagi Perseroan, oleh karena itu pengendalian risiko ini menjadi penting dan masuk dalam 15 Risiko utama Perseroan.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko) :

Memastikan semua peraturan perundang-undangan dan standar operasi & prosedur ditaati oleh Divisi yang melakukan fungsi pengadaan kapal.

Procurement Risk & Ship Modification;

Violence risk against law regulation in ship procurement to be able to provide significant impact for the Company, therefore this risk management becomes an important and including in 15 major risks of the Company.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Ensuring all of law regulation and operation & procedure standard is obeyed by division which conducting ship procurement function.

Risiko Pengadaan dan Modifikasi Kapal
Procurement and Ship Modification Risk

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	60 M *(Major)* 60 M (Major)	60 M *(High)* 60 M (High)	*AlmostCertain* (100%) Almost Certain (100%)	30 M *(Major)* 30 M (Major)	30 M *(High)* 30 M (High)	*Compliance* terhadap peraturan perundang-undangan tentang Pengadaan Barang merupakan salah satu response plan tepat untuk mengendalikan risiko ini, disamping *Response Plan* yang lainnya. Compliance towards the Law on Goods Procurement is one of the right response plans for controlling this risk, in addition to other Response Plan.

MANAJEMEN RISIKO
Riisk Management

Risiko Likuiditas *(Liquidity Risk)*
Merupakan suatu risiko bagi Perseroan yang cukup signifikan apabila tidak mengelola dan mengendalikan risk driver pada risiko ini dengan baik.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko) :
Konsisten dalam melaksanakan *response plan* yang ditetapkan merupakan salah satu kunci dalam mengelola risiko likuiditas ini.

Liquidity Risk
It is a risk for the Company which is significant if it does not manage and control risk drivers at this risk well.

Response Plan Action (Risk Mitigation):
Consistent in implementing the assigned response plan is one of the key in managing this liquidity risk.

Risiko Likuiditas
Liquidity Risk

Risiko Kotor Gross Risk		Risiko Residual Residual Risk				Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	60 M (Major) 60 M (Major)	60 M (High) 60 M (High)	Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	30 M (Major) 30 M (Major)	30 M (High) 30 M (High)	Liquidity Risk merupakan risiko yang berdampak cukup signifikan bagi Perseroan, maka pengendalian risiko dengan melaksanakan Response Plan secara konsisten adalah salah satu kunci dalam pengelolaan risiko ini Liquidity Risk is a risk that impacts significantly for the company, then risk control by implementing the Response Plan consistently is one of the key in managing this risk.

Risiko *Corporate Secretary;*
Risiko *Corporate Secretary* masuk dalam 15 Risiko Utama karena dampaknya cukup besar bagi Perseroan yang dapat berdampak bagi nama baik Perseroan yang sangat membutuhkan kepercayaan *(trust)* dari *stakeholders.*

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):
Pengendalian risiko ini salah satunya adalah *response plan* yang cepat dan tepat sehingga mampu memulihkan nama baik Perseroan, serta Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan prinsip-prinsip GCG.

Corporate Secretary Risk:
Corporate Secretary Risk includes into 15 Major Risks because the impact is large enough for companies that can impact the company reputation that are in dire need of trust from stakeholders.

Response Plan Action (Risk Mitigation)
This risk control is one of the fast and accurate response plans Therefore, can be able to restore the Company's good name, as well as the Corporate Governance in accordance with the GCG Principles.

Risiko *Corporate Secretary*
Corporate Secretary Risk

Risiko Kotor Gross Risk		Risiko Residual Residual Risk				Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	35 M *(Major)* 35 M (Major)	35 M *(High)* 35 M (High)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	2,2 M *(Major)* 2,2 M (Major)	2,2 M *(High)* 2,2 M (High)	Tata Kelola Perusahaan sesuai dengan Prinsip-prinsip GCG dan *Response Plan* atas pemulihan Nama Bank Perusahaan menjadi kunci dari Pengelolaan Risiko ini sehingga mampu menurunkan risiko menjadi sebesar 2,2 M *(residual risk).* Corporate Governance in accordance with the GCG Principles and Response Plan for The Company's Bank Name recovery becomes the key of this Risk Management was able to reduce the risk to be 2.2 M (residual risk)

Risiko *Assets Idle;*

Risiko kehilangan pendapatan lain dari Ruang Gedung atau Ruang Kantor dan *Space* di Kapal yang dapat diutilisasi sehingga harus ditangani dengan baik risiko ini.

Tindakan *Response Plan* (Mitigasi Risiko):

Melakukan pemasaran ruang perkantoran dan ruang di kapal serta menetapkan *Key Performance Indicator* atas keberhasilan pemasaran. Selain itu diluncurkan *Dash Board Assets* sebagai salah satu cara dalam menangani risiko ini.

Idle Assets Risk;

The risk of losing other income from the Building Room or Office Space and Space on the Ship that can be utilized so that it should be handled properly for this risk.

Response Plan Action (Risk Mitigation):

Conducting the marketing of office space and space on board and establishing the Key Performance Indicator for marketing success. In addition, Dashboard Assets has been launched as a way to handle this risk.

Risiko Assets Idel
Idle Assets Risks

Risiko Kotor Gross Risk			Risiko Residual Residual Risk			Keterangan Description
Kesempatan (%) Likehood (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	*Rating* Rating	Probalitas (%) Probability (%)	Dampak (Rupiah) Impact (Rupiah)	Tingkat Level	
Almost Certain (100%) Almost Certain (100%)	25,2 M *(Major)* 25,2 Billion (Major)	25,2 M *(High)* 25,2 Billion (High)	*Almost Certain* (100%) Almost Certain (100%)	28,8 M *(Major)* 28,8 Billion (Major)	8,8 M *(High)* 8,8 Billion (High)	*Response Plan* yang telah ditetapkan dilaksanakan secara konsisten sehingga mampu menurunkan risiko sebesar 16,4 M atau *residual risk* sebesar 8,8 M Response Plan that has been determined to be implemented consistently so can be able to reduce the risk of 16.4 Billion or residual risk of 8.8 Billion

Pada Tahun 2017, melalui pengelolaan seluruh risiko yang ada baik 15 risiko utama maupun risiko-risiko Perseroan lainnya, maka *gross risk* Perseroan sebesar Rp25,413 T dapat diturunkan atau berhasil dihilangkan risiko sebesar Rp19,157 T, sehingga *residual risk* Perseroan atau risiko Perseroan menjadi sebesar Rp6,256 T.

In the year 2017, through all risks management of the existing 15 major risks and other company's risks, then the gross risk of the company is amounted to Rp25,413 T can be derived or successfully eliminated the risk by Rp19,157 T, that the company's residual risk or corporate risk by Rp6,256 T.

EVALUASI DAN REVIEW TERHADAP SISTEM MANAJEMEN RISIKO

Pada Tahun 2017 telah dilakukan evaluasi terhadap sistem manajemen risiko Perseroan dengan hasil evaluasi sebagai berikut:

1. Pengelolaan risiko membutuhkan sumber data yang masuk dalam aplikasi *(computerize)* sehingga lebih terintegrasi antar unit kerja dalam pengelolaan risikonya.
2. Pada akhir tahun 2017 digunakan aplikasi QPR *(Quality Procces and Result) Performance Management and Risk Management.*
3. Pengembangan tanggung jawab dari *risk owner* untuk melaksanakan *respon plan* agar lebih efektif.

EVALUATION AND REVIEW ON RISK MANAGEMENT SYSTEM

In the year 2017 has been evaluated the Company's risk management system with the evaluation results as follows:

1. Risk management requires in-app data source (computerize) to be more integrated between work units in risk management.
2. At the end of 2017 was used QPR (Quality Procces and Result) applications Performance Management and Risk Management.
3. The responsibility development of the risk owner to implement the response plan to be more effective.

ETIKA BISNIS
Business Ethics

PEDOMAN PERILAKU

Perseroan menyusun Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* yang menjadi acuan perilaku bagi Dewan Komisaris, Direksi dan Pegawai Perseroan. Pedoman Perilaku berlaku bagi seluruh Insan PELNI di seluruh tingkat organisasi. Pedoman Perilaku PT PELNI (Persero) telah diperbarui dan disahkan melalui Surat Keputusan Direksi No. 12.29/01/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Perilaku *(Code of Conduct)* di Lingkungan PT PELNI (Persero).

ISI PEDOMAN PERILAKU

Perseroan dengan konsisten mengaitkan *Code of Conduct* dengan nilai-nilai utama Perseroan, yaitu sebagai berikut:

I. Pendahuluan

II. Pedoman Etika Usaha

A. Standar Hubungan dengan *Stakeholders*

1. Hubungan dengan Pemegang Saham.
2. Hubungan dengan Karyawan.
3. Hubungan dengan Pelanggan.
4. Hubungan dengan Pemasok dan Penyedia Barang dan Jasa.
5. Hubungan dengan Mitra Kerja.
6. Hubungan dengan Masyarakat dan Lingkungan.
7. Hubungan dengan Kreditor.
8. Hubungan dengan Pemerintah.
9. Hubungan dengan *Principal* Kapal Keagenan.
10. Hubungan dengan Media Massa.
11. Kepatuhan terhadap Hukum dan Perundang-Undangan.
12. Persaingan Usaha.

B. Standar Etika Pengelolaan Perusahaan

1. Kebijakan Akuntansi dan Keuangan.
2. Penggunaan Aset Perusahaan.
3. Kesehatan, Keselamatan Kerja dan Lingkungan.
4. Pengelolaan Anak Perusahaan.

III. Pedoman Etika Kerja:

A. Nilai-Nilai Luhur Perusahaan

B. Menjaga Citra Perusahaan

C. Tanggung Jawab Terhadap Perusahaan

1. Integritas.
2. Kepatuhan Terhadap Hukum dan Peraturan Perundang-Undangan.
3. Kerahasiaan Informasi.
4. Pencatatan Data, Pelaporan dan Dokumentasi
5. Perlindungan dan Penggunaan Aset Perusahaan.

CODE OF CONDUCTS

The Company formulates Code of Conducts as reference of conducts for the Board of Commissioners, Board of Directors and Employees. The Code of Conducts prevails for all PELNI People at all organization level. PT PELNI (Persero) Code of Conducts has been updated and validated under Board of Directors Decree No. 12.29/01/SK/HKO.01/2016 regarding Code of Conducts in PT PELNI (Persero) circumstances.

CONTENTS OF CODE OF CONDUCTS

The Company consistently linked the Code of Conducts with core values, as follows:

I. Introduction

II. Business Ethics Guidelines

A. Standard of Relationship with Stakeholders

1. Relationship with the Shareholders.
2. Relationship with the Employees.
3. Relationship with the Customers.
4. Relationship with the Suppliers and Vendors.
5. Relationship with the Business Partners.
6. Relationship with the Society and Environment.
7. Relationship with the Creditors.
8. Relationship with the Government.
9. Relationship with the Agency Ship Principal.
10. Relationship with the Mass Media.
11. Compliance with the Law.
12. Business Competition.

B. Ethical Standard in Company Management

1. Accounting and Finance Policy.
2. Corporate Assets Use.
3. Occupational Health, Safety and Environment.
4. Subsidiary Management.

III. Work Ethics Guideline:

A. Noble Values

B. Maintain Corporate Image

C. Responsibility to the Company

1. Integrity.
2. Compliance with the Law.
3. Information Confidentiality.
4. Data Recording, Report and Documentation.
5. Corporate Assets Protection and Use.

6. Penggunaan Komunikasi Elektronik
7. Kesehatan dan Keselamatan Kerja, Lingkungan dan Masyarakat
8. Penyalahgunaan Obat-Obatan dan Alkohol.
9. Keterlibatan dalam Aktivitas Politik.

D. Benturan Kepentingan
1. Menghindari Benturan Kepentingan.
2. Investasi dan Kepemilikan Saham Pribadi Karyawan.
3. Kegiatan di Luar Perusahaan.
4. Perlakuan Terhadap Keluarga dan teman
5. Pemberian dan Penerimaan Suap, Hadiah, Jamuan Bisnis/Hiburan dan lainnya.

E. Hubungan Kerja.
1. Lingkungan Kerja yang Bebas dari Diskriminasi, Pelecehan, Perbuatan Asusila, Ancaman dan Kekerasan.
2. Kerjasama Atasan dan Bawahan.

F. Hubungan Dengan Konsumen
1. Pelayanan Kepada Konsumen.
2. Perlakuan Adil dan Tidak Diskriminatif.

G. Perlakuan Terhadap Mitra Bisnis

H. Perlakuan Terhadap Pesaing

I. Hubungan Dengan Pemerintah
1. Kepatuhan Terhadap Ketentuan/Peraturan Terkait.
2. Pola Hubungan dan Komunikasi.

J. Hubungan Dengan Masyarakat
1. Pelayanan Masyarakat.
2. Pemberian Donasi.
3. Kesadaran akan Lingkungan Alam.

IV. Penerapan Pedoman Perilaku, mencakup:
- **A. Sosialisasi Pedoman Perilaku.**
- **B. Pernyataan Kepatuhan INSAN PT PELNI (Persero)**
- **C. Saluran Pengaduan Masalah.**
- **D. Sanksi Pelanggan Pedoman Perilaku.**

PENERAPAN DAN PENEGAKAN PEDOMAN PERILAKU

Implementasi *Code of Conduct* dilaksanakan oleh seluruh Insan PELNI. Untuk itu, Perseroan melaksanakan sosialisasi dan internalisasi untuk memastikan *Code of Conduct* diketahui dan dijalankan oleh seluruh Insan Perusahaan. Pedoman GCG dan *Code of Conduct* telah di-*upload* pada *website* PELNI www.pelni.co.id dan dapat diunduh secara langsung. Seluruh Insan PELNI diharuskan untuk

6. Electronic Communication Use
7. Occupational Health, Safety, Environment and Society
8. Abuse of Drugs and Liquor
9. Involvement in Political Activity

D. Conflict of Interest
1. Avoiding Conflict of Interest.
2. Employee Personal Investment and Shares Ownership.
3. External Activity.
4. Treatment to Family and Friend.
5. Gratification, Reward, Buisness Reception/ Entertainment and Others.

E. Working Relation.
1. Working Environment that is Free from Discrimination, Abuse, Dishonor Attitude and Abuse.
2. Coordination Between Superiors and Subordinates.

F. Relationship with Customers
1. Customer Service.
2. Fair and Non-Discriminative.

G. Treatment to Business Partner

H. Treatment to Competitors

I. Relationship with The Government
1. Legal Compliance.
2. Communication Scheme.

J. Relationship with The Society
1. Community Service.
2. Donation.
3. Environmental Care.

XI. Code of Conducts Implementation, including:
- **A. Code of Conducts Socialization**
- **B. PT PELNI (Persero) Individual Intergrity Statement**
- **C. Complaint Channel**
- **D. Punishment to Code of Conducts Violation.**

APPLICATION AND ENFORCEMENT OF THE CODE OF CONDUCT

Implementation of Code of Conduct implemented by all PELNI People. Therefore, the Company conducts socialization and internalization to ensure that the Code of Conduct is acknowledged and implemented by all Company People. The Code of GCG and Code of Conduct have been uploaded on the PELNI website www.pelni.co.id and can be downloaded directly. All PELNI People are required to

ETIKA BISNIS
Business Ethics

membaca dan memahami dengan baik Pedoman Perilaku Perusahaan serta wajib secara berkala setiap tahunnya untuk menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen atas kepatuhan tersebut.

Bagi setiap Insan Perseroan yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar *Code of Conduct* harus segera melaporkan kepada atasan atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi. Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap Insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Pemberian sanksi terhadap pelanggaran *Code of Conduct* dilakukan untuk menegakkan *Code of Conduct* Perseroan. Setiap Insan Perseroan yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap *Code of Conduct* akan diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai dengan peraturan pemerintah.

SOSIALISASI *CODE OF CONDUCT*

Perseroan senantiasa melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku Perseroan, karena sosialisasi merupakan tahapan penting dalam terciptanya insan PELNI yang berprilaku sesuai dengan Budaya Perusahaan. Pedoman Perilaku dikomunikasikan dan disosialisasikan kepada Dewan Komisaris dan organ pendukungnya, Direksi dan pejabat satu tingkat di bawah Direksi serta seluruh pegawai yaitu antara lain melalui penandatanganan Pakta Integritas yang memuat komitmen pelaksanaan Pedoman Perilaku.

Dalam ketentuan Bab IV mengenai sosialisasi *Code of Conduct,* disebutkan bahwa seluruh Insan PELNI harus membaca dan memahami dengan baik isi Buku Pedoman dan bertanggungjawab untuk menaatinya. Direktorat SDM dan Umum berkewajiban untuk mensosialisasikan Pedoman Perilaku kepada seluruh Insan PELNI dengan menyampaikan daftar baca. Setiap Insan PELNI dapat meminta penjelasan dari atasan langsung apabila kurang memahami kebijakan Pedoman Perilaku.

read and understand the Code of Conduct properly and to annually sign the Compliance Statement of Compliance as manifestation of their compliance.

For any Company People who acknowledge a situation that is believed to have the potential to violate the Code of Conduct must immediately report to the superior or higher leadership in writing by including the identity of the reporter on the basis of full and accountable evidences and does not contain libel and personal interests. The Company will protect the confidentiality of any PELNI Insan who has reported the violation and will follow up immediately unless the report is incorrect and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Sanctions administration on the violationa gainst the Code of Conduct is aimed to enforce the Code of Conduct. Any Company People who is proven to have violated the Code of Conduct shall be punished. Sanctions shall be governed by a separate regulation established in accordance with government regulations.

SOCIALIZATION OF THE CODE OF CONDUCT

The Company always disseminates the Code of Conduct considering the socialization as an important step in developing PELNI People who adapt the Corporate Culture in their attitude. The Code of Conduct is communicated and disseminated to the Board of Commissioners and its supporting structures, the Board of Directors and the one-level executives under the Board of Directors and all employees, among others through the signing of the Integrity Pact which contains the commitment of the implementation of Code of Conducts.

In the provisions of Chapter IV on the socialization of the Code of Conduct, the provisions mentioned that all Insan PELNI must read and understand well the contents of the Manual and be responsible for obeying it. The Directorate of Human Resources and General Affairs is obliged to socialize the Code of Conduct to all PELNI People by submitting the reading list. Each PELNI People may request an explanation from the immediate supervisor if he/she is not familiar with the Code of Conduct policy.

KEBIJAKAN PENEGAKKAN DISIPLIN DAN PENANGANAN PELANGGARAN

Seluruh insan PELNI wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan Pedoman Perilaku sebagai wujud komitmen untuk memenuhi Pedoman Perilaku. Pedoman Penandatanganan Surat Kepatuhan Pedoman perilaku dilakukan secara berkala setiap tahun. Direktorat SDM dan Umum mendokumentasikan Surat Pernyataan Kepatuhan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Pedoman Perilaku Perseroan.

Pemberian sanksi terhadap pelanggaran Pedoman Perilaku dijabarkan dalan Bab IV, yaitu dilakukan untuk menegakkan Pedoman Perilaku Perseroan. Setiap Insan PELNI yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku diberikan sanksi. Pemberian sanksi akan diatur dengan peraturan tersendiri yang ditetapkan sesuai Peraturan Perseroan.

Setiap insan PELNI yang mengetahui suatu situasi yang diyakini berpotensi melanggar Pedoman Perilaku harus segera melaporkan kepada atasan langsung atau pimpinan yang lebih tinggi secara tertulis dengan mencantumkan identitas pelapor berdasarkan bukti-bukti yang lengkap dan dapat dipertanggungjawabkan serta tidak mengandung unsur fitnah dan kepentingan pribadi.

Perseroan akan melindungi kerahasiaan setiap insan PELNI yang telah melaporkan pelanggaran dan akan segera menindaklanjutinya, kecuali laporannya tidak benar dan kepada pelapor dapat dikenakan sanksi sesuai ketentuan yang berlaku. Sepanjang tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku.

EVALUASI EFEKTIVITAS PELAKSANAAN ETIKA PERUSAHAAN

Evaluasi terhadap penerapan Pedoman Perilaku dilakukan secara berkala kepada Insan PELNI. Berdasarkan Evaluasi ini diharapkan mampu mendorong dan meningkatkan rasa kepemilikan dari setiap Insan PELNI serta diharapkan mampu meningkatkan kompetensi dan kemampuan karyawan secara konsisten. Sebagai pedoman yang bersifat dinamis, Pedoman Perilaku akan dikaji secara berkala dan berkelanjutan.

DISCIPLINE ENFORCEMENT AND VIOLATION POLICY

All of PELNI People are required to sign the Statement of Compliance as a form of commitment to meet the Code of Conduct. Guidance on Signing of Compliance Guidelines Behavioral guidelines are conducted periodically every year. The Directorate of Human Resources and the General documents the Compliance Statement as an integral part of the Company's Code of Conduct.

Punishment for any violations against the Code of Conduct are outlined in Chapter IV, which is to enforce the Company's Code of Conduct. Any PELNI People who are proven violating the Code of Conduct will be punished. The granting of sanctions shall be governed by a separate regulation stipulated by the Company's Regulations.

Every PELNI People who acknowledge any situation that is believed to have the potential of violation against the Code of Conduct shall promptly report to a superior superior or a higher lead in writing by including the identity of the complainant on the basis of complete and accountable evidence and not containing any slander and personal interests.

The Company will protect the confidentiality of any PELNI People who has reported the violation and will follow-up immediately, unless the report is incorrect and the complainant may be subject to sanctions in accordance with applicable regulations. Throughout 2017 there is no violation of the Code of Conduct.

EVALUATION ON EFFECTIVENESS OF CODE OF CONDUCTS IMPLEMENTATION

Evaluation of the implementation of the Code of Conduct is done periodically to the PELNI People. Based on this evaluation is expected to encourage and increase the sense of ownership of every Pelni Insan and is expected to improve the competence and ability of employees consistently. As a dynamic guideline, the Code of Conducts is reviewed periodically and continuously.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Litigation Involving The Company

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERSEROAN, ENTITAS ANAK, ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI YANG MASIH MENJABAT

Per 31 Desember 2017, Perseroan mencatat beberapa perkara penting yang melibatkan Perseroan, antara lain:

LITIGATION INVOLVING THE COMPANY, SUBSIDAIRY AND CURRENT BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS

As of December 31, 2017, the Company recorded some cases involving the Company, as follows:

1	Jenis Perkara Case Type	Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" yang diajukan oleh Hasan Ismail di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang mengklaim Aset Milik PT PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Angkasa No. 18 Jakarta Pusat. Civil Law "Act Againts the Law" was filed by Hasan Ismail in the Central Jakarta District Court who claimed PT PELNI (Persero) Assets which is located at Jl. Angkasa No. 18 Central Jakarta.
	Nomor Perkara Case Number	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 168/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Decision of the Central Jakarta District Court Number: 168/PDT.G/2008/PN.JKT.PST. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 537/PDT/2009/PT.DKI Decision of High Court of DKI Jakarta Number: 537/PDT/2009/PT.DKI. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 76K/PDT/2011. Decision of Supreme Court Cassation Number: 76K/PDT/2011. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung Nomor: 496PK/Pdt/2013. Judgement Decision Number: 496PK/Pdt/2013. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 110/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Pst. Decision of Central Jakarta District Court Number: 110 / Pdt.Plw / 2015 / PN.Jkt.Pst. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor : 127/Pdt/2017/PT.DKI Decision of High Court of DKI Jakarta Number: 127/Pdt/2017/PT.DKI
	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Penggugat mengklaim kepemilikan Aset milik PT PELNI (Persero) yang telah dikuasai selama + 52 tahun secara de yure sesuai alas hak sesuai Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 1179/ Gunung Sahari Selatan, PT PELNI (Persero) digugat karena melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Plaintiff claimed ownership of PT PELNI (Persero) which has been controlled for + 52 years de jure in accordance with the right base of the Build Right Certificate no. 1179 / South Gunung Sahari, PT PELNI (Persero) that sued for submit the lawsuit "Act Against the Law".
	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Kementerian BUMN sedang mengajukan upaya perlawanan pada tingkat kasasi. The Ministry of State-Owned Enterprises is filing for resistance at the cassation level.
	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	PT PELNI (Persero) belum dapat secara optimal mendayagunakan aset tetap tersebut. PT PELNI (Persero) has not been able to optimally utilize the fixed assets.
	Risiko Yang Dihadapi Dan Nilai Nominal Tuntutan Risk Faced And Value Of Demand	Sesuai dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 168/PDT.G/2008/PN.JKT.PST, Perusahaan diperintahkan membayar ganti rugi sebesar Rp10 miliar. According to the Central Jakarta District Court Decision Number 168 / PDT.G / 2008 / PN.JKT.PST, the Company was ordered to pay compensation amounting to Rp10 billion.
	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	Tidak Ada None
2	Jenis Perkara Case Type	Perkara Perdata "Gugatan Pengosongan" Oleh Sdr. Daeng Abdul Karim yang mengklaim sebagai ahli waris atas tanah & bangunan Kantor Cabang PT PELNI (Persero) Makassar yang terletak di Jl. Sudirman 14/14A. Civil case "Clearance law suit" has been submitted by Mr. Daeng Abdul Karim who claimed as heirs of land & building Branch Office of PT PELNI (Persero) in Makassar which is located at Jl. Sudirman 14/14A.
	Nomor Perkara Case Number	Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor : 324/Pdt.G/2013/PN.Mks Decision of Makassar District Court Number: 324/Pdt.G/2013/PN.Mks Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor : 59/PDT/2014/PT.MKS. Decision of the Makassar High Court Number: 59/PDT/2014/PT MKS.
	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Sdr. Daeng Abdul Karim mengklaim sebagai ahli waris tanah milik PT PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Sudirman No. 14/14A sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 259/Mangkura Makassar Sulawesi Selatan. Mr. Daeng Abdul Karim claimed to be the heir of land owned by PT PELNI (Persero) which is located at Jl.Sudirman No.14/14A as the Right to Build Certificate Number: 259/Mangkura Makassar South Sulawesi.
	Posisi Terakhir Perkara Case Status	PT PELNI (Persero) sedang mengajukan kasasi di Mahkamah Agung. PT PELNI (Persero) is filing cassation in The Supreme Court.
	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	Perkara ini masih sedang berjalan dan sepanjang belum ada putusan yang berkekuatan hukum tetap maka PT PELNI (Persero) belum merasakan dampak secara langsung atas perkara ini. The case is still ongoing and as long as there is no decision with permanent legal force PT PELNI (Persero) has not felt the direct impact on this case.

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Litigation Involving the Company

	Risiko Yang Dihadapi Dan Nilai Nominal Tuntutan Risk Faced And Value Of Demand	Perusahaan berisiko kehilangan asset senilai aset yang dimaksud. Company is at risk of losing assets valued the assets in question.
	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	Tidak Ada None
3	Jenis Perkara Case Type	Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" Oleh Agustine Ria Dewi (ahli waris penghuni) terhadap PT PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Civil Case "Act Against the Law" was filed by Agustine Ria Dewi (resident heir) to PT PELNI (Persero) which is located at Jl. Jambi No. 61 Surabaya.
	Nomor Perkara Case Number	Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 229/Pdt.G/2014/PN.Sby. Surabaya District Court Decision Number: 229/Pdt.G/2014/PN.Sby. Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 272/Pdt/2015/PT.Sby. Decision of the High Court of Surabaya Number: 272/Pdt/015/PT.Sby. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2935 K/Pdt./2016 Decision of Supreme Court Cassation Number: 2935 K/Pdt./2016.
	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Agustine Ria Dewi selaku Ahli Waris Penghuni mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT PELNI (Persero) atas Aset milik PT PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya Agustine Ria Dewi is as the inhabitants Heir filed statement of Act Againts the Law" to PT PELNI (Persero) on assets owned by PT PELNI (Persero) which is located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya
	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Telah dikeluarkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung Decision of Supreme Court Cassation has been issued
	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	PT PELNI (Persero) masih belum dapat menguasai secara langsung obyek sengketa. PT PELNI (Persero) still can not directly master the object of dispute.
	Risiko Yang Dihadapi Dan Nilai Nominal Tuntutan Risk Faced And Value Of Demand	Tidak Ada karena Putusan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2935 K/Pdt./2016, PT PELNI (Persero) dimenangkan. Not Available due to Decision in the Cassation level of Supreme Court Number: 2935 K/Pdt./2016, PT PELNI (Persero) won.
	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	Tidak Ada None
4	Jenis Perkara Case Type	Perkara Perdata "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" oleh PT Semarang Baru Indah Sejahtera terhadap PT PELNI (Persero) Civil case "statement of Act Againts lawsuit" by PT Semarang Baru Indah Sejahtera against PT PELNI (Persero).
	Nomor Perkara Case Number	Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor: 207/Pdt.G/2015/PN.Smg. Semarang District Court Decision Number: 207/Pdt.G/2015/PN.Smg. Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor : 120/Pdt/2016/PT.Smg. Decision of the Central Java High Court Number: 120/Pdt/2016/PT.Smg. Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2918.K/Pdt/2016. Decision of Supreme Court Cassation Number: 2918.K/Pdt/2016.
	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	PT Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum kepada PT PELNI (Persero) atas aset tanah dan bangunan sebagaimana alas hak SHGB Nomor 475/1983 atas nama PT PELNI (Persero) yang terletak di Jalan Mpu Tantular Nomor 25 Semarang. PT.Semarang Baru Indah filed Statement of Act againts the law to PT PELNI (Persero) on land and building assets as the basis of SHGB No. 475/1983 on behalf of PT PELNI (Persero) which is located at Jalan Mpu Tantular No. 25 Semarang.
	Posisi Terakhir Perkara Case Status	PT PELNI (Persero) sedang mengajukan permohonan eksekusi melalui Pengadilan Negeri Semarang PT PELNI (Persero) is applying for execution through Semarang District Court.
	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	Tanah dan bangunan milik PT PELNI (Persero) yang menjadi obyek sengketa masih ditempati oleh PT Semarang Baru Indah Sejahtera. Land and buildings owned by PT PELNI (Persero) which became the object of the dispute is still occupied by PT Semarang Baru Indah Sejahtera.
	Risiko Yang Dihadapi Dan Nilai Nominal Tuntutan Risk Faced And Value Of Demand	Tidak Ada karena Putusan di tingkat Kasasi Mahkamah Agung Nomor : 2918.K/Pdt/2016, PT PELNI (Persero) dimenangkan. Not Available due to Decision in the Cassation level of Supreme Court Number: 2918.K / Pdt/ 2016. PT PELNI (Persero) won.
	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	Tidak Ada None

PERKARA PENTING YANG SEDANG DIHADAPI PERUSAHAAN
Litigation Involving the Company

5	Jenis Perkara Case Type	Perkara Perdata "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" oleh PT Kanaka Line terhadap PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero). Civil Law "Statement of Act Against the Law" by PT Kanaka Line against PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero).
	Nomor Perkara Case Number	Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 684/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. Decision of Central Jakarta District Court Number: 684/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst.
	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	PT Kanaka Line mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum untuk menuntut ganti kerugian atas tenggelamnya KM. Patar akibat tubrukan dengan Kapal PT PELNI (Persero). PT Kanaka filed Act Against the Law to demand compensation for the sinking of KM. Patar due to collision with PT PELNI vessel (Persero).
	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Telah dikeluarkan Putusan Pengadilan Negeri. The Decision of the district court has been issued.
	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	Saat ini belum ada dampak hukum secara langsung kepada PT PELNI (Persero). Currently, there is no directly legal impact to PT PELNI (Persero).
	Risiko Yang Dihadapi Dan Nilai Nominal Tuntutan Risk Faced And Value Of Demand	Tidak Ada karena Putusan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 684/Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst PT PELNI (Persero) dimenangkan. Not Available due to Decision in central Jakarta district court Number: 648 / Pdt.G/2016/PN.Jkt.Pst. PT PELNI (Persero) won.
	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	Tidak Ada None
6	Jenis Perkara Case Type	Perkara Pidana "Dugaan Menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik dan sumpah palsu dan atau pemalsuan surat" yang dilaporkan oleh PT PELNI (Persero). Criminal Cases "Alleged Placing false information into authentic deeds and perjury and / or falsification of letters" that reported by PT PELNI (Persero).
	Nomor Perkara Case Number	Proses Pelaporan sebagaimana tanda bukti lapor Nomor: TBL/436/II/PMJ/Dit.Reskrimum tanggal 3 Februari 2015. Reporting process as mentioned on proof of report number: TBL/436/II/PMJ/Dit.Reskrimum dated February 3, 2015.
	Garis Besar Perkara Brief Explanation of the Case	Dugaan menempatkan keterangan palsu kedalam akta authentik dan sumpah palsu dan atau pemalsuan surat yang dilakukan oleh Hasan Ismail Alleged placing false information into authentic deeds and perjury and / or falsification of letters by Hasan Ismail.
	Posisi Terakhir Perkara Case Status	Proses Penyelidikan Polda Metro Jaya. The Regional Police Investigation Process.
	Dampak Terhadap Perusahaan Impact to the Company	Proses pidana ini berdampak pada upaya penyelamatan aset kemayoran yang sedang digugat secara perdata. This criminal process has an impact on the effort to rescue kemayoran assets that are being sued in civil.
	Risiko Yang Dihadapi Dan Nilai Nominal Tuntutan Risk Faced And Value Of Demand	Berkaitan dengan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 168/PDT.G/2008/PN.JKT.PST (Aset PT PELNI (Persero) di Kemayoran). Related to Central Jakarta District Court Decision Number: 168/PDT.G/2008/PN.JKT.PST (PT PELNI (Persero) assets in Kemayoran).
	Sanksi Administrasi Administrative Sanction	Tidak Ada None

PERKARA HUKUM YANG DIHADAPI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TAHUN 2017

Selama periode tahun 2017, tidak ada anggota Direksi dan Dewan Komisaris yang sedang menjabat memiliki permasalahan hukum, baik perdata maupun pidana.

SANKSI ADMINISTRASI TAHUN 2017

Selama periode tahun 2017, Perseroan tidak menerima sanksi administrasi baik yang dikenakan kepada Perseroan, anggota Dewan Komisaris maupun Direksi baik oleh Kementerian BUMN sebagai pemegang saham, Bursa Efek Indonesia maupun otoritas lainnya yang terkait dengan Perseroan.

JUMLAH PELANGGARAN ETIKA PERUSAHAAN TAHUN 2017

Pada tahun 2017 tidak terdapat pelanggaran etika Persahaan dan tidak ada sanksi yang diberikan untuk pelanggaran etika Perusahaan.

LAW CASE INVOLVING THE BOARD OF COMMISSIONERS AND BOARD OF DIRECTORS IN 2017

Throughout 2017 period, there was no serving member of Board of Directors and Board of Commissioners who were involved in law case either civil or criminal cases.

ADMINISTRATIVE SANCTION 2017

Throughout 2017 period, the Company did not charge by any administrative sanction either to the Company, Board of Commissioners or Board of Directors members by Ministry of SOE as Shareholder, Indonesia Stock Exchange or other authorities related with the Company.

TOTAL OF THE COMPANY VIOLENCE ETHIC 2017

In 2017, there is no the Company violence ethic and no sanction which given for the Company violence ethic.

AKSES INFORMASI DAN DATA PERUSAHAAN

Corporate Data and Information Access

PELNI secara berkala memperbarui informasi dan memberikan kemudahan akses informasi mengenai aktivitas dan kinerja Perseroan kepada para *stakeholders* agar mengetahui kondisi Perseroan secara jelas dan terbuka. PELNI memiliki berbagai sarana yang berfungsi sebagai saluran pengungkapan informasi, di antaranya sebagai berikut:

PELNI regularly updates information and provides easy access to information regarding the Company's activities and performance to stakeholders in order to know the Company's condition clearly and openly. PELNI has various facilities that serve as a channel of information disclosure, among them as follows:

Media Media	Keterangan Description
Email : info.corporate@pelni.co.id infopelni162@pelni.co.id	Email info.corporate@pelni.co.id dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi seputar kebijakan (contoh Surat Keputusan Direksi) kepada seluruh pegawai. Email infopelni162@pelni.co.id dimanfaatkan untuk penyampaian keluhan pelanggan. Email info.corporate@pelni.co.id be used to disseminate information about the policy (eg Decree of the Board) to all employees. Email infopelni162@pelni.co.id be used for the delivery of customer comp
Website: www.pelni.co.id	Biro Teknologi dan Informasi bertindak sebagai admin, dengan penyuplai konten dari tiap divisi yang berkepentingan. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab untuk konten Berita & Informasi. Technology and Information Bureau acts as admin, with suppliers of content from each division concerned. The Corporate Secretary is responsible for the content of News & Information.
Portal BUMN SOE's Portal	Website yang dikelola Kementrian BUMN yang menyediakan laman untuk tiap-tiap BUMN. Diperbaharui setiap kali Perseroan memiliki informasi yang layak diketahui oleh publik. Website is managed by the Ministry of SOEs that provides a page for each SOE. Updated whenever the Company has adequate information known to the public.
Media Internal Internal Media	Majalah Camar dengan 62 halaman diterbitkan secara berkala. Memuat informasi tentang peristiwa Perseroan yang disebarkan ke kantor pusat, cabang dan kapal. Camar magazine with 62 pages is published periodically. Contains information about events which are propagated to the company's head office, branches and boats.

PELNI juga menyediakan akses informasi lain bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan untuk memperoleh informasi relevan mengenai berita dan kinerja Perseroan, melalui media, sebagai berikut:

- Call Center : 162 / 021 162
- e-Mail : infopelni162@pelni.co.id
- Website : www.pelni.co.id
- SMS Masking : Pelni162
- Facebook : Pelayaran Nasional Indoneisa
- Twitter : @Pelni162
- Instagram : Pelniline

PELNI also provides other information access for the Shareholders and Stakeholders to gain relevant information about the Company's news and performance through media, as follows:

- Call Center : 162 / 021 162
- e-Mail : infopelni162@pelni.co.id
- Website : www.pelni.co.id
- SMS Masking : Pelni162
- Facebook : Pelayaran Nasional Indoneisa
- Twitter : @Pelni162
- Instagram : Pelniline

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistle Blowing System

Whistle Blowing System adalah sistem untuk memproses pengaduan/pemberian informasi yang disampaikan baik secara langsung maupun tidak langsung sehubungan dengan adanya perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang terjadi di lingkungan PT PELNI (Persero).

Landasan Kebijakan Sistem Pelaporan Pelanggaran di PT PELNI (Persero) merujuk pada SK Pedoman WBS No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran (*Whistle Blowing System)* PT PELNI (Persero). Merujuk pada pedoman tersebut, implementasi WBS di PT PELNI (Persero) bertujuan untuk membangun, menerapkan dan mengelola suatu Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) agar berbagai permasalahan dalam Perseroan yang tidak sesuai dengan standar etika dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dapat terdeteksi secara dini *(early warning system)* dan dapat mengurangi/meminimalisir risiko yang dihadapi oleh Perseroan akibat pelanggaran baik dari segi keuangan, operasi, hukum, keselamatan kerja dan reputasi yang berdampak pada pengurangan biaya *(cost reduction)* dalam mengelola akibat dari terjadinya suatu pelanggaran.

PENYAMPAIAN LAPORAN PELANGGARAN

Pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh pegawai dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui *e-mail* perusahaan: wbs@pelni.co.id
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:
  Direksi PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
  Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

Untuk pengaduan pelanggaran yang diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Kepala Unit Kerja dari Organ Penunjang Direksi dilakukan secara tertulis dengan mekanisme sebagai berikut:

- Melalui *e-mail* perusahaan: wbs@pelni.co.id
- Menyampaikan surat resmi yang ditujukan kepada Direksi dengan cara diantara langsung atau melalui pos ke alamat:
  Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
  Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

The Whistleblowing System is a system for processing complaints / deliveries submitted directly or indirectly in connection with actions against the law, regulations / standards, codes of ethics and policies, and other similar actions in the form of direct threats to the public interest, and Corruption, Collusion, and Nepotism (KKN) that occurred in the environment of PT PELNI (Persero).

Policy Basis for Violation Reporting System at PT PELNI (Persero) refers to WBS Decree No 12.29/04/SK/HKO.01/2016 on PT PELNI (Persero) Guideline for Whistle Blowing Management. Referring to these guidelines, WBS implementation at PT PELNI (Persero) aims to build, implement and manage a Reporting System of Violations (WBS) so that various issues within the Company that are not in accordance with prevailing ethical standards and laws and regulations can be detected early (Early warning system and can reduce/minimize risks faced by the Company due to financial, operational, legal, safety and reputation violations that result in cost reduction in managing the consequences of a violation.

SUBMISSION VIOLATION REPORT

Complaints of violation indication report by employees are made in writing with the following mechanism:

- Through company e-mail: wbs@pelni.co.id
- Delivering an official letter addressed to the Board of Directors by direct or by post to:
  Direksi PT PELNI (Persero) u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
  Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

For report of violation committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Head of Work Unit of the Board of Directors Supporting Organ shall be done in writing with the following mechanism:

- Through company e-mail: wbs@pelni.co.id
- Delivering an official letter addressed to the Board of Directors by direct or by send mailing letter to:

  PT PELNI (Persero) Board of Commissioners u.p Tim Pengelola Pengaduan pelanggaran
  Jl. Gajahmada No. 14 Jakarta 10130

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN
Whistle Blowing System

Beberapa ketentuan terkait penyampaian laporan pengaduan pelanggaran, sebagai berikut:

1. Pengaduan pelanggaran secara tertulis sebaiknya dilengkapi oleh fotokopi identitas dan bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
2. Pengaduan pelanggaran tanpa identitas sebaiknya dilengkapi oleh bukti pendukung seperti dokumen yang berkaitan dengan transaksi yang dilakukan dan/atau pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
3. Perseroan wajib memberikan tanda terima jika pengaduan pelanggaran diajukan secara tertulis beridentitas.
4. Apabila pengaduan pelanggaran diajukan oleh perwakilan *Stakeholders* maka selain dokumen di atas juga diserahkan dokumen lainnya yaitu fotokopi identitas *Stakeholders* dan/atau perwakilan Stakeholders, surat kuasa.
5. Perseroan wajib menyampaikan bukti tanda terima pengaduan pelanggaran kepada *Stakeholders* dan/atau perwakilan *Stakeholders* yang mengajukan pengaduan.

PERLINDUNGAN BAGI WHISTLEBLOWER

Kebijakan Perlindungan Pelapor mencakup beberapa aspek sebagai berikut:

1. Melindungi Pelapor.
2. Perlindungan pelapor dimaksudkan untuk mendorong keberanian melaporkan pelanggaran.
3. Perlindungan pelapor meliputi:
   - Jaminan fasilitas saluran pelaporan (telepon, surat, e-mail) atau Ombudsman yang independen, bebas dan rahasia.
   - Jaminan perlindungan kerahasiaan identitas pelapor dan isi laporan. Perlindungan ini diberikan bila pelapor memberikan identitas serta informasi yang dapat digunakan untuk menghubungi pelapor.
   - Jaminan perlindungan atas tindakan balasan dari terlapor atau organisasi. Perlindungan dari tekanan, dari penundaan kenaikan pangkat, pemecatan, gugatan hukum, harta benda, hingga tindakan fisik dan perlakukan merugikan lainnya. Perlindungan ini tidak hanya untuk pelapor tetapi juga dapat diperluas hingga ke anggota keluarga pelapor.

Several provisions related to the submission of complaint violation report are as follows:

1. Complaints submitted via written violations should attach a photocopy of identity and supporting evidence such as documents relating to transactions conducted and/or allegations of report submitted.
2. Complaints of an unlawful report should attach by supporting evidence such as documents relating to the transactions conducted and/or allegations of report submitted.
3. The Company shall provide a receipt if the violation report is filed in writing of identity.
4. If a violation report is filed by a Stakeholders representative, other than the above documents shall also be submitted another document that is a photocopy of the Stakeholders identity and/or Stakeholders representative, a power of attorney.
5. The seller shall be required to submit the receipt of the complaint to the Stakeholders and/or Stakeholders representatives who lodged the complaint.

WHISTLEBLOWER PROTECTION

The Whistleblower Protection Policy covers the following aspects:

1. Protecting the Whistleblower.
2. The protection of the Whistleblower is intended to encourage the courage to report the offense.
3. Protection of the Whistleblower includes:
   - Guaranteed reporting facility facilities (telephone, mail, e-mail) or an independent, free and confidential Ombudsman.
   - Security of confidentiality of the identity of the Whistleblower and the contents of the report. This protection is provided when the Whistleblower provides an identity and information that can be used to contact the Whistleblower.
   - Guarantees protection against retaliation from the reporter or organization. Protection from pressure, from postponement of promotion, dismissal, lawsuit, property, to physical acts and other harmful treatment. This protection is not only for Whistleblower but can also be extended to family members of the reporting party.

- Jaminan kerahasiaan komunikasi/saluran informasi dengan pelapor. Informasi pelaksanaan tindak lanjut, berupa kapan dan bagaimana serta kepada institusi mana tindak lanjut diserahkan. Informasi ini disampaikan secara rahasia kepada pelapor yang lengkap identitasnya.

4. Perlindungan di atas tidak diberikan kepada pelapor yang terbukti melakukan pelaporan palsu dan/atau fitnah. Perseroan dapat memberikan penghargaan kepada pelapor atas pelanggaran yang dapat dibuktikan sehingga aset/keuangan Perseroan dapat diselamatkan dimana penghargaan akan diberikan melalui kebijakan Direksi. Di sisi lain, Perseroan juga menerapkan sanksi bagi pelapor yang menyampaikan laporan palsu sesuai dengan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

PENANGANAN PENGADUAN

Mekanisme penanganan pengaduan di PT PELNI (Persero), sebagai berikut:

- Guarantee of confidentiality of communication/ information channels with the Whistleblower. Information on follow-up implementation, in the form of when and how and to the institution where the follow-up is submitted. This information is conveyed confidentially to the complete complainant.

4. The above protection is not granted to the Whistleblower who is proven to report false and/or slander. The Company may reward Whistleblower for provable violations so that the assets/finances of the Company can be saved where the award will be granted through the Directors' policies. On the other hand, the Company also applies sanctions to reporters who submit false reports in accordance with applicable laws and the applicable legislation.

REPORT PROCESS

Report handling mechanism at PT PELNI (Persero) is as follows:

Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Oleh Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran Independen (Eksternal)
Customer Complaint Management Scheme By Independent Whistle Blowing Manager Team (External)

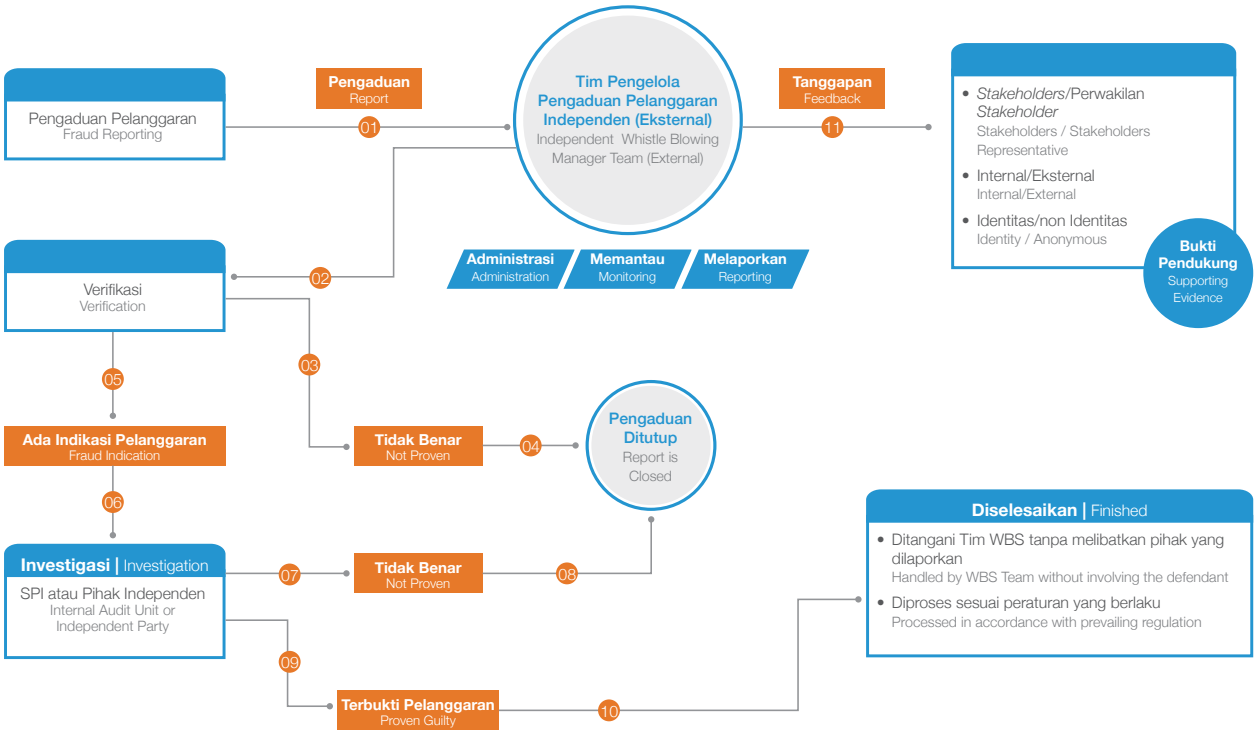

SISTEM PELAPORAN PELANGGARAN

Whistle Blowing System

Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi

Whistle Blowing System Process Scheme Indicated Committed by Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Structure of the Board of Commissioners and Board of Directors

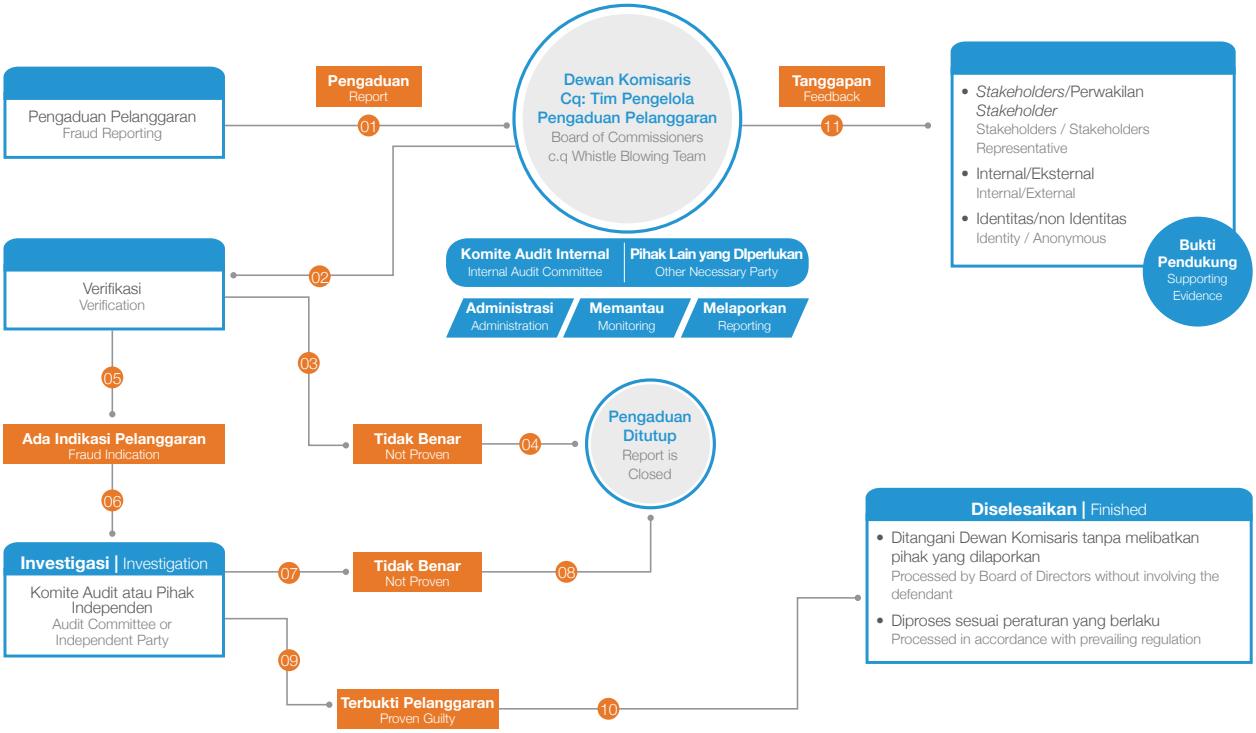

Skema Proses Pengelolaan Pengaduan Pelanggaran Diduga dilakukan oleh Karyawan PT PELNI (Persero)

Whistle Blowing System Process Scheme Indicated Committed by Employees PT PELNI (Persero)

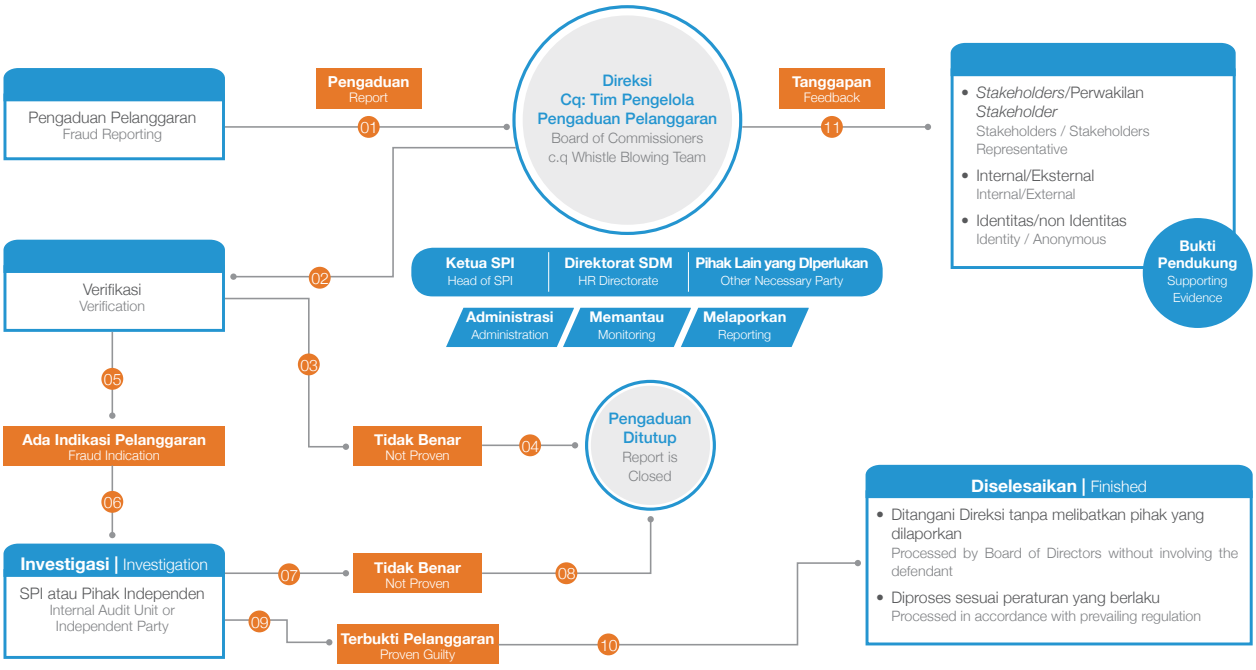

PIHAK YANG MENGELOLA PENGADUAN;

Untuk menangani laporan dugaan pelanggaran, Direksi telah membentuk:

1. Pengelola *Whistle Blowing System* adalah Unit yang melekat pada Struktural Sekretaris Perusahaan. Tugasnya meliputi: Menerima hasil dari laporan Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3), menyiapkan laporan berkala dan sosialisasi WBS.
2. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai, maka Direksi membentuk Tim Pengelola Pengaduan Pelanggaran (KP3) dan ditetapkan oleh Direksi meliputi unsur yang mewakili Direksi, SPI, Sekretaris Perusahaan, Divisi SDM dan Divisi Hukum.
3. Untuk dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi, Dewan Komisaris, Organ Penunjang Dewan Komisaris dan Organ Penunjang Direksi, dibentuk dan ditetapkan oleh Dewan Komisaris meliputi unsur Komisaris, Komite Audit, Komite Manajemen Risiko.

THE PARTY MANAGING THE COMPLAINT;

To handle the violation report, the Board of Directors has established:

1. Whistle Blowing System Manager is a Unit attached to Structural Corporate Secretary. Duty: Receiving results from reports of the Grievance Complaints Management Team (KP3), preparing WBS periodic reports and dissemination.
2. For alleged violations committed by employees, the Board of Directors shall establish a Complaints Grievance Management Team (KP3) and set by the Board of Directors covering elements representing the Board of Directors, SPI, Corporate Secretary, Human Resources Division and Legal Division.
3. For alleged violations committed by the Board of Directors, Board of Commissioners, Supporting Organs of the Board of Commissioners and Supporting Organs of the Board of Directors, established and determined by the Board of Commissioners comprising the Board of Commissioners, Audit Committee, Risk Management Committee.

JUMLAH PENGADUAN YANG MASUK DAN DIPROSES PADA TAHUN BUKU TERAKHIR

Per 31 Desember 2017, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggan Perseroan.

TOTAL REPORT RECEIVED AND PROCESSED IN RECENT FISCAL YEAR

As of December 31, 2017, there was no report or complaint submitted via Whistle Blowing System

SANKSI/TINDAK LANJUT ATAS PENGADUAN YANG TELAH SELESAI DIPROSES PADA TAHUN BUKU

Per 31 Desember 2017, tidak ada laporan atau pengaduan yang disampaikan melalui Sistem Pelaporan Pelanggan Perseroan sehingga tidak terdapat sanksi/tindak lanjut atas pengaduan atau laporan yang diterima melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran.

PUNISHMENT/FOLLOW-UP OF COMPLETED REPORT IN THE FISCAL YEAR

As of December 31, 2017 there was no report or complaint submitted through Whistle Blowing System, therefore, there was no punishment/follow-up on the accepted report received via the Whistle Blowing System.

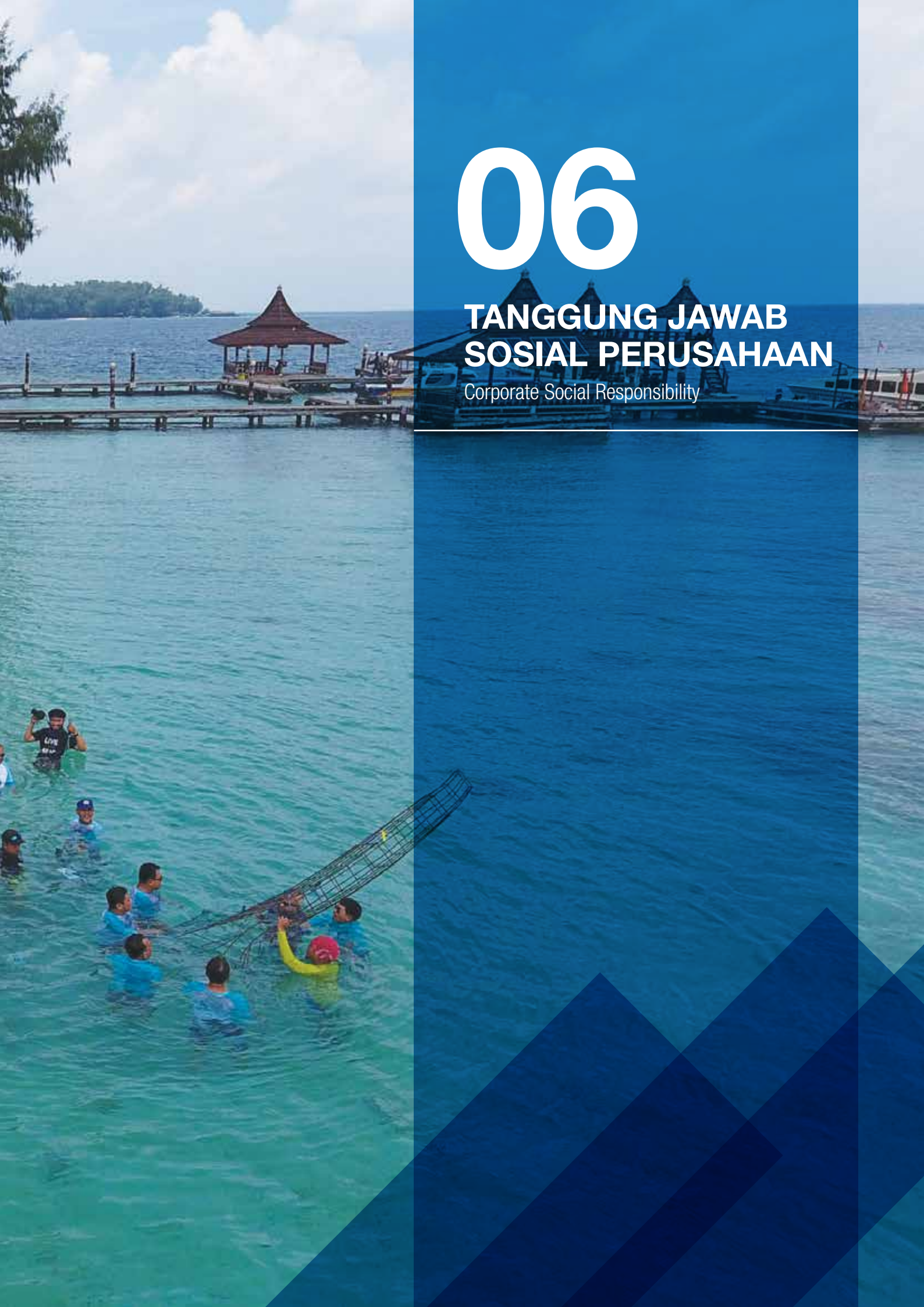

06

TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

PENDAHULUAN
Introduction

PT PELNI (Persero) sebagai Perusahaan yang seluruh kegiatan usaha dan operasionalnya berhubungan langsung dengan pemangku kepentingan khususnya adalah lingkungan, masyarakat, karyawan dan konsumen tentu selalu memperhatikan kebutuhan dan dampak yang ditimbulkan. Untuk itu, Perseroan berkomitmen untuk terus memberikan dampak yang positif agar kelangsungan usahanya selalu berkelanjutan.

Melalui kegiatan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan *(Corporate Social Responsibility),* Perseroan berkomitmen memberikan hubungan timbal balik yang positif antara Perseroan dengan para pemangku kepentingan. Hubungan antara Perseroan dan Pemangku kepentingan ini diharapkan dapat menjaga kelangsungan usaha Perseroan sehingga Perseroan dapat senantiasa memberikan kontribusinya terhadap lingkungan.

KEBIJAKAN PKBL

Kebijakan pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (*Corporate Social Responsibility* atau CSR) di PT PELNI (Persero) merujuk pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

Merujuk pada landasan kebijakan tersebut, PT PELNI (Persero) melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) dengan tujuan untuk membantu Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kegiatan PKBL tersebut juga melibatkan para pemangku kepentingan, khususnya masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

Pelaksanaan CSR PT PELNI (Persero) terbagi menjadi 4 (empat) bidang, yaitu:

- Tanggung Jawab Sosial Bidang Lingkungan Hidup.
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Ketenagakerjaan, Keselamatandan Kesehatan Kerja.
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Pengembangan SosialKemasyarakatan.
- Tanggung Jawab Sosial Bidang Perlindungan Pelanggan.

PT PELNI (Persero) as a company whose entire business activities and operations directly relate to the stakeholders, especially the environment, community, employees and consumers certainly always pay attention to the needs and impacts caused. To that end, the Company is committed to continue to have a positive impact to ensure its business continuity is always sustainable.

Through its Corporate Social Responsibility activities, the Company is committed to providing a positive mutual relationship between the Company and its stakeholders. The relationship between the Company and Stakeholders is expected to maintain the Company's business continuity so that the Company can always contribute to the environment.

PKBL POLICY

Corporate Social Responsibility (CSR) implementation at PT PELNI (Persero) refers to the Minister of State-Owned Enterprise (BUMN) regulation No. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 regarding to Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises and the latest amendment in accordance with the Minister of State-Owned Enterprise regulation. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 about the Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation no. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises.

Referring to the policy foundation, PT PELNI (Persero) implemented the Partnership and Community Development Program (PKBL) with the aim of assisting the Government in implementing more equitable development and improving the community welfare. PKBL's activities also involve the stakeholders, especially the communities that are located around the business area of PT PELNI (Persero).

CSR implementation of PT PELNI (Persero) is divided into 4 (four) areas, namely:

- Environmental Responsibility.
- Social Responsibility for Employment, Occupational Safetyand Health.
- Social Responsibility for Social and Social Development.
- Social Responsibility for Customer Protection.

LANDASAN HUKUM

Penerapan seluruh kegiatan Tanggung Jawab Sosial PT PELNI (Persero) telah sesuai dengan landasan-landasan hukum sebagai berikut:

- Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 60/KMK.016/96 tanggal 9 Februari 1996 tentang perubahan pasal 3 Keputusan Menteri Keuangan RI No. 316/KMK.016/1994.
- Surat Keputusan Menteri Negara BUMN No. 100MBU/2002 tanggal 04 Juni 2002 tentang penilaian tingkat kesehatan Badan Usaha Milik Negara.
- Keputusan Menteri BUMN Kep-236/MBU/2003 tentang Program Kemitraan Badan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Program Kemitraan BUMN Dengan Usaha Kecil Dan Program Bina Lingkungan.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-08/MBU/2007 tanggal 27 April 2007 tentang Perubahan keempat atas Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-05/MBU/2007.
- Surat Edaran Menteri Negara BUMN No. SE-03/MBU/S/2007 tanggal 17 Juli 2007 perihal Penetapan Wilayah Binaan, tahun 2007.
- Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan MenteriNegara BUMN No. PER-03/MBU/12/2016 tanggal 16 Desember 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.
- Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-02/MBU/7/2017 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/07/2015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara.

LEGAL BASIS

All activities of PT PELNI (Persero) Social Responsibility implementation has complied with the following legal basis:

- The Minister of Finance of the Republic of Indonesia decree No. 60/KMK.016/96 dated February 9, 1996 regarding to the amendment of article 3 of the Minister of Finance decree RINo. 316/KMK.016/1994.
- The Minister of State Owned Enterprises Decree Number: 100MBU/2002 dated 04 June 2002 about the health rating of State-Owned Enterprises.
- The Minister of SOE decree Kep-236/MBU/2003 on Partnership Program of the Small Business agency and Community Development Program.
- The Minister of State Owned Enterprises regulation No. PER-05/MBU/2007 dated April 27, 2007 on pertnership program With Small Business And Community Development Program of State Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-08/MBU/2007 dated 27 April 2007 Concerning to the fourth Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-05/MBU/2007.
- The Minister of State-Owned Enterprises Circular Letter No. SE-03/MBU/S/2007 dated July 17, 2007 on the Establishment of Assistance Areas, 2007.
- The Minister of State Owned Enterprises regulation PER-09 / MBU / 07/2015 dated July 3, 2015 on Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-03/MBU/12/2016 dated December 16, 2016 concerning Amendment to The Minister of SOEs regulation No. PER-09/MBU/07/2016 about Partnership and Community Development Program of State-Owned Enterprises.
- The Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-02/MBU/7/2017 About Second Amendment to the Minister of State-Owned Enterprises regulation No. PER-09/MBU/07/2015 About the Partnership and Community Development Program of State-owned enterprises.

PENDAHULUAN
Introduction

STRUKTUR ORGANISASI PKBL & CSR

Sesuai dengan Surat Keputusan Direksi PT PELNI (Persero) No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 tanggal 28 Februari 2017 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Kantor Pusat PT PELNI (Persero), maka Unit Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) berada di bawah Divisi Perbendaharaan *(Treasury)* dan Direktur Keuangan. Dalam melaksanakan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan untuk Kantor Pusat dilakukan oleh *Senior Manager* Perbendaharaan dan dibantu oleh Manager PKBL beserta satu orang supervisor dan satu orang staf, sedangkan di daerah-daerah untuk pelaksanaan pembinaan Mitra dilakukan oleh staf PT PELNI (Persero) di cabang-cabang setempat.

PKBL & CSR ORGANIZATIONAL STRUCTURE

In accordance with the Board of Directors decree of PT PELNI (Persero) No. 02.28/02/SK/HKO.01/2017 dated February 28, 2017 on Organizational Structure, Main Duties and Functions of PT PELNI (Persero) Head Office, Partnership and Community Development program (PKBL) is under the Treasury Division and the Finance Director. In implementing the Partnership and Community Development Program for the Head Office is performed by Senior Manager of Treasury and assisted by PKBL Manager along with one supervisor and one staff member, while in the areas for the implementation of coaching Partners are conducted by PT PELNI (Persero) staff in local branches.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP

Social Responsibility in Environment

PT PELNI (Persero) dalam melakukan aktivitasnya sebagai Perusahaan yang bergerak dalam sektor transportasi memastikan bahwa aktivitas Perusahaan sudah sesuai dengan prinsip keberlanjutan yaitu keseimbangan antara *triple bottom* yaitu *line people, profit, planet.* Perseroan mengukur keberhasilan usaha berdasarkan tanggung jawab sosial, kepedulian terhadap lingkungan dan keuntungan. Model yang dikembangkan tidak hanya mengejar keuntungan finansial namun juga tanggung jawab sosial.

KEBIJAKAN

Pelaksanaan Program Tanggung Jawab Sosial terhadap lingkungan merujuk pada dokumen Kedinasan di lingkungan PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM dan Umum/VII/2013. Selain itu PT PELNI (Persero) juga memiliki Surat Edaran No. 07/SE/Dir.SDM dan UM/VI.2013 tentang penghematan Listrik dan Air. Program tanggung jawab terhadap lingkungan PT PELNI (Persero) bertujuan untuk menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan guna menjaga kelestarian lingkungan sekaligus sebagai bagian dari program efisiensi sumber daya yang telah dilaksanakan secara berkelanjutan.

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

PT PELNI (Persero) menyadari keberlangsungan bisnis perusahaan tidak hanya bergantung pada kinerja finansial namun juga kelestarian lingkungan hidup dan kemampuan memberi nilai tambah kepada masyarakat sekitar. Oleh karena itu, Perseroan selalu berupaya untuk menjalankan bisnis yang ramah lingkungan dan berkelanjutan.

Pada awal tahun 2017 PT PELNI (Persero) telah menetapkan target kegiatan pengelolaan lingkungan yang disesuaikan dengan pencapaian tahunsebelumnya. Untuk mencapai target yang telah ditetapkan, Perseroantelah menyusun program yang menjadi kampanye utama Perseroan terhadap pengelolaan operasional usaha yang ramah lingkungan yaitu program *Green Office.*

Cakupan kegiatan yang direncanakan melalui program *Green Office* yaitu penerapan operasional yang hemat kertas, penerapan hemat listrik, penerapan hemat air, mengurangi polusi udara dan pengelolaan limbah operasional kantor.

REALISASI KEGIATAN

Program *Green Office*

Partisipasi PT PELNI (Persero) dalam menjaga kelestarian lingkungan dilaksanakan dengan menciptakan lingkungan kerja yang ramah lingkungan melalui Program *Green Office.* Program *Green Office* dilaksanakan melalui beberapa aktivitas, sebagai berikut:

PT PELNI (Persero) in performing its activities as a company operating in the transportation sector ensures that the Company's activities are in accordance with the principle of sustainability that is the balance between triple bottom line people, profit, planet. The Company measures business success based on social responsibility, environmental stewardship and profitability. The developed model pursues not only financial gain but also social responsibility.

POLICY

The environmental Responsibility Program implementation refers to the official document of PT PELNI (Persero) No. 01/HK.02.01/Dir.SDM and Umum/VII/2013. Besides, PT PELNI (Persero) also has Circular Letter No. 07/SE/DirSDM and UM/VI.2013 about electricity and Water savings. The environmental responsibility program of PT PELNI (Persero) aims to create an environmentally friendly at work environment for preserving the environment as well as part of the sustainable resource efficiency program that has been implemented in the sustainable manner.

TARGET AND ACTIVITY PLAN

PT PELNI (Persero) realizes that the sustainability of the company's business depends not only on financial performance but also on environmental sustainability and the ability to add value to the surrounding community. Therefore, the Company always strives to run a business that is environmentally friendly and sustainability.

PT PELNI (Persero) had set the target of environmental management activities In early 2017 that were adjusted to the achievement in previous year. In order to achieve the set targets, the Company has developed a program that becomes the Company's main campaign for the management toward environmentally friendly business operational, which is namely Green Office program.

The scope of activities which planned through the Green Office program is the implementation of paper-efficient operations, electricity and water saving, reducing air pollution and waste management office operations.

ACITIVITY REALIZATION

Green Office Program

PT PELNI (Persero) participation in preserving the environment is carried out by creating an environmentally friendly in work environment through the Green Office Program. Green Office Program implemented through several activities, as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG LINGKUNGAN HIDUP
Social Responsibility in Environment

1. Menerapkan hemat kertas dan tinta dengan cara mengurangi penggunaan kertas, penyimpanan dokumen dalam bentuk *soft copy,* pemanfaatan *email* sebagai pemanfaatan kertas bekas dalam mencetak dokumen yangbelum final dan menggunakan *economode* version ketika melakukan pencetakan pada alat printer.
2. Menerapkan hemat listrik dengan cara mematikan komputer dan peralatan elektronik lainnya jika akan ditinggal atau tidak digunakan dalam waktu yang lama, mengatur suhu ruangan agar tidak terlalu dingin, serta menghindari penggunaan lift dan menggunakan tangga jika hanya ingin pindah ke 1 atau 2 tingkat lantai yang berbeda.
3. Menerapkan hemat air dengan cara menggunakan air sesuai kebutuhan dan menutup keran air apabila tidak diperlukan.
4. Mengurangi polusi udara dengan cara pegawai dilarang untuk merokok di seluruh area dalam gedung, area merokok hanya diperbolehkan di tempat yang telah disediakan.
5. Melakukan pengelolaan limbah kertas, tinta printer, dan alat tulis melalui jasa pengelolaan sampah.

Bantuan Pelestarian Lingkungan

Sebagai Perusahaan yang bergerak dalam bidang transportasi laut, PT PELNI (Persero) menyadari bahwa ekosistem laut juga menjadi faktor keberlanjutan usaha dalam jangka panjang.Pada tahun 2017, PT PELNI kembali memberikan kontribusi dalam melestarikan lingkungan laut. PT PELNI melakukan kerjasama dengan Yayasan Terumbu Rupa untuk memberikan bantuan pelestarian lingkungan dengan dilakukannya Revitalisasi Terumbu Karang di Pulau Sepa, Kep Seribu, DKI Jakarta.

Secara spesifik, Perseroan tidak megalokasikan anggaran khusus dalam pelaksanaan program tanggung jawab sosial terhadap lingkungan karena telah terintegrasi dalam program kerja dan operasional. Namun, dalam realisasinya PT PELNI (Persero) telah memberikan bantuan terhadap pengelolaan dan pelestarian lingkungan dengan nilai mencapai lebih dari Rp200 juta.

SERTIFIKASI LINGKUNGAN HIDUP

Sebagai bagian dari Tanggung Jawab Sosial dalam Bidang Lingkungan Hidup, PT PELNI (Persero) juga telah melakukan sertifikasi lingkungan hidup untuk armada kapal penumpang melalui perolehan Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal yang diterbitkan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia No. 17 Tahun 2008 untuk memenuhi Peraturan Menteri Perhubungan No. 29 Tahun 2014 Tentang Pencegahan Pencemaran Lingkungan Maritim untuk Kapal Motor (KM) Bukit Raya. Sertifikat tersebut diperoleh pada tanggal 8 September 2017 dan berlaku hingga 7 September 2020.

1. Applying the paper and ink-saving by reducing paper usage, storingdocuments in soft copy, utilizing e-mail as wastepaper usage in printing unfinished documents and using economode version when printing on printer tools.
2. Applying the power saving by turning off the computer and other electronic equipment if it will be left or not used for along time, set the room temperature not too cold, and avoid the elevators usage and use the stairs if you just want tomove to 1 or 2 levels of floor different.
3. Applying the water-saving by using water as needed and closing the water faucet if not needed.
4. Reducing air pollution by means of employees are prohibited to smoke in all areas of the building, smoking area is only allowed in places that have been provided.
5. Managing the waste paper, printer ink, and stationery through waste management services.

Environmental Conservation Assistance

As a company engages in marine transportation, PT PELNI (Persero) realizes that the marine ecosystem is also a factor of business sustainability in the long term. In 2017, PT PELNI contributed in preserving the marine environment. PT PELNI cooperates with Terumbu Rupa Foundation to provide environmental conservation assistance by conducting Coral Reef Revitalization on Sepa Island, Seribu Islands, DKI Jakarta.

Specifically, the Company has not allocated special budget for social responsibility programs implementation to the environment because it has been integrated in work programs and operations. However, PT PELNI (Persero) has provided assistance to the management and conservation of the environment with nominal more than Rp200 million.

ENVIRONMENT CERTIFICATION

As part of Environmental Responsibility to the Environment, PT PELNI (Persero) has also conducted environmental certification for the passenger ships fleet through the acquisition of the National Certificate of Pollution Prevention from Ships which has been issued according to the Law of the Republic of Indonesia No. 17 of 2008 to comply with the Minister of Transportation Regulation No. 29 of 2014 about Maritime Environmental Pollution prevention for Motor Vessel (KM) Bukit Raya. The certificate was obtained on September 8, 2017 and has been valid until September 7, 2020.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Dalam melakukan operasi usahanya, PT PELNI (Persero) selalu mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja, serta kelestarian lingkungan, didasari atas kesadaran bahwa pengelolaan Kesehatan Dan Keselamatan Kerja yang prima sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang. Perseroan senantiasa mengambil tindakan yang tepat untuk menghindari terjadinya kecelakaan dan gangguan kesehatan di tempat kerja.Perseroan juga sangat memperhatikan masalah dan dampak lingkungan dari seluruh aktivitas Perseroan. Seluruh aktivitas Perseroan dievaluasi secara ilmiah dampaknya terhadap lingkungan dan dilakukan tindakan pengawasan serta pencegahan.

KEBIJAKAN

Berdasarkan Disposisi Direktur Utama No. 11.28/09/ ND/240/2016 tanggal 28 November 2016 perihal Jadwal Rencana Pelaksanaan Internal Audit dan Eksternal Audit DOC Kantor Pusat, SMC Kapal Penumpang, Kapal Barm & Kapal Perintis dan Kapal Ternak dan Program Kerja SMK3 serta Jadwal Rencana Check on the Spot ke Kapal Tahun 2017.

Pada unit kerja DPA terdapat tiga jenis program kerja,yaitu:

a. ISM-Code dan ISPS-Code yang didasari oleh regulasi IMO *(International Maritime Organization)* yang juga dikonsolidasikan pada SOLAS *(Safety of Life at Sea)* 1974 *Chapter* IX (untuk ISM-*Code*) dan *Chapter* XI-2 (untuk ISPS-*Code*).
b. SMK3 yang didasari oleh konvensi ILO *(International Labour Organization)* beserta turunannya seperti UU No.1 Th. 1970 tentang Kesehatan Kerja dan Peraturan pemerintah No. 50 Tahun 2012 tentang Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3).

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Sebagai komitmen untuk pelaksanaan Sistem Manajemen, PT PELNI (Persero) menetapkan target tahun 2017 yang berkaitan dengan sertifikasi *Document of Compliance* (DOC) dan *Safety Management Sertificate* (SMC).

Dalam rangka menghadapi eksternal audit DOC setiap tahunnya, Kantor Pusat harus diaudit internal terlebih dahulu sebagai syarat pengajuan eksternal audit untuk mempertahankan Sertifikat DOC. Dalam mempertahankan sertifikasi DOC, Perusahaan perlu melakukan verifikasi meliputi:

- Verifikasi Tahunan *(Annual Verification),* setiap tahun dengan masa pengajuan antara 3 bulan sebelum s/d 3 bulan sesudah dari ulang tahun sertifikat.

In conducting its business operations, PT PELNI (Persero) always prioritizes occupational safety and health, as well as environmental sustainability, based on the awareness that health and safety management is essential for long-term success. The Company always takes appropriate action to avoid accidents and health problems at work. The Company is also concerned with the problems and environmental impacts of all of the Company's activities. All of the Company's activities are scientifically evaluated their impact on the environment.Therefore, supervision and prevention actions are taken.

POLICY

Based on the President Director's Disposition No. 11.28 / 09 / ND / 240/2016 dated November 28, 2016 regarding Schedule of Internal Audit and External Audit Plan of DOC Head Office, SMC Passenger Ship, Barge Ship & Perintis Ship and Cattle Ship and Work Program of SMK3 and Schedule of Check on the Spot Plan to the Ship on 2017.

In the DPA working unit, there are three main working program, as follows:

a. ISM-Code and ISPS-Code that is referring to IMO (International Maritime Organization) regulation that is also consolidated to SOLAS (Safety of Life at Sea) 1974 Chapter IX (for ISM-Code) and Chapter XI-2 (for ISPS-Code).
b. SMK3 tha is referring to ILO (International Labour Organization) convention and its subsidiary regulations such as Law Number 1 of 1970 on Occupational Health and Government Regulation Number 50 of 2012 on Occupational Health and Safety Management System (SMK3).

TARGET AND ACIVITY PLAN

As a commitment to the Management System implementation, PT PELNI (Persero) has set a target of 2017 relating to the certification for Document of Compliance (DOC) and Safety Management Certificate (SMC).

In order to deal with external audits of DOC annually, the Head Office shall be internally audited first as a condition of external audit submission to retain the DOC Certificate. In maintaining DOC certification, the Company needs to verify including:

- Annual Verification, annually with a filing period of 3 months prior to 3 months after the certificate's birthday.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA
Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

- Verifikasi Pembaruan *(Renewal Verification),* pada tahun ke 5 dengan masa pengajuan 3 bulan sebelum habisnya masa berlaku sertifikat.

Sedangkan untuk sertifikat Manajemen Keselamatan (SMC) merupakan dokumen yang diterbitkan untuk suatu kapal yang menandakan bahwa manajemen Perusahaan dan kapal beroperasi sesuai dengan SMK yang disetujui. Dalam mempertahankan sertifikasi SMC, Perusahaan perlu melakukan verifikasi meliputi:

- Verifikasi Antara *(Intermediate Verification),* dengan masa pengajuan antara tahun ke 2 hingga tahun ke 3 dari ulang tahun sertifikat.
- Verifikasi Pembaruan *(Renewal Verification),* pada tahun ke 5 dengan masa pengajuan 6 bulan sebelum habisnya masa berlaku sertifikat.

REALISASI KEGIATAN
Ketenagakerjaan

» **Praktik Kesetaraan *Gender***

PT PELNI (Persero) menjamin kesetaraan dan kesempatan kerja yang sama bagi seluruh karyawan mulai dari tahap perekrutan, pengembangan karir hingga evaluasi kinerja. PT PELNI (Persero) tidak mengakui adanya diskriminasi berdasarkan gender maupun karakter lain seperti agama maupun etnis di mana kebijakan dan keputusan dalam aspek ketenagakerjaan sepenuhnya mempertimbangkan kinerja pegawai yang bersangkutan. Praktik kesetaraan gender di PT PELNI (Persero) juga tercantum dalam Surat Keputusan Direksi No. 09.30/5/SK/HKO.01/2015 tentang Pola Pengembangan Karir Jabatan Pegawai PT PELNI (Persero).

» ***Turnover* Karyawan**

Bagi Perseroan *turnover* karyawan merupakan indikator yang perlu diperhatikan. Sebab, tingkat *turnover* karyawan menggambarkan kualitas sistem SDM yang ada di suatu perusahaan. Tingkat *turnover* yang terlalu tinggi menunjukkan terdapat permasalahan yang perlu diatasi oleh perusahaan untuk mengejar kelancaran kerja rutin dan keberlanjutan dalam jangka panjang. Dengan pemahaman seperti itu, maka Perseroan senantiasa berupaya untuk menjaga suasana lingkungan kerja agar tetap kondusif sehingga mendukung rasa nyaman karyawan dalam bekerja.

Pada tahun 2017, jumlah *turnover* karyawan Perseroan adalah sebanyak 176 orang dengan penyebab pensiun dan lain-lain. Berikut adalah data tingkat *turnover* karyawan PT PELNI (Persero) selama tiga tahun terakhir dengan penyebabnya:

- Renewal Verification, in the fifth year with a filing period of 3 months prior to the expiration of the certificate.

The Safety Management certificate (SMC) is a document which issued for a ship indicating that the Company's management and ship operated in accordance with the approved SMK. In maintaining the SMC certification, the Company needs to verify including:

- Intermediate Verification, with the filing period between the 2nd and 3rd years of the certificate birthday.
- Renewal Verification, on the 5th year with the filing period of 6 months prior to the expiration of the certificate.

ACTIVITY REALIZATION
Employment

» **Gender Equality Practice**

PT PELNI (Persero) guarantees fair career equality and opportunity for all employees since recruitment, career development until performance assessment phase. PT PELNI (Persero) does not recognize any discrimination based on gender or other characters such as religion and ethnicity where the employment policy and decree are fully considered performance of the concerned employees. The gender equality practice at PT PELNI (Persero) is also stipulated in Board of Directors Decree Number 09.30/5/SK/HKO.01/2015 regarding to PT PELNI (Persero) Employee Career Development Scheme.

» **Employee Turnover**

For the Company employee turnover is also an indicator that need to considered. Because the Employee turnover rates also illustrate the quality of human resources system in the company. The turnover rate that is too high indicates there are problems that need to be addressed by the Company in order to pursue the smooth working routine and long-term sustainability. Therefore, the Company strives to maintain a conducive working environment that supports the comfort of employees in work.

In 2017, the number of the Company's employee turnover were as much as 176 people with causes of pension and others. PT PELNI (Persero) employee turnover rate over the past three years with the following reasons:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Kategori Category	Tahun Year		
	2017	2016	2015
Pensiun Alami Natural Retirement	132	144	145
Meninggal Dunia Pass Away	28	15	-
Mengundurkan Diri Resign	16	8	-
Lain-lain Others	-	-	-
Jumlah Turnover Total Turnover	**176**	**167**	**145**
Total Karyawan Total Turnover	**4.436**	**4.563**	**4.710**
%	**3,96%**	**3,66%**	**3,08%**

Keselamatan dan Kesehatan Kerja

» **Kinerja Keselamatan dan Kesehatan Kerja 2017**

- Terkait dengan Sistem Manajemen Keselamatan Kapal (SMK), telah dilaksanakan audit internal oleh ISM-*Code* sebanyak 26 kapal (100%) untuk kapal penumpang. Untuk kapal ternak dan kapal barang dan tol laut sudah terealisasi seluruhnya (100%).
- Melakukan pendampingan Audit Eksternal ISM-*Code* yang dilaksanakan oleh PT BKI sebagai Auditor Eksternal.
- Melaksanakan audit internal ISPS-*Code* sebanyak 20 kapal dari rencana 29 kapal (89%).
- Melakukan pendampingan Audit Eksternal ISPS-*Code* terhadap 11 Kapal yang dilakukan oleh RSO (*Recognized Security Organization)* Yapanindo dan Ditjen KPLP.
- Melakukan Inspeksi dan Sosialisasi SMK3-LH terhadap terhadap Kantor PT PELNI Pusat dan Kemayoran serta 9 (sembilan) Kantor Cabang.
- Melakukan pembaruan sistem ISM-*Code* melalui revisi dan penggadaan Manual SMK untuk Kapal, Cabang dan Kantor Pusat.
- Melakukan pembelian alat SMK3 *(infrared)* dan safety sign K3.
- Pada tahun 2017, telah dilakukan dua kali forum diskusi keselamatan transportasi oleh KNKT yang diwakili oleh masng masing wakil jenis transportasi di Auditorium Kantor Pusat PT PELNI.

Occupational Safety and Healty

» **2017 Occupational Safety and Healthy Performance**

- Related to Ship Safety Management System (SMK), internal audit had been conducted by ISM-Code of 26 ships (100%) for passenger ships. For cattle ships and cargo ships and toll ships were fully realized (100%).
- Conducting ISM-Code of External Audit accompaniment by PT BKI as External Auditor.
- Conducting ISPS-Code of internal audits as much as 20 ships from 29 ships (89%).
- Assistance with ISPS-Code of External Audit of 11 Ships conducted by RSAP (Recognized Security Organization) Yapanindo and DGCA.
- Performing Inspection and Socialization of SMK3-LH toward Head Office of PT PELNI and Kemayoran and also 9 (nine) Branch Offices.
- Updating ISM-Code system through revision and procurement of Vocational Manual for Ships, Branches and Head Office.
- purchasing SMK3 (infrared) equipment and K3 safety sign.
- In 2017, two transport safety discussion forums have been conducted by KNKT represented by each representative of transportation type at Auditorium of PT PELNI Head Office.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

» **Tingkat Kecelakaan Kapal Tahun 2017**

Untuk periode tahun 2017, Perseroan membuat 3 (tiga) kategori laporan keadaan darurat, yaitu laporan berita acara keadaan darurat yang dikirimkan ke unit DPA dan laporan keadaan darurat yang dirapatkan dalam MRT *(Management Response Team).*

Tidak semua laporan keadaan darurat yang dikirimkan ke DPA kemudian dirapatkan ke dalam rapat MRT, hal ini dikarenakan hanya kasus-kasus yang membutuhkan tindakan penanggulangan lebih lanjut dengan koordinasi dari tim dan unit kerja terkait dan menyebabkan kerugian pihak lain dan korban jiwa/pencemaran lingkungan maritim serta viral di media baik media sosial maupun media elektronik.

Ditahun 2017 terdapat beberapa kejadian keadaan darurat maupun *near misses* yang dikirimkan ke Unit Kerja DPA-QHSSE *Code* diantaranya kejadian tubrukan (benturan, sentuhan, dan menabrak dua kapal atau lebih satu sama lain, ata menabrak benda lain yang bukan kapal baik benda bergerak atau tetap seperti rambu-rambu laut, lentera kapal dan dermaga yang menyebabkan potensi kerusakan pada kapal, korban manusia, tumpahan minyak ke laut/ pencemaran); kejadian kebakaran;kerusakan teknis; kejadian kandas; kejadian lain-lain yang meliputi jangkar jatuh kelaut, baling-baling terbelit tali *spring.*

Secara keseluruhan, jumlah keadaan darurat yang terjadi pada tahun 2017 turun sebesar 21% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.Laporan mengenai keadaan darurat yang terjadi pada kapal-kapal PELNI Tahun 2017, sebagai berikut:

» **Ship Accident Rate 2017**

For the period of 2017, the Company prepared 3 (three) emergency reports categories, i.e emergency reports which sent to the DPA unit and discussed in the MRT (Management Response Team).

Not all emergency reports submitted to DPA were then incorporated into MRT meetings, this was because only cases requiring further countermeasures with coordination of relevant teams and work units and causes loss of others and the loss of life / pollution of the maritime environment and viral in the media, both in social media and electronic media.

In 2017, there were several incidents of emergency and near misses which sent to the DPA-QHSSE Code Working Unit, such as a collision occurrence (collision, touch, and crashing two or more ships at each other, ata crash into other objects that are not vessels either moving or fixed objects such as marine signs, ship lanterns and docks causing potential damage to ships, human casualties, oil spills to sea / pollution); fire incident, technical damage; incident aground; other events that include lose anchor in the sea, the twisted rotor blades.

Overall, the number of emergencies that occurred in 2017 decreased by 21% when compared to the previous year. The emergency report that occurred on PELNI ships for the year of 2017, are as follows:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG KETENAGAKERJAAN, KESEHATAN, DAN KESELAMATAN KERJA

Social Responsibility in Occupational Health and Safety (HSE) Aspects

Kategori Keadaan Darurat Emergency Case Category	Tahun Year		
	2017	2016	2015
Tubrukkan Crash	**11**	9	3
Kebakaran Fire	**2**	1	1
Teknikal Error Error Technical	**13**	11	10
Orang jatuh ke laut People fell into the sea	**0**	3	6
Faktor alam Natural Disaster	**0**	0	-
Kandas Ship Failure	**3**	14	4
Lain-lain Others	**3**	4	8
Jumlah Kejadian Total Case	**33**	**42**	**32**
Jumlah Kapal Total Ships	**85**	**75**	**29**
Persentase Kejadian Dibandingkan Dengan Jumlah Kapal Case Percentage Compared with Total Ships	**39%**	**56%**	**90%**

Setiap tahunnya persentase jumlah kejadian dibandingkan jumlah kapal selalu menurun meskipun jumlah kapal selalu bertambah. Hal ini menjadi sebuah indikator positif bagi Perusahaan dalam penanganan pencegahan kejadian darurat. Pada tahun yang akan datang Perusahaan berkomitmen untuk terus menekan angka kejadian darurat yang terjadi pada kapal.

Sebagai langkah antisipasi dan penanganan terhadap keadaan kasus darurat tersebut, Perseroan akan melakukan pengembangan *control system database*, dalam rangka untuk memudahkan dalam memonitor masa berlaku sertifikat COP dan COC serat membuat program *control document* terkait kelancaran operasional penerbitan DOC, SMC, dan ISSC. Perseroan juga akan melaksanakan *safety drill* rutin tahunan yang melibatkan pihak kapal, kantor darat, dan instansi terkait di luar perusahaan yang terkoordinir dengan baik sehingga tercipta kesiapan dan kerja sama yang baik antar semua pihak dalam menangani kondisi darurat keselamatan.

The percentage of incidents compared the number of ships always has decreased each year. Eventhough, the number of ships is always increasing. This is a positive indicator for the Company in handling emergency prevention. In the Future, the Company is committed to continue for pressuring the number of incidents which occurred on board.

As anticipatory steps and mitigations on those emergency cases, the Company will develop control system database, in order to ease monitoring validity of COP and COC certificates as well as developing control document program related with operational fluency of DOC, SMS and ISSC issuance. The Company will alsoperform regular safety drill involving the ship crews, onshore office and other related institutions as external of the Company that are well-coordinated to establish readiness and harmonious cooperation among all parties in handling safety emergency condition

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Social Responsibility in Community and Society Development Sector

PT PELNI (Persero) hadir tak sekadar mencari keuntungan semata. Sejak awal beroperasi, Perseroan berkomitmen agar kehadirannya dapat memberikan manfaat kepada masyarakat di sekitarnya. Harapannya dari tahun ke tahun, Perseroan dapat terus berupaya untuk meningkatkan hubungan yang harmonis dengan masyarakat.

KEBIJAKAN

Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) mengacu pada Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-09/MBU/07/2016 tanggal 03 Juli 2016 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara dan mengalami perubahan terakhir sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-02/MBU/07/2017 tanggal 05 Juli 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri BUMN No.PER-09/MBU/07/2015 tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Program PKBL ini bertujuan untuk membantu pemerintah dalam melaksanakan pembangunan yang lebih merata serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Di dalam setiap kegiatannya, PT PELNI (Persero) selalu berusaha untuk melibatkan para pemangku kepentingan terutama masyarakat yang berada di sekitar wilayah usaha PT PELNI (Persero).

TARGET DAN RENCANA KEGIATAN

Tanggung Jawab Sosial Perusahaan dalam bidang sosial dan kemasyarakatan PT PELNI (Persero) diterapkan melalui program PKBL. Setiap tahunnya PT PELNI (Persero) telah mencanangkan target dan rencana kerja program PKBL. Rencana kerja tersebut dibagai dalam dua bagian yaitu Program Kemitraan (PK) dan Bina Lingkungan (BL). Target dan rencana kerja tersebut dapat dilihat pada rincian sebagai berikut:

Rencana Kerja Kemitraan

a. Rencana Kerja Program Kemitraan

1. Penyaluran dana PKBL diprioritaskan ke daerah potensial dan sesuai dengan tingkat pengembalian dana tersebut.
2. Melakukan seleksi yang optimal terhadap calon mitra binaan yang layak mendapat pinjaman.
3. Mengelola, mengevaluasi dan monitoring laporan dan pengembalian kredit Dana Kemitraan untuk peningkatan kolektibilitas pinjaman.
4. Dalam menyalurkan bantuan dititik beratkan kepada Mitra Binaan yang merupakan mitra kerja PT PELNI (Persero) yang termasuk dalam usaha golongan ekonomi lemah dan koperasi.

PT PELNI (Persero) is not merely to collect profit. Since the beginning of its operation, the Company has been committed to make its presence can provide benefts to surrounding communities. The hope from year to year, the Company continues to strive to improve the harmonious relationship with the community.

POLICY

Partnership and Community Development Program (PKBL) refers to the Minister of State Owned Enterprises regulation. PER-09/MBU/07/2016 dated July 3, 2016 regarding to Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises and the latest amendment in accordance with the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprise. PER-02/MBU/07/2017 dated July 5, 2017 regarding to the Second Amendment on the Regulation of the Minister of SOE No. PER-09/MBU/07/2015 on Partnership Program and Community Development Program of State-Owned Enterprises. PKBL program aims to assist the government in carrying out more equitable development and improve the community walfare. In each of its activities, PT PELNI (Persero) is always trying to involve the stakeholders, especially the people around the business areas of PT PELNI (Persero).

TARGET AND ACTIVITY PLAN

Corporate Social Responsibility in social and community sector of PT PELNI (Persero) is implemented through PKBL program. Every year, PT PELNI (Persero) has launched the target and work plan of PKBL program. The work plan is divided into two parts: Partnership Program (PK) and Community Development (BL). The targets and work plan can be seen in the following details:

Partnership Workplan

a. Partnership Program Workplan

1. PKBL funds Distribution is prioritized to potential areas and in accordance with the refund rate.
2. Optimal selection of prospective partners who are eligible to receive loans.
3. Managing, evaluating and monitoring reports and credit repayment of Partnership Funds for increasing loan collectibility.
4. In distributing the funds that emphasized to partners who are the partners of PT PELNI (Persero) which included in the business of weak economic class and cooperatives.

5. Penyaluran dana kemitraan lebih dititikberatkan pada sektor perikanan dengan pembentukan cluster-cluster dan akan bekerja sama dengan lembaga atau Kementerian dalam rangka pembinaan mitra binaan PKBL PT PELNI (Persero).
6. Mengadakan penyempurnaan sistim monitoring dan penagihan serta pengendalian hasil bantuan dana PT PELNI (Persero) yang telah diberikan kepada pengusaha kecil dan koperasi agar mendapat hasil produksi yang optimal dengan mengintensifkan koordinasi dengan pelaksana pembinaan di Pusat dan daerah – daerah.
7. Mengadakan kerja sama dengan Instansi terkait maupun lembaga-lembaga pendidikan sebagai pembinaan untuk meningkatkan kemampuan SDM Mitra Binaan.
8. Mengikuti pelatihan atau *workshop* untuk meningkatkan kapasitas dan kemampuan staf PKBL.
9. Menginventarisir jaminan mitra binaan yang ada di kantor pusat maupun cabang-cabang atas mitra binaan yang mempunyai piutang macet serta melakukan tindakan atas jaminan mita binaan tersebut.

b. Rencana Anggaran

Dana yang akan dialokasikan untuk program kemitraan PT PELNI (Persero) tahun berasal dari saldo akhir 2016 ditambah pengembalian pinjaman dari mitra binaan, jasa administrasi dan pendapatan jasa giro serta penerimaan dana dari BUMN pembina. Pada tahun 2017 PT PELNI (Persero) selaku BUMN Pembina akan memberikan alokasi dana sebesar Rp1.000.000.000,- untuk Program Kemitraan.

Rencana Kerja Kegiatan Pembinaan Mitra Binaan

a. Rencana Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan dilakukan dalam bentuk pemberian pinjaman modal kerja usaha, mengadakan pelatihan ketrampilan/pendidikan dan membantu pemasaran hasil produksi.Pembinaan dititik beratkan kepada mitra binaan yang merupakan mitra kerja PT PELNI (Persero) yang termasuk dalam usaha golongan ekonomi lemah. Dengan pelaksanaan Program Kemitraan dan Bina Lingkungan (PKBL) diharapkan dapat membantu masyarakat terutama yang berada disekitar lingkungan PT PELNI (Persero) Pusat dan Cabang-Cabang PT PELNI (Persero) sebagai wujud kepedulian Perusahaan terhadap masyarakat sekitar dengan tujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan taraf hidup masyarakat.

5. Partnership funds Distribution is more focused on the fisheries sector with the formation of clusters and will cooperate with the institution or the Ministry in the framework of PKBL partners guided of PT PELNI (Persero)
6. Improving the monitoring and collection system and controlling the result of PT PELNI (Persero) fund grant which has been given to the small entrepreneurs and cooperatives in order to get optimal production result by intensifying coordination with the guided implementation in the Central and the regions.
7. Conducting cooperation with related institutions and educational institutions as a guided for improving Human Resources ability of Partnership Partners.
8. Attending the training or workshops to improve the capacity and capabilities of PKBL staff.
9. inventorying the guarantee of existing partners in the head office and branches of partners that have bad debts and take action for the guarantee of the clients.

b. Budget Plan

The funds will be allocated for PT PELNI (Persero) partnership program 2017 come from the end of 2016 balance plus loan repayments from the guided partners, administration services and giro service income as well as receipt of funds from the State-Owned Enterprises builder. In 2017, PT PELNI (Persero) as State-owned enterprises builder was be able to provide allocation of Rp1,000,000,000 for Partnership Program.

Partners Development Activities Workplan

a. Development Plan

The development program implementation is done in the form of business working capital loan, providing skills /education training and assisting the products marketing. Guided is emphasized to the partners of PT PELNI (Persero) who are included in the business class of weak economy. By the Partnership and Community Development Program (PKBL) implementation is expected to help the community, especially around the environment of PT PELNI (Persero) Center and Branches as a form of The Comapany awareness to the surrounding community with the aim for increasing economic growth and improving the level community life.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
Social Responsibility in Community and Society Development Sector

b. Rencana Anggaran

Rencana anggaran kegiatan Pembinaan Mitra Binaan untuk tahun 2017 telah dianggarkan sebesar Rp100 juta melalui berbagai kegiatan yang telah direncanakan sesuai program kerja PKBL.

Rencana Kerja Bina Lingkungan

a. Bantuan Bina Lingkungan

Sesuai Surat Peraturan Menteri Negara BUMN No. : PER–09/MBU/07/2015 tanggal 03 Juli 2015 Dana Bina Lingkungan dipergunakan untuk bantuan kemanusiaan dalam bentuk sebagai berikut:

- Bantuan bencana alam.
- Bantuan pendidikan.
- Peningkatan kesehatan masyarakat.
- Pengembangan prasarana dan sarana umum.
- Bantuan Sarana ibadah.
- Pelestarian alam.
- Bantuan sosial kemasyarakatan dalam rangka pengentasan kemiskinan.

Penyaluran dana Bina Lingkungan tahun 2017 lebih dititikberatkan pada sektor pendidikan dan kegiatan lainnya dalam rangka melaksanakan program BUMN Hadir untuk Negeri yang dikoordinir oleh Kementerian BUMN.

b. Rencana Anggaran

Dana bantuan untuk program Bina Lingkungan tahun 2017 berasal dari saldo akhir tahun 2016 ditambah jasa giro dan penerimaan dana dari BUMN Pembina.

REALISASI KEGIATAN DAN BIAYA

Secara keseluruhan PT PELNI (Persero) telah berhasil menyalurkan dana PKBL sebesar Rp3,9 miliar pada tahun 2017. Penyaluran dana tersebut dibagi atas Program Kemitraan, Pembinaan dan Bina Lingkungan. Rincian penyaluran dana PKBL pada tahun 2017 adalah sebagai berikut:

b. Budget Plan

The budget plan for the Partner development Program for 2017 has been budgeted by Rp100 million through some various activities that have been planned according to the work program of PKBL.

Community Development Workplan

a. Community Development Assistance

According to the Minister of State Owned Enterprise regulation letter : PER-09/MBU/07/2015 dated July 3, 2015 Community Development Funds are used for humanitarian assistance with the following forms:

- Natural disaster funds.
- Educational funds.
- Improving public health.
- Public infrastructure and facilities development.
- Worship facilities funds.
- Nature conservation.
- Social funds in the context of poverty alleviation.

The Community Development funds distribution in 2017 were more focused on the education sector and other activities in order to implement BUMN Hadir Untuk Negeri program which is coordinated by the Ministry of State-Owned Enterprises.

b. Budget Plan

The funds for the Community Development 2017 program were derived from the end of 2016 balance plus the demand deposit and receipt of funds from the State-Owned Enterprises builder.

COST AND ACTIVITIES REALIZATION

Overall, PT PELNI (Persero) has successfully channeled PKBL funds amounting to Rp3, 9 billion in 2017. Funds distribution was divided into Partnership and Community Development. Details of PKBL funds disbursement in 2017 are as follows:

Uraian Description	Biaya Cost
Program Kemitraan Partnership Program	Rp3.070 juta | Million
Pembinaan Mentoring	Rp99,68 juta | Million
Bina Lingkungan Community Development	Rp814 juta | Million

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
Social Responsibility in Community and Society Development Sector

Program Kemitraan

Pada tahun 2017 untuk penyalurannya terdapat penambahan mitra binaan sebanyak 85 unit usaha kecil, dengan total dana pinjaman mitra binaan yang telah disalurkan sebesar Rp. 3.070.000.000,-. Dengan demikian rincian jumlah mitra binaan PT PELNI (Persero) sampai dengan 31 Desember 2017 adalah sebagai berikut:

Partnership Program

In 2017 for the distribution, there were additional partners of 85 small businesses units, with a total loan of partners who had been channeled Rp. 3.070.000.000, -. The detail numbers of partners which assisted by PT PELNI (Persero) until December 31, 2017 are as follows:

Mitra Binaan Partner	Jumlah Penyaluran Total Distribution	Jumlah Mitra Binaan Total Partners
Usaha Kecil Small Business	Rp35.383.878.814	1.131
Koperasi Cooperative	Rp3.518.412.007	198
Jumlah Total	**Rp38.902.290.821**	**1.329**

Realisasi sumber dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan tahun 2017 berasal dari pengembalian pinjaman mitra binaan yaitu hutang pokok ditambah dengan bunga sedangkan sumber dana lainnya adalah dari jasa giro, pendapatan lain-lain dan tambahan alokasi dana dari BUMN Pembina.

Dana yang terhimpun untuk program kemitraan tahun 2017 adalah sebesar Rp3.283.803.979 atau 126% dari anggaran sebesar Rp2.600.000.000. Dana tersebut berasal dari pengembalian pokok pinjaman ditambah jasa administrasi pinjaman, jasa giro, tambahan alokasi dana dari BUMN Pembina (biaya) dan pendapatan lain-lain.

Penyaluran pinjaman kepada mitra binaan dalam bentuk pinjaman modal usaha sampai dengan akhir Desember tahun 2017 adalah sebesar Rp3.070.000.000 atau 123% dari anggaran 2017, sedangkan pembinaan mitra binaan di tahun 2017 sebesar Rp99.680.000.

Nilai realisasi penyaluran pinjaman dan pembinaan mitra pada tahun ini pada kenyataannya naik sebesar 34,85% jika dibandingkan dengan tahun 2016 yang mana sebesar Rp2.065.000.000.

Rincian rencana dan realisasi anggaran dan kegiatan program kemitraan PT PELNI (Persero) dapat dilihat pada table berikut ini:

The realization of the Partnership and Community Development program fund sources in 2017 were derived from the repayment of the loan form the assisted partners, namely principal plus interest, while other fund sources are from demand deposit services, other income and additional fund allocation from State-Owned Enterprises builder.

The Collected funds for the 2017 partnership program amounted to Rp3,283,803,979 or 126% from the budget of Rp2,600,000,000. The funds were derived from loan principal repayments plus loan administration services, demand deposit services, additional allocation of funds from State-Owned Enterprises builder (cost) and other income.

Loans disbursement to the partners in the form of business capital loans until the end of December 2017 amounted to Rp3,070,000,000 or 123% of the 2017 budget, while mentoring partners in 2017 amounted to Rp99,680,000.

The value realization of loan disbursement and mentoring partner this year in fact increased by 34.85% when compared to the year 2016 which amounted to Rp2,065,000,000.

The details of the budget and activities plan and the realization of PT PELNI (Persero) partnership program can be seen in the following table:

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Social Responsibility in Community and Society Development Sector

Sektor Sector	Rencana Plan		Realisasi Realization	
	Unit Unit	Jumlah Unit	Unit Unit	Jumlah Unit
Industri Industry	11	Rp440.000.000	8	Rp275.000.000
Perdagangan Trading	11	Rp330.000.000	7	Rp305.000.000
Peternakan Farming	1	Rp30.000.000	2	Rp100.000.000
Perikanan Fishery	19	Rp950.000.000	67	Rp2.370.000.000
Jasa Services	25	Rp750.000.000	1	Rp20.000.000
Hibah (Pembinaan) Grants (Mentoring)	5	Rp100.000.000	4	Rp99.680.000
Jumlah Total	**72**	**Rp2.600.000.000**	**89**	**Rp3.169.680.000**

Penandatanganan Kontrak Bantuan Pinjaman Program Kemitraan dengan Petambak Asal Pemalang dan Demak
Loan Aid Contract Program Signing with Pemalang and Demak Farmers

Program Pembinaan

Pelaksanaan program pembinaan yang telah dilakukan selama tahun 2017 sebanyak 4 mitra dengan biaya sebesar Rp. 99.680.000. Adapun kegiatan pembinaan di tahun 2017 meliputi:

1. Kegiatan Pameran KOWANI Fair 2017 pada tanggal 1-4 Juni 2017 di SME Tower Smesco dengan biaya sebesar Rp. 25.000.000,- (Diikuti oleh 2 mitra binaan).
2. Kegiatan Pameran Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 pada tanggal 11-15 Oktober 2017 di ICE BSD City dengan biaya sebesar Rp. 74.680.000,- (Diikuti oleh 2 mitra binaan).

Development Program

The implementation of mentoring program that has been conducted during 2017 as many as 4 partners at a cost of Rp. 99,680,000. The mentoring activities in 2017 include:

1. KOWANI Fair 2017 Exhibition on June 1-4 , 2017 at SME Tower Smesco at a cost of Rp. 25.000.000, - (Attended by 2 partners).
2. Expo Trade Expo Indonesia (TEI) 2017 activities on October 11-15, 2017 at ICE BSD City for a fee of Rp. 74,680,000, - (Followed by 2 partners).

Pameran TEI dan Kowani Fair
TEI and Kowani Fair Exibhition

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
Social Responsibility in Community and Society Development Sector

Program Bina Lingkungan

Dalam realisasi program Bina Lingkungan tahun 2017, PT PELNI (Persero) telah berhasil merealisasikan penyaluran dana sebesar Rp814.347.092 dari rencana anggaran sebesar Rp1.015.000.000 dalam bentuk pemberian sumbangan/bantuan korban bencana alam, pendidikan, peningkatan kesehatan, sarana ibadah, pelestarian alam dan sosial kemasyarakatan. Nilai realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan tersebut naik 64,98%dari tahun sebelumnya yang mana sebesar Rp285.000.000. Berikut adalah rincian realisasi penyaluran dana Bina Lingkungan pada tahun 2017:

Community Development Program

In the realization of the Community Development program in 2017, PT PELNI (Persero) had successfully realized the amount of Rp814,347,092 from the budget plan amounting to Rp1,015,000,000 in the form of donation / assistance for victims of natural disasters, education, health promotion, religious facilities, nature and social community. The value realization of the Community Development funds distribution increased by 64.98% from the previous year which amounted to Rp285,000,000. Below are the details of the realization of the Community Development funding in 2017:

Jenis Bantuan Kind of Assistance	Rencana Plans	Realisasi Realization
Bantuan korban bencana alam. Assistance for natural disaster victims.	Rp50.000.000	**Rp50.000.000**
Bantuan pendidikan dan/atau pelatihan. Educational and/or training assistance.	Rp365.000.000	**Rp154.982.311**
Bantuan peningkatan kesehatan. Health Improvement Assistance.	Rp195.000.000	**Rp82.757.151**
Bantuan pengembangan prasarana dan /atau sarana umum. Development of public infrastructure and/or facilities.	Rp25.000.000	**-**
Bantuan sarana ibadah. Worship facilities.	Rp20.000.000	**Rp10.500.000**
Bantuan pelestarian alam. Nature conservation.	-	**Rp227.912.500**
Bantuan Sosial Kemasyarakatan dalam rangka Pengentasan Kemiskinan. Social Assistance for Poverty Reduction.	Rp360.000.000	**Rp288.195.130**
Bantuan Pendidikan, pelatihan, pemagangan, pemasaran, promosi, dan bentuk bantuan lain yang terkait dengan upaya peningkatan kapasistas Mitra Binaan Program Kemitraan. Educational, training, apprenticeship, marketing, promotion, and other forms of assistance related to capacity building in an effort of Partnership Program.	-	**-**
Jumlah Total	**Rp1.015.000.000**	**Rp814.347.092**

Revitalisasi Terumbu Karang di Pulau Sepa
Coral Reef Revitalization on Sepa Island

TANGGUNG JAWAB SOSIAL KEPADA PELANGGAN

Social Responsibility to Customers

Pelanggan Perusahaan merupakan pihak eksternal Perusahaan yang sangat berpengaruh bagi keberlanjutan usaha PT PELNI (Persero) ke depan. Pelanggan merupakan pihak yang menjadi perhatian PT PELNI (Persero) untuk senantiasa ditunjang dengan fasilitas yang memadai dan memuaskan, hingga diharapkan terciptanya *customer engagement* dan saling menguntungkan.

KEBIJAKAN

Kebjakan tanggung jawab sosial terhadap pelanggan terdapat dalam Proses penyampaian dan tindak lanjut keluhan pelanggan merujuk pada Surat Keputusan Direksi No. 04.28/03/SK/HKO.01/2016 tentang Penetapan Standar Operasional Prosedur (SOP) *Contact Center* Info PELNI yang mengatur standar pelayanan pelanggan melalui "Info PELNI 162."

RENCANA KEGIATAN

PT PELNI (Persero) telah menyusun rencana kerja untuk aktivitas Tanggung Jawab Sosial Kepada Konsumen yang berorientasi pada peningkatan pelayanan kepada konsumen serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja tahun 2017 melalui koordinasi lintas direktorat, *Monday Biefing,* Rapat Pimpinan, dan Rapat Terbatas Direktorat/ Divisi.

Sasaran atau target rencana kegiatan/program kerja pada tahun 2017, antara lain:

1. Terpenuhinya Standar Pelayanan Penumpang Angkutan Laut dalam aspek kenyamanan mencakup mutu dan citarasa makanan, kebersihan, *hospitality,* dan hiburan di atas kapal.
2. Tertib administrasi.
3. Efisiensi dalam penggunan peralatan dapur.
4. Peningkatan *control* terhadap pelaksanaan kegiatan layanan penumpang dan awak kapal.
5. Tersedianya informasi produk perusahaan (Jadwal, Tarif, Reservasi, *customer care* dan informasi lainnya).

Untuk mencapai target program kerja tersebut, Perseroan telah mengimplementasikan kebijakan pelayanan jasa tahun 2017, yaitu:

1. Perubahan sistem pengelolaan permakanan dari pemberian modal kerja ke kapal menjadi *supply* bahan makanan untuk meningkatkan akuntabilitas administrasi.
2. Peningkatan layanan makanan siap saji (*frozen food* uji coba di KM. Kelud dan KM. Sinabung).

The Company's customers are external parties which very influential for the sustainability of PT PELNI (Persero) business in the future. Customer is a party to the attention of PT PELNI (Persero) to always supported with adequate facilities and satisfactory, until the expected creation of customer engagement and mutual benefit.

POLICY

The policy of social responsibility to customers is in the customer complaint report submission and follow-up refers to Board of Directors Decree Number 04.28/03/SK/ HKO.01/2016 regarding to Stipulation of Info PELNI Contact Center Standard Operating Procedure (SOP) that regulates customer service standard via "Info PELNI 162.

ACTIVITY PLAN

PT PELNI (Persero) has prepared working plan for Social Responsibility to Customers activity which is oriented on improving the service to consumers and evaluated on 2017 working program implementation through cross directorate coordination, Monday Briefing, Executive Meeting and Directorate/Division Limited Meeting.

Objectives or target of activity/working program plan in 2016 were as follows:

1. Fulfillment of Marine Transportation Passenger Service Standard in convenience aspect including quality and the foods taste, cleanliness, hospitality and on board entertainment.
2. Administration order.
3. Efficiency of cooking utensils usage.
4. Improving control on passenger and crew service activities implementation.
5. Product information availability (schedule, tariff,reservation, customer care and other information).

To achieve target of those working programs, the Company had implemented service policy in 2017, as follows:

1. Change in meal management system starting from workingcapital provision to cooking material supply to improveadministration accountability.

2. Increase number of fast food service (frozen food trial at KM Kelud and KM Sinabung).

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN

Social Responsibility in Community and Society Development Sector

3. Peningkatan mutu masakan melalui pelatihan juru masak diatas kapal dan modernisasi alat masak *(combi oven).*
4. Penetapan standar pelayanan penumpang di atas kapal.
5. Peningkatan *customer retention* melalui SMS *Masking* PELNI 162.
6. Peningkatan layanan informasi dan penjualan tiket dengan rekrutmen Petugas loket / PELNI *Point* Cabang
7. Peningkatan kompetensi petugas *contact center* melalui *training service excellent.*

REALISASI KEGIATAN

Kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan selama tahun 2017 dilaksanakan di bawah koordinasi Divisi Pelayanan Jasa meliputi 4 (empat) bidang, yaitu:

1. **Bidang *Service Quality Assurance***
   a. Penyusunan SOP Pelayanan Penumpang dan Awak Kapal di atas kapal.
   b. Pengadaan Inventaris Pelayanan Jasa.
   c. *Check on the spot* ke atas kapal.
   d. Pengadaan Sarana Informasi (*Sticker* & Akrilik).
2. **Bidang *Food & Baverages***
   a. Investasi *Combi Oven* (KM. Kelud & KM. Sinabung).
   b. Penerapan Layanan Makan Sistem Raming.
3. **Bidang *Hospitality***
   a. Pengadaan *Cover* + Kasur kelas ekonomi (dilakukan secara bertahap).
   b. Pengadaan *Cover* + Kasur eks. Kelas *(single class).*
   c. Pengadaan Fasilitas TV Media.
4. **Bidang Layanan Pelanggan**
   a. Pengadaan Aplikasi SMS *Blast.*
   b. *Rewarding Quiz Social Media.*
   c. Pelatihan Bid. *Customer Care.*

Selain melalui divisi-divisi tersebut, guna mendukung pelayanan kepada pelanggan, PT PELNI (Persero) juga menyediakan layanan *contact center* sebagai berikut:

1. *Voice Call* : 021-162 atau 162
2. Facebook : PELNI *Point* (*Fan Page* : Pelayaran Nasional Indonesia)
3. Twitter : @pelni162
4. Instagram : pelniline
5. Sms *Masking* : PELNI162
6. Email : infopelni162@pelni.co.id

3. Improve quality of the cooking through onboard cheftraining and cooking utensils modernization (combi oven).
4. Stipulation of onboard passenger service standard.
5. Intensify customer retention via SMS Masking PELNI 162.
6. Add ticket information and sales service through Locket/ PELNI Point Branch Officer recruitment.
7. Develop competency of contact center officer through service excellent training.

ACTIVITY REALIZATION

Social responsibility activities to the customers in 2016 were performed under Service Division coordination covering 4 (four) area, as follows:

1. **Quality Assurance Service**
   a. Formulation of Onboard Passenger and Crew Service SOP.
   b. Service Inventory Procurement.
   c. On the spot check on the ship.
   d. Information channel procurement (sticker & acrylic).
2. **Food & Beverages**
   a. Combi Oven Investment (KM Kelud & KM Sinabung).
   b. Implementation of Raming Meal System Service.
3. **Hospitality**
   a. Cover + Bed Procurement for economy class (in stages).
   b. Cover + Bed Procurement for eks. class (single class).
   c. TV Media Facility Procurement.
4. **Customer Service**
   a. SMS Blast Application Procurement.
   b. Social Media Quiz Rewarding.
   c. Customer Care Training.

Other than through these divisions, to support service to the customers, PT PELNI (Persero) also provides Contact Center services, as follows:

1. Voice Call : 021-162 atau 162.
2. Facebook: PELNI Point (Fan Page: Pelayaran Nasional Indonesia).
3. Twitter : @pelni162.
4. Instagram : pelniine.
5. Sms Masking : PELNI162.
6. Email : infoPELNI162@pelni.co.id.

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
Social Responsibility in Community and Society Development Sector

Jumlah Keluhan Melalui *Call Center* Tahun 2017

Untuk mendukung pelayanan terhadap pelanggan, pada tahun 2017, PT PELNI (Persero) didukung oleh 63 petugas loket yang bertugas untuk menjual dan mencetak tiket, menerima dan memproses masukan, saran maupun keluhan pelanggan yang disampaikan melalui loket pelayanan PT PELNI (Persero). Per 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) mencatat 21 keluhan pelangan yang disampaikan melalui *call center* 162 dan email infopelni162@pelni.co.id, dengan rincian jenis keluhan pelanggan sebagai berikut:

Total Complaint Received By Call Center in 2017

In order to support service to the customers, in 2017, PT PELNI (Persero) was supported by 63 locket staffs who were in charge to sell and print tickets, received and processed every inquiry, suggestion and complaint from the customers submitted to PT PELNI (Persero) service locket. As of December 31, 2017, PT PELNI (Persero) recorded 21 customer complaints that submitted via call center 162 and email infopelni162@pelni.co.id, with types of customer complaints, as follows:

Jenis Komplain Type of Complaint	Jumlah Total
Sewa Kabin/kasur Cabin/Bed Rental	1
Pencurian Robbery	1
Fasilitas di kapal Ship Facilities	2
Toilet Toilet	
Seat tidak sesuai tiket Seat Complaint	4
Penjualan tiket Ticket Sales	1
Harga tiket tdk sesuai Unmatch Price	6
Fasilitas film Film Facility	-
Sampah Garbage	-
Delay Delay	-
Merokok Smoking	-
Tarif muatan Cargo Tariff	2
Tiket online Online Ticket	2
Barang tertinggal Lost Item	1
Pedagang Merchants	-
Travel Agen Travel Agent	-
Calo Brokers	-
Keramahan petugas loket Locket Staff Hospitality	1
Penipuan di kapal Onboard Fraudulence	-
Jumlah Total	**21**

TANGGUNG JAWAB SOSIAL BIDANG PENGEMBANGAN SOSIAL DAN KEMASYARAKATAN
Social Responsibility in Community and Society Development Sector

Seluruh keluhan pelanggan telah ditindaklanjuti melalu koordinasi dengan unit kerja terkait sesuai dengan masalah yang dikeluhkan, melalui mekanisme sebagai berikut:

All of the customer complaint have been followed-up through coordination with related working unit based on the complained issues in the following mechanism:

Call Flow General Complaint
Call Flow General Complaint

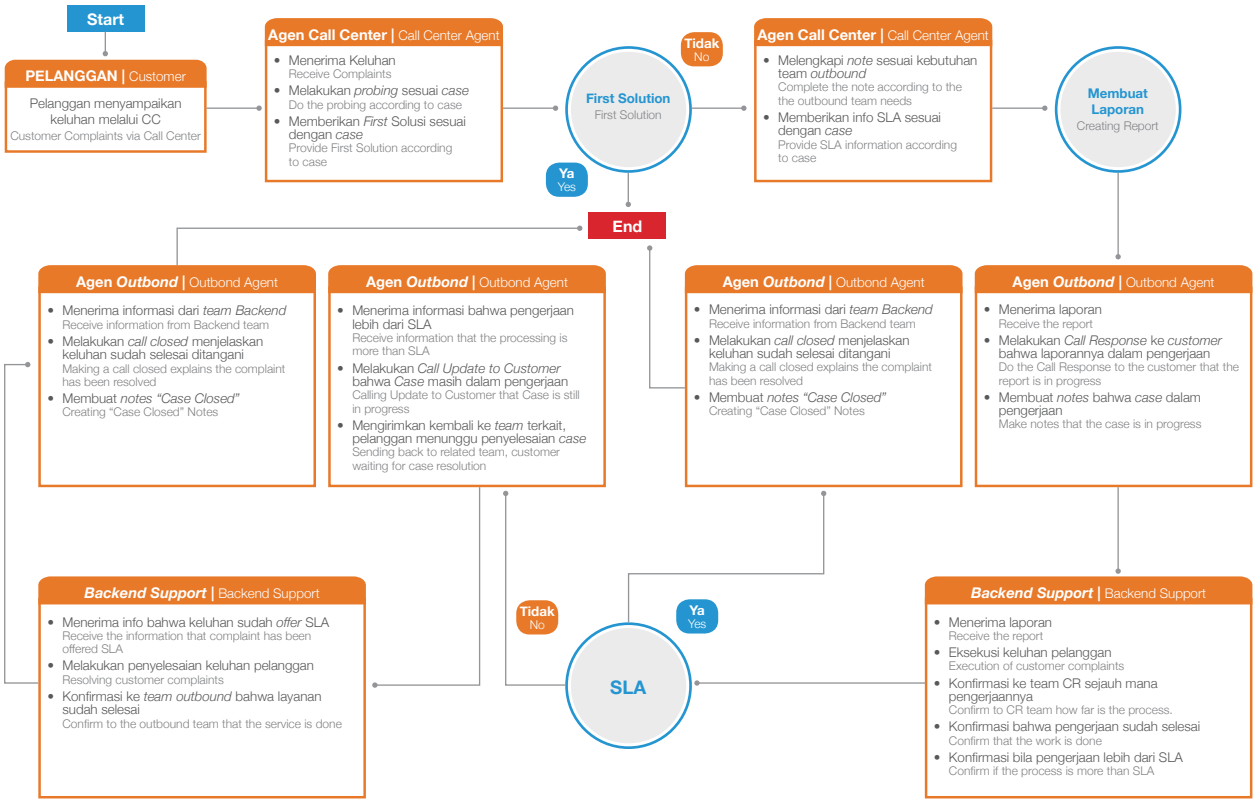

REALISASI ANGGARAN

Per 31 Desember 2017, PT PELNI (Persero) telah merealisasikan anggaran sebesar Rp5,168,789,475 untuk pelaksanaan kegiatan tanggung jawab sosial kepada pelanggan melalui pelayanan *contact center* 162.

BUDGET REALIZATION

As of December 31, 2017, PT PELNI (Persero) had allocated budget of Rp5,168,789,475 for social responsibility activities implementation to the customers through contact center 162 service.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT PELNI (PERSERO)

Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2017 of PT PELNI (Persero)

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT PELNI (PERSERO)

Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2017 of PT PELNI (Persero)

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT PELNI (Persero) tahun buku 2017 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan. Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 28 Mei 2018

DEWAN KOMISARIS
The Board of Commissioners

H. Leon Muhamad
Komisaris Utama
President Commissioner

Satya Bhakti Parikesit
Komisaris
Commissioner

Raldi Hendro Koestoer
Komisaris
Commissioner

Johanes Widodo Hario Mumpuni
Komisaris Independen
Independent Commissioner

Sudarto
Komisaris Independen
Independent Commissioner

SURAT PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2017 PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)

Statement of Board of Commissioner and Board of Director Members on Accountability for the Annual Reports 2017 of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

We, the undersigned, testify that all information in PT PELNI (Persero) Annual Report fiscal year 2017 is presented in its entirely and we are fully responsible for contents accuracy in the Annual Report and Consolidated Financial Statements of the Company. This statement is hereby made in all truthfulness.

Jakarta, May 28, 2018

DIREKSI
The Board of Directors

Insan Purwarisya L. Tobing
Direktur Utama
President Commissioner

Muhamad Tukul Harsono
Direktur Armada
Director of Fleet

Harry Boediarto Soewarto
Direktur Usaha Angkutan Barang & Tol Laut
Director of Freight & Tol Laut

Olih Masolich Sodikin
Direktur Usaha Angkutan Penumpang
Director of Passenger Business Transportation

Tri Andayani
Direktur Keuangan
Director of Finance

Ganefi
Direktur SDM & Umum
Director of Human Capital & General Affairs

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016:
Annual Report of Public Company

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
I. Ketentuan Umum		**I. General Provision**
1. Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik merupakan sumber informasi penting bagi investor atau pemegang saham sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam pengambilan keputusan investasi dan sarana pengawasan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik.	√	1. Annual Report of a listed company is one of the most important sources as the base for investors or shareholders in making an investment decision, and is a means of monitoring issuers or public company.
2. Seiring dengan perkembangan Pasar Modal dan meningkatnya kebutuhan investor atau pemegang saham atas keterbukaan informasi, Direksi dan Dewan Komisaris dituntut untuk meningkatkan kualitas keterbukaan informasi melalui Laporan Tahunan Emiten atau Perusahaan Publik.	√	2. Along with the development of Capital Market and the growing needs of investors or shareholders regarding information disclosure, the Board of Directors and the Board of Commissioners are required to improve the quality of information disclosure through an annual report.
3. Laporan Tahunan yang disusun secara teratur dan informatif dapat memberikan kemudahan bagi investor atau pemegang saham dalam memperoleh informasi yang dibutuhkan.	√	3. Annual Report should be prepared in an orderly manner and should be informative to provide conveniences for the investors or shareholders in getting the information they need.
4. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini merupakan pedoman bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang wajib diterapkan dalam menyusun Laporan Tahunan.	√	4. This Circular Letter of the Financial Service Agency serves guidelines for Issuers or Public Companies that should be applied in preparing their Annual Report.
II. Bentuk Laporan Tahunan		**II. Format of Annual Report**
1. Laporan Tahunan disajikan dalam bentuk dokumen cetak dan salinan dokumen elektronik.	√	1. Annual Report should be presented in the printed the format and in electronic document copy.
2. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk dokumen cetak, dicetak pada kertas yang berwarna terang, berkualitas baik, berukuran A4, dijilid, dan dapat diperbanyak dengan kualitas yang baik.	√	2. The printed version of the Annual Report should be printed on light-colored paper of fine quality, in A4 size, bound and can be reproduced in good quality.
3. Laporan Tahunan yang disajikan dalam bentuk salinan dokumen elektronik merupakan Laporan Tahunan yang dikonversi dalam format pdf.	√	3. The Annual Report presented in electronic document format is the Annual Report converted into pdf format.
III. Isi Laporan Tahunan		**III. Content Of Annual Report**
1. Ketentuan Umum		**1. General Provision**
a. Laporan Tahunan paling sedikit memuat informasi mengenai:		a. Annual Report should contain at least the following information:
1. Ikhtisar data keuangan penting;	18-21	1. Summary of key financial information;
2. Informasi saham (jika ada);	22-23	2. Stock information (if any);
3. Laporan Direksi;	38-53	3. The Board of Directors report;
4. Laporan Dewan Komisaris;	32-37	4. The Board of Commissioners report;
5. Profil Emiten atau Perusahaan Publik;	56-61	5. Profile of Issuer or Public Company;
6. Analisis dan pembahasan manajemen;	136-187	6. Profile of Issuer or Public Company;
7. Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	188-327	7. Corporate governance applied by the Issuer or Public Company;
8. Tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik;	328-350	8. Corporate social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company;
9. Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit; dan	387	9. Audited annual report; and
10. Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan;	352-353	10. Statement that the Board of Directors and the Board of Commissioners are fully responsible for the Annual Report;
b. Laporan Tahunan dapat menyajikan informasi berupa gambar, grafik, tabel, dan/atau diagram dengan mencantumkan judul dan/atau keterangan yang jelas, sehingga mudah dibaca dan dipahami; description, that is easy to read and be understood;	√	b. Annual Report may present the information in form of images, charts, tables, and diagrams are presented by mentioning the title and/or clear description, that is easy to read and be understood;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
2. Uraian Isi Laporan Tahunan		**2. Description of Content of Annual Report**
a. Ikhtisar Data Keuangan Penting Ikhtisar Data Keuangan Penting memuat informasi keuangan yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika Emiten atau Perusahaan Publik tersebut menjalankan kegiatan usahanya kurang dari 3 (tiga) tahun, paling sedikit memuat:	18-21	a. Summary of Key Financial Information Summary of Key Financial Information contains financial information presented in comparison with previous 3 (three) fiscal years or since the commencement of business if the Issuers or the Public Company commencing the business less than 3 (three) years, at least contain:
1. Pendapatan/penjualan;	√	1. Income/sales;
2. Laba bruto;	√	2. Gross profit;
3. Laba (rugi);	√	3. Profit (loss);
4. Jumlah laba (rugi) yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	4. Total profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non-controlling interest;
5. Total laba (rugi) komprehensif;	√	5. Total comprehensive profit (loss);
6. Jumlah laba (rugi) komprehensif yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk dan kepentingan non pengendali;	√	6. Total comprehensive profit (loss) attributable to equity holders of the parent entity and non controlling interest;
7. Laba (rugi) per saham;	√	7. Earning (loss) per share;
8. Jumlah aset;	√	8. Total assets;
9. Jumlah liabilitas;	√	9. Total liabilities;
10. Jumlah ekuitas;	√	10. Total equities;
11. Rasio laba (rugi) terhadap jumlah aset;	√	11. Profit (loss) to total assets ratio;
12. Rasio laba (rugi) terhadap ekuitas;	√	12. Profit (loss) to equities ratio;
13. Rasio laba (rugi) terhadap pendapatan/ penjualan;	√	13. Profit (loss) to income ratio;
14. Rasio lancar;	√	14. Current ratio;
15. Rasio liabilitas terhadap ekuitas;	√	15. Liabilities to equities ratio;
16. Rasio liabilitas terhadap jumlah aset; dan	√	16. Liabilities to total assets ratio; and
17. Informasi dan rasio keuangan lainnya yang relevan dengan Emiten atau Perusahaan Publik dan jenis industrinya;	√	17. Other information and financial ratios relevant to the Issuer or Public Company and type of industry;
b. Informasi Saham Informasi Saham (jika ada) paling sedikit memuat:	22-23	b. Stock Information Stock Information (if any) at least contains:
1. Saham yang telah diterbitkan untuk setiap masa triwulan (jika ada) yang disajikan dalam bentuk perbandingan selama 2 (dua) tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:		1. Shares issued for each three-month period in the last 2 (two) fiscal years (if any), at least covering:
a. Jumlah saham yang beredar;	√	a. Number of outstanding shares;
b. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	√	b. Market capitalization based on the price at the Stock Exchange where the shares listed on
c. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	√	c. Highest share price, lowest share price, closing share price at the Stock Exchange where the shares listed on; and
d. volume perdagangan pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	√	d. Share volume at the Stock Exchange where the shares listed on;
Informasi pada huruf a) diungkap oleh Emiten yang merupakan Perusahaan Terbuka yang sahamnya tercatat maupun tidak tercatat di Bursa Efek;		Information in point a) should be disclosed by the Issuer, the public company whose shares is listed or not listed in the Stock Exchange;
Informasi pada huruf b), c), dan huruf d) hanya diungkapkan jika Emiten merupakan Perusahaan Terbuka dan sahamnya tercatat di Bursa Efek;		Information in point b), point c), and point d) only be disclosed if the Issuer is a public company whose shares is listed in the Stock Exchange;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
2. Dalam hal terjadi aksi korporasi, seperti pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham, informasi saham sebagaimana dimaksud pada angka 1) ditambahkan penjelasan paling sedikit mengenai:	107-114	2. in the event of corporate actions, including stock split, reverse stock, dividend, bonus share, and change in par value of shares, then the share price referred to in point 1), should be added with explanation on:
a. Tanggal pelaksanaan aksi korporasi;	√	a. Date of corporate action;
b. Rasio pemecahan saham (stock split), penggabungan saham (reverse stock), dividen saham, saham bonus, dan perubahan nilai nominal saham;	√	b. Stock split ratio, reverse stock, dividend, bonus shares, and change in par value of shares;
c. Jumlah saham beredar sebelum dansesudah aksi korporasi; dan	√	c. Number of outstanding shares prior to and after corporate action; and
d. Harga saham sebelum dan sesudah aksi korporasi;	√	d. Share price prior to and after corporate action;
3. Dalam hal terjadi penghentian sementara perdagangan saham (suspension), dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) dalam tahun buku, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan alasan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut; dan	N.A.	3. In the event that the company's shares were suspended and/or delisted from trading during the year under review, then the Issuers or Public Company should provide explanation on the reason for the suspension and/or delisting; and
4. Dalam hal penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) sebagaimana dimaksud pada angka 3) masih berlangsung hingga akhir periode Laporan Tahunan, Emiten atau Perusahaan Publik menjelaskan tindakan yang dilakukan untuk menyelesaikan penghentian sementara perdagangan saham (suspension) dan/atau penghapusan pencatatan saham (delisting) tersebut;	N.A.	4. In the event that the suspension and/or delisting as referred to in point 3) was still in effect until the date of the Annual Report, then the Issuer or the Public Company should also explain the corporate actions taken by the company in resolving the suspension and/or delisting;
c. Laporan Direksi Laporan Direksi paling sedikit memuat:	38-53	c. The Board of Directors Report The Board of Directors Report should at least contain the following items:
1. Uraian singkat mengenai kinerja Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit meliputi:	√	1. The performance of the Issuer or Public Company, at least covering:
a. Strategi dan kebijakan strategis Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a. Strategy and strategic policies of the Issuer or Public Company;
b. Perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	c. Comparison between achievement of results and targets; and
c. Kendala yang dihadapi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d. Challenges faced by the Issuer or Public Company;
2. Gambaran tentang prospek usaha;	√	2. Description on business prospects;
3. Penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	3. Implementation of good corporate governance by Issuer or Public Company; and
d. Laporan Dewan Komisaris Laporan Dewan Komisaris paling sedikit memuat:	32-37	d. The Board of Commissioners Report The Board of Commissioners Report should at least contain the following items:
1. Penilaian terhadap kinerja Direksi mengenai pengelolaan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	1. Assessment of the performance of the Board of Directors in managing the Issuer or the Public Company;
2. Pengawasan terhadap implementasi strategi Emiten atau Perusahaan Publik;		2. Supervision on the implementation of the strategy of the Issuer or Public Company;
3. Pandangan atas prospek usaha Emiten atau Perusahaan Publik yang disusun oleh Direksi;	√	3. View on the business prospects of the Issuer or Public Company as established by the Board of Directors;
4. Pandangan atas penerapan tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik;	√	4. View on the implementation of the corporate governance by the Issuer or Public Company;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
5. Perubahan komposisi anggota Dewan Komisaris dan alasan perubahannya (jika ada); dan	√	5. Changes in the composition of the Board of Commissioners and the reason behind (if any); and
6. Frekuensi dan cara pemberian nasihat kepada anggota Direksi;	√	6. The frequency and procedure of providing advice to members of the Board of Directors;
e. Profil Emiten atau Perusahaan Publik Profil Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat:	56-135	e. Profile of the Issuer or Public Company Profile of the Issuer or Public Company should cover at least:
1. Nama Emiten atau Perusahaan Publik termasuk apabila terdapat perubahan nama, alasan perubahan, dan tanggal efektif perubahan nama pada tahun buku;	56	1. Name of Issuer or Public Company, including change of name, the reason for the change, and the effective date of the change of name during the year under review;
2. Akses terhadap Emiten atau Perusahaan Publik termasuk kantor cabang atau kantor perwakilan yang memungkinkan masyarakat dapat memperoleh informasi mengenai Emiten atau Perusahaan Publik, meliputi:	57	2. Access to Issuer or Public Company, including branch office or representative office, where the public can have access of information of the Issuer or Public Company, which include:
a. Alamat;	√	a. Address;
b. Nomor telepon;	√	b. Telephone number;
c. Nomor faksimile;	√	c. Facsimile number;
d. Alamat surat elektronik; dan	√	d. E-mail address; and
e. Alamat Situs Web;	√	e. Website address;
3. riwayat singkat Emiten atau Perusahaan Publik;	58-61	3. brief history of the Issuer or Public Company;
4. visi dan misi Emiten atau Perusahaan Publik;	68	4. vision and mission of the Issuer or Public Company;
5. kegiatan usaha menurut anggaran dasar terakhir, kegiatan usaha yang dijalankan pada tahun buku, serta jenis barang dan/atau jasa yang dihasilkan;	64-67	5. line of business according to the latest Articles of Association, and types of products and/or services produced;
6. struktur organisasi Emiten atau Perusahaan Publik dalam bentuk bagan, paling sedikit sampai dengan struktur 1 (satu) tingkat di bawah Direksi, disertai dengan nama dan jabatan;	72-75	6. structure of organization of the Issuer or Public Company in chart form, at least 1 (one) level below the Board of Directors, with the names and titles;
7. profil Direksi, paling sedikit memuat:	83-87	7. the Board of Directors profiles include:
a. nama dan jabatan yang sesuai dengan tugas dan tanggung jawab;	√	a. name and short description of duties and functions;
b. foto terbaru;	√	b. latest photograph;
c. usia;	√	c. age;
d. kewarganegaraan;	√	d. citizenship;
e. riwayat pendidikan;	√	e. education;
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f. history position, covering information on:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota Direksi pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	1. legal basis for appointment as member of the Board of Directors to the said Issuer or Public Company;
2. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. dual position, as member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Direksi dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada); dan	√	g. competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Directors during the year under review (if any); and

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
h. hubungan Afiliasi dengan anggota Direksi lainnya, anggota Dewan Komisaris, dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi;	√	h. disclosure of affiliation with other members of the Board of Directors, members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party;
8. profil Dewan Komisaris, paling sedikit memuat:	78-82	8. the Board of Commissioners profiles, at least include:
a. nama;	√	a. name;
b. foto terbaru;	√	b. latest photograph;
c. usia;	√	c. age;
d. kewarganegaraan;	√	d. citizenship;
e. riwayat pendidikan;	√	e. education;
f. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	f. history position, covering information on:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota Dewan Komisaris yang bukan merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	1. legal basis for the appointment as member of the Board of Commissioners who is not Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
2. dasar hukum penunjukan pertama kali sebagai anggota Dewan Komisaris yang merupakan Komisaris Independen pada Emiten atau Perusahaan Publik yang bersangkutan;	√	2. legal bases for the first appointment as member of the Board of Commissioners who also Independent Commissioner at the said Issuer or Public Company;
3. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	3. dual position; as member of the Board of Commissioners, member of the Board of Directors, and/or member of committee and other position (if any); and
4. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	4. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
g. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti anggota Dewan Komisaris dalam meningkatkan kompetensi dalam tahun buku (jika ada);	√	g. competency enhancement education and/or training program for member of the Board of Commissioner during the year under review (if any);
h. hubungan Afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris lainnya dan pemegang saham utama (jika ada) meliputi nama pihak yang terafiliasi; dan	√	h. affiliation with other members of the Board of Commissioners, and major shareholders (if any) including name of the affiliated party; and
i. pernyataan independensi Komisaris Independen dalam hal Komisaris Independen telah menjabat lebih dari 2 (dua) periode (jika ada);	√	i. statement of independence of Independent Commissioner in the event that the Independent Commissioner has been appointed more than 2 (two) periods (if any);
9. dalam hal terdapat perubahan susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terjadi setelah tahun buku berakhir sampai dengan batas waktu penyampaian Laporan Tahunan, susunan yang dicantumkan dalam Laporan Tahunan adalah susunan anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang terakhir dan sebelumnya;	N.A.	9. in the event that there were changes in the composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors occurring between the period after year-end until the date the Annual Report submitted, then the last and the previous composition of the Board of Commissioners and/or the Board of Directors shall be stated in the Annual Report;
10. jumlah karyawan dan deskripsi sebaran tingkat pendidikan dan usia karyawan dalam tahun buku;	99-102	10. number of employees and description of the distribution of education level and age of the employee in the year under review;
11. nama pemegang saham dan persentase kepemilikan pada akhir tahun buku, yang terdiri dari:	107-109	11. names of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, including:
a. pemegang saham yang memiliki 5% (lima persen) atau lebih saham Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a. shareholders having 5% (five percent) or more shares of Issuer or Public Company;
b. anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang memiliki saham Emiten atau Perusahaan Publik; dan	√	b. Commissioners and Directors who own shares of the Issuers or Public Company; and

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
c. kelompok pemegang saham masyarakat, yaitu kelompok pemegang saham yang masing-masing memiliki kurang dari 5% (lima persen) saham Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d. groups of public shareholders, or groups of shareholders, each with less than 5% (five percent) ownership shares of the Issuers or Public Company;
12. jumlah pemegang saham dan persentase kepemilikan per akhir tahun buku berdasarkan klasifikasi:	107	12. number of shareholders and ownership percentage at the end of the fiscal year, based on:
a. kepemilikan institusi lokal;	√	a. ownership of local institutions;
b. kepemilikan institusi asing;	√	b. ownership of foreign institutions;
c. kepemilikan individu lokal; dan	√	c. ownership of local individual; and
d. kepemilikan individu asing;	√	d. ownership of foreign individual;
13. informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali Emiten atau Perusahaan Publik, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu, yang disajikan dalam bentuk skema atau bagan;	202	13. information on major shareholders and controlling shareholders the Issuers of Public Company, directly or indirectly, and also individual shareholder, presented in the form of scheme or diagram;
14. nama entitas anak, perusahaan asosiasi, perusahaan ventura bersama dimana Emiten atau Perusahaan Publik memiliki pengendalian bersama entitas, beserta persentase kepemilikan saham, bidang usaha, total aset, dan status operasi Emiten atau Perusahaan Publik tersebut (jika ada); Untuk entitas anak, ditambahkan informasi mengenai alamat entitas anak tersebut;	115-125	14. name of subsidiaries, associated companies, joint venture controlled by Issuers or Public Company, with entity, percentage of stock ownership, line of business, total assets and operating status of the Issuers of Public Company (if any); For subsidiaries, include the addresses of the said subsidiaries;
15. kronologi pencatatan saham, jumlah saham, nilai nominal, dan harga penawaran dari awal pencatatan hingga akhir tahun buku serta nama Bursa Efek dimana saham Emiten atau Perusahaan Publik dicatatkan (jika ada);	110	15. chronology of share listing, number of shares, par value, and bid price from the beginning of listing up to the end of the financial year, and name of Stock Exchange where the Issuers of Public Company shares are listed;
16. kronologi pencatatan Efek lainnya selain Efek sebagaimana dimaksud pada angka 15), yang paling sedikit memuat nama Efek, tahun penerbitan, tanggal jatuh tempo, nilai penawaran, dan peringkat Efek (jika ada);	111-114	16. chronology of securities listing in addition to the said security in point 15), which at least should contain the name of the Securities, year of issuance, date of maturity, bid price, and rating of the securities (if any);
17. nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang pasar modal;	131-133	17. name and address of capital market supporting institutions and/or professionals;
18. dalam hal terdapat profesi penunjang pasar modal yang memberikan jasa secara berkala kepada Emiten atau Perusahaan Publik, diungkapkan informasi mengenai jasa yang diberikan, komisi (fee), dan periode penugasan; dan	131-133	18. in the event that the capital market supporting professionals provide services on a regular basis to the Issuer or the Public Company, then information on the services provided, fee and period of assignment should be disclosed; and
19. penghargaan dan/atau sertifikasi yang diterima Emiten atau Perusahaan Publik baik yang berskala nasional maupun internasional dalam tahun buku terakhir (jika ada), yang memuat:	26-29	19. awards and/or certification of national and international scales bestowed on the Issuer or Public Company during the last fiscal year (if any), covering:
a. nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	a. name of award and/or certification;
b. badan atau lembaga yang memberikan; dan	√	b. organization/institution that gives the awards; and
c. masa berlaku penghargaan dan/atau sertifikasi (kalau ada);	√	c. award/certificate validity period (if any);
f. Analisis dan Pembahasan Manajemen Analisis dan pembahasan manajemen memuat analisis dan pembahasan mengenai laporan keuangan dan informasi penting lainnya dengan penekanan pada perubahan material yang terjadi dalam tahun buku, yaitu paling sedikit memuat:	138-187	f. Management Discussion and Analysis Management Analysis and Discussion Annual should contain discussion and analysis on financial statements and other material information emphasizing material changes that occurred during the year under review, at least including:

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
1. tinjauan operasi per segmen operasi sesuai dengan jenis industri Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	141-151	1. operational review per business segment, according to the type of industry of the Issuer or Public Company including:
a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;	√	a. produksi, yang meliputi proses, kapasitas, dan perkembangannya;
b. pendapatan/penjualan; dan	√	b. income/sales; and
c. profitabilitas;	√	c. profitability;
2. kinerja keuangan komprehensif yang mencakup perbandingan kinerja keuangan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir, penjelasan tentang penyebab adanya perubahan dan dampak perubahan tersebut, paling sedikit mengenai	161-169	2. comprehensive financial performance analysis which includes a comparison between the financial performance of the last 2 (two) fiscal years, and explanation on the causes and effects of such changes, among others concerning:
a. aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	√	a. current assets, non-current assets, and total assets;
b. liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang, dan total liabilitas;	√	b. short term liabilities, long term liabilities, total liabilities;
c. ekuitas;	√	c. equities;
d. pendapatan/penjualan, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan total laba (rugi) komprehensif; dan	√	d. sales/operating revenues, expenses and profit (loss), other comprehensive revenues, and total comprehensive profit (loss); and
e. arus kas;	√	e. cash flows;
3. kemampuan membayar utang dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	170	3. the capacity to pay debts by including the computation of relevant ratios;
4. tingkat kolektibilitas piutang Emiten atau Perusahaan Publik dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan;	170-171	4. accounts receivable collectability of the Issuer or Public Company, including the computation of the relevant ratios;
5. struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure) tersebut disertai dasar penentuan kebijakan dimaksud;	171-172	5. capital structure and management policies concerning capital structure, including the basis for determining the said policy;
6. bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal dengan penjelasan paling sedikit meliputi:	173	6. discussion on material ties for the investment of capital goods, including the explanation on at least:
a. tujuan dari ikatan tersebut;	√	a. the purpose of such ties;
b. sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan tersebut;	√	b. source of funds expected to fulfill the said ties;
c. mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	c. currency of denomination; and
d. langkah yang direncanakan Emiten atau Perusahaan Publik untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait;	√	d. steps taken by the Issuer of Public Company to protect the position of a related foreign currency against risks;
7. bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan dalam tahun buku terakhir, paling sedikit meliputi:	173	7. discussion on investment of capital goods which was realized in the last fiscal year, at least include:
a. jenis investasi barang modal;	√	a. type of investment of capital goods;
b. tujuan investasi barang modal; dan	√	b. objective of the investment of capital goods;and
c. nilai investasi barang modal yang dikeluarkan;	√	c. value of the investment of capital goods;
8. informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan (jika ada);	177	8. material Information and facts that occurring after the date of the accountant's report (if any);
9. prospek usaha dari Emiten atau Perusahaan Publik dikaitkan dengan kondisi industri, ekonomi secara umum dan pasar internasional disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya;	185-187	9. information on the prospects of the Issuer or the Company in connection with industry,economy in general, accompanied with supporting quantitative data if there is a reliable data source;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
10. perbandingan antara target/proyeksi pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), mengenai:	174-176	10. comparison between target/projection at beginning of year and result (realization), concerning:
a. pendapatan/penjualan;	√	a. income/sales;
b. laba (rugi);	√	b. profit (loss);
c. struktur modal (capital structure); atau	√	c. capital structure; or
d. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	d. others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
11. target/proyeksi yang ingin dicapai Emiten atau Perusahaan Publik untuk 1 (satu) tahun mendatang, mengenai:	264	11. target/projection at most for the next one year of the Issuer or Public Company, concerning:
a. pendapatan/penjualan;	√	a. income/sales;
b. laba (rugi);	√	b. profit (loss);
c. struktur modal (capital structure);	√	c. capital structure; or
d. kebijakan dividen; atau	√	d. dividend policy;
e. hal lainnya yang dianggap penting bagi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	e. or others that deemed necessary for the Issuer or Public Company;
12. aspek pemasaran atas barang dan/atau jasa Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai strategi pemasaran dan pangsa pasar;	183-184	12. marketing aspects of the company's products and/or services the Issuer or Public Company, among others marketing strategy and market share;
13. uraian mengenai dividen selama 2 (dua) tahun buku terakhir (jika ada), paling sedikit:	177	13. description regarding the dividend policy during the last 2 (two) fiscal years, at least:
a. kebijakan dividen;	√	a. dividend policy;
b. tanggal pembayaran dividen kas dan/ atau tanggal distribusi dividen non kas;	√	b. the date of the payment of cash dividend and/or date of distribution of non-cash dividend;
c. jumlah dividen per saham (kas dan/atau non kas); dan	√	c. amount of cash per share (cash and/or non cash); and
d. jumlah dividen per tahun yang dibayar;	√	d. amount of dividend per year paid;
14. realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum, dengan ketentuan:	178	14. use of proceeds from Public Offerings, under the condition of:
a. dalam hal selama tahun buku, Emiten memiliki kewajiban menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana, maka diungkapkan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum secara kumulatif sampai dengan akhir tahun buku; dan	N.A.	a. during the year under review, on which the Issuer has the obligation to report the realization of the use of proceeds, then the realization of the cumulative use of proceeds until the year end should be disclosed; and
b. dalam hal terdapat perubahan penggunaan dana sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum, maka Emiten menjelaskan perubahan tersebut;	N.A.	b. in the event that there were changes in the use of proceeds as stipulated in the Regulation of the Financial Services Authority on the Report of the Utilization of Proceeds from Public Offering, then Issuer should explain the said changes;
15. informasi material (jika ada), antara lain mengenai investasi, ekspansi, divestasi, penggabungan/ peleburan usaha, akuisisi, restrukturisasi utang/ modal, transaksi Afiliasi, dan transaksi yang mengandung benturan kepentingan, yang terjadi pada tahun buku, antara lain memuat:	173-174	15. material information (if any), among others concerning investment, expansion, divestment, acquisition, debt/ capital restructuring, transactions with related parties and transactions with conflict of interest that occurred during the year under review, along others include:
a. tanggal, nilai, dan objek transaksi;	√	a. transaction date, value, and object;
b. nama pihak yang melakukan transaksi;	√	b. name of transacting parties;
c. sifat hubungan Afiliasi (jika ada);	√	c. sifat hubungan Afiliasi (jika ada);
d. penjelasan mengenai kewajaran transaksi; dan	√	d. description of the fairness of the transaction; and

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
e. pemenuhan ketentuan terkait;	√	e. compliance with related rules and regulations;
16. perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berpengaruh signifikan terhadap Emiten atau Perusahaan Publik dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada); dan	178-179	16. changes in regulation which have a significant effect on the Issuer or Public Company and impacts on the company (if any); and
17. perubahan kebijakan akuntansi, alasan dan dampaknya terhadap laporan keuangan (jika ada);	180-181	17. changes in the accounting policy, rationale and impact on the financial statement (if any);
g. Tata Kelola Emiten atau Perusahaan Publik Tata kelola Emiten atau Perusahaan Publik paling sedikit memuat uraian singkat mengenai:	190-327	g. Corporate Governance of the Issuer or Public Company Corporate Governance of the Issuer or Public Company contains at least:
1. Direksi, mencakup antara lain:		1. the Board of Directors, covering:
a. tugas dan tanggung jawab masing- masing anggota Direksi;	222-228	a. the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;a) the tasks and responsibilities of each member of the Board of Directors;
b. pernyataan bahwa Direksi memiliki pedoman atau piagam (charter) Direksi;	229-230	b. statement that the Board of Directors has already have board manual or charter;
c. prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Direksi, serta hubungan antara remunerasi dengan kinerja Emiten atau Perusahaan Publik;	233-237	c. procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration of each member of the Board of Directors, relation between remuneration and performance of the Issuer or Public Company;
d. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Direksi, termasuk rapat bersama Dewan Komisaris, dan tingkat kehadiran anggota Direksi dalam rapat tersebut;	242-245, 246-247	d. the policies and the frequency of the meeting of the Board of Directors, including the joint meeting with Board of Commissioners, and attendance of member of the Board of Directors in the said meeting;
e. informasi mengenai keputusan RUPS 1 (satu) tahun sebelumnya, meliputi:	204-209	e. information on the resolution from the AGM of the previous 1 (one) year, covering:
1. keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	√	1. AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
2. alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	√	2. explanation for the unrealized resolution;
f. informasi mengenai keputusan RUPS pada tahun buku, meliputi:	N.A	f. information on the resolution from the AGM of the year, covering:
1. keputusan RUPS yang direalisasikan pada tahun buku; dan	N.A	1. AGM resolutions that were realized during the fiscal year; and
2. alasan dalam hal terdapat keputusan yang belum direalisasikan; dan	N.A	2. explanation for the unrealized resolution;
g. penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Direksi;	232	g. assessment of the performance of the committees that support the implementation of the duties of the Board of Directors
2. Dewan Komisaris, mencakup antara lain:	212-218	2. the Board of Commissioners, cover:
a. tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;	√	a. duties and responsibilities of the Board of Commissioners;
b. pernyataan bahwa Dewan Komisaris memiliki pedoman atau piagam (charter) Dewan Komisaris;	√	b. statement that the Board of Commissioner has already have the board manual or charter;
c. prosedur, dasar penetapan, struktur, dan besarnya remunerasi masing-masing anggota Dewan Komisaris;	237-238	c. Commissioners;procedure, legal basis, structure, and amount of remuneration for each member of Board of
d. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Dewan Komisaris, termasuk rapat bersama Direksi, dan tingkat kehadiran anggota Dewan Komisaris dalam rapat tersebut;	242-245, 246-247	d. policies and frequency of meeting of the Board of Commissioners, including meeting with the Board of Directors, and attendance of each member of the Board of Commissioners in the said meetings;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
e. kebijakan Emiten atau Perusahaan Publik tentang penilaian terhadap kinerja anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dan pelaksanaannya, paling sedikit meliputi:	233-236	e. policies of the Issuer or Public Company regarding the assessment on the performance of the Board of Directors and Board of Commissioners and the implementation, at least covering:
1. prosedur pelaksanaan penilaian kinerja;	√	1. procedure for the implementation of performance assessment;
2. kriteria yang digunakan; dan	√	2. criteria for assessment; and
3. pihak yang melakukan penilaian;	√	3. assessor;
f. penilaian terhadap kinerja komite yang mendukung pelaksanaan tugas Dewan Komisaris; dan	218	f. assessment on the performance of the committees under the Board of Commissioners; and
g. dalam hal Dewan Komisaris tidak membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi, dimuat informasi paling sedikit mengenai:	N.A	g. in the event that the Board of Commissioners does not establish the Nomination and Remuneration Committee, then should contain at least:
1. alasan tidak dibentuknya komite; dan	N.A	1. reason not to establish the committee; and
2. prosedur nominasi dan remunerasi yang dilakukan dalam tahun buku;	√	2. procedure of nomination and remuneration performed in the year under review;
3. Dewan Pengawas Syariah, bagi Emiten atau Perusahaan Publik yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah sebagaimana tertuang dalam anggaran dasar, paling sedikit memuat:	N/A	3. Sharia Supervisory Board, for Issuer or Public Company that conduct business based on sharia law, as stipulated in the articles of association, at least containing:
a. nama;	N/A	a. name;
b. tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah; dan	N/A	b. duty and responsibility of Sharia Supervisory Board; and
c. frekuensi dan cara pemberian nasihat dan saran serta pengawasan pemenuhan Prinsip Syariah di Pasar Modal terhadap Emiten atau Perusahaan Publik;	N/A	c. frequency and procedure in providing advice and suggestion, as well as the compliance of Sharia Principles of the Issuer or Public Company in the Capital Market;
4. Komite Audit, mencakup antara lain:	249-264	4. Audit Committee, among others covering:
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a. name and position in the committee;
b. usia;	√	b. age;
c. kewarganegaraan;	√	c. citizenship;
d. riwayat pendidikan;	√	d. education background;
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. history of position; including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	1. legal basis for the appointment as member of the committee;
2. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of committee, and other position (if any); and
3. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f. periode dan masa jabatan anggota Komite Audit;	√	f. period and terms of office of the member of Audit Committee;
g. pernyataan independensi Komite Audit;	√	g. statement of independence of the Audit Committee;
h. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat Komite Audit dan tingkat kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat tersebut;	√	h. policies and implementation of the frequency of meeting of the Audit Committee and attendance of member of Audit Committee;
i. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	i. education and/or training during the year under review (if any); and

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
j. pelaksanaan kegiatan Komite Audit pada tahun buku sesuai dengan yang dicantumkan dalam pedoman atau piagam (charter) Komite Audit;	√	j. the activities of the Audit Committee in the year under review, in accordance with the Audit Committee Charter;
5. komite lain yang dimiliki Emiten atau Perusahaan Publik dalam rangka mendukung fungsi dan tugas Direksi dan/atau Dewan Komisaris, seperti Komite Nominasi dan Remunerasi, mencakup antara lain:	265-279	5. another committee of the Issuer or the Public Company formed to support the function and duty of the Board of Directors and/or the Board of Commissioners, such as Nomination and Remuneration Committee, containing:
a. nama dan jabatannya dalam keanggotaan komite;	√	a. name and position in the Committee;
b. usia;	√	b. age;
c. kewarganegaraan;	√	d. citizenship;
d. riwayat pendidikan;	√	d. education background;
e. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	e. history of position, including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai anggota komite;	√	1. legal basis for the appointment as a member of the committee;
2. rangkap jabatan, baik sebagai anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan/atau anggota komite serta jabatan lainnya (jika ada); dan	√	2. dual position, as a member of Board of Commissioners, member of Board of Directors, and/or member of the committee, and other position (if any); and
3. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	3. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
f. periode dan masa jabatan anggota komite;	√	f. period and terms of office of the member of Audit Committee;
g. uraian tugas dan tanggung jawab;	√	g. description of duty and responsibility;
h. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) komite;	√	h. the statement that the Committee has already had the Charter;
i. pernyataan independensi komite;	√	i. statement of independence of the Committee;
j. kebijakan dan pelaksanaan tentang frekuensi rapat komite dan tingkat kehadiran anggota komite dalam rapat tersebut;	√	j. policies and frequency of meeting of the committee, and attendance of each member of the committee in the said meetings;
k. pendidikan dan/atau pelatihan yang telah diikuti dalam tahun buku (jika ada); dan	√	k. education and/or training during the year under review (if any); and
l. uraian singkat pelaksanaan kegiatan komite pada tahun buku;	√	l. brief description on the activities of the committee;
6. Sekretaris Perusahaan, mencakup antara lain:	290-297	6. Corporate Secretary, including:
a. nama;	√	a. name;
b. domisili;	√	b. domicile;
c. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	c. history of position, including:
1. dasar hukum penunjukan sebagai Sekretaris Perusahaan; dan	√	1. legal basis for the appointment as Corporate Secretary; and
2. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
d. riwayat pendidikan;	√	d. education background;
e. pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku; dan	√	e. education and/or training during the year under review; and
f. uraian singkat pelaksanaan tugas Sekretaris Perusahaan pada tahun buku;	√	f. brief description on the implementation of duties of the Corporate Secretary in the year under review;
7. Unit Audit Internal, mencakup antara lain:	280-289	7. Internal Audit Unit, among others including:

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
a. nama kepala Unit Audit Internal;	√	a. name of Head of Internal Audit Unit;
b. riwayat jabatan, meliputi informasi:	√	b. history of position, including:
1. dasar hukum penunjukan sebagaikepala Unit Audit Internal; dan	√	1. legal basis for the appointment as Head of Internal Audit Unit; and
2. pengalaman kerja beserta periode waktunya baik di dalam maupun di luar Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. working experience and period in and outside the Issuer or Public Company;
c. kualifikasi atau sertifikasi sebagai profesi audit internal (jika ada);	√	c. qualification or certification as internal auditor (if any);
d. pendidikan dan/atau pelatihan yang diikuti dalam tahun buku;	√	d. education and/or training during the year under review;
e. struktur dan kedudukan Unit Audit Internal;	√	e. structure and position of Internal Audit Unit;
f. uraian tugas dan tanggung jawab;	√	f. description of duties and responsibilities;
g. pernyataan bahwa telah memiliki pedoman atau piagam (charter) Unit Audit Internal; dan	√	g. a statement that the Internal Audit Unit has already have Internal Audit Unit charter; and
h. uraian singkat pelaksanaan tugas Unit Audit Internal pada tahun buku;	√	h. a brief description of on the implementation of duty of Internal Audit Unit during the year under review;
8. uraian mengenai sistem pengendalian internal (internal control) yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	√	8. description on internal control system adopted by the Issuer or Public Company, at least covering:
a. pengendalian keuangan dan operasional, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan lainnya; dan	√	a. financial and operational control, and compliance to the other prevailing rules; and
b. tinjauan atas efektivitas sistem pengendalian internal;	√	b. review on the effectiveness of internal control systems;
9. sistem manajemen risiko yang diterapkan oleh Emiten atau Perusahaan Publik, paling sedikit mengenai:	√	9. risk management system implemented by the company, at least includes:
a. gambaran umum mengenai sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	a. general description about the company's risk management system the Issuer or Public Company;
b. jenis risiko dan cara pengelolaannya; dan	√	b. types of risk and the management; and
c. tinjauan atas efektivitas sistem manajemen risiko Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. review the effectiveness of the risk management system applied by the Issuer or Public Company;
10. perkara penting yang dihadapi oleh Emiten atau Perusahaan Publik, entitas anak, anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris (jika ada), antara lain meliputi:	311-316	10. important cases faced by the Issuer or Public Company, subsidiaries, current members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, among others include:
a. pokok perkara/gugatan;	√	a. substance of the case/claim;
b. status penyelesaian perkara/gugatan; dan	√	b. status of settlement of case/claim; and
c. pengaruhnya terhadap kondisi Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. potential impacts on the condition of the Issuer or Public Company;
11. informasi tentang sanksi administratif yang dikenakan kepada Emiten atau Perusahaan Publik, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas Pasar Modal dan otoritas lainnya pada tahun buku (jika ada);	326	11. information about administrative sanctions imposed to Issuer or Public Company, members of the Board of Commissioners and the Board of Directors, by the Capital Market Authority and other authorities during the last fiscal year (if any);
12. informasi mengenai kode etik Emiten atau Perusahaan Publik meliputi:	318	12. information about codes of conduct of the Issuer or Public Company, includes:
a. pokok-pokok kode etik;	√	a. key points of the code of conduct;
b. bentuk sosialisasi kode etik dan upaya penegakannya; dan	√	b. socialization of the code of conduct and enforcement; and
c. pernyataan bahwa kode etik berlaku bagi anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan karyawan Emiten atau Perusahaan Publik;	√	c. statement that the code of conduct is applicable for the Board of Commissioners, the Board of Directors, and employees of the Issuer of Public Company;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
13. informasi mengenai budaya perusahaan (corporate culture) atau nilai-nilai perusahaan (jika ada);	68-71	13. information about corporate culture (if any) of the Issuer or Public Company;
14. uraian mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain mengenai:	178	14. description of employee or management stock ownership program of the Issuer or Public Company, among others contains:
a. jumlah saham dan/atau opsi;	N/A	a. number of share and/or option;
b. jangka waktu pelaksanaan;	N/A	b. period;
c. persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	N/A	c. the requirement for eligible employee and/or management; and
d. harga pelaksanaan;	N/A	d. exercised price;
15. uraian mengenai sistem pelaporan pelanggaran (whistleblowing system) di Emiten atau Perusahaan Publik (jika ada), antara lain meliputi:	321-325	15. description of whistleblowing system at the Issuer or Public Company (if any), among others include:
a. cara penyampaian laporan pelanggaran;	√	a. mechanism for violation reporting;
b. perlindungan bagi pelapor;	√	b. protection for the whistleblower;
c. penanganan pengaduan;	√	c. handling of violation reports;
d. pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	d. unit responsible for handling of violation report; and
e. hasil dari penanganan pengaduan, paling sedikit meliputi:	√	e. results from violation report handling, at least includes:
1. jumlah pengaduan yang masuk dan diproses dalam tahun buku; dan	√	1. number of complaints received and processed during the fiscal year; and
2. tindak lanjut pengaduan;	√	2. follow up of complaints;
16. penerapan atas Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka bagi Emiten yang menerbitkan Efek Bersifat Ekuitas atau Perusahaan Publik, meliputi:	191-201	16. implementation of the Guidelines of Corporate Governance for Public Companies for Issuer issuing Equity-based Securities or Public Company, including:
a. pernyataan mengenai rekomendasi yang telah dilaksanakan; dan/atau	√	a. statement regarding the recommendation that has been implemented; and/or
b. penjelasan atas rekomendasi yang belum dilaksanakan, disertai alasan dan alternatif pelaksanaannya (jika ada);	√	b. description of recommendation that has not been implemented, along with the reason and alternatives of implementation (if any);
h. Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik	330-350	h. Social and Environmental Responsibility of the Issuer or Public Company
1. Informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan Emiten atau Perusahaan Publik meliputi kebijakan, jenis program, dan biaya yang dikeluarkan, antara lain terkait aspek:	√	1. Information on the social and environmental responsibility of the Issuer or Public Company that covers policies, types of programs, and cost, among others related to:
a. lingkungan hidup, antara lain:	334-347	a. environment, among others:
1. penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang;	√	1. the use of environmentally friendly and recyclable materials and energy;
2. sistem pengolahan limbah Emiten atau Perusahaan Publik;	√	2. the waste treatment systems of the Issuer or Public Company;
3. mekanisme pengaduan masalah lingkungan; dan	√	3. mechanism for filing a complaint on environmental issues; and
4. sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki;	√	4. environmental certifications;
b. praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, antara lain:	342-345	b. employment practices, occupational health and safety, among others:
1. kesetaraan gender dan kesempatan kerja;	√	1. gender equality and equal work opportunity;
2. sarana dan keselamatan kerja;	√	2. work and safety facilities;
3. tingkat perpindahan (turnover) karyawan;	√	3. employee turnover;
4. tingkat kecelakaan kerja;	√	4. work incident rate;

REFERENSI SEOJK NOMOR 30-SEOJK.04-2016: LAPORAN TAHUNAN PERUSAHAAN PUBLIK

SEOJK Reference No. 30-SEOJK.04-2016: Annual Report of Public Company

Keterangan	Halaman Page	Deskripsi Description
5. pendidikan dan/atau pelatihan;	√	5. education and/or training;
6. remunerasi; dan	√	6. remuneration; and
7. mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan;	√	7. mechanism for filling complaint on employment issues;
c. pengembangan sosial dan kemasyarakatan, antara lain:	346-347	c. social and community development, among others:
1. penggunaan tenaga kerja lokal;	√	1. the use of local work force;
2. pemberdayaan masyarakat sekitar Emiten atau Perusahaan Publik antara lain melalui penggunaan bahan baku yang dihasilkan oleh masyarakat atau pemberian edukasi;	√	2. empowerment of local communities among others through the use of raw material produced by the community or by providing education;
3. perbaikan sarana dan prasarana sosial;	√	3. improvement of public social facilities and infrastructure;
4. bentuk donasi lainnya; dan	√	4. other form of donation; and
5. komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi di Emiten atau Perusahaan Publik, serta pelatihan mengenai anti korupsi (jika ada);	√	5. dissemination of the policies and procedures of anti-corruption at the Issuers or Public Company, and training on anti-corruption (if any);
d. tanggung jawab barang dan/atau jasa, antara lain:	348-350	d. products and/or services responsibilities, among others:
1. kesehatan dan keselamatan konsumen;	√	1. consumers' health and safety;
2. informasi barang dan/atau jasa; dan	√	2. products and/or services information; and
3. sarana, jumlah, dan penanggulangan atas pengaduan konsumen.	√	3. facilities, number, and resolution of consumer complaint.
2. Dalam hal Emiten atau Perusahaan Publik menyajikan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada angka 1) pada laporan tersendiri seperti laporan tanggung jawab sosial dan lingkungan atau laporan keberlanjutan (sustainability report), Emiten atau Perusahaan Publik dikecualikan untuk mengungkapkan informasi mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan dalam Laporan Tahunan; dan	√	2. In the event that the Issuer or the Public Company imparts information on social and environmental responsibility as referred to in point 1) in separate report such corporate social and environmental responsibility report, or sustainability report, then the Issuers or the Public Company is excluded from disclosing information on social and environmental responsibility in Annual Report; and
3. Laporan sebagaimana dimaksud pada angka 2) disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan bersamaan dengan penyampaian Laporan Tahunan;	√	3. The said report in point 2) should be submitted to the Financial Service Authority along with the Annual Report;
i. Laporan Keuangan Tahunan yang Telah Diaudit Laporan keuangan tahunan yang dimuat dalam Laporan Tahunan disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia dan telah diaudit oleh Akuntan. Laporan keuangan dimaksud memuat pernyataan mengenai pertanggungjawaban atas laporan keuangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang- undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai tanggung jawab Direksi atas laporan keuangan atau peraturan perundang-undangan di sektor Pasar Modal yang mengatur mengenai laporan berkala Perusahaan Efek dalam hal Emiten merupakan Perusahaan Efek; dan	393-506	i. Audited Annual Financial Statement Financial Statements included in Annual Report should be prepared in accordance with the Financial Accounting Standards in Indonesia and audited by an Accountant. The said financial statement should be included with the statement of responsibility for financial report as stipulated in the legislation in the Capital Markets sector governing the responsibility of the Board of Directors on the financial report or the legislation in the Capital Markets sector governing the periodic reports of securities company in the event the Issuer is a Securities Company; and
j. Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan Surat pernyataan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris tentang tanggung jawab atas Laporan Tahunan disusun sesuai dengan format Surat Pernyataan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan ini.	390	i. Letter of Statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the Responsibility for Annual Reporting Letter of statement of the Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting should be prepared according to the format of letter of statement of member of Board of Directors and the Board of Commissioners regarding the responsibility for Annual Reporting as attached in the Attachment, which is an integral part of this Circulation Letter of the Financial Services Authority.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank

KRITERIA *ANNUAL REPORT AWARD* 2016

2016 Annual Report Award Criteria

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
I. Umum		**I. General**
1. Laporan tahunan disajikan dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar dan dianjurkan menyajikan juga dalam bahasa Inggris	√	1. The Annual Report shall be written in good and correct Indonesian, and is recommended to be presented in English
2. Laporan tahunan dicetak dengan kualitas yang baik dan menggunakan jenis dan ukuran huruf yang mudah dibaca	√	2. The Annual Report shall be printed with good quality using readable type and size of fonts
3. Laporan tahunan mencantumkan identitas perusahaan dengan jelas Nama perusahaan dan tahun annual report ditampilkan di:		3. The Annual Report shall present clear identity of the company Company name and the annual report financial year shall be presented on:
1. Sampul muka;		1. Front Cover;
2. Samping;		2. Side Cover;
3. Sampul belakang; dan	√	3. Back Cover; and
4. Setiap halaman.	√	4. Every page
4. Laporan tahunan ditampilkan di website perusahaan	√	4. The Annual Report shall be posted in the company's website
Mencakup laporan tahunan terkini dan paling kurang 4 tahun terakhir.	√	Including the latest annual report as well as those for the last four years, at least.
II. Ikhtisar Data Keuangan Penting	18-21	**II. Key Financial Highlights**
1. Informasi hasil usaha perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	18-21	1. Income statement in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain:	√	Information contains the following:
1. Penjualan/pendapatan usaha;	√	1. Income;
2. Laba (rugi):	√	2. Profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali;	√	b. Attributable to non controlling interest;
3. Penghasilan komprehensif periode berjalan :	√	3. Total comprehensive profit (loss):
a. Diatribusikan kepada pemilik entitas induk; dan	√	a. Attributable to equity holders of the parent entity; and
b. Diatribusikan kepada kepentingan nonpengendali; dan	√	b. Attributable to non controlling interest;
4. Laba (rugi) per saham.	√	4. Earning (loss) per share.
Catatan: Apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, perusahaan menyajikan laba (rugi) dan penghasilan komprehensif periode berjalan secara total.		Note: If the company does not have subsidiaries, the profit (loss) and other comprehensive income is presented in total.
2. Informasi posisi keuangan perusahaan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	18, 20-21	2. Financial position in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years
Informasi memuat antara lain:	√	Information contains the following:
1. Jumlah investasi pada entitas asosiasi;	√	1. Total investment on associates;
2. Jumlah aset;	√	2. Total assets
3. Jumlah liabilitas; dan	√	3. Total liabilities; and
4. Jumlah ekuitas.	√	4. Total equity.
3. Rasio keuangan dalam bentuk perbandingan selama 3 (tiga) tahun buku atau sejak memulai usahanya jika perusahaan tersebut menjalankan kegiatan usahanya selama kurang dari 3 (tiga) tahun	19	3. Financial ratio in comparison for 3 (three) financial years or since the commencement of business if the company has been running its business activities for less than 3 (three) years

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
Informasi memuat 5 (lima) rasio keuangan yang umum dan relevan dengan industri perusahaan.		Information covers 5 (five) financial ratios, which are generally applied and relevant to the company's industry.
4. Informasi harga saham dalam bentuk tabel dan grafik	22-23	4. Share price information in tables and charts
1. Jumlah saham yang beredar;	√	1. Number of shares outstanding;
2. Informasi dalam bentuk tabel yang memuat:	√	2. The table forms contain the following information:
a. Kapitalisasi pasar berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan;	√	a. Market capitalization based on the share price on the Stock Exchange where the share are listed;
b. Harga saham tertinggi, terendah, dan penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	√	b. Highest, lowest and closing the share price based on share price on the Stock Exchange where the share are listed; and
c. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	√	c. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed.
3. Informasi dalam bentuk grafik yang memuat paling kurang:	√	3. The graph forms contain at least the following information:
a. Harga penutupan berdasarkan harga pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan; dan	√	a. The closing price of shares based on the share price on the Stock Exchange where the shares are listed; and
b. Volume perdagangan saham pada Bursa Efek tempat saham dicatatkan.	√	b. Trading volume of shares on the Stock Exchange where the shares are listed
Untuk setiap masa triwulan dalam 2 (dua) tahun buku terakhir.		For each quarter in the latest 2 (two) financial years.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kapitalisasi pasar, informasi harga saham, dan volume perdagangan saham, agar diungkapkan.		Note: Should be disclosed if the company does not have market capitalization, share price, and share trading volume.
5. Informasi mengenai obligasi, sukuk atau obligasi konversi yang masih beredar dalam 2 (dua) tahun buku terakhir	114	5. Information regarding outstanding bonds, sukuk or convertible bonds, in 2 (two) latest financial years
Informasi memuat:		Information contains:
1. Jumlah obligasi/sukuk/obligasi konversi yang beredar (outstanding);	√	1. Number of outstanding bonds, sukuk or convertible bonds;
2. Tingkat bunga/imbalan;	√	2. Interest rate/yield;
3. Tanggal jatuh tempo; dan	√	3. Maturity date; and
4. Peringkat obligasi/sukuk tahun 2015 dan 2016.	√	4. Rating of bonds/sukuk in 2015 and 2016.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki obligasi/ sukuk/ obligasi konversi, agar diungkapkan.	√	Note: Should be disclosed if the company does not have outstanding bonds, sukuk or convertible bonds.
III. Laporan Dewan Komisaris dan Direksi	34-113	**III. Board of Commissioners and Board of Directors' Report**
1. Laporan Dewan Komisaris	32-37	1. Board of Commissioners' Report
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Penilaian atas kinerja Direksi mengenai pengelolaan perusahaan dan dasar penilaiannya;	√	1. Assessment on the performance of the Board of Directors in managing the company and the basis for such evaluation;
2. Pandangan atas prospek usaha perusahaan yang disusun oleh Direksi dan dasar pertimbangannya;	√	2. Views on the business prospects of the company as prepared by the Board of Directors and the basis for such consideration;
3. Pandangan atas penerapan/pengelolaan whistleblowing system (WBS) di perusahaan dan peran Dewan Komisaris dalam WBS tersebut; dan	√	3. Views on the implementation/management of the company's whistleblowing system (WBS), and the role of the Board of Commissioners in the WBS; and
4. Perubahan komposisi Dewan Komisaris (jika ada) dan alasan perubahannya.	√	4. Changes in the composition of the Board of Commissioners (if any) and the reason for such changes.
2. Laporan Direksi	38-53	2. Board of Directors' report
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Analisis atas kinerja perusahaan, yang mencakup antara lain:	√	1. Analysis of the company's performance, covering among others:
a. kebijakan strategis;	√	a. strategic policies;

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
b. perbandingan antara hasil yang dicapai dengan yang ditargetkan; dan	√	b. comparison between targets and achievements; and
c. kendala-kendala yang dihadapi perusahaan dan langkah-langkah penyelesaiannya;	√	c. challenges faced by the company and initiatives to deal with those challenges;
2. Analisis tentang prospek usaha;	√	2. Analysis on business prospects;
3. Perkembangan penerapan tata kelola perusahaan pada tahun buku; dan	√	3. Developments in the implementation of GCG during the fiscal year; and
4. Perubahan komposisi anggota Direksi (jika ada) dan alasan perubahannya.	√	4. Changes in the composition of the Board of Directors (if any) and the reason for such changes.
3. Tanda tangan anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi	352-353	3. Signatures of members of the Board of Commissioners and Board of Directors
Memuat hal-hal sebagai berikut:		Contain the following:
1. Tanda tangan dituangkan pada lembaran tersendiri;	√	1. Signatures on a separate page;
2. Pernyataan bahwa Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi laporan tahunan;	√	2. Statement of responsibility of the Board of Commissioners and Board of Directors for the accuracy of the contents of the Annual Report;
3. Ditandatangani seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi dengan menyebutkan nama dan jabatannya; dan	√	3. Signed by all members of the Board of Commissioners and Board of Directors by stating their names and position; and
4. Penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari yang bersangkutan dalam hal terdapat anggota Dewan Komisaris atau anggota Direksi yang tidak menandatangani laporan tahunan, atau penjelasan tertulis dalam surat tersendiri dari anggota yang lain dalam hal tidak terdapat penjelasan tertulis dari yang bersangkutan.	√	4. Written explanation in a separate letter from the person(s) concerned in the event that member(s) of Board of Commissioners or Board of Directors fail to sign the annual report; or: written explanation a separate letter from other member(s) in the event that there is no written explanation from the person(s) concerned.
IV. Profil Perusahaan	56-135	**IV. Company Profile**
1. Nama dan alamat lengkap perusahaan Informasi memuat antara lain: nama dan alamat, kode pos, no. Telp, no. Fax, email, dan website.	56	1. Name and complete address of the company Information contains, among others, name and address, postcode, telephone number, fax, email and website.
2. Riwayat singkat perusahaan Mencakup antara lain: tanggal/tahun pendirian, nama, perubahan nama perusahaan (jika ada), dan tanggal efektif perubahan nama perusahaan.	58-61	2. Brief history of the company Contain among others: date/year of establishment, name of the company, change of name (if any), and effective date of the change of name.
Catatan: apabila perusahaan tidak pernah melakukan perubahan nama, agar diungkapkan		Note: to be disclosed if the company never had a change of name
3. Bidang usaha	64-67	3. Line of business
Uraian mengenai antara lain:		Description of, among others:
1. Kegiatan usaha perusahaan menurut anggaran dasar terakhir;	√	1. The line of business as stated in the latest Articles of Association;
2. Kegiatan usaha yang dijalankan; dan	√	2. Business activities; and
3. Produk dan/atau jasa yang dihasilkan.	√	3. Product and/or services offered.
4. Struktur Organisasi Dalam bentuk bagan, meliputi nama dan jabatan paling kurang sampai dengan struktur satu tingkat di bawah Direksi.	72-75	4. Organization structure Diagram of organization structure, containing name and position of personnel up to one level below Director, at least
5. Visi, Misi, dan Budaya Perusahaan Mencakup:	68-71	5. Vision, Mission and Corporate Culture Covers:
1. Visi perusahaan;	√	1. Vision;
2. Misi perusahaan;	√	2. Mission;
3. Keterangan bahwa visi dan misi tersebut telah direviu dan disetujui oleh Direksi/Dewan Komisaris pada tahun buku; dan	√	3. Statement that the vision and mission have been reviewed and approved by the Board of Commissioners/Directors in the fiscal year; and

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Pernyataan mengenai budaya perusahaan (corporate culture) yang dimiliki perusahaan.	√	4. Statement on the corporate culture.
6. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Dewan Komisaris	78-82	6. Profiles of members of the Board of Commissioners
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Dewan Komisaris di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as a member of the Board of Commissioners at the company since the first appointment.
7. Identitas dan riwayat hidup singkat anggota Direksi Informasi memuat antara lain:	83-87	7. Profiles of members of the Board of Directors Contain information on:
1. Nama;	√	1. Name;
2. Jabatan dan periode jabatan (termasuk jabatan pada perusahaan atau lembaga lain);	√	2. Position and period in position (including position(s) held at other company/institution);
3. Umur;	√	3. Age;
4. Domisili;	√	4. Domicile;
5. Pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan);	√	5. Education (study field and education institution);
6. Pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat); dan	√	6. Work experience (position, company, and period in position); and
7. Riwayat penunjukkan (periode dan jabatan) sebagai anggota Direksi di Perusahaan sejak pertama kali ditunjuk.	√	7. History of assignments (period and position) as member of the Board of Directors at the company since the first appointment.
8. Jumlah karyawan (komparatif 2 tahun) dan data pengembangan kompetensi karyawan yang mencerminkan adanya kesempatan untuk masing-masing level organisasi	99-102	8. Total number of employees (comparative for 2 years) and data on employee competence development programs reflecting equal opportunities for each level of the organization
Informasi memuat antara lain:		Information contains, among others:
1. Jumlah karyawan untuk masing-masing level organisasi;	√	1. Number of employees at each level of the organization;
2. Jumlah karyawan untuk masing-masing tingkat pendidikan;	√	2. Number of employees by education;
3. Jumlah karyawan berdasarkan status kepegawaian;	√	3. Number of employees by employment status;
4. Data pengembangan kompetensi karyawan yang telah dilakukan pada tahun buku yang terdiri dari pihak (level jabatan) yang mengikuti pelatihan, jenis pelatihan, dan tujuan pelatihan; dan	√	4. Data on employee competence development programs during the fiscal year, concerning the position of participants, type of training, and purpose of training; and
5. Biaya pengembangan kompetensi karyawan yang telah dikeluarkan pada tahun buku.	√	5. The costs of employee competence development programs in the fiscal year.
9. Komposisi Pemegang saham	107-109 83-102	9. Shareholders composition
Mencakup antara lain:		Covering among others:
1. Rincian nama pemegang saham yang meliputi 20 pemegang saham terbesar dan persentase kepemilikannya;	√	1. Names of the 20 largest shareholders and their shareholding percentage;
2. Rincian pemegang saham dan persentase kepemilikannya meliputi:	√	2. Details of shareholders and shareholding percentage:
a. Nama pemegang saham yang memiliki 5% atau lebih saham; dan	√	a. Names of shareholders with 5% or more shareholding; and

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
b. Kelompok pemegang saham masyarakat dengan kepemilikan saham masing-masing kurang dari 5%.	√	b. Group of public shareholders with individual shareholding of less than 5% each.
3. Nama Direktur dan Komisaris serta persentase kepemilikan sahamnya secara langsung dan tidak langsung.	√	3. Names of Director and Commissioner with direct or indirect share-ownership and the percentage of such shareholding.
Catatan: apabila Direktur dan Komisaris tidak memiliki saham langsung dan tidak langsung, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the Director and Commissioner does not own shares, directly or indirectly.
10. Daftar entitas anak dan/atau entitas asosiasi	115-126	10. List of subsidiaries and/or associated entities
Dalam bentuk tabel memuat informasi antara lain:	√	In table form, containing:
1. Nama entitas anak dan/atau asosiasi;	√	1. Name of subsidiary and/or associated entity;
2. Persentase kepemilikan saham;	√	2. Share-ownership percentage;
3. Keterangan tentang bidang usaha entitas anak dan/ atau entitas asosiasi; dan	√	3. Line of business of subsidiary and/or associated entity; and
4. Keterangan status operasi entitas anak dan/atau entitas asosiasi (telah beroperasi atau belum beroperasi).	√	4. The operational status of subsidiary and/or associated entity (in commercial operation/not yet in commercial operation).
11. Struktur grup perusahaan	74-75	11. Corporate group structure
Struktur grup perusahaan dalam bentuk bagan yang menggambarkan entitas induk, entitas anak, entitas asosiasi, joint venture, dan special purpose vehicle (SPV).	√	Diagram of corporate group structure involving relationship of the parent company, subsidiary, associated entity, joint venture, and special purpose vehicle (SPV).
12. Kronologi penerbitan saham (termasuk private placement) dan/atau pencatatan saham dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	110	12. Chronology of share listing (including private placement) and/or share listing from the share issuance up to the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Tahun penerbitan saham, jumlah saham, nilai nominal saham, dan harga penawaran saham untuk masing-masing tindakan korporasi (corporate action);	√	1. Year of share issuance, number of shares issued, par value, and share offer price, for each separate corporate action;
2. Jumlah saham tercatat setelah masing-masing tindakan korporasi (corporate action); dan	√	2. Total number of shares outstanding following the corporate action; and
3. Nama bursa dimana saham perusahaan dicatatkan.	√	3. The stock exchange where the shares are listed.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi pencatatan saham, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have the chronology of share listing.
13. Kronologi penerbitan dan/atau pencatatan efek lainnya dari awal penerbitan sampai dengan akhir tahun buku	111-114	13. Chronology of other securities issuance and/or listing from the time of issuance up until the end of the fiscal year
Mencakup antara lain:		Covers, among others:
1. Nama efek lainnya, tahun penerbitan efek lainnya, tingkat bunga/imbalan efek lainnya, dan tanggal jatuh tempo efek lainnya;	√	1. Name of security instrument, year of issuance, interest rate/yield of securities, and maturity date;
2. Nilai penawaran efek lainnya;	√	2. Offering price of other securities;
3. Nama bursa dimana efek lainnya dicatatkan; dan	√	3. The stock exchange where the securities are listed; and
4. Peringkat efek.	√	4. Rating of securities.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki kronologi penerbitan dan pencatatan efek lainnya, agar diungkapkan		Note: should be disclosed if the company does not have chronology of other securities issuance/listing
14. Nama dan alamat lembaga dan/atau profesi penunjang	131-133	14. Name and address of supporting institutions and/or professionals
Informasi memuat antara lain:		Covers, among others:
1. Nama dan alamat BAE/pihak yang mengadministrasikan saham perusahaan;	√	1. Name and address of the company's Share Registrar;
2. Nama dan alamat Kantor Akuntan Publik; dan	√	2. Name and address of Public Accountant Firm; and
3. Nama dan alamat perusahaan pemeringkat efek.	√	3. Name and address of rating agencies.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
15. Penghargaan yang diterima dalam tahun buku terakhir dan/ atau sertifikasi yang masih berlaku dalam tahun buku terakhir baik yang berskala nasional maupun internasional	26-29	15. Awards received during the fiscal year, or valid certification in the fiscal year, at both national and international levels
Informasi memuat antara lain:	√	Covers, among others:
1. Nama penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	1. Name of award and/or certification;
2. Tahun perolehan penghargaan dan/atau sertifikasi;	√	2. Year received/issued;
3. Badan pemberi penghargaan dan/atau sertifikasi; dan	√	3. Name of institution that issued the award/certification; and
4. Masa berlaku (untuk sertifikasi).	√	4. Validity period (certification).
16. Nama dan alamat entitas anak dan/atau kantor cabang atau kantor perwakilan (jika ada)	115-126	16. Name and address of subsidiaries and/or branch offices or representative offices (if any)
Memuat informasi antara lain:		Covers information on:
1. Nama dan alamat entitas anak; dan	√	1. Name and address of subsidiaries; and
2. Nama dan alamat kantor cabang/perwakilan.	√	2. Name and address of branch/representative office.
Catatan: apabila perusahaan tidak memiliki entitas anak, kantor cabang, dan kantor perwakilan, agar diungkapkan		Note: should be disclosed if the company does not have a subsidiary, branch office or representative office.
17. Informasi pada Website Perusahaan	128-130	17. Information in the corporate website
Meliputi paling kurang:		Covers at the very least:
1. Informasi pemegang saham sampai dengan pemilik akhir individu;	√	1. Information of shareholders up to the individual ultimate shareholder;
2. Isi Kode Etik;	√	2. Contents of the Code of Conduct;
3. Informasi Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) paling kurang meliputi bahan mata acara yang dibahas dalam RUPS, ringkasan risalah RUPS, dan informasi tanggal penting yaitu tanggal pengumuman RUPS, tanggal pemanggilan RUPS, tanggal RUPS, tanggal ringkasan risalah RUPS diumumkan;	√	3. Information on the General Meeting of Shareholders (GMS), covering at least agenda of the GMS, the summary of GMS resolutions, and information of pertinent dates, namely the dates of GMS announcement, GMS invitation, GMS event, an announcement of summary GMS resolutions;
4. Laporan keuangan tahunan terpisah (5 tahun terakhir);	√	4. Annual financial statements (last 5 years);
5. Profil Dewan Komisaris dan Direksi; dan	√	5. Profiles of the Board of Commissioners and Directors; and
6. Piagam/Charter Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, dan Unit Audit Internal.	√	6. Board manual/Charter of the BoC. BoD, Committees and Internal Audit Unit.
18. Pendidikan dan/atau pelatihan Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite, Sekretaris Perusahaan, dan Unit Audit Internal	78-87, 231-232, 261-264, 276-279, 289,297	18. Training and education for Board of Commissioners, Board of Directors, Committees, Corporate Secretary, and Internal Audit Unit
Meliputi paling kurang informasi (jenis dan pihak yang relevan dalam mengikuti):	√	Cover at least information of type of training and participant of:
1. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Dewan Komisaris;	√	1. Training and/or education for Board of Commissioners;
2. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Direksi;	√	2. Training and/or education for Board of Directors;
3. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Audit;	√	3. Training and/or education for Audit Committee;
4. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Nominasi dan Remunerasi;	√	4. Training and/or education for Nomination and Remuneration Committee;
5. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Komite Lainnya;	√	5. Training and/or education for other Committee(s);
6. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Sekretaris Perusahaan; dan	√	6. Training and/or education for Corporate Secretary; and
7. Pendidikan dan/atau pelatihan untuk Unit Audit Internal. yang diikuti pada tahun buku.	√	7. Training and/or education for Internal Audit Unit. During the fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pendidikan dan/atau pelatihan pada tahun buku, agar diungkapkan		Note: should be disclosed if there are no training and/or education during the fiscal year

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
V. Analisa dan Pembahasan Manajemen atas Kinerja Perusahaan	138-187	V. Management Discussion and Analysis on the Company Performance
1. Tinjauan operasi per segmen usaha	141-151	1. Operation review per business segment
Memuat uraian mengenai:		Includes analysis on:
1. Penjelasan masing-masing segmen usaha.	√	1. Elaboration on each business segment.
2. Kinerja per segmen usaha, antara lain:	√	2. Performance of each business segment, among others:
a. Produksi;	√	a. Production;
b. Peningkatan/penurunan kapasitas produksi;	√	b. Increase/Decrease of production capacity;
c. Penjualan/pendapatan usaha; dan	√	c. Sales/income; and
d. Profitabilitas.	√	d. Profitability.
2. Uraian atas kinerja keuangan perusahaan	152-169	2. Description on the Company's financial performance
Analisis kinerja keuangan yang mencakup perbandingan antara kinerja keuangan tahun yang bersangkutan dengan tahun sebelumnya dan penyebab kenaikan/penurunan suatu akun (dalam bentuk narasi dan tabel), antara lain mengenai:		An analysis comparing the performance of the current year and that of the previous year (in the form of narration and tables) and the reasons for the increase/decrease of the accounts, including in:
1. Aset lancar, aset tidak lancar, dan total aset;	√	1. Current assets, non-current assets, and total assets;
2. Liabilitas jangka pendek, liabilitas jangka panjang dan total liabilitas;	√	2. Short-term liabilities, long-term liabilities, and total liabilities;
3. Ekuitas;	√	3. Equity;
4. Penjualan/pendapatan usaha, beban, laba (rugi), penghasilan komprehensif lain, dan penghasilan komprehensif periode berjalan; dan	√	4. Sales/operating revenues, expenses, Profit (Loss), other comprehensive income, comprehensive income for the current year; and
5. Arus kas.	√	5. Cash flows.
3. Bahasan dan analisis tentang kemampuan membayar utang dan tingkat kolektibilitas piutang perusahaan, dengan menyajikan perhitungan rasio yang relevan sesuai dengan jenis industri perusahaan	171	3. Discussion and analysis on solvability and level of the company receivables collectibility, by presenting relevant ratio calculation in line with the company's type of industry
Penjelasan tentang:		Explanation on:
1. Kemampuan membayar hutang, baik jangka pendek maupun jangka panjang; dan	√	1. Solvability, both short term and long term; and
2. Tingkat kolektibilitas piutang.	√	2. Level of receivables collectibility.
4. Bahasan tentang struktur modal (capital structure) dan kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policy)	171-172	4. Discussion on capital structure, and management policy on capital structure
Penjelasan atas:		Explanation of:
1. Rincian struktur modal (capital structure) yang terdiri dari utang berbasis bunga/sukuk dan ekuitas; dan	√	1. Details of capital structure comprising of interest- bearing debts/ sukuk and equity;
2. Kebijakan manajemen atas struktur modal (capital structure policies); dan	√	2. Capital structure policies; and
3. Dasar pemilihan kebijakan manajemen atas struktur modal.	√	3. Basis for the determination of capital structure policies.
5. Bahasan mengenai ikatan yang material untuk investasi barang modal (bukan ikatan pendanaan) pada tahun buku terakhir	173	5. Discussion on material commitments of capital investments (instead of funding commitments) in the last fiscal year
Penjelasan tentang:	√	Explanation on:
1. Nama pihak yang melakukan ikatan;	√	1. Parties in the commitments;
2. Tujuan dari ikatan tersebut;	√	2. Objectives of the commitments;
3. Sumber dana yang diharapkan untuk memenuhi ikatan-ikatan tersebut;	√	3. Sources of funds to meet the commitments;
4. Mata uang yang menjadi denominasi; dan	√	4. Denomination currency of commitments; and

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Langkah-langkah yang direncanakan perusahaan untuk melindungi risiko dari posisi mata uang asing yang terkait.	√	5. Initiatives taken to mitigate exchange rate risk.
Catatan: apabila perusahaan tidak mempunyai ikatan terkait investasi barang modal pada tahun buku terakhir agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if the company does not have any material commitment to capital investments in the fiscal year.
6. Bahasan mengenai investasi barang modal yang direalisasikan pada tahun buku terakhir	173-174	6. Discussion on capital investment realized at the latest financial year
Penjelasan tentang:	√	Explanation on:
1. Jenis investasi barang modal;	√	1. Type of capital investment;
2. Tujuan investasi barang modal; dan	√	2. Objectives of capital investment; and
3. Nilai investasi barang modal yang dikeluarkan pada tahun buku terakhir.	√	3. The nominal value of capital investment realized in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat realisasi investasi barang modal, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no capital investment.
7. Informasi perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi), dan target atau proyeksi yang ingin dicapai untuk satu tahun mendatang mengenai pendapatan, laba, dan lainnya yang dianggap penting bagi perusahaan.	174-176	7. Information on the comparison between initial target at the beginning of the financial year and the realization and target or the projection for the next year concerning income, profit, capital structure, and others considered a significant target for the company.
Informasi memuat antara lain:		Contain information on:
1. Perbandingan antara target pada awal tahun buku dengan hasil yang dicapai (realisasi); dan	√	1. Comparison of targets at the beginning of fiscal year and achievements; and
2. Target atau proyeksi yang ingin dicapai dalam 1 (satu) tahun mendatang.	√	2. Targets or projections set for the next 1 (one) year.
8. Informasi dan fakta material yang terjadi setelah tanggal laporan akuntan Uraian kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan termasuk dampaknya terhadap kinerja dan risiko usaha di masa mendatang.	177	8. Information and material facts following the date of accounting report (Subsequent events) Description of significant events following the date of accounting report including its impact on business risk and performance in the future.
Catatan: apabila tidak ada kejadian penting setelah tanggal laporan akuntan, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no subsequent events.
9. Uraian tentang prospek usaha perusahaan Uraian mengenai prospek perusahaan dikaitkan dengan industri dan ekonomi secara umum disertai data pendukung kuantitatif dari sumber data yang layak dipercaya.	185-187	9. Business prospects The description of on business prospects related to the general industry and economy including quantitative supporting data from reliable resources
10. Uraian tentang aspek pemasaran Uraian tentang aspek pemasaran atas produk dan/atau jasa perusahaan, antara lain strategi pemasaran dan pangsa pasar	183-184	10. Marketing aspects The description of on marketing aspects of the company's products and/or services, among others marketing strategy and market shares
11. Uraian mengenai kebijakan dividen dan jumlah dividen kas per saham dan jumlah dividen per tahun yang diumumkan atau dibayar selama 2 (dua) tahun buku terakhir	177	11. The description of on dividend policy and total cash dividend per share and total dividend per year that are published or disbursed during last 2 (two) financial years
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Kebijakan pembagian dividen;	√	1. Dividend payout policy;
2. Total dividen yang dibagikan;	√	2. Total dividend disbursement;
3. Jumlah dividen kas per saham;	√	3. Total cash dividend per share;
4. Payout ratio; dan	√	4. Payout ratio; and
5. Tanggal pengumuman dan pembayaran dividen kas. untuk masing-masing tahun.	√	5. Announcement date and cash dividend payout for each year.
Catatan: apabila tidak ada pembagian dividen, agar diungkapkan alasannya.		Note: To disclose if there are no dividend disbursement and its reasons.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
12. Program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen yang dilaksanakan perusahaan (ESOP/MSOP) yang masih ada sampai tahun buku	178	12. Employee/Management Share Ownership Program (ESOP/ MSOP) still ongoing in the fiscal year
Memuat uraian mengenai:		Contain information on:
1. Jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya;	√	1. Number of ESOP/MSOP shares and its execution;
2. Jangka waktu;	√	2. Period;
3. Persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak; dan	√	3. Eligible employee/management; and
4. Harga exercise.	√	4. Exercise price.
Catatan: apabila tidak memiliki program dimaksud, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no such programs
13. Realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum (dalam hal perusahaan masih diwajibkan menyampaikan laporan realisasi penggunaan dana)	178	13. Realization of initial public offering proceeds (in the event of the company is obligated to submit the report)
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Total perolehan dana;	N/A	1. Total proceeds;
2. Rencana penggunaan dana;	N/A	2. Proceeds utilization plan;
3. Rincian penggunaan dana;	N/A	3. Proceeds utilization details;
4. Saldo dana; dan	N/A	4. Proceeds balance; and
5. Tanggal persetujuan RUPS/RUPO atas perubahan penggunaan dana (jika ada).	N/A	5. The date of GMS/GMB resolution on the change of proceeds utilization (if any).
Catatan: apabila tidak memiliki informasi realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no such information of realization of proceeds of public offering.
14. Informasi transaksi material yang mengandung benturan kepentingan dan/atau transaksi dengan pihak afiliasi	177	14. Material transaction information with conflict of interest and/or transaction with related parties Covers the following:
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Nama pihak yang bertransaksi dan sifat hubungan afiliasi;	√	1. Name of transacting parties and the nature of related parties;
2. Penjelasan mengenai kewajaran transaksi;	√	2. Description of the transaction fairness;
3. Alasan dilakukannya transaksi;	√	3. Transaction background;
4. Realisasi transaksi pada periode tahun buku terakhir;	√	4. Transaction realization at the last financial year;
5. Kebijakan perusahaan terkait dengan mekanisme review atas transaksi; dan	√	5. Company policy related with transaction review mechanism; and
6. Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait.	√	6. Compliance to relevant regulations and provisions.
Catatan: apabila tidak mempunyai transaksi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no transactions.
15. Uraian mengenai perubahan peraturan perundang-undangan terhadap perusahaan pada tahun buku terakhir	178-179	15. Description on changes in laws and regulations during the fiscal year that impacted on the company
Uraian memuat antara lain:		Covers information on:
1. Nama peraturan perundang-undangan yang mengalami perubahan; dan	√	1. Name of regulations; and
2. Dampaknya (kuantitatif dan/atau kualitatif) terhadap perusahaan (jika signifikan) atau pernyataan bahwa dampaknya tidak signifikan.	√	2. The impact (quantitative and/or qualitative) on the company, or statement of the insignificant impact
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan peraturan perundang-undangan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in the laws and regulations that have significant impacts
16. Uraian mengenai perubahan kebijakan akuntansi yang diterapkan perusahaan pada tahun buku terakhir	180-181	16. Description on the changes in accounting policy implemented by the company at the last financial year
Uraian memuat antara lain:	√	Descriptions include among others:
1. Perubahan kebijakan akuntansi;	√	1. Changes in accounting policy;

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Alasan perubahan kebijakan akuntansi; dan	√	2. Reasons for the change; and
3. Dampaknya secara kuantitatif terhadap laporan keuangan.	√	3. Quantitative impact on the financial statements
Catatan: apabila tidak terdapat perubahan kebijakan akuntansi pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: To disclose if there are no changes in accounting policies during the fiscal year
17. Informasi kelangsungan usaha Pengungkapan informasi mengenai:	182	17. Information on business continuity Disclosures on:
1. Hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir;	√	1. Significant issues on the company business continuity at the last financial year;
2. Assessment manajemen atas hal-hal pada angka 1; dan	√	2. Management assessment on point 1; and
3. Asumsi yang digunakan manajemen dalam melakukan assessment.	√	3. Assumption implemented by the management in conducting the assessment.
Catatan: apabila tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan asumsi yang mendasari manajemen dalam meyakini bahwa tidak terdapat hal-hal yang berpotensi berpengaruh signifikan terhadap kelangsungan usaha perusahaan pada tahun buku terakhir.		Note: if there are no issues that potentially have significant influences to the company's business continuity at the last financial year, to disclose the basis of management assumption in ensuring that there are no issues that potentially have significant influences on the company's business continuity at the last financial year.
VI. Good Corporate Governance	190-327	**VI. Good Corporate Governance**
1. Uraian Dewan Komisaris	213-215	1. Description on the Board of Commissioners
Uraian memuat antara lain:		Covers the following:
1. Uraian tanggung jawab Dewan Komisaris;	√	1. Board of Commissioners responsibilities;
2. Penilaian atas kinerja masing-masing komite yang berada di bawah Dewan Komisaris dan dasar penilaiannya; dan	√	2. Assessment of performance of committees under the Board and the basis for such assessment; and
3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Dewan Komisaris).	√	3. Board Charter disclosures (Board of Commissioners work guidelines and procedures)
2. Komisaris Independen (jumlahnya minimal 30% dari total Dewan Komisaris)	219-220	2. Independent Commissioners (at least 30% of the total personnel of the Board of Commissioners)
Meliputi antara lain:		Covers the following:
1. Kriteria penentuan Komisaris Independen; dan	√	1. Assignment criteria of Independent Commissioners; and
2. Pernyataan tentang independensi masing-masing Komisaris Independen.	√	2. Independence statement of each Independent Commissioner.
3. Uraian Direksi	221-232	3. Description on the Board of Directors
Uraian memuat antara lain:		Covers information on, among others:
1. Ruang lingkup pekerjaan dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi;	√	1. Duties and responsibilities of each member of the Board of Directors;
2. Penilaian atas kinerja komite-komite yang berada di bawah Direksi (jika ada); dan	√	2. Assessment of performance of committees under the Board (if any); and
3. Pengungkapan mengenai Board Charter (pedoman dan tata tertib kerja Direksi).	√	3. Board Charter disclosures (Board of Directors work guidelines and procedures)
4. Penilaian Penerapan GCG untuk tahun buku 2015 yang meliputi paling kurang aspek Dewan Komisaris dan Direksi	233-236	4. GCG implementation assessment for 2015, at least for aspects of the Board of Commissioners and/or Board of Directors
Memuat uraian mengenai:		Covers the following:
1. Kriteria yang digunakan dalam penilaian;	√	1. Assessment criteria;
2. Pihak yang melakukan penilaian;	√	2. Assessor;
3. Skor penilaian masing-masing kriteria;	√	3. Assessment score on each criteria;

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
4. Rekomendasi hasil penilaian; dan	√	4. Recommendations on results of assessment; and
5. Alasan belum/tidak diterapkannya rekomendasi.		5. Reasons for the delay or non implementation of such recommendations.
Catatan: apabila tidak ada penilaian penerapan GCG untuk tahun buku 2015, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no GCG assessment for fiscal 2015.
5. Uraian mengenai kebijakan remunerasi bagi Dewan Komisaris dan Direksi	237-238	5. Description of the remuneration policy for the Board of Commissioners and Board of Directors
Mencakup antara lain:		Covers the following:
1. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Dewan Komisaris;	√	1. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Commissioners;
2. Pengungkapan prosedur pengusulan sampai dengan penetapan remunerasi Direksi;	√	2. Disclosure of procedure for the proposal and determination of remuneration for the Board of Directors;
3. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Dewan Komisaris;	√	3. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Commissioners;
4. Struktur remunerasi yang menunjukkan komponen remunerasi dan jumlah nominal per komponen untuk setiap anggota Direksi;	√	4. Remuneration structure showing the remuneration components and amounts per component for each member of the Board of Directors;
5. Pengungkapan indikator untuk penetapan remunerasi Direksi; dan	√	5. Disclosure of indicators for the remuneration of the Board of Directors; and
6. Pengungkapan bonus kinerja, bonus non kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi (jika ada).	√	6. Disclosure of performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors (if any).
Catatan: apabila tidak terdapat bonus kinerja, bonus non kinerja, dan opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no performance bonus, non-performance bonus, and/or share option received by each members of the Board of Commissioners and Directors.
6. Frekuensi dan Tingkat Kehadiran Rapat yang dihadiri mayoritas anggota pada rapat Dewan Komisaris (minimal 1 kali dalam 2 bulan), Rapat Direksi (minimal 1 kali dalam 1 bulan), dan Rapat Gabungan Dewan Komisaris dengan Direksi (minimal 1 kali dalam 4 bulan)	239-247	6. Meeting frequency and attendance of Board of Commissioners (at least once in 2 months), Board of Directors (at least once in a month), and joint meetings of BoC and BoD (at least once in 4 months)
Informasi memuat antara lain:		Covers among others:
1. Tanggal Rapat;	√	1. Date;
2. Peserta Rapat; dan	√	2. Attendance; and
3. Agenda Rapat. untuk masing-masing rapat Dewan Komisaris, Direksi, dan rapat gabungan.	√	3. Agenda. Of each of the meetings of BoC, BoD and Joint Meetings of BoC and BoD.
7. Informasi mengenai pemegang saham utama dan pengendali, baik langsung maupun tidak langsung, sampai kepada pemilik individu. Dalam bentuk skema atau diagram yang memisahkan pemegang saham utama dengan pemegang saham pengendali.	202	7. Information on majority and controlling shareholders, direct or indirect, up to the ultimate individual shareholder. Diagram with separate illustration for majority shareholders and controlling shareholders
Catatan: yang dimaksud pemegang saham utama adalah pihak yang, baik secara langsung maupun tidak langsung, memiliki sekurang-kurangnya 20% (dua puluh perseratus) hak suara dari seluruh saham yang mempunyai hak suara yang dikeluarkan oleh suatu Perseroan, tetapi bukan pemegang saham pengendali.	√	Note: majority shareholders are parties that own, directly or indirectly, at least 20% of the voting rights of the total share with voting rights issued by the company, but is not the controlling shareholder
8. Pengungkapan hubungan afiliasi antara anggota Direksi, Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama dan/atau pengendali	248	8. Disclosure of affiliation between members of the Board of Directors, Board of Commissioners and Majority/Controlling Shareholders
Mencakup antara lain:		Covers, among others:

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
1. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan anggota Direksi lainnya;	√	1. The affiliation between a member of the Board of Directors with fellow members of the Board of Directors;
2. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris;	√	2. The affiliation between a member of the Board of Directors with members of the Board of Commissioners;
3. Hubungan afiliasi antara anggota Direksi dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali;	√	3. The affiliation between a member of the Board of Directors with Majority and/or Controlling Shareholder;
4. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan anggota Komisaris lainnya; dan	√	4. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with fellow members of the Board of Commissioners; and
5. Hubungan afiliasi antara anggota Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali.	√	5. The affiliation between a member of the Board of Commissioners with Majority and/or Controlling Shareholder.
Catatan: apabila tidak mempunyai hubungan afiliasi dimaksud, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there is no affiliation relationship
9. Komite Audit	249-264	9. Audit Committee
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama, jabatan, dan periode jabatan anggota komite audit;	√	1. Name, position and tenure of audit committee members;
2. Riwayat pendidikan (Bidang Studi dan Lembaga Pendidikan) dan pengalaman kerja (Jabatan, Instansi, dan Periode Menjabat) anggota komite audit;	√	2. Education qualifications (study field and institution) and work experience (position, company and tenure) of audit committee members;
3. Independensi anggota komite audit;	√	3. Independency of audit committee members;
4. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	4. Duties and responsibilities;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan komite audit pada tahun buku; dan	√	5. Brief report of audit committee activity; and
6. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite audit.	√	6. Meeting frequency and attendance of audit committee.
10. Komite Nominasi dan/atau Remunerasi	265-279	10. Nomination and/or Remuneration Committee
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite nominasi dan/atau remunerasi;	√	1. Name, position and brief profiles of members of the Nomination and/or Remuneration Committee;
2. Independensi komite nominasi dan/atau remunerasi;	√	2. Independency of Nomination and/or Remuneration Committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	√	3. Duties and responsibilities ;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite nominasi dan/ atau remunerasi pada tahun buku;	√	4. Brief report of committee activity in the fiscal year;
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite nominasi dan/atau remunerasi;	√	5. Meeting frequency and attendance;
6. Pernyataan adanya pedoman komite nominasi dan/atau remunerasi; dan	√	6. Statement of committee charter; and
7. Kebijakan mengenai suksesi Direksi.	√	7. Policies on Director succession.
11. Komite-komite lain di bawah Dewan Komisaris yang dimiliki oleh perusahaan	N.A	11. Other committees under the Board of Commissioners
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Nama, jabatan, dan riwayat hidup singkat anggota komite lain;	N.A	1. Name, position and brief profile of members of committee;
2. Independensi komite lain;	N.A	2. Independency of committee;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab;	N.A	3. Duties and responsibilities ;
4. Uraian pelaksanaan kegiatan komite lain pada tahun buku; dan	N.A	4. Committee activity in the fiscal year; and

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
5. Frekuensi pertemuan dan tingkat kehadiran komite lain.	N.A	5. Committee meeting frequency and attendance.
12. Uraian tugas dan Fungsi Sekretaris Perusahaan	290-297	12. Description of duties and functions of Corporate Secretary
Mencakup antara lain:		Information on, among others:
1. Nama, dan riwayat jabatan singkat sekretaris perusahaan;	√	1. Name and brief work experience of Corporate Secretary;
2. Domisili;	√	2. Domicile;
3. Uraian tugas dan tanggung jawab; dan	√	3. Duties and responsibilities; and
4. Uraian pelaksanaan tugas sekretaris perusahaan pada tahun buku.	√	4. Report of activities of Corporate Secretary in the fiscal year.
13. Uraian mengenai unit audit internal	280-289	13. Description on Internal Audit Unit
Mencakup antara lain:	√	Includes the following:
1. Nama ketua unit audit internal;	√	1. Name of internal audit unit head;
2. Jumlah pegawai (auditor internal) pada unit audit internal;	√	2. Total employees (internal auditors) in internal audit unit;
3. Sertifikasi sebagai profesi audit internal;	√	3. Certification on internal audit profession;
4. Kedudukan unit audit internal dalam struktur perusahaan;	√	4. Internal audit unit composition in the company's structure;
5. Uraian pelaksanaan kegiatan unit audit internal pada tahun buku; dan	√	5. Brief report on internal audit unit activity implementation; and
6. Pihak yang mengangkat dan memberhentikan ketua unit audit internal.	√	6. The parties responsible to appoint/terminate the internal audit unit head.
14. Akuntan Publik	298-299	14. Public Accountant
Informasi memuat antara lain:		Includes the following:
1. Nama dan tahun akuntan publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	1. Name and year of the public accountant that audits the annual financial statements in the last 5 years;
2. Nama dan tahun Kantor Akuntan Publik yang melakukan audit laporan keuangan tahunan selama 5 tahun terakhir;	√	2. Name and year of Public Accountant Firm that audits the annual financial statements in the last 5 years;
3. Besarnya fee untuk masing-masing jenis jasa yang diberikan oleh Kantor Akuntan Publik pada tahun buku terakhir; dan	√	3. The amount of fee for each service provided by public accountant at the last financial year; and
4. Jasa lain yang diberikan Kantor Akuntan Publik dan akuntan publik selain jasa audit laporan keuangan tahunan pada tahun buku terakhir.	√	4. Other services provided by the accountant apart from the audit service of annual financial statements at the last financial year.
Catatan: apabila tidak ada jasa lain dimaksud, agar diungkapkan.		Note: to disclose if there are no other services rendered
15. Uraian mengenai manajemen risiko perusahaan	300-307	15. Description on risk management of the company
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan mengenai sistem manajemen risiko yang diterapkan perusahaan;	√	1. Explanation on risk management system implemented by the company;
2. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas sistem manajemen risiko pada tahun buku;	√	2. Explanation on risk management system effectiveness evaluation;
3. Penjelasan mengenai risiko-risiko yang dihadapi perusahaan; dan	√	3. Explanation on risks faced by the company; and
4. Upaya untuk mengelola risiko tersebut.	√	4. Risk mitigation.
16. Uraian mengenai sistem pengendalian intern	308-310	16. Description of internal control system
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Penjelasan singkat mengenai sistem pengendalian intern, antara lain mencakup pengendalian keuangan dan operasional;	√	1. Brief explanation on internal control system, among others on financial and operational control;

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Penjelasan kesesuaian sistem pengendalian intern dengan kerangka yang diakui secara internasional (COSO – internal control framework); dan	√	2. Explanation on internal control system alignment with international standard framework (COSO – internal control framework); and
3. Penjelasan mengenai hasil reviu yang dilakukan atas pelaksanaan sistem pengendalian intern pada tahun buku.	√	3. Explanation on internal control system effectiveness evaluation.
17. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan lingkungan hidup	334-341	17. Description on corporate social responsibility related to environmental
Mencakup antara lain informasi tentang:		Covers information on, among others:
1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen;	√	1. Activity target/plans by the Management for 2016;
2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut; dan terkait program lingkungan hidup yang berhubungan dengan kegiatan operasional perusahaan, seperti penggunaan material dan energi yang ramah lingkungan dan dapat didaur ulang, sistem pengolahan limbah perusahaan, mekanisme pengaduan masalah lingkungan, pertimbangan aspek lingkungan dalam pemberian kredit kepada nasabah, dan lain-lain.	√	2. Activities conducted and the quantitative impact of such activities; including environmental programs related to the company's operational activities such as utilization of environment-friendly materials and energy or recycled materials, waste management system, complaint handling of environmental issues, green lending, and others
3. Sertifikasi di bidang lingkungan yang dimiliki.	√	3. Environmental certifications.
18. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja	342-345	18. Description on corporate social responsibility related to occupational, health and safety
Mencakup antara lain informasi tentang:		Covers information on, among others:
1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen; dan	√	1. Activity target/plans by the Management for 2016; and
2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak kuantitatif atas kegiatan tersebut terkait praktik ketenagakerjaan, kesehatan, dan keselamatan kerja, seperti kesetaraan gender dan kesempatan kerja, sarana dan keselamatan kerja, tingkat turnover karyawan, tingkat kecelakaan kerja, remunerasi, mekanisme pengaduan masalah ketenagakerjaan, dan lain-lain.	√	2. Activities conducted and quantitative impact of such activities related to occupational, heath and safety aspects, such as gender equality and equal work opportunity, work health and safety equipment, employee turnover rate, accident rate, remuneration, complaint handling of work-related issues, and others.
19. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan pengembangan sosial dan kemasyarakatan	346-347	19. Description on corporate social responsibility related to social and community development
Mencakup antara lain informasi tentang:		Covers information on, among others:
1. Target/rencana kegiatan pada tahun 2016 yang ditetapkan manajemen;	√	1. Activity target/plans by the Management for 2016;
2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut; dan	√	2. Activities conducted and impact of such activities; and
3. Biaya yang dikeluarkan terkait pengembangan sosial dan kemasyarakatan, seperti penggunaan tenaga kerja lokal, pemberdayaan masyarakat sekitar perusahaan, perbaikan sarana dan prasarana sosial, bentuk donasi lainnya, komunikasi mengenai kebijakan dan prosedur anti korupsi, pelatihan mengenai anti korupsi, dan lain-lain.	√	3. Cost expended related to social and community development activities such as recruitment of local manpower, community development, donation in improvement to public facilities and infrastructure, other social donations, communications on anti-corruption policies and procedures, training on anti- corruption, and others.
20. Uraian mengenai corporate social responsibility yang terkait dengan tanggung jawab kepada konsumen	348-350	20. Description on corporate social responsibility related to responsibility to consumers
Mencakup antara lain:		Covers information on, among others:
1. Target/rencana kegiatan yang pada tahun 2016 ditetapkan manajemen; dan	√	1. Activity target/plans by the Management for 2016; and
2. Kegiatan yang dilakukan dan dampak atas kegiatan tersebut terkait tanggung jawab produk, seperti kesehatan dan keselamatan konsumen, informasi produk, sarana, jumlah dan penanggulangan atas pengaduan konsumen, dan lain-lain.	√	2. Activities conducted and impact of such activities related to product responsibility, such as consumers health and safety, product information, facility, total and handling of consumers claims, and so forth.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
21. Perkara penting yang sedang dihadapi oleh perusahaan, entitas anak, serta anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi yang menjabat pada periode laporan tahunan	311-316	21. Significant litigation currently faced by the company, subsidiaries, and members of the Board of Commissioners and Board of Directors that served the position at the annual report period
Mencakup antara lain:		Includes the following:
1. Pokok perkara/gugatan;	√	1. The principal litigation/claims;
2. Status penyelesaian perkara/gugatan;	√	2. Settlement status of litigation/claims;
3. Risiko yang dihadapi perusahaan dan nilai nominal tuntutan/gugatan; dan	√	3. Impact to the company's condition; and
4. Sanksi administrasi yang dikenakan kepada perusahaan, anggota Dewan Komisaris dan Direksi, oleh otoritas terkait (pasar modal, perbankan dan lainnya) pada tahun buku terakhir (atau terdapat pernyataan bahwa tidak dikenakan sanksi administrasi).	√	4. Administration sanctions charged to the company, members of the Board of Commissioners and Board of Directors, by relevant authorities (capital market, banking and others) at the last fiscal year (or a statement of no administration sanction being charged)
Catatan: dalam hal perusahaan, entitas anak, anggota Dewan Komisaris, dan anggota Direksi tidak memiliki perkara penting, agar diungkapkan.		Note: in the case of an Corporate, a subsidiary, a member of the Board of Commissioners, and a member of the Board of Directors has no important case to disclose.
22. Akses informasi dan data perusahaan Uraian mengenai tersedianya akses informasi dan data perusahaan kepada publik, misalnya melalui website (dalam bahasa Indonesia dan bahasa Inggris), media massa, mailing list, buletin, pertemuan dengan analis, dan sebagainya.	316-317	22. Access to company information and data Description on the availability of company information and data for public access, including dissemination through company website (in Bahasa and English), mass media, mailing list, bulletin, analyst gatherings, and others.
23. Bahasan mengenai kode etik	318-320	23. Discussion on code of conduct
Memuat uraian antara lain:		Includes the following:
1. Pokok-pokok kode etik;	√	1. Contents of Code of Conduct;
2. Pengungkapan bahwa kode etik berlaku bagi seluruh level organisasi;	√	2. Disclosure of code of conduct application in all level of organization;
3. Penyebarluasan kode etik;	√	3. Code of conduct dissemination;
4. Sanksi untuk masing-masing jenis pelanggaran yang diatur dalam kode etik (normatif); dan	√	4. Sanctions on code of conduct violations; and
5. Jumlah pelanggaran kode etik beserta sanksi yang diberikan pada tahun buku terakhir.	√	5. Number of violation and sanction in the last fiscal year.
Catatan: apabila tidak terdapat pelanggaran kode etik pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there are no violations of code of conduct in the last fiscal year.
24. Pengungkapan mengenai whistleblowing system	321-325	24. Disclosure on whistleblowing system
Memuat uraian tentang mekanisme whistleblowing system antara lain:		Includes the following mechanism of whistleblowing system:
1. Penyampaian laporan pelanggaran;	√	1. Violations report submission;
2. Perlindungan bagi whistleblower;	√	2. Whistleblowers protection;
3. Penanganan pengaduan;	√	3. Claims handling;
4. Pihak yang mengelola pengaduan; dan	√	4. Claims managers; and
5. Jumlah pengaduan yang masuk dan diproses pada tahun buku terakhir; dan	√	5. Total claims registered; and
6. Sanksi/tindak lanjut atas pengaduan yang telah selesai diproses pada tahun buku.	√	6. Sanctions/report processed at the last fiscal year including its follow up measures.
Catatan: apabila tidak terdapat pengaduan yang masuk dan telah selesai diproses pada tahun buku terakhir, agar diungkapkan.		Note: should be disclosed if there is no report and follow up action in the last fiscal year.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
25. Kebijakan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi Uraian kebijakan tertulis Perusahaan mengenai keberagaman komposisi Dewan Komisaris dan Direksi dalam pendidikan (bidang studi), pengalaman kerja, usia, dan jenis kelamin.	326	25. Diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors Composition Description of written policy regarding diversity of the Board of Commissioners and Board of Directors composition regarding education, work experience, age, and gender
Catatan: apabila tidak ada kebijakan dimaksud, agar diungkapkan alasan dan pertimbangannya.		Note: to disclose the reasons and considerations, if there is no policy applieda
VII. Informasi Keuangan	387-506	**VII. Financial Information**
1. Surat Pernyataan Direksi dan/atau Dewan Komisaris tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan		1. Board of Directors and/or Board of Commissioners' Statements regarding the Responsibility for the Financial Statements
Kesesuaian dengan peraturan terkait tentang Tanggung Jawab atas Laporan Keuangan.		Conformity with related regulations regarding the Financial Statements Responsibility
2. Opini auditor independen atas laporan keuangan		2. Independent auditor opinion on financial statements
3. Deskripsi Auditor Independen di Opini	392	3. Independent Auditor Description in the Opinion
Deskripsi memuat tentang:		Description contains the following:
1. Nama dan tanda tangan;	√	1. Name & signatures;
2. Tanggal Laporan Audit; dan	√	2. Audit Report date; and
3. Nomor ijin KAP dan nomor ijin Akuntan Publik.	√	3. License of Public Accountant Firm and license of Public Accountant
4. Laporan keuangan yang lengkap	393-506	4. Comprehensive financial statements
Memuat secara lengkap unsur-unsur laporan keuangan:		Comprehensively covers the financial statements elements:
1. Laporan posisi keuangan;	√	1. Statements of financial position;
2. Laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain;	√	2. Statements of comprehensive income and other comprehensive income;
3. Laporan perubahan ekuitas;	√	3. Statements of changes in equity;
4. Laporan arus kas;	√	4. Statements of cash flows;
5. Catatan atas laporan keuangan;	√	5. Notes to financial statements;
6. Informasi komparatif mengenai periode sebelumnya; dan	√	6. Comparative information on previous periods; and
7. Laporan posisi keuangan pada awal periode sebelumnya ketika entitas menerapkan suatu kebijakan akuntansi secara retrospektif atau membuat penyajian kembali pos-pos laporan keuangan, atau ketika entitas mereklasifikasi pos-pos dalam laporan keuangannya (jika relevan).	√	7. Statements of financial position at the beginning of previous periods upon the application of retrospective accounting policy by the entity or representation of financial statements postings, or reclassifications of postings in the financial statements (if relevant).
5. Perbandingan tingkat profitabilitas Perbandingan kinerja/laba (rugi) tahun berjalan dengan tahun sebelumnya	396-397	5. Profitability level comparison Comparison of current profit (loss) with the previous year
6. Laporan Arus Kas	399	6. Statements of Cash Flows
Memenuhi ketentuan sebagai berikut:		Conformity to the following provisions:
1. Pengelompokan dalam tiga kategori aktivitas: operasi, investasi, dan pendanaan;	√	1. Grouping into three category of activities of operations, investment, and financing;
2. Penggunaan metode langsung (direct method) untuk melaporkan arus kas dari aktivitas operasi;	√	2. Direct method application in the statements of cash flows from operations activity;
3. Pemisahan penyajian antara penerimaan kas dan atau pengeluaran kas selama tahun berjalan pada aktivitas operasi, investasi dan pendanaan; dan	√	3. Separation of presentation between cash in and or cash out during current year in the operation, investment and financing activities;
4. Pengungkapan transaksi non kas harus dicantumkan dalam catatan atas laporan keuangan.	√	4. Disclosure of non cash transaction shall be stated in the notes to financial statements.

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
7. Ikhtisar Kebijakan Akuntansi	405-435	7. Summary of accounting policies
Meliputi sekurang-kurangnya:		Including at least:
1. Pernyataan kepatuhan terhadap SAK;	√	1. Compliance statement to SAK;
2. Dasar pengukuran dan penyusunan laporan keuangan;	√	2. Basis of measurement and formulation of financial statements;
3. Pajak penghasilan;	√	3. Recognition of income and expense;
4. Imbalan kerja; dan	√	4. Employee benefits; and
5. Instrumen Keuangan.	√	5. Financial instrument.
8. Pengungkapan transaksi pihak berelasi	485-486	8. Disclosure of related parties transactions
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Nama pihak berelasi, serta sifat dan hubungan dengan pihak berelasi;	√	1. Name of related parties, and the nature and relationship with related parties;
2. . Nilai transaksi beserta persentasenya terhadap total pendapatan dan beban terkait; dan	√	2. Transaction values and its percentage to total income and expense; and
3. Jumlah saldo beserta persentasenya terhadap total aset atau liabilitas terkait.	√	3. Total balance and its percentage to total assets or liabilities.
9. Pengungkapan yang berhubungan dengan perpajakan	446-454	9. Disclosure related to taxes
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rekonsiliasi fiskal dan perhitungan beban pajak kini;	√	1. Fiscal reconciliation and current tax expense calculation;
2. Penjelasan hubungan antara beban (penghasilan) pajak dan laba akuntansi;	√	2. Explanation of relationship between tax expenses (income) and accounting profit;
3. Pernyataan bahwa Laba Kena Pajak (LKP) hasil rekonsiliasi dijadikan dasar dalam pengisian SPT Tahunan PPh Badan tahun 2016;	√	3. Statement that Taxable Income as a result of reconciliation is use as the basis in completing the 2016 Annual corporate income tax return;
4. Rincian aset dan liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan untuk setiap periode penyajian, dan jumlah beban (penghasilan) pajak tangguhan yang diakui pada laporan laba rugi apabila jumlah tersebut tidak terlihat dari jumlah aset atau liabilitas pajak tangguhan yang diakui pada laporan posisi keuangan; dan	√	4. The details of deferred tax assets and liabilities recognized in the financial position statements for every presentation period, and total deferred tax expenses (income) recognized in the income statements if the total are not visible from the total deferred tax assets or liabilities recognized in the financial position statements; and
5. Pengungkapan ada atau tidak ada sengketa pajak.	√	5. Disclosure of availability or un-availability of tax disputes.
10. Pengungkapan yang berhubungan dengan aset tetap	458-460	10. Disclosure related to fixed assets
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Metode penyusutan yang digunakan;	√	1. Used depreciation method;
2. Uraian mengenai kebijakan akuntansi yang dipilih antara model revaluasi dan model biaya;	√	2. Description on accounting policies selected between revaluation model and cost model;
3. Metode dan asumsi signifikan yang digunakan dalam mengestimasi nilai wajar aset tetap (untuk model revaluasi) atau pengungkapan nilai wajar aset tetap (untuk model biaya); dan	√	3. Significant methods and assumptions used in estimation of fixed assets fair value (for revaluation model) or disclosure of fixed assets fair value (for cost model); and
4. Rekonsiliasi jumlah tercatat bruto dan akumulasi penyusutan aset tetap pada awal dan akhir periode dengan menunjukkan: penambahan, pengurangan dan reklasifikasi.	√	4. Reconciliation of gross total recorded and accumulation of fixed assets depreciation at the beginning and end of period by presenting: addition, deduction and reclassification.
11. Pengungkapan yang berhubungan dengan segmen operasi	487-489	11. Disclosure related to operations segments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Informasi umum yang meliputi faktor-faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan;	√	1. General information covering factors used to identify reported segments;

KRITERIA ANNUAL REPORT AWARD 2016

2016 Annual Report Award Criteria

Keterangan	Halaman Page	Description
2. Informasi tentang laba rugi, aset, dan liabilitas segmen yang dilaporkan;	√	2. Information on segment's reported profit loss, assets, and liabilities;
3. Rekonsiliasi dari total pendapatan segmen, laba rugi segmen yang dilaporkan, aset segmen, liabilitas segmen, dan unsur material segmen lainnya terhadap jumlah terkait dalam entitas; dan	√	3. Reconciliation of segment's total revenues, segment's reported profit loss, segment's assets, segment's liabilities, and segment's other material elements to related total in entity; and
4. Pengungkapan pada level entitas, yang meliputi informasi tentang produk dan/atau jasa, wilayah geografis dan pelanggan utama.	√	4. Disclosure of entity level, which covers information on products and/or services, geographic areas and main customers.
12. Pengungkapan yang berhubungan dengan Instrumen Keuangan	498-505	12. Disclosure related to Financial Instruments
Hal-hal yang harus diungkapkan:		The disclosures shall includes:
1. Rincian instrumen keuangan yang dimiliki berdasarkan klasifikasinya;	√	1. Financial instrument classification;
2. Nilai wajar dan hirarkinya untuk setiap kelompok instrumen keuangan;	√	2. Fair value of every financial instrument group;
3. Penjelasan risiko yang terkait dengan instrumen keuangan: risiko pasar, risiko kredit dan risiko likuiditas;	√	5. Explanation on risks related to financial instrument: market risk, credit risk and liquidity risk;
4. Kebijakan manajemen risiko; dan	√	4. Risk management objectives and policies; and
5. Analisis risiko yang terkait dengan instrumen keuangan secara kuantitatif.	√	5. Risk analysis related to financial instrument in quantitative way.
13. Penerbitan laporan keuangan	506	13. Financial statements publication
Hal-hal yang diungkapkan antara lain:		The disclosures includes:
1. Tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit; dan	√	1. Date of financial statements authorized for publication; and
2. Pihak yang bertanggung jawab mengotorisasi laporan keuangan.	√	2. Parties responsible to authorize the financial statements.

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN

Consolidated Financial Report

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultans
Registered Public Accountant

International member of Antea

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA / ITS *SUBSIDIARIES*
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN
INDEPENDENT AUDITORS' REPORT
DAN / *AND*
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN /
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS

Tanggal 31 Desember 2017 dan
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan
1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Disajikan Kembali, dan
untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative as of December 31, 2016 and
January 1, 2016/December 31, 2015 - Restated, and
for the Year Ended December 31, 2016 - Restated)

Nomor / *Number* : DSI.IS/HO/045.PELNI-LAI/18
Tanggal / *Date* : 05 April / *April*, 2018

HEAD OFFICE:
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

DAFTAR ISI

TABLE OF CONTENTS

	Halaman/ *Pages*	
SURAT PERNYATAAN DIREKSI		***MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER***
LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN	i - iv	***INDEPENDENT AUDITORS' REPORT***
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAKNYA		***CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) AND ITS SUBSIDIARIES***
Laporan Posisi Keuangan (Neraca) Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Disajikan Kembali)	1 - 2	*Consolidated Statements of Financial Position (Balance Sheets) as of December 31, 2017 (With Comparative as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015 - Restated)*
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lainnya Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)	3	*Consolidated Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income for the Year Ended December 31, 2017 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2016 - Restated)*
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)	4 - 5	*Consolidated Statements of Changes in Equity for the Year Ended December 31, 2017 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2016 - Restated)*
Laporan Arus Kas Konsolidasian untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017 (Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)	6	*Consolidated Statements of Cash Flows for the Year Ended December 31, 2017 (With Comparative for the Year Ended December 31, 2016 - Restated)*
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut - Disajikan Kembali)	7 - 158	*Notes to Consolidated Financial Statements as of December 2017 and for the Year Then Ended (With Comparative as of December 31, 2016 and for the Year Then Ended - Restated)*
Informasi Tambahan:		***Additional Information:***
LAPORAN KEUANGAN POKOK PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Informasi Keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri) Tanggal 31 Desember 2017 dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut (Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015, dan untuk Tahun yang Berakhir Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)		***FINANCIAL STATEMENTS OF PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) (Financial Information - Parent Entity Only, As a Separate Financial Statements)*** *As of December 31, 2017 and for the Year Then Ended (With Comparative as of December 31, 2016 and January 1, 2016/December 31, 2015, and for the Year Ended December 2016 - Restated)*
● Laporan Posisi Keuangan (Neraca) - Induk Saja	1 - 2	● *Statements of Financial Position (Balance Sheets) - Parent Only*
● Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain - Induk Saja	3	● *Statements of Profit or Loss and Other Comprehensive Income - Parent Only*
● Laporan Perubahan Ekuitas - Induk Saja	4	● *Statements of Changes in Equity - Parent Only*
● Laporan Arus Kas - Induk Saja	5	● *Statement of Cash Flows - Parent Only*

SURAT PERNYATAAN MANAJEMEN/
MANAGEMENT REPRESENTATION LETTER

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (Persero)

SURAT PERNYATAAN DIREKSI
TENTANG
TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR TANGGAL 31 DESEMBER 2017
PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO) DAN ENTITAS ANAK

Kami yang bertandatangan di bawah ini :

1. Nama : Insan Purwarisya L Tobing
   Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Albezia VII C RT.005/RW.012 Cipinang, Pulo Gadung Jakarta Timur
   Jabatan : Direktur Utama
2. Nama : Tri Andayani
   Alamat Kantor : Jl. Gajah Mada No. 14 Jakarta 10130
   Alamat Domisili sesuai KTP : Jl. Serdang I No 46 Duren Sawit, Jakarta Timur
   Jabatan : Direktur Keuangan

Menyatakan bahwa :

1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017.
2. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak telah disusun dan disajikan sesuai dengan standar akuntansi keuangan di indonesia.
3. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak telah dimuat secara lengkap dan benar.
4. Laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material.
5. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian intern dalam PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan entitas anak.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Jakarta, 05 April 2018

METERAI TEMPEL 6000

Insan Purwarisya L Tobing
Direktur Utama

Tri Andayani
Direktur Keuangan

Kantor Pusat : JL. Gajah Mada No. 14 kode Pos : 10130
Telepon +62-21-6334342 (Hunting) Fax. +62-21-63854130 Call Center : (021) 162. http//www.pelni.co.id

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN/
INDEPENDENT ACCOUNTANT'S REPORT

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultants
Registered Public Accountant

International member of Antea

Nomor : DSI.IS/HO/045.PELNI-LAI/18 *: Number*

LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN

Pemegang Saham,
Dewan Komisaris dan Direksi
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, dan suatu ikhtisar kebijakan akuntansi signifikan dan informasi penjelasan lainnya. Kami juga melakukan pengujian atas kepatuhan perusahaan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Tanggung jawab manajemen atas laporan keuangan

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Manajemen juga bertanggung jawab atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian ini.

Tanggung jawab auditor

Tanggung jawab kami adalah untuk menyatakan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material berdasarkan audit kami. Kami melaksanakan audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia dan standar pemeriksaan yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Standar tersebut mengharuskan kami untuk mematuhi ketentuan etika serta merencanakan dan melaksanakan audit untuk memperoleh keyakinan memadahi bahwa laporan keuangan konsolidasian bebas dari kesalahan penyajian material, serta kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian terlampir.

INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT

The Shareholders,
Boards of Commissioners and Directors
PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero)

We have audited the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries attached, consisting of statement of financial position (balance sheet) the consolidated dated December 31, 2017, as well as the income statement and earnings other comprehensive consolidated statement of changes in consolidated shareholders' equity, and flows consolidated cash for the year ended on that date, and an overview of the significant accounting policies and other explanatory information. We also conduct tests of adherence to laws and regulations and internal control direct and material effect on the consolidated financial statements.

Management's responsibility for the financial statements

Management is responsible for the preparation and fair presentation of such consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatements, whether due to fraud or error. Management is responsible to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect to fairly presentation of these consolidated financial statements.

Auditor's responsibility

Our responsibilities are to express an opinion on such consolidated financial statements, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect on the financial statements presentation based on our audits. We conducted our audits in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants and examination standards established by The Financial Audit Board of the Republic of Indonesia. Those standards require that we comply with ethical requirements and plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether such consolidated financial statements are free from material misstatement, and compliance to other legal and regulatory requirements and internal control that have direct affect and material effect on the present fairly to the accompanying consolidated financial statements enclosed.

HEAD OFFICE:
Graha Mandiri d/h Plaza Bumi Daya 19th Floor Jl. Imam Bonjol No. 61 Jakarta Pusat 10310 Indonesia
Phone: 62-21 39838734, 39838735, Fax: 62-21 39832081
Website: www.kapdsi.com, E-mail: kapdsi.kpusat@gmail.com
NIUKAP: 959/KM.1/2014

Suatu audit melibatkan pelaksanaan prosedur untuk memperoleh bukti audit tentang angka-angka dan pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian. Prosedur yang dipilih bergantung pada pertimbangan auditor, termasuk penilaian atas risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan. Dalam melakukan penilaian risiko tersebut, auditor mempertimbangkan pengendalian intern yang relevan dengan penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian entitas untuk merancang prosedur audit yang tepat sesuai kondisinya. Suatu audit juga mencakup evaluasi atas ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan dan kewajaran estimasi akuntansi yang dibuat oleh manajemen, serta evaluasi atas penyajian laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan. Selain itu, juga mencakup pengujian atas kepatuhan entitas terhadap kontrak, persyaratan bantuan dan pasal-pasal tertentu peraturan perundang-undangan serta kepatuhan terhadap pengendalian intern.

An audit involves the implementation of procedures to obtain audit evidence about the numbers and disclosures in the consolidated financial statements. The procedures selected depend on the auditor's judgment, including the assessment of the risks of material misstatement in the consolidated financial statements, whether due to fraud or error. In assessing such risks, the auditor considers internal control relevant to the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements of the entity to design audit procedures that are appropriate condition. An audit also includes evaluating the accuracy of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates made by management, as well as the evaluation of the consolidated financial statements as a whole. Moreover, it also includes testing for compliance entity to the contract, the terms of the help and specific provisions of the legislation, and compliance with internal control.

Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini audit kami.

We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our audit opinion.

Opini

Opinion

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

In our opinion, the consolidated financial statements attached present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries December 31, 2017, and its financial performance and cash flows for the year then ended in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.

Penekanan suatu hal

Emphasis of matter

Sebagaimana yang diungkapkan dalam Catatan 37.a atas laporan keuangan, perusahaan telah melakukan penyesuaian kembali *(restated)* atas beberapa saldo akun laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan saldo awal tahun 2016 sebagai akibat dari penerapan PSAK 24 (2016): Imbalan Kerja, yang belum diperhitungkan sebelumnya pada entitas anak PT Pelita Indonesia Djaja. Perubahan tersebut tidak mempengaruhi secara signifikan terhadap saldo laba tahun lalu, tetapi merupakan penerapan pertama kali sehingga mempengaruhi saldo laba tahun lalu pada tanggal 31 Desember 2016 dan saldo awal periode terdekat sebelumnya (1 Januari 2016 / 31 Desember 2015) pada laporan posisi keuangan (neraca). Selain itu, sebagaimana yang diungkapkan dalam catatan 37.b atas laporan keuangan konsolidasian, perusahaan telah melakukan reklasifikasi atas beberapa akun aset dan liabilitas, serta pendapatan dan beban pada laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2016 dan untuk tahun yang berakhir tanggal tersebut, serta laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 1 Januari 2016 / 31 Desember 2015 untuk tujuan komparasi laporan keuangan konsolidasian.

As disclosed in Note 37.a to the financial statements, the Company has restated some accounts of the consolidated financial statements (balance sheets) for the year ended December 31, 2016 and the balance at the beginning of 2016 as a result of the adoption of PSAK 24 (2016): Employee Benefits, which have not been calculated previously in subsidiaries PT Pelita Indonesia Djaja. The changes did not significantly affect the retained earnings of the past year but were the first such implementation that affected last year's retained earnings as of December 31, 2016 and the beginning of the previous closing balance (1 January 2016 / 31 December 2015) on the statements of financial position (balance sheets). Furthermore, as disclosed in Note 37.b to the consolidated financial statements, the Company has reclassified certain assets and liabilities accounts, and income and expenses accounts in the consolidated financial statements as of December 31, 2016 and for the year then ended, and the statements of financial position (balance sheets) dated January 1, 2016 / December 31, 2015 for the purpose of comparative consolidated financial statements.

Sehubungan dengan penekanan atas beberapa hal pada paragraf diatas, bahwa untuk saldo beberapa akun atas laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2016 dan laporan posisi keuangan (neraca) konsolidasian pada tanggal 1 Januari 2016/31 Desember 2015 telah disajikan ulang *(restatement)* dan kami telah melakukan pengujian, dan menurut pendapat kami penyajian kembali *(restated)* (catatan 37.a) dan reklasifikasi (catatan 37.b) atas beberapa saldo akun laporan keuangan konsolidasian tersebut telah diperhitungkan dan disajikan kembali sebagaimana mestinya.

Refer to emphasis of matters in the above paragraph, that for the balance of certain accounts in the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016 and the consolidated statements of financial position (balance sheets) dated 1 January 2016/31 December 2015 have been restatement and we have examination, and in our opinion restatements (note 37.a) and reclassifications (note 37.b) on some of the consolidated financial statements accounts' have been properly calculated and restated.

Opini kami tidak dimodifikasi sehubungan dengan hal tersebut.

Our opinions are not modified in respect of this matter.

Hal lain

Others

Audit kami atas laporan keuangan konsolidasian PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan Entitas Anak tanggal 31 Desember 2017 dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut terlampir dilaksanakan dengan tujuan untuk merumuskan suatu opini atas laporan keuangan konsolidasian tersebut secara keseluruhan. Laporan keuangan tersendiri (induk saja) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan (neraca) tanggal 31 Desember 2017, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, disajikan sebagai informasi tambahan dari laporan keuangan konsolidasi terlampir, yang disajikan untuk tujuan analisis tambahan dari laporan keuangan konsolidasian terlampir yang diharuskan menurut Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

Our audit the consolidated financial statements of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) and Subsidiaries December 31, 2017 and for the year ended on that date attached conducted to formulate an opinion on the consolidated financial statements as a whole. Separate financial statements (parent only) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) attached, which consists of a statement of financial position (balance sheet) dated December 31, 2017, as well as the income statement and earnings other comprehensive, statement of changes in equity and cash flow statement for the year then ended, is presented as additional information of the consolidated financial statements, which are presented for purposes of additional analysis of the accompanying consolidated financial statements are required under financial Accounting Standard in Indonesia.

Informasi keuangan - Entitas Induk Saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri merupakan tanggung jawab manajemen serta dihasilkan dari dan berkaitan secara langsung dengan catatan akuntansi dan catatan lainnya yang mendasarinya yang digunakan untuk menyusun laporan keuangan konsolidasian terlampir. Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai Laporan Keuangan Tersendiri telah menjadi obyek prosedur audit yang diterapkan dalam audit atas laporan keuangan konsolidasian terlampir berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia. Menurut opini kami, Informasi Keuangan - Entitas Induk saja sebagai laporan Keuangan Tersendiri disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, dalam rangka laporan keuangan konsolidasian terlampir secara keseluruhan.

A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statement is the responsibility of management and was derived from and relates directly to the underlying accounting and other records used to prepare the accompanying consolidated financial statements. A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statements has been subjected to the auditing procedures applied in the audit of the accompanying consolidated financial statement based on Auditing Standard established by the Indonesian Intitute of Certified Public Accountants. In our opinion, A parent entity's financial statements as a Separate Financial Statements present fairly, in all material respects, in the framework of the accompanying consolidated financial statements as a whole.

DJOKO, SIDIK & INDRA
Audit, Tax, and Business Consultans
Registered Public Accountant

International member of Antea

Laporan atas ketentuan peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern

Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan pengendalian intern kami sampaikan kepada manajemen dalam laporan kami No. DSI.IS/HO/045A.PELNI.UU/18, tanggal 05 April 2018 dan No. DSI.IS/HO/045B.PELNI.PI/18, tanggal 05 April 2018.

The report on compliance with laws and regulations and internal control

Compliance with laws and regulations and internal control we issued to management in our report number DSI.IS/HO/045A.PELNI.UU/18, dated April 05, 2018 and number DSI.IS/HO/045B.PELNI.PI/18, April 05, 2018.

KANTOR AKUNTAN PUBLIK
DJOKO, SIDIK & INDRA

DJOKO, SIDIK & INDRA
REGISTERED PUBLIC ACCOUNTANTS

Indra Soesetiawan, Ak., CPA., CA.
NRAP / *Public Accountant License* AP.0139

05 April / *April* , 2018

NOTICE TO READERS

The above auditor's report and the accompanying financial statements are English translations of the Indonesian auditor's report and financial statements enclosed prepared for and used in Indonesia. The accompanying financial statements were prepared using accounting principles, procedures and reporting practices generally accepted in Indonesia and are not intended to present the financial positions, financial performances and their cash flows in accordance with accounting principles and practices generally accepted in countries and jurisdictions other than Indonesia. The standards, procedures and practices utilized to audit such financial statements are conformity with Financial Accounting Standards in Indonesia.

LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENT*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan
1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of December 31, 2017
(With Comparative as of December 31, 2016 and
January 1, 2016/December 31, 2015 - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/*Notes*	31 Desember 2017/*December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*)*	1 Jan 2016/ 31 Des. 2015/ *Dec. 31, 2015*)*	
ASET					***ASSETS***
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	4c; 4e; 4f; 4h; 6	1.338.781.110.919	885.614.536.588	732.418.276.306	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	4e; 4h; 7	204.786.564.118	272.795.406.111	185.894.832.123	*Accounts Receivables*
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp4.727.279.135, Rp8.199.684.373 dan Rp7.075.367.277)					*(Net of provision for impairment at December 31, 2017 and 2016, and January 1, 2016/ December 31, 2015 respectively Rp4.727.279.135, Rp8.199.684.373 and Rp7.075.367.277)*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	4e; 4g; 4h; 8	649.901.221.742	856.018.628.204	475.468.444.544	*Other Receivables*
Persediaan	4j; 9	473.077.781.262	462.927.981.397	575.712.421.792	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	4u; 10a	33.256.903.830	22.151.702.943	8.971.850.403	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	4k; 11	42.912.175.985	25.443.019.319	62.398.904.074	*Advances Payment*
Biaya Dibayar Dimuka	4k; 12	22.732.479.729	17.619.757.767	19.664.884.645	*Prepaid Expenses*
Jumlah Aset Lancar		**2.765.448.237.585**	**2.542.571.032.329**	**2.060.529.613.887**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar					***Non - Current Assets***
Properti Investasi	4l; 4n;13	22.088.283.770	22.981.274.640	23.963.122.175	*Invesment Properties*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/Desember, 31 2015 masing-masing sebesar: Rp21.982.967.567 Rp20.960.976.697 dan Rp19.794.417.172)					*(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2017, 2016 and January 1st 2016/31 December 2015 respectively for: Rp21.982.967.567, Rp20.960.976.697 and Rp19.794.417.172)*
Alat Produksi	4m; 4n:14	3.205.175.256.051	3.228.703.512.764	3.431.348.997.603	*Production Equipment*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 masing-masing sebesar: Rp4.859.148.638.141, RpRp4.553.569.324.712 dan Rp4.241.410.197.633)					*(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2017, 2016 and January 1st 2016/ December,31 2015 respectively: Rp4.859.148.638.141, Rp4.553.569.324.712 and Rp4.241.410.197.633)*
Aset Tetap	4m; 4n; 4r:15	365.254.325.090	355.224.472.619	333.552.397.687	*Fixed Assets*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 masing-masing sebesar: Rp365.874.521.101, Rp343.217.346.928 dan Rp327.959.205.856)					*(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2017, 2016 and January 1st 2016/ December 31, 2015 respectively: Rp365.874.521.101, Rp343.217.346.928 and Rp327.959.205.856)*
Aset Tidak Berwujud	4n; 4o;16	21.690.120.173	4.535.792.088	3.270.750.754	*Intangible Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	4j; 4m; 4n; 17	1.215.907.402	11.528.979.765	3.479.879.012	*Other Non Current Assets*
Aset Pajak Tangguhan	4u; 10d	51.192.067.682	46.097.154.851	37.157.705.304	*Deferred Tax Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**3.666.615.960.168**	**3.669.071.186.727**	**3.832.772.852.535**	***Total Non Current Assets***
TOTAL ASET		**6.432.064.197.753**	**6.211.642.219.056**	**5.893.302.466.422**	***TOTAL ASSETS***

**) Disajikan kembali lihat catatan 37*

**) As Restate see note 37*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan
1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS)
As of December 31, 2017
(With Comparative as of December 31, 2016 and
January 1, 2016/December 31, 2015 - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/*Notes*	31 Desember 2017/*December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*)*	1 Jan 2016/ 31 Des. 2015/ *Dec. 31, 2015*)*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas Jangka Pendek					***Short-Term Liabilities***
Utang Usaha	4e; 4h;18	155.769.014.126	157.386.238.502	172.010.297.808	*Accounts Payable*
Beban Akrual	4h: 4q;19	171.423.202.038	219.932.451.249	141.017.668.917	*Accrued Expenses*
Utang pajak	4u; 10b	63.470.575.859	51.601.453.326	42.456.623.738	*Tax Payable*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	4e; 4h; 22; 23	33.571.237.683	40.085.652.287	235.632.112.034	*Cureent Portion of Long term Liabilities*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	4h; 4p; 20	49.554.163.437	48.640.623.848	67.020.147.664	*Perpaid Revenues/ Deposit/Deposit Guarantee*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	4e; 4h; 21	52.357.538.981	72.557.027.154	144.413.628.078	*Other Short Term Financial Assets*
Sub Jumlah		**526.145.732.124**	**590.203.446.366**	**802.550.478.239**	***Sub Total***
Liabilitas Jangka Panjang					***Long-Term Liabilities***
Utang Non Usaha Jangka Panjang	4e; 4h; 22	37.687.297.741	43.523.055.567	333.185.536.052	*Long-Term Non Operating Payables*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	4e; 4h; 23	29.840.753.913	35.546.791.937	36.351.954.660	*Long-Term Finacial Institution and Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	4t; 24	134.742.481.003	78.574.423.843	34.658.100.696	*Long Term Employee Benefits*
Sub Jumlah		**202.270.532.657**	**157.644.271.347**	**404.195.591.408**	***Sub Total***
Jumlah Liabilitas		**728.416.264.781**	**747.847.717.713**	**1.206.746.069.647**	***Total Liabilities***
Ekuitas					***Equity***
Modal Saham (Modal dasar sebanyak 13.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 7.065.092 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham)	1.1.3;25	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	*Capital Stock (As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 7.065.092 with a nominal value of Rp 1.000.000 per share)*
Penyertaan Modal Pemerintah	26	564.951.174.642	564.951.174.642	143.585.642	*Government Equity*
Cadangan	27	412.593.309.421	164.190.404.982	66.533.679.319	*Reserves*
Saldo Rugi (Defisit)	4v; 28	(2.250.844.492.727)	(2.278.860.622.616)	(2.428.394.508.942)	*Retained Earnings (Defisits)*
Komponen Ekuitas Lainnya	29	(89.998.650.964)	(52.980.133.140)	(17.850.143.998)	*Other Component Equity*
		5.701.793.340.373	5.462.392.823.869	4.685.524.612.021	
Kepentingan Non Pengendali	4i; 30	1.854.592.600	1.401.677.474	1.031.784.754	*Non-Controlling Interest*
Jumlah Ekuitas		**5.703.647.932.972**	**5.463.794.501.343**	**4.686.556.396.775**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**6.432.064.197.753**	**6.211.642.219.056**	**5.893.302.466.422**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

**) Disajikan kembali, lihat Catatan 37*

**) As Restate, see Note 37*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

2

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME
For The Year Ended December 31, 2017
(With Comparative for the Year Ended
December 31, 2016 - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	Catatan/ *Notes*	2016 *)	
Pendapatan Usaha	4.415.691.596.174	4q; 31	4.255.263.271.038	*Operating Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	(20.846.904.014)	4q; 31	(10.648.231.000)	*Reduction in Operating Revenues*
Pendapatan Usaha Bersih	**4.394.844.692.160**		**4.244.615.040.038**	***Net Operating Revenues***
Beban Pokok Usaha	(3.652.043.994.978)	4q; 32	(3.445.001.339.133)	*Operating Expenses*
Laba Kotor	**742.800.697.182**		**799.613.700.905**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	(23.151.835.641)	4q; 33	(15.175.886.778)	*Distribution and Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	(457.368.737.599)	4q; 34	(524.024.483.336)	*General and Administrative Expenses*
Laba Usaha	**262.280.123.943**		**260.413.330.791**	***Operating Profit***
Pendapatan (Beban Non Usaha)	95.046.791.560	4q; 35	56.581.296.695	*Financial Expenses*
Laba Sebelum Pajak	**357.326.915.503**		**316.994.627.487**	***Profit Before Tax***
Penghasilan (Beban) Pajak				***Benefit (Expense) Income Tax***
Kini	(85.431.483.847)	4u; 10c	(77.316.329.864)	*Current Tax*
Tangguhan	4.986.061.877	4u; 10d	8.868.349.214	*Deferred Tax*
	(80.445.421.970)		**(68.447.980.650)**	
Laba Tahun Berjalan	**276.881.493.533**		**248.546.646.837**	***Profit for The Year***
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos-pos yang Tidak akan Direklasifikasi ke Laba Rugi:				*Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss*
- Keuntungan (Kerugian) Akturia	(37.429.500.261)	4t	(33.627.124.362)	*Actuaria Gain (Loss) -*
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**239.451.993.272**		**214.919.522.475**	***Total Comprehensive Profit of The Year***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Profit Current Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk	276.419.034.328	4d; 4i	248.177.043.561	*Owner of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	462.459.205	4d; 4i	369.603.276	*Non-Controlling Interest*
	276.881.493.533		**248.546.646.837**	
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Total Comprehensive Profit Attributable to:***
Pemilik entitas induk	238.989.534.067	4d; 4i	214.549.919.199	*Owner of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	462.459.205	4d; 4i	369.603.276	*Non-Controlling Interest*
	239.451.993.272		**214.919.522.475**	
Laba Bersih Per Saham Dasar	**39.124,62**	4w	**35.127,22**	***Basic Earnings Per Share***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan 37.

**) As Restated, see Note 37.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

3

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2017
(With Comparative for the Year Ended December 31, 2016 - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Additional Paid In Capital	***Penyertaan Modal Pemerintah / Goverment Capital***	***Cadangan/ Reserve***	**Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Defisits)***	**Komponen Ekuitas lainnya/ *Other Equity Components***	**Sub Jumlah/ *Sub Total***	**Kepentingan Non Pengendali/ *Non Controlling Interest***	***Jumlah Ekuitas / Total Equity***
Saldo per 1 Januari 2015	6.565.092.000.000	143.585.642	55.530.479.000	(2.514.750.050.733)	-	4.106.016.013.909	740.556.095	4.106.756.570.004
Balance of Januari 1, 2015								
Laba Tahun Berjalan/*Current Year Profit*	-	-	-	98.643.157.235	-	98.643.157.235	291.228.659	98.934.385.894
Penyesuaian Laba Tahun Berjalan - Pengaruh Disajikan Kembali/ *Profit Adjustment Current Year -Effect of Restated*	-	-	-	(43.970.588)	-	(43.970.588)	-	(43.970.588)
Penyesuaian Saldo Laba-Pengaruh Disajikan Kembali *Adjustment of Retained Earnings (Deficit) - Effect of Restated*	-	-	-	(1.015.889.429)	-	(1.015.889.429)	-	(1.015.889.429)
Cadangan/*Reserve*	-	-	11.003.200.319	(11.003.200.319)	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / *Goverment Capital* (Sesuai Surat Kementerian BUMN /*Letters correspond Ministry of SOEs* No. S-27/MBU/01/2016)	500.000.000.000	-	-	-	-	500.000.000.000	-	500.000.000.000
Penyaluran Program PKBL / *PKBL Program Distribution*	-	-	-	(224.555.108)	-	(224.555.108)	-	(224.555.108)
Kerugian Aktuaria/*Actuarial Losses*	-	-	-	-	(17.812.331.538)	(17.812.331.538)	-	(17.812.331.538)
Penyesuaian Kerugian Aktuaria - Pengaruh Disajikan Kembali/ *Actuarial Loss Adjustment -Effect of Restated*	-	-	-	-	(37.812.460)	(37.812.460)	-	(37.812.460)
Saldo per 31 Desember 2015/ *Balance of Desember 31, 2015 *)*	7.065.092.000.000	143.585.642	66.533.679.319	(2.428.394.508.941)	(17.850.143.998)	4.685.524.612.022	1.031.784.754	4.686.556.396.776
Laba (Rugi) Tahun Berjalan/ *Current Year Profit*	-	-	-	248.402.904.439	-	248.402.904.439	369.892.719	248.772.797.158
Penyesuaian Laba Tahun Berjalan - Pengaruh Disajikan Kembali *Profit Adjustment Current Year - Effect of Restated*				(225.860.878)	-	(225.860.878)	-	(225.860.878)
Cadangan/*Reserve*	-	-	98.643.157.235	(98.643.157.235)	-	-	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / *Goverment Capital* (Sesuai Peraturan Pemerintah/*As the Government Regulation* No. 87 Tahun 2016)	-	564.807.589.000	-	-	-	564.807.589.000	-	564.807.589.000
Penyaluran Program PKBL / *PKBL Program Distribution*	-	-	(986.431.573)	-	-	(986.431.573)	-	(986.431.573)
Kerugian Aktuaria/ Actuarial Losses	-	-	-	-	(34.922.419.643)	(34.922.419.643)	-	(34.922.419.643)
Penyesuaian Kerugian Aktuaria - Pengaruh Disajikan Kembali/ *Actuarial Loss Adjustment -Effect of Restated*					(207.569.498)	(207.569.498)	-	(207.569.498)
Saldo per 31 Desember 2016/ *Balance of December 31, 2016 *)*	7.065.092.000.000	564.951.174.642	164.190.404.981	(2.278.860.622.615)	(52.980.133.139)	5.462.392.823.869	1.401.677.473	5.463.794.501.342

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND ITS SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY
For The Year Ended December 31, 2017
(With Comparative for the Year Ended December 31, 2016 - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ Additional Paid In Capital	*Penyertaan Modal Pemerintah / Goverment Capital*	*Cadangan/ Reserve*	Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Defisits)*	Komponen Ekuitas lainnya/ *Other Equity Components*	Sub Jumlah/ *Sub Total*	Kepentingan Non Pengendali/ *Non Controlling Interest*	*Jumlah Ekuitas / Total Equity*
Saldo per 31 Desember 2016/ ***Balance of December 31, 2016 *)***	7.065.092.000.000	564.951.174.642	164.190.404.981	(2.278.860.622.615)	(52.980.133.139)	5.462.392.823.869	1.401.677.473	5.463.794.501.342
Laba Tahun Berjalan/ *Current Year Profit*	-	-	-	276.419.034.328	-	276.419.034.328	462.459.205	276.881.493.533
Cadangan/*Reserve*	-	-	248.402.904.439	(248.402.904.439)	-	-	-	-
Penyaluran Program PKBL / *PKBL Program Distribution*	-	-	-	-	-	-	-	-
Kerugian Aktuaria/*Actuarial Losses*	-	-	-	-	(37.429.500.261)	(37.429.500.261)	-	(37.429.500.261)
Reklasifikasi/*Reclasification*	-	-	-	-	410.982.436	410.982.436	(9.544.078)	401.438.358
Saldo per 31 Desember 2017 ***Balance of December 31, 2017***	7.065.092.000.000	564.951.174.642	412.593.309.420	(2.250.844.492.726)	(89.998.650.964)	5.701.793.340.373	1.854.592.600	5.703.647.932.972

*) Disajikan Kembali, Lihat Catatan 37.

**) As Restated, See Note 37.*

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
LAPORAN ARUS KAS KONSOLIDASIAN
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun
yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
CONSOLIDATED STATEMENT OF CASH FLOWS
For The Years Ended December 31, 2017
(With Comparative for the Year
Ended December 31, 2016)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan Kas dari Pelanggan	2.251.600.111.268	3.424.307.968.034	*Receipt from Customer*
Penerimaan Public Service Obligation	2.461.769.659.728	2.363.973.650.652	*Receipt from Public Service Obligation*
Pembayaran Kepada Pemasok	(3.685.537.235.345)	(3.037.676.163.180)	*Payment to Suppliers*
Penerimaan Kas Lain-Lain	58.865.649.640	20.510.115.867	*Cash Receipt Others*
Pembayaran Biaya Operasional	(495.157.387.845)	(612.060.661.650)	*Payment of Operating Expenses*
Pembayaran Biaya Overhead	(21.902.907.842)	(148.878.315.240)	*Payment of Overhead Expense*
Pengeluaran Kas Biaya Lain-Lain	(64.074.590.632)	(4.706.364.267)	*Receipt from Other Revenues*
Penempatan Jangka Pendek	-	(1.237.337.994.500)	*Short Term Placement*
Penerimaan Uang Jaminan Dari Pelanggan	3.938.351.294	145.636.450.150	*Receipt of Cash Collateral from Customer*
Pencairan Uang Jaminan	-	(1.611.483.524)	*Liquefaction of Cash Collateral*
Pembeliaan Persediaan	(5.928.989.525)	(107.472.275)	*Purchase of Supplies*
Penerimaan Bunga	42.694.350.966	33.862.313.284	*Interest Receipt*
Pembayaran Bunga Pinjaman	(3.399.321.678)	(26.842.172.033)	*Payment of Interest Loan*
Pembayaran Pajak	(103.606.112.553)	(130.257.373.802)	*Tax Payment*
	439.261.577.477	**788.812.497.516**	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Hasil Penjualan Aset Tetap	11.818.181.818	2.336.589.063	*Sale of Fixed Assets*
Pembelian Aset Tetap	(255.874.864.846)	(54.279.499.287)	*Purchase of Fixed Assets*
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian	(70.411.551.464)	(12.235.000)	*Construction in Progress*
Perolehan Aset Takberwujud	(5.403.564.630)	-	*Intangible Assets*
Pembelian Aset Lain-Lain	(3.554.408.000)	(2.110.421.994)	*Purchase of Other Assets*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(323.426.207.122)**	**(54.065.567.218)**	***Net Cash Flows from Investment Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan Pinjaman Bank / Pihak Ketiga	-	35.557.498.850	*Receipt from Bank Loan / Third Parties*
Penerimaan (Pengeluaraan) Deviden	-	-	*Receipt (Issuence) Deviden*
Pembayaran Utang Bank	(13.087.284.628)	(7.797.345.252)	*Payment of Bank Loan*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**(13.087.284.628)**	**27.760.153.598**	***Net Cash Flows from Financing Activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**102.748.085.726**	**762.507.083.897**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas			
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	**1.601.598.260.209**	**839.091.176.312**	***BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.704.346.345.935**	**1.601.598.260.209**	***ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements taken as a whole

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN/ *NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM

1.1. Pendirian Perusahaan

Berdirinya PT PELNI (Persero) bermula dengan dikeluarkannya Surat Keputuan Bersama (SKB) antara Menteri Perhubungan dengan Menteri Pekerjaan Umum pada tanggal 5 September 1950 yang isinya mendirikan Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-kapal (PERPUSKA).

Pada tanggal 28 April 1952 Yayasan Pepuska resmi dibubarkan. Pada saat yang sama didirikanlah PT PELNI (Persero) dengan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Perhubungan No. M.2/1/2 tanggal 28 Februari 1952 dan No. A.2/1/2 tanggal 19 April 1952, serta Berita Negara Republik Indonesia No. 50 tanggal 20 Juni 1952.

Perusahaan mengalami beberapa kali perubahan bentuk Badan Usaha. Pada tahun 1961 pemerintah menetapkan perubahan status dari Perusahaan Perseroan menjadi Perusahaan Negara (PN) dan dicantumkan dalam Lembaran Negara RI No. LN 1961. Kemudian pada tahun 1975 status perusahaan diubah dari Perusahaan Negara (PN) menjadi Perseroan Terbatas (PT) PELNI sesuai dengan Akte Pendirian No. 31 tanggal 30 Oktober 1975. Perubahan tersebut dicantumkan dalam Berita Negara RI No. 562-1976 dan Tambahan Berita Negara RI No. 60 tanggal 27 Juni 1976. Dan Akte Perubahan No. 22 tanggal 4 Maret 1998 tentang Anggaran Dasar PT PELNI (Persero) yang diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia tanggal 16 April 1999 No. 31 tambahan Berita Negara No.2203.

Perubahan terakhir Anggaran Dasar Perseroan dituangkan dengan Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., SpN. No. 01, tanggal 16 Januari 2014 yang telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.: AHU-02312.AH.01.02 tahun 2014 tanggal 23 Januari 2014.

1. GENERAL

1.1. Company Establishment

PT PELNI (Persero) was started when the Decree of Three Ministers was issued by the Minister of Transportation and the Minister of Public Works on 5th September 1950, about the establishment of the Yayasan Penguasaan Pusat Kapal-Kapal (PEPUSKA).

On 28th April 1952, Yayasan PEPUSKA was officially closed down. At the same time, PT PELNI (Persero) was founded based on the Decree of the Minister of Transportation No.M.2/1/2 on 28th February 1952 and No.A.2/1/2 on 19th April 1952, and by the National Gazette of Indonesian Republic No.50 on 20th June 1952.

The company experienced several changes in its business entity. In 1961, government of Indonesia changed the status from Limited Liability Company to be State Owned Company (PN) and was stated in the National Gazette of the Indonesia Republic No. LN 1961. Then, in 1975 the status was again changed into the Perseroan Terbatas (PT) PELNI based on the Articles of Incorporation No.31 on 30th October 1975. The amendment is stated in RI State Gazette No. 562-1976 and Supplement to the State Gazette of the Republic of Indonesia No. 60 dated 27 June 1976. And Deed of Amandement No.22 on 4th March 1998 about Articles Association of PT PELNI (Persero) which was published on the National Gazette of Indonesian Republic on 16th April 1999 No.31 and in Supplement of State Gazette of Indonesian Republic No.2203.

The latest amendment of the Articles of Association of the Company is filed by the Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, SH., M.Kn., SpN. No. 01 dated January 16, 2014 which has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No . AHU-02312.AH.01.02 year 2014 dated January 23, 2014.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.2. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan Perusahaan adalah:

a. Pengadaan armada dan kelengkapannya untuk menyelenggarakan pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran berjadwal dan pelayaran yang melayani potensi pasar.

b. Menjalankan kegiatan keagenan usaha pelayaran.

c. Melakukan kegiatan operasi terminal, perdagangan, rute dan ekspedisi/forwarding.

d. Melakukan kegiatan usaha jasa pemeliharaan kapal dan usaha dock/reparasi kapal.

e. Melakukan kegiatan charter dan broker kapal.

f. Kegiatan jasa konsultasi, pendidikan dan latihan yang berkaitan dengan kegiatan usaha pelayaran dan pelayanan kesehatan.

1.3. Modal

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% Penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta Notaris Ida Adiningsih,SH tanggal 01 Februari 2016 yang telah mendapat pengesahaan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 Tahun 2016 tanggal 02 Februari 2016. Penambahan modal dasar tersebut bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2016 melalui konversi uang pokok Subsidiary Loan Agreement (SLA) serta kapitalisasi sebagian cadangan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sampai dengan tahun buku 2015 yang telah diaudit oleh KAP Drs.Bambang Mudjiono & Widiarto sebagaimana suratnya No.LAI_AU-015/KAP.BM&W/BM/IV/2016.

1.4. Tempat dan Kedudukan

Perseroan berkedudukan di Jalan Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat.

Berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 11.01/I/SK/HKO.01/2014, tanggal 05 November 2014, Perseroan memiliki 34 Cabang operasional, 32 sub cabang operasional, 1 cabang khusus di Singapura dan 2 *Strategic Business Unit* (Galangan Surya Surabaya dan Hotel Bahtera Cipayung).

1. GENERAL *(continued)*

1.2. Purposes and Objectives

Purposes and objectives of the Company are:

a. Fleet procurement and apparatus for organizing the transport of passengers and goods by scheduled and cruise shipping networks that serve the market potential.

b. Cater a business shipping agency activities.

c. Conducting terminal operation, trade, service and expedition / forwarding.

d. Perform maintenance services business activities and ship dock business/repair ships.

e. Do charter activities and ship broker

f. Event consulting services, education and training related to the shipping business and health care.

1.3. Capital

Share Capital paid to the entity is a 100% goverment participation in accordance with the Notarial Deed Ida Adiningsih SH, dated February, 01, 2016 which was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-AH.01.03-0012165 Year 20016 dated February 02, 2016. The addition of authorized capital was sourced from Transfer of State Assets sourced from Money Conversion Subsidiary Loan Agreement (SLA) and part of capitalized reserves PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) until the year 2015 audited by KAP Drs.Bambang Mudjiono & Widiarto as its letter No. LAI_AU-015/KAP.BM&W/BM/IV/2016.

1.4. Place and Domicile

The Company domiciled in Gajah Mada No. 14, Central Jakarta.

By virtue of Decree No. 11:01 / I / SK / HKO.01 / 2014, dated November 5, 2014, the Company has 34 operational branches, 32 sub-branches operating, 1 special branch in Singapore and two Strategic Business Units (Galangan Surya Surabaya and Hotel Bahtera Cipayung).

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-210/MBU/09/2017 tanggal 26 September 2017 dan Akta No. 1 tanggal 3 Oktober 2017 tentang Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia, susunan Dewan Komisaris untuk tahun 2016 sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors

Board of Commissioners

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises no. SK-210 / MBU / 09/2017 dated September 26, 2017 and Deed No. 1 dated October 3, 2017, Notary Ida Adiningsih, SH., regarding the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Persero Limited of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the composition of the Board of Commissioners for the fiscal year 2016 as follows:

Komisaris Utama	Leon Muhamad	*Chief Commissioner*
Komisaris Independen	Omo Dahlan	*Independent Commissioner*
Komisaris	Sudarto	*Commissioner*
Komisaris	Satya Bakti Parikesit	*Commissioner*
Komisaris	Wolter Beni Hasegem	*Commissioner*
Komisaris	Raldi Hendro T. Koestoer	*Commissioner*

Selanjutnya mendasar pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-264/MBU/12/2017 tanggal 4 Desember 2017, susunan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2017 sebagai berikut:

Furthermore, fundamental to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises no. SK-264 / MBU / 12/2017 dated December 4, 2017, the composition of the Board of Commissioners for the fiscal year 2017 is as follows:

Komisaris Utama	Leon Muhamad	*Chief Commissioner*
Komisaris Independen	Johanes Widodo Hario Mumpuni	*Independent Commissioner*
Komisaris	Sudarto	*Commissioner*
Komisaris	Satya Bakti Parikesit	*Commissioner*
Komisaris	Raldi Hendro T. Koestoer	*Commissioner*

Remunerasi Dewan Komisaris diberikan sesua dengan Risalah RUPS PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan Laporan Tahunan Pengesahan Laporan Keuangan dan mengacu kepada peraturan Menteri Negara BUMN RI No: PER: 04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris dan Pemegang Saham Badan Usaha Milik Negara. Remunerasi Dewan Komisaris terdiri dari gaji/honorarium, tunjangan yang terdiri dari tunjangan hari raya keagamaan, transportasi, komunikasi dan santunan purna jabatan dan tunjangan transportasi. Fasilitas yang diberikan adalah fasilitas kesehatan, bantuan hukum dan perkumpulan profesi.

The remuneration of the Board of Commissioners is granted in accordance with the Minutes of Shareholders Meeting of PT PELNI (Persero) on the Approval of the Annual Report of Ratification of Financial Statements and refers to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No: PER: 04 / MBU / 2014 dated March 10, 2014 on Guidelines for Stipulation of Directors, Board of Commissioners and Shareholders of State-Owned Enterprises. The remuneration of the Board of Commissioners consists of salaries / honoraria, allowances comprising religious holidays, transportation, communication and post-employment benefits and transportation allowances. The facilities provided are health facilities, legal aid and professional associations.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dewan Komisaris (lanjutan)

Hubungan Afiliasi antara Dewan Komisaris dengan Direksi dan Pemegang Saham

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun serta tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Dewan Komisaris lainnya, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

Dalam menunjang pelaksanaan fungsi dan efektivitas peran Dewan Komisaris, Dewan Komisaris dibantu oleh Sekretaris Dewan Komisaris. Tahun 2017 dan 2016, Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Nani Sukamto.

Komite Audit

Komite Audit merupakan organ dari Dewan Komisaris yang dibentuk oleh Dewan Komisaris sesuai dengan yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara. Komite Audit berfungsi untuk membantu Dewan Komisaris dalam melaksanakan tugas pengawasannya. Komite Audit bersifat independen dan mandiri, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan, dan bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris.

Anggota Komite Audit diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS. Masa tugas anggota Komite Audit tidak boleh lebih lama dari masa jabatan Dewan Komisaris sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar Perusahaan dan dapat dipilih kembali hanya untuk 1 (satu) periode berikutnya.

1. GENERAL *(continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors *(continue*

Board of Commissioners *(continued)*

Affiliate Relations between Board of Commissioners, Directors and Shareholders

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) act independently and free from intervention from any party and have no financial relationship, management, share ownership, and/or family relationship up to the second degree with other members of the Board of Commissioners, Board of Directors and/ or the controlling shareholders or relationship with the company that could affect its ability to act independently.

Dual Positions

All members of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) should not hold concurrent position which is prohibited by regulation.

In supporting the implementation of the function and effectiveness of the Board of Commissioners role, the Board of Commissioners is assisted by the Secretary of the Board of Commissioners. In 2017 and 2016, the Secretary of the Board of Commissioners is held by Nani Sukamto.

The Audit Committee

The Audit Committee is an organ of the Board of Commissioners established by the Board of Commissioners as mandated by Law No. 19 of 2003 on State-Owned Enterprises. The Audit Committee serves to assist the Board in carrying out its supervisory duties. The Audit Committee is independent and self-sufficient, both in the execution of its duties and reporting, and is directly responsible to the Board of Commissioners.

Audit Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (RUPS). Audit Committee member terms should not be longer than the term of office of the Board of Commissioners in accordance with the Articles of Association of the Company and may be reelected only for one (1) term.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dewan Komisaris (lanjutan)

Komite Audit (lanjutan)

Komposisi keanggotaan Komite Audit PT PELNI (Persero) setiap periode berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal pihak profesional yang independen. Susunan Komite Audit tahun buku 2016 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit				*Chairman of Audit Committee*
(juga selaku Komisaris Independen)	:	Omo Dahlan	:	*(Also as Independent Commissioner)*
Anggota	:	Joko Murdyono	:	*Members*
	:	Subagio	:	

Selanjjutnya mendasar pada Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. Kep-07/DK/XII-2017 tanggal 8 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Ketua Komite Audit pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Audit tahun buku 2017 sebagai berikut:

Ketua Komite Audit				*Chairman of Audit Committee*
(merangkap Komisaris Independen)	:	Johanes Widodo Hario Mumpuni	:	*(also as Independent Commissioner)*
Anggota	:	Joko Murdyono	:	*Members*
	:	Subagio	:	

Pelaksanaan tugas Komite Audit PT PELNI (Persero) berlandaskan pada Piagam Komite Audit yang disahkan pada 27 Mei 2004.

Komite Kebijakan Risiko

Pembentukan Komite Kebijakan Risiko merupakan bagian dari upaya Perusahaan untuk menerapkan GCG. Terkait implementasi GCG, peran dan fungsi Komite Kebijakan Risiko menjadi sangat strategis untuk membantu dan meningkatkan peran Dewan Komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasannya.

1. GENERAL *(continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors *(continued)*

Board of Commissioners *(continued)*

The Audit Committee (continued)

The membership composition of the Audit Committee of PT PELNI (Persero) for each period is amounting to 3 (three) people consisting of a chairman who is a member of the Board of Commissioners of PT Pelni (Persero) and two (2) members from the committee that an independent professional.The composition of the Audit Committee of year 2016 is as follows:

Furthermore, based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) no. Kep-07 / DK / XII-2017 dated December 8, 2017 concerning the Termination and Appointment of the Chairman of the Audit Committee to the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee of book year 2017 as follows:

Implementation of the Audit Committee duties in PT PELNI (Persero) based on the Audit Committee Charter which was ratified on May 27, 2004.

Risk Policy Committee

Establishment of Risk Policy Committee is part of the company's efforts to implement the GCG. Related to the implementation of good corporate governance, the role and functions of Risk Policy Committee are to be very strategic in assisting and enhancing the role of the Board of Commissioners in performing its supervisory function.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Dewan Komisaris (lanjutan)

Komite Kebijakan Risiko (lanjutan)

Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) SK: Kep.03/DK/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 tentang pemberhentian dan pengangkatan Ketua Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT PELNI (Persero). Anggota Komite Kebijakan Risiko diangkat dan diberhentikan oleh Dewan Komisaris dan dilaporkan kepada RUPS.

Komposisi keanggotaan Komite Kebijakan Risiko PT PELNI (Persero) setiap periode berjumlah 3 (tiga) orang yang terdiri dari seorang ketua yang merupakan anggota Dewan Komisaris PT PELNI (Persero) dan 2 (dua) orang anggota komite yang berasal pihak profesional yang independen. Susunan Komite Kebijakan Risiko tahun buku 2016 sebagai berikut:

Ketua Komite Kebijakan Risiko				*Chairman of the Risk Policy Committee*
(merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Satya Bhakti Parikesit	:	*(Also as Members of Commissioner)*
Anggota	:	Awal Susmanto	:	*Members*
	:	Radjalis	:	

Selanjjutnya mendasar pada Keputusan Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) No. Kep-06/DK/XII-2017 tanggal 1 Desember 2017 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Komite Kebijakan Risiko pada Dewan Komisaris PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), susunan Komite Kebijakan Risiko tahun buku 2017 sebagai berikut:

Ketua Komite Kebijakan Risiko				*Chairman of the Risk Policy Committee*
(merangkap sebagai Anggota Komisaris)	:	Satya Bhakti Parikesit	:	*(Also as Members of Commissioner)*
Anggota	:	Abdul Kholik Sutrisno	:	*Members*
	:	Radjalis	:	

1. GENERAL *(continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors *(continued)*

Board of Commissioners *(continued)*

Risk Policy Committee (continued)

Risk Policy Committee of PT PELNI (Persero) is established by the Decree of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) No: KEP.03/DK/XII/2015 dated December 10, 2015 on the dismissal and appointment of the Chairman of the Risk Policy Committee. Risk Policy Committee members are appointed and dismissed by the Board of Commissioners and reported to the General Meeting of Shareholders (RUPS).

The membership composition of the Risk Policy Committee of PT PELNI (Persero) for each period is 3 (three) members consisting of a chairman who is a member of the Board of Commissioners of PT PELNI (Persero) and 2 (two) committee members from independent professional parties. The composition of the 2016 Risk Policy Committee as follows:

Furthermore, based on the Decision of the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) no. Kep-06 / DK / XII-2017 dated December 1, 2017 concerning the Termination and Appointment of the members of the Risk Policy Committee to the Board of Commissioners of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), the composition of the Audit Committee of book year 2017 as follows:

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Direksi

Berdasarkan Keputusan Menteri Negara BUMN Nomor: SK-263 /LIBU/12/2016 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tanggal 1 Desember 2016, maka Susunan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Elfin Goentoro	:	*President Director*
Direktur Keuangan	:	Wibisono	:	*Director or Finance*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Insan Purwarisya L. Tobing	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur	:	Harry Boediarto	:	*Director*
Direktur	:	Olih Masolich Sodikin	:	*Director*
Direktur	:	M. Tukul Harsono	:	*Director*

Selanjutnya mendasar pada Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia No. SK-MBU/04/2017 tanggal 3 April 2017 tentang Perubahan Nomenklatur Jabatan, Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia dan No. SK-210/MBU/09/2017 tanggal 26 September 2017 tentang Pengalihan Tugas dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia dan telah di Akta Notariskan No. 1 tanggal 3 Oktober 2017, Notaris Ida Adiningsih, SH., susunan Direksi untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 sebagai berikut:

Direktur Utama	:	Insan Purwarisya L.	:	*President Director*
Direktur Usaha Angkutan Penumpang	:	Olih Masolich Sodikin	:	*Director of Passenger Transportation*
Direktur Keuangan	:	Tri Andayani	:	*Director or Finance*
Direktur Usaha Angkutan Barang dan Tol Laut	:	Harry Boediarto	:	*Director of Maritime Goods and Toll Road Transport*
Direktur Sumber Daya Manusia dan Umum	:	Ganefi	:	*Director of Human Resources and General Affairs*
Direktur Armada	:	M. Tukul Harsono	:	*Director of the Fleet*

1. GENERAL *(continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors *(continued)*

Directors

Based on the Decree of the Minister of State Enterprises Number: SK-263 /LIBU/ 12/2016 Termination and Appointment of Members of Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) on December, 1st 2016, the composition of the Directors for the years ended December 31, 2016 as following:

Furthermore, fundamental to the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises as the General Meeting of Shareholders of Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia. SK-MBU / 04/2017 dated April 3, 2017 on the Change of Nomenclature of Occupation, Transfer of Duties and Appointment of Members of the Board of Directors of Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia and No. SK-210 / MBU / 09/2017 dated September 26, 2017 on the Transfer of Duties and Appointments of Members of the Board of Directors of Limited Liability Company Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia and notarized by Notarial Deed No. 1 dated October 3, 2017, Notary Ida Adiningsih, SH., The composition of the Board of Directors for the year ended December 31, 2017 as follows:

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Direksi (lanjutan)

Mendasar pada Surat Keputusan Menteri BUMN Nomor SK-122/MBU/06/2017 tanggal 21 Juni 2017 dan memperhatikan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT PELNI (Persero) tentang Persetujuan atas Laporan Tahunan dan Pengesahan atas Laporan Keuangan Tahun buku 2016 yang disahkan pada tanggal 16 Mei 2017, maka ditetapkan Penghasilan Dewan Komsaris dan Direksi serta insentif kinerja tahun Buku 2017 sebagai berikut:

a. Gaji Dirut ditetapkan naik dari gaji tahun 2016. Gaji Direktur lainnya 90 % dari gaji Direktur Utama.

b. Honorarium Komisaris ditetapkan 45 % dari Gaji Direktur Utama. Honorarium Dewan Komisaris ditetapkan 90 % dari Komisaris Utama.

c. Tunjangan dan/atau fasilitas bagi BOD & BOC ditetapkan mengacu pada PER-01/MBU/06/2017.

d. Gaji/Honorarium bagi Direksi & Dewan Komisaris serta tunjangan dan fasilitas untuk tahun 2017 berlaku efektif 1 Januari 2017.

Selain itu Direksi dan Dewan Komisaris juga menerima insentif kinerja tahun buku 2016, dengan ketentuan sebagai berikut:

- Insentif Kinerja Direktur & Komisaris Utama masing-masing 90% dan 45% dari insentif kinerja Direktur Utama sedangkan insentif Dewan Komisaris sebesar 90% dari insentif Komisaris Utama dan pembayarannya dihitung proporsional dengan memperhitungkan masa kerja efektif tahun buku 2016.

- PPH menjadi beban perusahaan.

1. GENERAL *(continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors *(continued)*

Directors *(continued)*

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-122 / MBU / 06/2017 dated June 21, 2017 and observe the decision of PT PELNI (Persero) General Meeting of Shareholders on Approval on the Annual Report and Ratification of Financial Statements 2016 Final year validated on 16 May 2017, stipulated Income of the Board of Commissioners and the Board of Directors as well as the performance incentives for the fiscal year 2017 as follows:

a. Salary of President Director is set up from the salaries of 2016. Salaries of other Directors are 90% of salary of Presdent Director.

b. Honorarium of Commissioner was assigned to 45% of the salary of the President Director. Honorarium of Board of Commissioners is set to 90% of the Commissioner.

c. Benefits and/or facilities for BOD and BOC were set refers to the PER-01/MBU/06/2017.

d. Salary/Honorarium for Board of Directors and Commissioners as well as allowances and facilities for 2017 become effectively commencing on January 1, 2017.

In addition, the Board of Commissioners and also received performance incentives for the fiscal year 2016, subject to the following conditions:

- *Performance Incentives of President Director & Commissioner are respectively 90% and 45% of performance incentives of President Director while the incentives of Board of Commissioners are amounting to 90% of the Commissioner incentive and the payment is calculated proportionately and by calculating the effective work on fiscal year of 2016.*

- *PPH become the company's expense.*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.5. Dewan Komisaris dan Direksi (lanjutan)

Direksi (lanjutan)

Hubungan Afiliasi antara Direksi dengan Dewan Komisaris dan Pemegang Saham

Seluruh anggota Direksi PT PELNI (Persero) bertindak independen dan bebas intervensi dari pihak manapun. Seluruh anggota Direksi tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham, dan/atau hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua dengan anggota Direksi lainnya, Dewan Komisaris dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan perusahaan yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Rangkap Jabatan

Seluruh anggota Direksi PT PELNI (Persero) tidak merangkap jabatan yang dilarang oleh peraturan yang berlaku.

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki

Usaha pokok PT PELNI (Persero) adalah menyediakan jasa angkutan transportasi laut yang meliputi jasa angkutan penumpang dan jasa angkutan muatan barang antar pulau. Berdasarkan usaha pokok tersebut, bidang usaha yang dijalankan oleh PT PELNI (Persero) antara lain:

a. Jasa pengangkutan penumpang dan barang dengan jaringan pelayaran tetap, teratur dan terjadwal maupun pelayaran yang melayani permintaan tertentu.
b. Jasa keagenan.
c. Jasa operasi terminal, pergudangan, angkutan *Red* dan ekspedisi/*forwarding*.
d. Jasa pemeliharaan kapal dan usaha dok atau reparasi kapal.
e. Charter dan broker kapal.
f. Jasa konsultan, pelatihan, pelayanan kesehatan dan usaha perhotelan.

1. GENERAL *(continued)*

1.5. Board of Commissioners and Directors *(continued)*

Directors *(continued)*

Affiliate Relations Between the Directors, the Board of Commissioners and Shareholders

All members of the Directors of PT PELNI (Persero) act independently and free from intervention from any party and have not the financial relationship, management, ownership, and/or family relationship to the second degree with other members of the Directors, Board of Commissioners and/or controlling shareholders or relationship with the company that could affect their abilities to act independently.

Dual Positions

All members of the Directors of PT PELNI (Persero) shall not also have dual positions which have been prohibited by valid law.

1.6. Business Line and Owned Business Unit

The primary business line of PT PELNI (Persero) is the provision of the marine transportation which serves the commercial and logistic among islands. Based on that primary business, the services provided by PT PELNI (Persero) are:

a. Freight services for passengers and freight with fixed, regular and scheduled shipping lines as well as shipping that serves certain requests.
b. Agency services.
c. Terminal operation, warehouse, Red transportation, and expedition/forwarding services.
d. Ship maintenance and dock business or ship reparation services.
e. Ship charter and broker.
f. Consultant, training, health care services, and hospitality business.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Produk dan Jasa Perkapalan

Jasa Perkapalan

a. Kapal 2 in 1

Kapal jenis 2 in 1 adalah kapal yang dapat mengangkut penumpang dan sejumlah kontainer, dirancang oleh Meyer Welf dan dibangun di galangan Pepenburg, Jerman. Kapal 2 in 1 ini memiliki kapasitas 1.583 penumpang dan 98 kontainer. Salah satu Kapal tipe 2 in 1 ini secara resmi diberi nama KM Gunung Dempo, dibuat sejak pertengahan 2006 dan panjang 146,80 m dengan kecepatan berlayar lebih dari 20 knot.

b. Kapal Penumpang Serbaguna

Kapal jenis 3 in 1 adalah jenis kapal penumpang serbaguna yang mampu mengangkut kontainer, penumpang dan mobil sekaligus. Kapal Motor Dobonsolo dan Kapal Motor Ciremai adalah kapal penumpang yang telah dimodifikasi menjadi kapal jenis 3 in 1, yaitu kapal serbaguna yang dapat mengangkut kontainer di bagian depan dan belakang serta penumpang dan mobil. Kapal ini telah dimodifikasi di galangan Sembawang Singapura.

c. Kapal Barang

Untuk keperluan distribusi barang logistik ke seluruh wilayah Indonesia, PT PELNI (Persero) memiliki 3 kapal barang yaitu KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 dan KM Caraka Jaya Niaga– 32 dengan kapasitas muat yang berbeda-beda untuk mengangkut kargo volume besar dengan layanan terbaik dan dukungan SDM profesional.

d. Kapal Tol Laut

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 9 (sembilan) armada Kapal Tol Laut yaitu KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Caraka Jaya Niaga III – 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III – 32 dan KM Caraka Jaya III – 4, KM.Logistik Nusantara I, II dan III.

1. GENERAL *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

Product and Shipping Services

Shipping Services

a. Kapal 2 in 1

2 in 1 Ship is a type of ship with capacity to carry passenger and containers that is designed by Meyer Welf and built at Pepenburg Shipyard, Germany. The 2 in 1 ship has capacity of 1,583 passengers and 98 containers. One of the 2 in 1 ships is officially named KM Gunung Dempo and built in mid 2006 with total length of 146.80 m and sailing speed over 20 knot.

b. Multipurpose Passenger Ship

The 3 in 1 ship type is multipurpose passenger ship with capacity to carry containers, passenger and car simultaneously. KM Dobonsolo and KM Ciremai are passenger ships which have been modified into 3 in 1 ship type, the multipurpose ships for carrying container at the front and back sides as well as passenger and car. The ships had been modified at Sembawang Shipyard, Singapore.

c. Cargo Ship

For logistic distirbution across Indonesian region, PT PELNI (Persero) has 3 cargo ships, among others, KM Caraka Jaya Niaga III – 4, KM Caraka Jaya Niaga III – 22 and KM Caraka Jaya Niaga– 32 with different capacities for provide cargo ship to carry large volume cargo with excellent service and supported by professional personnel.

d. Tol Laut Ship

PT PELNI (Persero) operates 9 (nine) fleet of Marine Toll Ship that is KM Freedom, KM Mentari Perdana, KM Caraka Jaya Niaga III - 22, KM Meratus Ultima I, KM Caraka Jaya Niaga III - 32 and KM Caraka Jaya III - 4, KM.Logistik Nusantara I, II and III.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Produk dan Jasa Perkapalan (lanjutan)

Jasa Perkapalan (lanjutan)

d. Kapal Tol Laut (lanjutan)

Kapal Tol Laut dioperasikan merujuk pada Peraturan Presiden RI No. 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang di Laut dan Peraturan Menteri Perhubungan RI No. PM161 tahun 2015 tentang penyelenggarakan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut, PT PELNI (Persero) ditunjuk sebagai pelaksana penyelenggarakan kewajiban pelayanan publik tersebut atau yang disebut sebagai program Tol Laut (layanan angkutan barang yang terjadwal, tetap, dan teratur).

e. Kapal Ternak

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 1 (satu) armada Kapal Ternak yaitu KM Camara Nusantara I dengan rute Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. Kehadiran Kapal Ternak bertujuan untuk membantu Pemerintah menekan harga daging dan mensejahterakan para peternak di sentra peternakan sapi dalam negeri.

f. Kapal Perintis

Armada Kapal Perintis merupakan bagian dari penugasan Pemerintah kepada PT PELNI (Persero) selain Kapal Tol Laut dan Kapal Ternak.

PT PELNI (Persero) mengoperasikan 46 (empat puluh enam) Kapal Perintis yang menjangkau daerah terpencil di seluruh Indonesia.

Unit Bisnis Stratejik

a. Keagenan Kapal

Jenis keagenan kapal, meliputi:

1) *Clearance in 7 out*
2) *Bunker, Fresh Water, Provision Supply*
3) *Crew Attendance*

1. GENERAL *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

Product and Shipping Services *(continued)*

Shipping Services (continued)

d. Tol Laut Ship (continued)

Tol Laut Ship is operated referring to the RI Presidential Decree No. 106 year 2015 concerning the Implementation of Public Service Obligations for Marine Freight Transportation and the Regulation of the Minister of Transportation No. PM161 year 2015 concerning on public service obligations for the marine freight transportation, PT PELNI appointed as executor of the public service obligations or the so called Tol Laut (Marine Toll) program (scheduled, fixed, and regular freight services).

e. Cattle Ship

PT PELNI (Persero) operates 1 (one) Cattle Ship, KM Camara Nusantara I with route of Kupang – Waingapu – Bima – Lembar – Surabaya – Semarang – Cirebon – Tanjung Priok – Kupang. The operation of cattle ship aims to help the Government implements lower meat price and increase welfare of the breeders in domestic cow breeding center.

f. Pioneer Ship

Pioneer ship flet is part of Government's assignment to PT PELNI (Persero) besides Tol Laut and Cattle ships.

PT PELNI (Persero) operates 46 (forty six) Pioneer Ships covering remote area across Indonesia.

Strategic Business Unit

a. Ship Agency

Type of Agency Services:

1) Clearance in 7 out
2) Bunker, Fresh Water, Provision Supply
3) Crew Attendance

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Produk dan Jasa Perkapalan (lanjutan)

Unit Bisnis Stratejik (lanjutan)

a. Keagenan Kapal (lanjutan)

Jenis keagenan kapal, meliputi: (lanjutan)

4) *Protecting Agent*
5) *Custom Clearance*
6) Layanan *Sea Pollution*
7) Layanan *Garbage Removal*

b. Hotel Bahtera

Hotel dengan fasilitas untuk acara rapat dan pusat pelatihan dilengkapi dengan fasilitas ruang rapat berkapasitas lebih dari 200 orang dan fasilitas penunjang lainnya.

c. Galangan Surya Surabaya

Berdiri sejak 20 Mei 1996 dan mengerjakan kapal PELNI tipe 500, yaitu KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI *Maintenance Facilities* (PMF), proyeksi strategis yang dapat menjamin *space* dok dan perbaikan bagi seluruh kapal (termasuk kapal besar) yang dioperasikan oleh PT PELNI (Persero).

d. Bisnis Properti

Persewaaan ruang kantor dari aset gedung PT PELNI (Persero) yang tersebar di seluruh cabang PT PELNI (Persero). Selain itu, bisnis properti juga meliputi persewaan ruang beriklan di atas kapal PELNI serta persewaaan toko dan cafe di atas kapal.

Sebagai perusahaan pelayaran, saat ini PT PELNI (Persero) mengoperasikan 25 unit armada kapal penumpang, 1 unit kapal ferry cepat dan mengoperasikan 3 unit armada kapal barang dengan total bobot mati sebesar 1.200 ton. Untuk melayani penumpang dan barang tersebut, kami membagi armada menjadi:

1. GENERAL *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

Product and Shipping Services *(continued)*

Strategic Business Unit (continued)

a. Ship Agency (continued)

Type of Agency Services: (continued)

4) Protecting Agent
5) Custom Clearance
6) Sea Pollution Services
7) Garbage Removal Services

b. Bahtera Hotel

Hotel that has meeting and training center facilities equipped with meeting room facility that has capacity over 200 pax as well as other supporting facilities.

c. Galangan Surya Surabaya

Established since May 20, 1996, the Shipyard handled 500- type PELNI ships, such as KM Sangiang, KM Pangrango, KM Wilis. PELNI Maintenance Facilities (PMF), strategic projection to guarantee docking and repair space for all vessels (including large ships) that are operated by PT PELNI (Persero).

d. Property Business

Office space renta from PT PELNI (Persero)'s building assets spread across branch office of PT PELNI (Persero). In addition, the property business also includes onboard advertising space rental on PELNi ships as well as onboard store and café rental.

As a shipping company, PT PELNI (Persero) operates 25 units of passenger vessels fleet, one fast ferry vessels and operates a fleet of 3 units of goods with a total deadweight of 1,200 tons. To serve passengers and goods, we divided the fleet into:

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

Produk dan Jasa Perkapalan (lanjutan)

1) Type 3000 pax
2) Type 2000 pax (2 unit dimodifikasi 3 in 1)
3) Type 1000 pax
4) Type 500 pax
5) Ro-Ro type cargo 3 unit
6) Kapal Barang Type Caraka
7) Kapal Logistik Nusantara *(Tipe Container)*

PT Pelni (Persero) dalam menjalankan kegiatan operasinya memiliki unit-unit usaha yang terdiri dari:

- **Kantor Pusat** **1**
- **Kantor Cabang A, lokasi di:** **3**
  1) Tanjung Priuk
  2) Surabaya
  3) Makasar
- **Kantor Cabang B, lokasi di:** **10**
  1) Jayapura
  2) Sorong
  3) Ambon
  4) Semarang
  5) Bau-Bau
  6) Balikpapan
  7) Kupang
  8) Bitung
  9) Manokwari
  10) Tanjungpinang
- **Kantor Cabang C, lokasi di:** **18**
  1) Batam
  2) Pare-Pare
  3) Nabire
  4) Ternate
  5) Medan/Belawan
  6) Pontianak
  7) Kumai
  8) Tarakan
  9) Nunukan
  10) Fak-Fak
  11) Maumere

1. GENERAL *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

Product and Shipping Services *(continued)*

1) Type 3000 pax
2) Type 2000 pax (2 unit modificated to be 3 in 1)
3) Type 1000 pax
4) Type 500 pax
5) Ro-Ro type cargo 3 unit
6) Cargo Ship Type Caraka
7) Logistik Nusantara Ship (Type Container)

PT Pelni (Persero) in managing the business operation has business units that consists as below:

- ***Head Office***
- ***Branch Office A, location at:***
  Tanjung Priuk 1)
  Surabaya 2)
  Makasar 3)
- ***Branch Office B, location at:***
  Jayapura 1)
  Sorong 2)
  Ambon 3)
  Semarang 4)
  Bau-Bau 5)
  Balikpapan 6)
  Kupang 7)
  Bitung 8)
  Manokwari 9)
  Tanjungpinang 10)
- ***Branch Office C, location at:***
  Batam 1)
  Pare-Pare 2)
  Nabire 3)
  Ternate 4)
  Medan/Belawan 5)
  Pontianak 6)
  Kumai 7)
  Tarakan 8)
  Nunukan 9)
  Fak-Fak 10)
  Maumere 11)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.6. Bidang Usaha dan Unit Usaha yang Dimiliki (lanjutan)

- **Kantor Cabang C, lokasi di:** (lanjutan)
  12) Serui
  13) Biak
  14) Sampit
  15) Bali/Denpasar
  16) Larantuka
  17) Tual
  18) Namlea
- **Kantor Cabang D, lokasi di:** — **13**
  1) Palu
  2) Timika
  3) Ende
  4) Kendari
  5) Bima
  6) Waingapu
  7) Kotabaru/Batulicin
  8) Dobo
  9) Toli-Toli
  10) Kaimana
  11) Tanjung Balai Karimun
  12) Merauke
  13) Luwuk
- **Terminal Penghubung, lokasi di:** — **5**
  1) Gorontalo
  2) Ampenan
  3) Pangkal Pinang
  4) Labuhan Bajo
  5) Tahuna
- **SBU:** — **2**
  1) Galangan Surya Surabaya
  2) Hotel Bahtera Cipayung
- **Cabang Khusus, lokasi di:** — **1**
  Singapore

Jumlah — **53**

1. GENERAL *(continued)*

1.6. Business Line and Owned Business Unit *(continued)*

- ***Branch Office C, location at:*** *(continued)*
  12) Serui
  13) Biak
  14) Sampit
  15) Bali/Denpasar
  16) Larantuka
  17) Tual
  18) Namlea
- ***Branch Office D, location at:***
  1) Palu
  2) Timika
  3) Ende
  4) Kendari
  5) Bima
  6) Waingapu
  7) Kotabaru/Batulicin
  8) Dobo
  9) Toli-Toli
  10) Kaimana
  11) Tanjung Balai Karimun
  12) Merauke
  13) Luwuk
- ***Terminal Point, location at:***
  1) Gorontalo
  2) Ampenan
  3) Pangkal Pinang
  4) Labuhan Bajo
  5) Tahuna
- ***SBU:***
  1) Galangan Surya Surabaya
  2) Hotel Bahtera Cipayung
- ***Chief Executive Officer, location at:***
  Singapore

Total

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.7. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

Jumlah karyawan tetap Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebagai berikut: (tidak diaudit)

1. GENERAL *(continued)*

1.7. Human Resources and Organizational Structure

The number of permanent employees on December 31, 2017 dan 2016 respectively as follows: (unaudited)

	31 Des/*Dec 2017*	**31 Des/*Dec 2016***	
Manajer Utama	129	131	*Top Manager*
Senior Manajer	486	488	*Midle Manager*
Yunior Manajer	496	510	*Lower Manager*
Staf	554	566	*Staff*
Officer	2.827	2.868	*Officer*
Jumlah	**4.492**	**4.563**	***Total***

Struktur Organisasi PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) mengalami beberapa kali perubahan, yang terakhir dengan Surat Keputusan Direksi Nomor 11.06/SK/HKO.01/2017 tentang Perubahan Atas Surat Keputusan Direksi Nomor: 04.12/3/SK/HKO.01/2016 tentang Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, tanggal 06 Nopember 2017, sebagaimana tampak pada halaman berikut ini.

Organizational Structure of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amended several times, the last by the Board of Directors Decree Number: 11.06/SK/HKO.01/2017 on the Amendment to the Decree of the Board of Directors Number: 04.12/3/SK/HKO.01/2016 on the Organization Structure, Duties and Functions Principal Owned PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero), dated November 6, 2017, as presented on the following page.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

1.7. Sumber Daya Manusia dan Struktur Organisasi

1.7. Human Resources and Organizational Structure

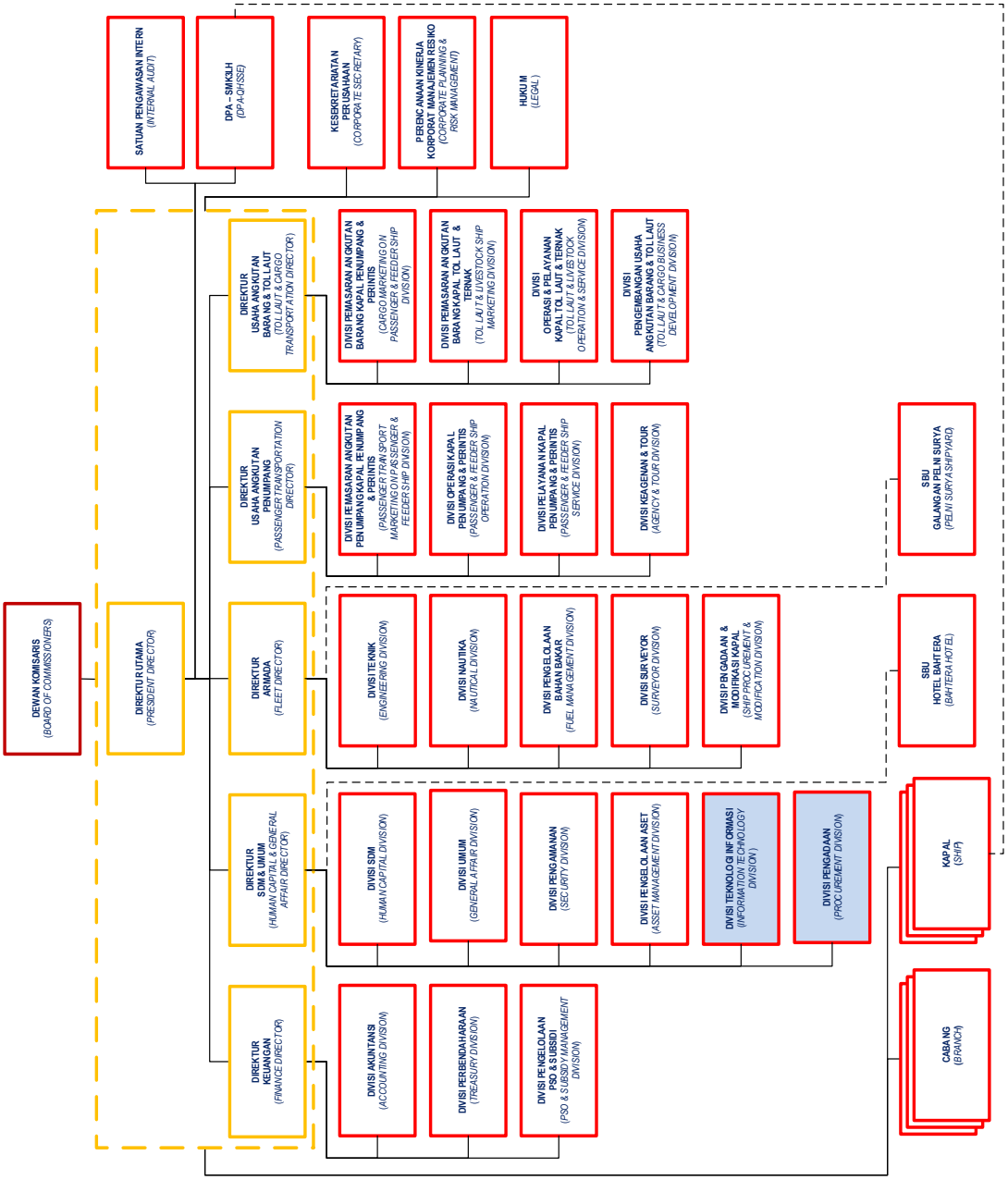

1. UMUM (lanjutan)

1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik

Perseroan menerapkan struktur dan mekanisme GCG dengan tujuan untuk menjalankan suatu proses dan struktur untuk mencapai target kinerja serta mewujudkan akuntabilitas Perseroan guna menghasilkan nilai tambah bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan dengan tetap memperhatikan kepentingan *stakeholders* lainnya.

Penerapan Praktik Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance* atau GCG) di PT PELNI (Persero) merujuk pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, antara lain Undang-Undang No. 40 tahun 2007 mengenai Perseroan Terbatas dan Keputusan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: Kep-117/M-MBU/2002 tanggal 31 Juli 2002 tentang Penerapan Praktek *Good Corporate Governance* pada Badan Usaha Milik Negara (BUMN) serta Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-01/MBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik *(Good Corporate Governance)* pada Badan Usaha Milik Negara sebagaimana telah diperbaharui melalui Nomor PER-09/MBU/2012, bahwa BUMN wajib menerapkan GCG secara konsisten dan berkelanjutan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri ini dengan tetap memperhatikan ketentuan, dan norma yang berlaku serta anggaran dasar BUMN.

Komitmen pelaksanaan GCG di Perseroan diwujudkan dalam rangkaian pedoman terkait pelaksanaan GCG dan penandatanganan Pakta Integritas GCG oleh Dewan Komisaris dan Direksi, sebagai berikut:

a. Pedoman GCG
b. Pedoman *Code of Conduct*
c. Tata Laksana Kerja (Board Manual) Direksi & Dewan Komisaris PT PELNI (Persero)
d. Pedoman Benturan Kepentingan
e. Pakta Integritas
f. Pedoman Penanganan Gratifikasi

1. GENERAL *(continued)*

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG)

The Company implements GCG structure and mechanism aiming to operate process and structure to achieve performance target and accountability of the Company to generate addedvalue for the Shareholders and Stakeholders by considering interests of other Stakeholders.

Implementation of Good Corporate Governance (GCG) practice at PT PELNI (Persero) refers several prevailing Laws in Indonesia, among others, Law Number 40 of 2007 on Limited Liability Company and Minister of State-Owned Enterprise Decree Number Kep-117/M-MBU/2002 dated July 31, 2002 regarding Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprise (SOE), and the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-01 / MBU / 2011 dated August 1, 2011 on Application of Corporate Governance (Good Corporate Governance) in State-Owned Enterprises, as had been refurbished through No. PER-09 / MBU / 2012. GCG that the BUMN are required to apply consistently and continuously by referring to this Regulation by taking into account the terms and norms as well as the articles of association of BUMN.

GCG implementation commitment in the Company is manifested as several manual books related with GCG implementation and GCG integrity pact signing by the Board of Commissioners and Board of Directors, as follows:

a. Manual of GCG
b. Manual of Code of Conduct
c. PT PELNI (Persero) Board Manual for Board of Directors and
d. Manual of Conflict of Interest
e. Integrity Pact
f. Anti-Gratification Manual

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.8. Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (lanjutan)

Perseroan melaksanakan evaluasi praktik GCG melalui kegiatan Asesmen GCG (GCG Assessment) secara berkala guna mengukur kualitas pelaksanaan GCG pada masing-masing Organ Perseroan. Untuk periode tahun buku 2016, Asesmen GCG dilakukan oleh BPKP Perwakilan DKI Jakarta sesuai dengan Laporan No. LGCG-221/PW09/4.1/2017 tanggal 6 Juni 2017 dengan capaian skor 80,785 atau predikat Baik dengan rincian sebagai berikut:

1. GENERAL *(continued)*

1.8. The Implementation of Good Corporate Governance (GCG) *(continued)*

The Company conducts the GCG practice evaluation through regular GCG Assessment (GCG) Assessment activities to measure the quality of GCG implementation in each of the Company's organs. For the period of the fiscal year 2016, GCG Assessment shall be conducted by BPKP DKI Jakarta Representative in accordance with Report No. LGCG-221 / PW09 / 4.1 / 2017 dated June 6, 2017 with an achievement score of 80.785 or Good predicate with details as follows:

No.	Kriteria Pengujian/ *Assessment Criteria*	Bobot/ *Weight*	Capaian/ *Achievement*		Penjelasan/ *Explanation*
			Skor/ *Score*	Persentase/ *Persentage*	
1.	Komitmen Terhadap Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik Secara Berkelanjutan/*Commitment on Sustainable Corporate Governance*	7,000	5,681	81,157	Baik/*Good*
2.	Pemegang Saham dan RUPS (Pemilik Modal)/*Shareholders and GMS (Capital Owner)*	9,000	8,135	90,388	Sangat Baik/ *Very Good*
3.	Dewan Komisaris/*The Board of Commissioners*	35,000	31,461	89,888	Sangat Baik/ *Very Good*
4.	Direksi/*Directors*	35,000	29,389	83,968	Baik/*Good*
5.	Pengungkapan Informasi dan Transparasi/*Information Disclosure and Transparency*	9,000	6,119	67,994	Cukup Baik/ *Fair*
6.	Aspek Lainnya/*Others Aspect*	5,000	0	0	
	Skore Keseluruhan/*Total Score*	**100,000**	**80,785**	**80,785**	**Baik/*Good***

1.9. Manajemen Risiko

PT PELNI (Persero) mengimplementasikan Sistem Manajemen Risiko sesuai dengan framework ISO 31000 untuk menghasilkan praktik manajemen risiko dengan perspektif lebih luas, mudah dipahami, terukur serta mendukung koordinasi dan integrasi antar unit kerja di Perseroan.

Kebijakan Sistem Manajemen Risiko di Perseroan telah diperbarui berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 tanggal 6 Oktober 2016 tentang Penetapan Pedoman Manajemen Risiko PT PELNI (Persero).

1.9. Risk Management

PT PELNI (Persero) implements Risk Management System based on ISO 31000 framework to establish risk management practice with broader perspective, easier to be understood, measured and support cross working units coordination and integration in the Company.

Risk Management System policy has been updated according to Board of Directors Decree No. 10.06/2/SK/HKO.01/2016 dated October 6, 2016 regarding Stipulation of PT PELNI (Persero) Risk Management Policy.

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Guna mendukung penerapan Manajemen Risiko ISO 31000, dilakukan peningkatan kompetensi SDM di unit manajemen risiko dengan mengikutsertakan workshop dan standardisasi sertifikat risk management berbasis ISO 31000 secara berkelanjutan. Tercatat sampai tahun 2016, 1 orang expert risk management (Staf Utama Direktur Utama), 1 orang (manager) memiliki sertifikasi risk management base on ISO 31000 dan base on ISO 31010, 2 orang (staf) memiliki sertifikasi risk management base on ISO 31000 dan ISO 31010.

Profil dan Mitigasi Risiko

a. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Armatek

Masih menjadi urutan pertama dalam 15 Risiko Utama karena menyiapkan armada kapal yang laik laut *(seaworthiness)* merupakan hal yang utama dalam menjalankan operasional perusahaan pelayaran dan mengelola risiko keselamatan kapal adalah assurance dalam menyiapkan kapal laik laut *(seaworthiness)* .

Tindakan Mitigasi:

Melakukan sistem perawatan kapal yang telah dibakukan secara konsisten baik secara harian, bulanan maupun docking tahunan termasuk *home doctor service* , *husbanding team* dengan menerapkan *Integrated Maintenance System* dan penerapan *Fleet Management* berbasis Tekonologi Informasi.

b. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Operasi;

Risiko keselamatan kapal & penumpang ditinjau dari perspektif pengoperasian kapal merupakan salah satu alat untuk mengelola risiko ini agar lebih fokus dan detail, karena memiliki peran yang penting dalam menjalankan alat produksi yang menghadapi berbagai macam tantangan ketidakpastian cuaca, kondisi dermaga dan fasilitas kepelabuhanan, alat-alat keselamatan dan pencetus risiko lainnya *(risk drivers)* .

1. GENERAL *(continued)*

1.9. Risk Management *(continued)*

In order to support the implementation of ISO 31000 Risk Management, personnel competency development in risk management unit had been done by participating the personnel in risk management workshop and certificate standardization based on ISO 31000 in on going basis. As of 2016, 1 risk management expert (Main Staff of the President Director), 1 Manager with risk management certification based on ISO 31000 and based on ISO 31010, 2 staffs with risk management certification based on ISO 31000 and ISO31010.

Risk Profile and Mitigation

a. Vessels & Passenger Safety Risk in Fleet & Technical Perspective

The risk is placed on the first rank of 15 Key Risks due to preparation of seaworthiness vessel fleet is primary aspect in running the shipping company's operations and mitigate the vessel safety risk becomes the assurance in preparing seaworthiness of the ship.

Mitigation Measures:

Consistent formal ship maintenance both daily and monthly as well as annual docking including home doctor service, husbanding team and implementation of Integrated Maintenance System and Fleet Management based on Information Technology.

b. Vessel & Passenger Safety Risk in Operational Perspective

In operational perspective, vessel & passenger safety risk becomes one of the instruments to mitigate the risk to be more focus and detail for having important role in operating modes of production that experienced various challenges such as weather uncertainty, pier and ports facilities condition, safety equipment and other risk drivers.

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

b. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang perspektif Operasi; (lanjutan)

Di kapal-kapal yang dioperasikan PT PELNI (Persero), secara periodik dalam 1 (satu) voyage harus melakukan latihan penanggulangan keadaan darurat (emergency) dan latihan meninggalkan kapal (abandon ship) juga menyiapkan peralatan keselamatan penumpang. Disamping itu, kebijakan fundamental yang selalu diterapkan adalah tidak akan memberangkatkan kapal jika ada hal-hal yang dirasa dapat mengancam keselamatan.

c. Risiko Keselamatan Kapal & Penumpang Perspektif *Designated Persons Ashore* (DPA);

Merupakan risiko yang sangat besar dampaknya maka sebuah unit kerja didirikan khusus untuk melakukan pemeriksaan *(internal safety audit)* dan pemantauan kepatuhan *(compliance)* terhadap semua peraturan dan ketentuan nasional dan internasional yang berlaku di lingkungan pelayaran.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan sinergi dan koordinasi dengan pihak eksternal safety audit diantaranya Biro Klasifikasi Indonesia dalam pemeriksaan keselamatan kapal, kesiapan peralatan keselamatan, kecukupan alat keselamatan sesuai peraturan dan ketentuan yang berlaku. Hasil temuan dari pemeriksaan keselamatan harus segera ditindaklanjuti.

d. Risiko Budget;

Risiko anggaran *(budgetting)* suatu risiko yang dihadapi perusahaan dalam hal pengelolaan anggaran yang telah ditetapkan dengan risk driver komponen biaya dan pendapatan. Dilakukan risk assesment secara periodik triwulanan maka dilakukan langkah-langkah tindaklanjut *(detail response plan)* untuk menangani risiko ini sehingga dapat dihilangkan atau dikurangi dampak finansialnya terhadap anggaran.

1. GENERAL *(continued)*

1.9. Risk Management *(continued)*

Risk Profile and Mitigation *(continued)*

b. Vessel & Passenger Safety Risk in Operational Perspective; (continued)

On the ships operated by PT PELNI (Persero), 1 (one) voyage shall perform emergency response and abandon ship training periodically as well as preparing passenger safety equipment. In addition, the fundamental policy to be implemented is not to depart the ship if there is any issue that is analyzed may threat the safety.

c. Vessel & Passenger Safety Risk in Designated Persons Ashore Perspective (DPA);

A risk with huge impact, therefore, a special working unit has been established to perform internal safety unit and compliance monitoring towards all of national and international regulations in shipping industry.

Mitigation Measures:

Synergy and coordination with external safety audit, such as Indonesia Classification Bureau to examine vessels safety, safety equipment readiness according to the prevailing Law. Result of the safety audit finding shall be followed-up immediately.

d. Budget Risk;

Budgeting risk refers to a risk experienced by the Company in terms of budget management as stipulated with cost and revenue components as risk drivers. Risk assessment had been done periodically in every quarter and detail response plan had been implemented to mitigate the risk, therefore, the risk is possible to be eliminated or reduced in terms of its financial impact on the budget.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

d. Risiko Budget; (lanjutan)

Tindakan Mitigasi:

Melakukan kebijakan disiplin anggaran dengan mengingatkan kepada pengguna anggaran atau tiap-tiap unit kerja untuk memenuhi RKAP yang telah ditetapkan.

e. Risiko *Public Service Obligation* (PSO);

Dana *Public Service Obligation* (PSO) masuk dalam struktur pendapatan perusahaan sehingga merupakan suatu risiko cukup besar bagi financial perusahaan apabila tidak tertangani dengan baik pengelolaannya. Pada tahun 2016, risiko PSO ini masuk dalam risk tolerance karena serapan Dana PSO terpenuhi.

Tindakan Mitigasi:

Menjaga pemenuhan voyage seluruh kapal merupakan risk response plan yang tepat disamping tahap-tahap teknis lainnya.

f. Risiko Kelangsungan Usaha Perusahaan;

Tingkat *Competitiveness Level* yang rendah pada segmen pasar penumpang l*ong distance* dan tren penurunan jumlah penumpang merupakan suatu risiko kelangsungan usaha bagi perusahaan.

Tindakan Mitigasi:

Diperlukan kajian perubahan pola trayek *medium distance* .

g. Risiko Pax Factor Kapal Penumpang;

Tingkat pax factor penumpang yang rendah serta terdapat tren penurunan jumlah penumpang kapal-kapal PELNI maka menjadi suatu risiko yang harus ditangani segera.

Tindakan Mitigasi:

Promosi *preonbard* , *onboard* dan *post onboard* melalui event-event dan MICE serta kemudahan penjualan tiket kapal bagi calon penumpang.

1. GENERAL *(continued)*

1.9. Risk Management *(continued)*

Risk Profile and Mitigation *(continued)*

d. Budget Risk; (continued)

Mitigation Measures:

Implementation of tight budget policy by warning the budget user or every working unit to comply with stipulated Budget Plan (RKAP).

e. Public Service Obligation (PSO) Risk;

Public Service Obligation (PSO) proceeds is included in the Company's revenue structure, therefore, this becomes a major risk for the Company's financial if not properly managed. In 2016, PSO risk is classified as risk tolerance due to the PSO proceeds absorption is fulfilled.

Mitigation Measures:

To maintain voyage fulfillment in al vessels as correct risk response plan besides other technical initiatives

f. Going Concern Risk;

Low competitiveness level in long distance passenger segment and decreasing trend of passenger number brought business continuity risk for the Company.

Mitigation Measures:

Review the medium distance route scheme.

g. Passenger Ship Pax Factor Risk;

Low passenger pax factor level and decreasing trend of PELNI ships passenger number brought a risk that shall be mitigated immediately.

Mitigation Measures:

Pre-onoard, onboard and post onboard promotion via events and MICE and easy passenger ship ticket sales.

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

h. Risiko Kelayakan dan Keamanan Gedung;

Kelayakan dan keamanan gedung merupakan suatu risiko bagi penggunanya, terlebih ada beberapa gedung yang disewakan ke pihak ketiga, maka risiko ini harus ditangani dengan baik.

Tindakan Mitigasi:

Penyusunan SOP Penggunaan dan Pemeliharaan Gedung menjadi *risk response plan* risiko ini.

i Risiko Pemakaian BBM dan Pelumas;

Biaya BBM dan pelumas merupakan biaya variable terbesar bagi PT PELNI (Persero) dalam mengoperasikan armada kapal.

Tindakan Mitigasi:

Pembentukan Biro Pengelolaan Bahan Bakar yang bertugas monitoring pemakaian BBM dan pelumas sesuai dengan standar yang telah ditetapkan *(Standard Fuel Oil Consumption)* akan berdampak pada efisiensi pemakaian BBM dan Pelumas.

j. Risiko Pemasaran Kapal Barang, Ternak & Perintis;

Penyerapan subsidi pada Kapal Barang Tol Laut, Perintis dan Ternak merupakan salah satu kunci keberhasilan pengelolaan risiko ini.

Tindakan Mitigasi:

Pemenuhan *voyage* Kapal Barang Tol Laut, Perintis dan Ternak menjadi hal yang utama dalam mitigasinya.

k. Risiko Pengadaan Barang & Jasa;

Menjadi risiko bagi perusahaan apabila terjadi suatu *case* proses pengadaan barang & jasa tidak sesuai dengan aturan dan ketentuan yang berlaku, pada tahun 2016 *Case* : Nil, maka termasuk dalam *risk tolerance* .

Tindakan Mitigasi:

Menjaga *existing controls* yang telah ditetapkan agar risiko ini tidak terjadi.

1. GENERAL *(continued)*

1.9. Risk Management *(continued)*

Risk Profile and Mitigation *(continued)*

h. Building Feasibility and Security Risk;

Building feasibility and security is a risk for the user, further, some buildings are rented to third parties, the risk shall be mitigated properly.

Mitigation Measures:

Formulation of Building Use and Maintenance as this risk response plan.

i. Oil Fuel and Lubricants Consumption Risk;

Oil fuel and lubricants costs are the highest variable cost for PT PELNI (Persero) in operating its vessel fleets.

Mitigation Measures:

Establishment of Oil Fuel Management Bureau who is in charge to monitor Oil Fuel and Lubricants use based on stipulated standard (Standard Fuel Oil Consumption) that will influence Oil Fuel & Lubricants use efficiency.

j. Cargo, Cattle & Pioneer Ships Marketing Risk;

Subsidy absorption in cargo ship, Tol Laut Shop, Piooner Ship and Cattle Ship becomes key of this risk management success.

Mitigation Measures:

Fulfillment of Tol Laut, Pioneer and Cattle ships voyage is primary mitigation plan.

k. Procurement Risk;

Risk for the Company if dealing with a procurement process that is not complied with prevailing law and regulation, In 2016 the case was nil, and classified as risk tolerance.

Mitigation Measures:

Maintain existing controls that has been implemented to prevent this risk occurrence.

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

l. Risiko Pengadaan & Modifikasi Kapal;

Risiko penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan, penyimpangan atas standar operasi dan prosedur, kesalahan spesifikasi dapat terjadi dan memberikan dampak yang tidak diinginkan.

Tindakan Mitigasi:

Memastikan semua peraturan perundang-undangan dan standar operasi & prosedur ditaati oleh Divisi yang melakukan fungsi pengadaan kapal.

m. Risiko Audit;

Merupakan suatu risiko bagi perusahaan apabila temuan dan rekomendasi tindaklanjut hasil audit baik dari internal maupun eksternal auditor tidak dilaksanakan.

Tindakan Mitigasi:

Monitoring tindak lanjut auditee atas rekomendasi temuan disamping melaksanakan tindaklanjut rekomendasi dari eksternal auditor.

n. Risiko Pengembangan Sumber Daya Manusia;

Pengembangan Sumber Daya Manusia yang tertata baik berdampak positif terhadap performa perusahaan serta pencapaian tujuan perusahaan. Oleh sebab itu, PT PELNI (Persero) menempatkan risiko ini termasuk dalam 15 Risiko Utama Perusahaan sehingga memperoleh perhatian yang lebih untuk ditangani dan dikelola dengan baik.

Tindakan Mitigasi:

Penanganan risiko secara komperhensif dengan fokus pada pengembangan kompetensi pegawai dan *performance appraisal* .

o. Risiko Teknologi Informasi;

Menjadi risiko yang besar bagi perusahaan apabila teknologi informasi yang diterapkan perusahaan tidak dikelola dengan baik. Penentuan *risk drivers* dan KRI Target menjadi hal yang penting dalam menangani risiko ini.

1. GENERAL *(continued)*

1.9. Risk Management *(continued)*

Risk Profile and Mitigation *(continued)*

l. Ship Procurement & Modification Risk;

Risk of incompliance with the Law, violation of operational standard and procedure, specification mistake may be occurred and cause unexpected impact.

Mitigation Measures:

Ensure every law and regulation and operational standard & procedure have been complied by the Division that performs ship procurement function.

m. Audit Risk;

A risk for the Company if audit finding and recommendation follow-up from internal and external auditors is not implemented.

Mitigation Measures:

Monitoring follow-up of auditee on the finding recommendation besides follow-up of recommendation from the external auditor.

n. Human Resources Development Risk;

An effective Human Resources development will contribute positively to performance of the Company as well as achievement of the Company's objectives. Therefore, PT PELNI (Persero) classifies this risk as 15 Key Risks of the Company that is exposed by greater concern to be managed and mitigated properly.

Mitigation Measures:

Comprehensive risk mitigation by focusing on employee competency development and performance appraisal.

o. Information Technology Risk;

A major risk of the Company if the information technology is not well managed. Stipulation of risk drivers and target KRI become important aspect in this risk mitigation.

1. UMUM (lanjutan)

1.9. Manajemen Risiko (lanjutan)

Profil dan Mitigasi Risiko (lanjutan)

o. Risiko Teknologi Informasi; (lanjutan)

Tindakan Mitigasi:

Menjaga kontrol yang telah ditetapkan dan disiplin menerapkan seluruh prosedur yang berlaku di lingkungan Teknologi Informasi.

p. Risiko Aset *Idle* ;

Risiko atas ruang kantor dan ruang kapal yang tidak tersewa merupakan kehilangan mendapatkan pendapatan dan oleh sebab itu perlu dimonitor dengan seksama.

Tindakan Mitigasi:

Melakukan pemasaran ruang perkantoran dan ruang di kapal serta menetapkan *Key Performance Indicator* atas keberhasilan pemasaran. Selain itu dilakukan juga renovasi atas ruang kantor dan ruang kapal agar lebih mudah dipasarkan.

q. Risiko Reputasi (Humas);

Menjadi risiko yang cukup besar dampaknya bagi nama baik perusahaan apabila terjadi suatu peristiwa yang berkaitan dengan kegiatan usaha utama perusahaan *(core business)* terutama kejadian keselamatan pelayaran. Pemulihan nama baik secara tepat dan cepat menjadi tugas utama bidang Humas untuk menjaga kepercayaan *(trust)* dari *stakeholders* .

Tindakan Mitigasi:

Pemulihan nama baik perusahaan dengan target waktu maksimal 3 hari melalui jaringan media nasional.

1. GENERAL *(continued)*

1.9. Risk Management *(continued)*

Risk Profile and Mitigation *(continued)*

o. Information Technology Risk; (continued)

Mitigation Measures:

Maintain the stipulated control and discipline implementation of all procedures prevailed in Information Technology aspect.

p. Idle Assets Risk;

Risk of office space and ships room that are vacant that will cause loss of income, therefore, the risk shall be monitored thoroughly.

Mitigation Measures:

Marketing plan for office rental and ship room as well as stipulation of Key Performance Indicators on the marketing succeed. In addition, the plan also includes office space and ship room renovation to support the marketing process.

q. Reputation (PR) Risk;

A risk with major impact under particular event that is related with the company's core business, primarily shipping safety case. Fast and effective reputation recovery is main duty of Public Relation Unit to maintain trust of the Stakeholders.

Mitigation Measures:

Recovery of the Company's reputation with maximum target within 3 days via national media network.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

Perseroan telah memperoleh sertifikasi atas aset yang digunakan dalam kegiatan usaha utama dibidang pelayaran, meliputi:

1. GENERAL *(continued)*

1.20. Certification of Quality Management System

The Company has certified the assets used in the main business activities in the field of shipping, including:

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
1.	Sertifikat Nasional Pencegahan Pencemaran dari Kapal/*Ship Pollution Prevention National Certificate*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/*Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	14 Desember 2016 s.d. 21 September 2017/ *December14, 2016 until September 21, 2017*
2.	Sertifikat Keselamatan Kapal Penumpang/*Passengers Vessels Safety Certificate*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/*Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	26 Oktober 2015 s.d. 25 Januari 2016/ *October 26, 2015 until January 25, 2016*
3.	Dokumen Keselamatan Pengawakan Minimum/*Minimum Safe Manning Document*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/*Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	25 Juli 2016 s.d. 12 Oktober 2016/ *July 25, 2016 until October 12, 2016*
4.	Sertifikat Internasional Pencegahan Pencemaran Oleh Kotoran/*Dirt Pollution Prevention International Certificate*	Dirjen Perhubungan Laut, Kementerian Perhubungan RI/*Marine Transportation General Directorate, Ministry of Transportation Republic of Indonesia*	1 Juli 2016 s.d. 30 September 2016/ *July 1, 2016 until September 30, 2016*
5.	Sertifikat Garis Muat, Lambung dan Mesin - Kapal Penumpang/*Load Line, Hull and Machine - Passenger Ships Certificate:*		
	a. KM Awu		3/4/2017 - 5/4/2017
	b. KM Bukit Raya		30/9/2014 - 27/3/2019
	c. KM Binaiya		2/6/2014 - 25/3/2019
	d. KM B. Siguntang		24/10/2016 - 23/5/2021
	e. KM Ciremai		24/1/2014 - 1/8/2018
	f. KM Dobonsolo		15/11/2013 - 11/10/2018
	g. KM Dorolonda		25/10/2016 - 11/7/2021
	h. KM Egon	PT Biro Klasifikasi Indonesia	30/9/2015 - 29/6/2010
	i. KM G. Dempo		18/6/2013 - 20/6/2018
	j. KM Kelimutu		7/5/2015 - 4/2/2020
	k. KM Kelud		23/12/2013 - 27/10/2018
	l. KM Lawit		26/5/2016 - 8/12/2019
	m. KM Leuser		24/7/2013 - 28/5/2018
	n. KM Lambelu		20/7/2012 - 15/5/2017
	o. KM Labobar		12/9/2014 - 26/6/2019

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

1.20. Sertifikasi Sistem Manajemen Mutu

1.20. Certification of Quality Management System

No.	Nama Sertifikat/ *Name of Certificate*	Lembaga Penerbit Sertifikat/ *Certificate Issuer Institution*	Masa Berlaku/ *Validity Period*
5.	Sertifikat Garis Muat, Lambung dan Mesin - Kapal Penumpang/*Load Line, Hull and Machine - Passenger Ships Certificate:*		
	p. KM Nggapulu		3/5/2012 - 5/4/2017
	q. KM Pangrango		9/11/2016 - 9/4/2017
	r. KM Sirimau		21/9/2015 - 17/5/2020
	s. KM Sinabung		23/1/2013 - 1/11/2017
	t. KM Sangiang		19/6/2014 - 12/5/2019
	u. KM Tilong Kabila		12/6/2015 - 4/2/2020
	v. KM Tatamailau		19/1/2016 - 25/3/2020
	w. KM Tidar		26/1/2017 - 26/11/2021
	x. KM Umsini		10/8/2015 - 28/7/2020
	y. KM Wilis		11/5/2015 - 11/2/2020
	z. KM Caraka Jn Iii-4		25/10/2016 - 24/3/2017
	aa. KM Caraka Jn Iii-22		8/3/2013 - 12/1/2017
	ab. KM Caraka Jn Iii-32		4/7/2014 - 14/5/2019
	ac. Kfc Jel Liner		22/10/2013 - 11/9/2018

1.21. Entitas Anak

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, entitas anak yang dikonsolidasikan termasuk persentase kepemilikan Perusahaan sebagai berikut:

1.21. Subsidiaries

As of December 31, 2017 and 2016, the subsidiaries which were consolidated, including the respective percentages of ownership held by the Company, are as follows:

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bidang Usaha/ *Line of Business*	*Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan/ *Persentage of Ownership*	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ *Total Assets (Before Elimination)*	
				31 Desember/ December 2017	*31 Desember/ December 2016*
PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)	Angkutan transportasi, bongkar muat, pengiriman barang, pergudangan, operator terminal laut, truk, custom clearance, pedalaman depo/*Transportation, loading, logistic, warehouse, marine terminal operator, truck, custom clearance, inland depo.*		**99,47%**	**284.811.017.330**	**245.704.031.622**
PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PT PIDC)	Jasa perdagangan umum, jasa kepelabuhan, perusahaan pengutusan kepabeanan, jasa kebersihan, jasa pengamanan, jasa pengelolaan kasur, jasa penyediaan air minum dalam kemasan, jasa pengelolaan hotel, jasa penyediaan hiburan atas kapal/*General trading, port services,*		**99,50%**	**138.318.058.306**	**105.476.368.015**

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

1.21. Entitas Anak (lanjutan)

1.21. Subsidiaries *(continued)*

Entitas Anak/ *Subsidiaries*	Bidang Usaha/ *Line of Business*	*Tahun Operasi Komersial/ Start of Commercial Operations*	Persentase Kepemilikan/ *Persentage of Ownership*	Jumlah Aset (Sebelum Eliminasi)/ *Total Assets (Before Elimination)*	
				31 Desember/ December 2017	*31 Desember/ December 2016*
PT Pelita Indonesia Djaya Corp (PT PIDC)	custom delegation company, cleaning service, security service, management service for bed, drinking and bottled water supply, hotel management service, onboard entertainment service.				
PT Rumah Sakit Pelni	Rumah Sakit/*Hospital*		99,96%	290.200.259.225	267.243.352.962

1.21.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

PT Sarana Bandar Nasional didirikan berdasarkan Akte Notaris Soelaiman Arjasasmita di Jakarta No. 59 tanggal 31 Maret 1986 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan dengan Surat Keputusan Nomor 02-1932 HT 01.01 tahun 1987 tanggal 5 Maret 1987. Anggaran Dasar Entitas diperbaharui dengan Akte Notaris Ny. Imah Fatimah, SH No. 17 tanggal 12 Agustus 1998. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh sebesar Rp15.000.000.000.

Perubahan anggaran dasar terakhir berdasarkan Akta Notaris Saifullah, SH No. 9 tahun 2008 pada tanggal 12 Agustus 2008 dan telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 tahun 2008 tanggal 4 September 2008.

Modal Saham

Berdasarkan Akta Pendirian PT Sarana Bandar Nasional Nomor 59 tanggal 31 Maret 1986, Notaris Soeleman Ardjasasmita, SH dan Akta perbahan anggaran dasar terakhir Nomor: 17 tanggal 12 Agustus 1998, Notaris Imas Fatimah, SH modal dasar perseroan berjumlah Rp15.000.000.000 (lima belas milyar rupiah) terbagi atas 15.000 (lima belas ribu) lembar saham dengan nilai nominal Rp1.000.000 (satu juta rupiah) setiap lembar saham.

1.21.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

PT Sarana Bandar Nasional was established based on the Notary Deed Soelaiman Arjasasmita in Jakarta No. 59 March, 31 1986 and has received approval by the Minister of Law and legislation with the Decree HT 01.01 02-1932 Number 1987 on 5 March 1987. The basic budget entity updated with the Notary Deed Mrs. Imah Fatimah, SH No. 17 12 August 1998. The capital placed and paid in full is Rp15.000.000.000.

The last basic budget changes based on the Deed Notary Saifullah, SH No. 9 Year 2008 on August,12 2008 and has received approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-5912.AH.01.02 dated September, 4 2008.

Capital Stock

Based on Deed of Establishment of PT Sarana Bandar National No. 59 dated March 31, 1986, Notary Soeleman Ardjasasmita, SH and Deed perbahan Last statutes No. 17 dated August 12, 1998, Notary Imas Fatimah, SH authorized capital amounted to Rp15,000,000,000 (fifteen billion rupiah) divided into 15,000 (fifteen thousand) shares with a nominal value of Rp1,000,000 (one million rupiah) per share.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.21. Entitas Anak (lanjutan)

1.21.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

1. GENERAL *(continued)*

1.21. Subsidiaries *(continued)*

1.21.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

Modal Saham

Capital Stock

Pemegang Saham/ *Shareholders*	Jumlah Saham / *Shares*	Nilai Nominal/ *Par Value* (Rp)	Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/*Issued and Fully Paid Shares Value* (Rp)	Persentase Kepemilikan/ *Ownership Percentage*
PT Pelni (Persero)	14.920	1.000.000	14.920.000.000	99,47%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	80	1.000.000	80.000.000	0,53%
Jumlah / *Total*	**15.000**	**1.000.000**	**15.000.000.000**	**100,00%**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tentang Pemberhentian dan Pengangkatan anggota Dewan Komisaris PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) tanggal 12 Nopember 2013, dan, Surat Keputusan Direktur Utama PT PELNI (Persero) selaku Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) Nomor: 01/DIR/SBN/X/2014 tanggal 16 Oktober 2014, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Sarana Bandar Nasional, maka susunan Dewan Komisaris dan Direksi PT Sarana Bandar Nasional sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors

Based on the Minutes of the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) on dismissal and appointment of members of the Board of Commissioners of PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN) dated November 12, 2013, and, the Decree of the President Director of PT Pelni (Persero) as the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) Number: 01 / DIR / SBN / X / 2014 dated October 16, 2014, on Termination and Appointment of Directors of PT Sarana Bandar Nasional, the composition of the Board of Commissioners and Directors of PT Sarana Bandar National as follows:

		31 Desember/ *December* 2017		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Capt. Daniel E. Bangonan	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	August Harris, SH	:	*Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Suharyanto	:	*President Director*
Direktur Operasional	:	Murdiyoto	:	*Operation Director*
Direktur Keuangan	:	Nofiyetti Edizar	:	*Finance Director*

Tempat dan Kedudukan

Dalam menjalankan usahanya PT Sarana Bandar Nasional berkedudukan di Jl. Cempaka Putih Tengah II Blok B 13-14 Cempaka Putih Jakarta Pusat 10510.

Place and Position

Currently, PT Sarana Bandar National is located in Jl. Cempaka Putih, Central II Block B 13-14 Cempaka Putih 10510.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.21. Entitas Anak (lanjutan)

1.21.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 118 dan 202 karyawan. (Tidak Diaudit)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

1. GENERAL *(continued)*

1.21. Subsidiaries *(continued)*

1.21.1. PT Sarana Bandar Nasional (PT SBN)

Human Resources

The number of employees of the company on December 31, 2017 and 2016 are 218 and 202 employees. (Unaudited)

Summary of Key Financial Information

	31 Desember/ December 2017	***31 Desember/ December 2016***	
Aset	284.811.017.330	245.704.031.622	*Assets*
Liabilitas	43.184.898.925	49.693.976.431	*Liabilities*
Ekuitas	241.626.118.405	196.010.055.191	*Equity*
Pendapatan	292.879.633.825	228.899.824.235	*Revenues*
Beban	(247.376.106.144)	(188.107.872.511)	*Expenses*
Laba Tahun Berjalan	45.503.527.681	40.791.951.724	*Profit for The Year*

1.21.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya Corporation, Jakarta didirikan berdasarkan Akte Notaris Djojo Mulyadi, SH di Jakarta No. 3 tanggal 29 September 1969 dan telah mendapat pengesahan oleh Menteri Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 9 Desember 1969.

Anggaran Dasar Perseroan diperbaharui dengan Akte Notaris SP. Henny Singgih, SH No. 21 tanggal 10 April 2001. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp2.010.000.000.

Modal Saham

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 99,5% penyertaan PT Pelayaran Nasional Indonesia dan 0,5% penyertaan Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni sesuai dengan Akta Notaris Raden Mas Soediarto Soenarto, SH No. 7 tanggal 10 Juni 2009 yang disahkan dengan Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No.AHU-43800.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 4 september 2009.

1.21.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC)

PT Pelita Indonesia Djaya Corporation, Jakarta was established based on the Notary Act Djojo Mulyadi, SH in Jakarta No. 3 dated September 29, 1969 and was approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia on December 9, 1969.

The Articles of Association of the Company are updated by Notarial Deed SP. Henny Singgih, SH. No. 21 dated April 10, 2001. The issued and fully paid capital amounted to Rp2,010,000,000.

Shares Capital

Shares Capital paid to the entity is 99.5% ownership of PT Pelayaran Nasional Indonesia and 0.5% ownership in accordance Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni Deed Raden Mas Soediarto Soenarto, SH No. 7 dated June 10, 2009 were approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia No. AHU-43800.AH.01.02 in 2009 on September 4, 2009.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.21. Entitas Anak (lanjutan)

1.21.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) (lanjutan)

Modal Saham (lanjutan)

1. GENERAL *(continued)*

1.21. Subsidiaries *(continued)*

1.21.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) *(continued)*

Shares Capital *(continued)*

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham / *Shares***	**Nilai Nominal/ *Par Value* (Rp)**	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares Value* (Rp)**	**Persentase Kepemilikan/ *Ownership Percentage***
PT Pelni (Persero)	2.000	1.000.000	2.000.000.000	99,50%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	10	1.000.000	10.000.000	0,50%
Jumlah / *Total*	**2.010**	**1.000.000**	**2.010.000.000**	**100,00%**

Dewan Komisaris dan Direksi

Berdasarkan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT Pelita Indonesia Djaya Nomor :AHU-10.AH.02.02- Tahun 2009 Tanggal 24 April 2009 Keputusan Kepala Badan Pertahanan Nasional RI Nomor : 104/KEP-17.3/III/2011 Tanggal 21 Maret 2011 Tentang Pemberhentian dan Pengalihan Tugas Anggota Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelita Indonesia Djaya maka susunan Direksi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia per tanggal 27 Mei 2016 sebagai berikut:

Board of Commissioners and Directors

Based on the General Meeting Extraordinary Shareholders (EGM) of PT Pelita Indonesia Djaya Number: AHU-10.AH.02.02- Year 2009 Date 24 April 2009 Decree of the Head of the National Defence Decree No. 104 / KEP-17.3 / III / 2011 Date March 21, 2011 On Termination and Transfer of Duties Members of the Board of Directors of the Company (Persero) PT Pelita Indonesia Djaya membership of the Board of Directors the Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia as of May 27, 2016 as follows:

		31 Desember/ *December* 2017		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Olih Masolich Sodikin	:	*President Commissioner*
Direksi				***Director***
Direktur Utama	:	Effendi	:	*President Director*
Direktur Operasi	:	Asiano Yames Iryanto Lontoh	:	*Operation Director*

Tempat dan Kedudukan

Entitas berkedudukan di Jalan Palmas No 2 Pelabuhan Tanjung Priok Jakarta Utara.

Place and Position

Entities domiciled in Palmas No 2, Tanjung Priok Port in North Jakarta.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 1.002dan 943 karyawan. (Tidak diaudit)

Human Resources

The number of employees of the company on December 31, 2017 and 2016 are 1.002 and 943 employees. (Unaudited)

1. UMUM (lanjutan)

1.21. Entitas Anak (lanjutan)

1.21.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) (lanjutan)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting

1. GENERAL *(continued)*

1.21. Subsidiaries *(continued)*

1.21.2. PT Pelita Indonesia Djaya Corporation (PT PIDC) *(continued)*

Summary of Key Financial Information

	31 Desember/ December 2017	*31 Desember/ December 2016*	
Aset	138.318.058.306	105.476.368.015	*Assets*
Liabilitas	60.293.748.001	60.635.143.658	*Liabilities*
Ekuitas	78.024.310.305	44.841.224.357	*Equity*
Pendapatan	315.514.834.715	189.055.695.008	*Revenues*
Beban	(281.741.637.595)	(165.825.432.958)	*Expenses*
Laba Tahun Berjalan	33.773.197.120	23.230.262.050	*Profit for The Year*

1.21.3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI, didirikan berdasarkan Akta Notaris Yulkhaizar, SH No. 7 tanggal 9 November 2007 di Jakarta. PT Rumah Sakit PELNI merupakan salah satu usaha sampingan dari Entitas yang sejak tanggal 1 Juli 2007 dipisah menjadi Entitas Anak. Modal yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebesar Rp59.480.000.000.

Modal Saham

Berdasarkan Akta Notaris Yulkhaizar Panuh, SH., No. 7 tanggal 9 November 2008, modal dasar Perseroan berjumlah Rp237.920.000.000 terbagi atas 237.920 lembar saham, masing-masing saham bernilai nominal sebesar Rp 1.000.000.

Modal dasar ditempatkan dan disetor penuh sebesar 25% atau Rp 59.480.000.000 yang terdiri dari 59.480 lembar saham dengan nilai nominal sebesar Rp1.000.000.

1.21.3. PT Rumah Sakit PELNI

PT Rumah Sakit PELNI, was established based on the Deed Notary Yulkhaizar, SH No. 7 date of November 9, 2007 in Jakarta. PT Rumah Sakit PELNI is one of the side business of entity that since July 1, 2007 are separated into subsidiary. The capital placed and paid in full is Rp59.480.000.000.

Share Capital

Based on Notarial Deed Yulkhaizar Panuh, SH., No.7 dated November 9, 2008, authorized capital stock amounting to Rp237.920.000.000 divided into 237.920 shares, each share having a nominal value of Rp 1.000.000.

Authorized and issued capital stock of 25% or Rp 59,480,000,000 consisting of 59.480 shares with a nominal value of Rp1.000.000.

Pemegang Saham/ *Shareholders*	**Jumlah Saham / *Shares***	**Nilai Nominal/ *Par Value* (Rp)**	**Modal Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Shares Value* (Rp)**	**Persentase Kepemilikan/ *Ownership Percentage***
PT Pelni (Persero)	59.455	1.000.000	59.455.000.000	99,96%
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	25	1.000.000	25.000.000	0,04%
Jumlah / *Total*	**59.480**	**1.000.000**	**59.480.000.000**	**100,00%**

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

1. UMUM (lanjutan)

1.21. Entitas Anak (lanjutan)

1.21.3. PT Rumah Sakit PELNI

Dewan Komisaris dan Direksi

Sesuai dengan SK Direksi PT PELNI No: 128/HKO.01/DIR/XII2013 tanggal 18 Desember 2013 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Direksi PT Rumah Sakit PELNI dan SK Direktur Utama PT PELNI No: 08/HK0.01/DIRI-2014 tanggal 16 Januari 2014 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris PT Rumah Sakit PELNI dan Surat Keputusan RUPS Nomor: 09.16/1/SK/HKO.01/2015 tanggal 16 Oktober 2015 tentang Pengangkatan dan Pengalihan Dewan Komisaris PT Rumah Sakit PELNI , dengan susunan sebagai berikut:

***1. GENERAL** (continued)*

***1.21. Subsidiaries** (continued)*

1.21.3. PT Rumah Sakit PELNI

Board of Commissioners and Directors

In accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Pelni No: 128 / HKO.01 / DIR / XII2013 dated December 18, 2013 on the Dismissal and Appointment of Directors PT RS PELNI and SK President Director of PT Pelni No: 08 / HK0.01 / SELF-2014 January 16 2014 on Termination and Appointment of Commissioners of T RS PELNI and Decree No. GMS: 09:16 / 1 / SK / HKO.01 / 2015 dated October 16, 2015 on the Appointment and Transfer of Board of Commissioners of T RS PELNI , with the following composition:

		31 Desember/ December 2017		
Dewan Komisaris				***Board Of Commissioners***
Komisaris Utama	:	Wibisono, SE., MM	:	*President Commissioner*
Komisaris	:	Laksda TNI (PURN) dr. H Darmansyah	:	*Commissioner*
Direksi				***Directors***
Direktur Utama	:	dr. Fathema Djan Rachmat, Sp.B.BTKV (K)	:	*President Director*
Direktur Adm.& Keuangan	:	Mohamad Kartobi	:	*Director of Adm & Financial*
Direktur Operasi	:	dr. Rooshardianty Suryandari, MBA	:	*Director of Operation*
Direktur Medis	:	dr. Astari Mayang Anggarani, MARS	:	*Director of Medical*

Tempat dan Kedudukan

Saat ini, PT RS Pelni beralamat di Jl. Aipda K.S Tubun No.92-94, Jakarta Barat 11410.

Place and Position

Currently, PT RS Pelni Located In Aipda K. S Tubun No.92-94, West Jakarta 11410.

Sumber Daya Manusia

Jumlah karyawan Perseroan pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 masing-masing sebanyak 1.227 dan 1.225 karyawan. (Tidak diaudit)

Human Resources

The number of employees of the company on December 31, 2017 and 2016 are 1.227 and 1.225 employees.(Unaudited)

Ringkasan Informasi Keuangan Penting / ***Summary of Key Financial Information***

	31 Desember/ December 2017	*31 Desember/ December 2016*	
Aset	290.200.259.225	267.243.352.962	*Assets*
Liabilitas	157.925.695.933	170.857.861.676	*Liabilities*
Ekuitas	132.274.563.292	96.385.491.286	*Equity*
Pendapatan	447.991.683.195	415.344.164.935	*Revenues*
Beban	(410.966.676.305)	(382.587.217.644)	*Expenses*

Laba Tahun Berjalan	37.025.006.890	32.756.947.291	*Profit for The Year*

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN

PT Pelni (Persero) dalam menjalankan kegiatan jasa perkapalan tunduk pada Undang-undang Republik Indonesia nomor 17 Tahun 2008, tentang Pelayaran dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 61 Tahun 2009, tentang Kepelabuhanan, serta ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh Menteri Perhubungan. Beberapa ketentuan penting yang berkaitan dengan jasa perkapalan:

a. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

b. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2015 tentang Penetapan dan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting.

c. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Publik untuk Angkutan Barang di Laut.

d. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 161 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang di Laut.

e. Peraturan Menteri Perhubungan RI Nomor PM. 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Kapal Perintis Milik Negara.

f. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tarif Angkutan Barang Di Laut Dalam Rangka Pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik *(Public Service Obligation)* .

g. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 20 tahun 2015, tentang Standar Keselamatan Pelayaran.

h. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 37 tahun 2015 tentang Standar pelayanan penumpang angkutan laut.

i. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 65 tahun 2015 tentang Komponen biaya kompensasi yang dibayarkan oleh pemerintah dalam penyelenggaraan angkutan kewajiban pelayanan publik bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi.

j. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 119 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 37 tahun 2015, tentang standar pelayanan penumpang angkutan laut.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION

PT Pelni (Persero) in carrying out the shipping services activities is subject to the Law of the Republic of Indonesia number 17 of 2008, concerning Shipping and Regulation of the Government of Republic of Indonesia number 61 of 2009, on Ports, as well as the provisions stipulated by the Minister of Communications. Some important provisions related to shipping services:

a. Presidential Regulation Number 2 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.

b. Presidential Regulation Number 71 of 2015 regarding Stipulation and Storing of Groceries and Valuable Goods.

c. Presidential Regulation Number 106 of 2015 regarding Public Service Obligation Implementation for Marine Cargo.

d. Minister of Transportation Regulation Number PM. 4 of 2016 as Amendment to Minister of Transportation Regulation Number PM 161 of 2015 regarding Public Service Obligation for Marine Cargo.

e. The Republic of Indonesia Minister of Transportation Regulation Number PM. 6 of 2016 regarding State-Owned Pioneer Ship Public Service Obligation Implementation.

f. Minister of Transportation Regualtion Number 10 of 2016 regarding Marine Cargo Transportation Tariff in Public Service Obligation Implementation.

g. Minister of Transportation Regulation No. PM 20 Year 2015 regarding Maritime Safety Standards..

h. Minister of Transportation Regulation No. PM 37 of 2015 regarding Standard sea transportation services for passengers.

i. Minister of Transportation Regulation No. PM 65 of 2015 regarding Cost components of compensation paid by the government to implement public service obligations of maritime transport for economy class passengers.

j. Minister of Transportation Regulation No. PM 119 of 2015 regarding Amendment to the Minister of Transportation Regulation No. PM 37 of 2015, about maritime passenger transport service standards.

2. KETENTUAN JASA PERKAPALAN (lanjutan)

k. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 146 tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 74 tahun 2015 tentang penyelenggaraan dan pengusahaan jasa transportasi.

l. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 161 tahun 2015, tentang Penyelenggaraan kewajiban pelayanan publik untuk angkutan barang di laut.

m. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 168 tahun 2015, tentang Tarif angkutan barang di laut dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik *(Public Service Obligation)* .

n. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 170 tahun 2015, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 16 tahun 2014 tentang tarif batas atas angkutan penumpang laut dalam negeri kelas ekonomi.

o. Peraturan Menteri Perhubungan nomor PM 182 tahun 2015, tentang Tarif muatan untuk kegiatan subsidi pengoperasian kapal ternak.

p. Surat Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/7/1/DJPL-15 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor AL.108/5/18/DJPL-15 tentang Jaringan Trayek dan Kebutuhan Kapal Pelayaran Perintis Tahun Anggaran 2016 serta Ketentuan-Ketentuan Pelaksanaannya tanggal 30 November 2015.

2. SHIPPING SERVICES REGULATION *(continued)*

k. Minister of Transportation Regulation No. PM 146 of 2015 regarding Second amendment for Minister of Transportation Regulation No. 74 of 2015 about the implementation and operation of transport services.

l. Minister of Transportation Regulation No. PM 161 of 2015 regarding Organizing public service obligations for sea freight.

m. Minister of Transportation Regulation No. PM 168 of 2015 regarding Sea freight rates in order to do public service obligation.

n. Minister of Transportation Regulation No. PM 170 of 2015 regarding Amendments to the Minister of transportation's regulation No. PM 16 of 2014 about upper limit rates for domestic sea passenger in economy class.

o. Minister of Transportation Regulation No. PM 182 of 2015 regarding Cargo rates to subsidize the ship cattle operation.

p. Marine Transportation General Directorate Decree Number Al.108/7/1/DJPL-15 as the Second Amendment on Marine Transportation General Directorate Decree Number Al.108/5/18/DJPL-15 regarding Route Network and Requirement for Pioneer Shipping Vessel Budget year 2016 and Implementation Provisions dated November 30, 2015.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK)

a. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup:

- PSAK 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan: Tentang Prakarsa Pengungkapan"

  Amandemen PSAK 1 memberikan klarifikasi terkait penerapan persyaratan materialitas, fleksibilitas urutan sistematis catatan atas laporan keuangan dan pengidentifikasian kebijakan akuntansi signifikan. Penerapan lebih dini terhadap amandemen ini diperkenankan.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK")

a. The Amendments and Adjustments to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements:

- *PSAK 1 (Ammendment 2015), "Presentation of Financial Statements: about Disclosure Initiative"*

  PSAK 1, the amendment provides clarification related to the application of the requirements of materiality, flexibility systematic sequence of notes to the financial statements and the identification of significant accounting policies. Early application of the amendments is permitted

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

a. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup: (lanjutan)

- PSAK 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan: Tentang Prakarsa Pengungkapan" (lanjutan)

  Amandemen ini juga mengijinkan penyajian pos-pos dalam posisi keuangan, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dapat dipisahkan selama masih dapat dipahami.

  Terdapat persyaratan wajib dari PSAK 1 bagi entitas dalam menyajikan subtotal laporan posisi keuangan dan laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain; serta dilakukannya pemisahan informasi bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi dan ventura bersama yang dicatat menggunakan metode ekuitas.

  Amandemen ini juga memberikan fleksibilitas bagi entitas untuk menentukan urutan sistematis catatan atas laporan keuangan yang disajikan.

- PSAK 24 (Penyesuaian 2016), "Imbalan Kerja"

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa tingkat yang digunakan untuk mendiskontokan kewajiban imbalan pascakerja (baik yang didanai maupun tidak) mengacu pada imbal hasil pasar atas obligasi korporasi berkualitas tinggi pada akhir periode pelaporan dan pasar obligasi korporasi berkualitas tinggi dinilai berdasarkan denominasi mata uang obligasi tersebut dan bukan berdasarkan negara di mana obligasi tersebut berada.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

a. The Amendments and Adjustments to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements: *(continued)*

- *PSAK 1 (Ammendment 2015), "Presentation of Financial Statements: about Disclosure Initiative" (continued)*

  This amendment also allows the entity to separate the financial position, income statement and other comprehensive income presentation as long as it is understandable.

  There are some requirements from PSAK 1 for the entity in presenting the subtotal of the financial position, income statement, and other comprehensive income. Besides that the PSAK also requires the separation information of other comprehensive income from associate and joint venture which are recognize using the equity method.

  This amendment also provides flexibility for the entity to determine the systematic sequence for the presentation of financial statement notes.

- *PSAK 24 (Improvement 2016), "Employee Benefits"*

  This adjustment clarifies that the rate used to discount post-employment benefits (whether or not funded) refers to market returns on high quality corporate bonds at the end of the reporting period and high-quality corporate bond markets are valued on the basis of denominated bonds rather than by country where the bond is located.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

a. Amandemen serta Penyesuaian Standar dan Interpretasi berikut Efektif untuk Periode yang Dimulai pada atau setelah 1 Januari 2017, tidak berdampak signifikan terhadap laporan keuangan Grup: (lanjutan)

- PSAK 58 (Penyesuaian 2016), " Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan"

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa perubahan dari satu metode pelepasan ke metode pelepasan lainnya dianggap sebagai rencana awal yang berkelanjutan dan bukan sebagai rencana pelepasan baru. Penyesuaian ini juga mengklarifikasi bahwa perubahan metode pelepasan ini tidak mengubah tanggal klasifikasi sebagai aset atau kelompok lepasan.

- PSAK 60 (Penyesuaian 2016), "Instrumen Keuangan: Pengungkapan"

  Penyesuaian ini mengklarifikasi bahwa entitas harus menilai sifat dari imbalan kontrak jasa untuk menentukan apakah entitas memiliki keterlibatan berkelanjutan dalam aset keuangan dan apakah persyaratan pengungkapan terkait keterlibatan berkelanjutan terpenuhi.

- ISAK 31, "Interpretasi atas Ruang Lingkup PSAK 13 "Properti Investasi"

  ISAK 31 memberikan interpretasi atas karakteristik bangunan yang digunakan sebagai bagian dari definisi properti investasi dalam PSAK 13. Bangunan sebagaimana dimaksud dalam definisi properti investasi mengacu pada struktur yang memiliki karakteristik fisik yang umumnya diasoasiasikan dengan suatu bangunan yang mengacu pada adanya dinding, lantai, dan atap yang melekat pada aset.

- ISAK 32, "Definisi dan Hierarki Standar Akuntansi Keuangan"

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

a. The Amendments and Adjustments to Standards and Interpretations Effective for the Period Starting on or after 1 January 2017, has no significant impact on the Group's financial statements: *(continued)*

- *PSAK 58 (Improvement 2016), "Non-current Assets Held for Sale and Discounted Operation"*

  This improvement clarifies that a change from one disposal method to the other disposal method are considered as the beginning of a sustainable plan and not as a new disposal plan. This improvement also clarifies that the change in the disposal method does not change the date classification as an asset or disposal group.

- *PSAK 60 (Improvement 2016), "Financial Instruments: Disclosure"*

  This improvement clarifies that an entity must assess the nature of the service contract benefits to determine whether the entity has a continuing involvement in financial assets and whether the disclosure requirements related to the continuing involvement are met.

- *ISAK 31, "Interpretation of PSAK 13 "Investing Property"*

  ISAK 31 provides an interpretation of the characteristics of the building that is used as part of the definition of investment property in ISAK 13. The building that referred to in the definition of investment property refers to structures that have physical characteristics that are generally associated with a building which refers to the presence of walls, floors, and roofs are attached to the asset.

- *ISAK 32, "Definition and Hierarchy of Financial Accounting Standards"*

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

b. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut:

- PSAK 2 (Amandemen 2016), "Laporan Arus Kas tentang Prakarsa Pengungkapan"

  Amandemen ini mensyaratkan entitas untuk menyediakan pengungkapan yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan, termasuk perubahan yang timbul dari arus kas maupun perubahan non-kas.

  Grup sedang mempertimbangkan implikasi dari penerapan amandemen standar ini terhadap laporan keuangan Grup.

- PSAK 16 (Amandemen 2015), Aset Tetap: tentang penambahan paragraf yang terkait dengan Aset Agrikultur

  Mengklarifikasi bahwa aset biologis yang memenuhi definisi tanaman produktif *(bearer plants)* masuk ruang lingkup PSAK 16 : Aset Tetap; tanaman produktif sebagai Tanaman Hidup yang (i) digunakan dalam proses produksi atau penyediaan produk agrikultur, (ii) diharapkan untuk menghasilkan produk untuk lebih dari 1 periode , dan (iii) memiliki kemungkinan yang sangat jarang untuk dijual sbg produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa yang insidental.

  Amandemen ini menyatakan bahwa pengakuan dan pengukuran tanaman produktif mengikuti persyaratan yang ada dalam PSAK 16.

  Amandemen ini tidak menyebabkan perubahan atas kebijakan akuntansi Perseroan dan tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan grup.

- PSAK 46 (Amandemen 2016), Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi

  Amandemen ini mengklarifikasi bahwa untuk menentukan apakah laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dapat dimanfaatkan; estimasi atas kemungkinan besar laba kena pajak masa depan dapat mencakup pemulihan beberapa aset entitas

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

b. Amendments Standards and Standard that have been issued but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018 as follows:

- *PSAK 2 (Amendment 2016), "Cash Flows Statement – Disclosure Initiative"*

  The amendments require entities to provide disclosures that enable the financial statements users to evaluate the changes in liabilities arising from financing activities, including changes from cash flow and noncash.

  The Group is considering the implications of applying this standard amendment to the Group's financial statements.

- *PSAK 16 (Amendment 2015), Fixed Asset: about adding paragraphs related to Agricultural Assets*

  Clarify that biological assets that meet the definition of a productive plant (bearer plants) fall within the scope of PSAK 16: Fixed Assets; (ii) is expected to produce the product for more than one period, and (iii) has a rarity that is rarely for sale as an agricultural product, except for the sale of the remainder the incidental.

  This amendment states that the recognition and measurement of productive plants follow the requirements of PSAK 16.

  This Amendment does not result in changes to the Company's accounting policies and does not affect the presentation or disclosure of the group's financial statements.

- *PSAK 46 (Amendment 2016), Income Tax; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses*

  The amendments clarify that to determine whether the taxable profit will be available so that the deductible temporary differences can be utilized; estimates of the most likely future taxable profit can include recovery of certain assets of the entity exceeds its carrying amount.

melebihi jumlah tercatatnya.

3. PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (PSAK) BARU DAN REVISI DAN INTERPRETASI STANDAR AKUNTANSI KEUANGAN (ISAK) (lanjutan)

b. Standar dan Amandemen Standar yang telah diterbitkan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2018 sebagai berikut: (lanjutan)

- PSAK 46 (Amandemen 2016), Pajak Penghasilan: tentang Pengakuan Aset Pajak Tangguhan untuk Rugi yang Belum Direalisasi (lanjutan)

  Amandemen ini menambahkan bahwa pengurangan pajak yang berasal dari pembalikan aset pajak tangguhan dikecualikan dari estimasi laba kena pajak masa depan.

  Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerapan amandemen standar ini terhadap laporan keuangan Grup.

- PSAK 69 (2015), Agrikultur

  PSAK ini mengatur tentang definisi tanaman produktif, transformasi biologis, aktivitas agrikultur, pengakuan dan pengukuran aset biologis, serta keuntungan dan kerugian yang timbul pada saat pengakuan awal aset biologis pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual aset biologis.

  Penerbitan Standar baru ini tidak relevan dengan kegiatan usaha Grup sehingga tidak memberikan dampak pada penyajian maupun pengungkapan terhadap laporan keuangan Grup.

c. Amandemen Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang telah diterbitkan dan relevan bagi perusahaan namun berlaku efektif untuk tahun buku yang dimulai pada atau setelah tanggal 1 Januari 2020 sebagai berikut:

- PSAK 71 (Amandemen 2017), "Instrumen Keuangan"
- PSAK 72 (Amandemen 2017), "Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan"

Grup sedang mempelajari dampak yang mungkin timbul atas penerbitan standar akuntansi keuangan tersebut.

3. ADOPTION OF NEW AND REVISED STATEMENTS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("PSAK") AND INTERPRETATIONS OF FINANCIAL ACCOUNTING STANDARDS ("ISAK") *(continued)*

b. Amendments Standards and Standard that have been issued but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2018 as follows: *(continued)*

- *PSAK 46 (Amendment 2016), Income Tax; Recognition of Deferred Tax Asset for Unrealized Losses (continued)*

  The amendment adds that the tax deductions arising from the reversal of deferred tax assets are exempted from future estimated taxable income.

  The Group is evaluating the possible impact of applying this standard amendment to the Group's financial statements.

- PSAK 69 (2015), Agricultural

  This PSAK provides for the definition of productive crops, biological transformation, agricultural activities, recognition and measurement of biological assets, as well as gains and losses arising from the initial recognition of biological assets at fair value less costs to sell and from changes in fair value less the cost of selling biological assets .

  The issuance of this new standard is irrelevant to the Group's business activities, so as not to have an impact on the presentation or disclosure of the Group's financial statements.

c. Amendments to Statements of Financial Accounting Standards that have been issued and are relevant to the Company but will be effective for the financial year beginning on or after January 1, 2020 as follows:

- *PSAK 71 (Amandment 2017), "Financial Instruments"*
- *PSAK 72 (Amandment 2017), "Revenue from Contract with Customers"*

The Group is evaluating the possible impact on the issuance of these financial accounting standards.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING

a. Pernyataan Kepatuhan

Laporan keuangan konsolidasi disusun dan disajikan dengan menggunakan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, meliputi Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) dan Interpretasi Standar Akuntansi Keuangan (ISAK) yang diterbitkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan (DSAK) - Ikatan Akuntan Indonesia yang telah konvergen dengan IFRS, dan Peraturan No. VIII.G.7 tentang "Penyajian dan Pengungkapan Laporan Keuangan Emiten atau Perusahaan Publik".

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 untuk diterbitkan pada tanggal 15 Maret 2018.

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian

Penyajian laporan keuangan konsolidasian disusun sesuai dengan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) No. 1 (Amandemen 2015), "Penyajian Laporan Keuangan".

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2017 adalah konsisten dengan kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016.

Laporan keuangan konsolidasian, kecuali laporan arus kas konsolidasian, disusun berdasarkan konsep akrual dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali untuk beberapa akun tertentu yang diukur berdasarkan pengukuran sebagaimana diuraikan dalam kebijakan akuntansi masing-masing akun tersebut.

Laporan arus kas konsolidasian disusun dengan menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan arus kas dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Untuk tujuan pelaporan arus kas, kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan semua investasi yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal perolehannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES

a. The Statement of Compliance

The Consolidated financial statements have been complied and prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, which comprise the Statement of Financial Accounting Standard and Interpretation of Financial Accounting Standard issued by the Financial Accounting Standards Board (DSAK) - Indonesian Institute of Accountants who has been converging with IFRS, and Regulation No. VIII.G.7, "Presentation of Financial Statements for Public Listed Company".

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 to be published on March 15, 2018.

b. Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement

Presentation of the consolidated financial statements are prepared in accordance with the Statements of Financial Accounting Standard ("PSAK") No. 1 (Amendment 2015), "Presentation of Financial Statements".

The accounting policies adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 are consistent with those adopted in the preparation of the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2016.

The consolidated financial statements, except for the consolidated statements of cash flows, have been prepared on the accrual basis using the historical cost concept of accounting, except for certain accounts which are measured on the bases described in the related accounting policies of each account.

The consolidated statements of cash flows prepared using the direct method the cash flows into operating, investing and financing activities. For cash flows presentation purposes, cash and cash equivalents comprise of cash on hand, cash in bank and all unrestricted investments with maturities of three months or less from the date of placement.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

b. Dasar Penyajian dan Penyusunan Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang disusun berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Indonesia memerlukan penggunaan estimasi akuntansi tertentu dan asumsi-asumsi.

Hal ini juga mengharuskan manajemen untuk melakukan pertimbangan dalam proses penerapan kebijakan akuntansi di dalam Grup. Area yang kompleks atau memerlukan tingkat pertimbangan yang lebih tinggi, atau area dimana asumsi dan estimasi dapat berdampak signifikan terhadap laporan keuangan konsolidasian diungkapkan dalam Catatan 5.

Walaupun estimasi ini dibuat berdasarkan pengetahuan terbaik manajemen atas kejadian dan tindakan saat ini, hasil yang timbul mungkin berbeda dengan jumlah yang diestimasi semula.

c. Penjabaran Mata Uang Asing

Mata Uang Fungsional dan Pelaporan

Transaksi-transaksi yang termasuk dalam laporan keuangan pada tiap entitas dalam Grup diukur dengan mata uang lingkungan ekonomi utama dimana entitas beroperasi (“mata uang fungsional”). Laporan keuangan konsolidasian disajikan dalam Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional dan penyajian Perseroan.

Seluruh angka keuangan dalam laporan keuangan konsolidasian ini disajikan dalam Rupiah penuh, kecuali apabila dinyatakan lain.

Transaksi dan Saldo

Sesuai PSAK No.10 (R-2010): Pengaruh Perubahan Kurs Valuta Asing (Penyesuaian 2014), pada pengakuan awal, transaksi valuta asing dicatat dalam mata uang fungsional (yaitu: Rupiah). Jumlah valuta asing dihitung ke dalam mata uang fungsional dengan kurs spot antara mata uang fungional dan valuta asing pada tanggal transaksi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

b. Basic of Presentation and Preparation of the Consolidated Financial Statement *(continued)*

The preparation of the consolidated financial statements in conformity with Indonesian Financial Accounting Standards requires the use of certain critical accounting estimates and assumptions.

It also requires management to consider in the process of implementing the accounting policies within the Group. Complex areas or require higher levels of consideration, or areas where assumptions and estimates may have significant impact on the consolidated financial statements are disclosed in Note 5.

Although these estimates are based on management's best knowledge of the event and the current action, the results may differ resulting in the amount originally estimated.

c. Foreign Currency Translation

Functional and Reporting Currencies

Transaction included in the financial statements of each of the entities in the Group are measured using the currency of the primary economic environment which the operate entity (“the functional currency”). The consolidated financial statements are presented in Rupiah, which is the Company’s functional and presentation currency.

The entire financial figures in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah unless otherwise stated.

Transactions and Balances

In accordance with PSAK No.10 (R-2010): The Effect of Changes in Foreign Exchange Rates (Adjustment 2014), on initial recognition, foreign exchange transactions are recorded in the functional currency (ie: Rupiah). The amount of foreign currency is calculated into the functional currency at the spot rate between the fungional and foreign currencies on the date of the transaction.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

Transaksi dan Saldo (lanjutan)

Pada akhir setiap periode pelaporan:

- Pos moneter valuta asing dijabarkan menggunakan kurs penutup;
- Pos non moneter yang diukur dalam biaya historis dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal transaksi; dan
- Pos non moneter yang diukur pada nilai wajar dalam valuta asing dijabarkan menggunakan kurs pada tanggal ketika nilai wajar diukur.

Transaksi dalam mata uang asing dijabarkan kedalam mata uang fungsional menggunakan kurs pada tanggal transaksi. Keuntungan atau kerugian selisih kurs yang timbul dari penyelesaian transaksi dan dari penjabaran pada kurs akhir tahun atas aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing diakui dalam laba rugi.

Mata Uang Penyajian Berbeda dengan Mata Uang Fungsionalnya

Ketika penggunaan mata uang penyajian berbeda dengan mata uang fungsionalnya, maka:

- Aset dan liabilitas disajikan/dijabarkan menggunakan kurs penutup pada tanggal laporan posisi keuangan;
- Penghasilan dan beban untuk setiap laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dijabarkan dengan menggunakan kurs transaksi; dan
- Selisih kurs yang dihasilkan diakui dalam penghasilan komprehensif lain.

Kurs penutup yang digunakan pada akhir periode pelaporan adalah kurs tengah Bank Indonesia sebagai berikut:

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Foreign Currency Translation *(continued)*

Transactions and Balances (continued)

At the end of each reporting period:

- *Foreign exchange monetary items are translated using the closing exchange rate;*
- *Pos nonmonetary measured in historical cost in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date of the transaction; and*
- *Pos nonmonetary measured at fair value in a foreign currency are translated using the exchange rate at the date when fair value is measured.*

Transactions denominated in foreign currencies are translated into the functional currency using the exchange rate on the date of the transaction. Exchange gains or losses arising from transaction settlement and from translation at the end of the year exchange rates on monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are recognized in profit or loss.

Presentation Currency Differs from its Functional Currency

When the use of a presenting currency differs from its functional currency, then:

- *Assets and liabilities are presented/ translated at the closing rate at the statement of financial position date;*
- *Income and expenses for each income statement and other comprehensive income are translated at the transaction rate; and*
- *The resulting foreign exchange difference is recognized in other comprehensive income.*

The closing exchange rate used at the reporting is the middle rate of Bank Indonesia as follows:

	2017	2016	
1 EURO	Rp 16.174	Rp 14.162	*1 EURO*
1 USD	Rp 13.548	Rp 13.436	*1 USD*
100 JPY	Rp 120	Rp 115	*100 JPY*
1 AUD	Rp 10.557	Rp 9.724	*1 AUD*
1 SGD	Rp 10.134	Rp 9.299	*1 SGD*

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

c. Penjabaran Mata Uang Asing (lanjutan)

Mata Uang Penyajian Berbeda dengan Mata Uang Fungsionalnya

Selanjutnya, untuk pungutan dan penyetoran pajak-pajak (PPN dan PPh) berkenaan dengan tagihan dan kewajiban dalam mata uang asing dibayarkan dengan Rupiah, dan dicatat sesuai dengan 'kurs pajak mingguan' yang berlaku pada tanggal diterbitkannya faktur pajak yang bersangkutan.

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasi

Laporan keuangan konsolidasian menggabungkan laporan keuangan Perusahaan dan entitas yang dikendalikan oleh Perusahaan dan entitas anak (termasuk entitas terstruktur) sebagaimana diungkapkan pada Catatan 1.21

Pengendalian diperoleh apabila Grup memiliki seluruh hal berikut ini:

- kekuasaan atas investee;
- eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan investee; dan
- kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas investee untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil investor.

Pengkonsolidasian entitas anak dimulai pada saat Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Secara khusus, penghasilan dan beban entitas anak yang diakuisisi atau dilepaskan selama tahun berjalan termasuk dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh pengendalian sampai dengan tanggal Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan, beban dan arus kas dalam intra kelompok usaha terkait dengan transaksi antar entitas dalam Grup dieliminasi secara penuh dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

c. Foreign Currency Translation *(continued)*

Presentation Currency Differs from its Functional Currency

Furthermore, for the collection and remittance of taxes (VAT and income tax) with respect to claims and liabilities in foreign currency payable in dollars, and recorded in accordance with the 'weekly tax rate" prevailing at the date of issuance of tax invoice.

d. Principles of Consolidation

The consolidated financial statements incorporate the financial statements of the Company and entities controlled by the Company and its subsidiaries (including structured entities) as disclosed in Note 1.21

Control is obtained if the Group has all of the following:

- *power over the investee;*
- *is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the investee; and*
- *the ability to use its power to affect its returns.*

Consolidation of a subsidiary begins when the Group obtains control over the subsidiary and ceases when the Group losses control of the subsidiary. Specifically, income and expenses of a subsidiary acquired or disposed of during the year are included in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income from the date the Group gains control until the date when the Group ceases to control the subsidiary.

All intragroup assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relating to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Laba rugi dan setiap komponen dari penghasilan komprehensif lain diatribusikan kepada Perusahaan dan kepentingan nonpengendali. Perusahaan juga mengatribusikan total laba komprehensif entitas anak kepada pemilik entitas induk dan kepentingan nonpengendali meskipun hal tersebut mengakibatkan kepentingan nonpengendali memiliki saldo defisit.

Jika diperlukan, penyesuaian dapat dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak agar kebijakan akuntansi yang digunakan sesuai dengan kebijakan akuntansi yang digunakan oleh Grup.

Perubahan kepemilikan Grup pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan nonpengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Selisih antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Ketika Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak, keuntungan dan kerugian diakui didalam laba rugi dan dihitung sebagai perbedaan antara:

(i) keseluruhan nilai wajar yang diterima dan nilai wajar dari setiap sisa investasi; dan

(ii) nilai tercatat sebelumnya dari aset (termasuk goodwill) dan liabilitas dari entitas anak dan setiap kepentingan non pengendali.

Seluruh jumlah yang diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas anak yang dicatat seolah-olah Grup telah melepaskan secara langsung aset atau liabilitas terkait entitas anak (yaitu direklasifikasi ke laba rugi atau ditransfer ke kategori lain dari ekuitas sebagaimana ditentukan / diizinkan oleh standar akuntansi yang berlaku).

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Principles of Consolidation *(continued)*

Profit or loss and each component of other comprehensive income are attributed to the owners of the Company and to the noncontrolling interest. Total comprehensive income are attributed to owners of the Company and the non-controlling interest even if this results in the non-controlling interest having a deficit balance.

When necessary, adjustment are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies.

Changes in the Group's ownership interest in subsidiaries that do not result in the Group losing control over the subsidiaries are accounted for as equity transactions.

The carrying amounts of the Group's interest and the non-controlling interest are adjusted to reflect the changes in their relative interest in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interest are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognized directly in equity and attributed to owners of the Company.

When the Group losses control of a subsidiary, a gain or loss is recognized in profit or loss and is calculated as the difference between:

(i) the aggregate of the fair value of the consideration received and the fair value of any retained interest;

(ii) the previous carrying amount of the assets (including goodwill), and liabilities of the subsidiary and any non-controlling interest.

All amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that subsidiary are accounted for as if the Group had directly disposed of the related assets or liabilities of the subsidiary (i.e. reclassified to profit or loss or transferred to another category of equity as specified/permitted by applicable accounting standards).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

d. Prinsip-Prinsip Konsolidasi (lanjutan)

Nilai wajar setiap sisa investasi pada entitas anak terdahulu pada tanggal hilangnya pengendalian dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal untuk akuntansi berikutnya dalam PSAK 55, Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran atau, ketika berlaku, biaya perolehan pada saat pengakuan awal dari investasi pada entitas asosiasi atau ventura bersama.

Kepentingan Nonpengendali pada entitas anak diidentifikasi secara terpisah dan disajikan dalam ekuitas. Kepentingan Nonpengendali pemegang saham pada awalnya boleh diukur pada nilai wajar atau pada proporsi kepemilikan kepentingan nonpengendali atas aset neto teridentifikasi dari pihak yang diakuisisi. Pilihan pengukuran dibuat pada saat akuisisi dengan dasar akuisisi. Setelah akuisisi, nilai tercatat kepentingan nonpengendali adalah jumlah kepentingan non pengendali pada pengakuan awal ditambah dengan proporsi kepentingan nonpengendali atas perubahan selanjutnya dalam ekuitas.

Jumlah pendapatan komprehensif diatribusikan pada kepentingan nonpengendali bahkan jika hal ini mengakibatkan kepentingan nonpengendali mempunyai saldo defisit.

Perubahan dalam bagian kepemilikan Perseroan dan entitas anak pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian dicatat sebagai transaksi ekuitas.

Nilai tercatat kepentingan entitas anak dan kepentingan non pengendali disesuaikan untuk mencerminkan perubahan bagian kepemilikannya atas entitas anak. Setiap perbedaan antara jumlah kepentingan non pengendali disesuaikan dan nilai wajar imbalan yang diberikan atau diterima diakui secara langsung dalam ekuitas dan diatribusikan pada pemilik entitas induk.

Bagian kepemilikan pemegang saham minoritas atas aset neto Entitas Anak disajikan sebagai "Kepentingan Nonpengendali" pada Laporan Posisi Keuangan konsolidasian. Hak minoritas atas laba (rugi) neto Entitas Anak pada Laporan Laba Rugi Komprehensif konsolidasian disajikan sebagai "Laba/Rugi Periode Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada Kepentingan Nonpengendali".

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

d. Principles of Consolidation *(continued)*

The fair value of any investment retained in the former subsidiary at the date when control is lost is regarded as the fair value on initial recognition for subsequent accounting under PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement or, when applicable, the cost on initial recognition of an investment in an associate or a jointly controlled entity.

Non-controlling interests in subsidiaries are identified separately and presented within equity. The interest of non-controlling shareholders maybe initially measured either at fair value or at the non controlling interests' proportionate share of the fair value of the acquiree's identifiable net asset. The choice of measurement is made on acquisition by acquisition basis. Subsequent to acquisition, the carrying amount of non controlling interests is the amount of those interests at initial recognition plus non controlling interests' share of subsequent changes in equity.

Total comprehensive income is attributed to non-controlling interests even if this results in the non-controlling interests having a deficit balance.

Changes in the Company and its subsidiaries interests in subsidiaries that do not result in a loss of control are accounted for as equity transactions.

The carrying amounts of the Company and its subsidiaries interests and the non-controlling interests are adjusted to reflect the changes in their relative interests in the subsidiaries. Any difference between the amount by which the non-controlling interests are adjusted and the fair value of the consideration paid or received is recognised directly in equity and attributed to owners of the Company.

Minority interest in net assets of Subsidiaries are presented as "Non-controlling Interests" in the Consolidated Statements of Financial Position. Minority interest in net earnings (loss) of Subsidiaries are presented in the Consolidated Statements of Comprehensive Income as "Profit/Loss for the Period Attributable to Non-Controlling Interests".

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

Pihak-pihak berelasi adalah orang atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan yang menyiapkan laporan keuangannya (“Perseroan pelapor”):

1) Orang atau anggota keluarga terdekat mempunyai relasi dengan Perseroan pelapor, jika orang tersebut:
   a) Memiliki pengendalian atau pengendalian bersama atas Perseroan pelapor,
   b) Memiliki pengaruh signifikan atas Perseroan pelapor, atau
   c) Personal manajemen kunci Perseroan pelapor atau Perseroan induk Perseroan pelapor.

2) Suatu Perseroan berelasi dengan Perseroan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:
   a) Perseroan dan Perseroan pelapor adalah anggota dari Perseroan dan Entitas Anak yang sama (artinya Perseroan induk, entitas anak dan entitas anak berikutnya terkait dengan Perseroan lain).
   b) Satu Perseroan adalah Perseroan asosiasi atau ventura bersama dari Perseroan lain (atau Perseroan asosiasi atau ventura bersama yang merupakan anggota suatu Perseroan dan Entitas Anak, dimana Perseroan lain tersebut adalah anggotanya).
   c) Kedua Perseroan tersebut adalah ventura bersama dari pihak ketiga yang sama.
   d) Satu Perseroan adalah ventura bersama dari Perseroan ketiga dan Perseroan yang lain adalah Perseroan asosiasi dari Perseroan ketiga.
   e) Perseroan tersebut adalah suatu program imbalan pasca kerja untuk imbalan kerja dari salah satu Perseroan pelapor atau Perseroan yang terkait dengan Perseroan pelapor. Jika Perseroan pelapor adalah Perseroan yang menyelenggarakan program tersebut, Perseroan sponsor juga berelasi dengan Perseroan pelapor.
   f) Perseroan yang dikendalikan atau dikendalikan bersama oleh orang yang diidentifikasi dalam

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with Related Parties

The related party is a person or company associated with the Company prepares its financial statements ("Company complainant "):

1) Person or immediate family member has a relationship with the reporting company, if the person:
   a) Have control or joint control over the reporting company,
   b) The Company has significant influence over the reporting company, or
   c) Key management personnel of the reporting company or holding company of the reporting company.

2) A company is related to the reporting company if it meets one of the following:
   a) Companies and reporting company is a member of the same business group (ie parent company, subsidiaries and related entities the next child with another company).
   b) One company is an associated company or joint venture of another company (or an associate or joint venture which is a member of a business group, where other companies are members).
   c) Both companies are joint venture of the same third party.
   d) One company is a joint venture of third companies and other companies are associated companies of a third company.
   e) The company is a post-employment benefit plans for employee benefits of any reporting company or companies associated with the reporting company. If the reporting company is a company that organizes the program, the company sponsors also relate to the reporting company.
   f) Companies controlled or controlled jointly by the person identified in 1).

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

angka 1).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

e. Transaksi dengan Pihak Berelasi

2) Suatu Perseroan berelasi dengan Perseroan pelapor jika memenuhi salah satu hal berikut:

g) Orang yang diidentifikasi dalam angka 1), huruf a) memiliki pengaruh signifikan terhadap Perseroan atau personil manajemen kunci Perseroan (atau Perseroan induk dari Perseroan).

h) Entitas, atau anggota dari kelompok yang mana entitas merupakan bagian dari kelompok tersebut, menyediakan jasa personil manajemen kunci kepada entitas pelapor atau kepada entitas induk dari entitas pelapor.

Semua transaksi penting dengan pihak berelasi, baik yang dilakukan dengan atau tidak dengan, persyaratan dan kondisi yang sama dengan pihak ketiga diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

f. Kas dan Setara Kas

Kas dan setara kas terdiri dari kas, bank dan instrumen yang dapat diklasifikasikan sebagai Setara Kas antara lain:

1) deposito berjangka yang jatuh tempo dalam tiga bulan atau kurang dari tanggal penempatannya dan tidak dijaminkan serta tidak dibatasi penggunaannya (termasuk deposit on call); dan

2) instrumen pasar uang yang diperoleh dan dapat dicairkan dalam jangka waktu tidak lebih dari 3 (tiga) bulan.

g. Kas dan Setaran Kas yang Dibatasi Penggunaannya

Kas dan setara kas yang ditempatkan sebagai bank garansi, jaminan pelaksanaan dan lainnya untuk tujuan tertentu disajikan sebagai ”kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya" dan dikelompokkan pada aset keuangan lancar lainnya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

e. Transactions with Related Parties

2) A company is related to the reporting company if it meets one of the following:

g) Person identified in 1), point a) has a significant influence on the company or the company's key management personnel (or the parent company of the company).

h) The entity, or any member of a group of which it is a part, provides key management personnel services to the reporting entity or to the parent of the reporting entity.

All significant transactions with related parties, whether or not done under similar terms and conditions as those done with third parties, are disclosed in the consolidated financial statements.

f. Cash and Cash Equivalent

Cash and cash equivalents consist of cash on hand, bank and instruments that can be classified as cash equivalents include:

1) time deposits with original maturities of three months or less from the date of placement and is unrestricted and not warranted (including deposits on call); and

2) market instruments and can be liquid within a period of not more than three (3) months.

g. Restricted cash and cash equivalents

Cash and cash equivalents which are placed as bank guarantees, performance bond and others for a particular purpose are classified as “restricted cash and cash equivalents” and are classified into other current financial assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan

Grup mengakui aset keuangan atau liabilitas keuangan pada laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, Grup menjadi salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrumen tersebut. Pembelian atau penjualan yang reguler atas instrumen keuangan diakui pada tanggal transaksi.

Instrumen keuangan pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya, yang merupakan nilai wajar kas yang diserahkan (dalam hal aset keuangan) atau yang diterima (dalam hal liabilitas keuangan). Nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima ditentukan dengan mengacu pada harga transaksi atau harga pasar yang berlaku. Jika harga pasar tidak dapat ditentukan dengan andal, maka nilai wajar kas yang diserahkan atau diterima dihitung berdasarkan estimasi jumlah seluruh pembayaran atau penerimaan kas masa depan, yang didiskontokan menggunakan suku bunga pasar yang berlaku untuk instrumen sejenis dengan jatuh tempo yang sama atau hampir sama. Pengukuran awal instrumen keuangan termasuk biaya transaksi, kecuali untuk instrumen keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Biaya transaksi adalah biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan atau penerbitan aset keuangan atau liabilitas keuangan, dimana biaya tersebut adalah biaya yang tidak akan terjadi apabila entitas tidak memperoleh atau menerbitkan instrumen keuangan. Biaya transaksi tersebut diamortisasi sepanjang umur instrumen menggunakan metode suku bunga efektif.

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau beban bunga selama periode selama periode yang relevan, menggunakan suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa depan selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari instrumen keuangan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments

The Group recognizes a financial asset or a financial liability in the consolidated statement of financial position if, and only if, they become a party to the contractual provisions of the instrument. All regular way purchases and sales of financial instruments are recognized on the transaction date.

Financial instruments are recognized initially at fair value, which is the fair value of the consideration given (in case of an asset) or received (in case of a liability). The fair value of the consideration given or received is determined by reference to the transaction price or other market prices. If such market prices are not reliably determinable, the fair value of the consideration is estimated as the sum of all future cash payments or receipts, discounted using the prevailing market rates of interest for similar instruments with similar maturities. The initial measurement of financial instruments, except for financial instruments at fair value through profit and loss (FVPL), includes transaction costs.

Transaction costs include only those costs that are directly attributable to the acquisition of a financial asset or issue of financial liability and they are incremental costs that would not have been incurred if the instrument had not been acquired or issued. Such transaction costs are amortized over the terms of the instruments based on the effective interest rate method.

Effective interest rate method is a method of calculating the amortized cost of a financial asset or a financial liability and allocating the interest income or expense over the relevant period by using an interest rate that exactly discounts estimated future cash payments or receipts through the expected life of the instruments or, when appropriate, a shorter period to the net carrying amount of the financial instruments.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

Pada saat menghitung suku bunga efektif, Grup mengestimasi arus kas dengan mempertimbangkan seluruh persyaratan kontraktual dalam instrumen keuangan tersebut, tanpa mempertimbangkan kerugian kredit di masa depan, namun termasuk seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan atau diterima, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari suku bunga efektif.

Biaya perolehan diamortisasi dari aset keuangan atau liabilitas keuangan adalah jumlah aset keuangan atau liabilitas keuangan yang diukur pada saat pengakuan awal dikurangi pembayaran pokok, ditambah atau dikurangi dengan amortisasi kumulatif menggunakan metode suku bunga efektif yang dihitung dari selisih antara nilai awal dan nilai jatuh temponya, dan dikurangi penurunan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Pengklasifikasian instrumen keuangan dilakukan berdasarkan tujuan perolehan instrumen tersebut dan mempertimbangkan apakah instrumen tersebut memiliki kuotasi harga di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, Grup mengklasifikasikan instrumen keuangan dalam kategori berikut:

1) aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi;
2) pinjaman yang diberikan dan piutang;
3) investasi dimiliki hingga jatuh tempo;
4) aset keuangan tersedia untuk dijual,
5) liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi; dan
6) liabilitas lain-lain.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, Grup memiliki instrumen keuangan dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi, dan liabilitas lain-lain.

4.h.1. Aset Keuangan

Aset keuangan diakui ketika Grup merupakan bagian dari salah satu pihak dalam ketentuan pada kontrak instrument tersebut.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

When calculating the effective interest, the Group estimates future cash flows considering all contractual terms of the financial instruments excluding future credit losses and includes all fees and points paid or received that are an integral part of the effective interest rate.

Amortized cost is the amount at which the financial asset or financial liability is measured at initial recognition, minus principal repayments, plus or minus the cumulative amortization using the effective interest rate method of any difference between the initial amount recognized and the maturity amount, minus any reduction for impairment.

The classification of the financial instruments depends on the purpose for which the instruments were acquired and whether they are quoted in an active market. At initial recognition, the Group classifies its financial instruments in following categories:

1) financial assets at Fair Value through Profit or Loss (FVTPL);
2) loans and receivables;
3) held-to maturity (HTM) investments;
4) available for sale (AFS) financial assets;
5) financial liabilities at Fair Value through Profit or Loss (FVTPL); and
6) other financial liabilities.

As of December 31, 2017 and 2016, the Group has financial instruments under loans and receivables, financial liabilities at FVTPL and other financial liabilities categories.

4.h.1. Financial Assets

Financial assets are recognized when a group entity becomes a party to the contractual provisions of the instruments.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Seluruh aset keuangan diakui dan dihentikan pengakuannya berdasarkan tanggal perdagangan. Pembelian atau penjualan aset keuangan yang regular mensyaratkan penyerahan aset dalam kurun waktu tertentu yang umumnya ditetapkan dalam peraturan atau kebiasaan yang berlaku dipasar dimana pada pengakuan awal diukur pada nilai wajarnya. Pada pengakuan awal biaya transaksi diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan atau penerbitan aset keuangan (selain aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi) yang ditambahkan atau dikurang secara tepat ke nilai wajar aset keuangan. Biaya transaksi yang diatribusikan langsung pada perolehan aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi diakui langsung ke laba rugi.

Aset keuangan Grup diklasifikasikan sebagai berikut:

- Investasi Dimiliki Hingga Jatuh Tempo

Aset keuangan non derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan jatuh temponya telah ditetapkan diklasifikasikan sebagai investasi dimiliki hingga jatuh tempo ketika Perusahaan memiliki intensi positif dan kemampuan untuk memiliki aset keuangan tersebut hingga jatuh tempo.

Setelah pengukuran awal, investasi HTM diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif. Metode ini menggunakan suku bunga efektif yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari aset keuangan ke nilai tercatat bersih *(net carrying amount)* dari aset keuangan. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasi pada saat investasi tersebut dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, serta melalui proses amortisasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

All financial assets are recognized and derecognized on trade date basis. Regular way purchase or sales of financial assets that require delivery of assets within the time frame established by regulation or convention in the marketplace and are initially measured at fair value. Transaction costs that are directly attributable to the acquisition or issue of financial assets (other than financial assets at fair value through profit or loss) are added to or deducted from the fair value of the financial assets as appropriate, on initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial assets at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

The Group financial assets are classified as follows:

- *Held to Maturity Investment*

Non-derivative financial assets with fixed or determinable payments and fixed maturities are classified as HTM investments when the Company has the positive intention and ability to hold them to maturity.

Subsequent to initial measurement, HTM investment are measured at amortized cost using effective interest rate. The method uses effective interest rate which appropriately discounting the future estimated cash receipts over the expected time from financial assets to net carrying amount. Gain or losses recognized at consolidated statements of profit loss and other comprehensive income when the investment is derecognized or impaired, and through amortization process.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

- Pinjaman yang diberikan dan piutang

Pinjaman yang diberikan dan piutang adalah aset keuangan non-derivatif dengan pembayaran tetap atau telah ditentukan dan tidak mempunyai kuotasi di pasar aktif. Pada saat pengakuan awal, pinjaman yang diberikan dan piutang diakui pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi dan selanjutnya diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode suku bunga efektif.

Keuntungan dan kerugian diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada saat pinjaman yang diberikan dan piutang dihentikan pengakuannya atau mengalami penurunan nilai, demikian juga pada saat proses amortisasi.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi kas dan setara kas, kas setara kas yang dibatasi penggunaannya, piutang usaha, dan aset keuangan lancar lainnya yang dimiliki oleh Grup.

Metode Suku Bunga Efektif

Metode suku bunga efektif adalah metode yang digunakan untuk menghitung biaya perolehan diamortisasi dari instrumen keuangan dan metode untuk mengalokasikan pendapatan bunga atau biaya selama periode yang relevan. Suku bunga efektif adalah suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi penerimaan atau pembayaran kas masa depan (mencakup seluruh komisi dan bentuk lain yang dibayarkan dan diterima oleh para pihak dalam kontrak yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif, biaya transaksi dan premium dan diskonto lainnya) selama perkiraan umur instrumen keuangan, atau, jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat untuk memperoleh nilai tercatat bersih dari aset keuangan pada saat pengakuan awal.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

- *Loans and Receivable*

Loans and receivables are non-derivative financial assets with fixed or determinable payments that are not quoted in an active market. Loans and receivables are initially recognised at fair value plus transaction costs and subsequently measured at amortised cost using the effective interest rate method.

Gains and losses recognized in consolidated statement of comprehensif income as loans and receivables derecognized or impaired, as well as during the process of amortization.

As of December 31, 2017 and 2016, the Group's cash and cash equivalents, restricted cash and cash equivalents, trade accounts receivable, and other current financial assets are classified in this category.

Effective Interest Method

The effective interest method is a method of calculating the amortized cost of a financial instrument and of allocating interest income or expense over the relevant period. The effective interest rate is the rate that exactly discounts estimated future cash receipts or payments (including all fees and points paid or received that form an integral part of the effective interest rate, transaction costs and other premiums or discounts) through the expected life of the financial instrument, or where appropriate, a shorter period to the net carrying amount on initial recognition.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Pendapatan diakui berdasarkan suku bunga efektif untuk instrumen keuangan selain instrumen keuangan yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi.

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan

Aset keuangan, selain yang dinilai pada nilai wajar melalui laporan laba rugi (FVTPL), dievaluasi terhadap indikator penurunan nilai pada setiap tanggal pelaporan. Aset keuangan diturunkan nilainya bila terdapat bukti yang objektif, sebagai akibat dari satu atau lebih peristiwa yang terjadi setelah pengakuan awal aset keuangan, yang berdampak pada estimasi arus kas masa depan atas aset keuangan yang dapat diestimasi secara andal.

Untuk investasi ekuitas AFS yang tercatat dan tidak tercatat di bursa, penurunan yang signifikan atau jangka panjang dalam nilai wajar dari instrumen ekuitas di bawah biaya perolehannya dianggap sebagai bukti obyektif terjadinya penurunan nilai.

Manajemen pertama-tama menentukan apakah terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai secara individual atas aset keuangan yang signifikan secara individual, atau secara kolektif untuk aset keuangan yang jumlahnya tidak signifikan secara individual.

Jika manajemen menentukan tidak terdapat bukti obyektif mengenai penurunan nilai atas aset keuangan yang dinilai secara individual, baik aset keuangan tersebut signifikan atau tidak signifikan, maka aset tersebut dimasukkan ke dalam kelompok aset keuangan yang memiliki karakteristik risiko kredit yang sejenis dan menilai penurunan nilai kelompok tersebut secara kolektif. Aset yang penurunan nilainya dinilai secara individual, dan untuk itu kerugian penurunan nilai diakui atau tetap diakui, tidak termasuk dalam penilaian penurunan nilai secara kolektif.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

Income is recognized on an effective interest basis for financial instruments other than those financial instruments assessed as at fair value through profit or loss.

Impairment of Financial Assets

Financial assets, other than those at fair value through profit and loss (FVTPL), are assessed for indicators of impairment at each reporting date. Financial assets are impaired where there is objective evidence that, as a result of one or more events that occurred after the initial recognition of the financial asset, the estimated future cash flows of the investment have been affected.

For listed and unlisted equity investments classified as AFS, a significant or prolonged decline in the fair value of the security below its cost is considered to be objective evidence of impairment.

The management first assesses whether objective evidence of impairment exists individually for financial assets that are individually significant, or collectively for financial assets that are not individually significant.

If the management determines that no objective evidence of impairment exists for an individually assessed financial asset, whether significant or not, the asset is included in a group of financial assetswith similar credit risk characteristics and that group of financial assets is collectively assessed for impairment. Assets that are individually assessed for impairment and for which an impairment loss, is or continues to be recognized are not included in a collective assessment of impairment.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif bahwa penurunan nilai telah terjadi atas aset dalam kategori pinjaman yang diberikan dan piutang, maka jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang di diskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut (yang merupakan suku bunga efektif yang dihitung pada saat pengakuan awal).

Nilai tercatat aset tersebut langsung dikurangi dengan penurunan nilai yang terjadi atau menggunakan akun cadangan. Jumlah kerugian yang terjadi diakui dalam laporan laba rugi.

Bukti obyektif bahwa aset keuangan atau kelompok aset keuangan mengalami penurunan nilai meliputi:

1) Kesulitan keuangan signifikan yang dialami pihak peminjam atau penerbit instrumen keuangan;
2) Pelanggaran kontrak, seperti terjadinya wanprestasi atau tunggakan pembayaran pokok atau bunga;
3) Terdapat kemungkinan bahwa pihak peminjam akan dinyatakan pailit atau melakukan reorganisasi keuangan lainnya;
4) Pihak pemberi pinjaman, dengan alasan ekonomi atau hukum sehubungan dengan kesulitan keuangan yang dialami pihak peminjam, memberikan keringanan (konsesi) pada pihak peminjam yang tidak mungkin diberikan jika pihak peminjam tidak mengalami kesulitan tersebut;
5) Hilangnya pasar aktif dari aset keuangan akibat kesulitan keuangan; atau

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

Impairment of Financial Assets (continued)

If there is objective evidence that an impairment loss on loans and receivables carried at amortized cost has been incurred, the amount of the loss is measured as the difference between the asset's carrying amount and the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the financial asset's original effective interest rate (i.e., the effective interest rate computed at initial recognition).

The carrying amount of the asset is reduced either directly or through the use of an allowance account. The amount of loss is charged to the profit or loss.

The criteria that the Company uses to determine that there is objective evidence of an impairment loss include:

1) Significant financial difficulty of the obligor or issuer of financial instruments;
2) A breach of contract, such as a default or delinquency in interest or principal payments;
3) There is a probability that the borrower will enter bankruptcy or other financial reorganization;
4) The lender, for economic or legal reasons in connection with the financial difficulties experienced by the borrower, provide relief (concessions) on the part of borrowers who do not may be given if the borrower did not experience such difficulties;
5) Disappearance of an active market for that financial asset because of financial difficulties; or

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

6) Data yang dapat diobservasi mengindikasikan adanya penurunan yang dapat diukur atas estimasi arus kas masa depan dari kelompok aset keuangan sejak pengakuan awal aset dimaksud, meskipun penurunannya belum dapat diidentifikasi terhadap aset keuangan secara individual dalam kelompok aset tersebut, termasuk:

(i) Memburuknya status pembayaran pihak peminjam dalam kelompok tersebut; dan

(ii) Kondisi ekonomi nasional atau lokal yang berkorelasi dengan wanprestasi atas aset dalam kelompok tersebut.

Jumlah kerugian tersebut diukur sebagai selisih antara nilai tercatat aset dengan nilai kini estimasi arus kas masa depan (tidak termasuk kerugian kredit di masa depan yang belum terjadi) yang didiskonto menggunakan suku bunga efektif awal dari aset tersebut. Nilai tercatat aset tersebut dikurangi dan jumlah kerugian diakui pada laporan laba rugi.

Jika pinjaman yang diberikan dan piutang memiliki suku bunga variabel, maka tingkat diskonto yang digunakan untuk mengukur setiap kerugian penurunan nilai adalah suku bunga efektif yang berlaku yang ditetapkan dalam kontrak. Sebagai panduan praktis, Perseroan dapat mengukur penurunan terhadap nilai wajar instrumen dengan menggunakan harga pasar yang dapat diobservasi.

Jika, pada periode berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai berkurang dan pengurangan tersebut dapat dikaitkan secara obyektif pada peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai diakui (seperti meningkatnya peringkat kredit debitor), maka pembalikan atas kerugian penurunan nilai yang sebelumnya telah diakui dicatat pada laporan laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

Impairment of Financial Assets (continued)

6) Observable data indicating that there is a measurable decrease in the estimated future cash flows from a portfolio of financial assets since the initial recognition of those assets, although the decrease cannot yet be identified with the individual financial assets in the portfolio, including:

(i) Adverse changes in the payment status of borrowers in the portfolio; and

(ii) National or local economic conditions that correlate with defaults on the assets in the portfolio.

The amount of the loss is measured as the difference between the carrying value of the asset to the present value of estimated future cash flows (excluding future credit losses that have not been incurred) discounted at the original effective interest rate of the asset. The carrying value of the asset is reduced and the amount of the loss is recognized in the statement of profit or loss.

If loans and receivables has a variable interest rate, the discount rate for measuring any impairment loss is the current effective interest rate determined under the contract. As a practical expedient, the Company may measure impairment on the basis of an instrument's fair value using an observable market price.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss decreases and the decrease can be related objectively to an event occurring after the impairment was recognised (such as an improvement in the debtor's credit rating), the reversal of the previously recognised impairment loss is recognised in the consolidated statements of profit or loss.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

Uji penurunan nilai dilakukan secara individual untuk aset keuangan yang signifikan yang terdapat indikasi penurunan nilai dan secara kolektif untuk aset keuangan yang tidak signifikan dan aset keuangan yang signifikan tetapi tidak memiliki indikasi penurunan nilai berdasarkan data historis.

Perseroan membentuk cadangan kerugian penurunan nilai piutang usaha berdasarkan pendekatan kolektif.

Jika, pada tahun berikutnya, jumlah kerugian penurunan nilai bertambah atau berkurang karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka dilakukan penyesuaian atas cadangan kerugian penurunan nilai yang sebelumnya diakui.

Pemulihan penurunan nilai selanjutnya diakui dalam laporan rugi, dengan ketentuan nilai tercatat aset setelah pemulihan penurunan nilai tidak melampaui biaya perolehan diamortisasi pada tanggal pemulihan tersebut.

Dalam hal investasi ekuitas yang diklasifikasikan sebagai aset keuangan tersedia untuk dijual, bukti obyektif akan meliputi penurunan yang signifikan atau penurunan jangka panjang pada nilai wajar dari investasi di bawah biaya perolehannya.

Jika terdapat bukti bahwa, kerugian penurunan nilai telah terjadi, jumlah kerugian kumulatif yang diukur sebagai selisih antara biaya perolehan dengan nilai wajar kini, dikurangi kerugian penurunan nilai pada investasi yang sebelumnya telah diakui dalam laporan laba rugi direklas dari ekuitas ke laporan laba rugi. Kerugian penurunan nilai atas investasi ekuitas tidak boleh dipulihkan melalui laporan laba rugi, kenaikan nilai wajar setelah penurunan nilai diakui dalam ekuitas.

Dalam hal instrumen utang dalam kelompok tersedia untuk dijual, penurunan nilai ditelaah berdasarkan kriteria yang sama dengan aset keuangan yang dicatat pada biaya perolehan

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

Impairment of Financial Assets (continued)

Impairment test performed individually for financial assets that are significant indications of impairment and collectively for financial assets that are not significant and significant financial assets but has no indication of impairment based on historical data.

The Company allowance for impairment losses on trade receivables based on a collective approach.

If, in a subsequent period, the amount of the impairment loss increases or decreases because of an event occurring after the impairment was recognized, the previously recognized impairment loss is reversed.

Any subsequent reversal of an impairment loss is recognized in the statement of profit or loss, to the extent that the carrying value of the asset does not exceed its amortized cost at the reversal date.

In the case of equity investments classified as AFS financial assets, objective evidence would include a significant reduction or a long-term decline in the fair value of the investment below its cost.

Where there is evidence of impairment, the cumulative loss measured as the difference between the acquisition cost and the current fair value, less any impairment loss on that financial asset previously recognized in the statement of income is removed from equity and recognized in the statement of income. Impairment losses on equity investments are not reversed through the statement of income. Increases in fair value after impairment are recognized directly in equity.

In the case of debt instruments classified as AFS, impairment is assessed based on the same criteria as financial assets carried at amortized cost.

diamortisasi.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Penurunan Nilai dari Aset Keuangan (lanjutan)

Bunga tetap diakru berdasarkan suku bunga efektif asal yang diterapkan pada nilai tercatat aset yang telah diturunkan nilainya, dan dicatat sebagai bagian dari pendapatan bunga dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen hutang meningkat dan peningkatan nilai wajar tersebut karena suatu peristiwa yang terjadi setelah penurunan nilai tersebut diakui, maka penurunan nilai yang sebelumnya diakui harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Akrual tersebut dicatat sebagai bagian dari akun "pendapatan bunga" dalam laporan laba rugi. Jika, pada periode berikutnya, nilai wajar instrumen utang meningkat dan peningkatan tersebut secara obyektif dihubungkan dengan peristiwa yang terjadi setelah pengakuan kerugian penurunan nilai pada laporan laba rugi, maka kerugian penurunan nilai tersebut harus dipulihkan melalui laporan laba rugi.

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan

Aset keuangan (atau mana yang lebih tepat, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) dihentikan pengakuannya, pada saat:

1) hak kontraktual atas arus kas yang berasal dari aset keuangan tersebut berakhir;

2) grup tetap memiliki hak untuk menerima arus kas dari aset keuangan tersebut, namun juga menanggung kewajiban kontraktual untuk membayar kepada pihak ketiga atas arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa adanya penundaan yang signifikan berdasarkan suatu kesepakatan; atau

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

Impairment of Financial Assets (continued)

Interest continues to be accrued at the original effective interest rate on the reduced carrying amount of the asset and is recorded as part of interest income in the statement of income. If, in subsequent period, the fair value of a debt instrument increased and the increase can be objectively related to an event occurring after the impairment loss was recognized in the statement of income, the impairment loss is reversed through the statement of profit or loss.

Accrual is recorded as part of "interest income" in the income statement. If, in the next period, the fair value of debt increases and the increase is objectively related to events occurring after the impairment loss recognized in profit or loss, the impairment loss value should be recovered through the statement of profit or loss.

Derecognition of Financial Assets

Financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is derecognized when:

1) the rights to receive cash flows from the asset have expired;

2) the Group's retains the right to receive cash flows from the asset, but has assumed an obligation to pay to the third party for the received cash flows in full without material delay based on an agreement, or

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.1. Aset Keuangan (lanjutan)

Penghentian Pengakuan Aset Keuangan (lanjutan)

3) grup telah mentransfer haknya untuk menerima arus kas dari aset keuangan dan (i) telah mentransfer secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, atau (ii) secara substansial tidak mentransfer atau tidak memiliki seluruh risiko dan manfaat atas aset keuangan, namun telah mentransfer pengendalian atas aset keuangan tersebut.

Dalam penghentian pengakuan aset keuangan secara keseluruhan, selisih antara jumlah tercatat aset dan jumlah pembayaran dan piutang yang diterima dan keuntungan atau kerugian kumulatif yang telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas diakui dalam laba rugi.

4.h.2. Liabilitas Keuangan

Liabilitas keuangan pada awalnya diukur sebesar nilai wajar. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung ke dalam akuisisi atau penerbitan liabilitas keuangan (selain liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi) dikurangkan dari nilai wajar liabilitas keuangan, sesuai dengan pengakuan awal. Biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung dengan akuisisi liabilitas keuangan pada nilai wajar melalui laporan laba rugi diakui segera dalam laporan laba rugi.

Grup memiliki liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas lain-lain. Oleh karena itu, kebijakan akuntansi terkait dengan liabilitas keuangan dalam kategori liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi dan derivatif yang ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam lindung nilai yang efektif tidak diungkapkan.

Liabilitas keuangan lain-lain merupakan liabilitas keuangan yang tidak dimiliki untuk diperdagangkan atau pada saat pengakuan awal tidak ditetapkan untuk diukur pada nilai

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.1. Financial Assets *(continued)*

Derecognition of Financial Assets (continued)

3) the Group's has transferred its rights to receive cash flows from the asset and either (i) has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (ii) has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.

On derecognition of financial asset in its entirety, the difference between the asset's carrying amount and the sum of the consideration received and receivable and the cumulative gain or loss that had been recognized in other comprehensive income and accumulated in equity is recognized in profit or loss.

4.h.2. Financial Liabilities

Financial liabilities are initially measured at fair value. Transaction cost that are directly attributable to the acquisition or issue of financial liabilities (other than financial liabilities at fair value through profit or loss) are deducted from the fair value of the financial liabilities, as appropriate, in initial recognition. Transaction costs directly attributable to the acquisition of financial liabilities at fair value through profit or loss are recognized immediately in profit or loss.

The Group has financial liabilities in the category of other liabilities. Therefore, accounting policies related to financial liabilities in the category of financial liabilities measured at fair value through profit or loss and derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge are not disclosed.

Other Financial liabilities is not financial liabilities held for trading on initial recognition or are not defined to be measured at fair value through profit or loss.

wajar melalui laporan laba rugi.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.2. Liabilitas Keuangan (lanjutan)

Instrumen keuangan yang diterbitkan atau komponen dari instrumen keuangan tersebut, yang tidak diklasifikasikan sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laporan laba rugi, jika subtansi perjanjian kontraktual mengharuskan Grup untuk menyerahkan kas atau aset keuangan lain kepada pemegang instrumen keuangan, atau jika liabilitas tersebut diselesaikan tidak melalui penukaran kas atau aset keuangan lain atau saham sendiri yang jumlahnya tetap atau telah ditetapkan.

Liabilitas keuangan ini pada pengakuan awal diukur pada nilai wajar dan sesudah pengakuan awal diukur pada biaya perolehan diamortisasi, dengan memperhitungkan dampak amortisasi (atau akresi) berdasarkan suku bunga efektif atas premi, diskonto dan biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, kategori ini meliputi utang usaha, beban akrual, bagian lancar atas liabilitas jangka panjang, pendapatan diterima dimuka/deposit/uang muka diterima, liabilitas keuangan jangka pendek lainnya, liabilitas jangka pendek lainnya, utang non usaha jangka panjang dan utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang yang dimiliki oleh Grup.

Penghentian Pengakuan Liabilitas Keuangan

Grup menghentikan pengakuan liabilitas keuangan, jika dan hanya jika, liabilitas Grup telah dilepaskan, dibatalkan atau kadaluarsa. Selisih antara jumlah tercatat liabilitas keuangan yang dihentikan pengakuannya dan imbalan yang dibayarkan dan utang diakui dalam laba rugi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.2. Financial Liabilities *(continued)*

Issued financial instruments or their components, which are not classified as financial liabilities at fair value through profit loss, where the substance of the contractual arrangement results in the Group's having an obligation either to deliver cash or another financial asset to the holder, or to satisfy the obligation other than by the exchange of a fixed amount of cash or another financial asset for a fixed number of own equity shares.

This financial liabilities are recognized initially at fair value and are subsequently carried at amortized cost, taking into account the impact of applying the effective interest rate method of amortization (or accretion) for any related premium, discount and any directly attributable transaction costs.

As of December 31, 2017 and 2016, these categories include accounts payable, accrued expenses, current portion of long-term liabilities, prepaid revenues / deposit / advances received, other short-term financial liabilities, other short-term liabilities, long-term non-business debt and long-term bank loans and financial institutions held by the Group.

Derecognition of Financial Liabilities

The Group derecognizes financial liabilities when, and only when, the Group's obligations are discharged, cancelled or expires. The difference between the carrying amounts of the financial liability and the consideration paid and payable is recognized in profit or loss.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.3. Saling-Hapus dari Instrumen Keuangan

Aset keuangan dan liabilitas keuangan saling-hapus dan nilai bersihnya dilaporkan dalam Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian jika, dan hanya jika:

a. saat ini memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk melakukan saling-hapus atas jumlah yang telah diakui; dan

b. terdapat niat untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan kewajibannya secara

4.h.4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima untuk menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- di pasar utama untuk aset dan liabilitas tersebut; atau
- jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Grup harus memiliki akses ke pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan pada tanggal pengukuran.

Nilai wajar aset atau liabilitas diukur menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar utamanya bertindak untuk kepentingan ekonomi terbaik mereka.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan dimana data memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, memaksimalkan penggunaan input yang dapat diobservasi yang relevan dan meminimalkan penggunaan input relevan yang tidak dapat diobservasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.3. Offsetting of Financial Instruments

Financial assets and liabilities are offset and the net amount reported in the consolidated statements of financial position if, and only if:

a. the Company and its subsidiaries have a currently enforceable right to offset the recognized amounts; and

b. there is intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.

4.h.4. Fair Value of Financial Instruments

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- *In the principal market for the assetmand liability, or*
- *In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.*

The Group must have access to the principal or the most advantageous market at the measurement date.

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Seluruh aset dan liabilitas dimana nilai wajar diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dapat dikategorikan pada level hirarki nilai wajar, sebagaimana dijelaskan di bawah ini, berdasarkan tingkatan input terendah yang signifikan atas pengukuran nilai wajar secara keseluruhan:

1) Level 1-Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik;

2) Level 2-Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diobservasi baik secara langsung atau tidak langsung;

3) Level 3-Teknik penilaian dimana input level terendah yang signifikan terhadap pengukuran yang tidak dapat diobservasi.

Untuk aset dan liabilitas yang diakui sebesar nilai wajar dalam laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terjadi transfer antara Level di dalam hirarki dengan cara mengevaluasi kategori (berdasarkan input level terendah yang signifikan dalam pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada setiap akhir periode pelaporan.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup telah menentukan kategori aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik, dan risiko dari aset atau liabilitas tersebut, dan level hirarki nilai wajar seperti dijelaskan di atas.

Nilai wajar instrumen keuangan yang diperdagangkan di pasar aktif pada tanggal Laporan Posisi Keuangan (neraca) adalah berdasarkan kuotasi harga pasar atau harga kuotasi penjual/dealer (*bid price* untuk posisi beli dan *ask price* untuk posisi jual), tanpa memperhitungkan biaya transaksi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.4. Fair Value of Financial Instruments *(continued)*

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

1) Level 1-Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities;

2) Level 2-Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable;

3) Level 3-Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

For assets and liabilities that are recognized at fair value in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between Levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting year.

For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.

The fair value of financial instruments traded in active markets at the balance sheet date is based on their quoted market price or dealer price quotations (bid price for long positions and ask price for short positions), without any deduction for transaction costs.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.4. Nilai Wajar Instrumen Keuangan (lanjutan)

Apabila bid price dan ask price yang terkini tidak tersedia, maka harga transaksi terakhir yang digunakan untuk mencerminkan bukti nilai wajar terkini, sepanjang tidak terdapat perubahan signifikan dalam perekonomian sejak terjadinya transaksi. Untuk seluruh instrumen keuangan yang tidak terdaftar pada suatu pasar aktif, kecuali investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga, maka nilai wajar ditentukan menggunakan teknik penilaian.

Teknik penilaian meliputi teknik nilai kini *(net present value)*, perbandingan terhadap instrumen sejenis yang memiliki harga pasar yang dapat diobservasi, model harga opsi *(options pricing models)*, dan model penilaian lainnya.

Dalam hal nilai wajar tidak dapat ditentukan dengan andal menggunakan teknik penilaian, maka investasi pada instrumen ekuitas yang tidak memiliki kuotasi harga dinyatakan pada biaya perolehan setelah dikurangi penurunan nilai.

4.h.5. Biaya Perolehan Diamortisasi dari Instrumen Keuangan

Biaya perolehan diamortisasi dihitung dengan menggunakan metoda suku bunga efektif dikurangi dengan cadangan atas penurunan nilai dan pembayaran pokok atau nilai yang tidak dapat ditagih.

Perhitungan tersebut mempertimbangkan premium atau diskonto pada saat perolehan dan termasuk biaya transaksi dan biaya yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari suku bunga efektif.

4.h.6. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan

Perseroan dan entitas anak mengklasifikasikan instrumen keuangan ke dalam klasifikasi tertentu yang mencerminkan sifat dari informasi dan mempertimbangkan karakteristik dari

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.4. Fair Value of Financial Instruments *(continued)*

When current bid and asking prices are not available, the price of the most recent transaction is used since it provides evidence of the current fair value as long as there has not been a significant change in economic circumstances since the time of the transaction. For all other financial instruments not listed in an active market, except investment in unquoted equity securities, the fair value is determined by using appropriate valuation techniques.

Valuation techniques include net present value techniques, comparison to similar instruments for which market observable prices exist, options pricing models, and other relevant valuation models.

In the absence of a reliable basis for determining fair value, investments in unquoted equity securities are carried at cost, net of any impairment.

4.h.5. Amortized Cost of Financial Instruments

Amortized cost is calculated using the effective interest method less any allowance for impaire in value and payment of principal or value that can not be billed.

The calculation is considered a premium or discount on acquisition and includes transaction cost and expenses that are an integral part of the effective interest rate.

4.h.6. Classes of Financial Instruments

The company and its subdiaries classifies the financial instruments into classes that reflects the nature of information and take into account the characteristic of those financial instruments.

instrumen keuangan tersebut.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

h. Instrumen Keuangan (lanjutan)

h. Financial Instruments *(continued)*

4.h.6. Klasifikasi atas Instrumen Keuangan (lanjutan)

4.h.6. Classes of Financial Instruments *(continued)*

Instrumen Keuangan/ *Financial Instruments*	**Kategori yang didefinisikan oleh PSAK No. 55 (Revisi 2014) / *Category as defined by PSAK No. 55 (Revised 2014)***	**Golongan / *Class***	***Sub Golongan / Sub Class***
Aset Keuangan / *Financial Assets*	Pinjaman yang diberikan dan piutang / *Loans and receivables*	Kas dan setara kas / *Cash and cash equivalents* Piutang usaha / *Account receivables*	
		Aset Keuangan Lancar Lainnya/*Other Current Financial Assets*	Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya/*Restricted cash and cash equivalent*
			Piutang Lain-Lain/*Other Receivables* Pendapatan Masih Harus Diterima/*Accrued Revenues* Penempatan jangka pendek/*Short term investment*
			Aset lancar lainnya/*Other current assets*
Liabilitas keuangan / *Financial liabilities*	Liabilitas Keuangan Lainnya/ *Other Financial Liablities*	Utang Usaha / *Account Payables*	
		Beban Akrual / *Accrued Expenses*	
		Bagian lancar atas pinjaman jangka panjang/ *Current portion of long term debt*	
		Pendapatan diterima dimuka/deposit/uang jaminan/ *Prepaid revenues/deposits/deposits quarantee*	
		Utang Bunga/ *Interest Payables*	
		Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya/*Other Short Term Financial Liabilities*	
		Liabilitas Jangka Pendek Lainnya/*Other Long term liabilities*	
		Utang non usaha jangka panjang/*Long term non business debt*	
		Utang bank dan lembaga keuangan jangka panjang/*Long term financial institution and bank debt*	

i. Investasi Pada Entitas Asosiasi

Entitas asosiasi adalah suatu entitas dimana Grup mempunyai pengaruh yang signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional investee tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

Penghasilan dan aset dan liabilitas dari entitas asosiasi digabungkan dalam laporan keuangan konsolidasian dicatat dengan menggunakan metode ekuitas, kecuali ketika investasi diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual, sesuai dengan PSAK 58 (revisi 2014),

i. Investment in an Associated Company

An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and operating policy decisions of the investee but is not control or joint control over those policies.

The results of operations and assets and liabilities of associates are incorporated in these consolidated financial statements using the equity method of accounting, except when the investment is classified as held for sale, in which case, it is accounted for in accordance with PSAK 58 (revised 2014),

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Investasi Pada Entitas Asosiasi (lanjutan)

Aset Tidak Lancar yang Dimiliki untuk Dijual dan Operasi yang Dihentikan. Dengan metode ekuitas, investasi pada entitas asosiasi diakui di laporan posisi keuangan konsolidasian sebesar biaya perolehan dan selanjutnya disesuaikan untuk perubahan dalam bagian kepemilikan Grup atas laba rugi dan penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi yang terjadi setelah perolehan. Ketika bagian Grup atas kerugian entitas asosiasi melebihi kepentingan Grup pada entitas asosiasi (yang mencakup semua kepentingan jangka panjang, yang secara substansi, membentuk bagian dari investasi bersih Grup dalam entitas asosiasi), Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas kerugian selanjutnya.

Kerugian selanjutnya diakui hanya apabila Grup mempunyai kewajiban bersifat hukum atau konstruktif atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi.

Investasi pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas dari tanggal pada saat investasi menjadi entitas asosiasi. Setiap kelebihan biaya perolehan investasi atas bagian Grup atas nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen asosiasi yang diakui pada tanggal akuisisi, diakui sebagai goodwill. Goodwill termasuk dalam jumlah tercatat investasi, dan diuji penurunan nilai sebagai bagian dari investasi. Setiap kelebihan dari kepemilikan Grup dari nilai wajar bersih dari aset yang teridentifikasi, liabilitas dan liabilitas kontinjen atas biaya perolehan investasi, sesudah pengujian kembali, segera diakui di dalam laba rugi pada periode dimana investasinya diperoleh.

Persyaratan dalam PSAK 55 Instrumen Keuangan: Pengakuan dan Pengukuran, diterapkan untuk menentukan apakah perlu untuk mengakui setiap penurunan nilai sehubungan dengan investasi pada entitas asosiasi Grup.

Jika perlu, jumlah tercatat investasi yang tersisa (termasuk goodwill) diuji penurunan nilai sesuai dengan PSAK 48, Penurunan Nilai Aset, sebagai suatu aset tunggal dengan membandingkan antara jumlah terpulihkan (mana yang lebih tinggi antara nilai pakai dan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan) dengan jumlah tercatatnya. Rugi penurunan nilai yang diakui pada keadaan tersebut tidak dialokasikan pada setiap aset yang membentuk bagian dari nilai tercatat investasi pada entitas asosiasi.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Investment in an Associated Company *(continued)*

Non-current Assets Held for Sale and Discontinued Operations. Under the equity method, an investment in an associate is initially recognized in the consolidated statement of financial position at cost and adjusted thereafter to recognize the Group's share of the profit or loss and other comprehensive income of the associate. When the Group's share of losses of an associate exceeds the Group's interest in that associate (which includes any long-term interests that, in substance, form part of the Group's net investment in the associate), the Group discontinues recognizing it's share of further losses.

Additional losses are recognized only to the extent that the Group has incurred legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate.

Investments in associates is accounted for using the equity method from the date on the investee becomes an associate. Any excess of the cost of acquisition over the Group's share of the net fair value of identifiable assets, liabilities and contingent liabilities of the associate recognized at the date of acquisition, is recognized as goodwill. Goodwill is included within the carrying amount of the investment and assessed for impairment as part of that investment. Any excess of the Group's share of the net fair value of the identifiable assets, liabilities and contingent liabilities over the cost of acquisition, after reassessment, are recognized immediately in profit or loss in the period which the investment is acquired.

The requirements of PSAK 55, Financial Instruments: Recognition and Measurement, are applied to determine whether it is necessary to recognize any impairment loss with respect to the Group's investment in an associate.

When necessary, the entire carrying amount of the investment (including goodwill) is tested for impairment in accordance with PSAK 48, Impairment of Assets, as a single asset by comparing its recoverable amount (higher of value in use and fair value less costs to sell) with its carrying amount. Any impairment loss recognized forms part of the carrying amount of the investment.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Investasi Pada Investasi Asosiasi (lanjutan)

Setiap pembalikan dari penurunan nilai diakui sesuai dengan PSAK 48 (revisi 2014) sepanjang jumlah terpulihkan dari investasi tersebut kemudian meningkat.

Grup menghentikan penggunaan metode ekuitas dari tanggal ketika investasinya berhenti menjadi investasi pada entitas asosiasi atau ketika investasi diklasifikasi sebagai dimiliki untuk dijual.

Pada saat pelepasan suatu entitas asosiasi yang mengakibatkan Grup kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, investasi yang tersisa diukur pada nilai wajar pada tanggal tersebut dan nilai wajarnya dianggap sebagai nilai wajar pada saat pengakuan awal sebagai suatu aset keuangan sesuai dengan PSAK 55.

Selisih antara jumlah tercatat sebelumnya atas entitas asosiasi diatribusikan ke sisa kepemilikan dan nilai wajar termasuk dalam penentuan keuntungan atau kerugian atas pelepasan entitas asosiasi. Selanjutnya, Grup memperhitungkan seluruh jumlah yang sebelumnya diakui dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan entitas asosiasi tersebut dengan menggunakan dasar yang sama dengan yang diperlukan jika entitas asosiasi telah melepaskan secara langsung aset dan liabilitas yang terkait. Oleh karena itu, jika keuntungan atau kerugian yang sebelumnya telah diakui dalam penghasilan komprehensif lain oleh entitas asosiasi akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait, maka Grup mereklasifikasi keuntungan atau kerugian dari ekuitas ke laba rugi (sebagai penyesuaian reklasifikasi) sejak Grup menghentikan menggunakan metode ekuitas.

Jika Grup mengurangi bagian kepemilikan pada entitas asosiasi tetapi Grup tetap menerapkan metode ekuitas, Grup mereklasifikasi ke laba rugi proporsi keuntungan yang telah diakui sebelumnya dalam penghasilan komprehensif lain yang terkait dengan pengurangan bagian kepemilikan (jika keuntungan atau kerugian tersebut akan direklasifikasi ke laba rugi atas pelepasan aset atau liabilitas yang terkait).

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Investment in an Associated Company *(continued)*

Any reversal of that impairment loss is recognized in accordance with PSAK 48 (revised 2014) to the extent that the recoverable amount of the investment subsequently increases.

The Group discontinues the use of the equity method from the date when the investment ceases to be an associate or when the investment is classified as held for sale.

Upon disposal of an associate that results in the Group losing significant influence over that associate, any retained investment is measured at fair value at that date and the fair value is regarded as its fair value on initial recognitio as a financial asset in accordance with PSAK 55.

The difference between the previous carrying amount of the associate attributable to the retained interest and the fair value is included in the determination of the gain or loss on disposal of the associate. In addition, the Group accounts for all amounts previously recognized in other comprehensive income in relation to that associate on the same basis as would be required if that associate had directly disposed of the related assets or liabilities. Therefore, if a gain or loss previously recognized in other comprehensive income by that associate would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities, the Group reclassifies the gain or loss from equity to profit or loss (as a reclassification adjustment) when the equity method is discontinued.

When the group reduces its ownership interest in an associate but the Group continues to use the equity method, the Group reclassifies to profit or loss the proportion of the gain that had previously been recognized in other comprehensive income relating to that reduction in ownership interest (if that gain or loss would be reclassified to profit or loss on the disposal of the related assets or liabilities).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

i. Investasi Pada Investasi Asosiasi (lanjutan)

Ketika Grup melakukan transaksi dengan entitas asosiasi, keuntungan dan kerugian yang timbul dari transaksi dengan entitas asosiasi diakui dalam laporan keuangan konsolidasian Grup hanya sebesar kepemilikan dalam entitas asosiasi yang tidak terkait dengan Grup.

j. Persediaan

Persediaan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan atau nilai realisasi bersih, mana yang lebih rendah.

Biaya perolehan ditentukan dengan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi bersih merupakan taksiran harga jual persediaan dikurangi taksiran biaya penyelesaian dan biaya yang diperlukan untuk melakukan penjualan.

Cadangan kerugian penurunan nilai persediaan dibentuk untuk menyesuaikan nilai persediaan ke nilai realisasi bersih pada tahun berjalan.

Penyisihan atas persediaan usang ditentukan berdasarkan hasil penelaahan terhadap keadaan persediaan pada tanggal laporan posisi keuangan (neraca).

Persediaan rusak, alat induknya sudah tidak ada atau secara ekonomis tidak dapat digunakan dipisahkan penyajiannya ke dalam kelompok “aset tidak lancar lainnya”.

k. Biaya Dibayar Dimuka dan Uang Muka

Biaya dibayar dimuka merupakan biaya yang telah dibayar untuk masa manfaat dua belas bulan atau lebih. Biaya dibayar dimuka diamortisasi sesuai dengan masa manfaat masing-masing biaya menggunakan metode garis lurus.

Pada akhir periode pelaporan, biaya dibayar dimuka disajikan sebesar nilai barang/jasa/manfaat atau setaranya yang belum diakui pada periode berjalan. Biaya dibayar dimuka jangka panjang disajikan sebagai "Aset Tidak Lancar Lainnya" dalam Laporan Posisi Keuangan (neraca).

Uang muka merupakan sejumlah kas keluar atau biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk suatu kegiatan atau suatu hal yang nantinya akan mendapat pertanggungjawaban dalam waktu tertentu dan telah ditetapkan.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

i. Investment in an Associated Company *(continued)*

When a group entity has transactions with its associate, profits and losses resulting from the transaction with the associate are recognized in the Group’s consolidated financial statements only to the extent of its interest in the associate that are not related to the Group.

j. Inventories

Inventories are stated at cost or net realizable value, whichever is lower.

Cost is determined using the weighted average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business less all estimated costs of completion and costs necessary to make the sale.

Allowance for decline in value of the inventories are provided to reduce the carrying value of inventories to their net realizable values int the current period.

The allowance for the obsolete inventories is determined using the periodic review on the condition of the inventory on the statements of financial position (balance sheet) date.

Defective/spoilage Inventories, there is no parent/main asset or economically can not be used are presented in the "other non-current assets".

k. Prepaid Expenses and Advance Payment

Prepaid expenses are expenses that have been paid for the useful life of twelve months or more. Prepaid expenses are amortized over the useful life of each expense using the straight-line method.

At the end of the reporting period, prepaid expenses are stated at the value of the goods / services / benefits or equivalent which has not been recognized in the current period. Long-term prepaid expenses are presented as "Other Current Assets" in the Statement of Financial Position (balance sheet).

Advances are a number of cash-out or costs incurred by the company for an activity or something that will have the responsibility in a certain time and have been assigned.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

l. Properti Investasi

Properti investasi adalah properti (tanah atau bangunan atau bagian dari suatu bangunan atau keduanya) untuk menghasilkan rental atau untuk kenaikan nilai atau keduanya.

Properti investasi awalnya diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung.

Selanjutnya setelah penilaian awal, properti investasi dinilai dengan menggunakan nilai wajar, yaitu setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi penurunan nilai. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar diakui pada laporan laba rugi pada saat terjadinya.

Biaya-biaya setelah perolehan awal diakui dalam jumlah tercatat properti investasi jika dan hanya jika besar kemungkinan manfaat ekonomis di masa depan berkenaan properti investasi tersebut akan mengalir ke perusahaan dan biaya perolehan aset dapat diukur secara andal, dan tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari properti investasi.

Properti investasi disusutkan dengan metode garis lurus selama estimasi masa manfaatnya.

Properti investasi mencakup juga properti dalam proses pembangunan dan akan digunakan sebagai properti investasi setelah selesai.

Akumulasi biaya perolehan dan biaya pembangunan (termasuk biaya pinjaman yang terjadi) diamortisasi pada saat selesai dan siap untuk digunakan.

Properti investasi dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau tidak digunakan lagi secara permanen dan tidak memiliki manfaat ekonomi masa depan yang diperkirakan dari pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan properti investasi ditentukan dari selisih antara hasil neto pelepasan dan jumlah tercatat aset dan diakui dalam laba rugi pada periode terjadinya penghentian atau pelepasan.

Transfer ke, atau dari properti investasi dilakukan jika, dan hanya jika, terdapat perubahan penggunaan, yang ditunjukkan dengan berakhirnya pemakaian oleh pemilik, dimulainya sewa operasi ke pihak lain, berakhirnya konstruksi atau pengembangan, dimulainya penggunaan oleh pemilik atau dimulainya pengembangan untuk dijual.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

l. Investment Properties

Investment properties are properties (land or a building or part of a building or both) held to earn rentals or for capital appreciation or both.

Investment property is initially measured at cost which includes the purchase price and costs directly attributable.

Furthermore, after the initial assessment, property investments valued using fair value, net of accumulated depreciation and accumulated impairment. Gains or losses arising from changes in fair value recognized in profit or loss as incurred.

Costs after the initial acquisition is recognized in the carrying amount of investment property if and only if it is probable that future economic benefits in respect of the investment property will flow to the company and the cost of the item can be measured reliably, and does not include the cost of the maintenance of investment property.

Investment properties are depreciated using the straight-line method based on its estimated useful

Investment property includes properties in the process of development and will be used as investment property after completion.

Accumulated acquisition and development costs (including borrowing costs incurred) are amortized when completed and ready for use.

Investment properties shall be derecognized upon disposal or when the investment property is permanently withdrawn from use and no future economic benefits are expected from its disposal. Any gain or loss arising on derecognition of the property (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is included in profit or loss in the period in which the property is derecognized.

Transfers to or from investment properties when, and only when, there is a change in use, evidenced by the end of the use by the owner, commencement of an operating lease to another party, end of construction or development, commencement of use by the owner or commencement of development for sale.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap

Aset tetap, kecuali tanah, dinyatakan berdasarkan biaya perolehan (cost method), tetapi tidak termasuk biaya perawatan sehari-hari, dikurangi akumulasi penyusutan dan akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada. Tanah tidak disusutkan dan dinyatakan berdasarkan biaya perolehan dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai, jika ada.

Biaya perolehan awal aset tetap meliputi harga perolehan, termasuk bea impor dan pajak pembelian yang tidak boleh dikreditkan dan biaya-biaya yang dapat diatribusikan secara langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan sesuai dengan tujuan penggunaan yang ditetapkan.

Biaya pengurusan legal hak atas tanah ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah, dan biaya ini tidak disusutkan. Biaya pengurusan perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah diakui sebagai aset takberwujud dan diamortisasi sepanjang umur hukum hak atas tanah.

Suku cadang utama dan peralatan siap pakai diklasifikasikan sebagai aset tetap bila diperkirakan akan digunakan dalam operasi selama lebih dari satu tahun.

Beban-beban yang timbul setelah aset tetap digunakan, seperti beban perbaikan dan pemeliharaan, dibebankan ke laba rugi pada saat terjadinya.

Apabila beban-beban tersebut menimbulkan peningkatan manfaat ekonomis di masa datang dari penggunaan aset tetap tersebut yang dapat melebihi kinerja normalnya, maka beban-beban tersebut dikapitalisasi sebagai tambahan biaya perolehan aset tetap.

Penyusutan (selain tanah) dimulai pada tanggal aset tersebut digunakan atau siap untuk digunakan, penyusutan diakui sebagai penghapusan biaya perolehan aset dikurangi nilai residu dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomis aset tetap sebagai berikut:

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed Assets

Fixed Asssets, except land, are carried at cost (cost method), excluding day-to-day servicing, less accumulated depreciation and any impairment in value. Land is not depreciated and is stated at cost less any impairment in value (if any).

The initial cost of property and equipment consists of its purchase price, including import duties and taxes and any directly attributable costs in bringing the property and equipment to its working condition and location for its intended on use.

Initial legal costs incurred to obtain legal rights are recognized as part of the acquisition cost of the land, and these costs are not depreciated. Costs related to renewal of land rights are recognized as intangible assets and amortized during the period of the land rights.

Major spare parts and stand-by equipment are classified as fixed assets when they are expected to be used in operations during more than one year.

Expenditures incurred after the fixed assets have been put into operations, such as repairs and maintenance costs, are normally charged to operations in the year such costs are incurred.

In situations where it can be clearly demonstrated that the expenditures have resulted in an increase in the future economic benefits expected to be obtained from the use of the fixed assets beyond its originally assessed standard of performance, the expenditures are capitalized as additional costs of fixed assets..

Depreciation (except for land) is applied from the date the assets are put into service or when the assets are ready for service, depreciation is recognized so as to write-off the cost of assets less residual values using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follows:

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Aset Tetap (lanjutan)

m. Fixed Assets *(continued)*

Jenis Aset Tetap	Umur Manfaat/ *Useful Life*	Tarif Penyusutan / *Depreciation Rate*	*Type of Assets*
Aset Tetap			***Fixed Assets***
Bangunan			*Building*
- Diperoleh masa PN	12,5 Tahun / *Years*	*8%*	*Retrieved period PN -*
- Diperoleh setelah PT	40 Tahun / *Years*	*2,5%*	*Obtained after PT -*
Kendaraan	5 Tahun / *Years*	*20%*	*Vehicle*
Inventaris			*Inventory*
- Peralatan komputer	7 Tahun / *Years*	*15%*	*Computer equipment -*
- Peralatan komunikasi	7 Tahun / *Years*	*15%*	*Communications equipment -*
- Perabotan kantor/rumah tangga	7 Tahun / *Years*	*15%*	*Office equipment / household -*
- Aset KSO	7 Tahun / *Years*	*15%*	*Joint Operation - assets -*
Peralatan Wisma	7 Tahun / *Years*	*15%*	*Homestead equipment*
Alat Produksi			***Production Equipments***
Armada Kapal			*Fleet*
- Kapal Penumpang	30 Tahun / *Years*	*3,3%*	*Passenger ship -*
- Kapal Roro	30 Tahun / *Years*	*3,3%*	*Roro ship -*
Jet Liner	25 Tahun / *Years*	*4%*	*Jetliner*
Egon	25 Tahun / *Years*	*4%*	*Egon*
Galangan dan alat apung	10 Tahun / *Years*	*10%*	*Shipyard and floating equipment*
Kontainer	10 Tahun / *Years*	*10%*	*Containers*
Alat mekanik dan non mekanik	10 Tahun / *Years*	*10%*	*Tools mechanical and non-mechanical*

Nilai tercatat aset tetap ditelaah kembali dan dilakukan penurunan nilai apabila terdapat peristiwa atau perubahan kondisi tertentu yang mengindikasikan nilai tercatat tersebut tidak dapat dipulihkan sepenuhnya.

Jumlah tercatat aset tetap dihentikan pengakuannya *(derecognized)* pada saat dilepaskan atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasannya. Aset tetap yang dijual atau dilepaskan, dikeluarkan dari kelompok aset tetap berikut akumulasi penyusutan dan amortisasi serta akumulasi penurunan nilai yang terkait dengan aset tetap tersebut.

The carrying values of property and equipment are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that the carrying values may not be recoverable.

Recognizes any resulting difference as a gain or loss in the income component; and Fixed assets are derecognized upon disposal or no future economic benefits are expected from its use or disposal. When assets are sold or retired, the cost of a group of fixed assets and accumulated depreciation and amortization and accumulated impairment losses related to the fixed assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Laba atau rugi yang timbul dari penghentian pengakuan aset tetap ditentukan sebesar perbedaan antara jumlah neto hasil pelepasan, jika ada, dengan jumlah tercatat dari aset tetap tersebut, dan diakui dalam laporan laba rugi pada tahun terjadinya penghentian pengakuan.

Nilai residu, umur manfaat, serta metode penyusutan ditelaah setiap akhir tahun dan dilakukan penyesuaian apabila hasil telaah berbeda dengan estimasi sebelumnya.

Aset kerjasama operasi adalah tanah Perseroan yang digunakan untuk menyelenggarakan kegiatan kerjasama operasi. Bangunan kantor yang diperoleh sebagai kompensasi dalam kerjasama operasi dan pendapatan diterima di muka terkait diakui pada saat aset tersebut selesai dibangun dan siap digunakan sesuai dengan tujuannya. Pendapatan diterima di muka diakui selama periode kerjasama operasi.

Aset dan aset KSO dinyatakan pada nilai dapat diperoleh kembali pada saat kejadian-kejadian atau perubahan-perubahan keadaan mengindikasikan bahwa nilai tercatatnya mungkin tidak dapat diperoleh kembali. Penurunan nilai aset, jika ada, diakui sebagai rugi pada laporan laba rugi.

Biaya Pinjaman

Pinjaman yang dapat dihubungkan secara langsung dengan suatu aset tertentu, jumlah yang dapat dikapitalisasi adalah sebesar biaya pinjaman yang terjadi dalam periode berjalan, dikurangi dengan penghasilan investasi jangka pendek dari pinjaman tersebut.

Untuk pinjaman yang tidak secara khusus digunakan untuk perolehan suatu aset kualifikasian, jumlah biaya pinjaman yang dikapitalisasi ditentukan dengan menggunakan tingkat kapitalisasi untuk pengeluaran aset kualifikasian tersebut.

Tingkat kapitalisasi adalah tingkat rata-rata tertimbang biaya pinjaman terkait pinjaman dalam periode tertentu, tidak termasuk jumlah pinjaman yang secara khusus digunakan untuk pendanaan pembangunan aset kualifikasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed Assets *(continued)*

Any gain or loss arising on derecognition of fixed assets is determined by the difference between the net disposal proceeds, if any, and the carrying amount of the item and recognized in profit or loss in the year the item is derecognized.

The asset's residual values, useful lives and depreciation method are reviewed and adjusted if appropriate, at each financial year end.

Joint venture assets are the Company's land titles used to carry out the joint venture activities. Office building obtained as compensation in the joint operation and the respective unearned income are recognized when the construction is completed and the asset is ready for its intended use. Unearned income is recognized over the period of the joint operation.

Assets and joint venture assets are stated at estimated recoverable amount whenever events or changes in circumtances indicate that the carrying amount may not be fully recoverable. Impairment in asset values, if any, is recognized as a loss in statement of profit or loss.

Borrowing Costs

The borrowings directly attributable to a qualifying asset, the amount able to be capitalized is determined as the actual borrowing costs incurred during the period, less any income earned from the temporary investment of such borrowings.

For borrowings that are not directly attributable to a qualifying asset, the amount to be capitalized is determined by applying a capitalization rate to the amount disbursed on the qualifying asset.

The capitalization rate is the weighted average of the borrowing cost applicable to the total borrowings outstanding during the period, excluding borrowings directly attributable to financing the qualifying asset under construction.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Biaya Pinjaman (lanjutan)

Kapitalisasi biaya pinjaman dihentikan pada saat aktivitas yang berkaitan dengan perolehan dan pengembangan proyek telah selesai atau pada saat konstruksi selesai dan aset tersebut siap digunakan sesuai dengan tujuannya.

Biaya bunga dan biaya pinjaman lain, seperti biaya diskonto atas pinjaman, baik yang secara langsung ataupun tidak langsung digunakan untuk mendanai konstruksi aset tertentu yang memenuhi syarat, dikapitalisasi sampai konstruksi tersebut selesai.

Aset Dalam Penyelesaian

Aset dalam penyelesaian merupakan aset tetap dalam tahap konstruksi dinyatakan sebesar biaya perolehan berdasarkan persentase fisik pekerjaan yang telah diselesaikan sesuai dengan Berita Acara Kemajuan Fisik Pekerjaan. Dan disajikan sebagai bagian dari aset tetap, yang dinyatakan berdasarkan biaya perolehan yaitu harga perolehan, biaya-biaya yang dapat diatribusikan langsung, estimasi awal biaya pembongkaran dan pemindahan aset tetap dan restorasi lokasi aset tetap dan biaya pinjaman yang digunakan untuk membiayai aset selama masa pembangunan.

Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat konstruksi selesai secara substansial dan aset tersebut telah digunakan sesuai tujuannya, yang dibuktikan dengan Berita Acara Serah Terima Pertama.

Aset Tidak Produktif/Tidak Berfungsi

Aset tetap yang tidak memberikan manfaat dalam aktivitas produksi/usahanya atau tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan/pelepasannya dikategorikan sebagai aset tidak produktif/tidak berfungsi dan disajikan pada kelompok aset tidak lancar lainnya.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed Assets *(continued)*

Borrowing Costs (continued)

Capitalization of borrowing costs discontinued when activities associated with the acquisition and development projects have been completed or when construction is completed and the asset is ready for its use.

Interest expense and other borrowing costs, such as discount fees on loans, either directly or indirectly used to finance construction of certain assets are eligible, are capitalized until construction is completed.

Construction in Progress

Construction in progress represents fixed assets under construction are stated at cost based on the percentage of physical work completed in accordance with the Minutes of Physical Progress and presented as part of the fixed assets, which are stated at cost of acquisition price, costs directly attributable, the initial estimate of the cost dismantling and removing the item and restoring the site on fixed assets and the cost of loans used to finance assets during the construction period.

The accumulated costs will be transferred to the respective fixed assets when the construction is substantially completed and the assets are ready for its intended use, as evidenced by the Minutes of First Taking Over.

Non Productive/Non Function Assets

Fixed assets that do not provide benefits in production activity / her business or no future economic benefits are expected from the use / disposal of assets not classified as productive / not functioning and are presented in groups of other non-current assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

m. Aset Tetap (lanjutan)

Aset tetap pada kategori tersebut dilakukan penurunan nilai sebesar nilai tercatatnya pada saat tidak lagi memberikan manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaannya. Akumulasi penurunan nilai aset tidak produktif dibentuk sebagai penerapan atas akuntansi penurunan nilai.

Penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-02/MBU/2010, tentang Tata-cara Penghapus-bukuan dan Pemindahtanganan Aset Tetap Badan Usaha Milik Negara.

Aset tetap tidak produktif dihentikan pengakuannya bilamana telah mendapat persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris dan atau Pemegang Saham.

Keuntungan atau kerugian yang diperoleh dari hasil penjualan aset tetap tidak produktif usulan penghapusan ini, diakui pada kelompok pendapatan atau beban lain-lain.

n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Grup menerapkan PSAK No. 48 (Revisi 2014), ”Penurunan Nilai Aset”, yang mengatur lebih dalam kriteria mengenai hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang telah diakui dan kriteria penyelesaian secara

Pada setiap akhir tahun pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian tahunan penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau Unit Penghasil Kas (“UPK”) dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

m. Fixed Assets *(continued)*

Fixed assets in that category of impaired its carrying value at the time no longer provide future economic benefits are expected from its use. Accumulated impairment of non-productive assets created as the application of the accounting impairment.

The write-off and the alienation of property and equipment following the regulation stated by the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-02/MBU/2010 regarding Procedure for Written-off and alienation of Fixed Assets of State-Owned Company.

Unproductive fixed assets are derecognised when the the elimination has received approval from the Board of Commissioners and or Shareholders.

Gain or loss realized from the sale of fixed assets proposed the elimination unproductive it was recognized in the group income or other expenses.

n. Impairment of Non-financial Assets

The Group adopted PSAK No. 48 (Revised 2014), “Impairment of Assets”, which provides further criterion on legally enforceable right to set off the recognized amounts and criterion to settle on a net basis.

The Group assesses at each annual reporting period whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists, or when annual impairment testing for an asset (i.e., an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset’s recoverable amount.

An asset’s recoverable amount is the higher of the asset’s or Cash Generating Unit’s (“CGU”) fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Jika nilai tercatat aset lebih besar daripada nilai terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar nilai terpulihkannya. Rugi penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan diakui pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian sebagai biaya "Rugi Penurunan Nilai".

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset.

Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Kelompok Usaha menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Penilaian dilakukan pada setiap akhir tahun pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset tersebut.

Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain goodwill dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, setelah dikurangi penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada tahun sebelumnya.

Pembalikan rugi penurunan nilai diakui dalam laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di tahun mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Impairment of Non-financial Assets *(continued)*

Where the carrying amount of an asset exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount. Impairment losses of continuing operations are recognized in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income as "Impairment Losses".

In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset.

In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.

An assessment is made at each annual reporting period as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses recognized for an asset other than goodwill may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the recoverable amount is estimated.

A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the asset does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior years.

Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future years to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

selama sisa umur manfaatnya.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

n. Penurunan Nilai Aset Non-keuangan (lanjutan)

Goodwill hanya diuji untuk menentukan adanya penurunan nilai pada setiap akhir tahun pelaporan dan ketika terdapat suatu indikasi bahwa nilai tercatatnya mengalami penurunan nilai. Penurunan nilai bagi goodwill ditetapkan dengan menentukan jumlah tercatat tiap UPK (atau kelompok UPK) dimana goodwill terkait. Jika jumlah terpulihkan UPK kurang dari jumlah tercatatnya, maka rugi penurunan nilai diakui. Rugi penurunan nilai atas goodwill tidak dapat dibalik pada tahun berikutnya.

o. Aset Tak Berwujud

Beban perpanjangan atau pembaruan hak atas tanah diakui sebagai aset tak berwujud. Beban tersebut diamortisasi selama, mana yang lebih pendek antara umur legal atau umur ekonomi tanah. Jika beban pengurusan perpanjangan atau pembaharuan hak atas tanah tidak material, maka dibebankan pada periode berjalan.

Aset Tak Berwujud dicatat pada biaya perolehannya dikurangi akumulasi amortisasi dan akumulasi rugi penurunan nilai. Aset takberwujud diamortisasi selama estimasi masa manfaatnya. Grup mengestimasi nilai yang dapat diperoleh kembali dari aset takberwujud.

Umur manfaat aset takberwujud dinilai sebagai terbatas atau tidak terbatas. Aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas diamortisasi sesuai umur manfaat ekonomis dan diuji untuk penurunan nilai jika terdapat indikasi bahwa aset takberwujud mengalami penurunan nilai. Periode dan metode amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas ditelaah sekurang-kurangnya pada setiap akhir periode pelaporan. Perubahan pada perkiraan umur manfaat atau pola konsumsi manfaat ekonomi masa depan dari aset tersebut dijadikan pertimbangan dalam mengubah periode atau metode amortisasi dan diperlakukan sebagai perubahan estimasi akuntansi. Beban amortisasi aset takberwujud dengan umur manfaat terbatas dicatat sebagai beban pada laba rugi sesuai dengan fungsi aset takberwujud tersebut.

remaining useful life.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

n. Impairment of Non-financial Assets *(continued)*

Goodwill is tested for impairment in each annual reporting end and when circumstances indicate that the carrying value may be impaired. Impairment is determined for goodwill by assessing the recoverable amount of each CGU (or group of CGUs) to which the goodwill relates. If the recoverable amount of the CGU is less than its carrying amount, an impairment loss is recognized. Impairment losses relating to goodwill cannot be reversed in future years.

o. Intangible Assets

Cost incurred for extension or renewal of land rights are recognized as intangible assets. Amortized over the period, whichever is shorter between the legal life or economic life of the land. If the cost incurred are not material, then charged in the current period.

Intangible assets are recorded at acquisition cost less accumulated amortization and accumulated impairment losses. Intangible assets are amortized over their useful lives. The Group estimates the recoverable value of its intangible assets.

The useful lives of intangible assets are assessed as either finite or indefinite. Intangible assets with finite lives are amortised over the useful economic life and assessed for impairment whenever there is an indication that the intangible asset may be impaired. The amortisation period and the amortisation method for an intangible asset with a finite useful life are reviewed at least at the end of each reporting period. Changes in the expected useful life or the expected pattern of consumption of future economic benefits embodied in the asset are considered to modify the amortisation period or method, as appropriate, and are treated as changes in accounting estimates. The amortisation expense on intangible assets with finite lives is recognised in the profit or loss as the expense category that is consistent with the function of the intangible assets.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

o. Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas tidak diamortisasi, tetapi diuji setiap tahun untuk penurunan nilai, secara individual atau pada tingkat unit penghasil kas. Apabila nilai tercatat aset takberwujud melebihi estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali, maka nilai tercatat aset tersebut diturunkan menjadi sebesar estimasi nilai yang dapat diperoleh kembali. Umur manfaat aset takberwujud yang tidak diamortisasi ditelaah setiap periode untuk menentukan apakah peristiwa dan kondisi dapat terus mendukung penilaian bahwa umur manfaat tetap tidak terbatas. Jika tidak, maka perubahan umur manfaat dari tidak terbatas menjadi terbatas diterapkan secara prospektif.

Perangkat lunak diamortisasi dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat aset takberwujud selama 5 (lima) hingga 10 (sepuluh) tahun.

Aset takberwujud dihentikan pengakuannya ketika aset tersebut dilepaskan atau ketika tidak terdapat lagi manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari penggunaan atau pelepasan aset tersebut. Selisih dalam laporan antara nilai tercatat aset dengan hasil neto yang diterima dari pelepasannya diakui dalam laporan laba rugi.

Biaya-biaya yang tidak mempunyai masa manfaat lebih dari satu periode tidak dapat ditangguhkan, termasuk kerugian yang timbul dari kegiatan awal operasi dan biaya pra-operasi / perintisan usaha.

p. Pendapatan Diterima Dimuka

Pendapatan diterima dimuka adalah penerimaan uang dari pihak lain sehubungan dengan jasa yang akan dilakukan oleh entitas dimasa depan, tetapi jasa tersebut belum diserahkan kepada pihak tersebut.

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban

Pendapatan diakui bila besar kemungkinan manfaat ekonomi akan diperoleh oleh Grup dan jumlahnya dapat diukur secara andal. Pendapatan diukur pada nilai wajar saat diterima, tidak termasuk pajak penjualan (PPN).

- Pendapatan tambang pasasi dan muatan diakui sesuai tingkat penyelesaian jasa atas dasar daftar uang tambang pasasi (B60A) dan daftar tambang

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

o. Intangible Assets *(continued)*

Intangible assets with indefinite useful lives are not amortised, but are tested for impairment annually, either individually or at the cashgenerating unit level. When the carrying amount of an asset exceeds its estimated recoverable amount, the asset is written down to its estimated recoverable amount. The useful life of an intangible asset that is not being amortised shall be reviewed each period to determine whether events and circumstances continue to support an indefinite useful life assessment for that asset. If not, the change in useful life from indefinite to finite is made on a prospective basis.

Software is amortized using the straight-line method, based on the estimated useful lives of the assets of 5 (five) up to 10 (ten) years.

Intangible assets are derecognized when no further economic benefits are expected, either from further use or from disposal. The difference between the carrying amount and the net proceeds received from disposal is recognized in the statement of profit or loss.

The costs that do not have a useful life of more than one period can not be suspended, including losses arising from the initial operation and cost of preoperative / pioneering effort.

p. Received in Advance

Received in advance are money received from other parties in connection with the services of products that will be performed by entities in the future, but the services are not delivered to that party.

q. Revenue and Expense Recognition

Revenue is recognized to the extent that it is probable that the economic benefits will flow to the Group and the revenue can be reliably measured. Revenue is measured at fair value of the consideration received, excluding sales taxes (VAT).

- *Pasasi mines and cargo revenues are recognized according to the level of completion services on the basis pasasi mine money list (B60A) and the list of*

muatan (B60).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

q. Pengakuan Pendapatan dan Beban (lanjutan)

- Pendapatan charter diakui proporsional selama periode perjanjian.
- Pendapatan bongkar muat, komisi keagenan, EMKL dan reparasi diakui pada saat jasa tersebut telah selesai dilaksanakan.
- Pendapatan sewa, bunga dan lainnya diakui dengan metode akrual.
- Penghasilan dividen dari investasi saham diakui pada saat hak menerima dividen telah ditetapkan.

Beban diakui pada saat terjadinya atau sesuai dengan masa manfaatnya.

r. Transaksi Sewa

Penentuan apakah suatu kontrak merupakan, atau mengandung unsur sewa adalah berdasarkan substansi kontrak pada tanggal awal sewa, yakni apakah pemenuhan syarat kontrak tergantung pada penggunaan aset tertentu dan kontrak tersebut berisi hak untuk menggunakan aset tersebut.

Sewa yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan aset, diklasifikasikan sebagai sewa pembiayaan. Dalam sewa pembiayaan Grup *(Lesse)* mengakui aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian pada awal masa sewa, sebesar nilai wajar aset sewa pembiayaan, atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar.

Evaluasi ulang atas perjanjian sewa dilakukan setelah tanggal awal sewa hanya jika salah satu kondisi berikut terpenuhi:

a. terdapat perubahan dalam persyaratan perjanjian kontraktual, kecuali jika perubahan tersebut hanya memperbarui atau memperpanjang perjanjian yang ada;

b. opsi pembaruan dilakukan atau perpanjangan disetujui oleh pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian, kecuali ketentuan pembaruan atau perpanjangan pada awalnya telah termasuk dalam masa sewa;

c. terdapat perubahan dalam penentuan apakah pemenuhan perjanjian tergantung pada suatu aset tertentu; atau

charges mines (B60).

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

q. Revenue and Expense Recognition *(continued)*

- *Charter revenue is recognized proportionately over the period of the agreement.*
- *Revenue stevedoring, agency commissions, and reparations EMKL recognized when services have been completed.*
- *Rental income, interest and other recognized on an accrual basis.*
- *Dividend income from investment in shares of stock is recognized when the shareholders rights to receive such dividend have been established.*

Expenses are recognized when incurred or based on their beneficial period.

r. Lease Transactions

The determination of whether an arrangement is, or contains a lease is based on the substance of the arrangement at inception date of whether the fulfillment of the arrangement is dependent on the use of a specific asset or assets and the arrangement conveys a right to use the asset.

Leases that transfer substantially all the risks and rewards incidental to ownership of the asset are classified as finance leases. In a Group financing lease (Lesse) recognizes assets and liabilities in the consolidated statement of financial position at the beginning of the lease, at fair value of the leased asset, or at the present value of the minimum lease payments, if the present value is less than fair value.

A reassessment is made after inception of the lease only if one of the following applies:

a. *there is a change in the contractual terms of the agreement, unless such changes only renew or extend the existing agreement;*

b. *a renewal option is exercised or extension granted, unless the term of the renewal or extension was initially included in the lease term;*

c. *there is a change in the determination of whether the fulfillment is dependent on a specified asset; or*

d. terdapat perubahan subtansial atas aset yang

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Transaksi Sewa (lanjutan)

Apabila evaluasi ulang telah dilakukan, maka akuntansi sewa harus diterapkan atau dihentikan penerapannya pada tanggal dimana terjadi perubahan kondisi pada skenario a, c atau d dan pada tanggal pembaharuan atau perpanjangan sewa pada skenario b.

Perlakuan Akuntansi untuk *Lessee*

Sewa Pembiayaan

Sewa pembiayaan, yang mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset kepada Perseroan, dikapitalisasi pada awal sewa sebesar nilai wajar aset sewaan atau sebesar nilai kini dari pembayaran sewa minimum, jika nilai kini lebih rendah dari nilai wajar. Pembayaran sewa dipisahkan antara bagian yang merupakan beban keuangan dan bagian yang merupakan pelunasan liabilitas sehingga menghasilkan suatu tingkat suku bunga periodik yang konstan atas saldo liabilitas. Beban keuangan dibebankan sebagai kerugian pada laporan laba-rugi komprehensif konsolidasian tahun berjalan.

Aset sewaan disusutkan selama masa manfaat aset tersebut, kecuali apabila terdapat ketidakpastian yang memadai bahwa lessee akan mendapatkan hak kepemilikan pada akhir masa sewa, maka aset sewaan disusutkan selama periode yang lebih pendek antara masa sewa atau masa manfaat.

Keuntungan yang ditangguhkan dari transaksi penjualan dan sewa-balik pembiayaan diamortisasi dengan metode garis lurus selama masa sewa.

Sewa Operasi

Sewa dimana seluruh risiko dan manfaat kepemilikan aset tersebut tidak ditransfer kepada Grup diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pembayaran sewa operasi diakui sebagai beban dalam laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan secara garis lurus selama masa sewa.

d. *there is a substantial change to the asset.*

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Lease Transactions *(continued)*

Where a reassessment is made, lease accounting shall commence or cease from the date when the change in circumstances gave rise to the reassessment for scenarios a, c or d and the date of renewal or extension period for scenario b.

Accounting Treatment as a Lessee

Financial Lease

Leases which transfer to the Company substantially all the risks and benefits incidental to ownership of the leased item, are capitalized at the inception of the lease at the fair value of the leased property or, if lower, at the present value of the minimum lease payments. Lease payments are apportioned between the finance charges and reduction of the lease liability so as to achieve a constant rate of interest on the remaining balance of the liability. Finance charges are charged directly as loss at the consolidated statement of comprehensive income in current year.

The leased of assets are depreciated over the estimated useful life of the assets except if there is no reasonable certainty that the group will obtain ownership by the end of the lease term, in which case, the lease of assets are depreciated over the shorter of the estimated useful life of the assets and the lease term.

Deferred gain from sale and finance leaseback transaction is amortised using straight line method over the lease term.

Operating Lease

Leases where all the risk and benefits of ownership of the assets are not transferred to the group are classified as operating leases. Lease payments under operating leases are recognized as an expense at the consolidated statement of comprehensive income in current year on a stright-line basis over the lease term.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

r. Transaksi Sewa (lanjutan)

Perlakuan Akuntansi sebagai *Lessor*

Sewa dimana Perseroan dan entitas anak tetap mempertahankan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi.

Biaya langsung awal yang dapat diatribusikan secara langsung dengan negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke nilai tercatat aset sewaan dan diakui ke laporan laba-rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan selama masa sewa sesuai dengan dasar pengakuan pendapatan sewa.

s. Provisi

Provisi diakui ketika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) sebagai akibat peristiwa masa lalu, kemungkinan besar Grup diharuskan menyelesaikan kewajiban dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Jumlah diakui sebagai provisi merupakan taksiran terbaik yang diharuskan menyelesaikan Liabilitas pada tanggal laporan posisi keuangan, dengan memperhatikan unsur risiko dan ketidakpastian yang melekat pada Liabilitas tersebut. Provisi diukur menggunakan estimasi arus kas untuk menyelesaikan Liabilitas kini dengan jumlah tercatatnya sebesar nilai kini dari arus kas tersebut.

Apabila suatu provisi diukur menggunakan arus kas yang diperkirakan untuk menyelesaikan kewajiban kini, maka nilai tercatatnya adalah nilai kini dari arus kas.

Ketika beberapa atau seluruh manfaat ekonomi untuk penyelesaian provisi yang diharapkan dapat dipulihkan dari pihak ketiga, piutang diakui sebagai aset apabila terdapat kepastian bahwa penggantian akan diterima dan jumlah piutang dapat diukur secara andal.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

r. Lease Transactions *(continued)*

Accounting Treatment as a Lessor

Leases where the Company and its subsidiaries retains substantially all the risks and benefits of ownership of the asset are classified as operating leases.

Initial direct costs incurred in negotiating an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized at the consolidated statement of comprehensive income in current year conformity with the lease term on the same basis as rental income.

s. Provision

Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) as a result of a past event, it is probable that the Group will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.

The amount recognized as a provision is the best estimate of the consideration required to settle the obligation at the balance sheet late, taking into account the risks and uncertainties surrounding the obligation. Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

Where a provision is measured using the cash flows estimated to settle the present obligation, its carrying amount is the present value of those cash flows.

When some or all of the economic benefits required to settle a provision are expected to be recovered from a third party, a receivable is recognized as an asset if it is virtually certain that reimbursement will be received and the amount of the receivable can be measured

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja

Imbalan Kerja Jangka Pendek

Imbalan kerja jangka pendek merupakan imbalan kerja yang dibayarkan dalam waktu kurang dari satu tahun, meliputi antara lain gaji, upah dan iuran jaminan sosial. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah tidak terdiskonto dan dibebankan pada laporan rugi komprehensif konsolidasi tahun berjalan serta dicatat sebagai beban yang masih harus dibayar/beban akrual.

Imbalan Kerja Jangka Panjang

Imbalan kerja jangka panjang merupakan imbalan kerja yang akan dibayarkan/terutang setelah pekerja menyelesaikan masa kerjanya. Kewajiban pembayaran imbalan ini diakui sebesar jumlah yang didiskontokan dan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dan diakui sebagai beban pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan liabilitas.

Bagian kewajiban yang akan jatuh tempo dalam waktu satu periode akuntansi akan dicatat sebagai liabilitas jangka pendek dan bagian kewajiban yang akan jatuh tempo setelah satu periode akuntansi dicatat sebagai liabilitas jangka panjang.

4.t.1. Pensiun

Program Pensiun Manfaat Pasti

Program Dana Pensiun Manfaat Pasti adalah program pensiun yang menetapkan jumlah manfaat pensiun, yang akan diterima oleh karyawan pada saat pensiun, setelah memperhitungkan faktor usia, masa kerja dan jenjang kepangkatan (golongan) dan nilai kompensasi.

Dalam program ini, manfaat pensiun yang akan dibayarkan dihitung berdasarkan gaji pokok terakhir dan masa kerja karyawan. Program manfaat pensiun ini dikelola oleh Dana Pensiun ini dikelola oleh Yayasan Dana Pensiun Pelni (YKPP).

Pembayaran kontribusi (iuran dana pensiun) dibiayai oleh karyawan (Peserta) dan Perseroan (Pemberi Kerja). Iuran Dana Pensiun (IDP) beban peserta ditetapkan sebesar 5% dari penghasilan dasar pensiun dan kontribusi

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employment Benefits

Short-Term Employee Benefits

Short-term employee benefits are employee benefits payable in less than one year, including the following salaries, wages and social security contributions. The obligation to pay these benefits are recognized at its undiscounted amount and and as an expense in the consolidated statement of comprehensive income for the year and recorded as accrued expenses.

Long-Term Employment Benefits

Long-term employee benefits are employee benefits that will be paid / payable after workers retire. The obligation to pay these benefits are recognized at amounts discounted and maturing after one accounting period and are recognized as an expense in the consolidated statement of comprehensive income and liabilities.

Part of obligations maturing within one accounting period will be recorded as part of current liabilities and obligations that will mature after one accounting period are recorded as long-term liabilities.

4.t.1. Pension

The Defined Benefit Pension Plan

The defined benefit plan is a pension plan that defines an amount of pension benefit that an employee will receive on retirement after considering factor such as age, years of service, rank ladder (grade) and the amount of compensation.

In this program, retirement benefits will be paid is calculated based on final salary and the employee. This pension benefit program is managed by the Pension Fund Foundation Pelni (YKPP).

Contribution payments (contributions to pension funds) are financed by employees (Participants) and the Company (Procuring Entity). The contributions of the Pension Fund (IDP) of the participants' expenses are set at 5% of the

Perseroan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

4.t.1. Pensiun (lanjutan)

IDP beban pemberi kerja ditetapkan berdasarkan perhitungan aktuaria sesuai dengan kebutuhan dana bagi pembiayaan Program Pensiun setelah dikurangi IDP beban peserta. Perhitungan aktuaria dilakukan secara berkala, sekurang-kurangnya sekali dalam tiga tahun.

Program Pensiun Manfaat Pasti (lanjutan)

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuaria berdasarkan metode *Projected Unit Credit* (PUC) seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24 (Revisi 2016) "imbalan Kerja". Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuaria yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method*, dengan capaian usia normal.

Seluruh pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial dan hasil atas aset dana pensiun (tidak termasuk bunga bersih) diakui langsung melalui penghasilan komprehensif lainnya dengan tujuan agar aset atau kewajiban pensiun neto diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasian untuk mencerminkan nilai penuh dari defisit dan surplus dana pensiun. Pengukuran kembali tidak mengreklasifikasi laba atau rugi pada periode berikutnya.

Seluruh biaya jasa lalu diakui pada saat yang lebih dulu antara ketika amandemen/kurtailmen terjadi atau ketika biaya restrukturisasi atau pemutusan hubungan kerja diakui. Sebagai akibatnya, biaya jasa lalu yang belum vested tidak lagi dapat ditangguhkan dan diakui selama periode vesting masa depan.

pension basic income and the contribution of

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employment Benefits *(continued)*

Long-Term Employment Benefits *(continued)*

4.t.1. Pension *(continued)*

The IDP of the employer's expense is determined based on the actuarial calculation in accordance with the funding requirement for the financing of the Pension Program after deducting the participant's IDP. The actuarial calculations are performed periodically, at least once every three years.

The Defined Benefit Pension Plan (continued)

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the Projected Unit Credit (PUC) method as required by PSAK No. 24 (Revised 2016), "Employee Benefits". For funding purposes, the actuarial method used is Projected Benefit Cost Method, with attained normal age.

The entire remeasurement, consisting of actuarial gains and losses and the yield on pension fund assets (excluding net interest) recognized directly through Other comprehensive income in order for assets or pension liabilities net recognized in the consolidated statement of financial position to reflect the full value of the deficit and surplus pension fund. Remeasurement mengreklasifikasi no profit or loss in subsequent periods.

The entire past service costs are recognized when the first between when the amendment / curtailment occurs or when the cost of restructuring or termination of employment are recognized. As a result, the past service cost not yet vested no longer be deferred and recognized over the vesting period of the future.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

4.t.2. Program Manfaat Karyawan Lainnya

Perseroan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan/tabungan purna jabatan, program santunan meninggal dan catat, Uang pisah, Tunjangan Hari Tua dan Tunjangan Masa Persiapan Pensiun kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan.

Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja

4.t.3. Kesejahteraan Karyawan

Untuk mensejahterakan karyawannya, PT Pelni (Persero) memiliki beberapa program kesejahteraan, antara lain:

Tantiem

Tantiem dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan dalam Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS"), serta dibukukan sebagai beban (expense) tahun

Jasa Produksi/Bonus

Bonus dicadangkan berdasarkan estimasi manajemen Perseroan dan disahkan oleh Rapat Umum Pemegang saham (“RUPS”), dibukukan sebagai beban (expense) tahun berjalan.

Cuti Besar dan Cuti Tahunan

Perseroan memberikan kesempatan cuti tahunan (selama 12 hari per tahun) dan cuti besar (selama 30 hari). untuk melengkapi pelaksanaan cuti tersebut, Perseroan memberikan tunjangan cuti tahunan.

Dana Pindah Rumah

Perseroan menyediakan uang pindah bagi karyawan Perusahaan yang dipindahtugaskan

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employment Benefits *(continued)*

Long-Term Employment Benefits *(continued)*

4.t.2. Other Employee Benefit Program

The Company also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay and functional retirement pay death benefit program and record, Money separation, Annuities and Retirement for their qualifying employees based on the Company policies.

These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the employees. No funding has been made to this long-term benefits.

4.t.3. Employee Welfare

For the welfare of their employees PT Pelni (Persero) has several welfare programs such as:

Tantiem

Tantiem is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders ("RUPS"), charged to the income statement of the current year.

Incentives for Employee/Bonus

Incetives for employee/Bonus is reserved by management estimation and authorized through the General Meeting of Shareholders (so called "RUPS"), charged to the income statement of the current year.

Annual and Long Leave

The Company provides annual leave opportunities (for 12 days per year) and long leave (for 30 days). to complete the execution of such leave, the Company provides annual vacation allowance.

Relocation Allowance

The company provides the fund for Company's employee who is going to move on his duty-free

dan memasuki masa bebas tugas (MBT).

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

t. Imbalan Kerja (lanjutan)

Imbalan Kerja Jangka Panjang (lanjutan)

4.t.3. Kesejahteraan Karyawan

Asuransi Jiwa dan Jamsostek

Perseroan membiayai program asuransi jiwa bagi karyawan. Perseroan bekerja sama dengan beberapa Perseroan asuransi untuk mendukung program tersebut. Perseroan juga mengikut sertakan karyawannya dalam program jaminan ketenagakerjaan di BPJS Ketenagakerjaan.

u. Pajak Penghasilan

Beban pajak adalah jumlah gabungan pajak kini dan pajak tangguhan yang diperhitungkan dalam menentukan laba rugi pada suatu periode. Pajak tersebut diakui dalam laporan laba rugi, kecuali apabila pajak tersebut terkait dengan transaksi atau kejadian yang langsung diakui ke ekuitas dan penghasilan komprehensif lain.

Pajak Kini

Pajak saat terutang berdasarkan laba kena pajak untuk suatu tahun. Beban pajak kini Grup ditentukan berdasarkan laba kena pajak dalam periode yang bersangkutan yang dihitung berdasarkan tarif pajak

Laba kena pajak berbeda dari laba sebelum pajak seperti yang dilaporkan dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain karena pos pendapatan atau beban yang dikenakan pajak atau dikurangkan pada tahun berbeda dan pospos yang tidak pernah dikenakan pajak atau tidak dapat dikurangkan.

Aset dan liabilitas pajak kini diakui, jika jumlah pajak yang telah dibayar untuk periode berjalan dan periode-periode sebelumnya melebihi jumlah pajak yang terutang untuk periode tersebut, maka kelebihannya diakui sebagai aset, dan jika jumlah pajak kini yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.

Aset dan liabilitas pajak kini untuk tahun berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku

period.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

t. Employment Benefits *(continued)*

Long-Term Employment Benefits *(continued)*

4.t.3. Employee Welfare

Life Insurance and Jamsostek

The Company entitles its employees in the life insurance program. In supporting this program, the Company has agreement with several insurance companies to provide the insurance products The Company's employees are also entitled to the social security of employee in BPJS Ketenagakerjaan.

u. Income Tax

Expenses (income) tax is the combined sum of current tax and deferred tax are taken into account in determining income in the period. The tax is recognized in the income statement, except when the tax related to the transactions or events directly recognized in equity and other comprehensive income.

Current Taxes

The tax currently payable is based on taxable profit for the year. The Group's current tax expense is determined based on the taxable income for the year computed using prevailing tax rates.

Taxable profit differs from 'profit before tax' as reported in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income statement because of items of income or expense that are taxable or deductible in other years and items that are never taxable or deductible.

Current tax assets and liabilities are recognized, if the amount of taxes paid for the current period and prior periods exceeds the amount of tax payable for that period, then the excess is recognized as an asset, and if the amount of unpaid taxes is now recognized as a liability.

Current income tax assets and liabilities for the current year are measured at the amount expected to be recoverd from or paid to the tax authority. The tax rates and tax laws used as a basis for computation are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting dates.

pada tanggal pelaporan.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Kini (lanjutan)

Koreksi terhadap liabilitas perpajakan dicatat saat surat ketetapan pajak diterima atau apabila dilakukan banding, ketika hasil banding sudah diputuskan. Kekurangan/kelebihan pembayaran pajak penghasilan dicatat sebagai bagian dari “Beban Pajak Kini” dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain.

Aset pajak kini dan liabilitas pajak kini saling hapus jika terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah yang diakui dan memiliki intensi untuk menyelesaikan dengan dasar neto, atau merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

Pajak Tangguhan

Pajak penghasilan tangguhan diakui, dengan menggunakan metode balance sheet untuk semua perbedaan temporer antara dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas dengan nilai tercatatnya pada laporan keuangan konsolidasian.

Pajak penghasilan tangguhan ditentukan dengan menggunakan tarif pajak yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada periode pelaporan dan diharapkan diterapkan ketika aset pajak penghasilan tangguhan direalisasi atau liabilitas pajak penghasilan tangguhan diselesaikan.

Aset pajak tangguhan diakui apabila besar kemungkinan jumlah penghasilan kena pajak di masa mendatang akan memadai untuk dikompensasi dengan perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan rugi fiskal yang masih dapat dimanfaatkan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diakui menggunakan metode liabilitas atas konsekuensi pajak pada masa mendatang yang timbul dari perbedaan jumlah tercatat aset dan liabilitas menurut laporan keuangan dengan dasar pengenaan pajak aset dan liabilitas pada setiap tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer kena pajak dan aset pajak tangguhan diakui untuk perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal, sepanjang besar kemungkinan perbedaan temporer yang boleh dikurangkan dan akumulasi rugi fiskal tersebut dapat dimanfaatkan untuk mengurangi laba kena pajak pada masa mendatang.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Income Tax *(continued)*

Current Taxes (continued)

Corrections to taxation obligations are recorded when an assessment is received or, if appealed, when the result of the appeal is decided. Shortage / excess income tax payments are recorded as part of the "Current Tax Expense" in the income statement and other comprehensive income.

Current tax assets and current tax liabilities are offset when there is a legal right to offset the recognized amounts and has the intention to finish with a net basis, or realize the asset and settle the liability simultaneously.

Deferred Taxes

Deferred income tax is recognized, using the balance sheet method, on temporary differences arising between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts in the consolidated financial statements.

Deferred income tax is determined using tax rates that have been enacted or substantively enacted as at reporting period and is expected to apply when the related deferred income tax asset is realized or the deferred income tax liability is settled.

Deferred tax assets are recognized to the extent that it is probable that future taxable profit will be available against which the deductible temporary differences and tax losses carried forward can be utilized.

Deferred tax assets and liabilities are recognized for the future tax consequences attributable to differences between the carrying amounts of existing assets and liabilities in the financial statements and their respective tax bases at each reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences and deferred tax assets are recognized for deductible temporary differences and accumulated fiscal losses to the extent that it is probable that taxable income will be available in future years against which the deductible temporary differences and accumulated fiscal losses can be utilized.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

u. Pajak Penghasilan (lanjutan)

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Nilai tercatat aset pajak tangguhan ditinjau kembali pada tanggal laporan posisi keuangan dan nilai tercatat tersebut diturunkan apabila laba fiskal tidak mungkin memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua aset pajak tangguhan. Penurunan tersebut harus disesuaikan kembali apabila besar kemungkinan laba fiskal memadai untuk kompensasi tersebut.

Perubahan nilai tercatat aset dan liabilitas pajak tangguhan yang disebabkan perubahan tarif pajak dibebankan pada tahun berjalan, kecuali untuk transaksi-transaksi yang sebelumnya telah langsung dibebankan atau dikreditkan ke ekuitas.

Pajak tangguhan yang berkaitan dengan transaksi baik yang ada di pendapatan komprehensif lainnya atau langsung dibebankan ke ekuitas, dicatat pada pendapatan komprehensif lainnya atau ekuitas bersangkutan.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan saling hapus ketika entitas memiliki hak yang dapat dipaksakan secara hukum untuk melakukan saling hapus aset pajak kini terhadap liabilitas pajak kini dan ketika aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan serta Perseroan dan entitas anak yang bermaksud untuk memulihkan aset dan liabilitas pajak kini dengan dasar neto.

v. Penggunaan Saldo Laba

Penggunaan saldo laba yang dilakukan atas dasar keputusan/risalah Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) direalisasikan sesuai dengan isi keputusan tersebut. Penggunaan tersebut meliputi, tetapi tidak terbatas pada pembagian dividen, biaya pegawai dan penyisihan saldo laba ke cadangan umum. Pembagian laba tersebut tidak diperlakukan sebagai beban (expense) melainkan sebagai distribusi/ pengurang saldo laba.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

u. Income Tax *(continued)*

Deferred Taxes (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each consolidated statement of financial position date and is reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable income will be available to allow the benefit of part or all of that deferred tax asset to be utilized. Any such reduction is reversed to the extent that it becomes probable that sufficient taxable income would be available.

Changes in the carrying amount of deferred tax assets and liabilities due to a change in tax rates are charged to current year operations, except to the extent that they relate to items previously charged or credited to equity.

Deferred tax related to transactions both in other comprehensive income or directly charged to shareholders' equity, are recorded in other comprehensive income or equity in question.

Deferred tax assets and liabilities are offset when there is legally enforceable right to set off current tax assets against current tax liabilities and when they relate to income taxes levied by the same taxation authority and the Company and its subsidiaries intend to settle their current tax assets and current tax liabilities on a net basis.

v. The Usage of Retained Earnings

The use of retained earnings on the basis of decisions/minutes of the General Meeting of Shareholders (RUPS) to be realized in accordance with the contents of the decision. Such use includes, but is not limited to the distribution of dividends, cost of personnel and provision for general reserve to retained earnings. The distribution is not treated as an expense (expense) but rather as a distribution / deduction from retained earnings.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

v. Penggunaan Saldo Laba (lanjutan)

Sebagaimana diatur pada Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. PER-03/MBU/12/2016, tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara No. PER-09/MBU/072015 Tentang Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan Badan Usaha Milik Negara, pasal 8 ayat (1), bahwa Dana Program Kemitraan dan Program Bina Lingkungan bersumber dari:

1) Penyisihan sebagian laba bersih BUMN; dan/atau
2) Anggaran yang diperhitungkan sebagai biaya pada BUMN.

Lihat catatan 27 dan 28.

w. Laba (Rugi) Bersih Per Saham Dasar

Laba (rugi) per saham dasar dihitung dengan membagi laba (rugi) periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemegang saham induk dengan jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar pada tahun yang bersangkutan.

Laba (rugi) per saham dilusian dihitung setelah melakukan penyesuaian yang diperlukan terhadap jumlah rata-rata tertimbang saham biasa yang beredar dengan asumsi bahwa semua opsi saham dilaksanakan pada saat penerbitan.

x. Informasi Segmen

Informasi segmen disusun sesuai dengan kebijakan akuntansi yang dianut dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian.

Grup melakukan identifikasi segmen operasi berdasarkan laporan internal tentang komponen Grup yang dianalisa secara berkala oleh pengambil keputusan operasional dalam rangka mengalokasikan sumber daya berdasarkan segmen dan menilai prestasi mereka.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

v. The Usage of Retained Earnings *(continued)*

As stipulated in the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-03 / MBU / 12/2016, on the Amendment of the Regulation of the State Minister for State Owned Enterprises No. PER-09 / MBU / 07/2015, concerning the Partnership Program and Community Development Program for State Owned Enterprises, article 8, point (1), that the Fund Partnership Program and Community Development Program sourced from:

1) Allowance partially net profit of BUMN; and/or
2) Budgets are calculated as cost in BUMN.

See notes 27 and 28.

w. Basic Net Earnings (Loss) Per Share

Basic earnings (loss) per share amounts are computed by dividing the profit for the year attributable to owners of the parent entity by the weighted average number of ordinary shares outstanding during the year.

Diluted earnings (loss) per share is computed after making necessary adjustments to the weighted-average number of ordinary shares outstanding assuming the full exercise of employee stock option at the time of issuance

x. Segment Information

Segment information is prepared using the accounting policies adopted for preparing and presenting the consolidated financial statements.

Operating segments are required to be identified on the basis of internal reports about components of the Group that are regularly reviewed by the chief operating decision maker in order to allocate resources to the segments and to assess their performances.

4. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI PENTING (lanjutan)

x. Informasi Segmen (lanjutan)

Segmen operasi adalah suatu komponen dari entitas:

1) yang terlibat dalam aktivitas bisnis yang mana memperoleh pendapatan dan menimbulkan beban;
2) yang hasil operasinya dikaji ulang secara regular oleh pengambil keputusan operasional untuk membuat keputusan tentang sumber daya yang dialokasikan pada segmen tersebut dan menilai kinerjanya;
3) tersedia informasi keuangan yang dapat dipisahkan.

Untuk tujuan manajemen, Grup membagi menjadi beberapa segmen operasi berdasarkan produk dan jasa yang dikelola secara independen oleh masing-masing pengelola segmen yang bertanggung jawab atas kinerja dari masing-masing segmen. Para pengelola segmen melaporkan secara langsung kepada manajemen yang secara teratur mengkaji hasil operasi sebagai dasar untuk mengalokasikan sumber daya ke masing-masing segmen dan untuk menilai kinerja segmen. Pengungkapan tambahan pada masing-masing segmen terdapat dalam catatan 36, termasuk faktor yang digunakan untuk mengidentifikasi segmen yang dilaporkan dan dasar pengukuran informasi segmen.

y. Kejadian Setelah Periode Pelaporan

Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah periode pelaporan berjalan yang menyediakan informasi mengenai posisi keuangan Grup pada tanggal laporan posisi keuangan konsolidasian sehingga perlu dilakukan penyesuaian, jika ada, telah tercermin dalam laporan keuangan konsolidasian. Kejadian-kejadian setelah tanggal laporan posisi keuangan yang tidak memerlukan penyesuaian, apabila jumlahnya material, telah diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian.

4. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING POLICIES *(continued)*

x. Segment Information *(continued)*

An operating segment is a component of an entity:

1) that engages in business activities from which it may earn revenues and incur expenses;
2) whose operating results are regularly reviewed by the entity's operating decision maker to make decisions about resources to be allocated to the segment and value its performance;
3) for which discrete financial information is available.

For management purposes, the Group are divided into operating segments based on products and services which are independently managed by the respective segment managers responsible for the performance of each segment. The segment managers report directly to the management regularly review the operating results as a basis for allocating resources to each of the segments and to assess segment performance. Additional disclosures on each of the segments contained in note 36, including the factors used to identify the reported segments and the measurement basis of segment information.

y. Events After the Reporting Period

Post year-end events that provide additional information about the Group's financial position at the date of the consolidated statement of financial position (adjusting events), if any, are reflected in the consolidated financial statements. Post year-end events that are not adjusting events are disclosed in the notes to consolidated financial statements when material.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN

Dalam penerapan kebijakan akuntansi Grup, seperti yang diungkapkan dalam catatan 4 pada laporan keuangan konsolidasi, manajemen diminta untuk membuat penilaian, estimasi dan asumsi nilai tercatat aset dan liabilitas yang telah disajikan oleh sumber lain. Estimasi dan asumsi tersebut, berdasarkan pengalaman historis dan faktor lain yang dipertimbangkan relevan.

Manajemen berkeyakinan bahwa, pengungkapan berikut telah mencakup ikhtisar estimasi, pertimbangan dan asumsi signifikan yang dibuat oleh manajemen, yang berdampak terhadap jumlah-jumlah yang dilaporkan serta pengungkapan dalam laporan keuangan konsolidasian.

Pertimbangan

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

a. Klasifikasi Aset dan Liabilitas Keuangan

Grup menetapkan klasifikasi atas aset dan liabilitas tertentu sebagai aset keuangan dan liabilitas keuangan dengan mempertimbangkan bila definisi yang ditetapkan PSAK No. 55 (Revisi 2014) dipenuhi. Dengan demikian, aset keuangan dan liabilitas keuangan diakui sesuai dengan kebijakan akuntansi Grup seperti diungkapkan pada catatan 4.h.6.

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan

Provisi kerugian penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang dipelihara pada jumlah yang menurut manajemen adalah memadai untuk menutup kemungkinan tidak tertagihnya aset keuangan.

Pada setiap tanggal laporan posisi keuangan konsolidasi, Grup secara spesifik menelaah apakah telah terdapat bukti obyektif bahwa suatu aset keuangan telah mengalami penurunan nilai (tidak tertagih).

Provisi yang dibentuk adalah berdasarkan pengalaman penagihan masa lalu dan faktor-faktor lainnya yang mungkin mempengaruhi kolektibilitas, antara lain kemungkinan kesulitan likuiditas atau kesulitan keuangan yang signifikan yang dialami oleh debitur atau penundaan pembayaran yang signifikan.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS

In the application of the Group accounting policies, which are described in note 4 to the consolidated financial statements, management is required to make judgments, estimates and assumptions about the carrying amounts of assets and liabilities that are not readily apparent from other sources. The estimates and assumptions are based on historical experience and other factors that are considered to be relevant.

Management believes that the following represent a summary of the significant estimates, judgments and assumptions made by the management, which affected certain reported amounts and disclosures in the consolidated financial statements.

Judgments

The following judgments are made by management in the process of applying the Group accounting policies that have the significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

a. Classification of Financial Assets and Liabilities

The Group determines the classifications of certain assets and liabilities as financial assets and financial liabilities by judging if they meet the definition set forth in PSAK 55 (Revised 2014). Accordingly, the financial assets and financial liabilities are accounted for in accordance with the group accounting policies disclosed in note 4.h.6.

b. Provision for Impairment of Financial Assets

Provision for impairment of loans and receivables is maintained at a level considered adequate to provide for potentially uncollectible receivables.

The Group assesses specifically at each consolidated statement of financial position date whether there is an objective evidence that a financial asset have impairment value (uncollectible).

The formed of provision is based on past collection experience and other factors that may affect collectability such as the probability of insolvency or significant financial difficulties of the debtors or significant delay in payments.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Pertimbangan (lanjutan)

b. Provisi Kerugian Penurunan Nilai Aset Keuangan (lanjutan)

Jika terdapat bukti obyektif penurunan nilai, maka saat dan besaran jumlah yang dapat ditagih diestimasi berdasarkan pengalaman kerugian masa lalu. Provisi kerugian penurunan nilai dibentuk atas akun-akun yang diidentifikasi secara spesifik telah mengalami penurunan nilai.

Akun pinjaman dan piutang dihapusbukukan berdasarkan keputusan manajemen bahwa aset keuangan tersebut tidak dapat ditagih atau direalisasi meskipun segala cara dan tindakan telah dilaksanakan.

Suatu evaluasi atas piutang, yang bertujuan untuk mengidentifikasi jumlah penyisihan yang harus dibentuk, dilakukan secara berkala sepanjang tahun. Oleh karena itu, saat dan besaran jumlah penyisihan kerugian penurunan nilai piutang tak tertagih yang tercatat pada setiap periode dapat berbeda tergantung pada pertimbangan dan estimasi yang digunakan.

Nilai tercatat pinjaman diberikan dan piutang Grup tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 sebagai berikut:

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Judgments *(continued)*

b. Provision for Impairment of Financial Assets (continued)

If there is objective evidence of impairment, timing and collectible amounts are estimated based on historical loss data. Provision for doubtful accounts is provided on accounts specifically identified as impaired.

Loans and receivables written-off are based on management's decisions that the financial assets are uncollectible or cannot be realized in whatsoever actions will be taken.

Evaluation on receivables to identify total allowance that should be provided, is performed periodically during the period. Therefore, timing and amount of allowances for impairment value of doubtful accounts recorded at each period might differ based on the judgments and estimates that have been used.

The carrying value of the Group loans and receivables as of December 31, 2017 and 2016 are as follows:

	31 Desember/ *December* 2017	31 Desember/ *December* 2016	
Kas dan Setara Kas	1.338.781.110.919	885.614.536.588	*Cash and Cash Equivalent*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	649.901.221.741	856.018.628.205	*Short-term Investment*

c. Pajak Penghasilan

Pertimbangan yang signifikan dibutuhkan untuk menentukan jumlah pajak penghasilan. Terdapat banyak transaksi dan perhitungan yang mengakibatkan ketidakpastian penentuan jumlah pajak penghasilan. Grup memiliki akumulasi rugi fiskal dan mengakui aset pajak tangguhan atas rugi fiskal tersebut. Jika hasil pemeriksaan pajak mungkin berbeda dengan jumlah yang sebelumnya telah diestimasi, maka selisih tersebut akan berdampak terhadap aset dan liabilitas pajak kini dan tangguhan dalam periode dimana hasil pemeriksaan tersebut terjadi.

c. Income Taxes

Significant judgment is required in determining the provision for income taxes. There are many transactions and calculations for which the ultimate tax determination is uncertain. The Group has accumulated fiscal loss and recognized deffered tax asset on those fiscal loss. The final tax outcome of the tax audit is different from the amounts that were initially estimated, such differences will have an impact on the current and deferred income tax assets and liabilities in the period in which such determination is made.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi

Asumsi utama mengenai estimasi ketidakpastian di masa datang dan sumber utama estimasi tersebut pada tanggal pelaporan yang mempunyai risiko signifikan yang menyebabkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas dalam tahun/periode buku selanjutnya diungkapkan di bawah ini.

Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia saat laporan keuangan disusun. Kondisi yang ada dan asumsi mengenai perkembangan masa depan dapat berubah karena perubahan situasi pasar yang berada di luar kendali Grup. Perubahan tersebut tercermin dalam asumsi ketika keadaan tersebut terjadi:

a. Nilai Wajar Aset Keuangan dan Liabilitas Keuangan

Prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia mensyaratkan pengukuran aset keuangan dan liabilitas keuangan tertentu pada nilai wajarnya, dan penyajian ini mengharuskan penggunaan estimasi dan pertimbangan akuntansi.

Komponen pengukuran nilai wajar yang signifikan ditentukan berdasarkan bukti obyektif yang dapat diverifikasi (seperti nilai tukar, suku bunga), sedangkan saat dan besaran perubahan nilai wajar dapat menjadi berbeda karena penggunaan metode penilaian yang berbeda.

Nilai wajar aset keuangan dan liabilitas keuangan diungkapkan pada catatan 38.

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud

Grup mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap dan aset takberwujud berdasarkan utilisasi dari aset yang diharapkan dan didukung dengan rencana dan strategi usaha dan perilaku pasar. Estimasi dari masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud adalah berdasarkan penelaahan Group terhadap praktek industri, evaluasi teknis internal dan pengalaman untuk aset yang setara. Estimasi masa manfaat ditelaah minimal setiap akhir periode pelaporan dan diperbarui jika ekspektasi berbeda dari estimasi sebelumnya dikarenakan pemakaian dan kerusakan fisik, keusangan secara teknis atau komersial dan hukum atau pembatasan lain atas penggunaan dari aset.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and Assumptions

The key assumptions concerning the future and other key sources of estimation uncertainty at the reporting date that have a significant risk of causing a material adjustment to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial period are disclosed below.

The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes on circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur:

a. Fair Value of Financial Assets and Financial Liabilities

Indonesian Financial Accounting Standards require measurement of certain financial assets and liabilities at fair values, and the disclosure requires the use of estimates.

Significant component of fair value measurement is determined based onobjective evidence derived from diversification (i.e. foreign exchange, interest rate), while timing and amount of changes in fair value might differ due to different valuation method used.

The fair value of financial assets and financial liabilities are disclosed in Note 38.

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets

The Group estimates the useful lives of its fixed assets based on expected asset utilization as anchored on business plans and strategies that also consider expected market behavior. The estimation of the useful lives of fixed assets is based on The Group assessment of industry practice, internal technical evaluation and experience with similar assets. The estimated useful lives are reviewed at least each of ending financial period and are updated if expectations differ from previous estimates due to physical wear and tear, technical or commercial obsolence and legal or other limitations on the use of the assets.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

b. Estimasi Masa Manfaat Aset Tetap dan Aset Tak Berwujud (lanjutan)

Tetapi, adalah mungkin, hasil di masa depan dari operasi dapat dipengaruhi secara material oleh perubahan-perubahan dalam estimasi yang diakibatkan oleh perubahan faktor faktor yang disebutkan di atas. Penurunan estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud akan meningkatkan beban penyusutan dan menurunkan nilai tercatat aset tetap dan aset takberwujud.

Tidak terdapat perubahan signifikan dalam estimasi masa manfaat aset tetap dan aset takberwujud selama tahun berjalan. Estimasi masa manfaat aset tetap dan aset tak berwujud diungkapkan pada catatan 4.m dan 4.o.

c. Penurunan Nilai Pinjaman yang Diberikan dan Piutang

Grup menilai penurunan nilai pinjaman yang diberikan dan piutang pada setiap tanggal pelaporan. Dalam menentukan apakah rugi penurunan nilai harus dicatat dalam laporan laba rugi, Grup membuat penilaian, apakah terdapat bukti objektif bahwa kerugian telah terjadi. Grup juga membuat penilaian atas metodologi dan asumsi untuk memperkirakan jumlah dan waktu arus kas masa depan yang direview secara berkala untuk mengurangi perbedaan antara estimasi kerugian dan kerugian aktualnya. Nilai tercatat pinjaman yang diberikan dan piutang telah diungkapkan dalam Catatan 6,7,dan 8.

d. Penurunan Nilai Aset Non Keuangan

Penelaahan penurunan nilai dilakukan bila terdapat indikasi adanya penurunan nilai. Penentuan nilai wajar aset memerlukan estimasi arus kas yang diharapkan diperoleh dari penggunaan berkelanjutan dan pelepasan aset tersebut. Setiap perubahan signifikan pada asumsi yang digunakan dalam menentukan nilai wajar dapat memberikan dampak yang material terhadap penilaian nilai yang terpulihkan dan setiap kerugian penurunan nilai yang dihasilkan dapat memberikan dampak terhadap hasil operasi.

Nilai tercatat properti investasi, alat produksi dan aset tetap pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016 telah diungkapkan dalam Catatan 13, 14, dan 15.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

b. Estimated Useful Lives of Property and Equipment and Intangible Assets (continued)

It is possible, however, that future results of operations could be materially affected by changes in the estimates brought about by changes in the factors mentioned above.The decline in the estimated useful lives of fixed assets and intangible assets will increase depreciation and reduce the carrying value of fixed assets and intangible assets.

There is no change in the estimated useful lives of property and equipment and intangible assets during the year. Estimated useful lives of property and equipment and intangible asset described in note 4.m and 4.o.

c. Impairment of Loans and Account Receivables

The Group assess their loans and receivables for impairment at each reporting date. In determining whether an impairment loss should be recorded in profit or loss, the group makes judgment as to whether there is an objective evidence that loss event has occurred. The Group also makes judgment as to the methodology and assumptions for estimating the amount and timing of future cash flows which are reviewed regularly to reduce any difference between loss estimate and actual loss. The carrying amount of loans and receivables are disclosed in notes 6, 7, and 8.

d. Impairment of Non Financial Assets

Impairment review is performed when certain impairment indicators are present. Determining the fair value of assets requires the estimation of cash flows expected to be generated from the continued use and ultimate disposition of such assets. Any significant changes in the assumptions used in determining the fair value may materially affect the assessment of recoverable values and any resulting impairment loss could have a material impact on results of operations.

The carrying amounts of investment properties, production equipment and fixed assets as of December 31, 2017 and 2016 have been disclosed in

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

e. Imbalan Pasca Kerja

Penentuan liabilitas dan manfaat pasca kerja tergantung pada pemilihan asumsi tertentu yang digunakan oleh aktuaris dalam menghitung jumlah kewajiban dan imbalan tersebut. Asumsi yang digunakan diungkapkan dalam catatan 27 dan mencakup, antara lain, tingkat diskonto dan tingkat kenaikan gaji.

Hasil aktual yang berbeda dari asumsi Grup diakumulasi dan diamortisasi sepanjang masa kerja dan umumnya mempengaruhi beban yang diakui dan kewajiban yang dicatat pada periode mendatang. Walaupun Grup berpendapat bahwa asumsi yang digunakan wajar dan dapat diandalkan, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi dapat secara material mempengaruhi jumlah liabilitas imbalan pasti pasca-kerja Grup. Pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, liabilitas manfaat pascakerja masing-masing sebesar Rp134.742.481.003 dan Rp78.574.423.843. (Lihat Catatan 27)

f. Pajak Penghasilan

Dalam situasi tertentu, Perseroan tidak dapat menentukan secara pasti jumlah liabilitas pajak mereka pada saat ini atau masa depan karena proses pemeriksaan, atau negosiasi dengan otoritas perpajakan. Ketidakpastian timbul terkait dengan intepretasi dari peraturan perpajakan yang kompleks dan jumlah dan waktu dari penghasilan kena pajak di

Dalam menentukan jumlah yang harus diakui terkait dengan liabilitas pajak yang tidak pasti, Perseroan menerapkan pertimbangan yang sama yang akan mereka gunakan dalam menentukan jumlah cadangan yang harus diakui sesuai dengan PSAK 57 (R-2009), "Provisi, Liabilitas Kontijensi dan Aset Kontijensi". Pajak penghasilan telah diungkapkan dalam catatan 10.

g. Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan, sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer tersebut dapat

Notes 13, 14 and 15.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

e. Post Employment Benefits

The determination of the obligation and post-employment benefits is dependent on the selection of certain assumptions used by actuary in calculating such amounts its liabilities and benefit. Those assumptions are described in note 27 and include, among others, discount rate and rate of salary increase.

Actual results that differ from the Group assumptions are accumulated and amortized over future periods and therefore, generally affect the recognized expense and recorded obligation in such future periods. While it is believed that the Group assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in actual experience or significant changes in assumptions may materially affect the amount of the Group long term employee benefits liability. As of December 31, 2017 and 2016, long-term employee benefits liability amounted to Rp134.742.481.003 and Rp78.574.423.843. (See Note 24)

f. Inccome Taxes

In certain circumstances, the Company may not be able to determine the exact amount of its current or future tax liabilities due to ongoing investigations by, or negotiations with, the taxation authority. Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations and the amount and timing of future taxable income.

In determining the amount to be recognized in respect of an uncertain tax liability, the Company applies similar considerations as it would use in determining the amount of a provision to be recognized in accordance with PSAK 57 (R-2009), "Provisions, Contingent Liabilities and Contingent Asset. Income tax is disclosed in note 10.

g. Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences, to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the deductible temporary differences can be utilized.

digunakan.

5. PENGGUNAAN ESTIMASI, PERTIMBANGAN DAN ASUMSI MANAJEMEN (lanjutan)

Estimasi dan Asumsi (lanjutan)

g. Aset Pajak Tangguhan

Estimasi signifikan oleh manajemen disyaratkan dalam menentukan total aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak serta strategi perencanaan pajak masa depan. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 4u.

h. Cadangan Penurunan Nilai Persediaan Usang dan Bergerak Lambat

Cadangan persediaan usang dan bergerak lambat diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Cadangan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci diungkapkan dalam Catatan 9.

5. MANAGEMENT USE OF ESTIMATES, JUDGMENTS AND ASSUMPTIONS *(continued)*

Estimates and Assumptions *(continued)*

g. Deferred Tax Assets

Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of the future taxable profits together with future tax planning strategies. Further details are disclosed in Note 4u.

h. Allowance for obsolete and slow moving inventories

Allowance for obsolete and slow moving inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is reevaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details are disclosed in Note 9.

6. KAS DAN SETARA KAS / ***6. CASH AND CASH EQUIVALENT***

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Kas			***Cash***
Rupiah	8.212.262.162	5.359.195.264	*Rupiah*
Valuta Asing (2017: USD 2,840 ; SGD 419 dan 2016: USD 2,440)	48.044.793	32.787.890	*Foreign Currency (2017: 2,840 ; SGD 419 and 2016: USD 2,440)*
Jumlah Kas	**8.260.306.955**	**5.391.983.154**	***Total Kas***
Bank			***Bank***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	430.344.483.128	141.024.440.414	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	357.328.378.520	21.631.516.105	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	21.686.624.733	9.110.166.855	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	-	160.992.799	*PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk*
Sub Jumlah	**809.359.486.381**	**171.927.116.174**	***Sub Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

6. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan) / ***6. CASH AND CASH EQUIVALENT*** *(continued)*

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Bank			***Bank***
Pihak berelasi			***Related parties***
Valuta Asing			*Foreign Exchange*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk (2017: USD 1,356,829 dan 2016: USD 835,712)	18.382.315.363	11.228.628.985	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk *(2017: USD 1,356,829 and 2016: USD 835,712)*
PT Bank Negara Indonesia *(Persero), Tbk* (2017: USD 28,899 ; SGD 31,894 ; EUR 6,770 dan 2016: USD 34,498 ; SGD 12,309 ; EUR 6.800)	912.853.687	743.190.939	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (2017: USD 28,899 ; SGD 31,894 ; EUR 6,770 and 2016: USD 34,498 ; SGD 12,309 ; EUR 6.800)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2017: USD 10,974 dan 2016: USD 11,012)	148.679.816	147.960.591	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk (2017: USD 10,974 and 2016: USD 11,012)*
Sub Jumlah	**19.443.848.866**	**12.119.780.515**	***Sub Total***
Pihak ketiga			***Third parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Central Asia, Tbk	615.331.774	1.070.131.046	PT Bank Central Asia, Tbk
PT Bank DKI	399.121.928	258.741.025	*PT Bank DKI*
PT Bank Syariah Mandiri	280.585.741	4.538.020.704	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Bank Panin, Tbk	2.159	-	*PT Bank Panin, Tbk*
Valuta Asing			*Foreign Exchange*
Citibank N.A	1.797.427.114	1.783.140.064	*Citibank N.A*
Sub Jumlah	**3.092.468.717**	**7.650.032.839**	***Sub Total***
Jumlah Bank	**831.895.803.963**	**191.696.929.528**	***Total Bank***
Deposito			***Deposit***
Pihak berelasi			***Related parties***
Rupiah			*Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	35.100.000.000	153.925.623.906	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	211.600.000.000	11.600.000.000	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	251.925.000.000	523.000.000.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
Jumlah Deposito	**498.625.000.000**	**688.525.623.906**	***Total Deposit***
Jumlah Kas dan Setara Kas	**1.338.781.110.919**	**885.614.536.588**	***Total Cash & Equivalents***

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 4,25% - 7,5% dan 6% - 7% pada tahun 2017 dan 2016.

Interest rate per year rupiah deposits by 4,25% - 7,5% and 6% - 7% in 2017 and 2016.

Seluruh kas dan setara kas adalah milik Perseroan dan entitas anak tidak digunakan sebagai jaminan atas liabilitas dan pinjaman lainnya dan tidak dibatasi

The entire cash and cash equivalents of the Company and subsidiaries are not pledged as collateral for liabilities and other loans and there are no restrictions for

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 38.

Explanations of related parties refer to Notes 38.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

7. PIUTANG USAHA / *7. ACCOUNTS RECEIVABLE*

a. Berdasarkan pelanggan / *a. Based on the customer*

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	21.831.920.318	13.344.698.076	*Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni*
PT Sarana Gama Sejahtera	2.238.142.833	2.346.234.693	*PT Sarana Gama Sejahtera*
PT Pupuk Kaltim (Persero)	973.163.670	1.555.082.759	*PT Pupuk Kaltim (Persero)*
Kementrian Perhubungan CQ. Karo. Perencanaan	78.733.271.116	197.813.998.577	*Ministry of Transportation CQ. Head of Planning Bureau*
PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	860.817.498	860.817.498	*PT Krakatau Steel (Persero) Tbk*
Satuan Kerja Direktorat Lalu Lintas Angkatan Laut	1.359.089.236	-	*Directorate of Naval Traffic*
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)	-	840.169.660	*PT ASDP Indonesia Ferry (Persero)*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	-	707.622.724	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
JKN - BPJS	29.739.795.353	5.239.959.500	*JKN - BPJS*
Lain-lain (dibawah Rp500 juta)	10.185.354.185	-	*Others (below Rp500 Million)*
Sub Jumlah	**145.921.554.209**	**222.708.583.487**	***Sub Total***
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Putra Master	7.653.775.720	4.435.293.600	*PT Putra Master*
PT Parani Artamandiri	2.394.640.000	-	*PT Parani Artamandiri*
CV Jimsagho	2.353.000.000	-	*CV Jimsagho*
PT Guheba Indonesia	2.184.355.223		*PT Guheba Indonesia*
Perusahaan Ekspedisi Bongkar Muat Kapal	1.362.323.620	-	*Expedition Loading Company*
PT Armada Rock Karunia (ARK)	1.334.506.884	620.519.160	*PT Armada Rock Karunia (ARK)*
PT Solusi Integrasi Utama	1.216.187.592	-	*PT Solusi Integrasi Utama*
PT KAPP Nusa Wangi	986.544.188	-	*PT KAPP Nusa Wangi*
PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk	880.768.129	1.126.554.727	*PT Sumber Alfaria Trijaya Tbk*
PT Atosim Lampung Pelayaran	865.291.650	1.037.791.650	*PT Atosim Lampung Pelayaran*
PT Indomarco Prismatama	839.054.913	-	*PT Indomarco Prismatama*
PT Selog	711.754.068	-	*PT Selog*
Carnival Uk (MV. Arcadia)	686.399.394	1.049.985.242	*Carnival Uk (MV. Arcadia)*
PT Pewete Bahtera Kencana	655.234.300	830.234.300	*PT Pewete Bahtera Kencana*
PT Equator Marindo	612.520.203	-	*PT Equator Marindo*
AS Makening	583.646.126	506.701.854	*AS Makening*
Fred Olsen Cruise Line	533.404.405	531.682.002	*Fred Olsen Cruise Line*
RCCL Ltd	519.389.811	-	*RCCL Ltd*
CV Anambas Expedisi	503.436.940	-	*CV Anambas Expedisi*
Muklis (Wicaksono)	-	1.313.797.593	*Muklis (Wicaksono)*
PT Jembatan Nusantara	-	959.144.919	*PT Jembatan Nusantara*
Limpo	-	913.757.497	*Limpo*
Silversea Cruises Ltd.	-	873.248.635	*Silversea Cruises Ltd.*
PT LMINDO	-	676.495.058	*PT LMINDO*
EMKL Sejahtera	-	659.231.266	*EMKL Sejahtera*
Yes	-	514.908.604	*Yes*
TLIPH Nulan Raya (Maulana)	-	511.487.140	*TLIPH Nulan Raya (Maulana)*
Lainnya (dibawah Rp500 juta)	36.716.056.148	41.725.673.749	*Others (below Rp500 Million)*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Saldo dipindahkan	**63.592.289.314**	**58.286.506.997**	***Carried forward balance***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan) / ***7. ACCOUNTS RECEIVABLE*** *(continued)*

a. Berdasarkan pelanggan (continued) / ***a. Based on the customer*** *(continued)*

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Saldo pindahan	**63.592.289.314**	**58.286.506.997**	***Brought forward balance***
Dikurangi:			*Less:*
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(4.727.279.135)	(8.199.684.373)	*Provision for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**58.865.010.180**	**50.086.822.624**	***Sub Total***
Jumlah	**204.786.564.118**	**272.795.406.111**	***Total***

b. Berdasarkan jenis usaha / ***b. Based of type business***

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Entitas Induk:			*Parent Entity:*
Perkapalan	109.031.501.563	219.370.807.504	*Shipping*
Perhotelan	158.550.200	4.791.022.047	*Hospitality*
Perbengkelan	11.965.827.910	10.280.059.227	*Workshop*
Usaha Lainnya	13.202.284.253	464.959.810	*Others*
	134.358.163.926	234.906.848.588	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(2.022.898.695)	(5.557.749.769)	*Provision for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**132.335.265.231**	**229.349.098.819**	***Sub Total***
Entitas Anak:			*Subsidiaries:*
PT Sarana Bandar Nasional	23.377.843.681	20.543.391.143	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	2.815.238.899	1.403.142.490	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	48.962.596.747	24.141.708.263	*PT Rumah Sakit Pelni*
	75.155.679.327	46.088.241.896	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(2.704.380.440)	(2.641.934.604)	*Provision for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**72.451.298.887**	**43.446.307.292**	***Sub Total***
Jumlah	**204.786.564.118**	**272.795.406.111**	***Total***

c. Berdasarkan analisa umur piutang / ***c. Based on Aging Analysis***

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Kurang dari 1 tahun	159.666.127.912	205.806.137.774	*Less than 1 year*
1 - 2 tahun	32.254.495.852	48.960.065.233	*1 - 2 Years*
2 - 3 tahun	5.351.214.252	16.457.481.526	*2 - 3 Years*
3 - 4 tahun	-	2.393.006.471	*3 - 4 Years*
4 - 5 tahun	12.242.005.236	5.416.590.038	*4 - 5 Years*
Di atas 5 tahun	-	1.961.809.442	*Di atas 5 tahun*
	209.513.843.252	280.995.090.484	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi penurunan nilai	(4.727.279.135)	(8.199.684.373)	*Provision for Impairment Losses*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Jumlah	**204.786.564.118**	**272.795.406.111**	***Total***

7. PIUTANG USAHA (lanjutan)

7. ACCOUNTS RECEIVABLE *(continued)*

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai selama tahun 2017 dan 2016 sebagai berikut:

Movements of provision for impairment losses during 2017 and 2016 as follows:

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Saldo Awal	8.199.684.373	7.075.367.277	*Beginning Balance*
Provisi Tahun Berjalan	(3.472.405.239)	1.124.317.096	*Provision Current Year*
Saldo akhir	**4.727.279.135**	**8.199.684.373**	***Ending Balance***

Piutang Kememterian Perhubungan CQ. Kepala Biro Perencanaan merupakan piutang kepada Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan atas kekurangan kompensasi biaya *Public Service Obligation* (PSO) tahun 2016, pengakuan awal disajikan sebagai pendapatan yang masih harus diterima. Lihat Catatan 8.

Transportation Clearance CQ. Receivables The Head of Planning Bureau is a receivable to the Directorate General of Sea Transportation of the Ministry of Transportation on the lack of compensation for the Public Service Obligation (PSO) fee in 2016, initial recognition is presented as accrued income.See Note 8.

Terhadap piutang usaha yang berasal dari pihak-pihak berelasi, Perseroan tidak membentuk cadangan provisi atas penurunan nilai, karena manajemen berkeyakinan jumlah piutang tersebut dapat tertagih.

Toward accounts receivable from the related parties, the Company did not set up a reserve provision for impairment, as management believes the amount of such receivables are collectible.

Tidak terdapat piutang usaha yang dijadikan jaminan atas pinjaman Perseroan dan Entitas Anak pada tahun 2017 dan 2016.

No trade receivables are pledged as collateral for the loans of the Company and Subsidiaries in 2017 and 2016.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa provisi kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang

Based on a review at the end of the year, management believes that the provision for impairment losses is adequate to cover possible losses on uncollectible accounts.

Penjelasan pihak-pihak berelasi lihat Catatan 38.

Explanations of related parties refer to Notes 38.

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
a. Pendapatan Masih Harus Diterima	274.806.676.091	132.144.918.028	*Accrued Revenues*
b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	360.565.235.016	710.983.723.622	*Restricted Cash and Cash Equivalent*
c. Piutang Lain-lain	9.529.310.634	7.889.986.555	*Other Receivables*
d. Penempatan Jangka Pendek	5.000.000.000	5.000.000.000	*Short Term Investment*
Jumlah	**649.901.221.741**	**856.018.628.205**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS *(continued)*

a. Rincian Pendapatan Masih Harus Diterima

a. Detail of Accrued Revenues

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Public Service Obligation (PSO)	196.992.392.533	78.715.467.539	*Public Service Obligation (PSO)*
Pelayanan kesehatan	47.569.890.108	49.321.942.810	*Health Service*
Usaha Penunjang	30.197.946.150	2.039.054.942	*Supporting Business*
Lainnya	46.447.300	2.068.452.737	*Other*
Jumlah	**274.806.676.091**	**132.144.918.028**	***Total***

Pendapatan masih harus diterima Public Service Obligation (PSO) merupakan pendapatan PSO tahun berjalan yang belum terealisasi pencairan dananya sampai dengan akhir tahun berjalan sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) No. 999.07.1985120/2017 tanggal 30 Desember 2017 dan tahun 2016 merupakan kekurangan pendapatan PSO sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tahun 2013. Lihat Catatan 31.

Revenue Accrued Public Service Obligation (PSO) PSO is the income of the current year unrealized disbursement of funds until the end of the current year in accordance with the Budget Implementation List State General Treasurer (DIPA-BUN) (BABUN-BPP) No. 999.07.1.985120/2017 dated December 30, 2017 and 2016 is a revenue shortfalls PSO accordance with the Minister of Finance No. 173 / PMK.02 / 2013 in 2013. See Notes 31.

Pendapatan masih harus diterima pelayanan kesehatan merupakan tagihan/klaim pada Entitas Anak PT Rumah Sakit Pelni atas pasien Jaminan Kesehatan Nasional yang masih dalam proses

Revenues are still to be received health services is a bill / claim on Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni on the National Health Insurance patients are still in the process of verification.

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya

b. Restricted Cash and Cash Equivalent

Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya merupakan kas setara kas yang dicadangkan untuk tujuan tertentu seperti bank garansi, jaminan pelaksanaan dan sebagainya yang berjangka waktu 1 tahun atau kurang. Kas dan setara kas yang dibatasi penggunaannya terdiri dari:

Cash and cash equivalents Restricted cash equivalents represent cash reserved for specific purposes such as bank guarantees, performance bonds and so the term of 1 year or less. Cash and cash equivalents restricted as follows:

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Pihak berelasi			***Related parties***
Giro - Rupiah			*Deposit - Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	426.084.496	-	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	349.739.224	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
Sub Jumlah	**775.823.720**	-	***Sub Total***
Deposito - Rupiah			*Deposit - Rupiah*
PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	333.234.082.933	631.000.000.000	*PT Bank Mandiri (Persero), Tbk*
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	181.938.890	-	*PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk*
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	57.300.000	55.157.300.000	*PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk*
Sub Jumlah	**333.473.321.823**	**686.157.300.000**	***Sub Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan) / ***8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS*** *(continued)*

b. Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya (lanjutan) / ***b. Restricted Cash and Cash Equivalent*** *(continued)*

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Pihak ketiga			***Third parties***
Deposito - Rupiah			*Deposit - Rupiah*
PT Bank Syariah Mandiri	26.315.789.473	24.826.423.622	*PT Bank Syariah Mandiri*
PT Tirta Investama	300.000	-	*PT Tirta Investama*
Sub Jumlah	**26.316.089.473**	**24.826.423.622**	***Sub Total***
Jumlah	**360.565.235.016**	**710.983.723.622**	***Total***

Deposito PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., merupakan dana Penyertaan Modal Negara dan sejumlah Rp31.000.000.000 per 31 Desember 2017 dan Rp181.000.000.000 per 31 Desember 2016 digunakan sebagai jaminal *Letter of Credit* (LC) dan Bank Garansi.

Deposit of PT Bank Mandiri (Persero) Tbk is a State Capital Investment fund and a total of Rp31,000,000,000 as of December 31, 2017 and Rp181,000,000,000 as of December 31, 2016 is used as collateral for Letter of Credit (LC) and Bank Guarantee.

c. Piutang Lain-Lain / ***c. Other Receivables***

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Pihak Berelasi:			*Related Parties:*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	1.530.400.369	1.339.152.407	*Pelni Pensioners Health Foundation*
Pegawai	1.502.513.129	2.544.398.404	*Employee*
Sub Jumlah	**3.032.913.498**	**3.883.550.811**	***Sub Total***
Pihak Ketiga:			*Third Parties:*
PT Asuransi Purna Arthanugraha	695.160.913	697.527.913	*PT Asuransi Purna Arthanugraha*
Uang Jaminan	-	2.084.082.933	*Deposit*
Lainnya	5.975.696.698	1.447.376.819	*Others*
	6.670.857.611	4.228.987.665	
Dikurangi:			*Less:*
Provisi Kerugian Penurunan Nilai	(174.460.475)	(222.551.921)	*Provision for Impairment Losses*
Sub Jumlah	**6.496.397.136**	**4.006.435.744**	***Sub Total***
Jumlah	**9.529.310.634**	**7.889.986.555**	***Total***

Mutasi provisi kerugian penurunan nilai tahun 2017 dan 2016, sebagai berikut:

Movements of allowance for impairment losses of 2017 and 2016, as follows:

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Saldo Awal	222.551.921	202.093.926	*Beginning Balance*
Pemulihan Tahun Berjalan	(48.091.446)	-	*Recovery of Current Year*
Provisi Tahun Berjalan	-	20.457.995	*Provision of Current Year*
Saldo akhir	**174.460.475**	**222.551.921**	***Ending Balance***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

8. ASET KEUANGAN LANCAR LAINNYA (lanjutan)

c. Piutang Lain-Lain (lanjutan)

Piutang lain-lain kepada PT Asuransi Purna Arthanugraha (Aspan) merupakan klaim asuransi kapal KM. FUDI sesuai dengan Berita Acara No. 477/DIRUT/UM/XII/2011 tanggal 22 Desember 2011, sebesar USD 51,170.58 dan Rp1.901.895 sampai dengan 31 Desember 2017.

Berdasarkan hasil penelaahan pada akhir tahun, Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan kerugian penurunan nilai telah memadai untuk menutup kemungkinan kerugian atas tidak tertagihnya piutang lain-lain.

d. Penempatan Jangka Pendek

Merupakan deposito berjangka waktu lebih dari 3 (tiga) bulan namun tidak lebih dari dua belas bulan pada PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk oleh Entitas Anak PT Sarana Bandar Nasional sebesar Rp5.000.000.000, pada tanggal 31 Desember 2017

Tingkat bunga per tahun deposito Rupiah sebesar 8,25% pada tahun 2017 dan 2016.

8. OTHER CURRENT FINANCIAL ASSETS *(continued)*

c. Other Receivables *(continued)*

Another explanation lay-kepada PT Asuransi Full Arthanugraha (Aspan) is an Insurance Claim Ship KM. FUDI accordance WITH Minutes No. 477 / Managing Director / UM / XII / 2011 Date of December 22, 2011, amounting to USD 1,661,437.95 As of December 31, 2017.

Based on a review at the end of the year, management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses on other receivables uncollectible.

c. Short Term Investment

Is a time deposit of more than 3 (three) months but not more than twelve months in PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk by Subsidiaries of PT Sarana Bandar Nasional amounting to Rp5,000,000,000, as of December 31, 2017 and 2016.

Interest rate per year rupiah deposits by 8,25% in 2017and 2016.

9. PERSEDIAAN / ***9. INVENTORY***

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Suku cadang	374.681.043.927	389.808.153.421	*Spareparts*
Pelumas	25.612.037.475	22.354.869.249	*Lubricants*
Bahan bakar	48.814.658.270	31.429.397.419	*Fuel*
Makanan	4.441.721.936	3.688.457.412	*Food*
Tiket Penumpang	5.301.143.040	5.068.651.792	*Passenger Ticket*
Lainnya	423.943.683	996.029.513	*Others*
Sub Jumlah	**459.274.548.331**	**453.345.558.806**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	6.929.688.674	3.108.640.797	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Rumah Sakit Pelni	6.873.544.256	6.473.781.795	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**13.803.232.931**	**9.582.422.592**	***Sub Total***
Jumlah	**473.077.781.262**	**462.927.981.398**	***Total***

Persediaan obat-obatan pada entitas anak PT Rumah sakit Pelni sebesar Rp5.597.000.000 digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. Lihat Catatan 23.

Supplies of medicines in the subsidiary PT Rumah Sakit Pelni Rp5.597.000.000 used as collateral for credit facilities obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk. See Note 23.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

9. PERSEDIAAN (lanjutan)

Persediaan tidak diasuransikan terhadap risiko kebakaran, *burglary* dan resiko lainnya. Manajemen berkeyakinan bahwa persediaan Perseroan terletak pada beberapa lokasi, sehingga kemungkinan timbulnya kerugian dalam waktu yang bersamaan untuk beberapa lokasi adalah sangat kecil.

Manajemen berkeyakinan bahwa nilai tercatat dari persediaan tidak melebihi nilai pengganti atau nilai pemulihan aset dan tidak terdapat persediaan usang pada komponen aset lancar.

Persediaan usang telah dilakukan reklasifikasi kedalam aset tidak lancar lainnya dan telah dilakukan penurunan nilai persediaan.

9. INVENTORY *(continued)*

Inventories are not insured against fire, burglary and other risks. Management believes that, the company's inventory is located in several locations, so the possibility of a loss in the same time to multiple locations is very small.

Management believes that the carrying value of inventories does not exceed replacement or recovery value of assets and there are no obsolete inventories in current assets component.

Inventory obsolescence the reclassification into other non-current assets and has conducted impairment of inventories.

10. PERPAJAKAN

10. TAXATION

a. Pajak Dibayar Dimuka

a. Prepaid Taxes

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.620.497.379	3.620.497.379	*Income Tax Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 28A	6.223.141.753	4.705.618.682	*Income Tax Article 28A*
Pajak Lainnya	5.463.496.406	-	*Other Taxes*
Sub Jumlah	**15.307.135.538**	**8.326.116.061**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Pajak Penghasilan Pasal 22	-	807.473.456	*Income Tax Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	554.203.876	2.464.866.577	*Income Tax Article 23*
Pajak Pertambahan Nilai	15.757.861.624	10.553.246.849	*Value-Added Tax*
Pajak Lainnya	1.637.702.792	-	*Other Taxes*
Sub Jumlah	**17.949.768.292**	**13.825.586.882**	***Sub Total***
Jumlah	**33.256.903.830**	**22.151.702.943**	***Total***

b. Utang Pajak

b. Tax Payable

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pajak Pertambahan Nilai	14.972.882.583	12.701.813.444	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 15	7.951.953.686	9.430.906.644	*Tax Income Article 15*
Pajak Penghasilan Pasal 21	7.680.786.129	3.225.264.156	*Tac Income Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 22	2.152.051.789	934.041.325	*Tax Income Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	1.116.482.875	646.975.773	*Tax Incime Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 26	7.374.080	-	*Tax Incime Article 26*
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	166.180.513	121.148.496	*Tax Income Article 4 Paragraph 2*
Pajak Daerah	41.332.141	53.403.421	*Local Tax*
Pajak Lainnya	6.817.879.798	-	*Other Taxes*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sub Total	**40.906.923.594**	**27.113.553.259**	***Sub Total***

10. PERPAJAKAN (lanjutan) / ***10. TAXATION*** *(continued)*

b. Utang Pajak (lanjutan) / ***b. Tax Payable*** *(continued)*

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Pajak Penghasilan Pasal 29	12.788.440.878	16.706.538.506	*Tax Income Article 29*
Pajak Pertambahan Nilai	5.665.137.777	6.209.206.926	*Value Added Tax*
Pajak Penghasilan Pasal 21	3.838.522.154	1.464.804.717	*Tac Income Article 21*
Pajak Penghasilan Pasal 23	247.956.133	94.848.718	*Tax Incime Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 4 Ayat 2	15.585.163	12.501.200	*Tax Income Article 4 Paragraph 2*
Pajak Lainnya	8.010.159	-	*Other Tax*
Sub Total	**22.563.652.265**	**24.487.900.067**	***Sub Total***
Jumlah	**63.470.575.859**	**51.601.453.326**	***Total***

c. Beban (Manfaat) Pajak / ***c. Tax Expense (Benefit)***

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Entitas Induk:			***Parenth Entity:***
Beban Pajak Kini	3.767.159.308	5.772.914.173	*Current Tax Expense*
Beban Pajak Final	43.285.023.252	42.863.499.798	*Final Tax Expense*
Beban (Manfaat) Tangguhan	(5.476.277.129)	(12.232.460.270)	*Tax Expense (Benefits)*
Sub Jumlah	**41.575.905.431**	**36.403.953.701**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
Beban Pajak Kini	38.008.112.380	28.679.915.893	*Current Tax Expense*
Beban Pajak Final	371.188.906	-	*Final Tax Expense*
Beban (Manfaat) Tangguhan	490.215.252	3.364.111.056	*Tax Expense (Benefits)*
Sub Jumlah	**38.869.516.539**	**32.044.026.949**	***Sub Total***
Jumlah	**80.445.421.970**	**68.447.980.650**	***Total***

d. Rekonsiliasi Fiskal / ***d. Fiscal Recontiliation***

	2017	**2016**	
Laba sebelum pajak penghasilan Entitas Induk	317.994.939.757	253.916.781.486	*Profit before income tax of the parent entity*
Perbedaan temporer:			***Temporary Differrences:***
Penyisihan piutang usaha	(3.490.944.269)	38.373.465.015	*Receivable Allowance*
Liabilitas imbalan pasca kerja	17.459.992.274	8.896.669.154	*Employee Benefits Liability*
Penyusutan aset tetap	7.936.060.511	1.659.706.906	*Fixed Assets Depreciation*
Jumlah	**21.905.108.516**	**48.929.841.075**	***Total***
Perbedaan permanen:			***Permanent Differences:***
Beban pemasaran	2.791.637.332	1.098.938.369	*Marketing expenses*
PPh 21 ditanggung Entitas	16.251.620.000	12.684.194.941	*Income tax art 21 by entity*
Pendapatan di luar usaha lainnya	(118.050.368.818)	(96.751.222.819)	*Other revenues*
Jumlah	**(99.007.111.486)**	**(82.968.089.509)**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan) | ***10. TAXATION*** *(continued)*

d. Rekonsiliasi Fiskal (lanjutan) | ***d. Fiscal Recontiliation*** *(continued)*

	2017	2016	
Beban (pendapatan) terkait yang telah dikenakan Pajak			***Related expenses (income) that have been charged Final Tax:***
PPh final Usaha perkapalan	(1.224.230.973.065)	(1.481.345.789.960)	*Income Tax Shipping Businessess*
Penghasilan PSO (Public Service Obligation)	(2.461.783.255.474)	(2.065.598.008.644)	*Public Service Obligation Income*
Usaha sampingan	(9.843.290.638)	(30.775.056.503)	*Other Income*
Pendapatan deposito, jasa giro dan dividen	(44.319.214.292)	(32.040.360.368)	*Revenues deposits, demand deposits and dividends*
Beban usaha perkapalan	3.268.421.413.107	3.106.804.637.220	*Shipping Businessess Expenses*
Beban overhead	116.911.910.175	284.498.027.835	*Overhead Expenses*
Beban diluar usaha - PPh final atas pendapatan deposito, jasa giro, dividen dan aset tetap penjualan	129.019.109.673	21.669.674.059	*Expenses outside the business final income tax on income on deposits, current accounts, dividends and fixed asset sales*
Jumlah	**(225.824.300.514)**	**(196.786.876.361)**	***Total***
Penghasilan Kena Pajak	**15.068.636.273**	**23.091.656.691**	***Taxable Income***
Pajak Penghasilan Badan Terutang	**3.767.159.068**	**5.772.914.173**	***Corporate Income Tax Payable***
Kredit Pajak:			*Tax Deduction:*
Pajak Penghasilan Pasal 22	3.360.085.671	3.296.193.067	*Income Tax Article 22*
Pajak Penghasilan Pasal 23	72.251.731	1.107.200	*Income Tax Article 23*
Pajak Penghasilan Pasal 25	6.557.963.419	7.181.232.588	*Income Tax Article 25*
Jumlah	**9.990.300.821**	**10.478.532.855**	***Total***
Pajak Penghasilan Badan Lebih Bayar	**6.223.141.753**	**4.705.618.682**	***Corporate Income Tax Over Payment***
Beban Pajak Penghasilan Kini:			***Current Income Tax Expense:***
Entitas Induk	**3.767.159.068**	**5.772.914.173**	***Parent Entity***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	15.721.503.500	11.675.978.785	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	11.826.923.500	8.286.237.491	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	10.459.685.380	8.717.699.617	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**38.008.112.380**	**28.679.915.893**	***Sub Total***
Jumlah	**41.775.271.449**	**34.452.830.066**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

10. PERPAJAKAN (lanjutan)

10. TAXATION *(continued)*

e. PajakTangguhan

e. Deferred Tax

	2017			
	Aset (Liabilitas) Pajak *Deferred Tax Assets* Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi) / *Charged to Profit (Loss)* *)**	**Aset (Liabilitas) Pajak *Deferred Tax Assets* Saldo Akhir / *Ending Balance***	
Entitas Induk:				***Parent Entity:***
Provisi Penurunan Nilai Piutang	22.706.816.296	(872.736.067)	21.834.080.229	*Provision of Impairment of Receivables*
Penyusutan Aset Tetap	3.857.223.733	1.984.015.128	5.841.238.861	*Depreciation of Fixed Assets*
Liabilitas Imbalan Kerja	6.247.994.952	4.364.998.069	10.612.993.021	*Liability for Employee Benefits*
Sub Jumlah	**32.812.034.981**	**5.476.277.129**	**38.288.312.110**	***Sub Total***
Entitas Anak:	13.285.119.870	(381.364.298)	12.903.755.572	**Subsidiary:**
Sub Jumlah	**13.285.119.870**	**(381.364.298)**	**12.903.755.572**	***Sub Total***
Jumlah	**46.097.154.851**	**5.094.912.831**	**51.192.067.682**	***Total***

	2016			
	Aset (Liabilitas) Pajak *Deferred Tax Assets* Saldo Awal / *Beginning Balance*	**Dibebankan ke Laba (Rugi) / *Charged to Profit (Loss)* *)**	**Aset (Liabilitas) Pajak *Deferred Tax Assets* Saldo Akhir / *Ending Balance***	
Entitas Induk:				**Parent Entity:**
Penyisihan piutang	13.113.450.041	9.593.366.255	22.706.816.296	*Receivable Allowance*
Penyusutan Aset Tetap	1.633.056.444	2.224.167.289	3.857.223.733	*Depreciation of Fixed Assets*
Liabilitas Imbalan Kerja	5.833.068.226	414.926.726	6.247.994.952	*Liability for Employee Benefits*
Sub Jumlah	**20.579.574.711**	**12.232.460.270**	**32.812.034.981**	***Sub Total***
Entitas Anak:	16.578.130.593	(3.294.921.223)	13.285.119.870	***Subsidiaries:***
Sub Jumlah	**16.578.130.593**	**(3.294.921.223)**	**13.285.119.870**	***Sub Total***
Jumlah	**37.157.705.304**	**8.937.539.047**	**46.097.154.851**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

11. UANG MUKA

Merupakan pengeluaran yang diberikan kepada pihak ketiga dan dana operasional SBU dan Cabang berkenaan dengan aktivitas usaha atau non usaha.

11. ADVANCES PAYMENT

Represents expenditures granted to third parties and SBU and Branch operational funds in respect of business or non-business activities.

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Perkapalan	21.216.443.699	13.626.903.133	*Shipping*
Keagenan	6.617.213.527	2.205.283.837	*Agency*
Administrasi dan umum	6.982.007.397	2.648.750.370	*General and Administrative*
Usaha Galangan	224.912.388	932.666.788	*Enterprises Shipyard*
Pengadaan aset tetap	-	2.285.621.625	*Procurement of Fixed Asset*
Lainnya	42.231.800	52.807.198	*Other*
Sub Jumlah	**35.082.808.811**	**21.752.032.951**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	3.429.886.837	1.226.032.528	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	2.341.528.872	1.377.931.153	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	2.057.951.465	1.087.022.687	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**7.829.367.174**	**3.690.986.368**	***Sub Total***
Jumlah	**42.912.175.985**	**25.443.019.319**	***Total***

12. BIAYA DIBAYAR DIMUKA

12. PREPAID EXPENSES

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Administrasi dan umum	15.388.657.810	11.807.750.474	*General and Administrative*
Sewa	423.343.158	521.204.979	*Rent*
Usaha Perkapalan	25.557.663	574.759.927	*Shipping*
Asuransi	788.105	8.990.659	*Insurance*
Lainnya	116.339.500	198.905.106	*Other*
Sub Jumlah	**15.954.686.236**	**13.111.611.145**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	6.528.106.509	4.502.438.065	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Rumah Sakit Pelni	249.686.984	5.708.557	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**6.777.793.493**	**4.508.146.622**	***Sub Total***
Jumlah	**22.732.479.729**	**17.619.757.767**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. PROPERTI INVESTASI / *13. INVESTMENT PROPERTY*

	2017				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	3.094.049.600	-	-	-	3.094.049.600
Gedung/*Building*	40.848.201.737	129.000.000	-	-	40.977.201.737
Sub Jumlah	**43.942.251.337**	**129.000.000**	**-**	**-**	**44.071.251.337**
Akumulasi Penyusutan/ *Depreciation Accumulated*					
Gedung/*Building*	20.960.976.697	1.021.990.870	-	-	21.982.967.567
Sub Jumlah	**20.960.976.697**	**1.021.990.870**	**-**	**-**	**21.982.967.567**
Nilai Buku	**22.981.274.640**				**22.088.283.770**

	2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Tanah/*Land*	3.094.049.600	-	-	-	3.094.049.600
Gedung/*Building*	40.663.489.747	184.711.990	-	-	40.848.201.737
Sub Jumlah	**43.757.539.347**	**184.711.990**	**-**	**-**	**43.942.251.337**
Akumulasi Penyusutan/ *Depreciation Accumulated*					
Gedung/*Building*	19.794.417.172	1.166.559.525	-	-	20.960.976.697
Sub Jumlah	**19.794.417.172**	**1.166.559.525**	**-**	**-**	**20.960.976.697**
Nilai Buku	**23.963.122.175**				**22.981.274.640**

Tanah dan gedung yang disewakan oleh Entitas terletak di Kemayoran, Medan dan Makassar. Entitas juga menyewakan sebagian gedungnya di beberapa cabang yang terletak di Kantor Pusat, Surabaya, Tanjung Priok, Bali, Ampenan, Pontianak, Bitung, Jayapura, Makassar, Manokwari, Ende, Semarang dan Sorong. Entitas juga menyewakan sebagian tanahnya yang terletak di cabang Balikpapan. Tanah dan gedung yang diakui sebagai properti investasi dihitung dengan berdasarkan perkiraan luas tanah dan gedung yang disewakan kepada pihak ketiga.

Land and buildings leased by Entities located in Kemayoran, Medan and Makassar. Entities also rented part of the building in a few branches located in the Central Office, Surabaya, Tanjung Priok, Bali, Ampenan, Pontianak, Bitung, Jayapura, Makassar, Manokwari, Ende, Semarang and Sorong. Entities also rents some land located in Balikpapan branch. Land and buildings recognized as investment property calculated based on the estimated area of land and buildings are leased to third parties.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

13. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)

Tidak terdapat properti investasi Grup yang dijadikan jaminan terhadap pinjaman/kewajiban lainnya dan properti investasi berupa gedung tidak diasuransikan.

Berdasarkan hasil evaluasi Grup, mengenai nilai yang dapat diperoleh kembali pada tanggal 31 Desember 2017, Grup berkeyakinan bahwa tidak terdapat perubahan keadaan yang mengindikasikan adanya penurunan nilai properti investasi.

13. INVESTMENT PROPERTY *(continued)*

There are no Group investment properties that are pledged as collateral to other loans / liabilities and investment properties in the form of uninsured buildings.

Based on evaluation of the Grup's regarding the recoverable value on December 31, 2017, the Grup's believes that there are changes in circumstances indicate impairment of investment property.

14. ALAT PRODUKSI

14. PRODUCTION EQUIPMENT

	2017				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Armada Kapal/Fleet	7.316.831.712.215	39.678.936.577	-	444.937.814.552	7.801.448.463.344
Perlengkapan Armada/ *Equipment Fleet*	465.441.125.261	167.707.924.129	-	(420.551.558.946)	212.597.490.444
Sub Jumlah	**7.782.272.837.476**	**207.386.860.706**	**-**	**24.386.255.606**	**8.014.045.953.788**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ *Accumulated Depreciation and Impairment*					
Armada Kapal/Fleet	4.332.583.706.343	282.767.281.192	-	203.937.338.823	4.819.288.326.358
Perlengkapan Armada/ *Equipment Fleet*	220.985.618.369	5.010.048.981	-	(186.135.355.567)	39.860.311.783
Sub Jumlah/*Sub Total*	**4.553.569.324.712**	**287.777.330.173**	**-**	**17.801.983.256**	**4.859.148.638.141**
Nilai Buku/Book Value	**3.228.703.512.764**				**3.154.897.315.647**
Aset Dalam Penyelesaian/ *Assets Under Construction*	-	50.277.940.404	-	-	50.277.940.404
Jumlah/*Total*	**3.228.703.512.764**				**3.205.175.256.051**

	2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Armada Kapal/Fleet	7.316.831.712.215	-	-	-	7.316.831.712.215
Perlengkapan Armada/ *Equipment Fleet*	420.961.528.094	110.202.703.121	-	(65.723.105.954)	465.441.125.261

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sub Jumlah/ Sub Total	**7.737.793.240.309**	**110.202.703.121**	**-**	**(65.723.105.954)**	**7.782.272.837.476**

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan) / ***14. PRODUCTION EQUIPMENT*** *(continued)*

	2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ *Accumulated Depreciation and Impairment*					
Armada Kapal/Fleet	4.114.213.535.044	229.279.359.667	(10.909.188.368)	-	4.332.583.706.343
Perlengkapan Armada/ *Equipment Fleet*	192.230.707.661	94.478.016.662	(65.723.105.954)	-	220.985.618.369
Sub Jumlah/*Sub Total*	**4.306.444.242.705**	**323.757.376.329**	**(76.632.294.322)**	**-**	**4.553.569.324.712**
Nilai Buku/Book Value	**3.431.348.997.604**				**3.228.703.512.764**

Pada tahun berjalan, Grup melakukan penilaian 2 (dua) unit kapal penumpang dan tanah serta bangunan kantor yang berlokasi di Jalan Jenderal Sudirman No. 14, Kelurahan Mangkura, Kecamatan Ujung Pandang, Kotamadya Ujung Pandang, Propinsi Sulawesi Selatan dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai nilai wajar untuk kepentingan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 48. Pendekatan penilaian yang digunakan adalah menggunakan Pendekatan Pasar untuk aset kapal penumpang dan Pendekatan Biaya untuk aset tanah dan bangunan pada tanggal 31 Desember 2017. Penilaian dilakukan oleh penilai independen sesuai dengan Laporannya No. 061/SKR/II/2018 tanggal 23 Februari 2018. Berikut hasil nilai wajar dari aset yang dinilai:

In the current year, the Group assessed 2 (two) units of passenger vessels and land and office buildings located at Jalan Jenderal Sudirman no. 14, Mangkura Village, Ujung Pandang District, Ujung Pandang Municipality, South Sulawesi Province with the intent and objective to provide an objective opinion on the fair value for financial reporting purposes in accordance with PSAK 16 and PSAK 48. The valuation approach used is to use the Market Approach for assets passenger vessels and the Cost Approach for land and building assets as of December 31, 2017. The appraisal is performed by an independent appraiser pursuant to its Report no. 061 / SKR / II / 2018 dated February 23, 2018. Here are the fair value of assessed assets:

No./ *Number*	**Nama Aset Tetap/ *Fixed Assets Name***	**Tipe/*Type* dan Luas/*Wide***	**Nilai Buku/ *Book Value (Rp)***	**Nilai Wajar/ *Fair Value (Rp)***	**Simpulan/ *Conclusion***
1.	KM. Bukit Siguntang	2000 Pax	57.225.262.760	108.437.100.000	Tidak terindikasi mengalami penurunan nilai
2.	KM. Lambelu	2000 Pax	65.364.044.731	108.437.100.000	
3.	Tanah dan Bangunan	1.724 M2	1.238.660.947	65.772.575.000	

Pada tahun buku 2016, Grup melakukan penilaian properti berupa 2 (dua) tanah dan bangunan gedung serta 8 (delapan) armada untuk memberikan pendapat yang objektif mengenai nilai wajar dan sisa umur manfaat dari aset tersebut, per tanggal 31 Desember 2016. Penilaian ini dilakukan oleh Kantor Jasa Penilai Publik yang digunakan untuk kepentingan pelaporan keuangan Sesuai PSAK 16 dan PSAK 68. Berikut aset yang dilakukan penilaian:

In the year 2016, the Grup's has assessed the property in the form of two (2) land and buildings to provide an objective opinion on the fair value and remaining useful life of the assets, as of December 31, 2016. The assessment was performed by the Office of Public Appraisal Service applied for the purposes of financial reporting in accordance with IAS 16 and IAS 68.The following assets are assessed:

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan) ***14. PRODUCTION EQUIPMENT*** *(continued)*

No. /Number	No. Laporan / *No. Report*	Tanggal Laporan / *Reporting date*	Keterangan / *Information*	Definisi Nilai / *Definition of value*	Nilai / Value *(Rp)*
(1)	016/LP/II/2017	14 Februari 2017	KFC. Jet Liner	Nilai Wajar/*Fair value*	109.201.538.727
(2)	017/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Labobar	Nilai Wajar/*Fair value*	455.680.060.890
(3)	018/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Gunung Dempo	Nilai Wajar/*Fair value*	713.140.500.924
(4)	019LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	Nilai Wajar/*Fair value*	5.897.112.276
(5)	020/LP/II/2017	14 Februari 2017	KFC. Jet Liner	Nilai Residu/ *Residual value*	18.210.319.343
(6)	021/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Labobar	Nilai Residu/ *Residual value*	50.233.464.243
(7)	022/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Gunung Dempo	Nilai Residu/ *Residual value*	44.775.299.002
(8)	023/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Sinabung	Nilai Residu/ *Residual value*	57.406.675.018
(9)	024/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Kelud	Nilai Residu/ *Residual value*	56.385.588.227
(10)	025/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Dorolonda	Nilai Residu/ *Residual value*	51.119.679.893
(11)	026/LP/II/2017	14 Februari 2017	KM. Nggapulu	Nilai Residu/ *Residual value*	53.120.810.988
(12)	027/LP/II/2017	14 Februari 2017	Gedung Gajah mada	Nilai Wajar/ *Fair value*	433.568.800.000
(13)	028/LP/II/2017	14 Februari 2017	Gedung Kemayoran	Nilai Wajar/ *Fair value*	219.940.600.000

Atas hasil tersebut, tidak mengakibatkan penyajian kembali atas nilai aset tetap.

On these results, when compared with the book value of each asset is assessed, will be summed up as follows:

No.	Nama Properti / *Property name*	Nilai Buku / *Book Value*	Nilai Wajar / *Fair Value*	Selisih / *Difference*
(1)	KFC. Jet Liner	107.997.913.528	109.201.538.727	-
(2)	KM. Labobar	452.928.495.667	455.680.060.890	-
(3)	KM. Gunung Dempo	712.162.029.642	713.140.500.924	-
(4)	KM. Caraka Jaya Niaga III-4	-	5.897.112.276	-
(5)	KM. Sinabung	250.175.938.573	250.175.938.573	-
(6)	KM. Kelud	231.191.409.929	231.191.409.929	-
(7)	KM. Dorolonda	296.199.154.208	296.199.154.208	-
(8)	KM. Nggapulu	341.104.694.142	341.104.694.142	-
(9)	Gedung Gajah mada	23.680.981.511	433.568.800.000	-
(10)	Gedung Kemayoran	11.724.725.246	219.940.600.000	-

Berdasaran laporan KJPP bahwa umur ekonomis kapal diperkirakan selama 30 tahun dengan mengacu pada umur ekonomis hasil kajian dari *Clarkson Research Service*, dan dapat dinyatakan bahwa rata-rata nilai sisa

Based on the report KJPP that the estimated economic life of the ship for 30 years with reference to the economic life results from Clarkson Research Service, and can be stated that the average value of the rest of

kapal berkisar 5% dari nilai barunya atau biaya reproduksi barunya.

the ship about 5% of the value of new or reproduction cost new.

14. ALAT PRODUKSI (lanjutan)

14. PRODUCTION EQUIPMENT *(continued)*

Atas dasar penilaian KJPP tersebut, Manajemen melakukan penyesuaian atas nilai residu per 31 Desember 2016 untuk 7 tujuh) armada kapal, dengan total nilai sebesar Rp10.909.188.368.

On the basis of the KJPP assessment, management adjusted the residual values per December 31, 2016 for 7 seven) fleet, with a total value of Rp10.909.188.368.

Alat produksi Entitas Induk berupa armada kapal diasuransikan pada PT Asuransi Jasindo dan Grup berkeyakinan bahwa nilai pertanggungan cukup memadai untuk menutupi kemungkinan timbulnya kerugian terhadap aset yang dipertanggungkan. Lihat Catatan 32.

Parent Entity of fixed assets in the form of a fleet of ships insured with PT Asuransi Jasindo and management believes that there is no indication of a significant decline in the value of assets.The Grup's believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the assets insured. See Note 32.

Tidak terdapat alat produksi yang digunakan sebagai jaminan atas kewajiban/pinjaman Grup.

There are no production equipment used as collateral for Group liabilities.

15. ASET TETAP

15. FIXED ASSETS

	2017				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Tanah/*Land*	23.387.815.055	982.583.539	-	-	24.370.398.594
Gedung/*Building*	264.438.673.391	9.372.515.341	-	784.238.501	274.595.427.232
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	32.150.324.359	28.877.742.424	-	85.692.831.660	146.720.898.443
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	114.012.377.740	6.887.162.616		116.242.485.080	237.142.025.437
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	248.782.826.358	692.751.900	-	(226.970.479.330)	22.505.098.928
Sub Jumlah/*Sub Total*	**682.772.016.903**	**46.812.755.819**	**-**	**(24.250.924.089)**	**705.333.848.634**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	9.486.888.686	4.292.240.000	-	-	13.779.128.686
Sub Jumlah/*Sub Total*	**9.486.888.686**	**4.292.240.000**	**-**	**-**	**13.779.128.686**
Jumlah/*Total*	**692.258.905.589**	**51.104.995.819**	**-**	**(24.250.924.089)**	**719.112.977.320**
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ *Accumulated Depreciation and Impairment*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Gedung/*Building*	85.041.790.759	7.459.436.316	(121.659.974)	47.343.962	92.426.911.063
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	27.363.821.129	24.811.813.205	-	30.898.151.752	83.073.786.085

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Saldo dipindahkan/ *Carried forward balance*	**112.405.611.888**	**32.271.249.520**	**(121.659.974)**	**30.945.495.713**	**175.500.697.148**

15. ASET TETAP (lanjutan) ***15. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2017				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Saldo pindahan/ *Brought forward balance*	**112.405.611.888**	**32.271.249.520**	**(121.659.974)**	**30.945.495.713**	**175.500.697.148**
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	91.958.272.344	5.407.291.688	-	68.676.178.487	166.041.742.520
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	136.037.279.526	2.941.558.600	-	(119.623.188.202)	19.355.649.924
Sub Jumlah/*Sub Total*	**340.401.163.758**	**40.620.099.808**	**(121.659.974)**	**(20.001.514.001)**	**360.898.089.591**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	2.816.183.170	2.160.248.340	-	-	4.976.431.510
Sub Jumlah/*Sub Total*	**2.816.183.170**	**2.160.248.340**	**-**	**-**	**4.976.431.510**
Jumlah/*Total*	**343.217.346.928**	**42.780.348.148**	**(121.659.974)**	**(20.001.514.001)**	**365.874.521.101**
Nilai Buku/*Book Value*	**349.041.558.661**				**353.238.456.219**
Aset Dalam Penyelesaian/ *Assets Under Construction*	6.182.913.958	11.848.726.371	-	(6.015.771.458)	12.015.868.871
Jumlah/*Total*	**355.224.472.619**				**365.254.325.090**

	2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Tanah/*Land*	21.053.460.055	2.345.432.097	-	(11.077.097)	23.387.815.055
Gedung/*Building*	244.110.624.445	20.678.423.808	-	(350.374.862)	264.438.673.391
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	32.202.622.524	836.885.635	-	(889.183.800)	32.150.324.359
Inventaris Kantor/ *Office Inventory*	130.099.136.388	4.905.572.447	-	(20.992.331.094)	114.012.377.740
Alat Produksi Lainnya/ *Other Tools*	219.533.660.667	32.582.586.213	-	(3.333.420.522)	248.782.826.358
Sub Jumlah/*Sub Total*	**646.999.504.079**	**61.348.900.200**	**-**	**(25.576.387.375)**	**682.772.016.903**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan Bermotor *Vehicle*	8.983.408.686	503.480.000	-	-	9.486.888.686
Sub Jumlah/*Sub Total*	**8.983.408.686**	**503.480.000**	**-**	**-**	**9.486.888.686**
Jumlah/*Total*	**655.982.912.765**	**61.852.380.200**	**-**	**(25.576.387.375)**	**692.258.905.589**

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

15. ASET TETAP (lanjutan) ***15. FIXED ASSETS*** *(continued)*

	2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai/ *Accumulated Depreciation and Impairment*					
Perolehan Langsung/ *Direct Acquisition*					
Gedung/*Building*	78.284.809.947	7.238.369.641	(207.803.312)	(273.585.517)	85.041.790.759
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	23.988.331.102	4.348.415.927	-	(972.925.900)	27.363.821.129
Inventaris Kantor/ *Equipment*	107.022.997.232	5.905.980.373	(390.787)	(20.970.314.473)	91.958.272.344
Alat Produksi Lainnya *Other Tools*	117.651.959.429	21.613.740.619		(3.228.420.522)	136.037.279.526
Sub Jumlah/*Sub Total*	**326.948.097.710**	**39.106.506.560**	**(208.194.100)**	**(25.445.246.412)**	**340.401.163.758**
Sewa Pembiayaan/ *Leasing Financing*					
Kendaraan Bermotor/ *Vehicle*	1.011.108.146	1.805.075.024	-	-	2.816.183.170
Sub Jumlah/*Sub Total*	**1.011.108.146**	**1.805.075.024**	**-**	**-**	**2.816.183.170**
Jumlah/*Total*	**327.959.205.856**	**40.911.581.584**	**(208.194.100)**	**(25.445.246.412)**	**343.217.346.928**
Nilai Buku/*Book Value*	**328.023.706.909**				**349.041.558.661**
Aset Dalam Penyelesaian/ *Assets Under Construction*	5.528.690.778	3.946.654.247	-	3.292.431.067	6.182.913.958
Jumlah/*Total*	**333.552.397.687**				**355.224.472.619**

Tanah dan bangunan milik Entitas dengan HGB No. 1864 yang terletak di Jakarta Pusat digunakan sebagai jaminan atas pinjaman jangka pendek kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Land and buildings owned entity with HGB No. 1864 is located in central Jakarta used as collateral for short-term loans to PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Peralatan kesehatan berupa 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm dan 1 unit Brivo MR 355 Inspire 1,5T dijaminkan atas fasilitas pinjaman kredit yang diperoleh dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dengan nilai masing-masing sebesar Rp8.143.905.000 dan Rp12.439.680.000. Lihat Catatan 23.

The health care equipment as 1 unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & BRIVO OEC C-Arm Essential 785 and 1 355 units BRIVO MR Inspire 1,5T pledged against the loan facility obtained from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk , with the value of each of Rp8.143.905.000 and Rp12.439.680.000. See Note 23.

Grup telah melakukan penilaian terhadap aset tetap berupa tanah dan bangunan pada tahun buku 2017 dan 2016 oleh penilai independen dengan maksud dan tujuan untuk memberikan pendapat yang obyektif mengenai nilai wajar untuk kepentingan pelaporan keuangan sesuai dengan PSAK 16 dan PSAK 48. Hasil dari penilaian tersebut, tidak terdapat indikasi penurunan nilai sehingga

The Group has undertaken an assessment of property, plant and equipment in fiscal year 2017 and 2016 by an independent appraiser with the intent and purpose of providing an objective opinion of fair value for financial reporting purposes in accordance with PSAK 16 and PSAK 48. The results of the assessment, there is an indication of impairment so that the Group does not need

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Grup tidak perlu membentuk cadangan kerugian penurunan nilai pada tahun berjalan. (Lihat Catatan 14)

to establish allowance for impairment losses in the current year. (See Note 14)

16. ASET TAKBERWUJUD

16. INTANGIBLE ASSETS

	2017				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perangkat lunak	5.138.569.971	5.390.202.964	-	-	10.528.772.935
Hak guna bangunan	2.306.922.636	13.361.666	-	-	2.320.284.302
Sub Jumlah	**7.445.492.607**	**5.403.564.630**	**-**	**-**	**12.849.057.237**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated*					
Perangkat lunak	2.295.859.627	1.545.019.350	-	-	3.840.878.977
Hak guna bangunan	613.840.892	1.004.873.341	-	-	1.618.714.233
Sub Jumlah	**2.909.700.519**	**2.549.892.691**	**-**	**-**	**5.459.593.210**
Nilai Buku	**4.535.792.088**				**7.389.464.027**
Aset Dalam Penyelesaian/ *Asset Under Construction*	-	14.300.656.146	-	-	14.300.656.146
Sub Jumlah	**-**	**14.300.656.146**	**-**	**-**	**14.300.656.146**
Jumlah	**4.535.792.088**				**21.690.120.173**

	2016				
	Saldo Awal/ *Beginning Balance*	**Penambahan/ *Addition***	**Pengurangan/ *Reduction***	**Reklasifikasi/ *Reclassification***	**Saldo Akhir/ *Ending Balance***
Biaya Perolehan / *Acquisition Cost*					
Perangkat lunak	2.471.400.331	2.667.169.640	-	-	5.138.569.971
Hak guna bangunan	2.016.605.160	340.717.476	50.400.000	-	2.306.922.636
Sub Jumlah	**4.488.005.491**	**3.007.887.116**	**50.400.000**	**-**	**7.445.492.607**
Akumulasi Amortisasi/ *Amortization Accumulated*					
Perangkat lunak	958.662.500	1.337.197.127		-	2.295.859.627
Hak guna bangunan	480.956.052	155.508.590	22.623.750	-	613.840.892
Sub Jumlah	**1.439.618.552**	**1.492.705.717**	**22.623.750**	**-**	**2.909.700.519**
Nilai Buku	**3.048.386.939**				**4.535.792.088**

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

17. ASET TIDAK LANCAR LAINNYA / *17. OTHER NON CURRENT ASSETS*

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Biaya Perolehan:			***Acquisition Cost:***
Piutang Usaha Tidak Tertagih	78.205.289.102	6.041.695.311	*Account Receivable Not Collectible*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	1.322.703.811	1.322.503.811	*Inventory Damaged*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	29.930.797.353	27.880.102.445	*Fixed Assets Damage*
Lainnya	1.579.027.662	11.502.410.249	*Other*
Jumlah	**111.037.817.928**	**46.746.711.816**	***Total***
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai			***Accumulated Depreciation and Impairment***
Piutang Usaha Tidak Tertagih	(78.205.289.102)	(6.041.125.894)	*Account Receivable Not Collectible*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	(1.322.503.811)	(1.322.503.811)	*Inventory Damaged*
Lainnya	(29.904.797.253)	(2.129.806.401)	*Fixed Assets Damage*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(389.320.360)	(25.724.295.945)	*Others*
Jumlah	**(109.821.910.526)**	**(35.217.732.051)**	***Total***
Nilai Buku	**1.215.907.402**	**11.528.979.765**	***Book Value***

18. UTANG USAHA / *18. ACCOUNTS PAYABLE*

a. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok, sebagai berikut:

a. Details of the accounts payable by supplier, as follows:

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Pihak Berelasi:			***Related Parties:***
PT Pelindo I, II, III dan IV	13.981.210.186	6.921.594.193	*PT Pelindo I, II, III dan IV*
Yayasan Dana Pensiunan Pelni	2.477.445.687	-	*Pelni Pension Fund Foundation*
Otoritas Kepelabuhanan	2.117.138.342	-	*Port Authority*
PT Jasa Raharja (Persero)	1.801.166.000	-	*PT Jasa Raharja (Persero)*
PT Sarana Gama Sejahtera	1.035.911.773	640.732.764	*PT Sarana Gama Sejahtera*
PT Pertamina (Persero)	556.978.000	-	*PT Pertamina (Persero)*
Ditjen Perhubungan Laut	3.095.475	45.819.175.496	*Ditjen Perhubungan Laut*
PT. PAL Indonesia	-	2.366.256.068	*PT. PAL Indonesia*
Lainnya (dibawah Rp500 Juta)	3.573.449.581	-	*Others (below Rp500 million)*
Sub Jumlah	**25.546.395.044**	**55.747.758.521**	***Sub Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

18. UTANG USAHA (lanjutan)

a. Rincian utang usaha berdasarkan pemasok, sebagai berikut: (lanjutan)

18. ACCOUNTS PAYABLE *(continued)*

a. Details of the accounts payable by supplier, as follows: (continued)

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Pihak Ketiga:			***Thrid Parties:***
Araya Internusa	8.376.576.046	-	*Araya Internusa*
PT Dalekesa Asri Cemerlang	7.472.723.772	-	*PT Dalekesa Asri Cemerlang*
Koperasi Bina Sejahtera	4.489.424.036	-	*Koperasi Bina Sejahtera*
PT Segara Permai	4.074.968.177	-	*PT Segara Permai*
PT. Jasaraharja Putera	3.676.811.600	1.833.776.000	*PT. Jasaraharja Putera*
Karya Mandiri Makmur Sejati	3.069.938.323	-	*Karya Mandiri Makmur Sejati*
PT Eastern Citra Bamantara	2.980.122.321	-	*PT Eastern Citra Bamantara*
PT Telkom Enterprise	2.897.053.224	3.490.660.928	*PT Telkom Enterprise*
PT Sinar Kencana	2.115.748.538	659.921.422	*PT Sinar Kencana*
PT Eastern Indotech Multitama	2.096.425.180	-	*PT Eastern Indotech Multitama*
PT Harapan Abadi Niagatama	1.680.425.450	-	*PT Harapan Abadi Niagatama*
Insan Kencana Perdana	1.565.906.521	-	*Insan Kencana Perdana*
Makassar Teknik Abadi	1.349.489.400	-	*Makassar Teknik Abadi*
Koperasi Karya Sejahtera	1.262.345.869	-	*Koperasi Karya Sejahtera*
PT Sumber Mas Intinusa	1.225.673.273	814.424.930	*PT Sumber Mas Intinusa*
PT Pertalube Nusajaya	1.210.207.412	1.193.052.465	*PT Pertalube Nusajaya*
PT Peruri Digital Security	1.018.111.751	-	*PT Peruri Digital Security*
Berdikari Alam Surya	950.264.685	-	*Berdikari Alam Surya*
Indotek Total Solusi	931.947.493	-	*Indotek Total Solusi*
PT Kresna Adikarsa	840.189.500	-	*PT Kresna Adikarsa*
PT Pancuracahaya Wahyu	837.958.649	-	*PT Pancuracahaya Wahyu*
PT Pahala Artha Lestari	736.803.023	605.825.485	*PT Pahala Artha Lestari*
PT Astra Graphia	726.108.900	-	*PT Astra Graphia*
PT. Aerofood Indonesia	701.154.898	222.699.709	*PT. Aerofood Indonesia*
Kimiko Kimberly Indonesia	671.624.612	-	*Kimiko Kimberly Indonesia*
Panca Bina Persada	661.586.394	-	*Panca Bina Persada*
PT Central Marine Indonesia	602.684.533	-	*PT Central Marine Indonesia*
PT Metito Indonesia	589.904.200	-	*PT Metito Indonesia*
PT Bahtera Biru	541.099.876	-	*PT Bahtera Biru*
PT Solusi Integrasi Utama	517.072.788	-	*PT Solusi Integrasi Utama*
Administrasi dan Umum	-	4.046.055.696	*General and Administration*
PT Cahaya Samoedra Bersaudara	-	4.014.629.796	*PT Cahaya Samoedra Bersaudara*
PT. Industri Kapal Indonesia	-	2.641.700.345	*PT. Industri Kapal Indonesia*
PT. Janata Marina Indah	-	2.473.180.210	*PT. Janata Marina Indah*
PT Dok Kodja Bahari Galangan II	-	2.034.547.175	*PT Dok Kodja Bahari Galangan II*
Sucofindo Prima Internasional Konsultan	-	965.250.000	*Sucofindo Prima Internasional Consultan*
Dock & Perkapalan Surabaya	-	849.259.474	*Dock & Perkapalan Surabaya*
PT Pancuracahaya W	-	948.860.114	*PT Pancuracahaya W*
Keagenan	-	250.700.816	*Agency*
Lainnya (dibawah Rp500.000.000)	13.320.965.081	21.341.395.591	*Others (below Rp500,000,000)*
Sub Jumlah	**73.191.315.525**	**48.385.940.156**	***Sub Total***
Jumlah	**98.737.710.569**	**104.133.698.677**	***Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	2.910.200.035	1.500.980.114	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	12.993.328.835	11.502.134.735	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	41.127.774.687	40.249.424.976	*PT Rumah Sakit Pelni*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sub Jumlah	**57.031.303.557**	**53.252.539.825**	***Total***
Jumlah	**155.769.014.126**	**157.386.238.502**	***Total***

18. UTANG USAHA (lanjutan) / ***18. ACCOUNTS PAYABLE*** *(continued)*

b. Utang usaha berdasarkan jatuh temponya / *b. Accounts payable based on maturity*

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Belum jatuh tempo	1.362.851.678	1.319.258.238	*Not yet due*
1 sampai dengan 30 hari	39.490.100.174	59.858.314.576	*1 to 30 days*
31 sampai dengan 60 hari	22.270.918.945	19.378.508.580	*31 to 60 days*
61 sampai dengan 150 hari	26.590.613.567	9.720.891.744	*61 to 150 days*
Lebih dari 150 hari	66.054.529.762	67.109.265.364	*More than 150 days*
Jumlah	**155.769.014.126**	**157.386.238.502**	***Total***

19. BEBAN AKRUAL / ***19. ACCRUED EXPENSES***

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Usaha Perkapalan	119.714.612.161	80.272.598.853	*Shipping*
Usaha Penunjang	-	3.852.500	*Business Support*
Administrasi dan umum	-	86.406.211.011	*General and administrative*
Lainnya	3.233.754.129	19.996.000	*Other*
Sub Jumlah	**122.948.366.290**	**166.702.658.364**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	16.424.506.405	16.175.525.445	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	26.564.529.360	28.741.130.961	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	5.485.799.983	8.313.136.479	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**48.474.835.748**	**53.229.792.885**	***Sub Total***
Jumlah	**171.423.202.038**	**219.932.451.249**	***Total***

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA DAN UANG MUKA DITERIMA / ***20. PREPAID REVENUES AND ADVANCE RECEIVED***

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Entitas Induk:			***Parent entity:***
Uang Muka Diterima			*Advance Received*
Uang Jaminan	13.079.348.838	4.233.508.879	*Deposits*
Usaha Perkapalan	12.381.485.919	8.168.445.075	*Shipping*
Usaha Keagenan	7.808.664.426	14.754.671.102	*Agency*
Usaha Sampingan	64.415.000	62.350.000	*Side Business*
Lainnya	1.585.139.219	1.037.494.131	*Others*
Sub Jumlah	**34.919.053.402**	**28.256.469.187**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	1.931.875.689	1.468.001.665	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	444.588.630	375.477.131	*PT Pelita Indonesia Djaya*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Sub Jumlah	**2.376.464.319**	**1.843.478.796**	***Sub Total***
Jumlah Uang Muka Diterima	**37.295.517.721**	**30.099.947.983**	***Total Advance Received***

20. PENDAPATAN DITERIMA DIMUKA DAN UANG MUKA DITERIMA (lanjutan)

20. PREPAID REVENUES AND ADVANCE RECEIVED *(continued)*

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Pendapatan Diterima Dimuka			*Prepaid Revenues*
Tambang pasasi dan muatan	1.846.883.368	4.552.902.532	*Ticket and Freight*
Sewa	1.356.191.307	1.289.799.122	*Rental*
Usaha Penunjang	-	-	*Supporting Business*
Lainnya	2.181.486.252	2.266.092.194	*Others*
Sub Jumlah	**5.384.560.927**	**8.108.793.848**	***Sub Total***
Entitas Anak:			***Subsidiary:***
PT Sarana Bandar Nasional	3.797.070.245	5.035.713.064	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	933.243.615	430.003.585	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	2.143.770.929	4.966.165.368	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah	**6.874.084.789**	**10.431.882.017**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan Diterima Dimuka	**12.258.645.716**	**18.540.675.865**	***Total Prepaid Revenues***
Jumlah	**49.554.163.437**	**48.640.623.848**	***Total***

Uang jaminan diterima merupakan uang muka/deposit sebagai jaminan atas hubungan kerja sesuai kontrak/ketentuan, dan akan dikembalikan sekaligus atau bertahap sesuai dengan kesepakatan/ketentuan yang berlaku, meliputi uang deposit agen/biro perjalanan dan uang jaminan rekanan.

The deposit is received as deposit for security of the contractual / contractual relationship, and will be refunded at once or gradually in accordance with the applicable agreement, including the deposit of the agent / travel agency and the security deposit of the counterparty.

Uang muka diterima usaha perkapalan merupakan uang muka yang diterima sehubungan dengan kegiatan usaha perkapalan, meliputi tambang pasasi, tambang muatan, charter kapal, sewa ruang kapal, wisata bahari dan

Advances received by the shipping business are advances received in connection with shipping business activities, including pasang mines, cargo mines, boat charter, space rental vessels, marine tourism and others.

Pendapatan diterima di muka tambang pasasi dan muatan merupakan penerimaan hasil penjualan tiket penumpang dan muatan pada suatu jadwal keberangkatan kapal untuk beberapa tujuan pelabuhan

Prepaid income of the pasasi mine and the cargo shall be the proceeds of the sale of passenger tickets and cargo on a scheduled departure of the vessel for some of the transit port purposes.

Pendapatan diterima di muka atas sewa merupakan pendapatan sewa diterima dimuka atas sewa ruangan dari PT Bank Mandiri (Persero), Tbk., Telkomsel, sewa ruangan di kapal, *food court* di Rumah Sakit Pelni dari PT Sebastian Citra Indonesia..

Revenue received in advance on the lease is rental income received in advance upon room lease from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk., Telkomsel, rental space on board, food court at Pelni Hospital from PT Sebastian Citra Indonesia.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA / *21. OTHER SHORT TERM FINANCIAL LIABILITIES*

	31 Desember/ December 2017	31 Desember/ December 2016	
Entitas Induk:			***Parent Entity:***
Pihak Berelasi			*Related Parties*
PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)	5.152.204.232	4.404.889.481	*PT Pelabuhan Indonesia IV (Persero)*
PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)	4.567.488.277	4.511.031.955	*PT Pelabuhan Indonesia II (Persero)*
Otoritas Pelabuhan	1.656.255.360	218.221.700	*Port Authority*
Kementerian Keuangan Republik Indonesia	1.510.567.225	-	*Ministry of Finance of the Republic of Indonesia*
PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)	1.362.948.540	496.541.765	*PT Pelabuhan Indonesia I (Persero)*
BPJS Ketenagakerjaan	864.607.560	864.607.560	*BPJS Ketenagakerjaan*
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	719.453.661	719.453.661	*Pelni Pensioners Health Foundation*
PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)	440.600.938	430.754.478	*PT Pelabuhan Indonesia III (Persero)*
Yayasan Dana Pensiunan Pelni	106.806.000	6.943.327.762	*Pelni Pension Fund Foundation*
Lainnya	285.219.077	3.765.076.407	*Others*
Sub Jumlah	**16.666.150.870**	**22.353.904.769**	***Sub Total***
Pihak Ketiga			*Related Parties*
PT. Citra Bayu Adhiguna	23.722.584.692	42.535.017.328	*PT. Citra Bayu Adhiguna*
PT. Asuransi Purna Artanugraha	3.074.622.861	1.748.593.099	*PT. Asuransi Purna Artanugraha*
Dream Tours & Travel	973.255.290	-	*Dream Tours & Travel*
PT. Gendhis Mitra Kinarya	-	195.079.185	*PT. Gendhis Mitra Kinarya*
Travel Agus	-	171.196.500	*Travel Agus*
Lainnya	3.930.264.434	3.180.294.920	*Others*
Sub Jumlah	**31.700.727.277**	**47.830.181.032**	***Sub Total***
Sub Jumlah Entitas Induk	**48.366.878.147**	**70.184.085.801**	***Sub Total Parent Entity***
Entitas Anak:			***Subsidiaries:***
PT Sarana Bandar Nasional	2.400.041.633	1.226.920.590	*PT Sarana Bandar Nasional*
PT Pelita Indonesia Djaya	626.228.185	163.024.570	*PT Pelita Indonesia Djaya*
PT Rumah Sakit Pelni	964.391.016	982.996.193	*PT Rumah Sakit Pelni*
Sub Jumlah Entitas Anak	**3.990.660.834**	**2.372.941.353**	***Sub Total Subsidiaries***
Jumlah	**52.357.538.981**	**72.557.027.154**	***Total***

Utang kepada PT Citra Bayu Adhiguna merupakan Kerja Sama Operasi (KSO) dalam pengembangan kapal PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Dobonsolo dan Ciremai, sesuai dengan Surat Perjanjian No. TH.94/SS/VIII/2009 dan No.: TH.07.1-3/SS/2013 tanggal 20 Agustus 2009 dan 27 Maret 2013 tentang usaha optimalisasi kapasitas ruang muat kapal penumpang. Lihat Catatan 17.

Debt to PT Citra Bayu Adhiguna is a Joint Operation (KSO) in the development of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) ship of Dobonsolo and Ciremai, pursuant to Letter of Agreement No .: TH.94 / SS / VIII / 2009 and No. TH.07.1 -3 / SS / 2013 dated 20 August 2009 and 27 March 2013 on efforts to optimize the capacity of passenger vessel loading.See Note 17.

Kewajiban kepada Kementerian Keuangan Republik Indonesia sebesar Rp1.510.567.225 merupakan kelebihan atas penerimaan dana Kewajiban Pelayanan Publik (KPP/PSO) berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggara KPP PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2017 tanggal 5 April 2018.

The obligation to the Ministry of Finance of the Republic of Indonesia amounting to Rp1.510.567.225 is an advantage over the receipt of the Public Service Obligation Fund (KPP / PSO) based on the Minutes of Examination of the Calculation of the Fund of KPP Organizer of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) of Fiscal Year 2017 dated April 5, 2018.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

21. LIABILITAS KEUANGAN JANGKA PENDEK LAINNYA (lanjutan)

Berdasarkan hasil pemeriksaan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, PT Pelni telah menghitung pertanggungjawaban dana KPP TA 2017 sebesar Rp2.060.573.873.160,27. Dana KPP TA 2017 yang sewajarnya dapat diterima oleh PT Pelni sesuai hasil pemeriksaan sebesar Rp1.906.905.507.414,77, PT Pelni telah menerima dana KPP TA 2017 sebesar Rp1.908.416.074.640,12 sehingga terdapat kelebihan dana KPP TA 2017 sebesar Rp.1.510.567.225,35.

Lihat Catatan 31 dan 43.

21. OTHER SHORT TERM FINANCIAL LIABILITIES *(continued)*

Based on the results of the examination by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia, PT Pelni has calculated the liabilities of KPP funds TA 2017 amounting to Rp2.060.573.873.160,27. KPP Fund of TA 2017 which is reasonably acceptable to PT Pelni pursuant to result of examination equal to Rp1.906.905.507.414,77, PT Pelni has received fund of KPP FY 2017 equal to Rp1.908.416.074.640,12 so that there is excess of KPP FY 2017 equal to Rp.1.510.567.225,35.

See Note 31 and 43.

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS

31 Desember/*December* 2017					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2017 / *Balance Dec 31, 2017***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
KFW - Spare parts	1,25%	2025	27.592.316.854	3.480.658.332	24.111.658.522
KFW - KM Labobar	1,25%	2025	15.535.361.240	1.959.722.021	13.575.639.219
Jumlah			**43.127.678.094**	**5.440.380.353**	**37.687.297.741**

31 Desember/*December* 2016					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2016 / *Balance Dec 31, 2016***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang/ *Current Portion for Long Term Debt***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Portion Maturity***
KFW - Spare parts	1,25%	2025	31.325.930.639	3.480.658.330	27.845.272.309
KFW - KM Labobar	1,25%	2025	17.637.505.279	1.959.722.021	15.677.783.258
Jumlah			**48.963.435.918**	**5.440.380.351**	**43.523.055.567**

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (lanjutan)

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA-1144/DP3/2001 - Nilai Pinjaman DM 44.000.000

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar DM 44.000.000 sesuai dengan Loan Agreement 1999 66 383 tanggal 31 Juli 2000 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Entitas) melalui surat Menteri Keuangan No. S-047/MK.17/2001 tanggal 15 Januari 2001 sebagai *Project Executing Agency* dan *Sub Borrower* dalam rangka pengadaan Spareparts untuk kapal penumpang yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank DKI Jakarta sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

a. Bagian A sebesar DM 28,600,000 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.

b. Bagian B sebesar DM 15,400,000 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 9,54% per tahun.

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka menyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 33/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan cut-off date pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar DM 28,468,125 atau setara dengan Euro 14.555.521 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2040 dan DM 15.328.990 atau setara dengan Euro 7.837.588 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2014.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-488/SLA-1144/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015, diubah menjadi:

a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR22,393,109.43 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS *(continued)*

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA-1144/DP3/2001 - Value of Loan DM 44,000,000

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to DM 44 million according to the 1999 66 383 Loan Agreement dated July 31, 2000 which was forwarded to PT Indonesian National Shipping (Entity) through the Ministry of Finance letter No. S-047 / MK.17 / 2001 dated January 15, 2001 as Project Executing Agency and Sub-borrower in order to procure Spare parts for passenger ships as outlined in the Agreement SLA No.1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of Indonesia with PT National Shipping Indonesia (Persero) and PT Bank DKI Jakarta appoint as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

a. Part A of DM 28,600,000 as soft loans with an interest rate of 1.25% per year.

b. Part B of DM 15,400,000 as a commercial loan with an interest rate of 9.54% per year.

Based on the Minutes of Reconciliation in the Context menyelesaian sourced from the State Receivables Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Indonesian National Shipping No. 33 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the National Sailing PT Indonesia (Persero) amounting to DM 28,468,125 or equivalent to Euro 14,555,521 to soft loans ended June 30, 2040 and DM 15.32899 million, equivalent to Euro 7,837,588 for commercial loans ended June 30, 2014.

Based on the Amendment Agreement (Agreement) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015, changed to:

a. The principal liability of EUR 22,393,109.43 is made into State Equity Participation through the process in

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

accordance with the provisions of the law, which consists of:

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (lanjutan)

KFW Spareparts- Pemerintah Republik Indonesia: SLA-1144/DP3/2001 - Nilai Pinjaman DM 44.000.000 (lanjutan)

1) pinjaman lunak sebesar EUR14,555,521.09.
2) pinjaman komersil sebesar EUR7,837,588.34.

b. Kewajiban non pokok senilai EUR2,457,823.45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:

1) pinjaman lunak sebesar EUR431,540.19.
2) pinjaman komersil sebesar EUR2,026,283.26.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1144/DP3/2001) sebesar EUR2,457,823.45. Lihat Catatan 25

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16,361,340

Pinjaman kepada *Kreditanstalt fur Wiederaufbau* (KFW) merupakan pinjaman Pemerintah RI kepada KFW sebesar Euro 81,806,700 sesuai dengan Loan Agreement 2001 65 159 tanggal 1 Februari 2002 yang diteruskan kepada PT Pelayaran Nasional Indonesia (Entitas) melalui surat Menteri Keuangan No. S-115/MK.17/2002 tanggal 22 April 2002 sebesar Euro 16,361,340 dalam rangka pengadaan Kapal Penumpang Nomor 23 Pelni yang dituangkan dalam Perjanjian SLA No.1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002 antara Pemerintah RI dengan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) dan menunjuk PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) sebagai perantara dalam pelunasan pokok pinjaman dan biaya bunga, dengan rincian pinjaman sebagai berikut:

a. Bagian A sebesar Euro 8,180,670 sebagai pinjaman lunak dengan tingkat bunga sebesar 1,25% per tahun.

b. Bagian B sebesar Euro 8,180,670 sebagai pinjaman komersil dengan tingkat bunga sebesar 6,39% per tahun.

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS *(continued)*

KFW Spareparts- Government of Republic Indonesia : SLA-1144/DP3/2001 - Value of Loan DM 44,000,000 *(continued)*

1) a soft loan of EUR 14,555,521,09.
2) a commercial loan of EUR 7,837,588.34.

b. Non principal liabilities of EUR 2,457,823.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:

1) a soft loan of EUR 431,540.19.
2) a commercial loan of EUR 2,026,283.26.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1144 / DP3 / 2001) of EUR2,457,823.45. See Note 25.

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA-1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340

Loans to the Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KFW) is the Government of Indonesia to the KFW loan amounting to Euro 81,806,700 according to the 2001 65 159 Loan Agreement dated February 1, 2002 which was forwarded to PT Indonesian National Shipping (Entity) through the Ministry of Finance letter No. S-115 / MK.17 / 2002 April 22, 2002 amounted to Euro 16,361,340 in order to procure Passenger Vessel No. 23 Pelni as outlined in the Agreement SLA No.1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002 between the Government of Indonesia with PT Indonesian National Shipping (Persero) and appointed PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI) as an intermediary in the payment of principal and interest costs, with details of the loan as follows:

a. Part A of Euro 8,180,670 as a soft loan with an interest rate of 1.25% per year.

b. Section B of Euro 8,180,670 as a commercial loan with an interest rate of 6.39% per year.

22. UTANG NON USAHA JANGKA PANJANG (lanjutan)

KFW Kapal Penumpang - Pemerintah Republik Indonesia: SLA - 1151/DP3/2002 - Nilai Pinjaman Euro 16,361,340 (lanjutan)

Berdasarkan Berita Acara Rekonsiliasi Dalam Rangka Penyelesaian Piutang Negara yang bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman (NPPP) pada PT Pelayaran Nasional Indonesia No. 34/PB4.1/PT Bank DKI/2007 tanggal 22 Mei 2007 dilakukan rekonsiliasi pinjaman dengan menetapkan *cut-off date* pada tanggal 31 Maret 2007 dengan jumlah liabilitas PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) sebesar Euro 7,469,800 untuk pinjaman lunak yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2042 dan Euro 7,460,000 untuk pinjaman komersil yang berakhir pada tanggal 30 Juni 2015.

Berdasarkan Perjanjian Perubahan (Amandemen) terhadap Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor SLA-1151/DP3/2002 tanggal 30 Me 2002 antara Pemerintah Republik Indonesia dan Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor ; AMA-489/SLA-1151/DSMI/2015 tanggal 1 Desember 2015, diubah menjadi:

a. Kewajiban pokok pinjaman senilai EUR14,929,800 dijadikan Penyertaan Modal Negara melalui proses sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang terdiri dari:

   1) pinjaman lunak sebesar EUR7,469,800.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR7,460,000.

b. Kewajiban non pokok senilai EUR1,383,833.45 dibayarkan selama 10 tahun dai tahun 2016 sampai dengan 2015 yang terdiri dari:

   1) pinjaman lunak sebesar EUR220,414.14.
   2) pinjaman komersil sebesar EUR1,163,419.31.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 tanggal 30 Desember 2016 tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, maka sisa pinjaman kepada Pemerintah Republik Indonesia (SLA-1151/DP3/2002) sebesar EUR1,383,833,45. Lihat Catatan 25.

22. LONG TERM DEBT NON BUSINESS *(continued)*

KFW Passenger ship - Government of Republic Indonesia: SLA-1151/DP3/2002 - Value of Loan Euro 16,361,340 *(continued)*

Based on the Minutes of Settlement Reconciliation in the Context of State Receivables sourced from Manuscript Subsidiary Loan Agreement (NPPP) PT Pelayaran Nasional Indonesian No. 34 / PB4.1 / PT Bank DKI / 2007 dated May 22, 2007 to be reconciliation loan by setting the cut-off date of March 31, 2007 with total liabilities of the PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) amounting to Euro 7,469,800 for soft loans ended December 30, June 2042 and Euro 7,460,000 for commercial loans ended June 30, 2015.

Based on the Amendment Agreement (Agreement) on the Loan Settlement Agreement No. SLA-1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 between the Government of the Republic of Indonesia and Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Number; AMA-488 / SLA-1144 / DSMI / 2015 dated December 1, 2015, changed to:

a. The principal liability of EUR 14,929,800 is made into State Equity Participation through the process in accordance with the provisions of the law, which consists of:

   1) a soft loan of EUR 7,469,800.
   2) a commercial loan of EUR 7,460,000.

b. Non principal liabilities of EUR 1,383,833.45 are payable for 10 years from 2016 to 2015 consisting of:

   1) a soft loan of EUR 220,414.14.
   2) a commercial loan of EUR 1,163,419.31.

With the issuance of Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 87 Year 2016 dated December 30, 2016 concerning the Addition of State Equity Participation of the Republic of Indonesia into Capital of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, the remaining loan to the Government of the Republic of Indonesia (SLA-1151 / DP3 / 2002) of EUR 1,383,833.45. See Note 25.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS

31 Desember/*December* 2017					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2017/ *Balance Dec 31, 2017***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt***	**Bagian Jatuh Tempo lebih dari Setahun / *Long Term Maturity***
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	14,00%	2019	3.705.555.556	-	3.705.555.556
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	13,75%	2019	1.688.888.889	-	1.688.888.889
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2019	3.153.932.588	-	3.153.932.588
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	2.138.423.902	-	2.138.423.902
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	4.151.894.363	-	4.151.894.363
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	6.131.894.909	-	6.131.894.909
PT Bank Syariah Mandiri	13,00%	2021	6.080.884.707	-	6.080.884.707
PT Bank Syariah Mandiri	0,28%	2018	8.432.349.330	8.432.349.330	-
PT Bank Syariah Mandiri	0,31%	2018	9.500.000.000	9.500.000.000	-
PT Bank Syariah Mandiri	0,23%	2018	6.950.000.000	6.950.000.000	-
Sewa Pembiayaan / *Financial Lease*		2020	6.037.787.000	3.248.508.000	2.789.279.000
Jumlah/*Total*			**57.971.611.243**	**28.130.857.330**	**29.840.753.913**

31 Desember/*December* 2016					
Nama Kreditur/ *Creditur*	**Tingkat Bunga / *Interest Rate***	**Jatuh Tempo Tahun / *Maturity Year***	**Saldo 31 Des 2016 / *Balance Dec 31, 2016***	**Bagian Lancar Utang Jangka Panjang / *Current Portion for Long Term Debt***	**Bagian Jatuh Tempo Lebih dari Setahun / *Long Term Maturity***
PT Bank Syariah Mandiri	22,00%	2016	29.074.316.936	29.074.316.936	-
PT Bank Syariah Mandiri	22,00%	2018	8.405.717.047	-	6.026.599.928
PT Bank Syariah Mandiri	22,00%	2021	15.000.000.000	-	14.510.216.315
PT Bank Syariah Mandiri	22,00%	2022	6.415.531.250	-	6.415.531.250
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	14,00%	2018	11.794.444.444	-	8.594.444.444
PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk		2019	400.000.000	400.000.000	-
Sewa Pembiayaan / *Financial Lease*			6.667.689.000	5.170.955.000	-
Jumlah/*Total*			**77.757.698.677**	**34.645.271.936**	**35.546.791.937**

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Pinjaman kepada PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perjanjian kredit antara Entitas Anak PT Sarana Bandar Nasional dengan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk masing-masing sebesar Rp1.824.000.000 dan Rp3.248.000.000 per 31 Desember 2015 dan 2014 yang merupakan utang atas pembelian 1 unit Reachsteacker tahun 2011 dengan kredit jangka panjang dan utang jangka panjang pembelian 150 (seratus lima puluh) teus kontainer yang dibeli melalui pinjaman BRI.

Pinjaman PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk telah diselesaikan sesuai dengan jatuh temponya pada bulan April 2017.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Pinjaman kepada PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. merupakan perjanjian kredit antara Entitas Anak PT Rumah Sakit PELNI dengan PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dengan rincian sebagai berikut:

a. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/173

Perjanjian dibuat tanggal 14 November 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp8.700.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 14 November 2014 sampai dengan 13 November 2019.

Fasilitas kredit berupa kredit investasi dengan tujuan untuk pembelian alat kesehatan berupa 1 (satu) unit brivo MR355 Inspire 1,5T dengan rincian sebagai berikut:

Taksasi	Rp 12.439.680.000	(100%)
Dana Sendiri	Rp 3.739.680.000	(30%)
Pembiayaan	Rp (3.739.680.000)	(70%)

b. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/063

Perjanjian dibuat tanggal 26 Mei 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp5.700.000.000 dengan jangka waktu 60 (enam puluh) bulan, terhitung sejak 26 Mei 2014 sampai dengan 25 Mei 2019.

Fasilitas kredit berupa kredit investasi dengan tujuan

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk

Loans to PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. a credit agreement between the Subsidiary PT Sarana Bandar National with PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. (BRI), each for Rp1.824.000.000 and Rp3.248.000.000 per December 31, 2015 and 2014 which is owed on the purchase of one unit Reachsteacker in 2011 with long-term loans and long-term debt purchase of 150 (one hundred fifty) teus containers were purchased through a loan BRI.

Loan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk has been settled in accordance with its maturity in April 2017.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

Loans to PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. a credit agreement between the Subsidiary PT Rumah Sakit Pelni with PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., the details are as follows:

a. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/173

This contract created on November 14, 2014. The number of loans approved for Rp8.700.000.000 with a period of 60 (sixty) months, starting from November 14, 2014 until November 13, 2019.

Credit facility in the form of investment credit for the purpose of the purchase of medical equipment in the form of 1 (one) unit BRIVO MR355 Inspire 1,5T with details as follows:

Assessed	*Rp 12.439.680.000*	*(100%)*
Self Financing	*Rp 3.739.680.000*	*(30%)*
Financing	*Rp (3.739.680.000)*	*(70%)*

b. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/063

This contract created on May 26, 2014. The number of loans approved for Rp5.700.000.000 with a period of 60 (sixty) months, starting from May 26, 2014 until May 25, 2019.

Credit facility in the form of investment credit for the

pembelian berbagai macam alat kesehatan dengan rincian sebagai berikut:

purpose of the purchase of medical equipment with details as follows:

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk *(continued)*

b. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/063 (lanjutan)

Taksasi	Rp 8.143.905.000	(100%)
Dana Sendiri	Rp 2.443.905.000	(30%)
Pembiayaan	Rp 5.700.000.000	(70%)

b. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/063 (continued)

Assessed	*Rp 8.143.905.000*	*(100%)*
Self Financing	*Rp 2.443.905.000*	*(30%)*
Financing	*Rp 5.700.000.000*	*(70%)*

c. Perjanjian Kredit Nomor: 2014/MRC/0184

Perjanjian dibuat tanggal 3 Desember 2012 yang mengalami perubahan pertama berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (I) 2012/MRC/184 tanggal 27 Juni 2014 dan perubahan kedua berdasarkan Persetujuan Perubahan Perjanjian Kredit Nomor: (II) 2012/MRC/184 tanggal 23 Agustus 2014. Jumlah kredit yang disetujui sebesar Rp1.722.000.000 dengan jangka waktu 36 bulan sejak tanggal 23 Agustus 2014 sampai dengan 22 Agustus 2016.

Perjanjian ini mengalami perubahan pada jumlah kredit yang diberikan yang semula sebesar Rp1.722.000.000 menjadi Rp1.370.000.000.

c. Credit Contract Nomor: 2014/MRC/0184

This contract created on December 3, 2012 which amended the first Agreement on Amendment of Credit Contract No. (I) 2012 / MRC / 184 dated June 27, 2014 and the second amendment to the Agreement on Amendment of Credit Contract Number: (II) 2012 / MRC / 184 dated August 23, 2014. the number of loans approved for Rp1.722.000.000 with a period of 36 months from the date of August 23, 2014 until August 22, 2016.

This contract changes again on the amount of loans originally amounted Rp1.722.000.000 become Rp1.370.000.000.

Seluruh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dijamin dengan:

1) Peralatan kesehatan berupa:
   a) 1 (satu) unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm senilai Rp8.143.905.000.
   b) 1 (satu) unit Brivo MR355 Inspire 1,5 T senilai Rp12.439.680.000.

Seluruh fasilitas pinjaman kredit dari PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk., dijamin dengan:

2) Persediaan berbagai macam obat-obatan senilai Rp5.597.000.000.

All credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk are guaranteed by:

1) Medical equipment:
   a) 1 (satu) unit Optima CT660 P2.5 (Hino) & OEC Brivo 785 Essential C-Arm a mounth of Rp8.143.905.000.
   b) 1 (satu) unit Brivo MR355 Inspire 1,5 T a mounth of Rp12.439.680.000.

All credit facilities from PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk are guaranteed by:

2) Supplies kinds of medicine a mounth of Rp5.597.000.000.

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk.

a. Perjanjian No.: 17/1267/SP4/180

Perjanjian dibuat tanggal 27 Agustus 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp8.584.468.750 dan margin yang ditetapkan Rp3.022.734.968. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 39 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan Pembiayaan.

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk

a. Contract No.: 17/1267/SP4/180

Agreement was made on August 27, 2015, with a principal amount outstanding of Rp8.584.468.750 and margins are set Rp3.022.734.968. Payments are made in installments over 39 months, commencing from the date of disbursement of Financing.

23. UTANG BANK DAN LEMBAGA KEUANGAN JANGKA PANJANG (lanjutan)

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk (lanjutan)

b. Perjanjian No.: 17/1425/SP4/180

Perjanjian dibuat tanggal 28 Agustus 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp5.000.000.000 dan margin yang ditetapkan Rp3.657.165.342. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 72 bulan, terhitung sejak tanggal penandatanganan akad pembiayaan.

c. Perjanjian No.: 17/0986-3/180

Perjanjian dibuat tanggal 11 Agustus 2015, dengan jumlah pokok terutang sebesar Rp7.500.000.000 dan margin yang ditetapkan Rp5.485.748.014. Pembayaran dilakukan secara cicilan selama 72 bulan, terhitung sejak tanggal pencairan pembiayaan.

PT Tunas Finance Mandiri

Merupakan utang sewa pembiayaan antara entitas anak PT Pelita Indonesia Djaya dengan PT Tunas Finance Mandiri atas pengadaan 3 Unit Toyota Vios 1.5G A/T tahun 2015 jangka waktu 60 bulan, 12 Unit Toyota Inova G2.0M/T tahun 2015 jangka waktu 60 bulan, 16 unit Toyota Avanza Velos 1.5M/T tahun 2015 jangka waktu 36 bulan, 2 Unit Toyota Avanza Grand New 1.3 G/MT, 15 Unit Toyota Avanza G M/T jangka waktu 36 bulan dan 2 Unit Toyota Vios G A/T 1.5 jangka waktu 36 bulan.

23. LONG TERM FINANCIAL INSTITUTIONS AND BANK LOANS *(continued)*

PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk *(continued)*

b. Contract No.: 17/1425/SP4/180

Agreement was made on August 28, 2015, with a principal amount outstanding of Rp5,000,000,000 and margins are set Rp3.657.165.342. Payments are made in installments over 72 months, commencing from the date of signing of the financing agreement.

c. Contract No.: 17/0986-3/180

Agreement was made on August 11, 2015, with a principal amount outstanding of Rp7.500.000.000 and margins are Rp5.485.748.014. Payments are made in installments over 72 months, commencing from the date of disbursement of financing.

PT Tunas Finance Mandiri

Represents a debt financing lease between subsidiaries of PT Pelita Indonesia Djaya and PT Tunas Finance Mandiri on the procurement of 3 units of Toyota Vios 1.5GA / T in 2015 for 60 months, 12 units of Toyota Inova G2.0M / T 2015 period of 60 months, 16 units Toyota Avanza Velos 1.5M / T 2015 36 months, 2 units Toyota Avanza Grand New 1.3 G / MT, 15 units Toyota Avanza GM / T 36 month period and 2 units Toyota Vios GA / T 1.5 period 36 months.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG

Program Pensiun Manfaat Pasti

Perseroan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti (PPMP) untuk semua karyawan tetap yang dikelola Dana pensiun ini dikelola oleh Yayasan Dana Pensiunan Pelni. Program pensiun ini memberikan imbalan pasca kerja berdasarkan penghasilan dasar pensiun dan masa kerja karyawan.

Imbalan Pasca-Kerja Jangka Panjang Lain

Perseroan juga memberikan imbalan pasca-kerja lain tanpa pendanaan berupa uang pesangon, penghargaan masa kerja, penggantian hak dan penghargaan/tabungan purna jabatan kepada karyawan yang memenuhi persyaratan sesuai dengan kebijakan Perseroan. Imbalan program ini ditentukan berdasarkan penghasilan dan

24. LIABILITIES OF LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS

Defined Benefit Pension Plan

The Company has a defined benefit pension plan for all permanent employees managed by the Pension Fund managed by the Pelni Pension Fund Foundation. The pension plan provides post-employment benefits based on the basic income of employees' retirement and years of service.

Other Long Term Post-employee Benefits

The Company also provide other unfunded defined post-employment benefit plans such as severance pay, service pay, compensation pay and functional retirement pay for their qualifying employees based on the Company policies. These other postemployment benefits are computed based on the salaries and service years of the

masa kerja karyawan. Tidak terdapat pendanaan yang disisihkan oleh Perseroan sehubungan dengan imbalan kerja ini.

employees. No funding has been made to this long term benefits.

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

Perseroan memberikan imbalan kerja jangka panjang kepada karyawan sesuai dengan imbalan berdasarkan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003 (UU No. 13/ 2003). Imbalan tersebut tidak didanai. Tabel berikut menyajikan komponen dari beban imbalan neto yang diakui dalam laporan laba rugi komprehensif konsolidasi dan jumlah yang diakui dalam laporan posisi keuangan konsolidasi untuk liabilitas diestimasi imbalan kerja yang dihitung oleh aktuaris independen, untuk periode/tahun yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, berdasarkan laporannya masing-masing No. 496-A/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-B/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-C/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-D/PSAK/DAT/III/2018 dan No. 189-A/DAT/II/2017, No. 189-B/DAT/II/2017, No. 189-A/DAT/II/2017, No. 189-C/DAT/II/2017, No. 189-D/DAT/II/2017. Perhitungan aktuaris menggunakan metode *"Projected Unit Credit"* dengan asumsi-asumsi sebagai berikut:

24. LIABILITIES OF LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS *(continued)*

The Company provides long-term benefits to employees in accordance with the rewards based on Labor Law No. 13/2003 (Law No. 13/2003). The benefits are not funded. The following table presents the components of benefits expense net recognized in the income statement consolidation and the amounts recognized in our consolidated balance sheet for the estimated liabilities for employee benefits are calculated by an independent actuary, for the period / year ended December 31, 2017 and 2016, based on the report No. 496-A/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-B/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-C/PSAK/DAT/III/2018, No. 496-D/PSAK/DAT/III/2018 and No. No. 189-A/DAT/II/2017, No. 189-B/DAT/II/2017, No. 189-A/DAT/II/2017, No. 189-C/DAT/II/2017, No. 189-D/DAT/II/2017. The actuarial calculation uses the "Projected Unit Credit" method with the following assumptions:

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Tingkat diskonto	6,50%	8,10%	*Discount Rate*
Tingkat proyeksi kenaikan gaji	3%	5,00%	*The Projected rate of salary Increase*
Tingkat mortalita	Indonesia - III (2011)	Indonesia - III (2011)	*Mortality Rate*
Tingkat cacat tetap	0,02% per tahun	0,02% per tahun	*Permanent disability rate*

Rekonsiliasi perubahan liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan adalah:

Reconciliation of changes in liabilities recognized in the statement of financial position are:

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) awal periode	(41.640.111.748)	92.052.054.800	*Reserves (Prepaid Expenses) at beginning of period*
Pembayaran imbalan pada tahun berjalan	(5.572.410.272)	(6.272.816.000)	*Benefit payments in the current year*
Beban (pendapatan) imbalan pada Laba Rugi	(26.629.014.035)	(17.331.158.178)	*(Benefit) Expenses on the Profit and Loss*
Pendapatan (Beban) pada Penghasilan Komprehensif lain	(149.105.829.415)	(5.291.981.814)	*Benefits (Expenses) on other Comprehensive Income*
Iuran Pemberi kerja	(3.118.072.569)	(36.454.501.498)	*Employer Contributions*
Cadangan (Biaya Dibayar Dimuka) akhir periode	125.404.248.861	71.947.877.294	*Reserves (Prepaid Expenses) at end of period*
Entitas Anak	9.338.232.142	6.626.546.549	*Subsidiaries*
Jumlah	**134.742.481.003**	**78.574.423.843**	***Total***

24. LIABILITAS IMBALAN KERJA JANGKA PANJANG (lanjutan)

24. LIABILITIES OF LONG TERM EMPLOYEE BENEFITS *(continued)*

Rincian beban yang diakui di laporan laba rugi komprehensif, adalah:

Details of the expense recognized in the income statement, is:

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Biaya Jasa Kini	9.014.781.702	5.907.862.228	*Current service cost*
Biaya Bunga	32.291.789.807	26.935.532.104	*Interest Cost*
Pendapatan Bunga atas Aset	(23.846.579.235)	(24.408.905.308)	*Interest Income on Assets*
Jumlah	**17.459.992.274**	**8.434.489.024**	***Total***

25. MODAL SAHAM

25. CAPITAL STOCK

Modal dasar, ditempatkan dan disetor penuh masing-masing pada tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, sebagai berikut:

Authorized Capital, issued and fully paid respectively on December 31, 2017 and 2016, are as follows:

Pemegang Saham/ Shareholders	**Lembar Saham/ Shares**	**Nilai Nominal per Lembar Saham/ *Nominal Value per Share***	**Persentase kepemilikan/ *Percentage of ownership***	**Jumlah nilai saham/ *Total value of shares***
Negara Republik Indonesia/ *Republic of Indonesia*	7.065.092	1.000.000	100%	7.065.092.000.000
Jumlah	**7.065.092**	**1.000.000**	**100%**	**7.065.092.000.000**

Modal saham yang disetor ke Entitas merupakan 100% penyertaan Pemerintah sesuai dengan Akta No. 1 tanggal 1 Februari 2016, Notaris Ida Adiningsih, S.H., tentang Persetujuan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia. 100% dari nilai nominal setiap saham yang ditempatkan atau seluruhnya berjumlah Rp7.065.092.000.000 telah disetor penuh oleh Negara Republik Indonesia (Pemegang Saham) dengan cara sebagai berikut:

The paid-up capital stock to the Company represents 100% Government investment in accordance with Deed No. 1 dated February 1, 2016, Notary Ida Adiningsih, S.H., concerning Approval of Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as General Meeting of Shareholders of Persero Limited of PT Pelayaran Nasional Indonesia. 100% of the total nominal value of each share placed or fully amounting to Rp7,065,092,000,000 has been fully paid by the Republic of Indonesia (Shareholder) in the following manner:

a. sebesar Rp6.565.092.000.000 merupakan setoran modal lama sesuai dengan Akta No. 1, tanggal 16 Januari 2013, yang dibuat dihadapan Notaris Nanda Fauz Iwan, SH., yang telah memperoleh pengesahan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. AHU-02312.AH.01.02.TH 2013, tanggal 23 Januari 2013.

b. sebesar Rp500.000.000.000 yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun

a. amounting to Rp6.565.092.000.000 representing an initial capital contribution in accordance with Deed No. 1 dated January 16, 2013, drawn up before Notary Nanda Fauz Iwan, SH., Which has been approved by the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia No. AHU-02312.AH.01.02.TH 2013, January 23, 2013.

b. of Rp500,000,000,000 derived from the State Budget of 2015 as stipulated in Government Regulation no.

2015 sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah No. 111 Tahun 2015.

111 Year 2015.

26. PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH

26. GOVERNMENT CAPITAL

Landasan Hukum/ *Legal Foundation*	Penyertaan Modal Pemerintah / *Goverment Capital*	Pengalihan/ *Redirect*	Jumlah / *Total*
PP. RI No. 40 Tahun 1992	309.143.585.642	309.000.000.000	143.585.642
PP. RI No. 87 Tahun 2016	564.807.589.000	-	564.807.589.000
Jumlah / *Total*	**873.951.174.642**	**309.000.000.000**	**564.951.174.642**

Pada tahun 2016 terdapat penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Non Tunai berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2016 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Negara Republik Indonesia Ke Dalam Modal Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia dengan nilai sebesar Rp564.807.589.000, bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2016 melalui konversi Utang Soft Loan Agreement (SLA) Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia kepada Negara Republik Indonesia berdasarkan Perjanjian Penerusan Pinjaman Nomor 1144/DP3/2001 tanggal 25 Februari 2001 dan Nomor 1151/DP3/2002 tanggal 30 Mei 2002.

In 2016 there is the addition of the Government of Non-Cash by the Indonesian Government Regulation No. 87 Year 2016 About the Addition of Investment of the Republic of Indonesia in Capital Shares Owned Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia with a value of Rp564.807.589.000, sourced from budget of the State 2016 through the conversion of debt Soft Loan Agreement (SLA) Limited Liability Company (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia to the Republic of Indonesia under the Agreement Subsidiary Loan No. 1144 / DP3 / 2001 dated February 25, 2001 and No. 1151 / DP3 / 2002 dated May 30, 2002.

27. CADANGAN

27. RESERVE

Merupakan bagian dari sumber daya yang teridentifikasi dan dibentuk dari jumlah tertentu atau sebagian dari laba bersih setiap tahun buku, sesuai Undang-undang No.40 Tahun 2007, tentang Perseroan Terbatas, Pasal 70 (1).

Is a part of the identified resource and is formed from a certain or partial amount of net profit per year of the book, pursuant to Law No.40 of 2007, regarding Limited Liability Company, Article 70 (1).

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Saldo awal	164.190.404.981	66.533.679.319	*Beginning balance*
Penggunaan Laba tahun lalu	248.402.904.439	98.643.157.235	*Distribution of Profit Previous Year*
Penyaluran Program PKBL	-	(986.431.573)	*Distribution of PKBL Program*
Saldo akhir	**412.593.309.420**	**164.190.404.981**	***Ending balance***

Lihat Catatan 28.

See Note 28.

28. SALDO RUGI/DEFISIT

28. RETAINED EARNING/DEFICITS

Merupakan akumulasi laba tahun berjalan setelah dikurangi dengan pembentukan cadangan dan/atau pembagian dividen dan/atau alokasi dana Program Kemitraan dan Bina Lingkungan.

This represents the accumulated profit of the current year after deducting the formation of reserves and / or dividend distribution and / or allocation of Partnership and Community Development Program.

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Saldo awal	(2.278.860.622.615)	(2.427.334.648.925)	*Beginning balance*
Distribusi Saldo Laba Tahun Lalu:			*Distribution of Retained Earnings:*
Cadangan	(248.402.904.439)	(98.643.157.235)	*Reserve*

Penyesuaian		(1.285.720.894)	*Adjustments*
Laba Tahun Berjalan	276.419.034.328	248.402.904.439	*Profit of Current Year*
Saldo akhir	**(2.250.844.492.726)**	**(2.278.860.622.615)**	***Ending balance***

28. SALDO RUGI/DEFISIT (lanjutan)

Penggunaan laba tahun buku 2016 dan 2015 masing-masing sesuai dengan Akta Berita Acara Rapat Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, No. 5 tanggal 16 Mei 2017, dihadapan Notaris Ida Adiningsih, SH.,dan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perusahaan Perseroan Persero PT Pelayaran Nasional Indonesia No.06.03/RUPS/PELNI/VI/2016.

Lihat Catatan 27.

28. RETAINED EARNING/DEFICITS *(continued)*

The use of profit for the fiscal year 2016 and 2015 is in accordance with the Minutes of Meeting of Limited Liability Company (Persero) of PT Pelayaran Nasional Indonesia, no. 5 dated May 16, 2017, before Notary Ida Adiningsih, SH., And the Annual General Meeting of Shareholders of Perusahaan Perseroan PT Pelayaran Nasional Indonesia No.06.03 / RUPS / PELNI / VI / 2016.

See Note 27.

29. KOMPONEN EKUITAS LAINNYA

29. OTHER COMPONENT EQUITY

	31 Desember/ *December 2017*	**31 Desember/ *December 2016***	
Saldo awal	(52.980.133.139)	(17.850.143.998)	*Beginning balance*
Keuntungan (Kerugian) Aktuaria Tahun Berjalan	(37.429.500.261)	(34.922.419.643)	*Current Actuarial Profit (Loss)*
Penyesuaian	410.982.436	(207.569.498)	*Adjustment*
Saldo akhir	**(89.998.650.964)**	**(52.980.133.139)**	***Ending balance***

30. KEPENTINGAN NON PENGENDALI

30. NON-CONTROLLING INTERESTS

31 Desember/*December* 2017					
Pemegang Saham/ *Shareholders*	**% Penyertaan / *Participation***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan non-pengendali (awal) / *Part of the owners of shares of non-controlling interests (initial)***	**Dividen/ Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / *Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital***	**Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / *Profit (Loss) Current Year***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan non-pengendali akhir / *Part of shareholders of non-controlling interests of the end***
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0,53% in SBN	80.000.000	964.714.590	242.567.634	1.287.282.224
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0,50% in PIDC	10.050.000	214.407.311	168.795.034	393.252.345
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0,04% in RS PELNI	23.792.000	14.588.502	14.810.003	53.190.505
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	2,00 % in PBN	5.000.000	74.610.067	14.190.279	93.800.346

Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	1,01 % in SBL	3.800.000	1.170.925	22.096.255	27.067.180
Jumlah/*Total*		**122.642.000**	**1.269.491.395**	**462.459.205**	**1.854.592.600**

30. KEPENTINGAN NON PENGENDALI (lanjutan) ***30. NON-CONTROLLING INTERESTS*** *(continued)*

31 Desember/December 2016					
Pemegang Saham/ *Shareholders*	**% Penyertaan / *Participation***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan non-pengendali (awal) / *Part of the owners of shares of non-controlling interests (initial)***	**Dividen/ Koreksi Cadangan/ Setoran Modal / *Dividend / Correction Reserves / Deposits Capital***	**Bagian Laba (Rugi) Tahun Berjalan / *Profit (Loss) Current Year***	**Bagian dari pemilik saham kepentingan non-pengendali akhir / *Part of shareholders of non-controlling interests of the end***
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0,53% di SBN	80.000.000	749.707.754	217.544.639	1.047.252.393
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0,50% di PIDC	10.050.000	104.230.174	117.183.412	231.463.586
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	0,04% di RS PELNI	23.792.000	1.485.723	13.102.779	38.380.502
Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni / *Pensioners Health Foundation Pelni*	2,00 % di PBN	5.000.000	55.169.511	19.440.556	79.610.067
Koperasi Sabanas/ *Cooperative Sabanas*	1,01 % di SBL	3.800.000	(1.160.965)	2.331.890	4.970.925
Jumlah/*Total*		**122.642.000**	**909.432.197**	**369.603.276**	**1.401.677.473**

31. PENDAPATAN USAHA ***31. OPERATING REVENUES***

Pendapatan usaha merupakan penjualan jasa pelayaran dan jasa lainnya, terdiri dari:

Operating revenues represent the sale of shipping services and other services, consisting of:

	2017	**2016**	
Pendapatan Usaha, Bruto:			***Gross Operating Revenue:***
Penugasan Pemerintah	2.461.769.659.728	2.301.297.621.468	*Government Assignments*
Tambang Pasasi	889.394.643.194	978.980.194.949	*Ticketing*
Usaha Pelayanan Kesehatan	441.408.835.268	402.762.710.564	*Health Service Business*
Tambang Muatan	320.478.606.780	320.080.732.985	*Cargo*
Usaha Perkapalan Lainnya	35.136.941.899	11.993.887.419	*Other Shipping Business*
Usaha Perbengkelan	16.956.444.537	16.867.263.237	*Workshop Business*
Usaha Perhotelan	5.090.408.351	7.710.151.052	*Hospitality Business*
Usaha Keagenan	4.633.224.984	4.411.151.539	*Agency Business*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Usaha Wisata Bahari	67.005.500	391.500.000	*Marine Tourism Business*
Usaha Penunjang Lainnya	240.755.825.933	210.768.057.825	*Other Supporting Enterprises*
Sub Jumlah Dipindahkan	**4.415.691.596.174**	**4.255.263.271.038**	***Carried Forward Sub Total***

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan) ***31. OPERATING REVENUES*** *(continuued)*

	2 0 1 7	**2 0 1 6**	
Sub Jumlah Pindahan	**4.656.447.422.107**	**4.466.031.328.862**	***Brought Forward Sub Total***
Dikurangi:			*Less:*
Reduksi Tambang pasasi	(20.832.628.562)	(10.551.251.000)	*Ticketing Reduction*
Reduksi Perhotelan	(14.275.452)	(96.980.000)	*Hospitality Reduction*
Sub Jumlah	**(20.846.904.014)**	**(10.648.231.000)**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan Usaha, Bersih	**4.394.844.692.160**	**4.244.615.040.038**	***Total Revenue, Net***

Pemerintah menugaskan PT Pelayaran Nasional (Persero) sebagai Badan Penyelenggara Kewajiban Pelayanan Publik (*Public Service Obligation* - PSO) angkutan barang di laut. Penugasan tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden No.70 tahun 2017 pasal 5 (lima) tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Untuk Angkutan Barang Dari dan Ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan, tanggal 18 Juli 2017 dan diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 21 Juli 2017 oleh Menteri Hukum dan HAM.

The government commissioned PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) as the Public Service Obligation (PSO) Agency for freight transport at sea. The assignment is contained in Presidential Decree No.70 of 2017 article 5 (five) on the Implementation of Public Service Obligations for the Transport of Goods to and from Disadvantaged, Remote, Outlying and Border Areas, dated July 18, 2017 and promulgated in the State Gazette of the Republic of Indonesia on 21 July 2017 by the Minister of Law and Human Rights.

Pada tahun 2016, PT Pelayaran nasional Indonesia ditugaskan sebagai operator Tol Laut dan angkutan ternak yang melayani angkutan barang pada 6 (enam) trayek yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui SK Dirjen Hubla No. AL.108/7/8/DJPL-15 dan dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Kementerian Perhubungan melalui PM No. 10 tahun 2016.

In 2016, PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) assigned as a toll operator Sea and livestock transport that serves the transportation of goods in 6 (six) route that has been set by the Ministry of Transportation by SK Director General of Sea No. AL.108 / 7/8 / DGLT-15 and at the rates set by the Ministry of Transportation through PM No. 10 in 2016.

Penghasilan dana *Public Service Obligation* (PSO) merupakan dana kompensasi yang diperoleh Entitas dari Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka melaksanakan kewajiban pelayanan angkutan laut penumpang kelas ekonomi ke seluruh pelosok tanah air dengan tarif yang telah ditetapkan oleh Pemerintah RI sesuai dengan Peraturan Menteri Perhubungan No. PM. 149 Tahun 2016 tentang perubahan atas PM 38 Tahun 2016 tentang Tarif Batas Atas Angkutan Penumpang Laut Dalam Negeri Kelas Ekonomi dan tertuang dalam Perjanjian Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik Bidang Angkutan Laut Untuk Penumpang Kelas Ekonomi Tahun Anggaran 2017 Nomor HK.107/4/19/DJPL-16 dan TH. 12.30-01/SS/2016 tanggal 30 Desember 2016.

Public Service Obligation (PSO) is a compensation fund earned by an Entity from the Government of the Republic of Indonesia through the Directorate General of Sea Transportation in order to carry out liability of sea passenger economy class services to all corners of the country at a rate set by the Government of the Republic of Indonesia in accordance with the Minister of Transportation No. PM. 149 Year 2016 concerning amendment to PM 38 Year 2016 on Tariff Limit on Domestic Sea Passenger Transportation Economy Class and stipulated in Public Service Obligation Implementation Agreement of Sea Transportation for Economy Class Passenger of fiscal year 2017 Number HK.107 / 4/19 / DJPL- 16 and TH.12.30-01/SS dated December 30, 2016.

Penghasilan Penugasan Pemerintah juga diperoleh dari Pemerintah RI melalui Direktorat Jenderal Perhubungan Laut dalam rangka melaksanakan penyelenggaran kewajiban publik untuk angkutan barang di laut dalam

Income from Assignment government also obtained from the Government through the Directorate General of Sea Transportation in order to carry out the delivery of public obligations for the transport of goods at sea in the

rangka pelaksanaan tol laut, angkutan perintis, dan angkutan ternak tahun anggaran 2017, sesuai dengan jaringan trayek tetap dan teratur *(liner)* angkutan barang tahun 2017.

implementation of the toll the sea, pioneer transport, and transport livestock fiscal year 2017, according to the route network and regularly (liner) transport goods in 2017.

31. PENDAPATAN USAHA (lanjutan)

31. OPERATING REVENUES *(continued)*

Jumlah nilai perjanjian penyelenggaraan liabilitas pelayanan umum bidang angkutan laut untuk penumpang kelas ekonomi tahun anggaran 2017 dan 2016 berdasarkan pasal 7 adalah sebesar Rp2.060.567.229.000 dan Rp1.786.993.530.000 yang bersumber dari dana APBN sesuai dengan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bendahara Umum Negara Belanja Pemerintah Pusat (BABUN-BPP) Nomor DIPA-999.07.1985120/2017 tanggal 30 Desember 2016 dan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Bendahara Umum Negara (DIPA-BUN) Nomor DIPA-999.07.1.985120/2016 tanggal 17 Desember 2016.

The total value of the agreement for the implementation of public service liability in the field of sea transport for economy class passengers of fiscal year 2017 and 2016 under section 7 amounted to Rp2,060,567,229,000 and Rp1,786,993,530,000 originating from APBN funds in accordance with the List of Budget Implementation (DIPA) Bendahara General State Central Government Expenditure (BABUN-BPP) Number DIPA-999.07.1985120 / 2017 dated December 30, 2016 and List of State General Treasurer Budget Implementation List (DIPA-BUN) Number DIPA-999.07.1.985120 / 2016 dated December 17, 2016.

Mendasar pada hasil Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia tanggal 5 April 2018, pada tahun 2017 Perseroan membukukan pendapatan atas pelaksanaan Kewajiban Pelayanan Publik terhadap kapal penumpang, juga melalui subsidi Pemerintah dengan total sebesar Rp2.461.769.659.728, terdiri dari:

Based on to the results of the Audit of Calculation of Public Service Obligation Fund of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) of Fiscal Year 2017 by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia dated April 5, 2018, in 2017 the Company recorded revenues on the implementation of Public Service Obligations to passenger vessels as well as through Government subsidies with a total of Rp2.461.769.659.728, consisting of:

a. Penugasan Pemerintah - Kapal Penumpang	Rp	1.906.905.507.415	*Government Assignment - Passenger Ship*
b. Subsidi - Kapal Perintis	Rp	303.915.869.175	*Subsidies - Pioneer Ships*
c. Subsidi - Kapal Tol Laut	Rp	236.173.126.794	*Subsidies - Marine Toll Ship*
d. Subsidi - Kapal Ternak	Rp	14.775.156.344	*Subsidies - Ships Cattle*
Jumlah	**Rp**	**2.461.769.659.728**	***Total***

Lihat Catatan 21 dan 43.

See Note 21 and 43.

Pada tahun 2016 Perseroan membukukan pendapatan tambahan Public Service Obligation (PSO) sebesar Rp78.715.467.539 yang merupakan kekurangan dari pendapatan PSO berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Perhitungan Dana Penyelenggaraan KPP PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2016 tanggal 27 Februari 2017. Manajemen berkeyakinan bahwa jumlah kekurangan sebesar Rp78.715.467.539 telah memenuhi persyaratan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 173/PMK.02/2013 tahun 2013 tersebut dan dapat dicairkan.

In 2016, the Company recorded an additional income of Public Service Obligation (PSO) amounting to Rp78,715,467,539 which is a deficiency of PSO revenue based on the Minutes of Examination of Calculation of the Fund for the Implementation of KPP of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) for Fiscal Year 2016 dated 27 February 2017. Management believes that the amount of deficiency amounting to Rp78,715,467,539 has met the requirements of Regulation of the Minister of Finance No. 173 / PMK.02 / 2013 of 2013 and can be disbursed.

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

32. BEBAN POKOK PENDAPATAN USAHA / *32. COST OF REVENUES*

	2017	2016	
Perkapalan	1.432.966.113.744	1.490.102.712.526	*Shipping*
Pegawai	839.199.914.841	456.341.559.769	*Employee*
Pemeliharaan dan Perbaikan	384.944.638.739	426.351.428.754	*Maintenance and Repair*
Penyusutan dan Amortisasi	362.848.191.362	232.704.889.084	*Amortization and Depreciation*
Penumpang	306.730.836.564	179.079.171.358	*Passenger*
Pelayanan Kesehatan	172.122.151.544	268.605.040.488	*Health Services*
Sewa	58.266.709.817	42.994.681.000	*Rent*
Asuransi	56.986.731.284	59.149.746.246	*Insurance*
Perhotelan	12.499.776.156	3.735.361.253	*Hospitality*
Perbengkelan	12.298.909.214	11.121.295.375	*Workshop*
Kendali Mutu Pelayanan	6.473.352.683	9.362.746.329	*Quality Service Control*
Muatan Ternak	4.732.988.825	265.405.749.795	*Animal Cargo*
Pajak dan Retribusi	1.851.572.503	8.633.755	*Taxes and Levies*
Beban Pokok Lainnya	122.107.703	38.323.400	*Other Cost of Revenues*
Jumlah	**3.652.043.994.978**	**3.445.001.339.133**	***Total***

33. BEBAN PEMASARAN DAN DISTRIBUSI / *33. MARKETTING AND DISTRIBUTION EXPENSES*

	2017	2016	
Penjualan	15.118.685.616	9.012.000.884	*Sales*
Kehumasan	4.920.252.462	2.905.190.606	*Public Relations*
Promosi dan Periklanan	2.759.416.133	2.559.390.204	*Promotion and Advertising*
Pemasaran Lainnya	353.481.430	699.305.084	*Others Marketing*
Jumlah	**23.151.835.641**	**15.175.886.778**	***Total***

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI / *34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*

	2017	2016	
Pegawai	288.025.931.578	327.091.065.946	*Employees*
Pajak dan Restribusi	27.235.251.670	18.872.626.807	*Taxes and Levies*
Pemeliharaan dan Perbaikan	24.421.881.753	16.650.200.222	*Maintenance and Repair*
Rumah Tangga	21.913.398.925	37.995.403.121	*Household*
Imbalan Paska Kerja	21.417.153.114	9.230.284.991	*Post-Employment Benefits*
Adminsitrasi Perkantoran	16.512.819.679	20.751.247.866	*Office administration*
Penyusutan dan Amortisasi	12.840.673.320	15.065.711.980	*Amortization and Depreciation*
Konsultan dan Audit	10.457.716.767	10.303.228.564	*Audit and Consultant*
Sewa	9.133.480.251	7.548.875.933	*Rent*
Perencanaan dan Pengembangan	6.905.279.650	439.844.250	*Development and Planning*
Asuransi	4.809.024.558	14.126.215.850	*Insurance*
PKBL	2.111.847.807	94.430.838	*PKBL*
Provisi Penurunan Nilai Piutang	-	38.627.968.381	*Provision of Impairment of Receivables*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Denda/Klaim	1.217.608.447	2.284.780.672	*Penalties / Claims*
Keamanan dan Keselamatan	1.213.075.238	-	*Security and Safety*
Saldo dipindahkan	**448.215.142.757**	**519.081.885.422**	***Carried forward balance***

34. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI (lanjutan) ***34. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES*** *(continue*

	2017	2016	
Saldo pindahan	**448.215.142.757**	**519.081.885.422**	***Brought forward balance***
Olah Raga dan Kesenian	538.849.057	300.213.822	*Sport and Art*
Sumbangan	302.648.141	1.037.110.742	*Donations*
Kerugian Penurunan Nilai Aset Non Keuangan	287.204.334	-	*Loss on Impairment of Non-Financial Assets*
Lainnya	8.024.893.310	3.605.273.350	*Others*
Jumlah	**457.368.737.599**	**524.024.483.336**	***Total***

35. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA ***35. NON OPERATING INCOME (EXPENSES)***

	2017	2016	
a. Pendapatan Non Usaha:			***a. Non-Operating Revenues:***
Bunga	44.703.924.402	31.837.886.686	*Interest*
Sewa	13.984.118.564	18.583.305.085	*Rent*
Jasa Administrasi	5.699.846.076	7.536.185.912	*Administration Services*
Klaim Asuransi	4.727.394.885	254.487.045	*Insurance Claim*
Keuntungan Penjualan Aset	4.604.463.293	2.336.589.063	*Gains of Asset Sale*
Jasa Giro	3.829.970.595	4.330.301.767	*Current account service*
Keuntungan Selisih Kurs	2.243.458.642	3.771.077.346	*Foreign Exchange Gains*
Pelunasan Piutang Dihapuskan	87.068.007	678.985.493	*Repayment of Accounts Receivable*
Denda	-	618.230.976	*Penalties*
Lainnya	33.823.501.326	17.532.361.869	*Others*
Sub Jumlah	**113.703.745.790**	**87.479.411.242**	***Sub Total***
b. Beban Non Usaha:			***b. Non-Operating Expenses:***
Administrasi Bank	4.059.249.080	-	*Bank Administration*
Kerugian Penjualan Aset Keuangan	57.257.501	673.192.682	*Loss on Sale of Financial Assets*
Kerugian Selisih Kurs	1.568.831.084	4.008.127.932	*Foreign Exchange Losses*
Beban Keuangan	7.059.135.487	25.338.234.081	*Financial Expenses*
Lainnya	5.912.481.078	878.559.851	*Others*
Sub Jumlah	**18.656.954.229**	**30.898.114.546**	***Sub Total***
Jumlah Pendapatan (Beban) Non Usaha, Bersih	**95.046.791.560**	**56.581.296.695**	***Total Non Operating Income (Expenses), Net***

Mendasar pada Risalah Lelang Kapal Ganda Dewata No. RL-002/PLII.04/2017, tanggal 2 Agustus 2017, Perseroan membuku keuntungan atas penjualan kapal Ganda Dewata sebesar Rp4.499.945.962 dari harga lelang sebesar Rp13.000.000.000 termasuk Pajak Pertambahan Nilai atau sebesar Rp11.818.181.818 dengan nilai buku kapal Rp7.318.235.856.

Based on to the Minutes of Ganda Dewata Vessel Auction in 2017, the Company profits on the sale of Ganda Dewata vessels amounting to Rp4.499.945.962 from the auction price of Rp13.000.000.000 include Value Added Tax or amounth Rp11.818.181.818 with book value of Vessel Rp7.318.235.856.

Keuntungan penjualan aset tetap di tahun 2016 merupakan keuntungan pada penjualan kendaraan dinas yang telah habis masa ekonomisnya, sesuai dengan SK Direksi No. 05.11/I/SK/HKO.01/2015 tanggal 11 Mei 2015.

Gain from sales of fixed assets in 2016 is a gain on the sale of official vehicles that had run its economic future, according to the Decree of Directors No. 5:11 / I / SK / HKO.01 / 2015 dated May 11, 2015.

35. PENDAPATAN (BEBAN) NON USAHA (lanjutan)

35. NON OPERATING INCOME (EXPENSES) *(continued)*

Beban keuangan merupakan beban bunga atas pinjaman bank dan lembaga keuangan lainnya sebesar Rp7.059.135.487 dan Rp25.338.234.081 pada tahun 2017 dan 2016.

Finance expense represents interest expense on bank loans and other financial institutions amounting to Rp7.059.135.487 and Rp25.338.234.081 in 2017 and 2016.

36. INFORMASI SEGMEN USAHA

36. SEGMENT INFORMATION

a. Pendapatan usaha bersih menurut wilayah

a. Net operating income by region.

	2017		2016		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	73.721.812.630	1,68%	75.516.393.681	1,79%	*Sumatera*
Jawa	3.451.406.449.804	78,53%	3.190.626.870.545	70,22%	*Jawa*
Kalimantan	114.256.842.937	2,60%	113.967.418.822	4,39%	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	120.073.368.932	2,73%	114.697.529.843	2,95%	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	635.386.217.857	14,46%	717.591.558.349	19,99%	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Jumlah	**4.394.844.692.160**	**100%**	**4.212.399.771.240**	**100,00%**	***Total***

b. Hasil usaha laba (rugi)-kotor menurut wilayah

b. Results of gross operations income (loss) by region

	2017		2016		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	42.554.057.373	5,73%	53.331.448.023	7,14%	Sumatera
Jawa	501.306.840.981	67,49%	245.154.265.304	33%	Jawa
Kalimantan	79.407.360.514	10,69%	97.714.123.348	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nustra	70.637.368.467	9,51%	79.294.072.464	2,95%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	48.895.069.848	6,58%	271.932.492.842	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Jumlah	**742.800.697.183**	**100%**	**747.426.401.981**	**100,00%**	***Total***

c. Aset menurut wilayah

c. Assets by region

	2017		2016		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	62.323.009.504	0,97%	53.237.414.745	0,86%	Sumatera
Jawa	6.150.749.907.567	91,83%	5.703.715.239.719	70,22%	Jawa
Kalimantan	87.161.123.824	1,59%	105.748.553.185	4,39%	Kalimantan
Bali dan Nustra	79.037.211.242	1,26%	80.603.081.346	2,95%	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	53.832.243.474	4,50%	268.757.496.174	19,99%	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	(1.039.297.858)	0,01%	(970.836.264)	19,99%	Singapore
Jumlah	**6.432.064.197.753**	**100%**	**6.211.090.948.905**	**100,00%**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

36. INFORMASI SEGMEN USAHA (lanjutan) / ***36. SEGMENT INFORMATION*** *(continued)*

d. Aset Tetap menurut wilayah / *d. Fixed assets by region*

	2017		2016		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	1.854.875.114	0,05	2.703.439.494	0,08	*Sumatera*
Jawa	3.492.729.972.074	97,82	3.372.706.350.937	97,28	*Jawa*
Kalimantan	17.349.993.823	0,49	17.892.052.618	0,52	*Kalimantan*
Bali dan Nustra	7.050.471.274	0,20	6.767.545.680	0,20	*Bali dan Nustra*
Sulawesi, Maluku dan Papua	51.436.419.054	1,44	66.970.174.132	1,93	*Sulawesi, Maluku dan Papua*
Singapore	7.849.800	0,00	9.812.256	0,00	*Singapore*
Jumlah	**3.570.429.581.139**	**100%**	**3.467.049.375.117**	**100%**	***Total***

e. Biaya penyusutan menurut wilayah / *e. Depreciation costs by region*

	2017		2016		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	416.514.802	11,12%	329.519.314	0,13	Sumatera
Jawa	367.479.441.926	98,09%	240.463.516.572	98,31	Jawa
Kalimantan	1.342.828.573	0,36%	835.219.752	0,34	Kalimantan
Bali dan Nustra	513.948.588	0,14%	521.176.556	0,21	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	4.884.663.198	1,30%	2.444.317.356	1,00	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	1.962.456	0,00%	6.498.651	0,00	Singapore
Jumlah	**374.639.359.543**	**100%**	**244.600.248.201**	**100%**	***Total***

f. Liabilitas menurut wilayah / *f. Liabilities by region.*

	2017		2016		
	Rp	%	Rp	%	
Sumatera	13.388.915.010	1,84	6.029.073.406	0,81	Sumatera
Jawa	646.466.556.067	88,75	716.349.052.038	96,06	Jawa
Kalimantan	10.752.180.806	1,48	3.386.494.502	0,45	Kalimantan
Bali dan Nustra	11.173.401.196	1,53	3.639.241.176	0,49	Bali dan Nustra
Sulawesi, Maluku dan Papua	46.464.730.764	6,38	16.345.044.818	2,19	Sulawesi, Maluku dan Papua
Singapore	170.480.938	0,02	16.438.772	0,00	Singapore
Jumlah	**728.416.264.781**	**100%**	**745.765.344.712**	**100,00%**	***Total***

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015

a. Penyesuaian Kembali

Perseroan melakukan penyajian kembali laporan keuangan untuk tahun yang berakhir tanggal 31 Desember 2016 dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 yang disebabkan penyesuaian dan pengaruh penerapan PSAK 24 (Revisi 2013) oleh PT. PIDC selaku entitas anak. Berikut saldo akun-akun yang berpengaruh akibat dari penyesuaian tersebut.

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015

a. Restatement

The Company restated its financial statements for the year ended 31 December 2016 and 1 January 2016/31 December 2015 due to adjustments to account balances and the effect of the adoption of PSAK 24 (Revised 2013) by PT. PIDC as subsidiary. Here are the balances of the affected accounts as a result of the adjustment.

	31 Desember/*December* 2016			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *Previously Reported*	**Penyesuaian/ *Adjustments***	**Disajikan Kembali/ *Restated***	
Aset Tidak Lancar:				*Non Current Assets:*
Aset Pajak Tangguhan	45.545.884.702	551.270.149	46.097.154.851	*Deferred Tax Assets*
Liabilitas Jangka Pendek:				*Short Term Liability:*
Utang Pajak	51.724.160.922	(122.707.596)	51.601.453.326	*Tax Payable*
Liabilitas Jangka Panjang:				*Long Term Liability:*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	76.369.343.246	2.205.080.597	78.574.423.843	*Long Term Employee Benefits*
Ekuitas:				*Equity:*
Saldo Defisit	(2.277.574.901.722)	(1.285.720.894)	(2.278.860.622.616)	*Retained Earning (Deficits)*
Komponen Ekuitas Lainnya	(52.734.751.182)	(245.381.958)	(52.980.133.140)	*OtherComponents Equity*
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain:				*Profit or Loss and Other Comprehensive Income :*
Beban Umum dan Administrasi	(523.723.335.499)	(301.147.837)	(524.024.483.336)	*General and Administrative*
Manfaat Pajak Tangguhan	8.793.062.255	75.286.959	8.868.349.214	*Defereed Tax Benefits*
Laba Tahun Berjalan	248.772.507.715	(225.860.878)	248.546.646.837	*Profit for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain	(33.419.554.864)	(207.569.498)	(33.627.124.362)	*Other Comprehensive Income*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	215.352.952.851	(433.430.376)	214.919.522.475	*Total Comprehensive Profit of the Year*

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015 (lanjutan)

a. Penyesuaian Kembali (lanjutan)

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015 *(continued)*

a. Restatement *(continued)*

	31 Desember/*December* 2015			
	Dilaporkan Sebelumnya/ *Previously Reported*	**Penyesuaian/ *Adjustments***	**Disajikan Kembali/ *Restated***	
Aset Tidak Lancar:				*Non Current Assets:*
Aset Pajak Tangguhan	36.750.911.947	406.793.357	37.157.705.304	*Deferred Tax Assets*
Liabilitas Jangka Pendek:				*Short Term Liability:*
Utang Pajak	42.579.331.334	(122.707.596)	42.456.623.738	*Tax Payable*
Liabilitas Jangka Panjang:				*Long Term Liability:*
Liabilitas Imbalan Pasca Kerja	33.030.927.267	1.627.173.429	34.658.100.696	*Long Term Employee Benefits*
Ekuitas:				*Equity:*
Saldo Defisit	(2.427.334.648.926)	(1.059.860.016)	(2.428.394.508.942)	*Retained Earning (Deficits)*
Komponen Ekuitas Lainnya	(17.812.331.538)	(37.812.460)	(17.850.143.998)	*OtherComponents Equity*
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain:				*Profit or Loss and Other Comprehensive Income :*
Beban Umum dan Administrasi	(446.065.523.766)	(222.237.578)	(446.287.761.344)	*General and Administrative*
Beban Pajak Kini	(31.521.033.602)	122.707.596	(31.398.326.006)	*Current Tax Expenses*
Manfaat Pajak Tangguhan	10.754.431.735	55.559.395	10.809.991.130	*Defereed Tax Benefits*
Laba (Rugi) dan Penghasilan Komprehensif Lain:				*Profit or Loss and Other Comprehensive Income :*
Laba Tahun Berjalan	98.930.873.361	(43.970.588)	98.886.902.773	*Profit for The Year*
Penghasilan Komprehensif Lain	2.079.244.463	(37.812.460)	2.041.432.003	*Other Comprehensive Income*
Laba Komprehensif Tahun Berjalan	101.010.117.824	(81.783.047)	100.928.334.777	*Total Comprehensive Profit of the Year*

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015 (lanjutan)

b. Penyesuaian penyajian

Beberapa akun pada laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2016 dan 01 Januari 2016/31 Desember 2015 di reklasifikasi menyesuaikan penyajian laporan keuangan konsolidasian tahun 2017. Perbandingan saldo-saldo akun laporan keuangan konsolidasian yang disajikan kembali dengan yang dilaporkan sebelumnya sebagai berikut:

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015 *(continued)*

b. Presentation Adjustments

Multiple accounts in the consolidated financial statements for the years ended December 31, 2016 and 01 January 2016/31 December 2015 are reclassified in accordance with the presentation of the consolidated financial statements of 2017. Comparison of the consolidated balance sheet of account balances relative to those previously reported as follows:

	31 Desember/*December* 2016		
	Reklasifikasi Penyajian/ *Presentation Adjustments*		
	Sebelum/*Before*	**Sesudah/*After***	
Aset Lamcar:			*Current Assets:*
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	710.983.723.622	-	*Cash and Restricted Cash Equivalent*
Penempatan Jangka Pendek	5.000.000.000	-	*Short Term Investment*
Piutang Lain-Lain	7.889.986.555	-	*Other Receivables*
Pendapatan Masih Harus Diterima	132.144.918.028	-	*Accrued Revenues*
Aset Keuangan Lancar Lainnya:			*Other Current Financial Assets:*
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	710.983.723.622	*Cash and Restricted Cash Equivalent*
Penempatan Jangka Pendek	-	5.000.000.000	*Short Term Investment*
Piutang Lain-Lain	-	7.889.986.555	*Other Receivables*
Pendapatan Diterima Dimuka	-	132.144.918.028	*Prepaid Revenues*
Aset Tidak Lancar			*Non Current Assets:*
Aset Tetap	3.111.824.902.499	-	*Fixed Assets*
Alat Produksi	-	3.111.824.902.499	*Production Tools*
Aset Lain-Lain:			*Other Assets:*
Biaya Perolehan:			*Acquisition Cost:*
Aset Kerja Sama Operasi	199.642.233.072	-	*Joint Operation Assets*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	27.880.102.445	-	*Fixed Assets Damage*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	1.322.503.811	-	*Inventory Damage*
Piutang Usaha Tidak Tertagih	6.041.695.311	-	*Account Receivable Not Collectible*
Lainnya	11.502.410.249	-	*Other*
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai:			*accumulated Depreciation and Impairment*
Aset Kerja Sama Operasi	(82.763.622.808)	-	*Joint Operation Assets*
Lainnya	(2.129.806.401)	-	*Other*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	(1.322.503.811)	-	*Inventory Damage*
Piutang Usaha Tidak Tertagih	(6.041.125.894)	-	*Account Receivable Not Collectible*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	(25.724.295.945)	-	*Fixed Assets Damage*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015 (lanjutan)

b. Penyesuaian penyajian (lanjutan)

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015 *(continued)*

b. Presentation Adjustments *(continued)*

	31 Desember/*December* 2016		
	Reklasifikasi Penyajian/ *Presentation Adjustments*		
	Sebelum/*Before*	Sesudah/*After*	
Alat Produksi:			
Aset Kerja Sama Operasi	-	199.642.233.072	*Joint Operation Assets*
Akumulasi Penyusutan	-	(82.763.622.808)	*Accumulated Depreciation*
Aset Tidak Lancar Lainnya:			*Other Non Current Assets:*
Biaya Perolehan:			*Acqusition Cost:*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	-	27.880.102.445	*Fixed Assets Damage*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	-	1.322.503.811	*Inventory Damage*
Piutang Usaha Tidak Tertagih	-	6.041.695.311	*Account Receivable Not Collectible*
Lainnya	-	11.502.410.249	*Other*
Akumulasi Penyusutan dan Penurunan Nilai:			*accumulated Depreciation and Impairment:*
Lainnya	-	(2.129.806.401)	*other*
Persediaan Tidak Dapat Digunakan	-	(1.322.503.811)	*Inventory Damage*
Piutang Usaha Tidak Tertagih	-	(6.041.125.894)	*Account Receivable Not Collectible*
Aset Tetap Tidak Berfungsi	-	(25.724.295.945)	*Fixed Assets Damage*
Liabilitas Jangka Pendek			*Short Term Liabilities*
Uang Muka Diterima	15.551.958.765	-	*Received Advance*
Pendapatan Diterima Dimuka	18.540.675.865	-	*Prepaid Revenue*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan		34.092.634.630	*Prepaid Revenue/Deposit/ Deposit Guarantee*
Utang Lain-Lain:			*Other Payable:*
Utang KSO	42.535.017.328	-	*Joint Operatioan Payable*
Jaminan Diterima	14.547.989.218	-	*Deposit Received*
Asuransi	7.349.452.747	-	*Insurance*
Pas Pelabuhan	6.089.518.044	-	*Pas Port*
Dana Pensiun YKPP	7.662.781.423	-	*Pensions Fund YKPP*
BPJS Ketenagakerjaan	864.607.560	-	*BPJS Employment*
Pihak Ketiga	5.186.853.534	-	*Third Parties*
Lainnya	495.855.165	-	*Other*
Entitas Anak	2.372.941.353	-	*Subsidiary*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan		14.547.989.218	*Prepaid Revenue/Deposit/ Deposit Guarantee*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya		72.557.027.154	*Other Short Term Financial Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang:			*Long Term Liabilities:*
Pinjaman Jangka Panjang	79.069.847.504	-	*Long Term Debt*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	-	43.523.055.567	*Long Term Non Business Debt*

Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	-	35.546.791.937	*Long Term Financial Institution and Bank Loan*

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015 (lanjutan)

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015 *(continued)*

b. Penyesuaian penyajian (lanjutan)

b. Presentation Adjustments *(continued)*

	31 Desember/*December* 2016		
	Reklasifikasi Penyajian/ *Presentation Adjustments*		
	Sebelum/*Before*	Sesudah/*After*	
Pendapatan Usaha:			*Operating Revenues:*
Beban Pajak Penghasilan Pasal 15	(42.863.499.798)	-	*Income Tax Expense Article 15*
Jumlah Pendapatan Usaha	4.201.751.540.240	4.244.615.040.038	*Total Operating Revenues*
Beban Pokok Pendapatan Usaha:			*Cost of Revenues:*
Beban Komisi Penjualan	9.206.210.884	-	*Commission Sales Expense*
Beban Pajak Penghasilan Pasal 21	117.588.242	-	*Income Tax Expense Article 21*
Jumlah Beban Pokok Pendapatan Usaha	3.454.325.138.259	3.445.001.339.133	*Total Cost of Revenues*
Beban Pemasaran dan Distribusi:			*Marketing and Distribution Expenses:*
Beban Komisi Penjualan	-	9.206.210.884	*Commission Sales Expense*
Jumlah Beban Pemasaran dan Distribusi	5.969.675.894	15.175.886.778	*Total General and Administrative Expenses*
Beban Umum dan Administrasi:			*General and Administrative Expenses:*
Beban Lain-lain	-	2.284.780.672	*Others*
Beban Pajak Penghasilan Pasal 21	-	117.588.242	*Income Tax Expense Article 21*
Beban Pajak Tahun Lalu	-	14.174.615.931	*Previously Tax Expense*
Jumlah Beban Umum dan Administrasi	507.447.498.491	524.024.483.336	*Total General and Administrative Expenses*
Beban Non Usaha:			*Non Operating Expenses:*
Beban Lain-lain	2.284.780.672	-	*Others*
Beban Pajak Tahun Lalu	14.174.615.931	-	*Previously Tax Expense*
Beban Keuangan	-	25.338.234.081	*Financial Expenses*
Jumlah Beban Non Usaha	22.019.277.068	30.898.114.546	*Total Non Operating Expenses*
Beban Pajak Penghasilan:			*Income Tax Expenses:*
Beban Final Pajak Kini	-	(42.863.499.798)	*Current Final Tax Expenses*
Jumlah Beban Pajak Penghasilan	(34.452.830.066)	(77.316.329.864)	*Total Income Tax Expenses*

	31 Desember/*December* 2015		
	Reklasifikasi Penyajian/ *Presentation Adjustments*		
	Sebelum/*Before*	Sesudah/*After*	
Aset Lamcar:			*Current Assets:*
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	101.672.900.000	-	*Cash and Restricted Cash Equivalent*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Penempatan Jangka Pendek	5.000.000.000	-	*Short Term Investment*
Piutang Lain-Lain	12.086.058.871	-	*Other Receivables*
Pendapatan Masih Harus Diterima	356.709.485.667	-	*Accrued Revenues*

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015 (lanjutan)

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015 *(continued)*

b. Penyesuaian penyajian (lanjutan)

b. Presentation Adjustments *(continued)*

	31 Desember/*December* 2015		
	Reklasifikasi Penyajian/ *Presentation Adjustments*		
	Sebelum/*Before*	Sesudah/*After*	
Aset Keuangan Lancar Lainnya:			*Other Current Financial Assets:*
Kas dan Setara Kas yang Dibatasi Penggunaannya	-	101.672.900.000	*Cash and Restricted Cash Equivalent*
Penempatan Jangka Pendek	-	5.000.000.000	*Short Term Investment*
Piutang Lain-Lain	-	12.086.058.871	*Other Receivables*
Pendapatan Diterima Dimuka	-	356.709.485.667	*Prepaid Revenues*
Biaya Dibayar Dimuka:			*Prepaid Expenses:*
Biaya Sewa Dialokasikan	821.135.261	-	*Rent Allocation Cost*
Aset Lancar Lainnya	-	821.135.261	*Other Current Assets*
Aset Tetap	3.228.703.512.764	-	*Fixed Assets*
Alat Produksi	-	3.228.703.512.764	*Production Equipment*
Aset Tidak Lancar			*Non Current Assets*
Aset Lain-Lain:			*Other Assets:*
Aset Kerja Sama Operasi	134.608.188.000	-	*Joint Operation Assets*
Aset dan Persediaan Tidak dapat digunakan	491.006.710	-	*Inventory and Fixed Asstes not Use*
Lainnya	1.302.023.206	-	*Others*
Entitas Anak	1.686.849.096		*Subsidiaries*
Alat Produksi:			*Production Equipment:*
Aset Kerja Sama Operasi	-	134.608.188.000	*Joint Operation Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya:			*Other Non Current Assets:*
Aset dan Persediaan Tidak Dapat Digunakan	-	491.006.710	*Inventory and Fixed Asstes not Use*
Lainnya	-	1.302.023.206	*Others*
Entitas Anak	-	1.686.849.096	*Subsidiaries*
Liabilitas Jangka Pendek			*Short Term Liabilities*
Uang Muka Diterima	23.580.326.534	-	*Received Advance*
Pendapatan Diterima Dimuka	29.493.047.584	-	*Prepaid Revenue*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan		53.073.374.118	*Prepaid Revenue/Deposit/ Deposit Guarantee*
Utang Bunga	57.892.540.153	-	*Interest Payable*
Utang Lain-Lain:			*Others Payable:*
Utang KSO	65.161.755.998	-	*Joint Operatioan Payable*
Jaminan Diterima	13.946.773.546	-	*Deposits Received*
Asuransi	6.524.163.216	-	*Insurance*
Pas Pelabuhan	3.746.253.158	-	*Pas Port*
Dana Pensiun YKPP	3.013.928.694	-	*Pensions Fund YKPP*

BPJS Ketenagakerjaan	679.739.281	-	*BPJS Employment*
Entitas Anak	7.395.247.578	-	*Subsidiary*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan		13.946.773.546	*Prepaid Revenue/Deposit/ Deposit Guarantee*

37. PENYAJIAN KEMBALI SALDO AKUN LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR 31 DESEMBER 2016 DAN 01 JANUARI 2016/31 DESEMBER 2015 (lanjutan)

37. RESTATEMENT OF BALANCE OF CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS FOR THE YEARS ENDED 31 DECEMBER 2016 AND 01 JANUARY 2016/31 DECEMBER 2015 *(continued)*

b. Penyesuaian penyajian (lanjutan)

b. Presentation Adjustments *(continued)*

	31 Desember/*December* 2015		
	Reklasifikasi Penyajian/ *Presentation Adjustments*		
	Sebelum/*Before*	Sesudah/*After*	
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya		144.413.628.078	*Others Short Term Financial Liabilities*
Liabilitas Jangka Panjang:			*Long Term Liabilities:*
Pinjaman Jangka Panjang	369.537.490.712	-	*Long Term Loan*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	-	333.185.536.052	*Long Term Non Business Loan*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	-	36.351.954.660	*Long Term Financial Institution and Bank Loan*

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI

38. RELATED PARTY TRANSACTION

Sifat hubungan dan jenis transaksi yang material dengan pihak - pihak berelasi dengan rincian sebagai berikut:

The nature of relationship and type of material transactions with parties who have a special relationship with the following details:

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/*Transactions*
1.	PT Bank Mandiri (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas / *Cash equivalent*
2.	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas / *Cash equivalent*
3.	PT Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas / *Cash equivalent*
4.	PT Bank Tabungan Negara (Persero), Tbk	Institusi Keuangan yang Dikendalikan Oleh Pemerintah R.I. / *Financial Institution Controlled by Goverment of The Republic of Indonesia*	Setara Kas / *Cash equivalent*
5.	Kementerian Perhubungan c.q. Karo Perencanaan	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
6.	PT Pelabuhan Indonesia I, II,III dan IV	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
7.	PT ASDP Indonesia Ferry	Entitas Lelang yang Dikelola Oleh Pemerintah R.I. / *Auction Entity Controlled by the Goverment of The Republic of Indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*

8.	PT Krakatau Steel (Persero) Tbk	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*

38. TRANSAKSI DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI ***38. RELATED PARTY TRANSACTION***

No.	Pihak-Pihak Berelasi/ *Related Parties*	Sifat Hubungan Pihak-Pihak Berelasi/ *Nature of relationship Related Parties*	Transaksi/*Transactions*
9.	PT Pupuk Kaltim (Persero)	Entitas yang dikelola oleh Pemerintah R.I. / *Entity Controlled by the Goverment of The Republic of indonesia*	Utang Piutang / *Receivable - Payable*
10.	Yayasan Kesehatan Pensiunan Pelni	Personil Kunci / *Common Key Management*	Utang Piutang / Receivable - Payable
11.	PT Sarana Gama Sejahtera	Personil Kunci / *Common Key Management*	Utang Piutang / Receivable - Payable
12.	PT Sarana Bandar Nasional	Entitas Anak / *Subsidiaries*	Penyertaan, Hutang Piutang / *Interest, Receivable - payable*
13.	PT Pelita Indonesia Djaya	Entitas Anak / *Subsidiaries*	Penyertaan, Hutang Piutang / *Interest, Receivable - payable*
14	PT Rumah Sakit Pelni	Entitas Anak / *Subsidiaries*	Penyertaan, Hutang Piutang / *Interest, Receivable - payable*

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN ***39. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES***

Berikut ikhtisar nilai tercatat dan estimasi nilai wajar instrumen keuangan Perusahaan yang dinyatakan dalam laporan posisi keuangan (neraca):

Here's an overview of the carrying value and the estimated fair value of financial instruments are stated in the statement of financial position (balance sheet):

	31 Desember/*December 31, 2017*		
	Nilai Tercatat/ *Carrying Value*	Nilai Wajar/ *Fair Value*	
Aset Keuangan:			***Financial Assets:***
Kas dan Setara Kas	1.338.781.110.919	1.338.781.110.919	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	204.786.564.118	204.786.564.118	*Account Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	649.901.221.742	649.901.221.742	*Other Current Financial Assets*
Jumlah	**2.193.468.896.779**	**2.193.468.896.779**	***Total***
Liabilitas Keuangan:			***Financial Liability:***
Utang Usaha	155.769.014.126	155.769.014.126	*Account Payables*
Beban Akrual	171.423.202.038	171.423.202.038	*Accrued Expenses*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	33.571.237.683	33.571.237.683	*Current Portion for Long Term Liabilities*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	49.554.163.437	49.554.163.437	*Prepaid Income/Deposits/ Deposit Guarantee*
Liabiltias Keuangan Jangka Pendek Lainnya	52.357.538.981	52.357.538.981	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	37.687.297.741	37.687.297.741	*Other Long Term Non Business Debt*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	29.840.753.913	29.840.753.913	*Long Term Financial Institution and Bank Loan*
Jumlah	**530.203.207.919**	**530.203.207.919**	***Total***

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

39. NILAI WAJAR ASET DAN LIABILITAS KEUANGAN (lanjutan)

39. FAIR VALUE OF FINANCIAL ASSETS AND LIABILITIES *(continued)*

	31 Desember/*December 2016*		
	Nilai Tercatat/ ***Carrying Value***	**Nilai Wajar/** ***Fair Value***	
Aset Keuangan:			***Financial Assets:***
Kas dan Setara Kas	885.614.536.588	885.614.536.588	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	272.795.406.111	272.795.406.111	*Account Receivable*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	856.018.628.204	856.018.628.204	*Non-Current Financial Assets - Others*
Jumlah	**2.014.428.570.903**	**2.014.428.570.903**	***Total***
Liabilitas Keuangan:			***Financial Liability:***
Utang Usaha	157.386.238.502	157.386.238.502	*Account Payables*
Beban Akrual	219.932.451.249	219.932.451.249	*Accrued Expenses*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	40.085.652.287	40.085.652.287	*Current Portion for Long Term Liabilities*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	48.640.623.848	48.640.623.848	*Prepaid Income/Deposits/ Deposit Guarantee*
Liabiltias Keuangan Jangka Pendek Lainnya	72.557.027.154	72.557.027.154	*Other Short Term Financial Liabilities*
Utang Non Usaha Jangka Panjang	43.523.055.567	43.523.055.567	*Other Long Term Non Business Debt*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang	35.546.791.937	35.546.791.937	*Long Term Financial Institution and Bank Loan*
Jumlah	**617.671.840.544**	**617.671.840.544**	***Total***

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN

40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE

Keterangan	**2017**	**2016**	**Deviasi/** ***Deviation*** **(%)**	***Description***
1	**2**	**3**	**4=(2-3)/3**	**1**
Kas dan Setara Kas (KS)	1.338.781.110.919	885.614.536.588	51,17	*Cash and Cash Equivalents (CC)*
Piutang Usaha (PU)	204.786.564.118	272.795.406.111	(24,93)	*Trade Receivables (TR)*
Persediaan (SD)	473.077.781.262	462.927.981.397	2,19	*Inventory (IN)*
Aset Lancar (AL)	2.765.448.237.585	2.542.571.032.329	8,77	*Current Assets (CA)*
Penyusutan dan Amortisasi (PA)	331.808.371.163	265.019.864.571	25,20	*Depreciation and Amortization (DA)*
Jumlah Aset (JA)	6.432.064.197.753	6.211.642.219.056	3,55	*Total Assets (TA)*
Liabilitas Jk.Pendek (KL)	526.145.732.124	590.203.446.366	(10,85)	*Short-Term Liabilities (STL)*
Liabilitas Jk. Panjang (KJP)	202.270.532.657	157.644.271.347	28,31	*Long-Term Liabilities (LTL)*
Jumlah Kewajiban (JK)	728.416.264.781	747.847.717.713	(2,60)	*Total Liabilities (TL)*
Modal Kerja Bersih (MKB) = (AL - KL)	2.239.302.505.461	1.952.367.585.963	14,70	*Net Working Capital (WC)=(CA)-(STL)*
Akumulasi Saldo Laba (RE)	(2.250.844.492.727)	(2.278.860.622.616)	(1,23)	*Retained Earnings (RE)*
Ekuitas (EK)	5.703.647.932.972	5.463.794.501.343	4,39	*Equity (EQ)*
Laba Bersih (LRB)	276.881.493.533	248.546.646.837	11,40	*Net Income (NI)*
Laba Bersih (LRB1)	239.451.993.272	214.919.522.475	11,41	*Net Income (NI1)*
Modal Sendiri (MS) = (EK-LRB)	5.426.766.439.439	5.215.247.854.506	4,06	*Own Capital (OC)=(EQ-PCY)*
Pajak Penghasilan (PJ)	80.445.421.970	68.447.980.650	17,53	*Income Tax (IT)*

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
DAN ENTITAS ANAKNYA
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN
Tanggal 31 Desember 2017 dan
untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016
dan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal
Tersebut - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
AND IT'S SUBSIDIARIES
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS
As of December 31, 2017 and
for the Year Then Ended
(With Comparative
As of December 31, 2016 and
and for the Year Then Ended - Restated)
(Expressed In Full Rupiah, Unless Otherwise Stated)

Jumlah Pendapatan Usaha (JPU)	4.394.844.692.160	4.244.615.040.038	3,54	*Total Op. Revenue (TOP)*
Total Pendapatan (TP)	4.508.548.437.950	4.332.094.451.279	4,07	*Total Revenue (TR)*
Laba Kotor (LK)	742.800.697.182	799.613.700.905	(7,11)	*Gross Profit (GP)*

40. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

40. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE *(continued)*

Keterangan	2017	2016	Deviasi/ *Deviation* (%)	*Description*
1	2	3	4=(2-3)/3	1
Biaya Bunga (BB)	7.059.135.487	25.338.234.081	(72,14)	*Interest Cost (IC)*
Capital Employed (CE)	6.355.469.732.332	6.205.459.305.098	2,42	*Capital Employee (CE)*
EBIT=(LRB+BB+PJ)	364.386.050.990	342.332.861.568	6,44	*EBIT=(NI+IC+T)*
EBITDA=(LRB+BB+PJ+PA)	696.194.422.153	410.780.842.218	69,48	*EBITDA=(EBIT+DA)*

Keterangan	Satuan / *Unit* (%; kali/*times*; hari/*days*)	2017	2016	Deviasi / Deviation (%)	*Description*
a	*b*	*c*	*d*	*e=(c-d)/d*	*a*
I. Rasio Likuiditas					***I. Liquidity Ratios***
Rasio Lancar (AL/KL)	%	525,60	430,80	22,01	*Current Ratio (AL/KL)*
Rasio Cepat (KS + PU) / KL	%	293,37	196,27	49,47	*Quick Ratio (KS + PU) / KL*
Rasio Kas (KS / KL)	%	254,45	150,05	69,57	*Cash Ratio (KS / KL)*
II. Rasio Leverage					***II. Leverage Ratios***
Rasio Kewajiban atas Aset (JK/JA)	%	11,32	12,04	(5,94)	*Debt to Assets Ratio (JK/JA)*
Rasio Kewajiban atas Ekuitas (JK/EK)	%	12,77	13,69	(6,69)	*Debt to Equity Ratio (JK/EK)*
Rasio Kewajiban Jangka Panjang atas Ekuitas (KJP/EK)	%	3,55	2,89	22,91	*Long-Term Debt to to Equity (KJP/EK)*
III. Rasio Aktivitas					***III. Activity Ratios***
Rasio Perputaran Persediaan (SD/JPU)	kali / times	0,11	0,11	(1,30)	*Inventory Turnover Ratio (SD/JPU)*
Rasio Perputaran Aset (TP/CE)	%	70,94	69,81	1,62	*Assets Turnover Ratio (TP/CE)*
Rasio Penagihan Rata2 (PU/JPU)x365	hari / days	17	23	(27,50)	*Average Collectible Ratio (PU/JPU)x365*
IV. Rasio Profitabilitas					***IV. Profitability Ratios***
Imbalan terhadap Ekuitas (LRB1/MS)	%	4,41	4,12	7,07	*Return on Equity (LRB1/MS)*
Imbalan terhadap Investasi (EBIT + PA) / CE	%	10,82	6,61	63,67	*Return on Investment (EBIT + PA) / CE*
Marjin Laba Kotor atas Penjl. (LK / JPU)	%	16,90	18,84	-10,28	*Gross Profit Margin on Sales (LK / JPU)*

Marjin Laba Bersih atas Penjl. (LRB / TP)	%	6,14	5,74	7,04	*Net Profit Margin on Sales (LRB / TP)*
Rasio EBITDA atas Aset	%	10,82	6,61	63,67	*EBITDA on Assets Ratio*

41. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

41. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE *(continued)*

Rasio Likuiditas

Rasio Likuiditas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban jangka pendeknya.

Perusahaan dalam posisi likuiditas mengalami peningkatan pada tahun 2017 dibandingkan tahun 2016, hal ini tercermin dari peningkatan rasio lancar semula 430,80% menjadi 525,60%; rasio cepat dari 196,27% menjadi 293,37%; dan rasio kas dari 150,05% menjadi 254,45%.

Peningkatan rasio likuiditas dipengaruhi oleh:

a. Peningkatan kas dan setara kas sebesar 51,17% dari semula R885.614.536.588 menjadi Rp1.338.781.110.919.

b. Penurunan liabilitas jangka pendek sebesar 10,85% dari semula Rp590.203.446.366 menjadi Rp526.145.732.124.

Liquidity Ratio

Liquidity ratios *are measurement to calculate the company's ability to meet its short term liabilities.*

The Company's liquidity position increased by 2017 compared to 2016, the current ratio decreased from 430,80% to 525,60%; quick ratio from 196,27% to 293,37%; and cash ratio from 150,05% to 254,45%.

Increased liquidity ratios are influenced by:

a. The increase in cash and cash equivalents amounted to 51.17% from the original R88..614.536.588 to Rp1.338.781.110,919.

b. The decrease of short-term liabilities amounted to 10.85% from Rp590.203.446.366 to Rp526.145.732.124.

Rasio Leverage

Rasio leverage adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat kemampuan perusahaan dalam memenuhi segala kewajibannya apabila saat ini perusahaan dilikuidasi.

Tingkat kemampuan PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) tahun 2017 dalam memenuhi seluruh kewajiban apabila dilakukan likuidasi pada saat ini mengalami penurunan dibanding dengan capaian tahun 2016, hal ini tercermin dari penurunan rasio total liabilitas terhdap total aset dari 12,04% menjadi11,32%, rasio total liabilitas terhadap ekuitas dari 13,69% menjadi 12,77% dan meskipun rasio liabilitas jangka panjang terhadap ekuitas mengalami peningkatan dari 2,89% menjadi 3,55%. Hal ini dipengaruhi peningkatan total liabilitas jangka panjang 28,31% lebih besar dari peningkatan total ekuitas 4,39% dan total aset 3,55%.

Leverage Ratio

Leverage ratios *are a measurement to calculate the company's ability to meet all current liabilities if the company liquidated.*

The capability of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) in 2017 to fulfill all obligations if liquidated at this time has decreased compared to the achievement in 2016, this is reflected by the decrease of total liabilities ratio to total assets from 12.04% to 11.32% the ratio of total liabilities to equity from 13.69% to 12.77% and although the ratio of long-term liabilities to equity increased from 2.89% to 3.55%. This is influenced by the increase in total long-term liabilities 28.31% greater than the increase in total equity 4.39% and total assets of 3.55%.

Rasio Aktivitas

Rasio aktivitas adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan semua sumber daya yang ada pada

Activity Ratio

Activity ratio *are a measure used to calculate the effectiveness of the company in utilizing all available resources in its control.*

pengendaliannya.

41. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

Rasio Aktivitas (lanjutan)

Dibandingkan dengan tahun 2016, tingkat efektivitas perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya relatif mengalami peningkatan, hal ini tercermin dari rasio perputaran aset dari 69,81% menjadi 70,94% dan rasio penagihan rata-rata piutang dari 23 hari menjadi 17 hari, meskipun rasio perputaran persediaan stabil.

Peningkatan rasio aktivitas dipengaruhi oleh:

a. Peningkatan total pendapatan 4,07% dari Rp4.332.094.451.279 menjadi Rp4.508.548.437.950 sedangkan total pendapatan usaha meningkat 3,54% dari semula Rp4.244.615.040.038 menjadi Rp4.394.844.692.160.

b. Peningkatan *capital employee* 2,42% dari Rp6.205.459.305.098 menjadi 6.355.469.732.331.

c. Penurunan piutang usaha sebesar 24,93% dari Rp272.795.406.111 menjadi Rp204.786.564.118.

Rasio Profitabilitas

Rasio Profitabilitas atau rasio kemampulabaan perusahaan adalah ukuran yang dipergunakan untuk menghitung hasil akhir bersih dari berbagai kebijakan dan keputusan manajemen yang akan memberikan jawaban akhir tentang efektivitas manajemen dalam mengelola perusahaan.

Pada tahun 2017, tingkat efektivitas penggunaan sumber daya secara umum mengalami peningkatan, hal ini terlihat dari hasil imbalan *(return)* terhadap ekuitas meningkat dari 4,12% menjadi 4,41%, rasio imbalan terhadap investasi meningkat dari 6,61% menjadi 10,82%, margin laba bersih meningkat dari 5,74% menjadi 6,14%, dan rasio EBITDA terhadap aset meningkat dari 6,61% menjadi 10,82%, sedangkan margin laba kotor mengalami penurunan dari 18,84% menjadi 16,90%

Peningkatan efektivitas penggunaan sumber daya dipengaruhi oleh:

a. Peningkatan capital employee 2,42% dari Rp6.205.459.305.098 menjadi Rp6.355.469.732.331.

41. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE *(continued)*

Activity Ratio *(continued)*

Compared to the year 2016, the level of effectiveness of the company in utilizing the relative resources increased, this is reflected in the asset turnover ratio from 69.81% to 70.94% and the average collection of accounts receivable from 23 days to 17 days, although the rotation ratio inventory stable.

Increased activity ratio is affected by:

a The total revenue increase of 4.07% from Rp4.332.094.451.279 to Rp4.508.548.437.950, while total operating income increased 3.54% from Rp4,244.615.040.038 to Rp4.394.844.692.160.

b. Increase in capital employee by 2.42% from Rp6.205.459.305.098 to 6.355.469.732.331.

c. The decrease of trade receivables amounted to 24.93% from Rp272.795.406.111 to Rp204.786.564.118.

Profitability Ratio

Profitability ratios *or the ratio is a measure of corporate kemampulabaan used to calculate the net outcome of various policy and management decisions that will provide a final answer about the effectiveness of management in managing the company.*

In 2017, the level of effectiveness of the use of resources in general has increased, as seen from the return on equity increased from 4.12% to 4.41%, the ratio of return on investment increased from 6.61% to 10, 82%, net profit margin increased from 5.74% to 6.14%, and the EBITDA to asset ratio increased from 6.61% to 10.82%, while the gross profit margin decreased from 18.84% to 16.90%

Increased effectiveness of resource use is influenced by:

a. Increased capital employed 2.42% from Rp6,205.459.305.098 to Rp6.355.469.732.331.

b. Peningkatan laba tahun berjalan 11,40% dari Rp248.546.646.837 menjadi Rp276.881.493.533.

41. CAPAIAN KINERJA PERUSAHAAN (lanjutan)

Rasio Profitabilitas

c. Peningkatan EBITDA 69,48% dari Rp410.780.842.218 menjadi Rp696.19.422.153.

42. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA

Z-score model dikembangkan dari kombinasi beberapa formula analisis rasio keuangan untuk perusahaan yang belum go-public oleh Edwards Altman dengan formula sebagai berikut:

b. Increase in current profit 11.40% from Rp248.546.646.837 to Rp276.881.493.533.

41. ACHIEVEMENT OF CORPORATE PERFORMANCE *(continued)*

Profitability Ratio

c. EBITDA increase of 69.48% from Rp410.780.842.218 to Rp696.19.422.153.

42. REVIEW OF THE GOING CONCERN

Z-score model was developed from a combination of some formula of financial ratio analysis for companies that go public yet by Edwards Airman with the formula as follows:

$$\textit{Z - Score} = \frac{6{,}56 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak/}\textit{Earning Before Tax \& Interest}}{\text{Jumlah aset/}\textit{Total Assets}} + \frac{3{,}26 \times \text{Akm.Saldo Laba/}\textit{Retained Earning}}{\text{Jumlah aset/}\textit{Total Assets}}$$

$$+ \frac{1{,}05 \times \text{Laba Sebelum Bunga \& Pajak/}\textit{Earning Before Tax \& Interest}}{\text{Jumlah Kewajiban/}\textit{Total Liabilities}} + \frac{6{,}72 \times \text{Nilai Buku Ekuitas/}\textit{Equity}}{\text{Jumlah Kewajiban/}\textit{Total Liabilities}}$$

	31 Desember/ *December 2017*	31 Desember/ *December 2016*	
Laba Sebelum Bunga dan Pajak	319.682.126.588	310.494.974.882	*Profit before Interest and tax*
Laba Sebelum Pajak	357.326.915.503	316.994.627.487	*Profit before tax*
Dikurangi: Pendapatan Bunga	(44.703.924.402)	(31.837.886.686)	*Reduced: Interest Income*
Ditambah: Beban Bunga	7.059.135.487	25.338.234.081	*Additional: Interest Expense*
Jumlah Aset	6.432.064.197.753	6.211.642.219.056	*Total Assets*
Akm. Saldo Laba	(2.250.844.492.727)	(2.278.860.622.616)	*Retained Earning*
Saldo Ekuitas	5.703.647.932.972	5.463.794.501.343	*Total Equity*
Jumlah Liabilitas	728.416.264.781	747.847.717.713	*Total Liabilities*

Catatan:
- Jika hasilnya, Z < 1,23 mengindikasikan prediksi pailit.
- Jika hasilnya, 1,23 < Z < 2,90 mengindikasikan gray area.
- Jika hasilnya, Z > 2,90 mengindikasikan tidak pailit.

Perhitungan Z-score tahun 2017 sebagai berikut:

Notes:
- *If result Z <1.23 indicates prediction of bankruptcy.*
- *If result 1.23 < Z <2.90 indicates gray area.*
- *If result Z <2.90 indicates no bankruptcy.*

The calculate of Z-Score in 2017, consist of:

$$\textit{Z - Score} = \frac{6{,}56 \times 319.682.126.588}{6.432.064.197.753} + \frac{3{,}26 \times (2.250.844.492.727)}{6.432.064.197.753}$$

$$+ \frac{1{,}05 \times 319.682.126.588}{728.416.264.781} + \frac{6{,}72 \times 5.703.647.932.972}{728.416.264.781}$$

$$= \frac{2.097.114.750.416}{6.432.064.197.753} + \frac{-7.337.753.046.289}{6.432.064.197.753}$$

$$+ \frac{335.666.232.917}{728.416.264.781} + \frac{38.328.514.109.574}{728.416.264.781}$$

42. KAJIAN ATAS KELANGSUNGAN USAHA (lanjutan)

Perhitungan Z-score tahun 2017 sebagai berikut:

$$= 0,33 + (1,14) + 0,46 + 52,62$$

$$= \underline{\mathbf{52,27}}$$

42. REVIEW OF THE GOING CONCERN *(continued)*

The calculate of Z-Score in 2017, consist of:

Perhitungan Z-score tahun 2016 sebagai berikut:

The calculate of Z-Score in 2016, consist of:

$$\textit{Z - Score} = \frac{6,56 \times 310.494.974.882}{6.211.642.219.056} + \frac{3,26 \times (2.278.860.622.616)}{6.211.642.219.056}$$

$$+ \frac{1,05 \times 310.494.974.882}{747.847.717.713} + \frac{6,72 \times 5.463.794.501.343}{747.847.717.713}$$

$$= \frac{2.036.847.035.225}{6.211.642.219.056} + \frac{-7.429.085.629.728}{6.211.642.219.056}$$

$$+ \frac{326.019.723.626}{747.847.717.713} + \frac{36.716.699.049.023}{747.847.717.713}$$

$$= 0,33 + (1,20) + 0,44 + 49,10$$

$$= \underline{\mathbf{48,66}}$$

Z - Score	
2017	**2016**
52,27	**48,66**

Berdasarkan hasil perhitungan *Z-score model* tahun 2017 diperoleh score 52,27 sedangkan score tahun 2016 sebesar 48,66 sehingga mengindikasikan sangat jauh diatas batas 'tidak pailit' atau diartikan bahwa, dalam menjalankan aktivitasnya, perusahaan dan entitas anaknya **sangat mampu menjaga kelangsungan usahanya**.

Based on the results of Z-score calculation model year 2017 obtained score 52.27 while the score of 2016 of 48.66 so indicating very far above the limit 'not bankrupt' or meant that, in carrying out its activities, the company and its subsidiaries are very capable of maintaining continuity of business.

43. KONTINJENSI

Mendasar pada hasil pemeriksaan perhitungan dana penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik (KPP) PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) Tahun Anggaran 2017 oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia dan berdasarkan bukti pendukung serta perhitungan manajemen, terdapat beberapa beban yang dikoreksi dan akan menjadi beban pada tahun berikutnya dengan nilai total sebesar Rp17.537.219.949, dengan rincian sebagai berikut:

43. CONTINGENCY

Based on the results of the examination of the calculation of the fund of Public Service Obligation (PSO) of PT Pelayaran Nasional Indonesia (Persero) of Fiscal Year 2017 by the Supreme Audit Board of the Republic of Indonesia and based on supporting evidence and management calculation, there are some corrected expenses and will be the burden in the next year with total value of Rp17.537.219.949, with details as follows:

43. KONTINJENSI (lanjutan)

a. Bahan Bakar Minyak

Berdasarkan perhitungan manajemen terhadap sisa bahan bakar minyak bulan Desember 2017 mendasar pada realisasi voyage bulan Desember 2017, manajemen mengkoreksi terhadap sisa bahan bakar minyak sebanyak 2.049.152 liter atau senilai Rp10.098.778.747.

b. Pakaian Dinas

Manajemen mengkoreksi pengakuan beban pakaian dinas darat dan laut sebesar Rp5.725.996.247 karena belum didukung dengan berita acara serah terima pekerjaan.

c. Pendidikan Pegawai Program Managemen Traine

Manajemen mengkoreksi biaya sebesar Rp1.712.444.955 yang terjadi sehubungan dengan pelaksanaan pendidikan pegawai program Management Traine karena proses pendidikan tersebut berakhir pada bulan Mei 2018.

Dengan demikian, atas pos-pos biaya tersebut pada huruf a, b, dan c di atas akan menjadi beban pada periode tahun berikutnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku berkenaan dengan perolehan pendapatan dari *public service obligation (PSO)* .

Lihat Catatan 21 dan 31.

43. CONTINGENCY *(continued)*

a. Fuel

Based on the management's calculation of the remaining December 2017 oil fuel base on the realization of December 2017 voyage, the management corrects the remaining fuel oil of 2.049.152 liters or Rp10.098.778.747.

b. Custom

The management corrects the recognition of the burden of the land and sea clothing charges amounting to Rp5.725.996.247 because it has not been supported by the minutes of the handover of the

c. Training of Employee Management Trainee Program

Management corrected the fees amounting to Rp1.712.444.955 incurred in connection with the implementation of the Traine Management program employee education as the education process ended in May 2018.

Accordingly, the above cost items in letters a, b, and c will become expenses in the subsequent year period in accordance with the prevailing provisions concerning the acquisition of revenues from the public service obligation (PSO).

See Note 21 and 31.

44. PERKARA-PERKARA LITIGASI

a. Perkara Perdata Upaya Perlawanan "Derden Verzet" Menteri BUMN kepada Hasan Ismail, PT. PELNI (Persero), Perkara Nomor : 110/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Pst

Menteri BUMN selaku RUPS PT. PELNI (Persero) mengajukan perlawanan (Derden Verzet) terhadap penetapan Ketua PN Jakarta Pusat Nomor : 77/2012.Eks jo Nomor 168/Pdt.G/2008/PN.Jkt.Pst jo 537/Pdt/2009/PT.DKI jo 76K/Pdt/2011 jo 496PK/Pdt/2013. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

b. Perkara Perdata "Gugatan Pengosongan" oleh Sdr. Daeng Abdul Karim yang mengklaim sebagai ahli waris atas Tanah Kantor Cabang PT. PELNI (Persero) Makassar yang terletak di Jl. Sudirman 14/14A.

44. LITIGATION CASE

a. Civil Proceedings of "Derden Verzet" Resistance against Minister of SOEs to Hasan Ismail, PT. PELNI (Persero), Case Number 110/Pdt.Plw/2015/PN.Jkt.Pst

Minister of SOEs as the AGM of PT. PELNI (Persero) filed a resistance (Derden Verzet) against the determination of Chairman of Central Jakarta District Court Number: 77 / 2012.Ex jo Number 168 / Pdt.G / 2008/ PN.Jkt.Pst jo 537 / Pdt / 2009 / PT.DKI jo 76K / Pdt / 2011 jo 496 PK / Pdt / 2013. The final position of the case up to the publication of this report, Appeal at the High Court of DKI Jakarta.

b. The Civil Lawsuit "Lifting Law" By Br. Daeng Abdul Karim who claimed to be the heir of the Land Branch Office of PT. PELNI (Persero) Makassar which is located on Jl. Sudirman 14 / 14A.Case Number:

Perkara Nomor : 324/Pdt.G/2013/PN.Mks.

324/Pdt.G/2013/PN.Mks

44. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

44. LITIGATION CASE *(continued)*

Sdr. Daeng Abdul Karim mengklaim sebagai ahli waris tanah milik PT. PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Sudirman No. 14/14A sebagaimana Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor : 259/ Mangkura Makassar Sulawesi Selatan. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Banding pada tingkat Pengadilan Tinggi Sulawesi Selatan.

Mr. Daeng Abdul Karim claims to be the heir of land owned by PT. PELNI (Persero) located on Jl. Sudirman No. 14 / 14A as Building Rights Certificate Number: 259 / Mangkura Makassar South Sulawesi.The final position of the case up to the publication of this report, Appeal at the High Court of South Sulawesi.

c. Perkara Perdata "Gugatan Perbuatan Melawan Hukum" oleh PT. Semarang Baru Indah Sejahtera kepada PT. PELNI (Persero). Putusan Pengadilan Negeri Semarang Nomor : 207/Pdt.G/2015/PN.Smg, Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah No : 120/Pdt/2016/PT.Smg.

PT. Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan Gugatan "Perbuatan Melawan Hukum" kepada PT. PELNI (Persero) atas Aset tanah dan bangunan sesuai alas Hak SHGB No 475/1983 a.n PT PELNI (Persero). Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, PT. Semarang Baru Indah Sejahtera mengajukan Kasasi atas Putusan PN Semarang dan PT Jawa Tengah Kasasi di Mahkamah Agung.

c. Civil Lawsuit "Lawsuit of Action Against the Law" by PT. Semarang Baru Indah Sejahtera to PT. PELNI (Persero).Semarang State Court Verdict No. 207/Pdt.G/2015/ PN.Smg, Central Java High Court Verdict No. : 120/ Pdt/2016/PT.Smg.

PT. Semarang Baru Indah Sejahtera filed a lawsuit "Action Against the Law" to PT. PELNI (Persero) on Land and building assets in accordance with the rights of SHGB No 475/1983 a.n PT PELNI (Persero). The final position of the case up to the publication of this report, Appeal at the High Court of South Sulawesi..PT. Semarang Baru Indah Sejahtera filed an appeal on the verdict of PN Semarang and PT Jawa Tengah, Cassation in the Supreme Court.

d. Perkara Perdata "Perbuatan Melawan Hukum" Oleh Agustine Ria Dewi (ahli waris penghuni) terhadap PT.PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor : 229/Pdt.G/2014/PN.Sby, Putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 272/Pdt/2015/PT.Sby.

Agustine Ria Dewi selaku Ahli Waris Penghuni melakukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum kepada PT. PELNI (Persero) atas Aset milik PT. PELNI (Persero) yang terletak di Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Agustine Ria Dewi mengajukan Kasasi atas Putusan PN Surabaya dan PT Jawa Timur, serta Kasasi di Mahkamah Agung.

e. Civil Law "Action Against the Law" By Agustine Ria Dewi (heir of the inhabitants) against PT.PELNI (Persero) located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya. Surabaya State Court Verdict 229/Pdt.G/2014/PN.Sby Surabaya High Court Verdict: 272/Pdt/2015/ PT.Sby.

Agustine Ria Dewi as the Heir of the Inhabitant to Commit a Action against the Law to PT. PELNI (Persero) on assets owned by PT. PELNI (Persero) located on Jl. Jambi No. 61 Surabaya. The final position of the case up to the publication of this report, Agustine Ria Dewi filed an appeal on the Decision of PN Surabaya and PT East Java and Cassation in the Supreme Court

e. Perkara Pidana "Dugaan Tindak Pidana menyuruh menempatkan keterangan palsu dan atau pemalsuan surat atau akta otentik". Tanda Bukti Lapor Nomor : TBL/436/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum.

PT. PELNI (Persero) melaporkan dugaan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 266 KUHP dan atau 263 KUHP dan atau 264 KUHP. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini,

e. Criminal Case "Alleged Crime ordered put false information and or falsification of letters or authentic acts".Report Registry No.: TBL/436/II/2015/PMJ/Dit.Reskrimum

PT. PELNI (Persero) reported the alleged criminal act as regulated in Article 266 of the Criminal Code and or 263 of the Criminal Code and or 264 of the Criminal Code.The final position of the case up to the

Proses Penyidikan.

publication of this report, Investigation Process.

44. PERKARA-PERKARA LITIGASI (lanjutan)

f. PKPU PT Rolika Caterindo. Putusan PN Niaga Nomor : 17/Pdt.Sus/PKPU/2016/PN Niaga Jkt Pst.

PT Rolika Caterindo merupakan mitra PT.PELNI (Persero) yang memiliki utang macet, dan dalam perkembangannya digugat oleh BNI Syariah selaku Kreditur. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Putusan Pengadilan Negeri Jak-Pus Nomor : 17/Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

g. Pemberhentian Tenaga Harian Lepas di PELNI Cabang Ambon. Perkara Hubungan Industrial di PN Nomor 10/Pdt.SUS-PHI/2016/PN.Amb.

Tenaga Harian Lepas di berhentikan oleh Kepala Cabang, dan dalam perkembangannya melakukan upaya gugatan di PN Ambon. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 10/Pdt-sus.PHI/2016/ PN.Ambon.

h. Perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum oleh Star Power Bussines Pte ltd. Perkara di PN Nomor : 378/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.

PELNI melakukan pengadaan barang spare part kapal melalui proses lelang, dimana salah satu peserta melakukan gugatan. Posisi terakhir perkara sampai dengan terbitnya laporan ini, Menunggu Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

44. LITIGATION CASE *(continued)*

f. PKPU PT Rolika Caterindo. Commercial State Court Verdict No: 17/Pdt.Sus/PKPU/2016/PNNiaga Jkt Pst.

PT Rolika Caterindo is a partner of PT.PELNI (Persero) which has bad debts, and in its development sued by BNI Syariah as Creditor.The final position of the case up to the publication of this report, Central Jakarta State Court Verdict No.: 17/ Pdt.Sus-PKPU/2016/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Freelance Daily Worker. Industrial Dispute Case at PN No 10/Pdt.SUSPHI/2016/PN.AmbTermination at PELNI Cabang Ambon.

PELNI owns Assets with SHGB No: 7 /Lirung, Sangihe Talaud, Currently sued by claiming party as the heir. The final position of the case up to the publication of this report, Tahuna State Court Verdict No 57/PDT.G/2-16/PN.THN.

Action Against the Law Case by Star Power Bussines Pte ltd. Case at PN No. :378/Pdt.G/2016/PN.Jkt Pst.

PELNI conducted he procurement of spare parts of vessels through auction process, in which one of the participants filed suit. The final position of the case up to the publication of this report, Awaiting Verdict of Central Jakarta District Court.

45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL LAPORAN POSISI KEUANGAN

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia Nomor : SK-48/MBU/02/2018, tanggal 19 Februari 2018, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia, memutuskan:

a. Memberhentikan dengan hormat Saudara Leon Muhammad sebagai Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor : SK-232/MBU/11/2015 tanggal 16 Nopember 2015.

b. Mengangkat Saudara Bambang Prihartono sebagai

45. SUBSEQUENT EVENTS

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia as the General Meeting of Shareholders of the Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia Number SK-48 / MBU / 02/2018 dated 19 February 2018 regarding Termination and Appointment of President Commissioner of Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia, decides:

a. Honorably dismissed Mr. Leon Muhammad as President Commissioner of the Limited Liability Company of the PT Pelayaran Nasional Indonesia appointed based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-232 / MBU / 11/2015 dated 16 November 2015.

b. Appoint Mr. Bambang Prihartono as President

Komisaris Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Pelayaran Nasional Indonesia.

Commissioner of the Limited Liability Company of PT Pelayaran Nasional Indonesia.

46. TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN KEUANGAN

Manajemen Perusahaan bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian dan telah menyetujui laporan keuangan konsolidasian untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2017 untuk diterbitkan pada 15 Maret 2018.

46. RESPONSIBILITY FOR FINANCIAL STATEMENTS

The Company's management is responsible for the preparation of consolidated financial statements and has approved the consolidated financial statements for the year ended December 31, 2017 to be published on March 15, 2018.

INFORMASI TAMBAHAN/
ADDITIONAL INFORMATION

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan
1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) - PARENT ONLY
As of December 31, 2017
(With Comparative as of December 31, 2016 and
January 1, 2016/December 31, 2015 - Restated)
(In Fully Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/*Notes*	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*)*	1 Jan 2016/ 31 Des. 2015/ *Dec. 31, 2015*)*	
ASET					***ASSETS***
Aset Lancar					***Current Assets***
Kas dan Setara Kas	4f; 4g; 4i; 6	1.212.866.533.901	787.943.514.532	644.904.278.771	*Cash and Cash Equivalent*
Piutang Usaha	4h; 4i; 4j; 7	132.335.265.231	231.570.047.706	122.325.675.418	*Accounts Receivables*
(Setelah dikurangi provisi penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan 1 Januari 2016/31 Desember 2015 masing-masing sebesar Rp2.022.898.695, Rp9.282.853.975 dan Rp7.075.367.277)					*(Net of provision for impairment at December 31, 2017 and 2016 and January 1, 2016/ December 31, 2015 respectively Rp2.022.898.695, Rp9.282.853.975 and Rp7.075.367.277)*
Aset Keuangan Lancar Lainnya	4i; 8	541.264.278.129	768.213.597.000	408.264.497.385	*Other Receivables*
Persediaan	4k; 9	459.274.548.331	453.345.558.806	567.419.751.697	*Inventories*
Pajak Dibayar Dimuka	4w; 10a	15.307.135.538	8.326.116.061	3.658.592.426	*Prepaid Taxes*
Uang Muka	4i; 4l; 11	35.082.808.811	21.752.032.951	58.169.121.769	*Advances Payment*
Biaya Dibayar Dimuka	4i; 4l; 12	15.954.686.236	13.111.611.145	15.679.934.290	*Prepaid Expenses*
Akun Antar Entitas dalam 1 Grup Pelni	4i; 4l; 13	50.365.164.256	54.308.052.767	54.385.026.594	*Inter-Entity Account in 1 PELNI Group*
Jumlah Aset Lancar		**2.462.450.420.434**	**2.338.570.530.968**	**1.874.806.878.350**	***Total Current Assets***
Aset Tidak Lancar					***Non - Current Assets***
Investasi Pada Entitas Asosiasi	4i; 13	451.258.424.014	337.286.700.336	239.204.819.020	*Investments in Associated Entities*
Properti Investasi	4o; 4s; 14	22.088.283.770	22.981.274.640	23.963.122.175	*Invesment Properties*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017, 2016 dan 1 Januari 2016/Desember, 31 2015 masing-masing sebesar: Rp21.982.967.567 Rp20.960.976.697 dan Rp19.794.417.172)					*(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2017, 2016 and January 1st 2016/31 December 2015 respectively for: Rp21.982.967.567, Rp20.960.976.697 and Rp19.794.417.172)*
Aset Tetap					*Fixed Assets*
Alat Produksi	4p; 4q; 4s: 15	3.205.175.256.051	3.228.703.512.764	3.431.348.997.604	*Production Tools*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 masing-masing sebesar: Rp4.859.148.638.141, Rp4.553.569.324 dan Rp4.306.444.242.712)					*(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2017, and 2016, and January 1st 2016/ December,31 2015 respectively: Rp4.859.148.638.141, Rp4.553.569.324 and Rp4.306.444.242.712)*
Aset Tetap	4p; 4q; 4s: 16	116.513.627.554	129.215.638.842	132.647.023.271	*Fixed Assets*
(Setelah dikurangi akumulasi penyusutan dan penurunan nilai tanggal 31 Desember 2017 dan 2016, dan 1 Januari 2016/ 31 Desember 2015 masing-masing sebesar: Rp191.926.489.398, Rp199.302.331.526 dan Rp210.232.435.514)					*(Net of accumulated depreciation and impairment at December 31, 2017, and 2016, and January 1st 2016/ December,31 2015 respectively: Rp191.926.489.398, Rp199.302.331.526 and Rp210.232.435.514)*
Aset Tidak Berwujud	4r; 4s; 17	16.653.166.723	4.166.667.144	3.000.546.609	*Intangible Assets*
Aset Tidak Lancar Lainnya	4r; 4s; 18	47.946.320	10.663.122.609	1.793.029.918	*Other Non Current Assets*
Aset Pajak Tangguhan	4u; 10d	38.238.970.693	32.812.034.981	20.579.574.712	*Deferred Tax Assets*
Jumlah Aset Tidak Lancar		**3.849.975.675.125**	**3.765.828.951.316**	**3.852.537.113.309**	***Total Non Current Assets***
TOTAL ASET		**6.312.426.095.559**	**6.104.399.482.284**	**5.727.343.991.659**	***TOTAL ASSETS***

**) Disajikan kembali lihat catatan 38*

**) As Restate see note 38*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

1

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN POSISI KEUANGAN (NERACA) - INDUK SAJA
Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan Tanggal 31 Desember 2016 dan
1 Januari 2016/31 Desember 2015 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF FINANCIAL POSITION (BALANCE SHEETS) - PARENT ONLY
As of December 31, 2017
(With Comparative as of December 31, 2016 and
January 1, 2016/December 31, 2015 - Restated)
(In Fully Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	Catatan/*Notes*	31 Desember 2017/ *December 31, 2017*	31 Desember 2016/ *December 31, 2016*)*	1 Jan 2016/ 31 Des. 2015/ *Dec. 31, 2015*)*	
LIABILITAS DAN EKUITAS					***LIABILITIES AND EQUITY***
Liabilitas Jangka Pendek					***Short-term Liabilities***
Utang Usaha	4i; 4j; 19	152.480.454.118	125.302.981.925	134.636.958.380	*Accounts Payable*
Beban Akrual	4i; 20	158.854.933.432	260.361.024.818	100.599.129.620	*Accrued Expenses*
Utang pajak	4i; 4w; 10b	40.906.923.594	27.113.553.259	25.405.639.123	*Tax Payable*
Liabilitas Keuangan Jangka Pendek Lainnya	22	48.366.878.148	70.500.915.190	84.024.503.560	*Other Short Term Financial Assets*
Bagian Lancar atas Liabilitas Jangka Panjang	23	5.440.380.353	5.440.380.353	230.529.761.809	*Cureent Portion of Long term Liabilities*
Pendapatan Diterima Dimuka/ Deposit/Uang Jaminan	21	40.303.614.329	36.365.263.036	47.645.002.424	*Curretn Portion of Perpaid Income/ Deposit/Deposit Guarantee*
Jumlah Liabilitas Jangka Pendek		**446.353.183.974**	**525.084.118.580**	**622.840.994.916**	***Total Short Term Liabilities***
Liabilitas Jangka Panjang					***Long-Term Liabilities***
Utang Non Usaha Jangka Panjang	4i; 4j; 23	37.687.297.741	43.523.055.567	331.914.541.025	*Long-Term Non Operating Payables*
Utang Bank dan Lembaga Keuangan Jangka Panjang		-	-	57.892.540.153	*Long-Term Finacial Institution and Bank Loan*
Liabilitas Imbalan Paska Kerja Jangka Panjang	4i; 4u; 4y; 24	125.404.248.861	71.947.877.294	28.073.631.066	*Long Term Employee Benefits*
Jumlah		**163.091.546.602**	**115.470.932.861**	**417.880.712.244**	***Total***
Jumlah Liabilitas		**609.444.730.576**	**640.555.051.441**	**1.040.721.707.160**	***Total Liabilities***
Ekuitas					***Equity***
Modal Saham (Modal dasar sebanyak 13.000.000 saham, ditempatkan dan disetor penuh 7.065.092 saham dengan nilai nominal Rp 1.000.000 per saham)	1.1.4; 25	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	7.065.092.000.000	*Capital Stock (As much as 13,000,000 shares Authorized, issued and fully paid shares 7.065.092 with a nominal value of Rp 1.000.000 per share)*
Penyertaan Modal Pemerintah	29	564.951.174.642	564.951.174.642	143.585.642	*Government Equity*
Cadangan	1.1.4; 26	412.593.309.419	164.190.404.981	66.533.679.319	*Reserves*
Saldo Laba (Rugi)	27	(2.250.844.492.728)	(2.277.574.901.722)	(2.427.334.648.925)	*Retained Earnings*
Komponen Ekuitas Lainnya	4y; 28	(88.810.626.351)	(52.814.247.058)	(17.812.331.538)	*Other Component Equity*
Jumlah Ekuitas		**5.702.981.364.982**	**5.463.844.430.844**	**4.686.622.284.498**	***Total Equity***
TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS		**6.312.426.095.558**	**6.104.399.482.284**	**5.727.343.991.658**	***TOTAL EQUITY AND LIABILITIES***

**) Disajikan kembali lihat catatan 38*

**) As Restate see note 38*

Catatan atas laporan keuangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

2

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN LABA RUGI KOMPREHENSIF - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal 31 Desember 2016 - Disajikan Kembali)
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF COMPREHENSIVE INCOME - PARENT ONLY
For The Year Ended December 31, 2017
(With Comparative for the Year Ended
December 31, 2016 - Restated)
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	2017	Catatan/ *Notes*	2016 *)	
Pendapatan Usaha	3.733.250.039.396	4q; 30	3.648.947.655.181	*Operating Revenues*
Reduksi Pendapatan Usaha	(20.846.904.014)	4q; 30	(10.648.231.000)	*Reduction in Operating Revenues*
Pendapatan Usaha Bersih	**3.712.403.135.382**		**3.638.299.424.181**	***Net Operating Revenues***
Beban Pokok Usaha	(3.284.710.494.886)	4q; 31	(3.119.895.952.064)	*Operating Expenses*
Laba Kotor	**427.692.640.496**		**518.403.472.117**	***Gross Profit***
Beban Pemasaran dan Distribusi	(21.902.907.842)	4q; 32	(12.164.081.847)	*Distribution and Marketing Expenses*
Beban Umum dan Administrasi	(286.686.613.203)	4q; 33	(365.843.491.142)	*General and Administrative Expenses*
Laba Usaha	**119.103.119.451**		**140.395.899.128**	***Operating Profit***
Pendapatan (Beban Non Usaha)	198.891.820.306	4q; 34	144.410.950.012	*Financial Expenses*
Laba Sebelum Pajak	**317.994.939.757**		**284.806.849.140**	***Profit Before Tax***
Penghasilan (Beban) Pajak				***Benefit (Expense) Income Tax***
Kini	(47.052.182.560)	4u; 10c	(48.636.404.971)	*Current Tax*
Tangguhan	5.476.277.129	4u; 10d	12.232.460.269	*Deferred Tax*
	(41.575.905.431)		**(36.403.944.702)**	
Laba Tahun Berjalan	**276.419.034.326**		**248.402.904.438**	***Current Year Profit***
Penghasilan Komprehensif Lain				***Other Comprehensive Income***
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi				*Items That Will Not Be Reclassified Subsequently To Profit Or Loss*
- Pengukuran kembali atas Program imbalan pasti	(35.996.379.293)	4t	(35.001.915.520)	*Remeasurement, On Defined Benefit Plan* -
Penghasilan komprehensif lain tahun berjalan setelah pajak	(35.996.379.293)		(35.001.915.520)	*Other Comprehensive Income For The Year After Tax*
Total Laba Komprehensif Tahun Berjalan	**240.422.655.033**		**213.400.988.918**	***Total Comprehensive Profit Current Year***
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Profit Current Year Attributable to:***
Pemilik entitas induk			-	*Owner of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali			-	*Non-Controlling Interest*
	276.419.034.326		**248.402.904.438**	
Jumlah Laba Komprehensif yang Dapat Diatribusikan Kepada:				***Total Comprehensive Profit Attributable to:***
Pemilik entitas induk	240.422.655.033	4d; 4i	213.400.988.918	*Owner of Parent Entity*
Kepentingan Nonpengendali	-		-	*Non-Controlling Interest*
	240.422.655.033		**213.400.988.918**	
Laba Bersih Per Saham Dasar	**34.029,66**	4w	**30.204,98**	***Basic Earnings Per Share***

*) Disajikan kembali, lihat Catatan
**) Disajikan kembali lihat catatan 38*

**) Restated, see Note*
**) As Restate see note 38*

3

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2017
(Dengan Perbandingan untuk Tahun yang Berakhir pada Tanggal 31 Desember 2016)
(Dalam Rupiah Penuh, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENTS OF CHANGES IN EQUITY - PARENT ONLY
For The Years Ended December 31, 2017
(With Comparative for the Year Ended December 31, 2016)
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh/ *Issued and Fully Paid Capital Stock*	Penyertaan Modal Pemerintah/ *Government Equity Participation*	Dicadangkan/ *Appropriated*	Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings (Deficit)*	Komponen Ekuitas Lainnya/ *Other Equity Components*	Jumah Ekuitas/ *Total Equity*
Saldo per 1 Januari 2015/	**6.565.092.000.000**	**143.585.642**	**55.530.479.000**	**(2.514.750.050.733)**	**-**	**4.106.016.013.909**
Balance of Januari 1, 2015						
Laba Tahun Berjalan / *Current Year Profit*	-	-	-	98.643.157.235	-	98.643.157.235
Cadangan Umum / General Reserves (Sesuai Surat Kemenetrian BUMN/ Letters correspond Ministry of SOEs No. S-05/D4.MBU/07/2015)	-	-	11.003.200.319	(11.003.200.319)	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / Goverment Capital (Sesuai Surat Kementerian BUMN /Letters correspond Ministry of SOEs No. S-27/MBU/01/2016)	500.000.000.000	-	-	-	-	500.000.000.000
Penyaluran Program PKBL / *PKBL Program Distribution*	-	-	-	(224.555.108)		(224.555.108)
Kerugian Aktuaria/*Actuarial Losess*	-	-	-	-	(17.812.331.538)	(17.812.331.538)
Saldo per 31 Desember 2015/ ***Balance of Desember 31, 2015***	**7.065.092.000.000**	**143.585.642**	**66.533.679.319**	**(2.427.334.648.925)**	**(17.812.331.538)**	**4.686.622.284.498**
Laba Tahun Berjalan / *Current Year Profit*	-		-	248.402.904.438	-	248.402.904.438
Cadangan/*Reserves*	-		98.643.157.235	(98.643.157.235)	-	-
Penyertaan Modal Pemerintah / *Government Equity Participation*	-	564.807.589.000		-	-	564.807.589.000
Penyaluran Program PKBL / *PKBL Program Distribution*	-		(986.431.573)	-	-	(986.431.573)
Kerugian Aktuaria/*Actuarial Losess*	-			-	(35.001.915.520)	(35.001.915.520)
Saldo per 31 Desember 2016/ ***Balance of Desember 31, 2016***	**7.065.092.000.000**	**564.951.174.642**	**164.190.404.981**	**(2.277.574.901.722)**	**(52.814.247.058)**	**5.463.844.430.844**
Laba Tahun Berjalan / *Current Year Profit*				276.419.034.326		276.419.034.326
Penyesuaian Saldo Rugi (Defisit)/ *Retained Earnings Adjustment*				(1.285.720.894)		(1.285.720.894)
Cadangan/*Reserve*	-		248.402.904.438	(248.402.904.438)	-	-
Kerugian Aktuaria/Actuarial Losess	-			-	(35.996.379.293)	(35.996.379.293)
Saldo per 31 Desember 2017/ ***Balance of Desember 31, 2017***	**7.065.092.000.000**	**564.951.174.642**	**412.593.309.419**	**(2.250.844.492.728)**	**(88.810.626.351)**	**5.702.981.364.983**

Catatan atas laporan keuangan terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

The accompanying notes to the financial statements form an integral part of these financial statements taken as a whole

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
LAPORAN ARUS KAS - INDUK SAJA
Untuk Tahun yang Berakhir pada
Tanggal-Tanggal 31 Desember 2017 dan 2016
(Dalam Rupiah, kecuali Dinyatakan Lain)

PT PELAYARAN NASIONAL INDONESIA (PERSERO)
STATEMENT OF CASH FLOWS - PARENT ONLY
For The Years Ended
December 31, 2017 and 2016
(In Rupiahs, Unless Otherwise Stated)

	2017	2016	
Arus Kas dari Aktivitas Operasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Penerimaan Kas Dari Pelanggan Dan Pihak Terkait	1.235.329.385.180	2.581.598.947.547	*Receipt from Customer*
Penerimaan Public Service Obligation	2.461.769.659.728	2.363.973.650.652	*Receipt from Public Service Obligation*
Pembayaran Kepada Pemasok	(2.962.992.938.351)	(2.681.396.889.982)	*Payment to Suppliers*
Penerimaan Kas Lain-Lain	43.502.628.691	10.266.195.639	*Cash Receipt Others*
Pembayaran Biaya Operasional	(384.127.303.312)	(268.031.292.291)	*Payment of Operating Expenses*
Pembayaran Biaya Overhead	(21.902.907.842)	(87.417.788.774)	*Payment of Overhead Expense*
Pengeluaran Kas Biaya Lain-Lain	(11.894.116.293)	(4.352.728.940)	*Receipt from Other Revenues*
Penempatan Jangka Pendek	-	(1.237.337.994.500)	*Short Term Placement*
Penerimaan Uang Jaminan Dari Pelanggan	3.938.351.294	145.636.450.150	*Receipt of Cash Collateral from Customer*
Pencairan Uang Jaminan	-	(1.611.483.524)	*Liquefaction of Cash Collateral*
Pembeliaan Persediaan	(5.928.989.525)	(107.472.275)	*Purchase of Supplies*
Penerimaan Bunga	41.647.721.097	32.573.114.156	*Interest Receipt*
Pembayaran Bunga Pinjaman	-	(22.453.160.764)	*Payment of Interest Loan*
Pembayaran Pajak	(56.960.225.351)	(96.386.516.111)	*Tax Payment*
	342.381.265.316	**734.953.030.983**	
Arus Kas dari Aktivitas Investasi			***Cash Flows from Operating Activities***
Hasil Penjualan Aktiva Tetap	11.818.181.818	2.336.589.063	*Sale of Fixed Assets*
Investasi Entitas Asosiasi	-	-	
Pembelian Aset Tetap	(213.937.876.776)	(1.670.949.285)	*Purchase of Fixed Assets*
Perolehan Aset Dalam Penyelesaian	(62.335.982.670)	(12.235.000)	*Construction in Progress*
Perolehan Aset Takberwujud	(13.361.666)	-	*Purchase of Other Assets*
Pembelian Aset Lain-Lain	(129.000.000)		
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi	**(264.598.039.294)**	**653.404.778**	***Net Cash Flows from Investment Activities***
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan			***Cash Flows from Financing Activities***
Penerimaan Pemerintah	-	-	*Receipt from Goverment*
Penerimaan Pinjaman Bank / Pihak Ketiga	-	-	*Receipt from Bank Loan / Third Parties*
Penerimaan (Pengeluaraan) Deviden	-	-	*Receipt (Issuence) Deviden*
Pembayaran Utang Bank	-	-	*Payment of Bank Loan*
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pendanaan	**-**	**-**	***Net Cash Flows from Financing Activities***
PENURUNAN BERSIH KAS DAN SETARA KAS	**77.783.226.022**	**735.606.435.761**	***NET INCREASE (DECREASE) IN CASH AND CASH EQUIVALENT***
Dampak Perubahan Selisih Kurs terhadap Kas dan Setara Kas			
KAS DAN SETARA KAS AWAL TAHUN	1.468.943.514.532	**733.337.078.771**	***BEGINNING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***
KAS DAN SETARA KAS AKHIR TAHUN	**1.546.726.740.554**	**1.468.943.514.532**	***ENDING BALANCE CASH AND CASH EQUIVALENT***

Halaman ini Sengaja Dikosongkan

This Page is Intentionally Left Blank

PT PELNI (PERSERO)
Jl. Gajah Mada No. 14, Jakarta Pusat, 10130
Telp: (021) 6334342
Fax: (021) 63854130
infopelni162@pelni.co.id
www.pelni.co.id